SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang baik, terarah, dan berkelanjutan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana kerja pemerintah daerah dan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, perlu upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 dan terintegrasi dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. program;
    b. kegiatan;
    c. sub kegiatan;
    d. lokasi;
    e. kelompok sasaran;
    f. indikator kinerja; dan
    g. pendanaan,
    sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN;
BAB II	:	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024;
BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
BAB V	:	PENUTUP.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 Juli 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 29 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025 NOMOR 31

RENJA

RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO



2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya, Penyusunan ***Rencana Kerja (Renja)*** Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dapat kami selesaikan. Penyusunan Renja dimaksudkan untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, sinergisitas program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah agar pelaksanaan pembangunan daerah konsisten dengan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Renja Tahun 2026 disusun berdasarkan skala prioritas dengan besaran anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah.

Demikian dokumen Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahun 2026

Wates, 29 Juli 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KULON PROGO

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. NUR WAHYUDI, M.M
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19690705 198903 1005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

BAB I. PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024..... 10

2.1 Hasil Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Renja Tahun 2024..... 10

2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 25

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 30

2.4 Riviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 33

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 50

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 52

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 52

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 53

3.3 Program dan Kegiatan 54

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 58

4.1 Rencana Kerja 58

4.2 Pendanaan Program dan Kegiatan 59

BAB V PENUTUP..... 113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Tahun 2024 11
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja..... 17
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 26
Tabel 2.4. Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olahraga..... 28
Tabel 2.5. Jumlah Cabang Olah Raga 28
Tabel 2.6. Perolehan Medali 29
Tabel 2.7. Prestasi Pemuda Kulon Progo 29
Tabel 2.8. Penyandingan Permasalahan/Isu Strategis dan Intervensi Program.. 30
Tabel 2.9. Hasil Riviu RancanganAwal RKPD Tahun 2026 34
Tabel 2.10 Daftar Usulan Program dan Kegiatan masyarakat 50
Tabel 3.11 Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Prioritas (Mutu SPM)..... 53
Tahun 2023-2026 55
Tabel 3.12 Indikator Kinerja Program Tahun 2024-2026 56
Tabel 3.13 Program, Jumlah Kegiatan Subkegiatan, Sumber Dana dan Lokasi Kegiatan 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, khususnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan, dan penetapan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 berada pada tahapan transisi yaitu akhir Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan tahapan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.

Selanjutnya, Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
7. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2045.

26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan.
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.
28. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dimaksudkan untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, sinergisitas program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah supaya pelaksanaan pembangunan daerah konsisten.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, adalah untuk:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo kepada Kepala Daerah.
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, yakni:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari:

a. Latar Belakang

   Menguraikan tentang pengertian ringkas Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah.

b. Landasan Hukum

   Menjelaskan tentang landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah.

c. Maksud dan Tujuan

   Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

d. Sistematika Penulisan

   Menguraikan pokok bahasan dan penulisan dari penyusuna Renja Perangkat Daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Bab II berisi Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya, Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Analisis hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,

Bab III berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana kerja, serta capaian kinerja yang telah direncanakan. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan

masyarakat, diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan program dan kegiatan, dan rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024, yaitu indikator masukan (*input*) dan indikator hasil (*outcome*). Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Data kinerja diperoleh melalui dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada, seperti laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan laporan kegiatan lainnya, termasuk data realisasi kegiatan pada Aplikasi MonevKU di laman Bappeda; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan perhitungan capaian kinerja indikator sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 terlihat pada realisasi indikator sasaran kinerja: Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar, Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama, Persentase peningkatan penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs, Angka Melek Huruf, Nilai rata-rata

kemampuan literasi dan numerasi siswa SD hasil Asesmen Nasional, Nilai rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa SMP hasil Asesmen Nasional, Persentase SMP terakreditasi A, Indeks peningkatan kapasitas ketenagaan, Persentase pemuda yang aktif dan pemuda yang berprestasi, Persentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet yang berprestasi dan rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah.

Tabel 2.1. Capaian Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
I	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat		Rata-rata lama sekolah	Tahun	9.25	9,20	99.46	**Sangat baik**
1			Harapan lama sekolah	Tahun	14.30	14.49	101,33	**Sangat baik**
			Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	87.18	81.87	93.91	**Sangat baik**
			Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A	A	100	**Sangat baik**
			Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)	Opini BPK	WTP	WTP	100	**Sangat baik**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84.50	79.71	94.33	**Sangat baik**
		Meningkatnya derajat	Indeks Partisipasi	Nilai	17.47	14.27	81.68	**tinggi**

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
		pendidikan masyarakat	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal					
			Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar	%	93.88	98.54	104.96	**Sangat baik**
			Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama	%	95.57	86.28	90.28	**tinggi**
			Persentase peningkatan penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs	%	48.62	56.66	116.54	**Sangat baik**
			Angka Melek Huruf	%	95,52	95.66	100.15	**Sangat baik**
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa SD berdasarkan hasil	Nilai	2,04	60,3	-	

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target Perubahan	Realisasi	%	Keterangan
			Asesmen Nasional					
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Nilai	2,09	72.43	-	
2	Meningkatkan prestasi generasi muda	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	87.18	81.87	93.91	**Sangat baik**
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayaan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100	100	**100**	**Sangat baik**

Sumber: Dinas Dikpora Kulon Progo (2024)

Realisasi Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan tahun 2024 sebesar 14.27%, target kinerja tahun 2024 sebesar 17,46%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 81.68%. Salah satu faktor pendorong partisipasi Pendidikan anak usia dini adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di usia 0 – 6 tahun. Untuk meningkatkan ketercapaian kinerja, maka perlu dilakukan berbagai upaya diantaranya sosialisasi pentingnya pendidikan di usia 0 – 6 tahun,

pemenuhan sarana prasarana sekolah, penyediaan guru serta fasilitasi pembiayaan bagi peserta didik. Faktor pendukung partisipasi Pendidikan nonformal adalah ketertarikan sebagian masyarakat kepada keberadaan lembaga-lembaga non formal yang semakin mudah untuk diakses. Oleh karenanya, dilakukan sosialisasi pendidikan nonformal, pemberian bantuan kepada peserta didik, serta pendataan potensi calon peserta didik nonformal. Harapannya, aktivitas-aktivitas tersebut mampu meningkatkan capaian kinerja indikator Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Realisasi Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar tahun 2024 adalah 98.54% dari target 93.88%. Artinya, kinerja Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD mencapai target yang ditetapkan. Kinerja Angka Partisipasi Murni SD sebesar 104.96%. Sebaliknya, Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama 86.28% dari target 95.57%. Faktor penyebab kinerja tidak tercapai adalah masih ditemukan peserta didik di bawah usia yang ditentukan, artinya antusiasme orang tua menyekolahkan anak tinggi, dan tidak memperhatikan batasan usia yang ditentukan.

Kinerja indikator Persentase peningkatan penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs mencapai 116.54%. Dari target 47,84% terealisasi 56,66%. Faktor pendorong kenaikan persentase ini menunjukkan bahwa peserta didik yang telah khatam/tuntas di jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs sangat tinggi. Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan melalui subkegiatan Penyediaan Biaya Personel bagi siswa SD, SMP dan TK dan subkegiatan Minat dan Bakat untuk SD dan SMP. Selain itu, Gerakan Kulon Progo Mengaji (GKM) yang diluncurkan pada akhir tahun 2023 turut memberikan kontribusi bagi ketuntasan siswa SMP yang beragama islam.

Cakupan Prestasi Generasi Muda tahun 2024 masih menunjukkan hasil yang belum maksimal. Dari target yang ditetapkan sebesar 87.18% baru tercapai 81.87% atau kinerja sebesar 93.91%. Belum optimalnya capaian kinerja indikator tersebut karena kemampuan para atlet masih perlu

ditingkatkan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian target adalah dengan mengirimkan partisipasi atlet ke pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan di tingkat provinsi maupun nasional. Dengan demikian, atlet akan memiliki pengalaman bertanding, dan berkesempatan untuk meraih prestasi yang besar. Selain itu, melalui KONI Kulon Progo, dilaksanakan pemusatan latihan untuk atlet-atlet dan pelatih sejumlah 600 orang yang tersebar di 37 cabang olahraga (Cabor).

Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah 100%. Realisasi 100% merupakan upaya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam rangka mendukung operasional kinerja dinas dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Indikator Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional jenjang SD capaian sebesar 60.3, dan untuk jenjang SMP sebesar 72.43. Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional indikator tersebut tidak bisa dibandingkan dengan target karena adanya formulasi perhitungan dari basis 1-3 menjadi basis 100. Namun demikian, dalam rangka akuntabilitas kinerja, maka dilakukan konversi atas target basis 1-3 menjadi basis 100, untuk SD hasil konversi targetnya menjadi 55,58 sehingga capaian kinerjanya menjadi: 108.49%, sedangkan indikator Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SMP Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional jika target dikonversikan ke basis 100, maka targetnya 80,69, sehingga capaian kinerjanya menjadi: 89.76.

Capaian Kinerja Renja tahun 2024 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024. Jumlah/ besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2024. Jumlah program, kegiatan, subkegiatan tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo:

Jumlah Program : 5
Jumlah Kegiatan : 16
Jumlah Sub Kegiatan : 84

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo sampai dengan tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2 T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Tahun 2025.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Subkegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Subkegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian program dan kegiatan tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**										
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***		**100**	100	100	100	100	100	300	300
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu***		**94**	23	23	23	100	23	69	73.40
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	(Dokumen)	10	2	2	2	100	4	8	80
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	(Laporan)	84	21	21	21	100	21	63	75
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu***	**laporan**	**56**	14	14	14	100	14	42	75
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	(Orang/bulan)	3414	3414	3414	3414	100	3414	10242	100
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	(Dokumen)	4	1	1	1	100	1	3	75

1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	(Laporan)	56	14	14	14	100	14	42	75
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Jumlah dokumen administrasi kepegawaian***	**dokumen**	**8**	2	2	2	100	2	6	75
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	(Dokumen)	4	1	1	1	100	1	3	75
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	(Orang)	28	7	7	7	100	7	21	75
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***jumlah dokumen administrasi umum***	**dokumen**	**8**	2	2	2	100	2	6	75
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	(Paket)	16	4	4	4	100	4	12	75
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	(Laporan)	48	12	12	12	100	12	36	75
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***jumlah penambahan aset***		**40**	10	10	10	100	10	30	75
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	(unit)	40	10	10	10	100	10	30	75
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	**laporan**	**96**	24	24	24	100	24	72	75
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	(Laporan)	48	12	12	12	100	12	36	75
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	(Laporan)	48	12	12	12	100	12	36	75
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah***	**laporan**	**12**	3	3	3	100	3	9	75

1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	(Unit)	41	39	39	39	100	39	117	285.37
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	(Unit)	3	3	3	3	100	3	9	300
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	(Unit)	237	240	240	240	100	240	720	303.80
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Persentase SD/ MI Terakreditasi A***	**%**	**66.03**	60.76	65.22	60.76	93.1616	65.49	187.01	283.22
		Presentase SMP/ MTs Terakreditasi A	**%**	**73.75**	67.47	70	67.47	96.3857	71.25	206.19	279.58
		Persentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi	**%**	**35.63**	55.84	34.56	55.84	161.574	65.49	177.17	497.25
		Indeks Kapasitas Ketenagaan	**poin**	**87.31**	87.71	86.8	87.72	101.06	86.98	262.41	300.55
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	***Jumlah SD/MI Terakreditasi A***	**SP**	**243**	223	240	223	92.9167	241	687	282.72
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	Unit	1	1	1	1	100	1	3	300.00
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	Peserta Didik	140250	35250	35250	35250	100	35200	105700	75.37
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	Peserta Didik	12000	3000	3000	3000	100	3000	9000	75.00
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*	Orang	1485	3076	3076	3076	100	3076	9228	621.41
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	Orang	796	907	1199	1199	100	1199	3305	415.20

1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*	Satuan Pendidikan	337	337	335	335	100	335	1007	298.81
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*	Orang	350	350	2449	2449	100	2449	5248	1499.43
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*	Orang	200	50	50	50	100	50	150	75.00
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	Dokumen	4	1	1	1	100	1	3	75.00
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Satuan Pendidikan	3	0	1	1	100	1	2	66.67
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	unit	48	12	13	13	100	7	32	66.67
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Orang	450	450	450	450	100	450	1350	300.00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	Satuan Pendidikan	337	337	335	335	100	335	1007	298.81
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	***jumlah SMP/MTs terakreditasi A***		**59**	56	57	56	98.2456	57	169	286.44
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	Unit	7	1	2	2	100	2	5	71.43
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	Unit	4	2	2	2	100	2	6	150.00
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	Peserta Didik	72992	18248	18248	18248	100	18248	54744	75.00

1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	Peserta Didik	16000	4000	4000	4000	100	3700	11700	73.13
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	Orang	96	96	18248	18248	100	780	19124	19920.83
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	Orang	872	872	872	872	100	872	2616	300.00
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*	Satuan Pendidikan	65	65	65	65	100	67	197	303.08
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*	Orang	520	130	130	130	100	160	420	80.77
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	dokumen	8	2	2	2	100	2	6	75.00
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	Satuan Pendidikan	81	81	81	81	100	81	243	300.00
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Orang	240	60	60	60	100	60	180	75.00
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*	Orang	320	80	80	80	100	80	240	75.00
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	Dokumen	4	1	1	1	100	1	3	75.00
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	***Jumlah PAUD terakreditasi***		**303**	540	299	540	180.602	301	1381	151.93

1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	Unit	6	3	1	1	100	1	5	83.33
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	peserta didi	1458	390	390	390	100	376	1156	79.29
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar*	Peserta Didik	68427	16056	16056	16056	100	17457	49569	72.44
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD*	Orang	2750	2750	2750	2750	100	1609	7109	258.51
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	Orang	3319	814	330	330	100	330	1474	44.41
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	Satuan Pendidikan	830	830	830	830	100	830	2490	300.00
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*	Orang	3305	829	829	829	100	829	2487	75.25
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	Dokumen	4	1	1	1	100	1	3	75.00
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	dokumen	4	1	1	1	100	1	3	75.00
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	Orang	3256	814	814	814	100	814	2442	75.00
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	***Jumlah PNF terakreditasi***	**lembaga**	**26**	22	23	7	30.4348	24	53	203.85
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	Peserta Didik	920	230	230	230	100	230	690	75.00

1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	Orang	353	353	353	353	100	23	729	206.52
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	Orang	20	20	20	20	100	10	50	250.00
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	Satuan Pendidikan	35	35	12	12	100	12	59	168.57
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan*	Orang	120	30	13	13	100	10	53	44.17
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	Peserta Didik	240	90	90	90	100	50	230	95.83
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**										
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Persentase pemuda yang aktif dan pemuda berprestasi***	**%**	**80.21**	100	68.75	100	145.455	100	300	374.02
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	***Persentase pemuda berprestasi tingkat provinsi atau nasional***	**%**	**92**	100	75	100	133.333	83.33	283.33	309.08
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	*Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya*	Orang	20	5	5	5	100	5	15	75.00

2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	*Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya*	Orang	320	80	80	80	100	80	240	75.00
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya*	Orang	20	5	5	5	100	35	45	225.00
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Organisasi Pemuda yang aktif***	**%**	**68.75**	100	62.5	100	160	62.5	262.5	381.82
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan*	Dokumen	28	7	7	7	100	7	21	75.00
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Persentase Organisasi Olah Raga yang aktif dan atlet berprestasi***	**%**	**88.16**	81.28	87.18	77.21	88.56	86.84	245.33	278.28
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah sarana prasarana pembinaan dan pengembangan olah raga***	**unit**	**3**	3	3	3	100	3	9	300.00
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan*	Unit	3	3	3	3	100	3	9	300.00
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	***Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan***	**orang**	**76.32**	62.56	74.37	54.41	73.16	75.95	192.92	252.78
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan*	Orang	744	744	744	744	100	744	2232	300.00
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**										
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter***	**%**	**100**	0	100	100	100	100	200	200.00
2.22.08.5.08	**Pendidikan Berbasis Budaya**	***Pendidikan Berbasis budaya yang berkualitas***	**%**	**100**	0	100	100	100	100	200	200.00
2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah laporan hasil pembinaan muatan lokal (laporan)	laporan	3	0	1	1	100	1	2	66.67

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kulon Progo, 2024

2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan.

Standar pelayanan Dinas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan kesetaraan, serta Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, berikut capaian kinerja tahun 2024 dan Proyeksi kinerja tahun 2025-2026 untuk masing-masing indikator.

Tabel 2.3
T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi			Catatan
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Skor kemampuan literasi jenjang SD	100	-	-	71.69	74.19	-	69.19	71.69	74.19	76.69	
2	Skor kemampuan literasi jenjang SMP	100	-	-	84.01	85.11	-	82.91	84.01	85.11	86.21	
3	Skor kemampuan numerasi jenjang SD	100	-	-	61.71	64.61	-	58.81	61.71	64.61	67.51	
4	Skor kemampuan numerasi jenjang SMP	100	-	-	72.2	73.7	-	70.7	72.2	73.7	75.2	
5	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	100	-	-	97.78	98.03	-	97.52	97.78	98.03	98.28	
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	100	-	-	98.72	98.82	-	98.61	98.72	98.82	98.92	
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	100	-	-	14.85	15.62	-	14.09	14.85	15.62	16.38	
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	100	-	-	77.09	77.5	-	76.68	77.09	77.5	77.91	
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	100	-	-	76.83	77.58	-	81.08	76.83	77.58	78.33	
10	Iklim Inklusivitas jenjang SD	100	-	-	62.44	65.32	-	60.32	62.44	65.32	67.82	
11	Iklim Inklusivitas jenjang SMP	100	-	-	62.44	64.84	-	60.04	62.44	64.84	67.24	
12	Iklim Keamanan jenjang SD	100	-	-	80.23	81.13	-	79.33	80.23	81.13	82.03	
13	Iklim Keamanan jenjang SMP	100	-	-	74.32	75.82	-	72.82	74.32	75.82	77.32	
14	Iklim Kebinekaan jenjang SD	100	-	-	77.59	78.59	-	76.59	77.59	78.59	79.59	
15	Iklim Kebinekaan jenjang SMP	100	-	-	73.7	74.7	-	72.7	73.7	74.7	75.7	
16	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		-	-	-	-	-	1.56	1.75	1.76*	1.76*	
17	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan		-	-	-	-	-	35.3	75.79	75.8*	75.8*	
18	Peningkatan prestasi olah raga		-	-	-	-	-	1	1	1	1	

Sumber Data: BA Rakortek Daerah Provinsi DIY

2.2.1. Urusan Pendidikan

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kondisi layanan pendidikan di sebuah daerah. Angka Partisipasi Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. APS jenjang pendidikan dasar pada Tahun 2024 sebesar 98.41 %. APS pendidikan dasar di bawah 100% artinya (1) belum semua warga masyarakat menyadari perlunya pendidikan anak sesuai kelompok usianya, seperti masih adanya siswa usia Jenjang SD/MI dan sederajatnya yang masih berusia kurang dari 7 (tujuh) Tahun (masih usia PAUD dan/atau atas kondisi/kebutuhan/karakteristik khusus seperti anak berkebutuhan khusus), sehingga berdampak pada usia yang semestinya masih mengikuti pendidikan di SD/MI dan sederajatnya, ataupun adanya anak kelompok usia kurang dari sudah mengikuti pendidikan di SMP/MTs dan sederajatnya, (2) masih

terdapat sebagian warga masyarakat mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di luar kabupaten, karena alasan tertentu misalnya: mengikuti kerja orang tuanya, mencari sekolah yang favorit, mendekati tempat tinggal (daerah perbatasan), menyesuaikan alat transportasi umum yang ada, maupun alasan tertentu lainnya.

Kemampuan literasi numerasi merupakan ukuran atau indikator yang mencerminkan kualitas hasil belajar. Capaian kemampuan literasi numerasi jenjang SD dan SMP di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun di tahun 2024, capaian kinerja mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Keberhasilan capaian indikator tersebut tidak lepas dari upaya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Kondisi tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi pendidik meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di tahun 2024 sebesar 88,82%.

Selain ukuran kuantitas dan kualitas hasil belajar, iklim lingkungan belajar menjadi ukuran penting berikutnya. Iklim lingkungan belajar yang saat ini menjadi ukuran adalah iklim keamanan, iklim inklusivitas dan iklim kebinekaan. Capaian kinerja iklim lingkungan belajar diukur melalui assesmen nasional. Pada tahun 2024, capaian kinerja iklim lingkungan belajar jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami perbaikan.

2.2.2 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program dan kegiatan kepemudaan serta keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan dinamika kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan pemuda ditandai dengan meningkatnya partisipasi pemuda organisasi kepemudaan, dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan ekonomi mandiri. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan skala regional maupun nasional, diantaranya pengiriman pemuda/pemudi dalam kegiatan Pemuda Pelopor dan Jambore Pemuda Indonesia, serta pelatihan dan lomba kewirausahaan. Demikian juga halnya dengan berbagai kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan baik di tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di tingkat provinsi, regional, maupun nasional. Adanya kegiatan keolahragaan tersebut diharapkan mampu

meningkatkan prestasi olah raga di Kabupaten Kulon Progo. Untuk mendukung kinerja olahraga, jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 mengalami perubahan yaitu sebanyak 4 organisasi dari yang semula 42 organisasi menjadi 46 organisasi dan jumlah klub olahraga sebanyak 173 klub. Data tersebut menunjukkan ada peningkatan minat masyarakat pada olahraga.

Tabel 2.4. Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Organisasi pemuda	16	16	19	19	19
2	Organisasi Olahraga	42	45	45	46	46
3	Klub Olahraga	280	280	148	173	173
4	Kegiatan Pemuda	4	4	4	2	8
5	Kegiatan Olahraga	5	6	8	10	10

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2.5. Jumlah Cabang Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabor	28	45	45	46	46
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Cabor	21	21	32	28	28
3	Jumlah cabang olahraga yang mewakili kabupaten	Cabor	28	28	32	22	22
4	Jumlah kegiatan cabang olahraga non prestasi	Cabor	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Adapun berbagai prestasi yang telah diraih pemuda dan atlet Kulon Progo pada beberapa cabang olahraga pada tingkat regional dan nasional sampai dengan tahun 2019 cukup baik. Gambaran prestasi olahraga Kabupaten Kulon Progo dalam kancah regional dapat dilihat dari prestasi pada Pekan Olahraga Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.6 Perolehan Medali Kontingen Kulon Progo Dalam Pekan Olahraga Tingkat Provinsi

No.	PORDA/PORPROV	Perolehan Medali		
		Emas	Perak	Perunggu
1.	PORDA 2005	45	39	63
2.	PORDA 2007	18	42	84
3.	PORPROV 2009	26	37	61
4.	PORPROV 2011	22	25	62
5.	PORDA DIY 2013	20	27	66
6.	PORDA DIY 2015	23	39	74
7.	PORDA DIY 2017	32	28	74
8.	PORDA DIY 2019	40	28	65
9.	PORDA DIY 2022	31	46	91

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Gambaran prestasi pemuda Kabupaten Kulon Progo dalam kancah regional dan nasional ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7. Prestasi Pemuda Kulon Progo
Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional	Orang	16	16	17	9	14
2	Jumlah prestasi yang diraih kepemudaan dalam skala regional dan nasional	Orang	8	8	15	9	14

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Prestasi pemuda Kulon Progo pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu mengirim 17 pemuda dan yang berhasil meraih prestasi adalah 15 pemuda. Di tahun 2024 prestasi pemuda mengalami peningkatan dalam pengiriman pemuda yaitu 14 pemuda dan yang berhasil semuanya meraih prestasi. Selain pengiriman, pembinaan terhadap pemuda tetap dilaksanakan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan kalurahan melakukan seleksi pemuda berprestasi, melalui Karang Taruna, selanjutnya dilakukan pelatihan di tingkat kabupaten dengan substansi materi yang berjenjang, dari kepemimpinan, hingga kewirausahaan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, peluang dan tantangan yang ada, dapat diidentifikasi berbagai isu strategis dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kulon Progo antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan kesempatan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan untuk semua-pendidikan tanpa diskriminasi,
2. Peningkatan kualitas hasil belajar dan penciptaan iklim lingkungan belajar yang kondusif.
3. Pengembangan pendidikan karakter di semua lini bidang/urusan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, sehingga dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, yang memiliki ideologi Pancasila, yang berbudi pekerti luhur, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan berintegritas, SDM yang sehat, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Kulon Progo.
4. Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang lebih efektif dan efisien.
5. Peningkatan daya saing pemuda dan prestasi olahraga.

Berdasarkan isu strategis tersebut, maka intervensi yang direncanakan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8 Penyandingan Permasalahan/ Isu Strategis dengan Intervensi Program

No	Permasalahan Isu Strategis	Intervensi berdasarkan indikasi aktivitas
1	Penyediaan kesempatan pendidikan yang berkualitas di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.	1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah. 2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik. 3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan. 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.

No	Permasalahan Isu Strategis	Intervensi berdasarkan indikasi aktivitas
		5. Pengadaan Mebel. 6. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik. 7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah. 8. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan. 9. Perhitungan, pemetaan, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.
2	Peningkatan kualitas hasil belajar.	1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SatuanPendidikan. 2. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan. 3. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 4. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan. 5. Pengembangan konten digital untuk pendidikan. 6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan. 7. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik. 8. Pengembangan Minat dan Bakat Siswa. 9. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan

No	Permasalahan Isu Strategis	Intervensi berdasarkan indikasi aktivitas
		perundungan, kekerasan, dan intoleransi
3	Pengembangan pendidikan karakter	1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa jenjang SD dan SMP. 2. Pembinaan Muatan Lokal. 3. Pengembangan kurikulum muatan lokal.
4	Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan yang lebih efektif dan efisien.	1. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan. 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah. 3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOSP. 4. Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5	Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota. 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula. 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota. 4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor tingkat kabupaten/kota.

No	Permasalahan Isu Strategis	Intervensi berdasarkan indikasi aktivitas
		5. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota. 6. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota. 7. Seleksi Atlet Daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil riviu terhadap RKPD dan analisis kebutuhan menunjukkan adanya perubahan jumlah kegiatan dalam beberapa program yang tidak terdapat pada rancangan awal. Pengurangan dan penambahan sub kegiatan baru tersebut didasarkan pada: pertama Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; kedua, penetapan target kinerja indikator prioritas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rakortek Daerah Provinsi DIY tanggal 29 April 2025; ketiga hasil kajian terhadap tingkat kepentingan setiap sub kegiatan dikaitkan dengan penetapan skala prioritas sub kegiatan yang dapat menghasilkan kontribusi langsung terhadap capaian sasaran program di tahun 2026; keempat adanya keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD murni Kabupaten Kulon Progo. Berikut hasil riviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026.

Tabel 2.9 Hasil Riviu Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 (tc 31)

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	kab. Kulon Progo				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	kab. Kulon Progo				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	kab. Kulon Progo				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	kab. Kulon Progo				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kab. Kulon Progo	***Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	kab. Kulon Progo	***Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi***	100%		Penyesuaian Indikator kinerja
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kulon Progo	***Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu***			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	kab. Kulon Progo	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	2 laporan		Penyesuaian Indikator kinerja
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	25,887,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	10,000,000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	21 Laporan	308,905,083	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	12 Laporan	151,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kab. Kulon Progo	***Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu***			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	kab. Kulon Progo	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			Penyesuaian Indikator kinerja
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Kulon Progo	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	3414 Orang/bulan	268,169,235,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Kulon Progo	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	3170 Orang/bulan	242,629,302,061	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	1,500,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	1,452,049,800	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	14 Laporan	100,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	14 Laporan	61,049,900	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kab. Kulon Progo	***Jumlah dokumen administrasi kepegawaian***			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	kab. Kulon Progo	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**1 Laporan**		Penyesuaian Indikator kinerja
6	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	1 Dokumen	98,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	1 Dokumen	7,099,700	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	7 Orang	75,400,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	0 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kab. Kulon Progo	***jumlah dokumen administrasi umum***			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	kab. Kulon Progo	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**2 Laporan**		Penyesuaian Indikator kinerja
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kab. Kulon Progo	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	120,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kab. Kulon Progo	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	40,950,000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	150,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	58,096,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kab. Kulon Progo	***jumlah penambahan aset***			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	kab. Kulon Progo	***Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor***	1 Laporan		Penyesuaian Indikator kinerja
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kulon Progo	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 unit	120,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kulon Progo	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 unit	195,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kulon Progo	***jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	kab. Kulon Progo	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			Penyesuaian Indikator kinerja
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	370,070,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	315,788,439	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	1,828,454,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1,283,115,300	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kulon Progo	***jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah***			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	kab. Kulon Progo	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**3 Laporan**		Penyesuaian Indikator kinerja
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	39 Unit	375,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	39 Unit	217,499,000	
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab. Kulon Progo	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	275,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab. Kulon Progo	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	29,997,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	0 unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	240 unit	132,202,600	penggantian subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	240 Unit	500,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	0 Unit	0	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	kab. Kulon Progo	***Persentase SD/ MI Terakreditasi A***	**65,76%**		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	kab. Kulon Progo	***Persentase Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan***	**100 Persen**		Penyesuaian Indikator kinerja
		kab. Kulon Progo	***Presentase SMP/ MTs Terakreditasi A***	**72,50%**			kab. Kulon Progo	***Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik***	**57.25 persen**		Penyesuaian Indikator kinerja
		kab. Kulon Progo	***Persentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi***	**35,27%**			kab. Kulon Progo	***Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan Kondisi Layak***	**73.56 persen**		Penyesuaian Indikator kinerja
		kab. Kulon Progo	***Indeks Kapasitas Ketenagaan***	**87,15**			kab. Kulon Progo	***Persentase Peserta Didik yang Telah Mencapai Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP)***	**84.43 Persen**		Penyesuaian Indikator kinerja
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	kab. Kulon Progo	***Jumlah SD/MI Terakreditasi A***	**242**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	kab. Kulon Progo	***Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SD***	**4 Laporan**		Penyesuaian Indikator kinerja
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SD	**5 Laporan**		Penyesuaian Indikator kinerja
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru	**4 Laporan**		Penyesuaian Indikator kinerja
								Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SD	**7 Laporan**		Penyesuaian Indikator kinerja

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
17	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	2 Unit	18,167,250,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	2 Unit	266,500,000	mendukung program prioritas daerah
18	Pengadaan Mebel Sekolah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia*	2 paket	1,035,000,000	Pengadaan Mebel Sekolah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia*	2 paket	356,000,000	mendukung program prioritas daerah
19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	35200 Peserta Didik	5,240,500,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	34367 Peserta Didik	3,146,500,000	subkegiatan prioritas SPM
20	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	kab. Kulon Progo	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	3000 Peserta Didik	880,300,000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	kab. Kulon Progo	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	2000 Peserta Didik	264,000,000	subkegiatan prioritas SPM
21	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*	526 Orang	6,607,762,100	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*	450 Orang	6,045,000,000	subkegiatan prioritas SPM
22	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	1199 Orang	550,230,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	1090 Orang	120,600,000	subkegiatan prioritas SPM
23	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*	335 Satuan Pendidikan	508,820,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*	335 Satuan Pendidikan	75,699,900	subkegiatan prioritas SPM
24	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	kab. Kulon Progo	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*	2449 Orang	430,200,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	kab. Kulon Progo	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*	1314 Orang	111,300,000	mendukung subkegiatan prioritas SPM

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
25	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*	50 Orang	125,240,000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*	50 Orang	14,500,000	subkegiatan prioritas SPM
26						Pengembangan konten digital untuk pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan*	2 Konten Digital	15,000,000	subkegiatan prioritas SPM
27						Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*	50 Orang	15,000,000	subkegiatan prioritas SPM
28	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	1 Dokumen	326,575,000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	1 Dokumen	35,000,000	subkegiatan prioritas SPM
29	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Dokumen	31,450,000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Dokumen	11,000,000	subkegiatan prioritas SPM
30	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan	kab. Kulon Progo	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi	4 komunitas	250,000,000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan	kab. Kulon Progo	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi	2 komunitas	49,150,000	subkegiatan prioritas SPM
31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi	kab. Kulon Progo	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi	1 kegiatan	100,000,000	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi	kab. Kulon Progo	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi	1 kegiatan	35,000,000	subkegiatan prioritas SPM
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	3 unit	10,420,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	4 unit	3,423,238,600	subkegiatan prioritas SPM

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	450 Orang	550,000,000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	390 Orang	295,000,000	subkegiatan prioritas SPM
34	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	kab. Kulon Progo	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	335 Satuan Pendidikan	1,053,390,000	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	kab. Kulon Progo	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	335 Satuan Pendidikan	588,300,200	subkegiatan prioritas SPM
35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	kab. Kulon Progo	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*	6 Paket	2,400,000,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	kab. Kulon Progo	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*	0 Paket	0	sub kegiatan bersumber dana dari DAK Fisik
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	kab. Kulon Progo	***jumlah SMP/MTs terakreditasi A***			**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	kab. Kulon Progo	***Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SMP***	**4 Laporan**		Penyesuaian Indikator kinerja
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SMP	**5 Laporan**		Penyesuaian Indikator kinerja
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru	**4 Laporan**		Penyesuaian Indikator kinerja
								Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SMP	**7 Laporan**		Penyesuaian Indikator kinerja
36	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	1 Unit	23,768,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	1 Unit	5,479,173,000	mendukung program prioritas daerah

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
37	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	3 Unit	8,280,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	3 Unit	2,925,551,400	subkegiatan prioritas SPM
38						Pengadaan Mebel Sekolah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*	1 Paket	210,801,200	mendukung program prioritas daerah
39	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	18248 Peserta Didik	4,059,553,200	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	18248 Peserta Didik	2,566,014,800	subkegiatan prioritas SPM
40	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	kab. Kulon Progo	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	3700 Peserta Didik	534,746,300	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	kab. Kulon Progo	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	1660 Peserta Didik	287,366,800	subkegiatan prioritas SPM
41	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	780 Orang	1,100,050,800	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	72 Orang	960,375,000	subkegiatan prioritas SPM
42	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	872 Orang	250,000,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	319 Orang	98,600,000	subkegiatan prioritas SPM

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
43	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*	67 Satuan Pendidikan	150,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*	67 Satuan Pendidikan	22,031,900	subkegiatan prioritas SPM
44	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	kab. Kulon Progo	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*	160 Orang	273,660,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	kab. Kulon Progo	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*	100 Orang	26,000,000	mendukung subkegiatan prioritas SPM
45						Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*	85 Orang	20,000,000	subkegiatan prioritas SPM
46	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	kab. Kulon Progo	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 konten digital	50,000,000	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	kab. Kulon Progo	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 konten digital	23,050,000	subkegiatan prioritas SPM
47	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*	80 orang	30,000,000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*	85 orang	20,000,000	subkegiatan prioritas SPM
48	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	1 dokumen	50,000,000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	1 dokumen	20,000,000	subkegiatan prioritas SPM
49	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	2 Dokumen	20,430,000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Dokumen	12,500,000	subkegiatan prioritas SPM
50	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan	kab. Kulon Progo	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi	2 komunitas	100,000,000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan	kab. Kulon Progo	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi	2 komunitas	32,650,000	subkegiatan prioritas SPM

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
51	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi	kab. Kulon Progo	jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi	1 kegiatan	60,000,000	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi	kab. Kulon Progo	jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi	1 kegiatan	25,000,000	subkegiatan prioritas SPM
52	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	81 Satuan Pendidikan	737,460,000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	67 Satuan Pendidikan	613,585,000	subkegiatan prioritas SPM
53	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	60 Orang	293,485,200	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	490 Orang	197,000,000	subkegiatan prioritas SPM
54	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	kab. Kulon Progo	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	kab. Kulon Progo	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*	0	0	sub kegiatan bersumber dana dari DAK Fisik
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	kab. Kulon Progo	***Jumlah PAUD terakreditasi***			**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang PAUD	2 laporan		Penyesuaian Indikator kinerja
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang PAUD	8 Laporan		Penyesuaian Indikator kinerja
								Jumlah Laporan Peningkatan Kompetensi Guru	4 Laporan		Penyesuaian Indikator kinerja
55	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	1 Unit	8,861,950,617	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	1 Unit	200,000,000	subkegiatan prioritas SPM
56	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	376 peserta didik	101,350,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	387 Peserta Didik	50,754,300	subkegiatan prioritas SPM

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
57	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar*	17457 Peserta Didik	464,255,600	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar*	825 Satuan Pendidikan	308,154,800	subkegiatan prioritas SPM
58	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD*	182 Orang	3,235,409,300	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD*	1470 Orang	2,982,870,000	subkegiatan prioritas SPM
59	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	330 Orang	351,020,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	330 Orang	60,000,000	subkegiatan prioritas SPM
60	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	kab. Kulon Progo	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	830 Satuan Pendidikan	240,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	kab. Kulon Progo	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	825 Satuan Pendidikan	90,294,100	subkegiatan prioritas SPM
61	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*	829 Orang	182,885,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*	825 Orang	164,478,200	Mendukung subkegiatan prioritas SPM
62	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	1 Dokumen	55,000,000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	1 Dokumen	33,840,800	subkegiatan prioritas SPM
63	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Dokumen	21,844,800	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Dokumen	7,315,000	subkegiatan prioritas SPM
64	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan	kab. Kulon Progo	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi	2 komunitas	100,000,000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependididkan	kab. Kulon Progo	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi	2 komunitas	25,000,000	subkegiatan prioritas SPM

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
65	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kab. Kulon Progo	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 kegiatan	50,000,000	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kab. Kulon Progo	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 kegiatan	8,412,600	subkegiatan prioritas SPM
66	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	814 Orang	360,000,000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	814 Orang	215,000,000	subkegiatan prioritas SPM
67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia*	10 paket	470,000,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	kab. Kulon Progo	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia*	0	0	sub kegiatan bersumber dana dari DAK Fisik
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	kab. Kulon Progo	***Jumlah PNF terakreditasi***			**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	kab. Kulon Progo	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang Kesetaraan**	**7 Laporan**		Penyesuaian Indikator kinerja
68	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	230 Peserta Didik	232,000,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	230 Peserta Didik	266,000,000	subkegiatan prioritas SPM
69	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	23 Orang	103,400,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	23 Orang	75,175,000	subkegiatan prioritas SPM
70	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*		50,160,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	10 orang	9,250,000	subkegiatan prioritas SPM

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
71	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	12 Satuan Pendidikan	152,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	12 Satuan Pendidikan	63,150,000	subkegiatan prioritas SPM
72	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan*	10 Orang	53,850,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan*	10 Orang	12,500,000	Mendukung subkegiatan prioritas SPM
73	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang*	1 dokumen	50,000,000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di*	1 dokumen	12,000,000	subkegiatan prioritas SPM
74	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 dokumen	25,000,000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 dokumen	5,000,000	subkegiatan prioritas SPM
75	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi*	2 komunitas	100,000,000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi*	1 komunitas	5,000,000	subkegiatan prioritas SPM
76	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kab. Kulon Progo	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*	1 kegiatan	40,000,000	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kab. Kulon Progo	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*	1 kegiatan	5,000,000	subkegiatan prioritas SPM
77	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	kab. Kulon Progo	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	50 Peserta Didik	202,120,000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	kab. Kulon Progo	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	50 Peserta Didik	32,000,000	subkegiatan prioritas SPM
						PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	kab. Kulon Progo	*Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi dengan Satuan Pendidikan*	1 Kurikulum		Renstra 2025-2029
						Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi*	1 Laporan		Renstra 2025-2029

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
78						Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	kab. Kulon Progo	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun*	1 dokumen	65,000,000	Renstra 2025-2029
						PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	kab. Kulon Progo	*Persentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi Standar Jumlah Pendidik*	41.88 persen		Renstra 2025-2029
						Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan	2 Laporan		subkegiatan prioritas SPM
79						Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	1 Dokumen	55,000,000	subkegiatan prioritas SPM
80						Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	1 Laporan	24,000,000	subkegiatan prioritas SPM
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	kab. Kulon Progo				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	kab. Kulon Progo				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	kab. Kulon Progo				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	kab. Kulon Progo				

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	kab. Kulon Progo	***Persentase pemuda yang aktif dan pemuda berprestasi***			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	kab. Kulon Progo	***Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaaan, Sosial Kemasyarakatan, dan Wirausaha***	36.33 persen		Penyesuaian Indikator kinerja
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	kab. Kulon Progo	***Persentase pemuda berprestasi tingkat provinsi atau nasional***			**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	kab. Kulon Progo	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan***	3 Laporan		Penyesuaian Indikator kinerja
81	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	kab. Kulon Progo	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*	80 Orang	77,300,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	kab. Kulon Progo	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*	*80 Orang*	50,244,400	Mendukung Prioritas nasional
82	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	kab. Kulon Progo	*Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda*	1 kegiatan	40,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	kab. Kulon Progo	*Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda*	1 Kegiatan	37,162,700	Mendukung Prioritas nasional
83	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda*	5 orang	118,300,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	kab. Kulon Progo	*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda*	5 Orang	12,028,000	Mendukung Prioritas nasional
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kab. Kulon Progo	***Persentase Organisasi Pemuda yang aktif***			**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	kab. Kulon Progo	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan***	**1 Laporan**		Penyesuaian Indikator kinerja
84	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	kab. Kulon Progo	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	1 Organisasi	1,130,200,000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	kab. Kulon Progo	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	1 Organisasi	895,000,000	Mendukung Prioritas nasional

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	kab. Kulon Progo	***Persentase Organisasi Olah Raga yang aktif dan atlet berprestasi***			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	kab. Kulon Progo	***Persentase Atlet yang Mengikuti Pembinaan Intensif.***	55.78 persen		Penyesuaian Indikator kinerja
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	kab. Kulon Progo	***Jumlah sarana prasarana pembinaan dan pengembangan olah raga***			**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	kab. Kulon Progo	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga***	1 Laporan		Penyesuaian Indikator kinerja
85	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	kab. Kulon Progo	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	3 Unit	5,872,581,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	kab. Kulon Progo	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	3 Unit	10,281,544,412	Mendukung Prioritas nasional
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	kab. Kulon Progo	***Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan***			**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	kab. Kulon Progo	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah***			Penyesuaian Indikator kinerja
86	Seleksi Atlet Daerah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi*	744 Orang	6,000,000,000	Seleksi Atlet Daerah	kab. Kulon Progo	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi*	744 Orang	4,267,000,000	Mendukung Prioritas nasional
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	kab. Kulon Progo				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	kab. Kulon Progo				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	kab. Kulon Progo	***Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter***			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	kab. Kulon Progo	***Persentase Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya***	26.87 persen		Penyesuaian Indikator kinerja
	Pendidikan Berbasis Budaya	kab. Kulon Progo	***Pendidikan Berbasis budaya yang berkualitas***			**Pendidikan Berbasis Budaya**	kab. Kulon Progo	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya***	1 Laporan		Penyesuaian Indikator kinerja
87	Pembinaan Muatan Lokal	kab. Kulon Progo	Jumlah laporan hasil pembinaan muatan lokal (laporan)	1 laporan	200,000,000	Pembinaan Muatan Lokal	kab. Kulon Progo	Jumlah laporan hasil pembinaan muatan lokal (laporan)	1 Laporan	386,619,000	Mendukung Prioritas nasional

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musyawarah pembangunan di Tingkat kapanewon dan pokok-pokok pikiran DPRD, dihasilkan beberapa usulan. Dari hasil kajian terhadap data usulan kegiatan terdapat dua kategori kelompok kegiatan sebagai usulan program dan kegiatan masyarakat, yaitu kelompok kegiatan fisik dan kegiatan non fisik. Kelompok kegiatan fisik terdiri dari kegiatan rehabilitasi prasarana, sedangkan kegiatan non fisik berupa bantuan operasional lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal. Dari sisi jenis kegiatan terdapat relevansi antara kegiatan yang diusulkan masyarakat dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yaitu tuntutan pemenuhan layanan yang baik. Oleh karena itu, sebagian besar usulan masyarakat tersebut sudah terakomodasi dalam rumusan kebutuhan program kegiatan. Namun demikian, untuk lokus kegiatan tahun 2025 disesuaikan dengan prioritas dan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD pada penyusunan rencana kerja tahun 2026, usulan masuk sejumlah 39 usulan. Dari 39 usulan tersebut, 4 usulan tidak sesuai dengan kewenangan dinas, sehingga hanya 35 usulan yang sesuai dan diverifikasi oleh dinas. Berikut rekapitulasi usulan program dan kegiatan masyarakat pada aplikasi SIPD beserta catatan hasil penelaahan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.10
Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Sekolah Dasar	Kabupaten Kulon Progo	Tersalurkannya Bantuan Sosial siswa miskin tingkat SD	4 orang	Dapat diakomodir sepanjang diusulkan oleh sekolah
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Rehabilitasi Gedung SD (rehab sedang)	9 unit	Usulan dapat ditindaklanjuti dengan penyampaian proposal oleh sekolah, penilaian ke lapangan dan pengusulan anggaran oleh Dinas
3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang tersedia	3 paket	Usulan dapat ditindaklanjuti dengan penyampaian proposal oleh sekolah, penilaian ke lapangan dan

					pengusulan anggaran oleh Dinas
4	Bantuan Peralatan Olahraga	Kabupaten Kulon Progo	Tersedianya Bantuan Peralatan Olahraga	7 paket	Kebijakan pemda untuk penyediaan sarana prasarana olahraga di tingkat kalurahan/kapanewon diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Seleksi Atlet	Kabupaten Kulon Progo	Terlaksananya Pengembangan kelas khusus olahraga SMP	1 paket	Pendanaan Kelas Khusus Olahraga pada tahun 2026 diarahkan untuk operasional siswa untuk mendukung latihan.
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kabupaten Kulon Progo	jumlah Rehabilitasi gedung PAUD	5 unit	Usulan dapat ditindaklanjuti dengan penyampaian proposal oleh sekolah, penilaian ke lapangan, dan pengusulan anggaran
7	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemuda Olahraga	6 paket	Tahun 2026 diarahkan untuk persiapan tuan rumah PORDA PERPARDA DIY tahun 2027.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 berpedoman pada kebijakan nasional, sebagaimana arahan RPJMN 2020-2024, sasaran jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengalokasikan anggaran tahun 2026 untuk melaksanakan program prioritas yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
2. Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis.
3. Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan.
4. Digitalisasi Sekolah.
5. Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*).
6. Sekolah Model Transformatif.
7. Penguatan Bimbingan Konseling di Sekolah.
8. Wajib Belajar 13 Tahun.
9. Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Adapun sasaran pembangunan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural serta tata kelola pemerintah yang baik. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY. Selaras dengan sasaran tersebut, tema Pembangunan Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah Pembangunan Berkelanjutan untuk mewujudkan Peningkatan Daya Saing Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yaitu ***Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Ekslusif Menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan*** dan visi bupati terpilih yaitu "terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan", maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mendukung misi 1 yaitu Mewujudkan masyarakat Kulon Progo makmur, berbudaya dan religius. Serta mendukung misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Government, aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis. Untuk memastikan strategi dan arah kebijakan dinas selaras dengan tema pembangunan daerah, maka diperlukan tolok ukur/ indikator kinerja perangkat daerah. Selain indikator kinerja daerah, ditetapkan pula indikator prioritas utama (Indikator mutu SPM) urusan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Surat Mendikdasmen Nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025. Secara rinci indikator utama daerah dan Indikator prioritas utama urusan pendidikan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.11 Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Prioritas (Mutu SPM) Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026
A	**Tujuan**			
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,7 - 15,79
2		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	nilai	A (85,3)
5		Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3.231
B	**Sasaran**			
1.	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan di semua Jenjang	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun	%	98,03
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 tahun	%	98,82
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan Usia 7-18 tahun	%	15,62
2.	Meningkatnya mutu pendidikan	Kemampuan literasi numerasi SD (skor)	nilai	69,4

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026
		Kemampuan literasi numerasi SMP (skor)	nilai	79,4
		Persentase Penguatan Pendidikan Karakter	%	59,12
3.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Persentase Pemuda berprestasi	%	76,47
4.	Meningkatnya prestasi olahraga dalam event olahraga pelajar dan umum	Persentase perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar dan umum	%	50,78
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	A (>80-90)
6.	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	nilai	2,0 - 3,0
C	**Indikator Prioritas Pendidikan (Indikator Mutu SPM)**			
1		Skor Kemampuan Literasi SD	nilai	74,19
2		Skor Kemampuan Literasi SMP	nilai	85,11
3		Skor Kemampuan Numerasi SD	nilai	64,61
4		Skor Kemampuan Numerasi SMP	nilai	73,70
5		Angka Partisipasi Sekolah (5-6) tahun	%	98,03
6		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	%	98,82
7		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	%	15,62
8		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	77,50
9		Proporsi Guru PAUD dengan Kuali kasi S1/D4	%	77,58
10		Iklim Inklusivitas jenjang SD	nilai	65,32
11		Iklim Inklusivitas jenjang SMP	nilai	64,84
12		Iklim Keamanan jenjang SD	nilai	81,13
13		Iklim Keamanan jenjang SMP	nilai	75,82
14		Iklim Kebinekaan jenjang SD	nilai	78,59
15		Iklim Kebinekaan jenjang SMP	nilai	74,70

Sumber: RKPD Kulon Progo Tahun 2026, Berita Acara Rakortekbang DIY tahun 2025

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada tahapan transisi yaitu akhir Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan tahapan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Agar tujuan dan sasaran dinas dapat tercapai, maka

dilaksanakan beberapa program, dengan sasaran kinerja program sebagai berikut.

Tabel 3.12 Indikator Kinerja Utama Program
Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2026
1	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Sarana Prasarana Sekolah dalam Kondisi Layak	%	73,56
		Persentase peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan	%	100
		Persentase peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP)	%	84,43
		Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik	%	57,25
2	Program Pendidik dan tenaga Kependidikan	Persentase Satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik	%	41,88
3	Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah kurikulum muatan lokal yang terintegrasi dengan Satuan Pendidikan	kurikulum	2
4	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaaan, sosial kemasyarakatan, dan wirausaha.	%	36,33
5	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase atlet yang mengikuti pembinaan intensif.	%	55,78
4	Program penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya	%	32,84
5	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kot	Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100

Sumber: RKPD Kulon Progo Tahun 2026

Pada setiap tahapan penyusunan rencana kerja dilakukan beberapa penyesuaian untuk mengakomodir program, kegiatan, subkegiatan, yang terdiri dari 7 program dengan total anggaran sebesar Rp. 295.794.430.912 (Dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Ketujuh program tersebut dioperasionalisasikan dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan. Jumlah kegiatan, subkegiatan tersebut terinci pada Tabel 3.13, sedangkan rincian pagu indikatif per

program, kegiatan, subkegiatan disajikan secara lengkap pada bab IV dokumen ini.

Tabel 3.13 Program, Jumlah Kegiatan Subkegiatan, Sumber Dana dan Lokasi Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Sumber Dana	Lokasi
1	Program Pengelolaan Pendidikan	4	58	DAU Bidang Pendidikan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Insentif Fiskal, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Tersebar Kabupaten Kulon Progo
2	Program Pengembangan Kurikulum	1	1	DAU Bidang Pendidikan	Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	2	DAU Bidang Pendidikan	Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2	4	DAU Bidang Pendidikan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Tersebar Kabupaten Kulon Progo
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2	2	DAU Bidang Pendidikan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu.	1. Pembangunan dan pemeliharaan: GOR Cangkring, GOR Wates, Stadion Cangkring, 2. Pembinaan atlet tersebar di Kabupaten Kulon Progo
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	1	1	Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Daerah Provinsi	Tersebar Kabupaten Kulon Progo
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	7	14	Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Sumber Dana	Lokasi
	Daerah Kabupaten/Kota			Rokok, Dana Alokasi Umum, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
		18	**82**		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

4.1. Rencana Kerja

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan urusan pendidikan, pemuda dan olahraga yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, meningkatnya pembinaan generasi muda dan meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah. Arah kebijakan yang ditetapkan disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan untuk meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat, swasta dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sumber daya manusia, khususnya bidang Pendidikan, pemuda dan olahraga.

Pada tahun 2026, kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diarahkan untuk pemenuhan Standar Pekayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, pencapaian sasaran kinerja dinas sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, mendukung pelayanan publik, mengurangi masalah dan isu strategis yang berkembang, serta mengakomodasi usulan masyarakat. Rencana kerja yang disusun tersebut tetap mengacu dan mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Isi dan substansi dari Rencana kerja ini mencakup indikasi rencana program dan kegiatan prioritas, target kinerja, sumber dana, Lokasi dan prakiraan maju secara terperinci menurut fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Pengelolaan rencana kerja dilaksanakan secara terintegrasi melalui aplikasi SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

4.2. Pendanaan Program dan Kegiatan

Pendanaan Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Sumber pendanaan pada rencana kerja tahun 2026 bersumber dari DAU Bidang Pendidikan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Insentif Fiskal, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Daerah Provinsi. Penetapan rincian program, kegiatan, subkegiatan pada rencana kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 sebagai berikut.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA						**295.794.430.912,00**							**306.986.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**279.864.832.400,00**							**290.701.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**279.864.832.400,00**							**290.701.000.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi***	**-**			**100 persen**	**246.583.149.800,00**						**-**	**249.258.000.000,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			2 Laporan	161.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	167.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	151.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			3 Laporan	244.142.401.761,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	246.505.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3170 Orang/bulan	242.629.302.061,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		245.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1.452.049.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		1.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	61.049.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	7.099.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	20.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	7.099.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		15.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			2 Laporan	99.046.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	130.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		45.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	58.096.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor*	-			1 Laporan	195.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	195.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			2 Laporan	1.598.903.739,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	1.680.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	315.788.439,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.283.115.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			3 Laporan	379.698.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	555.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	217.499.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	29.997.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				240 Unit	132.202.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Persentase Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan Kondisi Layak Persentase Peserta Didik yang Telah Mencapai Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP)***	**-**			**100 persen 57.25 persen 73.56 persen 84.43 persen**	**33.137.682.600,00**						**-**	**41.238.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SD* *Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SD* *Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru* *Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SD*	-			3 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 7 Laporan	14.966.788.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	20.735.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	366.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	356.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2000 Peserta Didik	264.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				450 Orang	6.045.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		6.130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1090 Orang	120.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				335 Satuan Pendidikan	75.699.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				1314 Orang	111.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	14.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	15.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	15.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	49.150.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	35.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	3.423.238.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		7.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				390 Orang	295.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				335 Satuan Pendidikan	588.300.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				34367 Peserta Didik	3.146.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		3.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SMP* *Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SMP* *Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru* *Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SMP*	-			3 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 7 Laporan	13.539.699.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	15.545.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	5.479.173.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		6.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	2.925.551.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	210.801.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				18598 Peserta Didik	2.566.014.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1660 Peserta Didik	287.366.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				72 Orang	960.375.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				319 Orang	98.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				67 Satuan Pendidikan	22.031.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				100 Orang	26.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				85 Orang	20.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	23.050.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				85 Orang	20.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Pengembangan kawasan aerotropolis	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	32.650.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	25.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				67 Satuan Pendidikan	613.585.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				490 Orang	197.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang PAUD* *Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang PAUD* *Jumlah Laporan Peningkatan Kompetensi Guru*	-			1 Laporan 7 Laporan 4 Laporan	4.146.119.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD	-	4.380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				387 Peserta Didik	50.754.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1470 Orang	2.982.870.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		3.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				330 Orang	60.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				825 Satuan Pendidikan	90.294.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				825 Orang	164.478.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	33.840.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	7.315.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			0				2 0	25.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	8.412.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				814 Orang	215.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				0 Paket	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				825 Satuan Pendidikan	308.154.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang Kesetaraan*	-			6 Laporan	485.075.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan	-	578.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				230 Peserta Didik	266.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				23 Orang	75.175.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	9.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				12 Satuan Pendidikan	63.150.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				10 Orang	12.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				50 Peserta Didik	32.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	***Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi dengan Satuan Pendidikan***	**-**			**1 Kurikulum**	**65.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi*	-			1 Laporan	65.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan	-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***Persentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi Standar Jumlah Pendidik***	**-**			**41.88 persen**	**79.000.000,00**						**-**	**105.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan*	-			2 Laporan	79.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan	-	105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	24.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.929.598.512,00**							**16.285.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**15.542.979.512,00**							**15.885.000.000,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaaan, Sosial Kemasyarakatan, dan Wirausaha***	**-**			**36.33 persen**	**994.435.100,00**						**-**	**885.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan*	-			3 Laporan	99.435.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo	-	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				80 Orang	50.244.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	37.162.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				5 Orang	12.028.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan*	-			1 Laporan	895.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kulon Progo	-	765.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	895.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kulon Progo		765.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Persentase Atlet yang Mengikuti Pembinaan Intensif.***	**-**			**55.78 persen**	**14.548.544.412,00**						**-**	**15.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga*	-			1 Laporan	10.281.544.412,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Atlet di wilayah Kabupaten Kulon Progo	-	10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				3 Unit	10.281.544.412,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Atlet di wilayah Kabupaten Kulon Progo		10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah*	-			1 Laporan	4.267.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Atlet di wilayah Kabupaten Kulon Progo	-	5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah														
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				744 Orang	4.267.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Atlet di wilayah Kabupaten Kulon Progo		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**386.619.000,00**							**400.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya***	**-**			**26.87 persen**	**386.619.000,00**						**-**	**400.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.08	Pendidikan Berbasis Budaya	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya*	-			1 Laporan	386.619.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan	-	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal				1 Laporan	386.619.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	J U M L A H							**295.794.430.912,00**							**306.986.000.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2026 merupakan dokumen yang memuat arah pelaksanaan program kegiatan, dan alat untuk menjaga konsistensi perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan tahun 2026. *Renja* memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, penetapan target kinerja, usulan program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan masing-masing program.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi rencana kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik berintegritas yang diemban oleh dinas. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh pihak yang terkait sangat diharapkan dalam pelaksanaan isi rencana kerja ini. Oleh karenanya, beberapa kaidah pelaksanaan yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Renja tahun 2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dengan pelaksanaan harian oleh Kelompok Kerja Perencanaan Sekretariat Dinas.
2. Perencanaan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kulon Progo dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo
3. Setiap unit di lingkungan Dinas (Sekretariat, Bidang, UPTD) agar mempersiapkan rencana kerja anggaran, melaksanakan, mengendalikan dan menyusun laporan dengan cermat, tertib dan akuntabel.
4. Dalam mempersiapkan rencana/program/kegiatan tersebut, setiap unit di lingkungan dinas (Sekretariat, Bidang, UPTD) agar sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing harus mengacu dan mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dalam Renja Dinas Tahun 2026.
5. Untuk keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan perlu dilakukan penguatan peran stakeholder baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya.

6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2026 dilakukan pemantauan dan evaluasi:
   a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dilakukan oleh masing-masing unit di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
   b. Sekretaris Dinas mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seluruh program/kegiatan dan menyusun laporan.
   c. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan urusan bidang pendidikan, dan bidang pemuda olahraga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 serta sebagai acuan kegiatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Wates, 29 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. NUR WAHYUDI., M.M.
Pembina Utama Muda/ IV/C
NIP. 19690705 198903 1 005

KABUPATEN KULON PROGO

RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN

2026

DINAS KESEHATAN



Email : dinkes@kulonprogokab.go.id
Website : http//www.dinkes.kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Dokumen Rencana Kerja **(Renja)** Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 disusun berdasarkan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya dokumen ini. Semoga Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam upaya mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang sehat dan sejahtera. Aamiin.

Wates, 29 Juli 2025

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Kulon Progo



dr. Sri Budi Utami, M.Kes

NIP. 19660529 199603 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistimatika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ……..... 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan …… 18
2.4 Review Terhadap RKPD..... 19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 23
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan …….. 23
3.3 Program dan Kegiatan ……. 25

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan ..…… 27
4.2 Pendanaan …… 30

BAB V PENUTUP 102

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja terdiri dari enam tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir serta penetapan. Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

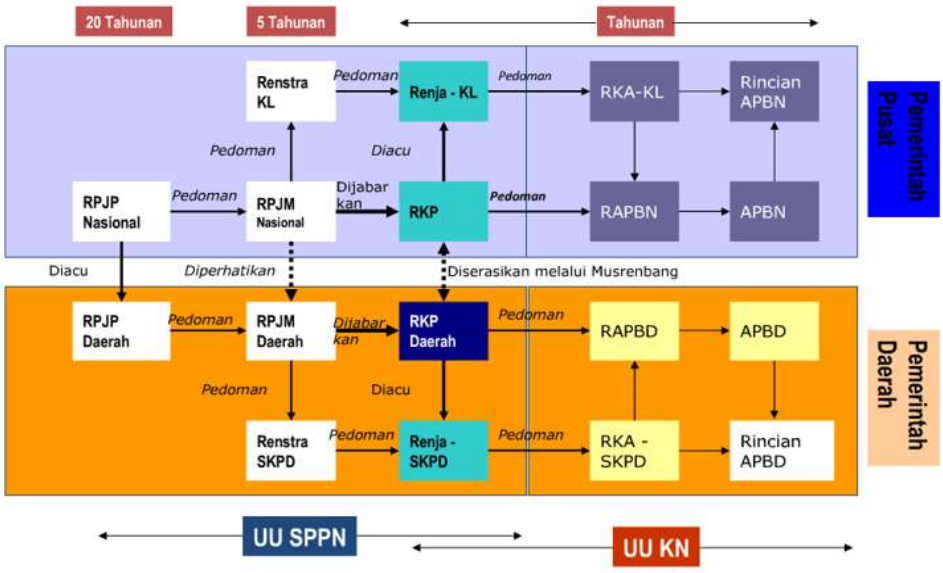
Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Kesehatan Kulon Progo disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Dinas Kesehatan Kulon Progo, serta berpedoman pada Renja Kementerian Kesehatan dan Renja Dinas Kesehatan DIY.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Kulon Progo akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati

dan Wakil Bupati Kulon Progo berakhir pada tahun 2022. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 dimaksud, akan diisi dengan penjabat gubernur/ penjabat bupati/ penjabat walikota sejak mulai tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Oleh sebab itu, salah satu konsekuensi logis dari kebijakan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa Kabupaten Kulon Progo tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah (RPJMD), menunggu pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Di sisi lain, RPJMD sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan rancangan APBD. Dalam tataran perangkat daerah, masing-masing OPD membuat rencana strategis di masa transisi juga

Proses penyusunan Rankir Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 didasarkan pada perubahan Renstra Dinas Kesehatan 2023 – 2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026. Tahun 2026 merupakan tahun keempat perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada RPD 2023 – 2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta sejalan dengan sasaran daerah nomer tiga yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Selanjutnya Renja perangkat daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.



Alur Perencanaan dan Penganggaran

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) .
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) .
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 81);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-

2026;

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomer 26);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah kalurahan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 76);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 13).
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 12 tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Nyi Ageng Serang;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang

Rencana Strategis Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;

29. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2026;
30. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026

1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud

   Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kesehatan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan kesehatan daerah.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah tahun 2026 adalah untuk:

   a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
   b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.
   c. Mengukur kinerja penyelenggara fungsi dan urusan perangkat daerah melalui pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
   d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistimatika penulisan

Sistimatika penulisan rencana kerja adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PADA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

2.4 Review terhadap RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja pada Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan membantu bupati dalam upaya mencapai sasaran pembangunan daerah nomer tiga yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan melaksanakan 5 program dan 15 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 4 kegiatan :
    a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota;
    b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
    c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
    d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; dengan 2 kegiatan :
    a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota; dengan
    b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman; dengan 2 kegiatan :
    a. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;

b. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; dengan 2 kegiatan :
   a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;
   b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dengan 5 kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian Renja untuk Urusan Kesehatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1.1 (T-C 29)
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target kinerja capaian program (renstra PD tahun terakhir 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target renja PD tahun 2024	Realisasi renja PD 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s.d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =7/6	9	10 = 5+7+9	11=(10/4)
01.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah yang dibuat dan disampaikan tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3020 orang/bulan	12 orang/bulan	12 orang/bulan	13 orang/bulan	108%	755 orang/bulan	755 orang/bulan	100%
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi umum**	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	**100%**
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	**100%**
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 unit	9 unit	37 unit	37 unit	100%	33 unit	33 unit	100%
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase pemenuhan UKP dan UKM**	**88,46%**	**82,09%**	**83,83%**	**79,04%**	**94,29%**	**83,09%**	**77,13%**	**92,83%**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasyankes pemerintah yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar**	**100%**	**100 %**	**73,91%**	**100%**	**135,30%**	**82,61%**	**100%**	**121,05%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target kinerja capaian program (renstra PD tahun terakhir 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target renja PD tahun 2024	Realisasi renja PD 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s.d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100%	8 unit	8 unit	100%
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 unit	4 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	8 unit	1 unit	3 unit	3 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	9 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	3 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar**	**81,22%**	**84,78%**	**81,22%**	**94,04%**	**115,78%**	**82,10%**	**74,66%**	**90,94%**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21540 orang	3984 orang	5360 orang	3413 orang	63,68%	5410 orang	755 orang	13,96%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20750 orang	3956 orang	5150 orang	3413 orang	66%	5200 orang	780 orang	15%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20750 orang	3952 orang	5150 orang	5150 orang	100%	5200 orang	754 orang	15%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84864 orang	19974 orang	21216 orang	19354 orang	91%	21216 orang	4022 orang	19%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135148 orang	32976 orang	33517 orang	51459 orang	154%	47643 orang	33517 orang	70%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	253867 orang	59725 orang	61218 orang	61218 orang	100%	66964 orang	61218 orang	91%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200805 orang	51932 orang	47950 orang	60828 orang	127%	50049 orang	47950 orang	96%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20012 orang	4883 orang	4963 orang	4963 orang	100%	10447 orang	4963 orang	48%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10500 orang	2562 orang	2604 orang	2604 orang	100%	3934 orang	2604 orang	66%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5853 orang	1410 orang	1455 orang	1455 orang	100%	1410 orang	1455 orang	103%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4 orang	3350 orang	3350 orang	3350 orang	100%	4078 orang	3188 orang	78%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4 orang	4113 orang	4181 orang	4181 orang	100%	4877 orang	4181 orang	86%
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target kinerja capaian program (renstra PD tahun terakhir 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target renja PD tahun 2024	Realisasi renja PD 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s.d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	1 orang	100%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	4 paket	0 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 unit	3 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		0,00%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	1 unit	100,00%
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang	336 orang	336 orang	100,00%	336 orang	336 orang	100,00%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 orang	0 orang	141 orang	141 orang	100%	141 orang	141 orang	100%
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	4624 orang	4564 orang	20 orang	20 orang	100,00%	20 orang	20 orang	100,00%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasyankes pemerintah yang menyelenggarakan SIK Terintegrasi		**61,76%**	**64,71%**	**70,00%**	108%	**67,65%**	**61,76%**	91%
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target kinerja capaian program (renstra PD tahun terakhir 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target renja PD tahun 2024	Realisasi renja PD 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s.d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasyankes yang melakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM)**	**100 %**	**81,82 %**	**81,82%**	**84,78%**	**104%**	**100%**	**88,64%**	**88,64%**
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	4 unit	1 unit	30 unit	30 unit	100,00%	23 unit	23 unit	100,00%
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
01.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan**	**69,96 %**	**9032 %**	**90,32%**	**97,88%**	**108,37%**	**59,22%**	**59,22%**	**100%**
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase nakes di fasyankes pemerintah yg memiliki SIP	**100%**	**97,81%**	**97,81%**	**96,68%**	**98,84%**	**88,04%**	**88,04%**	100%
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu**	**81,82%**	**100 %**	**63,64%**	**100%**	**157%**	**72,73%**	**100,00%**	**137%**
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 orang	2100 orang	21 orang	21 orang	100,00%	21 orang	21 orang	100,00%
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase nakes (Dokter, Drg, bidan, perawat) di fasyankes pemerintah yg dilakukan kredensialing**	**28,05%**	**73,16%**	**73,16%**	**96,96%**	**133%**	**26,00%**	**26,00%**	**100%**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	100%	21 orang	21 orang	100%
01.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	% Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	**91,72 %**	**75 %**	**88,33 %**	**72,22 %**	**81,76%**	**89,38%**	**65,65%**	**73,45%**
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg mendapatkan rekomendasi**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**88,89%**	**88,89%**	**100,00%**	**75,00%**	**75%**
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**% PIRT yang mendapatkan seritifikat PIRT**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100%**
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target kinerja capaian program (renstra PD tahun terakhir 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target renja PD tahun 2024	Realisasi renja PD 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s.d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yg memenuhi syarat**	**96,88%**	**85,71%**	**83,33%**	**85,67%**	**103%**	**87,50%**	**82,35%**	**94%**
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	4 unit	1 unit	24 unit	24 unit	100%	24 unit	24 unit	100%
01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan**	**50,41 %**	**6765 %**	**67,65 %**	**67,65 %**	**1**	**48,22%**	**48,22%**	**100%**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Desa Siaga kategori mandiri**	**46,59%**	**75%**	**48,22%**	**67,03%**	**139%**	**49,31%**	**70,14%**	**142%**
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu strata purnama mandiri**	**81,65%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**81,13%**	**99,79%**	**123%**
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**100%**	1 dokumen	1 dokumen	100%

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja di atas dapat terlihat bahwa mayoritas indikator kinerja tahun 2024 telah memenuhi target, namun terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target 100% yaitu sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil dan pengelolaan pelayanan kesehatan bersalin.

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan ibu hamil antara lain : migrasi masuk keluar daerah, kunjungan dalam kondisi triwulan III / mau melahirkan, adanya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) sehingga ibu hamil tidak kontrol sesuai jadwal atau K1 terlewati.

Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan ibu hamil antara lain : pendataan dan pendampingan ibu hamil oleh kader, mengoptimalkan WAG Rindu KIA kapanewon, edukasi ke masyarakat untuk melaporkan jika ada ibu hamil datang dan tinggal di wilayah. Koordinasi dengan lintas sektor terkait penanganan ibu hamil KTD.

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan ibu hamil antara lain : persalinan di rumah (brojol di rumah) atau perjalanan menuju fasyankes.

Upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin antara lain melakukan KIE tanda-tanda persalinan kepada ibu hamil dan keluarga pada saat kontrol maupun saat pertemuan kelas ibu, mengoptimalkan peran pendamping ibu hamil baik oleh kader maupun masyarakat sehingga jika sudah mendekati HPL segera berkomunikasi lebih intens dengan pendamping masing-masing.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Analisis ini menggunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, indikator SPM Kesehatan tertuang dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta mengacu Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Hasil capaian kinerja Dinas Kesehatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.1 (T.C 30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

no	Indikator	SPM	IKK	Target renstra 2023-2026				realisasi		proyeksi		
				2024	2025	2026	2027	2024	2025 tw 1	2026	2027	Catatan analisis
I	**Indikator Tujuan**											
	Umur Harapan Hidup			75,36	75,50 - 79,75	75,58 - 79,83		75,49	75,49			
II	**Indikator Sasaran**											
	Indeks Keluarga Sehat			0,31	0,33	0,36		0,31	0,34			
III	**Indikator Kinerja Utama**											
	Angka Kematian Ibu			68,69	61,12	62,56		58,53	123,15			
	Angka Kematian Bayi			7,3	10,39	10,32		10,24	14,78			
IV	**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**											
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk		V		0,16%	0,16%		0,16%	0,16%	0,16%		
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi		V	100%	100%	100%		100%	100%	100%		Tercapai
3	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	V	V	100%	100%	100%		91,29%	22,23%	100%		Belum tercapai
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	V	V	100%	100%	100%		99,85%	23,3%	100%		Belum tercapai
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	V	V	100%	100%	100%		98,71%	23,47%	100%		Belum tercapai

6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	V	V	100%	100%	100%		94,96%	21,28%	100%		Belum tercapai
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%		96,42%	96,42%	100%		Belum tercapai
8	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%		98,00%	23,87%	100%		Belum tercapai
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%		90,60%	29,54%	100%		Belum tercapai
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%		94,73%	47,5%	100%		Belum tercapai
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100%	100%	100%		98,07%	63,38%	100%		Belum tercapai
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	V	V	100%	100%	100%		93,54%	68,18%	100%		Belum tercapai
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	V	V	100%	100%	100%		93,30%	63,97%	100%		Belum tercapai
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	V	V	100%	100%	100%		94,39%	23,76%	100%		Belum tercapai

Pada tabel 2.2.1 diatas adalah data pencapaian kinerja sampai dengan triwulan IV, terlihat bahwa indikator penerapan SPM Bidang Kesehatan semua belum mencapai target (masih di bawah 100%). Beberapa hal yang menjadi kendala diantaranya :

1. Data proyeksi sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian kesehatan terlalu tinggi, sehingga ada gap yang cukup besar antara data target dengan data riil jumlah sasaran yang ada.
2. Masih adanya gap yang tinggi antara kebutuhan dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, sehingga belum bisa optimal dalam memberikan pelayanan SPM.
3. Pemenuhan kebutuhan logistik untuk pelayanan SPM belum bisa opimal meliputi alat kesehatan yang sesuai standar dan Bahan Medis Habis Pakai.
4. Belum optimalnya pengumpulan data pelaporan pelayanan dari fasyankes swasta, sehingga data pelayanan SPM yang terekap baru dari pelayanan di puskesmas, padahal masyarakat ada kemungkinan juga mengakses pelayanan di fasyankes swasta.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah meliputi :

a. Masih kurangnya pemenuhan kebutuhan tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah
b. Masih kurangnya sarana prasarana Kesehatan yang memenuhi standar Kementerian Kesehatan
c. Belum optimalnya peran aktif stakeholder dalam penggerakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.
d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

Permasalahan kesehatan yang masih dihadapi hingga tahun 2024 dapat diukur dengan tiga indikator yang merupakan gambaran dari keadaan derajat kesehatan masyarakat, yakni:

a. angka kematian ibu,
b. angka kematian bayi, dan
c. angka harapan hidup.

Dari tiga indikator tersebut, Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo merupakan angka tertinggi ke dua di DIY di bawah Kota Yogyakarta, akan tetapi masih terdapat kematian ibu dan kematian bayi yang membuat derajat kesehatan masyarakat belum optimal. Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, kendala yang dihadapi adalah:

- Masih adanya keterlambatan pihak keluarga dalam mengambil keputusan untuk mencari pertolongan
- Belum optimalnya penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal di rumah sakit
- Masih kurangnya kepedulian ibu dan pihak keluarga tentang bahaya ibu hamil risiko tinggi yang menyebabkan kematian ibu dan bayi.

Di samping hal di atas ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di sektor kesehatan yakni:

- Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang melakuka pelayanan kesehatan baik di sektor primer, sekunder maupun tersier sehingga pelayanan kesehatan tidak optimal
- Masih minimnya sarana dan prasarana kesehatan dalam menangani berbagai

penyakit baik menular maupun tidak menular

- Perlunya peningkatan koordinasi, komunikasi dan kerjasama internal, lintas sektor maupun lintas wilayah dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi:

a. Meningkatkan edukasi pada ibu hamil, keluarga dan masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan bayi.
b. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran jejaring komunikasi petugas kesehatan dan lintas sektor melalui “Rindu KIA” dalam upaya meningkatan pemantauan kesehatan bagi ibu dan bayi.
c. Mengintegrasikan aplikasi pemantauan “BumilKu” dan “Matahatiku” supaya lebih komprehensif dalam melakukan pemantauannya.
d. Meningkatkan mutu pelayanan ibu hamil dengan cara melakukan perbaikan Manual Rujukan Maternal Neonatal guna meningkatkan pelayanan di Puskesmas, Puskesmas mampu PONED, Rumah Sakit non PONEK, maupun Rumah Sakit.
e. Meningkatkan koordinasi intensif dengan Dokter Spesialis lainnya guna memantau kesehatan ibu selama kehamilan, saat persalinan sampai masa nifas
f. Meningkatkan kemampuan pelayanan PONEK penanganan ibu hamil risiko tinggi.
g. Mengoptimalkan pemanfaatan dana Jampersal meliputi pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan pembiayaan persalinan bagi penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan.
h. Meningkatkan sinergitas tenaga kesehatan terutama tenaga bidan baik di pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta dalam penanganan ibu hamil berisiko tinggi.
i. Meningkatkan peran aktif lintas sektor dalam mendukung penanganan ibu hamil terutama bumil yang berisiko tinggi.

2.4 Review terhadap RKPD

Renja Perangkat Daerah tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Kesehatan.

tabel T.C-31
Review terhadap Rancangan Akhir perubahan RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kulon Progo

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (ribuan)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (ribuan)	CATATAN PENTING
	DINAS KESEHATAN				**125.864.800**	**DINAS KESEHATAN**				**125.864.800**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB				**125.864.800**	**URUSAN PEMERINTAHAN**				**125.864.800**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				**125.864.800**	**URUSAN PEMERINTAHAN**				**125.864.800**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**		***Persentase Peningkatan Penunjang***	**100 persen**	**98.777.590**	**PROGRAM PENUNJANG**		***Persentase Peningkatan Penunjang***	**100 persen**	**98.777.590**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan		*Laporan Perencanaan, Penganggaran,*	2 dokumen	63.781	Perencanaan,		*Laporan Perencanaan, Penganggaran,*	2 dokumen	63.781	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Perencanaan*	1 Dokumen	39.742	Penyusunan Dokumen	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Perencanaan*	1 Dokumen	39.742	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja*	1 Laporan	24.038	Evaluasi Kinerja Perangkat	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja*	1 Laporan	24.038	
	Administrasi Keuangan Perangkat		*Laporan Administrasi Keuangan*	3 dokumen	96.923.576	Administrasi Keuangan		*Laporan Administrasi Keuangan*	3 dokumen	96.923.576	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan*	755	96.660.170	Penyediaan Gaji dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji*	755	96.660.170	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan*	1 Dokumen	238.300	Penyediaan Administrasi	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan*	1 Dokumen	238.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/*	1 Laporan	25.106	Koordinasi dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/*	1 Laporan	25.106	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Laporan Administrasi Umum Perangkat*	2 dokumen	127.978	Administrasi Umum		*Laporan Administrasi Umum*	2 dokumen	127.978	
	Penyediaan Peralatan dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Paket Peralatan dan*	1 Paket	63.950	Penyediaan Peralatan dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Paket Peralatan dan*	1 Paket	63.950	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat*	1 Laporan	64.028	Penyelenggaraan Rapat	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan*	1 Laporan	64.028	
	Pengadaan Barang Milik Daerah		*Laporan Pengadaan Barang Milik*	1 dokumen	61.363	Pengadaan Barang Milik		*Laporan Pengadaan Barang Milik*	1 dokumen	61.363	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana*	36 Unit	61.363	Pengadaan Sarana dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana*	36 Unit	61.363	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		*Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	2 dokumen	833.899	Penyediaan Jasa		*Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	2 dokumen	833.899	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa*	1 Laporan	382.067	Penyediaan Jasa	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa*	1 Laporan	382.067	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa*	1 Laporan	451.831	Penyediaan Jasa	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa*	1 Laporan	451.831	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		*Laporan Pemeliharaan Barang Milik*	3 dokumen	766.989	Pemeliharaan Barang Milik		*Laporan Pemeliharaan Barang Milik*	3 dokumen	766.989	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional*	33 Unit	437.173	Penyediaan Jasa	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional*	33 Unit	437.173	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan*	1 Unit	181.963	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan*	1 Unit	181.963	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung*	1 Unit	147.852	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung*	1 Unit	147.852	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA**		***% Pemenuhan UKP UKM***	**88,46**	**26.917.845**	**PROGRAM PEMENUHAN**		***% Pemenuhan UKP UKM***	**88,46**	**26.917.845**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan		*Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan*	4 dokumen	3.038.479	Penyediaan Fasilitas		*Laporan Penyediaan Fasilitas*	4 dokumen	3.038.479	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat*	1 Unit	524.266	Rehabilitasi dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat*	1 Unit	524.266	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang*	0 Unit	72.913	Pengadaan Alat	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat*	0 Unit	72.913	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan*	1 Paket	2.353.096	Pengadaan Obat, Bahan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai,*	1 Paket	2.353.096	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat,*	1 Paket	88.203	Distribusi Alat Kesehatan,	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan,*	1 Paket	88.203	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk		*Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan*	32 dokumen	23.775.925	Penyediaan Layanan		*Laporan Penyediaan Layanan*	32 dokumen	23.775.925	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan*	3391 Orang	106.976	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan*	3391 Orang	106.976	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan*	3349 Orang	19.635	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Ibu Bersalin yang*	3349 Orang	19.635	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang*	3329 Orang	34.364	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang*	3329 Orang	34.364	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Balita yang Mendapatkan*	19210 Orang	18.820	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Balita yang Mendapatkan*	19210 Orang	18.820	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar*	53063 Orang	116.450	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar*	53063 Orang	116.450	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang*	81400 Orang	48.448	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang*	81400 Orang	48.448	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang*	61406 Orang	129.110	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang*	61406 Orang	129.110	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Penderita Hipertensi yang*	13,000	22.700	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Penderita Hipertensi yang*	13,000	22.700	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang*	5,000 Orang	75.828	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus*	5,000 Orang	75.828	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Orang yang Mendapatkan*	1450 Orang	8.640	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Orang yang Mendapatkan*	1450 Orang	8.640	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Orang Terduga Menderita*	4318 Orang	76.435	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Orang Terduga Menderita*	4318 Orang	76.435	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV*	5710 Orang	153.540	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV*	5710 Orang	153.540	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	1 Dokumen	30.200	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	1 Dokumen	30.200	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	1 Dokumen	141.310	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	1 Dokumen	141.310	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	1 Dokumen	27.300	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	1 Dokumen	27.300	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (ribuan)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (ribuan)	CATATAN PENTING
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	1 Dokumen	162.253	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	1 Dokumen	162.253	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	1 Dokumen	94.176	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	1 Dokumen	94.176	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	1 Dokumen	47.449	Pengelolaan Surveilans	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	1 Dokumen	47.449	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan*	1 Dokumen	146.662	Pelayanan Kesehatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan*	1 Dokumen	146.662	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	1 Dokumen	20.873.016	Pengelolaan Jaminan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	1 Dokumen	20.873.016	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil*	1 Dokumen	18.550	Penyelenggaraan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil*	1 Dokumen	18.550	
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	10 Unit	12.010	Penyediaan Telemedicine	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	10 Unit	12.010	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Operasional*	1 Dokumen	136.515	Operasional Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Operasional*	1 Dokumen	136.515	
	Operasional Pelayanan Fasilitas	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Operasional*	1 Dokumen	376.754	Operasional Pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Operasional*	1 Dokumen	376.754	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang*	44 Unit	39.319	Pelaksanaan Akreditasi	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang*	44 Unit	39.319	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal*	1 Laporan	23.135	Investigasi Awal Kejadian	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal*	1 Laporan	23.135	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119)*	1 Unit	429.333	Penyediaan dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119)*	1 Unit	429.333	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang*	741 Orang	62.020	Pengelolaan pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis*	741 Orang	62.020	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang*	197 Orang	11.020	Pengelolaan pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV)*	197 Orang	11.020	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah orang yang mendapatkan*	11068 Orang	283.350	Pengelolaan pelayanan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah orang yang mendapatkan*	11068 Orang	283.350	
	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok*	1 Tatanan	43.800	Pengelolaan Kawasan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok*	1 Tatanan	43.800	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan*	1 Dokumen	6.800	Pengelolaan upaya	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan*	1 Dokumen	6.800	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi		*Laporan Penyelenggaraan Sistem*	1 dokumen	3.000	Penyelenggaraan Sistem		*Laporan Penyelenggaraan Sistem*	1 dokumen	3.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	1 Dokumen	3.000	Pengelolaan Sistem	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan*	1 Dokumen	3.000	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D		*Laporan Penerbitan Izin Rumah Sakit*	2 dokumen	100.440	Penerbitan Izin Rumah		*Laporan Penerbitan Izin Rumah Sakit*	2 dokumen	100.440	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang*	92 Unit	18.020	Peningkatan Mutu	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang*	92 Unit	18.020	
	Penyiapan Perumusan dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan*	1 Dokumen	82.420	Penyiapan Perumusan dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan*	1 Dokumen	82.420	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS**		***% Peningkatan kapasitas SDMK***	**69,96**	**86.609**	**PROGRAM PENINGKATAN**		***% Peningkatan kapasitas SDMK***	**69,96**	**86.609**	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga		*Laporan Pemberian Izin Praktik Tenaga*	1 dokumen	5.300	Pemberian Izin Praktik		*Laporan Pemberian Izin Praktik*	1 dokumen	5.300	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan*	1 Dokumen	5.300	Pembinaan dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan*	1 Dokumen	5.300	
	Perencanaan Kebutuhan dan		*Laporan Perencanaan Kebutuhan dan*	2 dokumen	76.929	Perencanaan Kebutuhan		*Laporan Perencanaan Kebutuhan dan*	2 dokumen	76.929	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Sumber Daya Manusia*	1248 Orang	25.212	Pemenuhan Kebutuhan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Sumber Daya Manusia*	1248 Orang	25.212	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan*	1 Dokumen	51.716	Pembinaan dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan*	1 Dokumen	51.716	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan		*Laporan Pengembangan Mutu dan*	1 dokumen	4.380	Pengembangan Mutu dan		*Laporan Pengembangan Mutu dan*	1 dokumen	4.380	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Sumber Daya Manusia*	43 Orang	4.380	Pengembangan Mutu dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Sumber Daya Manusia*	43 Orang	4.380	
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT**		***% Sediaan farmasi, alkes, makmin***	**91,72**	**25.912**	**PROGRAM SEDIAAN**		***% Sediaan farmasi, alkes, makmin***	**91,72**	**25.912**	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,		*Laporan Pemberian Izin Apotek, Toko*	1 dokumen	14.766	Pemberian Izin Apotek,		*Laporan Pemberian Izin Apotek, Toko*	1 dokumen	14.766	
	Pengendalian dan Pengawasan serta	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian*	1 Dokumen	14.766	Pengendalian dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian*	1 Dokumen	14.766	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan		*Laporan Penerbitan Sertifikat Produksi*	1 dokumen	4.656	Penerbitan Sertifikat		*Laporan Penerbitan Sertifikat Produksi*	1 dokumen	4.656	
	Pengendalian dan Pengawasan serta	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian*	1 Dokumen	4.656	Pengendalian dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian*	1 Dokumen	4.656	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil		*Laporan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut*	1 dokumen	6.490	Pemeriksaan dan Tindak		*Laporan Pemeriksaan dan Tindak*	1 dokumen	6.490	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi*	24 Unit	6.490	Pemeriksaan Post Market	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi*	24 Unit	6.490	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**		***Persentase Peningkatan***	**50,41**	**56.842**	**PROGRAM**		***Persentase Peningkatan***	**50,41**	**56.842**	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,		*Laporan Advokasi, Pemberdayaan,*	1 dokumen	38.955	Advokasi, Pemberdayaan,		*Laporan Advokasi, Pemberdayaan,*	1 dokumen	38.955	
	Peningkatan Upaya Promosi	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,*	1 Dokumen	38.955	Peningkatan Upaya	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,*	1 Dokumen	38.955	
	Pengembangan dan Pelaksanaan		*Laporan Pengembangan dan*	1 dokumen	17.887	Pengembangan dan		*Laporan Pengembangan dan*	1 dokumen	17.887	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan*	1 Dokumen	17.887	Bimbingan Teknis dan	Kab. Kulon Progo,	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan*	1 Dokumen	17.887	
					125.864.800					**125.864.800**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Kesehatan didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten dan kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan perangkat daerah di kabupaten diakomodir yang sesuai dengan bidang ketugasan Dinas Kesehatan dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan kegiatan di masyarakat. Aspirasi masyarakat terkait masalah kesehatan dapat juga disalurkan melalui Pokok Pikiran Dewan, kemudian usulan akan diteruskan pada Dinas Kesehatan.

Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan direncanakan. Terhadap beberapa masukan tersebut Dinas Kesehatan berusaha untuk menindaklanjuti dalam pelaksanaan kegiatan di masyarakat.

Tabel 2.5.1 (T-C 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2026
Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program : **Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				
	Kegiatan : **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Beberapa desa di wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Kulon Progo	Pemberian PMT Balita KEK	Sejumlah balita KEK yang ada di beberapa desa	Sudah terakomodir, dengan mempertimbangkan prioritas warga kurang mampu
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan	Beberapa desa di wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Kulon Progo	Pemberian Bantuan Jamban Sehat	Sejumlah KK kurang mampu di tiap desa	Sudah terakomodir, melalui verifikasi data warga miskin dari Dinas sosial.

Usulan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita KEK ini juga sesuai dengan pemenuhan kebutuhan untuk penanganan stunting yang merupakan salah upaya pencapaian target prioritas nasional. Usulan pemberian bantuan jamban sehat ini juga selaras dengan upaya mendukung kebijakan pusat dalam mewujudkan pencapaian Kabupaten Sehat, pada tahun 2026 pembangunan jamban diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan kebijakan nasional. Sesuai arahan RPJPN 2025-2045, sasaran jangka menengah 2025-2045 adalah terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran utama yaitu: 1) mencapai pendapatan perkapita setara negara maju, 2) kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan, 3) meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, 4) meningkatnya daya saing sumber daya manusia, dan 5) menurunnya intensitas emisi GRK menuju net zero emission.

Dalam mencapai kelima sasaran utama tersebut, maka agenda pembangunan nasional yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dengan tema pembangunan “Indonesia Emas 2045 : Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” adalah meliputi:

a. Mewujudkan transformasi sosial
b. Mewujudkan transformasi ekonomi
c. Mewujudkan transformasi tata kelola
d. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
e. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
f. Pembangunan kewilayahan
g. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
h. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas

3.2 Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah

Dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD 2025-2029 maka fungsi dan tugas Dinas Kesehatan terkait erat dengan

pencapaian tujuan pembangunan daerah nomor 1 : “Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas” serta sasaran nomer 1 : “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”. Adapun Tujuan dan Sasaran rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 (T.C 25)
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Dalam rencana jangka menengah

No	Kinerja Perangkat Daerah	IKU OPD	satuan	Kondisi awal	Target Kinerja OPD					Kondisi kinerja pada akhir periode renstra
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Tujuan**									
	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	tahun	75,49	75,50 – 79,75	75,58 – 79.83	75,65 – 79,90	75,73 – 79,98	75,80 – 80,05	75,88 – 80,13
		Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai			A (85,3)				
		Indeks maturitas SPIP	Nilai			3,231				
2	**Sasaran**									
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi Ibu Melahirkan/Bersalin	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	58,53	61,12	62,56	64,14	65,66	67,14	68,87
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi Bayi yang dilahirkan	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	10,24	10,39	10,32	10,26	10,18	10,07	9,99
		Prevalensi Stunting	%	20,10	18,80	16,20	16,30	15,20	14,20	13,20
	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat daerah				A (>80-90)				
		SPIP perangkat daerah				2,0-3,0				

Dari Tabel 3.2.1 dapat dijelaskan bahwa tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan adalah “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” yang diukur dengan indikator Umur Harapan Hidup dan Sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu melahirkan/bersalin” yang

diukur dengan indikator AKI dan “Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi bayi yang dilahirkan” yang diukur dengan indikator AKB dan prevalensi stunting.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan adalah :

a. Masih adanya kejadian kematian ibu melahirkan dan kematian bayi baru lahir, karena masih kurang kesadaran masyarakat untuk kontrol kehamilan secara teratur.
b. Belum optimalnya pelayanan skrining kesehatan di puskesmas oleh karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan secara teratur.
c. Belum optimalnya pelayanan skrining kesehatan di puskesmas oleh karena masih kurangnya pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan, banyak nakes yang yang sudah purna belum ada penggantinya.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Program
Dinas Kesehatan

no	Program	Indikator Kinerja Program	target
1.	**Program pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat**	Persentase FANYANKES yang Memiliki Sarana Prasarana Kesehatan yang Memenuhi Standar	91,84
		Persentase Pencapaian Layanan SPM Kesehatan	-
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100
		Pelayanan Kesehatan Balita	100
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	100
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodefeciency Virus)	100

no	Program	Indikator Kinerja Program	target
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Succes Rate)	91,29
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	100
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	99,18
2	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Wates	86
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS	85,75
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan**	Persentase Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dilakukan kredensial	97,64
4	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman**	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg dilakukan pendampingan	25,56
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yg mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	9,52
5	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	Persentase kel/kalurahan yang menerapkan GERMAS	47,73
6	**Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan**	Persentase FASYANKES yang Sudah Terakreditasi	47,83
7	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	28,57
8	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan.

Dalam memenuhi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang terkait erat dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah nomer dua : “Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya” serta terkait dengan pencapaian sasaran pembanugnan daerah nomer empat : “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”, maka Dinas Kesehatan melaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut:

4.1.1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Total rencana usulan anggaran Rp 26.917.845.399,- dengan 4 kegiatan :

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan :
    1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
    2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
    3. Pengadaan Obat, Vaksin
    4. Pengadaan Bahan Habis Pakai
    5. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan :
    1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
    2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
    3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
    4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
    5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
    6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
    7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
    8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
    9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
    10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV
13. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
17. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
18. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
19. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
20. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
21. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
22. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
23. Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat
24. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
25. Operasional Pelayanan Rumah Sakit
26. Operasional Pelayanan Puskesmas
27. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
28. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
29. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
30. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
31. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis
33. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
34. Pengelolaan Penyakit Malaria
35. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
36. Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
   sub kegiatan :
   1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan :
   1. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

2. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

4.1.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Total rencana usulan anggaran Rp 86.609.600**,**- dengan 2 kegiatan :

a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota; sub kegiatan :
   1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota; sub kegiatan :
   1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
   2. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

4.1.3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman;

Total rencana usulan anggaran Rp 25.912.800,- dengan 2 kegiatan :

a. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; sub kegiatan :
   1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
b. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga; sub kegiatan :
   1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

4.1.4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

Total rencana usulan anggaran Rp 56.842.500,- dengan 2 kegiatan :

a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota; sub kegiatan :
   1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan :

1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Program kegiatan tersebut di atas didukung sekretariat, yang mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut:

4.1.5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Total rencana usulan anggaran Rp 98.777.590.008,- dengan 6 kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat; sub kegiatan :
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; sub kegiatan :
   1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
   3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah; sub kegiatan :
   1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; sub kegiatan
   1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; sub kegiatan :
   1. Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
f. Peningkatan Pelayanan BLUD; sub kegiatan :
   1. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD RSUD Wates
   2. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD RSUD NAS
   3. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas

4.2. Pendanaan

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan prioritas Tahun 2026 dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DINAS KESEHATAN KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						**125.864.800.307,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**125.864.800.307,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**125.864.800.307,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 persen**	**98.777.590.008,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			2 dokumen	63.781.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	39.742.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	24.038.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			3 dokumen	96.923.576.960,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				755 Orang/bulan	96.660.170.060,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	238.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	25.106.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			2 dokumen	127.978.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	63.950.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	64.028.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 dokumen	61.363.640,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				36 Unit	61.363.640,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			2 dokumen	833.899.370,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	382.067.482,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	451.831.888,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			3 dokumen	766.989.938,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	437.173.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	181.963.638,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	147.852.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***% Pemenuhan UKP UKM***	**-**			**88,46 persen**	**26.917.845.399,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	-			4 dokumen	3.038.479.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	524.266.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	72.913.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	2.353.096.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	88.203.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			32 dokumen	23.775.925.699,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3391 Orang	106.976.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3349 Orang	19.635.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3329 Orang	34.364.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19210 Orang	18.820.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53063 Orang	116.450.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				81400 Orang	48.448.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				61406 Orang	129.110.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13,000 Orang	22.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5,000 Orang	75.828.360,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1450 Orang	8.640.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4318 Orang	76.435.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5710 Orang	153.540.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	30.200.383,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	141.310.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	27.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	162.253.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	94.176.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	47.449.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	146.662.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	20.873.016.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	18.550.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				10 Unit	12.010.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	136.515.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	376.754.756,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				44 Unit	39.319.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	23.135.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	429.333.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				741 Orang	62.020.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				197 Orang	11.020.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				11068 Orang	283.350.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	43.800.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	6.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi*	-			1 dokumen	3.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			2 dokumen	100.440.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				92 Unit	18.020.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	82.420.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***% Peningkatan kapasitas SDMK***	**-**			**69,96 persen**	**86.609.600,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Laporan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota*	-			1 dokumen	5.300.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	5.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Laporan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*	-			2 dokumen	76.929.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1248 Orang	25.212.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	51.716.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 dokumen	4.380.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				43 Orang	4.380.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***% Sediaan farmasi, alkes, makmin sesuai standar***	**-**			**91,72 persen**	**25.912.800,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Laporan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	-			1 dokumen	14.766.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	14.766.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Laporan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	-			1 dokumen	4.656.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	4.656.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Laporan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga*	-			1 dokumen	6.490.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				24 Unit	6.490.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan***	**-**			**50,41 persen**	**56.842.500,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 dokumen	38.955.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	38.955.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 dokumen	17.887.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	17.887.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H							**125.864.800.307,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES						**181.250.000.000,00**							**185.000.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**181.250.000.000,00**							**185.000.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**181.250.000.000,00**							**185.000.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Wates***	**-**			**86 %**	**181.250.000.000,00**						**-**	**185.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	181.250.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo; RSUD Wates	-	185.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	181.250.000.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo; RSUD Wates		185.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
	J U M L A H							**181.250.000.000,00**							**185.000.000.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RSUD NYI AGENG SERANG KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RSUD NYI AGENG SERANG						**41.665.983.000,00**							**45.006.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**41.665.983.000,00**							**45.006.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**41.665.983.000,00**							**45.006.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS***	**-**			**85,75 .**	**41.665.983.000,00**						**-**	**45.006.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	-			1 dokumen	41.665.983.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo	-	45.006.000.000,00	RSUD NYI AGENG SERANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	41.665.983.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo		45.006.000.000,00	RSUD NYI AGENG SERANG
	J U M L A H							**41.665.983.000,00**							**45.006.000.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS GALUR I KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS GALUR I						**1.286.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.286.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.286.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.286.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.286.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS GALUR I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.286.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS GALUR I
	J U M L A H							**1.286.000.000,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS GALUR II KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS GALUR II						**1.010.836.400,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.010.836.400,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.010.836.400,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.010.836.400,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.010.836.400,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS GALUR II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.010.836.400,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS GALUR II
	J U M L A H							**1.010.836.400,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS GIRIMULYO I KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS GIRIMULYO I						**1.132.197.375,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**995.197.375,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**995.197.375,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**995.197.375,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	995.197.375,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	995.197.375,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO I
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**137.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**137.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**137.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	137.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Penyandang Disabilitas	-	0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO I
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	137.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Penyandang Disabilitas		0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO I
	J U M L A H							**1.132.197.375,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS GIRIMULYO II KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS GIRIMULYO II						**1.436.183.599,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.436.183.599,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.436.183.599,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.436.183.599,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.436.183.599,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.436.183.599,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO II
	J U M L A H							**1.436.183.599,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS KALIBAWANG KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS KALIBAWANG						**2.482.672.800,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.385.432.800,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.385.432.800,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.385.432.800,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.385.432.800,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS KALIBAWANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.385.432.800,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS KALIBAWANG
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**97.240.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**97.240.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**97.240.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	97.240.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS KALIBAWANG
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	97.240.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS KALIBAWANG
	J U M L A H							**2.482.672.800,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS KOKAP I KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS KOKAP I						**1.546.921.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.546.921.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.546.921.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.546.921.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.546.921.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS KOKAP I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.546.921.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS KOKAP I
	J U M L A H							**1.546.921.000,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS KOKAP II KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS KOKAP II						**973.166.740,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**973.166.740,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**973.166.740,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**973.166.740,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	973.166.740,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS KOKAP II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	973.166.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS KOKAP II
	J U M L A H							**973.166.740,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS LENDAH I KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS LENDAH I						**1.586.953.645,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.586.953.645,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.586.953.645,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.586.953.645,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.586.953.645,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS LENDAH I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.586.953.645,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS LENDAH I
	J U M L A H							**1.586.953.645,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS LENDAH II KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS LENDAH II						**1.452.642.500,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.452.642.500,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.452.642.500,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.452.642.500,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.452.642.500,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS LENDAH II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.452.642.500,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS LENDAH II
	J U M L A H							**1.452.642.500,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS NANGGULAN KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS NANGGULAN						**2.407.130.397,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.407.130.397,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.407.130.397,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.407.130.397,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.407.130.397,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS NANGGULAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.407.130.397,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS NANGGULAN
	J U M L A H							**2.407.130.397,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS PANJATAN I KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS PANJATAN I						**1.592.512.800,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.592.512.800,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.592.512.800,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.592.512.800,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.592.512.800,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS PANJATAN I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.592.512.800,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS PANJATAN I
	J U M L A H							**1.592.512.800,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS PANJATAN II KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS PANJATAN II						**1.646.029.883,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.646.029.883,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.646.029.883,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.646.029.883,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.646.029.883,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS PANJATAN II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.646.029.883,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS PANJATAN II
	J U M L A H							**1.646.029.883,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS PENGASIH I KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS PENGASIH I						**1.693.014.573,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.693.014.573,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.693.014.573,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.693.014.573,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.693.014.573,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS PENGASIH I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.693.014.573,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Sendangsari	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS PENGASIH I
	J U M L A H							**1.693.014.573,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS PENGASIH II KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS PENGASIH II						**1.743.910.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.743.910.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.743.910.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.743.910.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.743.910.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS PENGASIH II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.743.910.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS PENGASIH II
	J U M L A H							**1.743.910.000,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SAMIGALUH I KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SAMIGALUH I						**1.657.070.699,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.657.070.699,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.657.070.699,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.657.070.699,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.657.070.699,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS SAMIGALUH I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.657.070.699,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS SAMIGALUH I
	J U M L A H							**1.657.070.699,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SAMIGALUH II KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SAMIGALUH II						**1.096.087.913,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.096.087.913,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.096.087.913,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.096.087.913,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.096.087.913,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS SAMIGALUH II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.096.087.913,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Pagerharjo	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS SAMIGALUH II
	J U M L A H							**1.096.087.913,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SENTOLO I KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SENTOLO I						**3.056.733.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.490.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.490.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.490.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.490.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS SENTOLO I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.490.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS SENTOLO I
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**566.733.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**566.733.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**566.733.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	566.733.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS SENTOLO I
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	566.733.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Sukoreno Kab. Kulon Progo, Sentolo, Kaliagung Kab. Kulon Progo, Sentolo, Sentolo Kab. Kulon Progo, Sentolo, Banguncipto	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS SENTOLO I
	J U M L A H							**3.056.733.000,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SENTOLO II KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SENTOLO II						**1.881.568.339,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.579.498.339,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.579.498.339,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.579.498.339,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.579.498.339,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS SENTOLO II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			0				0 0	1.579.498.339,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS SENTOLO II
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**302.070.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**302.070.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**302.070.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	302.070.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS SENTOLO II
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	302.070.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS SENTOLO II
	J U M L A H							**1.881.568.339,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS TEMON I KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS TEMON I						**2.351.640.572,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.223.500.572,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.223.500.572,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.223.500.572,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.223.500.572,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS TEMON I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.223.500.572,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS TEMON I
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**128.140.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**128.140.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**128.140.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	128.140.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS TEMON I
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	128.140.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS TEMON I
	J U M L A H							**2.351.640.572,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS TEMON II KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS TEMON II						**1.066.520.088,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**975.035.088,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**975.035.088,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**975.035.088,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	975.035.088,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS TEMON II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	975.035.088,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS TEMON II
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**91.485.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**91.485.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**91.485.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	91.485.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS TEMON II
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	91.485.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS TEMON II
	J U M L A H							**1.066.520.088,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS WATES KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS WATES						**2.881.600.513,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.881.600.513,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.881.600.513,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.881.600.513,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.881.600.513,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS WATES
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.881.600.513,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS WATES
	J U M L A H							**2.881.600.513,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023–2026 dalam menunjang pencapaian Target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Dinas Kesehatan mengimplementasikan kebijakan baru yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan harus dilaksanakan di daerah meliputi Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) serta Pencegahan dan Penanggulangan penyakit TB.

Kami menyadari bahwa belum semua sasaran target indikator dapat dicapai di tahun 2024, tetapi beberapa kegiatan telah kami upayakan untuk mencapainya di tahun 2025, untuk itu bantuan dari beberapa pihak terkait sangat kami harapkan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pembangunan bidang kesehatan.

Semoga dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman bagi pelaksana program pada khususnya dalam pelaksanaan kegiatan maupun pihak-pihak lain yang terkait pada umumnya.

Wates, 29 Juli 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo



dr. Sri Budi Utami, M.Kes
NIP. 19660520 199603 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

RENCANA KERJA TAHUN 2026



Alamat : Jl.Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo. Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092
Website : https://rsud.kulonprogokab.go.id, Email : rsud@kulonprogokab.go.id

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Dokumen Rencana Kerja RSUD Wates Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini disusun berdasarkan pada Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Dokumen ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan di RSUD Wates Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam upaya mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang sehat dan sejahtera. Aamiin.

Wates, 29 Juli 2025

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

dr. Eko Budiarto, M.Kes.,Sp.An
NIP. 19780604 200312 1 003

D A F T A R I S I

BAB I	PENDAHULUAN	5
	1.1 Latar Belakang	5
	1.2 Landasan Hukum	6
	1.3 Maksud dan Tujuan	8
	1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD WATES TAHUN 2024	10
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu	10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Wates	15
	2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Wates	16
	2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN	14
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	19
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Wates	19
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
	4.1 Program dan Kegiatan	21
BAB V	PENUTUP	26

D A F T A R T A B E L

Tabel 2.1	Capaian Kinerja AnggaranTahun Anggaran 2024	10
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Wates Tahun 2024	11
Tabel 2.3	Indikator Cakupan Kinerja BLUD	11
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evauasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024	13
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo	15
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RSUD Wates	19
Tabel 4.1	Rencana Pendapatan dan Belanja Rsud Wates Tahun 2026	22
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Wates Tahun 2026 dan Prakiraan Maju 2027	24

B A B I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,mengamanatkan perangkat daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2026, RSUD Wates menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (RPD) Tahun 2023-2026 dan Renstra RSUD Wates 2023-2026.

Dalam dokumen Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2026 ini memuat evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (RPD) Tahun 2023-2026 dan Renstra RSUD Wates 2023-2026 , Rancangan RKPD 2026, dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, yang selanjutnya digunakan untuk proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lainnya yaitu RAPBD.

RSUD Wates merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh sejak tahun 2009, sehingga dokumen perencanaannya telah menyesuaikan dengan peraturan perundangan sebagai BLUD.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026;
6. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Bidang Perumah Sakitan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 30 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 14 Tahun 2021 Tentang Standar KegiatanUsaha dan Prodak pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis ResikoSektor Kesehatan;
14. Kepmendagri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
18. Peraturan Bupati Nomor: 65 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan LayananUmum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates Pada Dinas Kesehatan;
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
22. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 546 tahun 2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Wates.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya di RSUD Wates.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2026 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya, penganggaran, evaluasi dan pelaporan program kegiatan tahunan;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Menjadi acuan pengukuran capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan di RSUD Wates;

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD WATES.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Wates;
- 2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Wates;
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS RSUD WATES.

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Wates.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

- 4.1. Rencana Kerja;
- 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP.

B A B I I
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD WATES

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menerangkan bahwa RSUD dengan BLUD menggunakan satu program dengan satu kegiatan, sejak tahun 2014 RSUD Wates sudah menerapkan satu program dan satu kegiatan. Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan di RSUD Wates mengalami perubahan dan dilakukan penyesuaian. Pada tahun 2024 RSUD Wates melaksanakan 1 program, 2 kegiatan, dan 2 sub kegiatan, adapun perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja AnggaranTahun Anggaran 2024

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.**	**174.415.015.705**	**167.453.351.631**	**96,01%**
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.(DAK 2024)			
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	9.523.930.000	8.576.341.342	90,05%
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.			
	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.	164.891.085.705	158.877.010.289	96,35%

Dari tabel di atas capaian kinerja keuangan RSUD Wates tahun 2024 untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar 96,01%, capaian kinerja keuangan ini sangat melebihi target yang ditetapkan.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan rangkaian Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (RPD) Tahun 2023-2026 Capaian indikator kinerja RSUD Wates tahun 2024:

Tabel 2.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Wates Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025
1	Nilai Kinerja BLUD	%	80	81,28	81,50

Pada tahun 2024 terdapat perubahan indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran yaitu Indikator Capaian Kinerja Program RSUD Wates yang semula adalah Capaian Kinerja Mutu dan Manfaat, berubah menjadi Cakupan Kinerja BLUD, perubahan indikator ini mengacu pada Renstra RSUD Wates Tahun 2023-2026 dan berdasar pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah.

Pada tahun 2024 capaian Indikator Cakupan Kinerja BLUD teralisasi sebesar 81,28% dari target sebesar 80%, sehingga pencapaian target pada beberapa komponen indikator yang telah ditetapkan telah mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2.3
Indikator Cakupan Kinerja BLUD

N0	INDIKATOR	Target (%) 2024	Capaian (%) 2024
A	**Indikator Kinerja Keuangan**		
1	Rentabilitas/Return on asset	4%	2,6
2	Likuiditas/Current Ratio	160%	195,39
3	Solvabilitas/Debt to asset ratio	35%	7,62
4	Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran	104%	96,68

N0	INDIKATOR	Target (%) 2024	Capaian (%) 2024
B	**Indikator Kinerja Pelayanan**		
5	Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain (>=80%)	84%	100
6	Kepatuhan identifikasi pasien (100%)	100%	93,12
7	Kepatuhan Kebersihan Tangan (>=85%)	87%	92,5
8	Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (100%)	100%	99,3
9	Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium RS (>= 80%)	82%	85,91
10	Kepatuhan terhadap clinical pathway (>=80%)	82%	99,7
11	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%)	100%	97,43
12	Kepatuhan waktu visite dokter (>=80%)	84%	86,57
13	Kepuasan pasien(>76.61%)	80%	85,78
14	Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%)	100%	100
15	Penundaan operasi elektif (<5%)	4%	1,65
16	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi (>80%)	80%	54,57
17	Waktu tunggu rawat jalan (>=80%)	82%	82,91
	Jumlah A+B	1349	1381,73
	Rata-Rata	80%	81,28%

Tabel 2.4.

Rekapitulasi Evauasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
	URUSAN WAJIB									
	BIDANG URUSAN KESEHATAN									
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	83%	85%	83%	85 %	100%	84%	100%	100%
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya operasional dan pelayanan RSUD Wates	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.									
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.									

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Wates Tahun 2024 s/d 2026.

Capaian kinerja pelayanan RSUD Wates terdiri dari capaian kinerja berdasar pada indikator kinerja Rencana Strategis RSUD Wates Tahun 2023-2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum. Selanjutnya tabel 2.5. menunjukkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja RSUD Wates tahun 2024 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis RSUD Wates Tahun 2023-2026

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasionall	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%		83 %	84 %	85 %	86 %	85%	85 %	84 %	85 %	.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Wates.

A. Tingkat Kinerja RSUD Wates.

Kinerja RSUD Wates Tahun 2024 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sebesar 85% dari target sebesar 83%, sudah melebihi target yang ditetapkan pada Renstra 2023-2026.

B. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi RSUD Wates.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi RSUD Wates terdapat beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelayanan, diantaranya:

1) Sarana prasarana alat kesehatan kurang lengkap untuk memenuhi layanan kesehatan yang sesuai kebutuhan masyarakat;
2) Akses jalan di sekitar RSUD Wates belum dapat dilalui oleh transportasi umum dari berbagai arah;
3) Keterbatasan kemampuan keuangan untuk pengembangan layanan;
4) Ketersediaan SDM belum semua sesuai standar;
5) Belum optimalnya pelayanan prima kepada pelanggan;
6) Kebijakan rujukan berjenjang;
7) Sistem penjaminan belum tersosialisasi secara optimal kepada masyarakat;
8) Sebagian penduduk Kulon Progo yang belum berpenjaminan;
9) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM belum optimal;
10) Belum optimalnya Kerjasama yang dibangun antara RSUD Wates dengan institusi Pendidikan;
11) Masih rendahnya pelaksanaan penelitian di RSUD Wates;
12) Belum efektifnya kegiatan/program sosialisasi/promosi layanan RSUD Wates kepada masyarakat luas.

Visi RSUD Wates adalah "***Rumah Sakit Rujukan Berbasis Kearifan Lokal Menuju Pelayanan Berstandar Internasional***". Sedangkan Misi RSUD Wates sebagaimana tercantum dalam Renstra adalah "***Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pendidikan yang Profesional berbasis Kearifan Lokal untuk Kepuasan Pelanggan***".

Dalam melaksanakan visi, misi, tugas dan fungsi RSUD menetapkan motto dan slogan untuk menjadi motivator kerja. Adapun motto di RSUD Wates adalah "Mengutamakan Mutu dan Kepuasan Pelanggan" , sedangkan slogannya adalah "Ikhlas Sepenuh Hati" . Iklas sepenuh hati dapat dijabarkan sebagai berikut:

- *I = Iman*, bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates selalu menjadikan Iman sebagai landasan utama dalam bekerja.
- *K = Konsisten*, bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates selalu Konsisten dalam memberikan kinerja terbaik sesuai dengan kompetensi masing – masing.
- *H = Handal,* bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates wajib menguasai bidang kerja masing – masing dan senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan dirinya untuk selalu dapat Diandalkan.
- *L = Loyal*, bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates, memiliki janjidan komitmen terhadap kesetiaan, kejujuran, serta loyal dan menjunjung tinggi institusi.
- *A = Akurat* bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates selalu mengikuti prosedur dalam bekerja, menghindari kesalahan baik data maupuntindakan serta selalu menyajikan data dengan lengkap dan tepat.
- *S = Sigap* bahwa setiap insan yang bekerja di RSUD Wates wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggan baik internal maupun eksternal dengan sigap, cepat dan disiplin serta menyenangkan bagi pelanggan.
- IKHLAS sebagaiman telah dijabarkan di atas dilaksanakan dengan sepenuh hati.

C. Formulasi Isu-isu Penting.

Beberapa isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026 antara lain:

1) Berkembangnya teknologi kedokteran sesuai ilmu pengetahuan teknologikedokteran dan kesehatan;
2) Rumah Sakit Unggulan Menuju Pelayanan Berstandar Internasional;
3) Pengembangan layanan unggulan diantaranya: KJSU-KIA; Tuberkolosis.

4) Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan;
5) Sebagai RSUD dengan 8 layanan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

RSUD Wates sampai saat ini belum menerima usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, pergururuan tinggi yang disampaikan secara tertulis. Adapun beberapa usulan berdasarkan hasil konsultasi publik/gathering forum OPD bidang kesehatan dengan para pemangku kepentingan *(stakeholder)* dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan untuk perkembangan pelayanan di RSUD Wates yang kemudian ditindaklanjuti melalui program/kegiatan yang sudah direncanakan

B A B I I I
PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS RSUD WATES

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Wilayah Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan tujuan pengembangan kawasan pariwisata Borobudur, selain itu dengan beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta yang berada di Kecamatan Temon secara langsung akan berpengaruh terhadap tingkat kepadatan lalulintas, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kunjungan wisatawan lokal maupun internasional sehingga diperlukan sarana prasarana kesehatan unggulan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

RSUD Wates sebagai Rumah Sakit Rujukan Tipe B Pendidikan, pada saat ini terus melakukan pengembangan pelayanan Kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat khususnya Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi D.I. Yogyakarta pada umumnya. Dalam menjalankan fungsi pelayanannya, RSUD Wates berkomitmen untuk memenuhi standar pemerintah dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien.

Bahwa RSUD Wates ditetapkan menjadi salah satu rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1339/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi; dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1277/2024 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung Dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, Dan Kesehatan Ibu Dan Anak.

Dalam rangka pengembangan RSUD Wates selama kurun waktu 3 tahun kedepan Tahun 2023-2026, selain dana APBD ditingkat Kabupaten sangat diperlukan dukungan pendanaan baik dari APBD Provinsi maupun APBN, oleh karena itu dalam proses perencanaannya RSUD Wates selalu mengacu pada kebijakan-kebijakan serta prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Wates.

Tujuan dan Sasaran RencanaKerja RSUD Wates tahun 2026 didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Wates yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis OPD disesuaikan dengan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD Wates, kegiatan untuk mencapai indikator kinerja program dan penyusunan target tahun 2026 harus realistis sehingga capaian kinerja dapat optimal. Berikut tabel tujuan dan sasaran RSUD Wates Tahun 2026.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran RSUD Wates Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Kinerja BLUD	82%

B A B I V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan.

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

   1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;

      Program, kegiatan, dan sub kegiatan di RSUD ditetapkan untuk mendukung pencapai visi dan misi kepala daerah khususnya misi kesatu yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya, dan Religius”.

   2) Pencapaian Standar Nasional terkait dengan Indikator Nasional Mutu (INM); Program, kegiatan, dan sub kegiatan di RSUD ditetapkan untuk mencapai standar nasional terkait Indikator Nasional Mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan Bidang Kesehatan Pasal 32.

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

   1) Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

      Tahun 2026 RSUD Wates menerapkan 1 program dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

   2) Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan di RSUD Wates untuk pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo dan sekitarnya;

   3) Total Kebutuhan Dana.

      Kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di RSUD Wates pada tahun 2026 dipenuhi dengan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD. Total anggaran RSUD Wates yang dananya bersumber non BLUD adalah dana untuk membayarkan gaji dan tunjangan bagi PNS, dan diharapkan adanya dana dari APBD DIY, dan Dana APBD Kabupaten Kulon Progo, serta Dana Alokasi Khusus dari

Pemerintah Pusat, sedangkan lainnya bersumber dari dana BLUD RSUD Wates.

Target pendapatan BLUD pada Tahun 2024 pada RENSTRA RSUD Wates Tahun 2023-2026 sebesar Rp. 80.000.000.000. Pada Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2024 pendapatan ditetapkan sebesar Rp. 119.000.000.000,-, kemudian dirubah pada Perubahan APBD Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp. 132.000.000.000,-.

Pada Tahun anggaran 2025 untuk belanja pada rekening belanja tidak langsung dengan rincian Belanja Gaji PNS dan Tunjangan sudah tidak tercantum dalam struktur pendapatan dan belanja RSUD Wates, hal ini dikarenakan menjadi satu pada rekening belanja tidak langsung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

Pada Tahun berjalan Tahun 2025, target pendapatan BLUD ditetapkan sebesar Rp. 132.500.000.000,- dan pada perubahan Tahun 2025 diasumsikan mengalami peningkatan menjadi Rp. 180.930.000.000,-

Pada Renstra RSUD Wates Tahun 2023-2026 asumsi pendapatan BLUD RSUD Wates pada tahun 2026 adalah sebesar Rp. 91.000.000.000,- namun demikian berdasarkan realisasi pada tahun 2024 serta Asumsi peningkatan pendapatan Tahun 2025 maka asumsi pendapatan BLUD Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 181.250.000.000,- sehingga rencana belanja seharusnya juga sebesar dana pendapatan yaitu Rp. 181.250.000.000,- rencana anggaran RSUD Wates secara lebih terperinci dapat dilahat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA RSUD WATES TAHUN 2026

No	Uraian		Asumsi Pendapatan Tahun 2026
1	**Asumsi Pendapatan**		
	A	**Pendapatan dari BLUD ***	**181.250.000.000.00**
		1.Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	177.300.000.000,00
		2.Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.100.000.000,00
		3. Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	43.021.000,00
		4. Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	735.000.000,00
		5. Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	1.071.979.000,00
	B	**Hibah**	**0**
	C	**Pendapatan APBD**	**0**
		1. Gaji PNS dan Tunjangannya	0
		2. Pendampingan DAK	0
		3. Pelayanan Covid-19	0
	D	**Pendapatan APBD DIY**	**0**
		1.Dana BKK	0
	E	**Pendapatan APBN**	**0**
		1.DAK	0
Jumlah Pendapatan (1)			**181.250.000.000.00**
2	**Belanja**		
	Belanja Tidak Langsung		**0**
	1	Belanja Gaji PNS dan Tunjangan	0
	2	Pembayaran Angsuran dan Bunga Bank	0
	Belanja Langsung		**181.250.000.000.00**
	1	Belanja Pegawai BLUD	15.500.000.000,00
	2	Belanja Barang dan Jasa BLUD	153.350.000.000,00
	3	Belanja Modal	12.400.000.000,00
		- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.500.000.000,00
		- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.900.000.000,00
Jumlah Belanja (2)			**181.250.000.000.00**
Defisit (3) = (1-2)			**0**
3	**Pembiayaan**		
	1. Penerimaan Pinjaman		0
	2. Pembayaran Pokok Pinjaman		0
	3. Pembayaran Bunga Pinjaman		0
	4. Proyeksi Silpa		0
Jumlah Pembiayaan (3)			**0**
Surplus/Defisit = (1-(2+3))			**0**

a. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Rancangan RKPD/Renstra OPD tahun (2023-2026), baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

   Program dan kegiatan RSUD Wates tahun 2026 disesuaikan dengan Kepmendagri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b. Tabel Rumusan Rencana Program, dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

   Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD WATES Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kulon Progo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES						**181.250.000.000,00**							**185.000.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**181.250.000.000,00**			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. -	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia -			**185.000.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**181.250.000.000,00**							**185.000.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	-			**100 %**	**181.250.000.000,00**						-	**185.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			440 orang/bulan	0,00					-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				0 0	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	181.250.000.000,00					Masyarakat Kulon Progo; RSUD Wates	-	185.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

B A B V
P E N U T U P

Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2026 ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun 2026 yang dibiayai dengan BLUD RSUD Wates. Beberapa hal perlu yang menjadi catatan penting dalam pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2026 adalah :

1. Catatan Penting.

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran adalah bahwa RSUD Wates merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga dalam pelaksanaan dan ketersediaan dananya tidak seperti OPD pada umumnya di lingkungan pemerintah kabupaten. RSUD Wates sebagai PPK BLUD melaksanakan kegiatan dan anggarannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi BLUD yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. Penyusunan Program/Kegitan/Subkegiatan mengacu pada Kepmendagri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

   Tahun 2026 RSUD Wates menggunakan satu program, satu kegiatan, dan satu sub kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

   Kaidah pelaksanaan anggaran RSUD Wates akan menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai sumber pendanaannya.

3. Rencana Tindak Lanjut.

   Rencana tindak lanjut terhadap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di RSUD Wates adalah dengan mengoptimalkan pelayanan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk kepuasan pelanggan RSUD Wates.

Demikian Rencana Kerja RSUD Wates Tahun 2026 yang telah disusun sebagai pedoman untuk mencapai dan melaksanakan visi, misi, serta tujuan dari RSUD Wates yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk bekerja sama, baik masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, serta dukungan dari seluruh civitas RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 29 Juli 2025

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates



dr. Eko Budiarto, M.Kes.,Sp.An

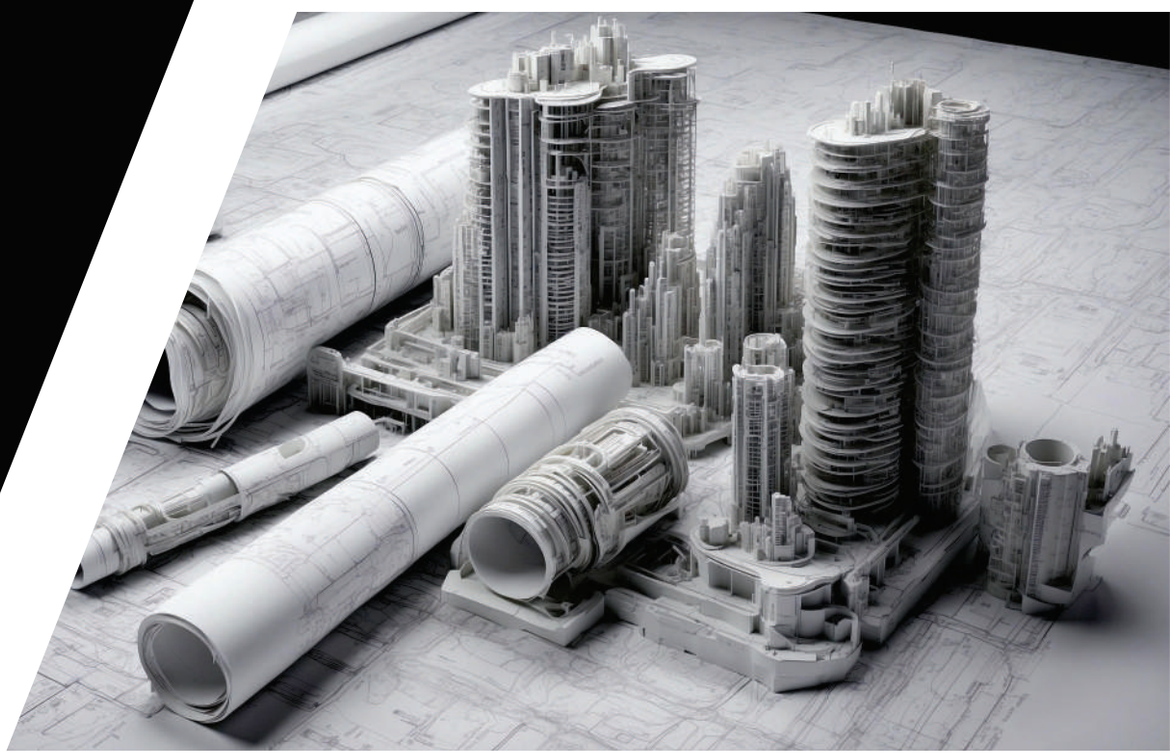
NIP. 19780604 200312 1 003

RENCANA KERJA
RSUD WATES
DINAS KESEHATAN
2026

Alamat : Jl.Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo. Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092

Website : https://rsud.kulonprogokab.go.id, Email : rsud@kulonprogokab.go.id

RENCANA KERJA



2026

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KULON PROGO

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar belakang 4

1.2 Landasan hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2024 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah 22

a. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 24

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 25

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 30

2.4. Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 33

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 42

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 45

3.1 **Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.** 45

3.1.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 47

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 49

BAB V PENUTUP .....

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026. Rencana Kerja TA 2026 ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun anggaran 2024, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan DPUPKP, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Kerja OPD, ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Wates 29 Juli 2025

Kepala Dinas,

DIDIK WIJANARTO, ST,.M.M.

NIP 19720314 199803 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

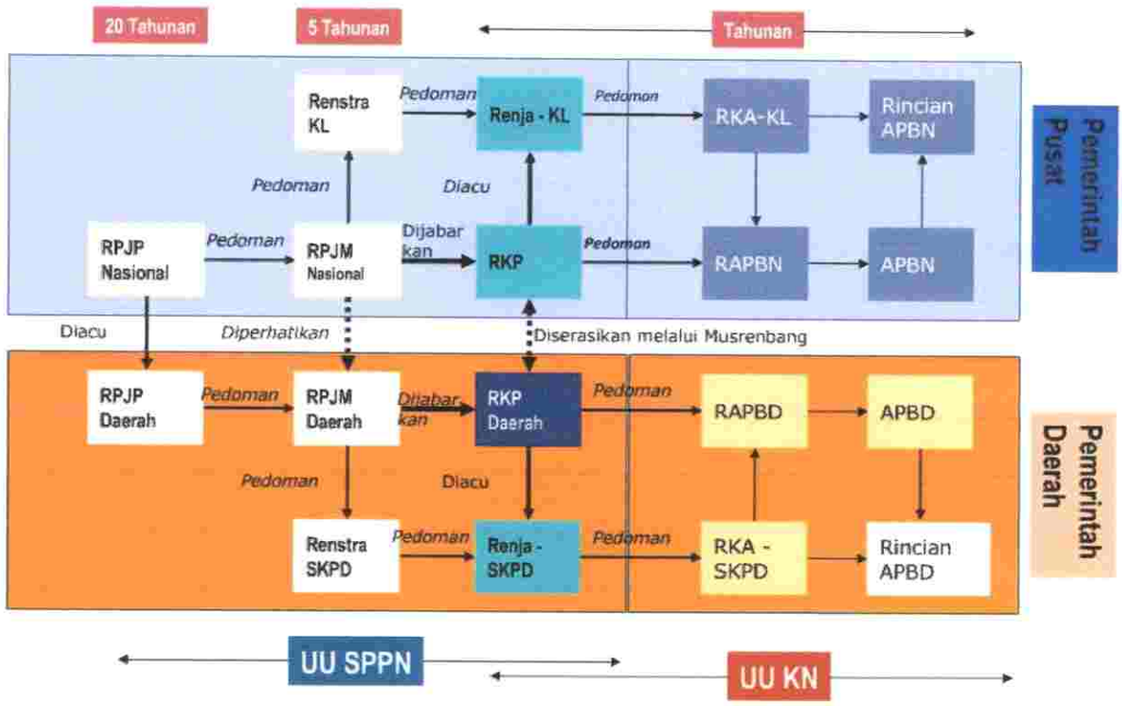
1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan..

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja DPUP-KP Kulon Progo disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra DPUP-KP Kulon Progo, serta berpedoman pada Renja Kementerian PPN/Bappenas dan Renja Bappeda DIY.

Proses penyusunan Renja DPUPKP Tahun 2026 didasarkan pada RKPD 2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rancangan akhir RKPD dan juga mengakomodir aspirasi masyarakat yang telah diusulkan melalui mekanisme perencanaan. Tahun 2026 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen Renja Tahun 2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DPUPKP serta sejalan dengan tujuan RPJPD Kulon Progo Tahun 2025-2029 yaitu "Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta lingkungan yang lestari dan tangguh bencana" yang sudah diselaraskan dengan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 yaitu "*Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, Maju Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan*"

Selanjutnya Rencana Kerja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kulon Progo.Keterkaitan Renja dengan dokumen RKPD, dokumen renja K/L dan Renja provinsi



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan perencanaan dan penganggaran SKPD adalah sebagai berikut:

1). Undang-undang Nomor 11Tahun 1974 tentang Pengairan;
2). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4). Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
5). Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,12,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

7). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8). Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

9). Permendagri RI No 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

10). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 tahun 2024 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

11). Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 - 2026;

12). Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo;

13). Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 124 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Konstruksi Dan Peralatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman

14). Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

15). Peraturan Bupati No 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo untuk tahun anggaran 2026 dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan daerah serta mewujudkan efisiensi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2.Tujuan

a. Tersedianya pedoman penyusunan strategi pencapaian target kinerja urusan pekerjaan umum dan urusan penataan ruang;

b. Tersedianya arahan program dan kegiatan beserta beban target sasaran kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Program Jangka Pendek Daerah kabupaten Kulon Progo 2025-2029 .

c. Tersedianya pedoman dan bahan sinergitas program dan kegiatan dalam proses pemaduserasian usulan dalam pelaksanaan forum OPD urusan pekerjaan umum dan urusan penataan ruang serta urusan lain yang terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir awal rencana kerja tahun anggaran 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil evaluasi rencana kerja tahun 2024
Bab III : Tujuan dan sasaran perangkat daerah
Bab IV : Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah
Bab V : Penutup

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan OPD. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C)

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas: membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman. Sesuai dengan Kemendagri No 900.1.3406 tahun 2024 selain Program dan Kegiatan juga adanya sub kegiatan pada tiap tiap kegiatan. Program dan kegiatan DPUPKP tahun 2024 sebanyak 12 (tiga belas) Program dan 22 (dua puluh dua) Kegiatan serta 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor
10. penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

11. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
12. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
13. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasiaonal atau lapangan

II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

G. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

14. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
15. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

H. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

16. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
17. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

III. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

I. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

18. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

IV. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

J. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

19. Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

V. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

K. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

20. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

21. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

VI. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

L. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

22. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
23. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot

VII. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

M. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

24. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

VIII. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

N. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

25. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
26. Rekonstruksi Jalan
27. Pembangunan Jalan
28. Pemeliharaan Berkala Jalan
29. Pemeliharaan Rutin Jalan
30. Rehabilitasi Jembatan
31. Pemeliharaan Rutin Jembatan
32. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

IX. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

O. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

33. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis

P. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

34. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

X. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Q. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

35. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Kota

R. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

36. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

S. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

37. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

XI. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

T. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)Ha

38. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

XII. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

U. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

39. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
40. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang

XIII. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG

V. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

41. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh
42. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo

Pengukuran kinerja program DPUPKP Kulon Progo Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.2. Pengukuran Kinerja Program DPUPKP 2024

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik	%	86,87	87.06
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	%	97,08	97,75
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	%	88.92	89
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan tertib administrasi	%	73.96	73.59
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	74.16	74.25

6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Uji Laboratorium, Layanan Alat Berat dan Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi	%	87.78	90.38
7	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	%	78,5	75.12
8	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	%	26.80	24.24
9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%	69.23	73.47
10	Program Kawasan Permukiman	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	%	7.09	10.40
11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	%	44.54	45.28

Adapun jumlah anggaran dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
1	143.558.208.774,00	140.22.3405.819	97.68	*Sumber simda 2024*

Rekapitulasi pelaksanaan renja PD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	2	2	2	100	2	6	0,7
	Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85	21	21	21	100	21	63	0,7
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								0	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94	94	94	94	100	94	282	3,0

	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	56	14	14	14	100	14	42	0,8
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	14	14	14	100	14	42	0,8
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	12	12	12	100	112	126	3,8
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	83	2	2	2	100	35	39	0,5
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	12	100	12	36	1,0
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	12	12	12	100	12	36	1,0

	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		36	12	12	12	100	12	36	1,0
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42	42	42	42	100	42	126	3,0
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34	34	34	34	100	34	102	3,0
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	4	4	100	4	12	3,0
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)									
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	302	300	302	302	100	304	906	3,0
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	30	5	5	5	100	5	15	0,5

	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
	Sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	3,1	2	1,2	1,2	100	1	4,2	1,4
	Sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5,2	1,8	1,2	1,2	100	2,5	5,5	1,1
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum									
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota									
	Sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1	1	1	1	100	120	122	122,0
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional									
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota									
	Sub kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	3	3	3	3	100	3	9	3,0
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah									

	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota									
	Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	704	447	173	173	100	172	792	1,1
	Sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1	1	1	1	100	1	3	3,0
	Program Penataan Bangunan Gedung									
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung									
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	800	180	180	180	100	180	540	0,7

	Sub kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	9	7	4	4	100	1	12	1,3
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya									
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota									
	Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		52	52	52		48	152	
	Program Penyelenggaraan Jalan									
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota									
	Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	0	0	7	7	100	7	14	
	Sub kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2	0,07	1,3	1,3	100	0,25	1,62	0,8

	Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	40	9,91	7,9	7,9	100	3,635	21,445	0,5
	Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	12	28,475	14,98	14,98	100	0,54	43,995	3,7
	Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	200	100	40	40	100	30	170	0,9
	Sub kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	60	0	2	2	100	1	3	0,1
	Sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	8	2	800	800	100	807	1609	201,1
	Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	360	40	40	40	100	40	120	0,3
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi									
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi									
	Sub kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	839	35	35	35	100	75	145	0,2
	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi									
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	100	12	350	350	100	220	582	5,8
	Program Pengembangan Perumahan									

	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									
	Sub kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		0	1	1	100	0	1	
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									
	Sub kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		0	3	3	100	4	7	
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus									
	Sub kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3	3	3	3	100	3	9	3,0
	Program Kawasan Permukiman									
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
	Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1600	300	200	200	100	172	672	0,4

	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman									
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)									
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan									
	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	60	34	80	80	100	71	185	3,1
	Sub kegiatan verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	4	1	5	5	100	3	9	2,3

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

A. Pencapaian Kinerja program

Kinerja tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Kulon Progo melaksanakan sebanyak 12 (tiga belas) Program dan 22 (dua puluh dua) Kegiatan serta 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

a. Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran

   Program administrasi perkantoran merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap perangkat daerah, sehingga capaiannya mencapai 100% dari renstra PD

b. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

   Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran berisikan kegiatan pengadaan maupun pemeliharaan sarana perkantoran. Capaian ketersediaan sarana perkantoran ini telah mencapai 100%

c. Capaian perencanaan , pengendalian, dan evaluasi kinerja

   Program perencanaan , .pengendalian dan evaluasi berisikan kegiatan penyusunan rencana Kerja, pelaporan keuangan, dan pengendalian & evaluasi. Semua dokumen tersusun sesuai target,yaitu 17 dokumen, Sehingga capaian dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi sebesar 100 %

d. Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap

   Tahun 2024 ini mencapai 74.16%. Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan ini berisikan kegiatan : pemeliharaan berkala jalan, peningkatan jalan, pemeliharaan rutin jalan, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pemeliharaan rutin jembatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan kabupaten telah mendukung sasaran daerah yaitu "Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah".

e. Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik.

   tahun 2024 Indikator ini telah mencapai target sebesar 86,77% Didalam program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air yang berisikan kegiatan : pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya, Pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong,Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai, Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif, Pemberdayaan Petani Pemakai Air, dan Penyelenggaraan kebijakan teknis irigasi, dari semua kegiatan telah mendukung tercapainya ketersediaan air baku untuk irigasi di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten.

f. Capaian uji laboratorium dan alat berat

tahun 2024 Indikator ini telah mencapai target sebesar 90.27 %. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana peralatan uji yang memadai serta didukung oleh peralatan berat yang tentunya juga mendukung tercapainya sasaran daerah melalui pembangunan infrastruktur jalan,

g. Capaian sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan tertib administrasi

tahun 2024 Indikator ini belum mencapai target yaitu 73.59% dari 73.96% dikarenakan pada tahun ini tidak ada pembangungan gedung baru. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum ini berisikan kegiatan pembangunan gedung kantor dan bangunan umum lainnya, Pembinaan dan pengawasan IMB dan Pembinaan jasa konstruksi, Dengan adanya kegiatan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi dapat dipastikan bahwa konstruksi gedung pemerintah berkualitas dan telah memenuhi ketentuan tata letak dan ruang sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan.

h. Cakupan layanan air bersih dan air limbah

tahun 2024 Indikator pelayanan air bersih dan sanitasi telah tercapai sebesar 88.71% %. Program ini berisikan kegiatan penyediaan sarana air bersi dan sanitasi, Dengan didukung oleh anggaran yang memadai baik dari APBD, DAK, dan APBN capaian ketersediaan air bersih di Kulon progo telah mendukung sasaran SKPD "Meningkatnya penataan lingkungan permukiman dan perkotaan"

i. Cakupan Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat.

Tahun 2024 Capaian indikator ini sebesar 78.50% Program ini berisikan kegiatan : Penyediaan PSU, Pemberdayaan infrastruktur oleh komunitas dan pembangunan fasilitas rusunawa, Anggaran DAK dan BKK sangat mendukung peningkatan pelayanan perumahan terutama pelayanan rumah layak huni.

j. Capaian taman dalam kondisi baik, layanan persampahan dan air limbah domestik

Indikator ini telah tercapai sebesar 69.23 %. Program ini berisikan kegiatan : pemeliharaan kebersihan kota, pengelolaan persampahan dan pengelolaan taman, Adapun dampak dari kegiatan ini adalah terwujudnya estetika lingkungan Kabupaten Kulon progo terutama di Kota wates dan sekitarnya, Dengan demikian kegiatan ini mendukung sasaran SKPD yaitu Meningkatnya penataan lingkungan permukiman dan perkotaan

B. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum:

a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik.

Jenis pelayanan dasar pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat:

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten.

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

2. Target Pencapaian SPM

Target penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 untuk Urusan Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	2060	Tahun 2024
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domistik	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	1892	Tahun 2024

Target penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 untuk Urusan Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Capaian
1	Penyediaan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	3	Tahun 2024
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	0	Tahun 2024

3. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Sasaran Dalam Tahun	Realisasi	Realisasi (%)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	2060	2060	100%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limah Domistik	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	1892	1892	100%

Dari capaian diatas bahwa untuk Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum sudah maksimal

Realisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Dalam Tahun	Realisasi	Realisasi (%)
1.	Penyediaan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	3	3	100%
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	0	0	0

Pencapaian SPM urusan perumahan rakyat jenis pelayanan dasar pada nomor satu telah mencapai 100%. Sedangkan pada jenis pelayanan dasar nomor dua baik sasaran maupun realisasi 0 (nol) karena tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo tidak ada bencana dengan skala kabupaten dan tidak ada relokasi program kabupaten sehingga tidak ada nilai yang dimasukkan sebagai capaian SPM.

C. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan penerintahan.IKK Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo meliputi urusan wajib pelayan dasar yang meliputi urusan pekerjaan umum dan peataan ruang serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Realisasi pencapaian IKK Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.3 Tabel IKK outcome Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

IKK Outcome (Hasil) Tahun 2024

	Urusan		IKK Outcome (Hasil)	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	Capaian Tahun 2024
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	0%	0
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)		0
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m)	0%	0
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)		0
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha)	100%	1.975
				Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten		1.975
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.	97,75%	153.303
				Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut.		156.824
		5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	98,86%	120.530
				Jumlah rumah di Kabupaten		121.921
		6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	100%	71.578
				Jumlah IMB yang berlaku		71.578
		7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap	73,30%	972,232
				Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten		1.308,645
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	51,19%	172
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten		336
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	86
				Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		86
d	Perumahan Rakyat dan	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	100%	3

	Kawasan Permukiman		huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n		3
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	0%	0
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		0
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	100%	6,75
				Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha		6,75
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	5,17%	6.299
				Jumlah total unit rumah Kabupaten		121.921
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	100%	2.128
				Jumlah unit rumah Kabupaten		2.128

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	Satuan	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD		Proyeksi		Catatan
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
A	**Standar Pelayanan Mininum / SPM**											
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	%		100	100	100		100	100	100		
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domistik	%		100	100	100		100	100	100		
3	Penyediaan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%		100	100	100		100	100	100		
4	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%		100	100	100		100	100	100		
B	**Indikator Kinerja Kunci / IKK**											
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	%		0	0	0		0	0	0		
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	%		0	0	0		0	0	0		
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%		86.76	86.87	86.95		86.76	86.87	86.95		
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	%		94.12	94.21	94.29		96.52	97.15	94.29		

	terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten											
5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%		88.64	88.71	88.77		88.73	89.00	88.71		
6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	%		29.35	29.35	29.29		29.35	29.35	29.33		
7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%		73.39	74.16	74.92		73.39	73.47	74.16		
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%		66.05	71.88	74,81		66.05	51.19	71.88		
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%		100	100	100		100	100	100		
10	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	%		100	100	100		100	100	100		
11	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	%		0	0	0		0	0	0		
12	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	%		44.28	44.54	45.32		44.28	45.28	45.32		
13	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni	%		4.97	7.09	3.27		10.51	10.40	10.51		
14	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%		100	100	100		100	100	100		
C	**Indikator Kinerja Utama PD / IKU PD**											
1	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai		72,80	73,32	73,71		73.32	73.39	73,71		
2	Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai		58,18	60,63	63,14		60.70	66.25	63,14		
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	%		100	100	100		100	100	100		

2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi nyata capaian pembangunan tahun sebelumnya. Pembangunan sebelumnya telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir seperti yang telah diuraikan pada BAB II antara lain sebagai berikut :

2.3.1 Sekretariat

1. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
2. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
3. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo belum optimal.

2.3.2 . Bidang Bina Marga

1. Terus berkembangnya pengguna jalan kabupaten mengakibatkan tingkat kerusakan 5 % pertahun sehingga perlu anggaran yang lebih untuk penangaanan jalan. Penanganan jalan terus dilakukan setiap tahun tapi dari sisi lain kerusakan jalan juga mempengaruhi tingkat kemantapan jalan kabupaten.
2. Kondisi umur konstruksi jembatan sehingga perlu pemantauan berkala/survey kondisi jalan dan jembatan

2.3.3. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

1. Terus berkembangnya jumlah pertambahan penduduk sehingga mempengaruhi pencapaian tingkat pelayanan air minum.
2. Belum meratanya pelayanan air perpipaan pada semua wilayah kecamatan terutama Wilayah bagian utara pegunungan
3. Menurunnya debit air pada musim kemarau sehingga akan berpengaruh terhadap suplay air bersih

3.3.4. Bidang Sumber Daya Air

1. Belum optimalnya pencapaian tingkat kemantapan infrastruktur irigasi . karena adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan belum optimalnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.
2. Adanya kebocoran embung sehingga cadangan air menjadi berkurang.

Dari identifikasi permasalahan yang dihadapi maka perlu adanya rumusan untuk menyelesaikan permasiahan tersebut. Perumusan permasalahan didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Kabupaten kulon progo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Strategi S-O

1). Jadikan visi serta misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai komitmen terhadap pelayanan publik sebagai landasan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat demi tercapainya Kabuaten Kulon Progo sebagai Kabupaten Termaju di Indonesia;

2). Dayagunakan sumber daya UPT untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum perumahan, dan kawasan permukiman

3). Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pembangunan dalam bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang lebih baik.

Strategi W-O

1). Pembinaan dan peningkatan kemampuan SDM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui kerja sama dengan unsur-unsur perguruan tinggi dan kementerian/ lembaga serta pelatihan-pelatihan teknis;

2). Manfaatkan potensi pembangunan bidang pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman yang tersebar untuk mewujudkan pelayanan efektif dan efisien serta merata antar wilayah.

Strategi S-T

1). Mendayagunakan SDM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mensosialiasikan peraturan di bidang urusan pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman kepada seluruh lapisan masyarakat;
2). Mengoptimalkan potensi UPT dalam rangka pengendalian pembangunan bidang urusan pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman.

Strategi W-T

1). Meningkatkan kemampuan SDM untuk mengatasi ketidaktahuan masyarakat terhadap perda-perda bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman;
2). Dayagunakan UPT untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian bangunan perumahan dan kawasan permukiman;
3). Meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan dinas.

Dari isu isu tesebut diatas diberikan sebuah arah kebijakan atau strategi untuk merumuskan permasalahan permasalahan tersebut. Isu pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau permasalahan penting dan mendasar yang harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan.

Rekomendasi, saran, kebijakan, strategi yang perlu diambil dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:

1. Perlunya mempertimbangkan usulan program dan kegiatan yang menjadi prioritas (penanganan kemiskinan, stunting dan ketahanan pangan)
2. Pemenuhan kebutuhan dasar air bersih guna mejnaga kesehatan masyarakat terutama di kawasan rawan kekeringan
3. Penanganan infrastruktur yang akan menjamin konektifitas dan stabilitas yang mendorong lancarnya roda perekonomian.
4. Penanganan kemiskinan dengan menjaga ketahanan pangan serta menjamin kesehatan dengan penyediaan perumahan layak huni

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 akan menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dokumen ini dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan. hasil telaahan terhadap Perubahan RKPD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

↳ agar terjadi keselarasan RKPD

- Menyesuaikan Ranwal RKPD dg Kesepakatan, RPTK, Pokir dan Aspirasi

Tabel 2.5. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
1	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah***					***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah***					
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	52.296.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	14.369.600	
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dok	26.187.826	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	12.250.300	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang	6.963.105.393	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang	5.677.953.181	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 DOK	133.705.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 DOK	97.400.000	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	14 Laporan	28.019.970	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunanLaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	14 Laporan	17.500.000	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
a	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	108.603.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	98.068.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan	12 Paket	57.357.100	
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup DPUP-KP	. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	244.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	43.423.400	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
a	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	62.866.430						
b	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	LingkupDPUP-KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	12 laporan	267.539.681	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	12 laporan	267.349.632	
c	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	LingkupDPUP-KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	351.385.464	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Lingkup DPUP-KP	pembayaran air dan listrik	12 laporan	320.990.580	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
a	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	183.600.000	
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 unit	58.321.120	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	49 unit	53.000.600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c	Penyediaan jasa pemeliharaan. biaya pemeliharaan.pajak. dan perizinan kendaraan dinas operasiaonal atau lapangan	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	458.062.000	Penyediaan jasa pemeliharaan. biaya pemeliharaan.pajak. dan perizinan kendaraan dinas operasiaonal atau lapangan	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	368.845.000	
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
a	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 unit	24.878.554.000	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	331.554.700	
b	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	302 lembaga	610.176.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup DPUP-KP	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	304Lembaga	119.188.900	
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
a	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kulon Progo	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 km	21.021.522.660	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kulon Progo	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 km	2.221.967.550	
b	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kulon Progo	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.2 km	39.444.969.710	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.2 km	3.748.714.500	
C	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					
a	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Lingkup Kulon Progo	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1.2 liter/detik	1.814.000.000						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaa	1000 SR	4.194.000.000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaa	80 SR	450.000.000	
D	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					
a	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	267 Rumh Tangga	4.218.416.000						
b	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 unit	300.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 unit	230.000.000	
						Penyediaan Unit pengolahan setempat	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Rumah Tangga yangmemiliki fasilitas buang airbesar individual denganktoset leher angsa dan unitpengolahan setempatanaerob (yang dapat berupatangki septik denganpengolahan lanjutan/sesuaiSNI 2398) atau unitpengolahan setempat aerob.	119 Rumah Tangga	1.275.800.000	
E	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
a	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tenaga Ahli Bangunan	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung	180 Dok	150.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung, serta	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung	180 Dokumen	119.252.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG		(SBKBG). Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB). Tim Profesi Ahli (TPA). Tim Penilai Teknis (TPT). Penilik. dan Pendataan Bangunan			Implementasi SIMBG		(SBKBG). Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB). Tim Profesi Ahli (TPA). Tim Penilai Teknis (TPT). Penilik. dan Pendataan Bangunan			
b	Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 dok	1.783.000.000	Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	9.320.000.000	
F	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					
a	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Dokumen Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disu	5 dok	550.000.000	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Dokumen Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disu	6 dok	627.408.500	
b	Pembangunan Jalan	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jalan yang Dibangun	0.3 km	5.150.000.000	Pembangunan Jalan	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jalan yang Dibangun	0.5 km	3.000.000.000	
c	Rekonstruksi Jalan	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	6 km	213.675.000.000	Rekonstruksi Jalan	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	5,4 km	20.011.253.700	
d	Pemeliharaan Berkala Jalan	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.8 km	103.885.000.000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.8 km	2.625.635.200	
e	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	40 jembatan	1.200.000.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	40 jembatan	1.164.367.700	
f	Pembangunan Jembata	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 jembatan	26.000.000.000						
g	Survey Kondisi	Lingkup	Panjang Jalan/Jembatan	800 km	550.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Lingkup	Panjang Jalan/Jembatan	807 km	420.273.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Jalan/Jembatan	Kulon Progo	yang Disurvey Kondisinya				Kulon Progo	yang Disurvey Kondisinya			
h	Pemeliharaan Rutin Jalan	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 km	8.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Lingkup Kulon Progo	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	36 km	7.186.555.700	
i	Rehabilitasi Jembatan	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 unit	3.000.000.000						
G	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**					**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**					
1	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**					**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**					
a	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	35 orang	160.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	70 orang	133.396.804	
2	**Pengawasan Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**					**Pengawasan Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**					
a	Pengawasan Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	350 Paket	400.000.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kot	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	110 Paket	442.589.700	
H	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA**										
1	***Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan***										
a	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Dokumen PemanfaatanRuangSatuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	6 Dokumen		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Dokumen PemanfaatanRuangSatuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	6 Dokumen	4.200.606.000	
b						Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang KawasanKiskendo-Sermo-Wates	3 Dokumen	16.196.697.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
c						Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan	1 Dokumen	5.458.992.000	
d						Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	2 Dokumen	2.795.398.700	
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					
1	***Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus***					***Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus***					
a	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 dokumen	1.700.000.000	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Lingkup Kulon Progo	umlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3 dokumen	1.130.000.000	
2	***Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah KorbanBencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***					***Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah KorbanBencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***					
a	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Rumah KorbanBencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1 Dokumen	66.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Rumah KorbanBencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	3 UnitRumah	66.000.000	
b	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Dokumen	41.000.000	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Dokumen	40.999.800	
J	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**					**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**					
1	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**					**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**					
a	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	200 unit	4.519.500.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki.	195 Unit	4.121.907.100	
b	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Lingkup Kulon Progo	Jumlah RumahBaru Layak HuniyangDibangundalam RangkaPencegahanKumuh	50 unit	267.500.000						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Baru										
K	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					
a	Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	17 lokasi	24.591.100.000	Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum di Perumahan	Lingkup Kulon Progo	JumlahLokasi Perumahan yangDisediakanPrasarana. Sarana. dan Utilitas Umum	68 lokasi	13.427.739.223	
b	Verifikasi dan Penyerahan PSU Pemukiman dari Pengembang	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	7 laporan	100.000.000	Verifikasi dan Penyerahan PSU Pemukiman dari Pengembang	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 laporan	99.999.900	
c	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Lingkup Kulon Progo	Jumlah RumahPenerimaManfaatDariPenyediaanJaringan TenagaListrik	10 unit	155.000.000						

Dari tabel diatas dilihat bahwa ada perbedaan anggaran. hal ini disebabkan karena pada usulan awal masih sebatas usulan dari proposal masyarakat dan belum memperhitungkan kondisi anggaran yang ada saat ini.

Catatan penting : anggaran usulan awal berbeda dengan hasil analisa kebutuhan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan Perangkat Daerah dan efisiensi anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Baru										
K	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					
a	Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	17 lokasi	24.591.100.000	Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum di Perumahan	Lingkup Kulon Progo	JumlahLokasi Perumahan yangDisediakanPrasarana. Sarana. dan Utilitas Umum	68 lokasi	13.427.739.223	
b	Verifikasi dan Penyerahan PSU Pemukiman dari Pengembang	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	7 laporan	100.000.000	Verifikasi dan Penyerahan PSU Pemukiman dari Pengembang	Lingkup Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 laporan	99.999.900	
c	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Lingkup Kulon Progo	Jumlah RumahPenerimaManfaatDariPenyediaanJaringan TenagaListrik	10 unit	155.000.000						

Dari tabel diatas dilihat bahwa ada perbedaan anggaran. hal ini disebabkan karena pada usulan awal masih sebatas usulan dari proposal masyarakat dan belum memperhitungkan kondisi anggaran yang ada saat ini.

Catatan penting : anggaran usulan awal berbeda dengan hasil analisa kebutuhan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan Perangkat Daerah dan efisiensi anggaran

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Forum OPD Urusan Pekerjaan Umum. Perumahan. Lingkungan Hidup dan ESDM merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2026. Forum Gabungan SKPD merupakan wadah bersama antar para pelaku (*stakeholder*) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan. Usulan OPD serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) OPDuntuk tahun anggaran 2026.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik RPJPD 2025-2029 yang telah disusun. tema dan prioritas pembangunan 2026 serta didasari review capaian kinerja OPD berdasarkan amanat target kinerja pada RPJPD. Dari proses paduserasi tersebut. didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2026 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPJMD. batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Gabungan OPD urusan pekerjaan umum. perumahan lingkungan hidup ESDM ini memang masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang. dengan adanya kendala keterbatasan waktu. sumber daya. banyaknya kegiatan yang harus dibahas serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kulon Progo bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Rancangan rencana kerja DPUPKP didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ /volume/usulan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemeliharaan berkala Jalan	Kulon Progo	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	60	Pokir
2	Pembangunan Jalan	Kulon Progo	Panjang Jalan yang dibangun	189	Pokir
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kulon Progo	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	476	Pokir.RPTK
4	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kulon Progo	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	12	Pokir
5	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kulon Progo	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	16	Pokir.RPTK

6	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3	Pokir
10	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Permukiman (Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, PJU Lingkungan)	Kulon Progo	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	996	Pokir
11	Rekonstruksi jalan	Kulon Progo	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	77	RPTK
12	Pembangunan Jembatan	Kulon Progo	jumlah jembatan yang dibangun	9	RPTK

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa usulan tahun 2026 baik dari pokir maupun RPTK merupakan usulan yang masuk pada OPD. Dan Ini tentunya menjadi prioritas pembangunan yang harus ditangani sebagai upaya tindaklanjut dari RPJPD 2025-2026 Selanjutnya. berbagai usulan baik dari masyarakat melalui musrenbang Kecamatan (RPTK). jaring aspirasi masyarakat. dan OPD dapat dalam lampiran Rencana Kerja OPD ini

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.1.1 Terhadap RPJMN

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial,dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi). Dalam Matrik Pembangunan RPJMN 2020-2024, bidang Prasarana dan Sarana, Kementrian PU dan PR bertanggung jawab terhadap beberapa Program Lintas/ Program Kegiatan Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Jalan/Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
2. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya
3. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak;
4. Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman/ Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (Rancangan akhir), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2026 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola Infrastruktur bidang Jalan, Jembatan dan Penataan Ruang. Disamping itu bidang Jalan, Jembatan dan Penataan Ruang juga berperperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya seperti sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang juga berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan, selain itu juga berperan untuk mendukung distribusi lalu lintas barang dan manusia maupun pembentuk struktur ruang wilayah. Oleh karenanya upaya pembangunan infrstruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah yang pada gilirannya akan

menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan Nasional

Sesuai tugas dan fungsinya, DPUKP memiliki peran untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan di atas, baik sebagai instansi pendukung beberapa fokus prioritas dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Arah kebijakan merupakan pedoman umum untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan.

3.1.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah sebagai berikut :

Isu Strategis	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
• Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah • Kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan lahan berkelanjutan • Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	• Meningkatnya pelayanan infrastruktur daerah • Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup • Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana • Meningkatnya kesesuaian peruntukan ruang

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tema Pembangunan pada Rancangan RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Tema Pembangunan Rancangan RKPd tahun 2026, Tema Pembangunan Rancangan RKPD DIY 2026, dan visi misi Bupati periode 2025-2029 sedangkan tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah: "Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan". Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah merupakan panduan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan holistik. Secara esensial, sasaran ini mencakup berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan. Sasaran

RKPD tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) 2025-2029. Dokumen RPJPD 2025-2029 disusun berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 dan Visi Misi Bupati Kulon Progo masa jabatan 2025-2029. Rumusan tujuan dan sasaran daerah beserta indikator dan target pada pada Dinas PUPKP tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Tujuan dan sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
1	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	50,15

Kesesuaian capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan Untuk itu, diperlukan parameter keberhasilan/ pencapaian suatu daerah yang dapat menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja juga diperlukan oleh masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan daerah terdiri dari indikator tujuan, indikator sasaran daerah, indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah, indikator kinerja program, ditampilkan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD tahun 2026

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026
1	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Capaian akses air minum aman	%	31,28
		Rasio rumah layak berkelanjutan	%	94,58
		Rasio luas layanan jaringan irigasi kabupaten	%	65,14
		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	69,03
2	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Indeks infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Nilai	4,28
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
4	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daera	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 - 3,0

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja utama /IKU OPD diperlukan dukungan dari indikator program yang dilaksanakan diseluruh perangkat daerah yang mencakup berbagai aspek penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib & pilihan. Adapun program yang mendukung IKU pada Dinas PUPKP adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Program Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	65,22
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Capaian Akses Air Minum Layak	%	98,46
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,53
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintah dan Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	%	58,80
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Penanganan Jalan	%	8,11
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Capaian Layanan Jasa Konstruksi	%	100
		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Kompetensi Kerja SKK	%	100

7	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Keterisian Hunian	%	47,74
8	Program Kawasan Permukiman	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	%	4,28
9	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	%	3,16
		Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun	%	29,69
10	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	%	100
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan dalam Rencana Kerja ini merupakan usulan program/ kegiatan urusan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten serta Dana Keistimewaan DIY.

Dinas PUPKP merumuskan program dan kegiatan yang didasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPJPD 2025-2029 yang dituangkan dalam Rencana Stategis (Renstra) dan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Kulon Progo, Pada tahun 2026 rencana kerja Dinas PUPKP mengakomodir beberapa pokok pokok yang mengenai :

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah

RPJPD 2025-2029 telah ditetapkan dan diarahkan untuk menuntaskan pencapaian visi pembangunan jangka panjang tahun 2025 – 2045, Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 sudah dirumuskan visi Kulon Progo sampai dengan tahun 2029, adapun Visi Terwujudnya "Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan". Dinas PUPKP dalam hal ini mendukung pencapaian misi ke empat yaitu "Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana ".

Konsep Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan kelanjutan dari konsep Millenium Development Goals (MDG's), SDGs adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs, SDG's adalah sasaran jangka Panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sector ekonomi, social dan lingkungan, Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang, SDG's berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu menjawab ketertinggalan pembangunan Negara-negara di seluruh dunia, baik Negara maju dan Negara berkembang, Adapun SDGs yang hendak kita capai adalah :

- Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua,
- Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian SDGs adalah Dari sisi infrastruktur akan mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni serta pengurangan kawasan kumuh, Membangun infrastruktur pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan,

2. Upaya Pengentasan kemiskinan

Pilar pembangunan ekonomi berisi agenda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan industri dengan komoditas unggulan, memastikan ketahanan pangan, Sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan, Beberapa kegiatan Dinas PU hakikatnya adalah dalam upaya pengentasan Kemiskinan, Sebagai contoh Kondisi irigasi yang baik memungkinkan upaya peningkatan ketahanan pangan, Kondisi jalan yang mantap akan mempermudah aksesbilitas perekonomian rakyat, Penyediaan perumahan dan Penanganan RTLH merupakan upaya kemiskinan ektrim di kulon progo,

3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat,

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, Untuk mengetahui apakah Perangkat Daerah/Unit Kerja sudah memenuhi SPM maka diperlukan suatu indikator, Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan, Indikator dan standar pencapaian SPM ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga Negara, Pada Dinas PUPKP ada dua SPM yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Bidang Perumahan Rakyat, Pada Urusan pekerjaan Umum yaitu : Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limah Domistik sedangkan Urusan Bidang Perumahan Rakyat adalah : Penyediaan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah, Dari dua SPM tersebut harus terpenuhi untuk pelayanan dasar kepada masyarakat,

4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, Prioritas program-program pembangunan daerah dengan melihat kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur seperti sekarang ini hendaknya diutamakan untuk lebih menguatkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang dilengkapi dengan kondisi pelayanan publik dan infrakstruktur yang semakin baik untuk memacu pertumbuhan ekonomi,

5. Ketahanan pangan Nasional

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat dan mempunyai peran yang vital bagi kehidupan suatu bangsa, Pemerintah telah menjadikan ketahanan pangan masuk dalam Agenda Pembangunan Nasional, Dukungan infrastruktur tersebut mencakup penyelesaian pembangunan bendungan / Embung yang sedang berjalan, serta rencana untuk pembangunan embung dan penampung air lainnya, Selain itu, diperlukan juga pembangunan jaringan tersier dan program cetak sawah yang telah ditugaskan kepada Kementerian PUPR berdasarkan peraturan presiden, Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jaringan irigasi secara keseluruhan, Optimalisasi jaringan irigasi yang baik akan memberi dampak signifikan pada produktifitas pertanian, terutama dan memperluas area tanam dan meningkatkan indeks pertanaman,

B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Matriks Rumusan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas PUPKP tahun 2026 yang menjadi urusan pekerjaan umum dan urusan perumahan dan kawasan permukiman , terdiri dari 11 program yang terdiri 19 kegiatan dan 41 sub kegiatan yaitu :

Tabel 4.1 Rekapitulasi Rumusan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas PUPKP tahun 2026

No	Uraian	Anggaran Tahun 2026
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
1	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	
1,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.369.600
1,2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.250.300
2	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	
2,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.677.953.181
2,2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	97.400.000
2,3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.500.000
3	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	
3,1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.068.000
4	***Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah***	
4,1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.423.400
5	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	
5,1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.990.580

5,2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.357.100
5,3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267.349.632
6	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	
6,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	368.845.000
6,2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	183.600.000
6,3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.000.600
II	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	
7	***Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	
7,1	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	450.741.600
7,2	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	119.186.900
8	***Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasiyang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	
8,1	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.221.967.550
8,2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.748.714.500
III	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGANSISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	
9	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota***	
9,1	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	450.000.000
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	
10	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota***	
10,1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	230.000.000
10,2	Penyediaan Unit pengolahan setempat	1.275.800.000
IV	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	
10	***Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung***	
11,1	Pembangunan, Pemanfaatan,Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	9.320.000.000
11,2	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	119.2520.00

V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	
12	***Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota***	
12,1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	627.408.500
12,2	Pembangunan Jalan	3.000.000.000
12,3	Rekonstruksi Jalan	20.011.253.700
12,4	Pemeliharaan Berkala Jalan	2.625.635.200
12,5	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.164.367.700
12,6	Pembangunan Jembatan	0
12,7	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	420.2730.00
12,8	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.186.555.700
VII	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	
13	***Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi***	
13,1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	133.396.804
13	***Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi***	
13,1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	442.589.700
	URUSANPEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
VII	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	
14	***Pendataan Penyediaandan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***	
14,1	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0
15	***Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***	
15,1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	66.000.000
15,2	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	40.999.800
16	***Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atauRumah Khusus***	
16,1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.130.000.000
VII	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	
17	***Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha***	
17,1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	4.121.907.100
IX	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	
18	***Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan***	
18,1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	13.527.739.123
18,1	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	99.999.900
18,3	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	0
X	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	

19	***Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***	
19.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	4.200.606.000
19.2	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	16.196.697.000
19.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	5.456.992.000
19.4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	2.795.398.700

Rancangan akhir Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 disajikan dalam Tabel matriks/tabel Renja OPD berikut ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KAB. KULON PROGO

TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							108.176.403.070,00							10.593.565.040,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						108.176.403.070,00							10.593.565.040,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						89.289.767.647,00							10.593.565.040,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.212.107.393,00							0,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						26.619.900,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	14.369.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	12.250.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.792.853.181,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	DPUPKP
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/bulan	5.677.953.181,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DPUPKP
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	97.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DPUPKP
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	17.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DPUPKP
	1.03.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	155.425.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	DPUPKP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Penyediaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	57.357.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	98.068.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						43.423.400,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	43.423.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						568.340.212,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	320.990.560,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	267.349.632,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	605.445.600,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DPUPKP
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	368.845.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	183.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.01.2.09.0019	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				49 Unit	53.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	*undefined*				undefined undefined	6.421.423.650,00							6.610.566.906,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						450.741.900,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			801.660.000,00	DPUPKP
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				304 Lembaga	119.166.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			409.870.000,00	DPUPKP
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	331.554.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			391.700.000,00	DPUPKP
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5.970.582.050,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			7.809.000.000,00	DPUPKP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				1 KM	2.221.867.550,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan			3.431.000.000,00	DPUPKP
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				5,15 KM	3.748.714.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan			4.378.000.000,00	DPUPKP
3.	1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	-	-			-	**450.000.000,00**						-	**491.400.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	450.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	491.400.000,00	DPUPKP
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				60 SR	450.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan			491.400.000,00	DPUPKP
4.	1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	-	-			-	**1.505.800.000,00**						-	**1.413.658.680,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.505.800.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, - mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengembe ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			1.413.058.800,00	DPUPKP
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	230.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengembe ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			460.858.600,00	DPUPKP
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				119 Rumah Tangga	1.275.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengembe ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			932.400.000,00	DPUPKP
5.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	9.439.252.000,00							78.446.440,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	9.439.252.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengembe ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an				DPUPKP
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	9.320.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengembe ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an				DPUPKP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.09.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				180 Dokumen	119.252.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP
6.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	35.035.493.800,00						-	0,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	35.035.493.800,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an		-	0,00	DPUPKP
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				6 Dokumen	627.408.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisiya				807 KM	420.273.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				3 6 K M	7.186.555.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan			0,00	DPUPKP
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				0,5 KM	3.000.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan			0,00	DPUPKP
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0,8 KM	2.625.635.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan			0,00	DPUPKP
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				5,4 KM	20.011.253.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan			0,00	DPUPKP
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				40 Jembatan	1.164.367.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan			0,00	DPUPKP
7.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						575.986.504,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	-	-	-	133.396.804,00	-	-	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DPUPKP
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				70 Orang	133.396.804,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-	-	-	-	442.589.700,00	-	-	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DPUPKP
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				110 Paket Pekerjaan	442.589.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DPUPKP
6.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-	-	-	-	-	28.649.693.700,00						-	0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan dan Kabupaten	-	-	-	-	-	28.649.693.700,00	-	-	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DPUPKP
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbatasan Meningkat				6 Dokumen	4.200.606.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP
	1.03.13.5.02.0011	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Semo-Wates														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Semo-Wates				3 Dokumen	18.196.697.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP
	1.03.13.5.02.0013	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo				1 Dokumen	5.466.992.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP
	1.03.13.5.02.0017	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo				2 Dokumen	2.795.398.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						16.855.646.023,00							0,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						1.235.999.800,00							0,00	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						105.999.800,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an			0,00	DPUPKP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				3 Unit Rumah	66.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan			0,00	DPUPKP
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			0				1 0	40.999.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DPUPKP
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-			-	1.130.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	DPUPKP
	1.04.02.2.05.0002	Pematausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3 Dokumen	1.130.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan			0,00	DPUPKP
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	4.121.907.100,00						-	0,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	4.121.907.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	DPUPKP
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				195 Unit Rumah	4.121.907.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DPUPKP
3.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	13.527.739.123,00						-	0,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	13.527.739.123,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DPUPKP
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang														
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	99.899.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DPUPKP
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				68 Lokasi	13.427.739.223,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DPUPKP

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana kerja perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukman merupakan pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029 di tahun pertama, Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Prioritas tersebut yang akan dilaksanakan ditahun 2026 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi keempat Kepala Daerah. Beberapa hal penting yang dilaksanakan adalah mencakup pembangunan infrastruktur, upaya pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting serta meningkatkan akses pengembangan kehidupan ekonomi yang layak,

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang Pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman dan Kabupaten Kulon Progo, Dokumen ini selain berisi program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan, Keberhasilan rancangan akhir rencana kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari DPUPKP, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat, Perencanaan ini dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi dari masyarakat/ *stakeholders,*

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja PD mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian rencana kerja yang telah dirumuskan, Renja PD disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran, Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renja ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat wilayah Kulon Progo,

Dalam rangka menjamin implementasi rencana kerja 2026 maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sosialisasi rencana kerja pada semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan
2. Rencana kerja menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah tahun 2026;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target dengan melakukan evaluasi pelaksanaan renja setiap triwulan,

4. Monitoring capaian kinerja yang dilakukan rutin setiap bulan
5. Reviu dari Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi,

Dokumen Rencana Kerja (Renja) PD tahun anggaran 2026 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi OPD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang urusan pekerjaan umum, perumahan & kawasan permukiman, Dokumen ini selain berisi program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan,

Rencana Kerja PD mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian rencana kerja yang telah dirumuskan, Renja PD disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran, Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renja ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat wilayah Kulon Progo,

Demikian Rencana Kerja PD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2026, semoga dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan yang baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

W a t e s, 29 Juli 2025

Kepala Dinas ,

DIDIK WIJANARTO, ST.,MM,

NIP 19720312 199803 1 004

RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KULON PROGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2026 ini dapat tersusun.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Pengasih, 29 Juli 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kulon Progo



BUDI HARTONO, S.Si, M.Si
NIP. 19690316 199603 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

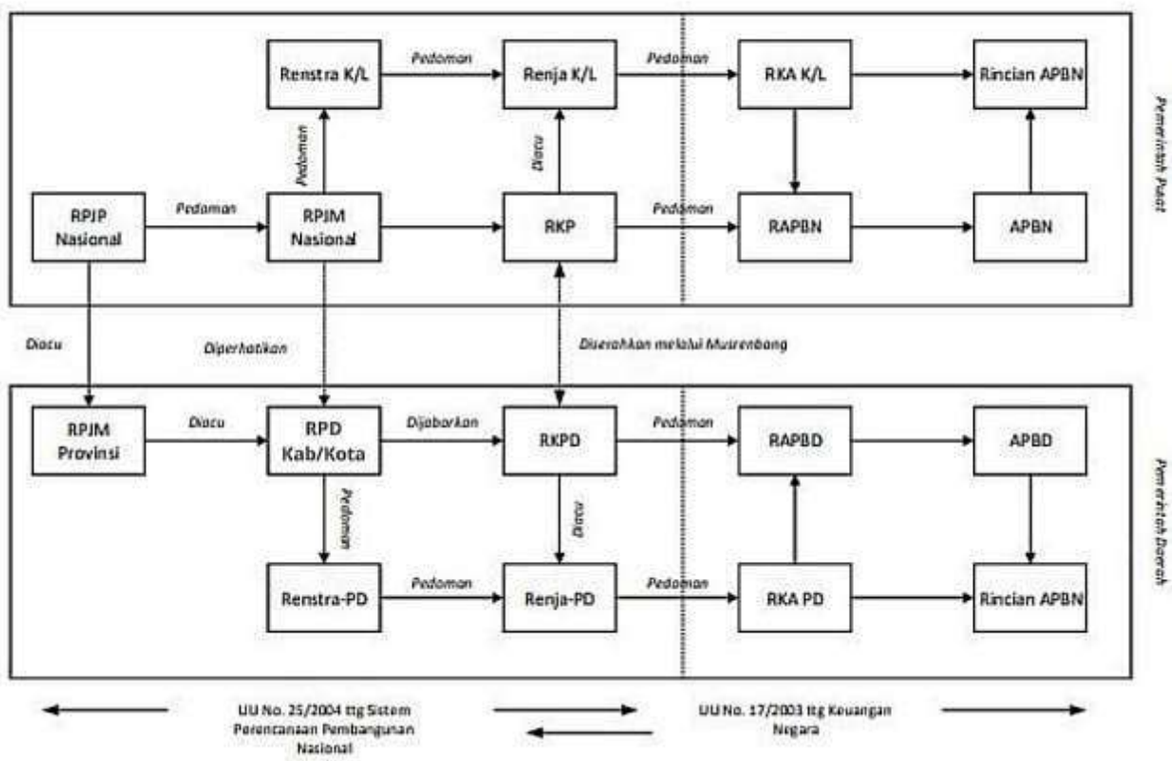
Proses penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan ; dan
f. penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada diatasnya seperti RKPD, perubahan Renstra Perangkat Daerah dan RPD. Renja Perangkat Daerah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai

dasar penyusunan Rencana Keja Anggaran (RKA) SKPD untuk menyusun Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD).

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

a. Undang-undang (UU) Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705;
g. Permendagri No. 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 550;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor : 1419;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir Tahun 2022;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1

q. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas.

r. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 – 2026, Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 20.

s. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024 – 2026, Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 20;

t. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SatPolPP Kabupaten Kulon Progo

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menjamin keselarasan antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo adalah :

1. Merupakan penjabaran dari rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Sebagai acuan dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional.
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan
5. Sebagai alat kontrol dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo

Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RANCANGAN RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;
b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
c. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KULON PROGO

SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA S.D TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)	
										I		II		III		IV							
1.	**Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**100**	**16.207,48**	**100**	**314.356,77**	**100**	**3.899,12**	**34,65**	**1.125,91**	**61,56**	**977,56**	**91,67**	**858,98**	**100**	**829,18**	**100**	**3.791 ,63**	**100**	**318.148,40**	**100,00**	**1.962,97**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah*																		-		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	24,80	2	679,00	2	7,00	0	1,36	0	2,07	2	0,88	0	1,50	2	5,81	4	684,81		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	14,70	21	391,00	21	4,00	9	0,98	4	0,24	4	0,53	4	1,61	21	3,36	42	394,36		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan*																	0	-		

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	192	13.041,75	12	287.552,00	13	3.060,92	3	961,16	3	763,77	3	635,12	4	636,10	13	2.996 ,14	25	290.548,14		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	193,49	12	5.576,00	12	55,89	3	10,24	3	18,10	3	13,69	3	13,50	12	55,53	24	5.631,53		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	10,65	14	3,93	14	4,00	4	0,64	3	1,54	4	-	3	1,42	14	3,60	28	7,53		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pengadaan pakaian, monev pegawai, diklat, dan sosialisasi cukai*																	0	-		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	24,57	2	717,00	2	3,76	1	1,85	1	0,49	0	-	0	1,33	2	3,67	4	720,67		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	30,17	25	867,00	20	9,02	0	1,25	0	3,77	0	2,00	20	0,68	20	7,69	45	874,69		
		Pengadaan Pakaian Dinas	Terlaksanany a pengadaan pakaian	96	57,60	0	0,00														-		

		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	240	269,12	0	0,00													-		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi*																0	-		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	58,00	5	1.379,00	5	15,50	1	3,53	1	5,58	1	3,27	2	2,47	5	14,85	10	1.393,85		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	55,24	3	1.993,00	4	26,61	1	0,73	1	4,15	1	6,22	1	1,47	4	12,57	7	2.005,57		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	_																	0	-		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	58,00	0	0,00	18	22,73	0	3,53	0	5,58	0	3,27	18	8,93	18	21,31	18	21,31		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor*																	0	-		

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa PTTD, Satpam, Pramu kantor, Pengemudi) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)	16,00	1.636,75	0	0,00														-		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	136,00	12	49,40	12	68,20	3	15,40	3	10,73	3	16,93	3	13,78	12	56,83	24	106,23		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	626,00	12	388,90	12	419,08	3	94,14	3	99,40	3	127,71	3	97,06	12	418,30	24	807,20		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya*																	0	-		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	64	525,00	16	14.745,00	16	178,92	6	31,10	2	54,94	4	43,18	4	42,27	16	171,49	32	14.916,49		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	128	703,63	41	15,54	79	23,50	6	-	36	7,20	33	6,18	4	7,07	79	20,46	120	36,00		
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	**Presentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum**	**100**	**6.293,67**	**95,01**	**1.949,87**	**97,87**	**2.527,65**	**95,01**	**358,43**	**95,01**	**661,07**	**94,95**	**528,54**	**94,95**	**866,51**	**95,01**	**2.414,55**	**95,01**	**4.364,42**	**95,01**	**69,35**
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen hasil pemberdayaan linmas*																		-		

		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	52	785,96	13	186,52	13	197,97	4	15,31	3	63,09	3	62,92	3	29,13	13	170,45	26	356,97		
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	-	9,30	120	8,75														8,75		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase pembentukan kelompok jaga warga**	**100**	**1.551,72**	**26,77**	**651,71**	**75,05**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**26,77**	**0,00**	**26,77**	**0,00**	**26,77**	**651,71**	**26,77**	**42,00**
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah pembentukan jaga warga*																		-		
		Pembinaan Jagawarga	Pembentukan jaga warga	630	1.551,72	6250	651,71		-	0	-		-					0	-	6250	651,71		

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 di atas dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 sesuai rencana.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Wilayah Kabupaten Kulon Progo yang begitu luas dimana terdapat 12 Kecamatan terdiri atas 87 Kalurahan dan 1 Kelurahan serta Sumber Daya Alam dan kondisi Demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketentraman dan Ketertiban.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Kulon Progo, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Kulon Progo relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Di samping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan anggaran Pendidikan dan Latihan Pol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karena hingga saat ini baru ada 6 PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten dan Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota, di mana ditargetkan pada tahun 2017 harus mencapai persentase 70%. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satpol PP.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yg kondusif dan demokratis,

sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah :

a. Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum;
b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP;
c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;
d. Diklat Dasar SatPol PP juga Diklat PPNS bagi aparat Satpol PP;
e. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah;
f. Monitoring dan evaluasi.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	
A.	**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**											
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada			5	5	5	5	0	0	5	5	
B.	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**											
1	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen hasil pemberdayaan linmas			25	25	25	25	25	0	25	25	
2	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP			25	25	25	25	25	0	25	25	
C.	**INDIKATOR KINERJA OPD**											
1	Persentase Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			100	100	100	100	100	0	100	100	

Analisis pencapaian kinerja pelayanan dapat kita lihat pada tabel 2.2 :

Sumber : SatPolPP Tahun 2025

Pelayanan minimal saat ini telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada pasal 9 mengatur antara lain: Terkait dengan Standar

1. SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi dan

SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota.

2. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Penerima layanan dasar untuk jenis pelayanan ketentraman dan ketertiban umum adalah warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota.

Ketentuan teknis standar pelayanan minimal bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diatur dalam Peraturan menteri Dalam Negeri yang sampai saat ini belum diterbitkan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Satpol PP;
b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah;
e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Satpol PP;
f. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral, dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan telaah Gambaran Pelayanan SKPD, Sasaran Jangka Menengah, Renstra K/L, dan Renstra SKPD Provinsi serta telaahan RTRW dan LKHS bagi pelayanan

SKPD maka Satuan Polisi Pamong Praja, merumuskan Isu-Isu Strategis guna mendukung agenda utama pembangunan daerah dalam waktu 4 (empat) tahun yang akan datang, yaitu :

1. Personil Satpol PP berkompetensi PPNS masih terbatas;
2. Adanya upaya peningkatan penegakan perda dan perkada;
3. Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Satgas Linmas yang ada di kapanewon belum terbentuk.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo :

Faktor Internal :

a. Kualitas dan kuantitas personil yang belum memenuhi persyaratan;
b. Anggaran operasional, sarana dan prasarana yang terbatas;

Faktor Eksternal :

a. Masih banyaknya penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah;
b. Meningkatnya Kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Sering terjadinya persengketaan dan ekses politik;
d. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan
e. Regulasi lambat mengikuti perubahan
f. Masih banyaknya pelanggaran dikarenakan kurangnya sosialisasi Perda dan Perbup
g. Masih banyaknya masyarakat yang kurang sadar hukum

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Tantangan:

1. Masih adanya masyarakat yang belum melaksanakan ketentuan dalam regulasi peraturan yang ada;
2. Lemahnya sosialisasi, pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah sektoral/teknis terhadap pelaksanaan peraturan;
3. Tuntutan masyarakat terhadap kenyamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang semakin tinggi.

Peluang:

1. Adanya Keterlibatan partisipasi masyarakat untuk mengambil kebijakan, tindakan, program dan kegiatan dalam penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya serta upaya-upaya dalam rangka mewujudkan keberhasilan pemeliharaan Tibum Tranmas.
2. Kemudahan memperoleh akses informasi secara dini
3. Dukungan Legislatif dan eksekutif bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan Trantibum serta penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya di Kabupaten Kulon Progo.

2.4. Review Terhadap RKPD

Tabel 2.4

Review Terhadap RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo

No.	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	RANCANGAN AWAL RKPD 2025			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Ket.
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	JUMLAH SEMUA				7.129.408.889	JUMLAH SEMUA				7.129.408.889	
	Urusan Pemerintahan Wajib ysng berkaitan dengan pelayanan dasar				6.942.506.889	**Urusan Pemerintahan Wajib ysng berkaitan dengan pelayanan dasar**				6.942.506.889	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				7.129.408.889	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				7.129.408.889	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KP	Capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	5.016.640.922	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KP	Capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	5.016.640.922	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KP	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	25 dokumen	11.993.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KP	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	25 dokumen	11.993.000	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	8.500.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	8.500.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 laporan	3.493.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 laporan	3.493.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KP	Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan	Laporan	3.136.555.280	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KP	Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan	laporan	3.136.555.280	
1.2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	3.081.455.280	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	3.081.455.280	
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	51.900.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	51.900.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	KP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	14 laporan	3.200.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	KP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	14 laporan	3.200.000	

	Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
1.3.	Kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	KP	Jumlah pengadaan pakaian, monev pegawai, dan diklat	-	15.000.000	Kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	KP	Jumlah pengadaan pakaian, monev pegawai, dan diklat	-	15.000.000	
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	KP	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60 Paket	0	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	KP	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60 Paket	0	Paket pengadaan pakaian dinas lapangan
1.3.2.	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	
1.3.3	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	15.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	15.000.000	
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KP	Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor dan penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi	-	17.840.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KP	Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor dan penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi	-	17.840.000	
1.4.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	17.840.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	17.840.000	
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1.042.943.800	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1.042.943.800	
1.5.1	Sub Kegiatan pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	KP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0	Sub Kegiatan pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	KP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0	Kebutuhan kendaraan roda 6 (Truk)
1.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (laptop 2, ac 1)	1 unit	196.139.800	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	196.139.800	Kebutuhan 1 unit gudang
1.5.3						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KP	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan			
1.5.4	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KP	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	846.804.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KP	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	846.804.000	

1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KP	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	604.979.842	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KP	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	604.979.842	
1.6.1	Sub Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	68.196.050	Sub Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	68.196.050	Tambah pemakaian AC
1.6.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan da Perlengkapan Kantor	KP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	15.890.600	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan da Perlengkapan Kantor	KP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	15.890.600	
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	520.893.192	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	520.893.192	
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	187.329.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	187.329.000	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	166.831.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	166.831.000	
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	79 unit	20.498.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	79 unit	20.498.000	
2.	**Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** :	KP	Persentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	100%	1.880.479.000	**Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** :	KP	Persentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	100%	1.880.479.000	
2.1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen pemberdayaan linmas	25 laporan	1.518.985.000	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen pemberdayaan linmas	25 laporan	1.518.985.000	
2.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	KP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga	1 Laporan	0	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	KP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga	1 Laporan	0	

			layanan yang terdampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani					layanan yang terdampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani			
2.1.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum		- Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	1.270.948.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	1.270.948.000	
2.1.3	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan		Jumlah laporan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	248.037.000	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan		Jumlah laporan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	248.037.000	
2.2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota		Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP	25 laporan	361.494.000	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota		Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP	25 laporan	361.494.000	
2.2.1	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1 Laporan	0	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1 Laporan	0	
2.2.2	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Dearah dan Peraturan Bupati/Walikota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	179.747.000	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Dearah dan Peraturan Bupati/Walikota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	179.747.000	
2.2.3	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 laporan	181.747.000	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 laporan	181.747.000	
2.2.4	Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan hasil penyelidikan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	-	0	Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan hasil penyelidikan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	-	0	

3.	Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan		Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100%	186.902.000	Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan		Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100%	186.902.000	
3.1	Kegiatan adat seni, tradisi dan lembaga budaya		Persentase dukungan terhadap penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100%	186.902.000	Kegiatan adat seni, tradisi dan lembaga budaya		Persentase dukungan terhadap penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100%	186.902.000	
3.1.1	Sub kegiatan pembinaan jaga warga		Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	180 orang	186.902.000	Sub kegiatan pembinaan jaga warga		Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	180 orang	186.902.000	

Sumber : SatPolPP Tahun 2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kalurahan sampai Musrenbang tingkat kabupaten. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan. Tahun ini belum ada usulan yang terkait dengan program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2026
di Kabupaten Kulon Progo

Nama PERANGKAT DAERAH : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Tidak ada	-	-	-	-

Sumber : SatPolPP Tahun 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP Tahun 2025) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Untuk prioritas nasional yang ada di SIPD yang mendukung kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo adalah Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 4 (empat) tahun

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan mencakup pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi maka Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan adalah terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode jangka menengah adalah meningkatnya penegakan peraturan daerah dan penanganan gangguan trantibum.

Memperhatikan evaluasi kinerja, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja

Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**Satuan**	Target 2026
Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum dan Pelanggaran Perda	%	100
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel		Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (84,2)
		Indeks maturitas SPIP	Nilai	3,23

	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (>80-90)
	Meningkatnya kualitas pengendalian internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0 - 3,0

Sumber : SatPolPP Tahun 2025

Tujuan Renja Daerah pada tahun 2026 yakni Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dan sasaran daerah adalah Persentase Penanganan gangguan Trantibum dan Pelanggaran Perda dengan target 100%.

Sedangkan sasaran Perangkat Daerah yaitu Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan indikator rata-rata Persentase Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat direncanakan sebesar 100%. Untuk sasaran yang kedua Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah direncanakan mencapai nilai A (>80 – 90). Dan yang ketiga Meningkatnya kualitas pengendalian internal Perangkat Daerah dengan indicator Nilai SPIP Perangkat Daerah direncanakan mencapai nilai 2,0 – 3,0

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

a. Meningkatnya pembinaan kualitas dan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja
b. Meningkatnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat dan atau badan hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
c. Memaksimalkan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan dinas/instansi dan aparat keamanan dalam menyelenggarakan penegakan perda dan perkada

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum. Sebanyak 3 Program, 10 kegiatan dan 21 sub kegiatan untuk perencanaan kegiatan.

Salah satu tugas utama pamong praja adalah menjaga ketertiban umum. Ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan penerapan dan penegakan peraturan daerah (perda) yang dibuat oleh pemerintah setempat. Ketertiban umum meliputi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti penertiban pedagang kaki lima yang beroperasi di tempat yang tidak sesuai, pengawasan terhadap bangunan ilegal, hingga penegakan aturan terkait lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Tidak hanya menjaga ketertiban, pamong praja juga bertugas untuk melindungi hak dan keamanan masyarakat. Dalam beberapa situasi, mereka harus berperan aktif dalam melindungi warga dari tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pamong praja memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah (perda) untuk mendukung pembangunan wilayah. Tanpa penegakan perda yang konsisten, pembangunan kota atau kabupaten bisa terganggu oleh pelanggaran, seperti bangunan liar atau pelanggaran tata ruang.

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100
		Persentase Penanganan Pelanggaran Perda	%	100
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Omah Jaga Warga yang aktif		22,33
3.	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	%	100

Sumber ; SatPolPP Tahun 2025

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			100%	**6.942.506.889,00**			100%	**6.985.818.610,00**
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			100%	**6.942.506.889,00**			100%	**6.785.818.610,00**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			100%	**6.942.506.889,00**	PAD		100%	**6.785.818.610,00**
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah*		16 dokumen	**4.983.702.089,00**	PAD		16 dokumen	**4.540.334.130,00**
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 dokumen	4.960.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		14 dokumen	11.993.000,00
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	3.374.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		2 Dokumen	8.500.000,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN, dan laporan keuangan*		55 dokumen	1.586.800,00			55 dokumen	3.493.000,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 orang/bulan	3.123.420.280,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 orang/bulan	3.136.555.280,00
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	3.081.455.280,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		1 dokumen	3.081.455.280,00

1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 laporan	40.765.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		14 laporan	51.900.000,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi*		25 orang	1.200.000,00			25 orang	3.200.000,00
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 orang	7.900.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		25 orang	15.000.000,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		2 dokumen	7.900.000,00			2 dokumen	15.000.000,00
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 paket	19.649.700,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		1 paket	33.730.600,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	9.163.700,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		1 laporan	15.890.600,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan kendaraan operasional/lapangan dan sarpras gedung kantor/gudang*		2 unit	10.486.000,00			2 unit	17.840.000,00
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 unit	1.042.943.800,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		1 unit	520.000.000,00
		-							
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	846.804.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		1 Unit	500.000.000,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- *Jumlah laporan/dokumen penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, serta Jasa Pelayanan Umum*		2 laporan	196.139.800,00			2 laporan	20.000.000,00
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber*	Kab. Kulon Progo, Semua	1 laporan	635.725.009,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		1 laporan	635.726.250,00

		Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kel/Desa						
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	68.194.809,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		1 Laporan	68.196.050,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*		80 unit	567.530.200,00			80 unit	567.530.200,00
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 unit	149.102.500,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		17 unit	187.329.000,00
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63 Unit	133.234.400,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		63 Unit	166.831.000,00
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			100%	15.868.100,00			100%	20.498.000,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penyediaan Layanan dasar dalam rangka dampak penegakan perda/perkada dan pemberdayaan linmas*		25 dokumen	**1.958.804.800,00**			25 dokumen	**2.245.484.480,00**
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 dokumen	1.454.264.700,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		12 dokumen	1.524.935.000,00
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.258.217.600,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		12 Dokumen	1.270.948.000,00
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	190.097.100,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		1 laporan	248.037.000,00

		ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani							
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah laporan/dokumen penyelidikan, sosialisasi, penanganan dan pengawasan terhadap pelanggaran perda/perkada*		26 Laporan	5.950.000,00			26 Laporan	5.950.000,00
1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	504.540.100,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		1 laporan	720.549.480,00
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	179.527.740,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		1 Laporan	179.527.740,00
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	119.672.460,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		12 Laporan	179.527.740,00
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	102.819.900,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		12 Laporan	181.747.000,00
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								200.000.000,00
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								200.000.000,00
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	*Peningkatan penyelenggaran keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan*		100%				100%	200.000.000,00
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina*		180 orang				180 orang	200.000.000,00
2.22.08.5.07.0012	Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180 orang	186.902.000,00	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINS		180 orang	200.000.000,00
	Jumlah				7.129.408.889,00				6.985.818.610,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 sebesar Rp. 7.129.408.889,00 terdiri dari sumber pembiayaan dari APBD sebesar Rp. 6.942.506.889,00 dan dari dana kesitimewaan sebesar Rp. 186.902.000,00. Untuk Program kegiatan dan sub kegiatan sama dengan RKPD sedangkan pagunya berbeda dikarenakan menyesuaikan dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan standar harga serta menyesuaikan dengan usulan pagu anggaran tahun 2026. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**7.129.408.889,00**							**6.985.818.610,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.942.506.889,00**							**6.785.818.610,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**6.942.506.889,00**							**6.785.818.610,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi*	-			**100 %**	**4.983.702.089,00**						-	**4.540.334.130,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah*	-			14 dokumen	4.960.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	11.993.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.374.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		8.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	1.586.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		3.493.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN, dan laporan keuangan*	-			55	3.123.420.280,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	3.136.555.280,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	3.081.455.280,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		3.081.455.280,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	7.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan toleran Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			2	18.649.700,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan toleran Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	33.730.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.163.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan toleran Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		15.890.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	10.486.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		17.840.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan kendaraan operasional/lapangan dan renovasi gedung kantor/gudang*	-			2 unit	1.042.943.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	520.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	846.804.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	196.139.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAER PENANGGUNG JAW
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan/dokumen penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, serta Jasa Pelayanan Umum*	-			2 laporan	635.725.009,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan toleransi Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	635.726.250,00	SATUAN POLISI PAMO PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	68.194.809,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan toleransi Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		68.196.050,00	SATUAN POLISI PAMO PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	567.530.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan lestarian Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		567.530.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			80 unit	149.102.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan lestarian Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	187.329.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU MENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	133.234.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		166.831.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				63 Unit	15.868.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		20.498.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat***	-			**100 %**	**1.958.804.800,00**						-	**2.245.484.460,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penyediaan Layanan dasar dalam rangka dampak penegakan perda/perkada dan pemberdayaan linmas*	-			25 dokumen	1.464.264.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan toleran. Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	1.524.935.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	1.258.217.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan toleran. Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		1.270.948.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	190.097.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		248.037.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah														
			*Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia*Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia				1 Laporan	5.960.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		5.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah laporan/dokumen penyelidikan, sosialisasi, penanganan dan pengawasan terhadap pelanggaran perda/perkada*	-			26 laporan	504.540.100,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	720.549.480,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	179.527.740,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		179.527.740,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	119.872.460,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		179.527.740,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	102.819.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		181.747.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

Activate W
Go to Setting

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	102.520.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan teslerasi Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		179.747.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**186.902.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**186.902.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	-			**100 %**	**186.902.000,00**						-	**200.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina*	-			180 orang	186.902.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan teslerasi Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina				180 Orang	186.802.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	JUMLAH							7.129.408.883,00							8.385.818.610,00	

BAB V
P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 - 2029 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 - 2029 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2026.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Sehingga SatPolPP mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal pembinaan ketentraman ke masyarakat dan ketetiban umum.

Masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap momentum sosialisasi dan pelatihan, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran dari masyarakat untuk turut menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pengasih, 29 Juli 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kulon Progo



BUDI HARTONO, S.Si, M.Si
NIP. 19690318 199603 1 003

BPBD Kabupaten
Kulon Progo

RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sampai saat ini kita masih diberi kemudahan menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD 2025–2030 dan hasil evaluasi Triwulan IV Rencana Kerja BPBD Tahun 2024.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 diucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Wates, 29 Juli 2025

Plt. Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kulon Progo

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

HERI DARMAWAN, A.P., MM.

NIP. 19740421 199311 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2024	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 Capaian Renstra BPBD 2023-2026	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
	2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	20
	2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD 2026	24
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	35
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	36
	3.3 Program dan Kegiatan	39
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V	PENUTUP	53
	Lampiran	54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta sebagai bagian integral dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana kerja ini memuat arah kebijakan, program, kegiatan, target kinerja, kebutuhan pendanaan, serta lokasi pelaksanaan yang akan dijalankan dalam satu tahun anggaran mendatang. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta menjadi dasar pengukuran kinerja perangkat daerah, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang bencana dan kebakaran. Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis disub urusan bidang kebencanaan dan sub urusan bidang kebakaran;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di sub urusan bidang kebencanaan dan sub urusanbidang kebakaran;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di sub urusan bidang kebencanaan dan sub urusan bidang kebakaran;
d. pelaksanaan administrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas peran sentral dalam Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kulon Progo.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dengan maksud meningkatkan kinerja guna

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap OPD menyusun Rencana Kerja OPD.

Yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah Rancangan Rencana Srategis BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2030 yang telah disusun berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Rencana Kerja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang RKPD dan Rencana Kerja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah serta arah kebijakan fiskal daerah. Oleh karena itu, Renja BPBD disusun dengan mengacu secara langsung pada tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2026. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan keselarasan antara program dan kegiatan BPBD dengan sasaran pembangunan daerah yang lebih luas, sehingga peran BPBD dalam penanggulangan bencana dan penyelamatan masyarakat dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 20025 – 2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tatacara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan; dan

24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan tidak hanya untuk merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan BPBD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026, tetapi juga sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah tahunan. Dokumen Renja menjadi instrumen penting dalam menjabarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam langkah-langkah operasional tahunan yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, penyusunan Renja berkontribusi langsung terhadap keterpaduan, konsistensi, dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh. Bahwa program Penanggulangan Bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap upaya pengurangan risiko bencana dalam pembangunan.

Tujuan Internal:

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
2. Menyediakan dokumen acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber lain yang sah.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan BPBD Kabupaten Kulon Progo dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di BPBD Kabupaten Kulon Progo dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di BPBD Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tujuan Eksternal:

1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berorientasi untuk Pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap bencana.

2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya Penanggulangan Bencana, baik dalam kondisi pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa Pemerintah Daerah Kulon Progo memiliki *concern* yang besar terhadap upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kulon Progo.
4. Mensinergikan program-program dan kegiatan Penanggulangan Bencana dengan program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengadapi ancaman risiko bencana, baik di OPD lain, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.
5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran program Penanggulangan Bencana yang berkelanjutan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra BPBD 2023-2026
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2026
2.5 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024

Pada tahun 2024 BPBD Kabupaten Kulon Progo melaksanakan 3(tiga) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

Dari ke 3 program ini terdapat kegiatan yang masing-masing akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : tidak ada

Sampai TW IV Tahun 2024 BPBD tidak ada beberapa sub kegiatan, kegiatan yang belum mencapai target yang ditetapkan.

b. **Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran**

Sampai TW IV Tahun 2024, semua sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil. Kinerja hasil/keluaran BPBD dapat mencapai 100 % sesuai dengan yang direncanakan dengan realisasi anggaran sebesar 98,12%. Kegiatan tersebut adalah

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,** dengan kegiatan:
   a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2) **Program Penanggulangan Bencana,** dengan kegiatan :
   a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
   b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
   c) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana
   d) Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana

3) **Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran,** dengan kegiatan :

a) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

b) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

c) Penilaian Proteksi Kebakaran

c. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Pada tahun 2024 tidak ada sub kegiatan yang melebihi target keluaran Sebagai informasi ada 2 kegiatan yang outputnya melebihi target tetapi tidak dituangkan dalam dokumen capaian laporan yaitu: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran. Hal ini karena banyak permintaan sosialisasi kebencanaan dan sosialisasi damkar dari masyarakat yang harus dipenuhi oleh BPBD, tetapi karena tidak ada dalam agenda keuangan maupun target output, maka kegiatan ini tidak dicatat sebagai output capaian BPBD

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program / Kegiatan.

Tidak ada target kinerja kegiatan/program yang tidak tercapai

e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain:

Tidak ada target kinerja kegiatan/program yang tidak tercapai

Evaluasi hasil kinerja BPBD dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kabupaten Kulon Progo

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Pemerintahan Wajib yang berkitan dengan pelayanan dasar									
1	05			Bidang Urusan Pmerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1	05.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota									
1	05.01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	05.01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 2023 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD 2022	9	2	2	2	100	3	7	77,78

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05.01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja bulanan, triwulanan, Lakip, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD dan Penerapan SPIP	84	21	21	21	100	21	63	75
1	05.01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1	05.01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	48	12	12	12	100	12	36	75
1	05.01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium petugas Pengelola BMD, Tim Pelaksana Kegiatan	48	12	12	12	100	12	36	75
1	05.01	2.02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera	Tersusunnya Laporan capaian Kinerja Keuangan	56	14	14	14	100	14	42	75
1	05.01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	05.01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan biaya koordinasi	4	1	1	1	100	1	3	75

1	05.01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05.01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	100	24	2	2	100	1	25	25
1	05.01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	05.01	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap), dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan Pustaka)	4	1	1	1	100	3	3	75
1	05.01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	1	1	1	100	3	3	75
1	05.01	2.09	04	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	05.01	2.09	10	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya 9 unit mobil roda empat, 5 unit roda enam, 7 unit roda dua,	21	21	21	21	100	21	21	100

				Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya 3 unit komputer, 4 unit chainsaw, 2 unit pompa air, 2 unit EWS, 2 unit AC, 1 genset, listrik, air, telpon, 1 unit septic tank dan gedung kantor	20	20	20	20	100	20	20	100
1	05.03			Program Penanggulangan Bencana									
	05.03	2.01		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota									
	05.03	2.01	02	Sub. Keg. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	1200	300	300	300	100	200	800	66,67
1	05.03	2.02		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
1	05.03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	470	110	110	110	100	50	270	57,45
1	05.03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana	Jumlah Dokumen Hasil pengendalian Operasi dan	4	1	1	1	100	1	3	75
1	05.03	2.02	04	P1enyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	56	14	14	14	100	14	42	75

1	05.03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	10	3	2	2	100	1	6	60
1	05.03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	800	200	200	200	100	200	600	75
1	05.03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1	1	1	1	100	1	1	100
1	05.03	2.03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
1	05.03	2.03	02	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4	1	1	1	100	1	3	75
1	05.03	2.03	04	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	80	20	20	20	100	20	60	75
1	05.03	2.04		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									
1	05.03	2.04	01	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	4	1	1	1	100	1	3	75

1	05.03	2.04	04	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	4	1	1	1	100	1	3	75
1	05.03	2.04	06	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	4	1	1	1	100	1	3	75
1	05.04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									
1	05.04	2.01		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
1	05.04	2.01	02	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	1	1	1	100	1	3	75
1	05.04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	4	1	1	1	100	1	3	75

1	05.04	2.01	06	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20	1	5	5	100	4	10	50
1	05.04	2.02		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran									
1	05.04	2.02	01	Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	4	1	1	1	100	1	3	75
1	05.04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4	1	1	1	100	1	3	75
1	05.04	2.04		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran									
1	05.04	2.04	01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	800	200	200	200	100	100	500	62,5

1	05.04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20	5	5	5	100	5	15	75

Capaian seluruh kegiatan BPBD Kabupaten Kulon Progo pada Triwulan IV Tahun 2024 menunjukkan hasil yang optimal, dengan seluruh kegiatan mencapai target kinerja output sebagaimana direncanakan dan tingkat realisasi anggaran yang tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD. Capaian tersebut secara langsung memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dalam Renstra, baik dari sisi kuantitas pelayanan, kualitas respon penanggulangan bencana, maupun peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat. Dengan kata lain, ketepatan pelaksanaan kegiatan secara substansi dan waktu menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPBD mendukung sepenuhnya target-target jangka menengah sebagaimana dirumuskan dalam Renstra 2025–2030.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah menunjukkan konsistensi terhadap perencanaan, capaian target output, serta efektivitas penggunaan anggaran. Tidak terdapat kegiatan yang gagal mencapai target, dan beberapa di antaranya bahkan memiliki capaian di luar target meskipun tidak tercatat dalam indikator resmi. Hal ini menunjukkan bahwa BPBD memiliki kapasitas organisasi, perencanaan, dan pelaksanaan yang solid. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Kulon Progo dinilai telah berada pada jalur yang tepat dan siap dalam mencapai target kinerja tahun 2026 sesuai dengan arah pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Review Kajian Resiko Bencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022, Kulon Progo memiliki 12 ancaman bencana berupa : longsor, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tsunami, kebakaran, abrasi, wabah penyakit, dampak letusan gunung berapi, dan kegagalan teknologi.

Secara umum, pelayanan yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari semua ancaman bencana. Pelayanan kepada masyarakat diupayakan melalui tiga tahapan yaitu:

1) Tahap pra bencana
2) Tahap saat bencana
3) Tahap pasca bencana

Jenis-jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup upaya tahap pra bencana adalah:

a) Peningkatan kapasitas kelembagaan, meliputi penerbitan kebijakan pengurangan resiko bencana (perda; perbup; SK bupati; rencana kontigensi; rencana operasi; SOP; dll) serta pemenuhan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
b) Peningkatan kapasitas masyarakat meliputi peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat (sosialisasi, simulasi/gladi, FGD), Kalurahan tangguh bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana, dll.

Jenis-jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup upaya Penanganan saat bencana adalah penanganan darurat bencana meliputi evakuasi dan pencarian korban, penanganan pengungsi (logistik; kesehatan; fasum; fasos; dll) serta penanganan tanggap darurat bencana.

Jenis-jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup upaya Penanganan Pasca bencana adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi dibidang fisik dan non fisik

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa BPBD diamanatkan untuk melaksanakan SPM bidang Trantibunlinmas. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/ kota yang dilaksanakan BPBD terdiri atas:

a. pelayanan informasi rawan bencana;
b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
c. c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pada pelaksanaan SPM ini, BPBD mengacu pada turunan PP No. 2 Tahun 2018 yaitu Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Pelaksanaan SPM telah dilaksanakan BPBD mulai Tahun 2019. Laporan dilaksanakan secara berjenjang dari OPD sampai ke Kementrian Dalam Negeri.

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tertuang dalam tabel berikut :

Tabel II.2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kulon Progo

NO	Indikator	SPM /standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat											
	Indikator Kinerja Kunci											
1	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	**V**	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	**300**	**300**	**300**		**300**	**200**	**200**		Adanya efisiensi anggaran
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**V**	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**110**	**110**	**140**		**110**	**50**	**50**		Adanya efisiensi anggaran
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**V**	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Prosentase)	**100**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**		
4	Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**V**	((Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah Jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/Perangkat Daerah)/Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten)X100%	**100**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**		Respon time pemadaman kebakaran oleh BPBD dan Relawan kebakaran

6	Persentase penanggulangan bencana	**-**	(Persentase desa tangguh bencana + Persentase Warga terdampak bencana yang terlayani + Persentase kejadian bencana yang direkomendasikan rehabilitasi dan Rekonstruksi + Persentase Kasus Kebakaran yang Tertangani Dalam Waktu Paling Lama 15 menit)/4	**98,01**	**98,86**	**100**		**98,01**	**9830**	**98,58**		IKU OPD-proyeksi 2025 dan 2026 tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai kedudukan dan fungsinya, BPBD memiliki lingkup pelayanan yang luas. Kabupaten Kulon Progo adalah daerah yang rawan bencana, namun sulit untuk mengukur kinerja pelayanan BPBD dalam penanggulangan bencana. Karakterstik satu jenis bencana berbeda dengan bencana yang lain sehingga penanganannya juga berbeda. Selain itu bencana merupakan hal yang rumit dan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Salah satu kinerja yang dapat diukur adalah jumlah Kalurahan Tangguh Bencana yang telah diinisiasi dan dibentuk oleh BPBD maupun Pihak lain sesuai unsur penthahelix yaitu keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa maupun akademisi dalam program penanggulangan bencana. Dari 88 Kalurahan/Kelurahan rawan bencana, sampai tahun 2024, sudah ada 81 Kalurahan tangguh bencana yang terbentuk. Dengan berbagai strategi yang ada pada tahun 2029 semua Kalurahan/Kelurahan telah terbentuk menjadi Kalurahan/Kelurahan tangguh bencana. Sehingga Kalurahan-kalurahan tersebut diharapkan mempunyai kesiapsiagaan dan ketangguhan terhadap bencana yang lebih baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan sebuah OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kebakaran. Bencana berimplikasi terhadap semua sektor, oleh sebab itu upaya pengurangan resiko bencana; penanganan tanggap darurat, penanganan pasca bencana harus dilakukan di semua sektor dan melibatkan semua unsur baik pemerintah, swasta/dunia usaha, media massa, akademisi dan masyarakat. Penanggulangan bencana tidak hanya beban Badan Penanggulangan Bencana Daerah semata. Penanggulangan bencana harus dibebankan kepada segenap Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, kalangan swasta/korporasi dan masyarakat itu sendiri, terlebih lagi saat ini telah terbit PP nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang mengatur Pelayanan Minimal bagi masyarakat salah satunya urusan trantibunlinmas dan kebencanaan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang diikuti Permendagri No 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No 101 Tahun 2018

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan No 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota membuat BPBD Kabupaten Kulon Progo harus bekerja keras dalam melaksanakan pelayanan standar minimal kepada masyarakat. Di satu sisi timbulnya peraturan tersebut mendorong pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pencapaian SPM, di sisi lain keterbatasan kewenangan dan personil BPBD mengharuskan adanya kerja keras semua pihak untuk melaksanakan amanat dari peraturan yang ada.

Permasalahan dan Hambatan dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi BPBD

BPBD Kabupaten Kulon Progo menghadapi sejumlah permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain:

1. Kapasitas SDM yang terbatas, berdampak pada rendahnya daya jangkau dan efektivitas koordinasi lintas sektor. Fungsi BPBD dalam hal urusan kebencanaan dan kebakaran untuk seluruh kabupaten, dengan dukungan jumlah ASN yang terbatas serta kapasitas yang dimiliki dalam hal penanggulangan bencana yang terbatas sedikit banyak mempengaruhi kinerja BPBD.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana; ditunjukkan dengan masih rendahnya indeks kesiapsiagaan masyarakat. Pada Penilaian Indeks Ketahanan Daerah, indeks kesiapsiagaan masyarakat masih pada angka 0,11–0,32. nilai ini tergolong rendah artinya ada sedikit pemahaman atau upaya terhadap upaya kesiapsiagaa, namun belum sistematis atau menyeluruh.Hal ini memerlukan yang intervensi serius dari pemerintah daerah, BPBD, maupun mitra terkait dengan disertai program edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan. Diperlukan pendekatan partisipatif berbasis komunitas agar kesiapsiagaan masyarakat dapatbmeningkat.
3. Ketergantungan tinggi terhadap intervensi BPBD dalam setiap fase penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca).
4. Belum optimalnya sistem peringatan dini (EWS), baik dari aspek teknis (infrastruktur) maupun aspek sosial (kesadaran masyarakat).
5. Minimnya pengawasan internal dan tata kelola kinerja, mencakup kelemahan SPIP, dokumentasi kegiatan, hingga pelaporan berbasis hasil.
6. Tidak tersedianya rencana kontingensi dan jalur/tempat evakuasi yang memadai, sehingga penanganan kedaruratan menjadi tidak terstruktur.

Dampak terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah serta Program Nasional

a. Dampak terhadap Tujuan dan Sasaran Daerah

   Rencana Kinerja BPBD mendukung tujuan daerah yaitu Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

   Hambatan dalam kesiapsiagaan bencana langsung berimplikasi pada rasa aman masyarakat dan stabilitas sosial, yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya ketangguhan, kesejahteraan dan kemandirian.

b. Dampak terhadap Capaian NSPK dan SPM

   SPM Sub-Urusan Bencana dan Kebakaran belum tercapai optimal, misalnya; SPM bencana mensyaratkan tersedianya rencana kontingensi, jalur evakuasi, edukasi PRB, dan pelatihan relawan serta semua kalurahan memiliki sistem peringatan dini dan kapasitas tanggap darurat.

   NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dalam sub-urusan kebencanaan dan kebakaran belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

   Dengan hambatan yang ada dapat berakibat capaian NSPK dan SPM juga kurang optimal.

c. Dampak terhadap SDGs

   SDGs (Suistanable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah seperangkat 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 dengan tujuanuntuk menghapus kemiskinan, melindungi bumi, dan menjamin kesejahteraan semua orang.

   Hambatan tersebut dapat berakibat pada capaian SDGs terutama

   1. SDGs 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) terganggu oleh pertumbuhan kawasan strategis di zona rawan bencana tanpa mitigasi memadai.
   2. SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) belum tercapai karena belum meratanya edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko iklim ekstrem.

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan BPBD

Tantangan:

a. Keterbatasan SDM dan anggaran, termasuk belum adanya tenaga ahli teknis sistem peringatan dini, kebencanaan berbasis digital, serta perencanaan kontinjensi.

b. Beban kerja lintas sektor tidak sebanding dengan kapasitas BPBD saat ini.
c. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kebencanaan, tanpa diimbangi peningkatan kapasitas institusi.
d. Perubahan iklim dan intensitas bencana yang meningkat menambah kompleksitas tugas.

Peluang:

a. Dukungan regulatif dari pusat melalui PP 2/2018 dan Permendagri terkait SPM serta peluang pembiayaan dari dana dekonsentrasi, Danais, atau Dana Siap Pakai BNPB.
b. Pendekatan kolaboratif penthahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, masyarakat) dapat diperkuat melalui forum PRB, forum KALTANA, dan mitra perguruan tinggi.
c. Digitalisasi sistem peringatan dini dan pelaporan memungkinkan efisiensi pelayanan darurat.
d. Tersedianya instrumen kajian risiko bencana dan tools perencanaan kontinjensi yang bisa diadopsi lebih luas di level kalurahan.
e. Momentum YIA dan sektor pariwisata sebagai pengungkit mitigasi berbasis kawasan strategis rawan bencana.

Formulasi Isu-Isu Penting: Rekomendasi Strategis untuk Program Prioritas 2026

Berikut rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan perumusan program dan kegiatan BPBD tahun 2026:

No	Isu Strategis	Program
1	Rendahnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	Pembentukan dan pengembangan program Kaltana dan pemberdayaan Forum PRB Kalurahan Pelatihan dan simulasi kebencanaan berbasis sekolah, kelompok rentan, dan destinasi wisata.
2	Sistem pengendalian internal yang belum optimal	Penguatan SPIP, pelatihan dokumentasi kegiatan, dan integrasi pelaporan kinerja berbasis hasil
3	Kurangnya EWS yang fungsional	Kolaborasi dengan BMKG, UGM, dan komunitas lokal untuk sistem EWS terintegrasi dan berbasis masyarakat.
4	Minimnya rencana kontinjensi dan infrastruktur tanggap darurat	Penyusunan rencana kontinjensi baik skala kabupaten/ Kalurahan

		Perencanaan jalur evakuasi dan titik evakuasi.
5	Belum maksimalnya pencapaian SPM	Penyesuaian anggaran untuk pemenuhan indikator SPM dan pengawasan capaian standar layanan dasar secara bertahap.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2026

Rancangan awal RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 telah memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang secara substansial mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD. Salah satu prioritas pembangunan daerah adalah peningkatan ketahanan sosial dan lingkungan hidup, yang di dalamnya mencakup upaya mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat. Program Penanggulangan Bencana yang tercantum dalam RKPD telah memuat kegiatan strategis seperti kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan darurat, pemulihan pascabencana, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana.

Kegiatan BPBD yang direncanakan dalam Renja 2026 pada umumnya telah sesuai dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana diarahkan dalam RKPD. Indikator kinerja yang tercantum, seperti peningkatan jumlah Kalurahan Tangguh Bencana (KATANA) dan cakupan wilayah rawan bencana yang memiliki sistem peringatan dini, menunjukkan konsistensi antara dokumen RKPD dan rencana kerja BPBD. Namun demikian, aspek penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem pengendalian internal seperti akuntabilitas kinerja, pengelolaan data kebencanaan, serta pelibatan masyarakat secara lebih sistematis belum sepenuhnya tergambar dalam indikator RKPD.
Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelarasan lebih lanjut pada tahap penyusunan RKA agar kegiatan BPBD benar-benar mendukung pemenuhan prioritas daerah sekaligus sasaran Renstra BPBD. Disarankan agar indikator kinerja yang mencerminkan aspek tata kelola dan akuntabilitas pelayanan publik turut diusulkan untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan tahunan. Selain itu, penguatan peran masyarakat dan kolaborasi lintas sektor (pendekatan penthahelix) perlu terus diupayakan agar pelayanan kebencanaan menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam Proses penyempurnaan dilakukan penyesuian terhadap kebutuhan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tertuang dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	*Rancangan Awal RKPD Tahun 2026*					Hasil Analisis Kebutuhan					*Catatan Penting*
	Program/Kegiatan	Lokasi	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	***Pagu Indikatif (Rp. 000)***	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kabutuhan Dana (Rp.000)**	
1	**2**	3	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Kulon Progo	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.211.316,7	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Kulon Progo	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.305.758,9	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo			13.209,6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo			8.938,0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.571,4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.299,8	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	2.638,2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	2.638,2	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo			1.787.971,6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo			1.894.346,6	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	1.753.178,2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/bulan	1.859.853,2	
	penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	32.396,8	penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	32.096,8	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.396,6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	2.396,6	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo			19.356,8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo			19.356,8	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	19.356,8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	19.356,8	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo			7.661,2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kulon Progo				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	7.661,2						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kulon Progo			187.210,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kulon Progo			187.210,1	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	56.727,4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	56.727,4	
	Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.340,0	Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	5.340,0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	125.142,7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	125.142,7	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kulon Progo			195.907,4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kulon Progo			195.907,4	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	176.045,6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	176.045,6	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	19.861,8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	19.861,8	
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Kab. Kulon Progo	Prosentase Penanggulangan Bencana	-	945.817,5	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Kab. Kulon Progo	Prosentase Penanggulangan Bencana		892.346,7	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo			36.936,4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo			36.936,4	

		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang	36.936,4		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang	36.936,4	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Kab. Kulon Progo			322.725,3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Kab. Kulon Progo			251.557,3	
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	20 Unit	14.068,0		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 unit	23.500,0	
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	200 Orang	49.614,9		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	200 Orang	49.614,9	
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	17 orang	30.000,0	

		Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	203.991,8		Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	93.391,8	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	110 Kawasan	55.050,6		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	110 kawasan	55.050,6	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Kab. Kulon Progo			521.487,7	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Kab. Kulon Progo			515.187,7	
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	485.132,3		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	478.832,3	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	36.355,4		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	36.355,4	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Kab. KP			64.668,1	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Kab. KP			88.665,3	
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		*Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah*	1 Dokumen	8.654,5							

		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		*Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia*	1 Dokumen	36.259,2						
		Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Kegiatan	19.754,4		Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	19.754,4	
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	68.910,9		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	68.910,9	
3		**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Kab. Kulon Progo		-	688.789,1		**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Kab. Kulon Progo			750.792,4	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo			623.025,2		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo			709.025,7	

		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	591.352,0		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	582.952,0	
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	6.720,0		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 dokumen	4.620,0	
		Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran		Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran				Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran		Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	10 laporan	100.000,0	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	24.953,2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	21.453,7	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Kab. Kulon Progo			23.997,2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					-	
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkun yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	23.997,2		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkun yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	- dokumen	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Kab. Kulon Progo			41.766,7	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Kab. Kulon Progo			41.766,7	

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	28.134,4		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	28.134,4	
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa/Kelurahan	13.632,3		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 desa	13.632,3	
JUMLAH						3.845.923,3	JUMLAH					3.948.898,0	

Dalam proses penyusunan Renja BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, telah dilakukan tahapan review dan penyandingan antara hasil analisis kebutuhan program/kegiatan dengan dokumen Rancangan awal RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Proses ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian arah kebijakan, sasaran pembangunan daerah, serta keterkaitan antara kebutuhan riil di lapangan dengan perencanaan makro daerah. Hasil penyandingan menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja telah mengacu pada prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD, baik dari sisi jenis program, indikator, target kinerja, maupun alokasi anggaran yang direncanakan. Ada beberap perbedaan pada analisis kebutuhan dengan rancangan awal RKPD karena penyesuaian kebutuhan di lapangan tahun 2026 yang perlu disesuaikan harganya, disamping itu ada beberapa subkegiatan yang dialihkan ke sub kegiatan lain karena mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan ini diharapkan kinerja BPBD dalam pelayanan masyarakat akan semakin baik.

Secara makro sudah tedapat kesesuaian antara Rancangan Awal RKPD dan Renja. Kesesuaian ini mencerminkan bahwa tahapan sinkronisasi perencanaan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan, forum perangkat daerah, hingga penajaman prioritas melalui fasilitasi Bapperida. Tidak ditemukan adanya kegiatan baru di luar RKPD maupun perbedaan signifikan dalam besarannya. Bahkan, beberapa program strategis BPBD seperti peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat, penyediaan sarana tanggap darurat, serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) sub-urusan kebencanaan dan kebakaran telah diperkuat secara proporsional dalam dokumen RKPD. Hal ini memperkuat optimisme bahwa program prioritas BPBD akan mampu berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur dan akuntabel.

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Proses penelaahan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat diharapkan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok OPD. Hal ini diperoleh pada saat dilaksanakannya Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wadah bersama antar para pelaku (stakeholder) dengan OPD untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan OPD serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk tahun anggaran 2026.

Dalam proses ini sebagai jembatan mediasi antara seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik Rancangan Awal Renstra 2025-2029 yang akan segera disusun, tema dan prioritas pembangunan 2026 serta didasari review capaian kinerja OPD berdasarkan amanat target kinerja pada Renstra. Dari proses regulasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2026 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik Renstra, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Dari rangkaian proses perencanaan 2026 akan disaring beberapa usulan baik dari Masyarakat dengan format sebagai berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pendataan Relawan	Seluruh Kabupaten Kulon Progo	Data relawan BNBA	1 Kegiatan	Akan dipertimbangkan mekanismenya.

Adapun usulan dari pokok pikiran dewan seperti tertuang dalam format tabel berikut :

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pengadaan peralatan evakuasi kebencanaan	Banjarasri, Kalibawang, Kab. Kulon Progo, ,	Pengadaan Peralatan Evakuasi Bencana (Gergaji mesin, Ganset 3000Watt, Lampu, Kabel,dll) Perkumpulan RKPM Banjarasri	1 kegiatan	Belum bisa diakomodir karena saat ini masih berfokus pada pembentukan Kaltana, sebagai bahan masukkan dan akan dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
2	Sosialisasi kebencanaan	Pengasih, Kab. Kulon Progo, ,	Sosialisasi tentang kebencanaan 7 kalurahan se kap pengasih	7 kegiatan	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan perencanaan BPBD Dan apabila masyarakat melaksanakan mandiri atau difasilitasi Pemerintah Kalurahan, BPBD bersedia hadir menjadi narasumber.

3	Sosialisasi kebencanaan	Kokap, Kab. Kulon Progo, ,	Sosialisasi tentang kebencanaan 5 kalurahan se kap kokap	5 kegiatan	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan perencanaan BPBD Dan apabila masyarakat melaksanakan mandiri atau difasilitasi Pemerintah Kalurahan, BPBD bersedia hadir menjadi narasumber.
4	Penyebarluasan informasi kebencanaan	Pengasih, Kokap, Kab. Kulon Progo, ,	Permohonan papan informasi reklame kebencanaan (PRIORITAS 2)	1 kegiatan	Diakomodir sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pemerintah Pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menetapkan arah kebijakan pembangunan nasional yang menekankan pada upaya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu agenda transformasi tersebut adalah penguatan ketahanan sosial, ekologi, dan ekonomi terhadap risiko-risiko global, termasuk risiko bencana dan perubahan iklim. Dalam konteks ini, pengurangan risiko bencana menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Hal ini ditandai dengan dimasukkannya indikator pengurangan risiko bencana dalam pengukuran kinerja pembangunan daerah serta penekanan terhadap pentingnya pembangunan yang adaptif dan tangguh terhadap bencana.

RPJMN 2025–2029 secara eksplisit menetapkan prioritas nasional dalam arus utama pengurangan risiko bencana (PRB), adaptasi perubahan iklim, dan penguatan sistem peringatan dini. Salah satu kebijakan prioritas adalah penguatan kelembagaan penanggulangan bencana yang inklusif dan kolaboratif, melalui peningkatan kapasitas BPBD di daerah dalam hal manajemen risiko, pemulihan pascabencana, dan sistem logistik kebencanaan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen data dan informasi bencana serta memperkuat skema pembiayaan kebencanaan yang berkelanjutan, termasuk perlindungan sosial adaptif dan asuransi risiko bencana.

Bagi BPBD Kabupaten Kulon Progo, arah kebijakan nasional ini menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan tahunan yang tidak hanya bersifat responsif terhadap kejadian bencana, tetapi juga berorientasi pada penguatan sistem pengurangan risiko secara menyeluruh. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan regulasi lokal tentang penanggulangan bencana, penyusunan dokumen perencanaan kontinjensi dan RPKB, serta pengembangan sistem informasi kebencanaan daerah. Dengan mengacu pada RPJMN 2025–2029, BPBD diarahkan untuk semakin adaptif dalam menghadapi ancaman bencana yang kompleks, memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta menyelaraskan seluruh upaya penanggulangan bencana dengan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Ada 2 substansi utama yang ada pada RPJMN 2025-2029 yaitu : Pertama adalah bagaimana RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 atau Indonesia Emas 2045, dapat tercapai di dalam fondasi lima tahun pertama dari

pembangunan RPJMN 2025-2029, Substansi kedua ialah adanya penuangan visi-misi dan program Presiden terpilih pada tahun 2024 ke dalam RPJMN 2025-2029. Salah satu arah / tujuan Indonesia emas 2045 adalah misi ketahanan sosial budaya dan ekologi yang didalamnya terdapat tujuan resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim. Diamanatkan bahwa bencana merupakan salah satu dari agenda pembangunan dalam kerangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Tidak dapat dipungkiri bahwa bencana pada saat ini telah menjadi isu nasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam program pembangunan nasional. Hal ini terjadi karena bencana dapat menghambat bahkan memundurkan program pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan tanpa memperhatikan aspek pengurangan resiko bencana akan menjadikan sia-sia saat bencana terjadi. Pembangunan infrastruktur pada periode ini juga akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya. Melalui kerangka pembangunan infrastruktur tersebut, tujuan pembangunan nasional menuju negara yang makmur dan sejahtera diharapkan dapat terwujud.

Infrastruktur sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Ketersediaan infrastruktur kebencanaan merupakan upaya pencegahan, adaptasi, serta antisipasi dampak kerugian baik secara finansial maupun korban jiwa. Kerugian finansial akibat bencana alam dalam kurun waktu 2002-2015 mencapai 1,26 miliar USD per tahun (EM-DAT database, 2018). Upaya pengurangan kerugian melalui pengembangan infrastruktur yang berketahanan bencana masih mendapat tantangan sejalan dengan tren pembangunan perkotaan dan kawasan strategis ekonomi yang masih dilakukan di zona rawan bencana. Di samping itu, upaya pengurangan resiko bencana masih belum didukung oleh ketersediaan masterplan peningkatan ketangguhan infrastruktur terhadap bencana. Untuk mendukung RPJMN tersebut, sudah selayaknya Pemerintah Daerah selalu memperhatikan aspek kebencanaan dalam pembangunan serta memberikan pemahaman dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana, mengajak dan menggali potensi serta peran serta masyarakat / dunia usaha dalam penanganan bencana serta mendukung infrastruktur tangguh bencana dalam program pasca bencana.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan tujuan dan sasaran Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 didasarkan pada rumusan isu-isu strategis yang telah dianalisis dalam Bab II. Tujuan dan sasaran ini dirancang untuk menjawab tantangan

penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, mendukung pencapaian target Renstra 2025–2030, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Tujuan dan Sasaran BPBD sejalan dengan Visi dan Misi Bupati Terpilih. Visi Bupati Terpilih adalah: "terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan". Dan BPBD mendukung visi tersebut melalui dukungan terhadap misi yang ke-4 yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, lingkungan yang lestari dan tangguh bencana.

Tujuan Rencana Kerja BPBD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana melalui penguatan sistem pengurangan risiko bencana yang menyeluruh.
2. Meningkatkan efektivitas manajemen kebencanaan pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
4. Mewujudkan pelayanan kebencanaan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara merata dan berkelanjutan.
5. Menguatkan tata kelola data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan dapat diakses lintas sektor.

Berdasarkan tujuan di atas, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Keterkaitan dengan Isu Strategis Bab II
1	Terwujudnya pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam pembangunan daerah	Belum optimalnya pengarusutamaan PRB dan minimnya kebijakan PRB dalam tata ruang dan lingkungan
2	Terwujudnya sistem kesiapsiagaan bencana yang inklusif dan adaptif	Masih rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dan keterbatasan sistem peringatan dini
3	Meningkatnya pelayanan dasar kebencanaan sesuai SPM	Amanat PP No. 2 Tahun 2018 dan keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan SPM
4	Meningkatnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana belum dilaksanakan secara kolektif lintas sektor (penthahelix)
5	Terselenggaranya penanganan darurat dan pemulihan pascabencana secara cepat, tepat, dan inklusif	Masih terbatasnya perencanaan kedaruratan dan kapasitas pemulihan pasca bencana

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah.

Sasaran kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 sesuai dengan Rancangan Renstra BPBD Kulon Progo 2025-2029 yaitu Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana di Kabupaten Kulon Progo.

Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang. Dari sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja BPBD yang dapat digunakan untuk menilai capaian sasaran dimaksud. Adapun indikator kinerja yang dimaksud adalah capaian penanggulangan bencana yang mengemas beberapa komponen penanggulangan bencana didalamnya yang dapat diukur maupun dinilai guna mengetahui tingkat ketercapaian sasaran dalam periode bersangkutan. Tahun 2026 ini ditetapkan c apaian ketangguhan masyarakat menghadapi bencana dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan dan Target BPBD
pada Rencana Kerja BPBD Tahun 2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja
Meningkatnya Ketangguhan terhadap bencana.		Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,66
	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran	Persentase penanggulangan bencana	%	94,32
		Persentase penanggulangan kebakaran	%	100
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	A (>80-90)
	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	nilai	2,0 - 3,0

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja OPD hendaknya selaras dengan isu-isu strategis dan tema pembangunan, baik di level Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Begitu halnya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo harus menyusun Rencana Kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dan harus mendukung Rancangan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029. Untuk mencapai hal tersebut, maka BPBD berusaha untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menentukan program dan kegiatan sebagai berikut :

	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/bulan
			penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14 laporan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan

			Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan
2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 unit
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana	200 Orang

			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	17 orang
			Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam	1 Dokumen
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) yang dilegalkan	1 Kegiatan
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen

3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 dokumen
		Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	10 Laporan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa/ Kelurahan

Guna memastikan pelaksanaan Program dan kegiatan, diperlukan adanya indikator kinerja program. Indikator kinerja program merupakan alat ukur utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan BPBD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, indikator kinerja disusun secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (prinsip SMART), sehingga memungkinkan adanya pemantauan dan evaluasi yang obyektif terhadap capaian hasil.

Penyusunan indikator kinerja ini didasarkan pada kerangka logis pembangunan yang mengaitkan input, output, outcome, hingga dampak (impact) dari setiap program. Indikator kinerja mencerminkan target-target konkret yang ingin dicapai, seperti peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, jumlah wilayah yang memiliki sistem peringatan dini, kecepatan respon darurat, maupun ketersediaan logistik dan sarana prasarana penanggulangan bencana. Selain itu, indikator juga diarahkan untuk memastikan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana sesuai regulasi nasional.

Dengan indikator yang jelas dan terukur, BPBD dapat lebih mudah dalam mengendalikan pelaksanaan program, melakukan pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Indikator ini juga menjadi acuan dalam pengalokasian sumber daya secara efisien dan dalam menyusun laporan kinerja tahunan perangkat daerah.

Indikator Kinerja Program BPBD Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Indikator kinerja Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga yang tersosialisasi KIE rawan bencana	%	100
		Persentase pelayanan terhadap warga di daerah rawan bencana	%	100
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran	Persentase pembinaan relawan kebakaran	%	100
		Persentase pelayanan terhadap warga terdampak kebakaran	%	100
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase layanan dasar penanggulangan bencana dan kebakaran yang terfasilitasi Dana Keistimewaan	%	33,33
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Dalam merumuskan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, terdapat sejumlah faktor strategis yang menjadi dasar pertimbangan. Pertama, perumusan program dan kegiatan didasarkan pada upaya pencapaian **visi** dan **misi** Kepala Daerah, khususnya misi keempat mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, lingkungan yang lestari dan tangguh bencana terutama dalam aspek peningkatan rasa aman dan ketangguhan masyarakat dari ancaman bencana sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kebencanaan, mendukung kesiapsiagaan masyarakat, serta melindungi hasil-hasil pembangunan daerah dari risiko bencana.

Selain itu, program BPBD turut disusun untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Aman dan Berkelanjutan) dan Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Pendekatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) menjadi kerangka utama dalam penyusunan kegiatan, baik melalui mitigasi struktural maupun non-struktural, peningkatan kapasitas masyarakat, dan edukasi kebencanaan.

Faktor pengurangan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif juga menjadi perhatian utama dalam penyusunan kegiatan. Mengingat bencana memiliki dampak paling besar terhadap kelompok rentan, maka program diarahkan untuk memperkuat sistem peringatan dini, evakuasi aman, fasilitasi logistik darurat, dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan kontinjensi berbasis komunitas. Seluruh program tersebut juga bertujuan mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana dan kebakaran sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 2 Tahun 2018 dan Permendagri No. 101 Tahun 2018, serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penanggulangan bencana.

Pertimbangan lain yang digunakan adalah hasil evaluasi pelaksanaan program pada tahun sebelumnya, isu strategis daerah, serta arahan kebijakan nasional dan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMN, RPJMD, dan RKPD Tahun 2026. Selain itu, penetapan program juga memperhatikan pendayagunaan potensi ekonomi wilayah, terutama dalam mengantisipasi risiko pada kawasan strategis seperti bandara YIA, kawasan pariwisata, dan kawasan pertumbuhan ekonomi lain yang berisiko terhadap bencana.

Secara garis besar, BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 menetapkan 2 program utama dengan total 8 kegiatan, yang seluruhnya mendukung capaian indikator

kinerja perangkat daerah sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup aspek pencegahan dan kesiapsiagaan, penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta penyediaan layanan dasar kebencanaan dan kebakaran.

Sebaran lokasi program dan kegiatan sebagian besar memiliki karakteristik lintas wilayah, karena menyangkut sistem kewaspadaan bencana yang bersifat kabupaten. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang bersifat spesifik lokasi atau kelompok sasaran, seperti sosialisasi dan edukasi kebencanaan.

Adapun total kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan tahun 2026 adalah sebesar Rp 3.948.898.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan sumber pendanaan APBD Murni Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026.

Setelah dilakukan penyandingan antara Renja BPBD dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa rumusan program dan kegiatan telah sepenuhnya sesuai baik dari sisi jenis program/kegiatan, target, maupun besaran pagu indikatifnya. Tidak ditemukan adanya kegiatan baru yang tidak tercantum dalam RKPD, begitu pula tidak terdapat perbedaan substansial terkait indikator, lokasi, dan sasaran kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah dilaksanakan secara sinergis dan sinkron antara BPBD dengan perencanaan makro daerah.Dalam merumuskan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, terdapat sejumlah faktor strategis yang menjadi dasar pertimbangan. Pertama, program disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mendorong peningkatan ketangguhan daerah dan masyarakat terhadap risiko bencana. Seluruh program dirancang untuk memperkuat pengurangan risiko bencana (PRB) sebagai pendekatan proaktif dalam meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini mencakup kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural, edukasi kebencanaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat.

Selain itu, program BPBD juga mempertimbangkan aspek pengurangan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif, mengingat bencana berdampak signifikan terhadap kelompok rentan dan berisiko memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang disusun tidak hanya bertujuan menangani kejadian bencana secara reaktif, tetapi juga diarahkan untuk melindungi kelompok rentan melalui pembangunan sistem peringatan dini, fasilitasi logistik darurat, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan kontinjensi berbasis komunitas. Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah perintah regulatif dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana, arahan kebijakan nasional dan daerah (RPJMN, RPJMD, RKPD), serta hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

Untuk mencapai hal tersebut, maka BPBD berusaha untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menentukan program dan kegiatan berdasar Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Target	*Anggaran 2026*	*Prakiraan Maju 2027*
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi				100 %	2.305.758.929,00	2.421.046.875
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan pelaksanaan subkegiatan	2 dokumen	8.938.000,00	9.384.900
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.299.800,00	6.614.790
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	2.638.200,00	2.770.110
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		laporan pelaksanaan subkegiatan	3 dokumen	1.894.346.553,00	1.989.063.881
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/ bulan	1.859.853.153,00	1.952.845.811
				penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	32.096.800,00	33.701.640
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.396.600,00	2.516.430
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		laporan pelaksanaan subkegiatan	1 dokumen	19.356.800,00	20.324.640
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	19.356.800,00	20.324.640
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		laporan pelaksanaan subkegiatan	3 dokumen	187.210.148,00	196.570.655
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	56.727.412,00	59.563.783
				Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	5.340.000,00	5.607.000

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Target	*Anggaran 2026*	*Prakiraan Maju 2027*
1	2	3	4	5	6	7	8	8
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	125.142.736,00	131.399.873
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		laporan pelaksanaan subkegiatan	2 dokumen	195.907.428,00	205.702.799
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	176.045.628,00	184.847.909
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	19.861.800,00	20.854.890
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase warga yang tersosialisasi KIE rawan bencana Persentase pelayanan terhadap warga di daerah rawan bencana				100 % 100 %	892.346.700,00	889.714.035
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		laporan pelaksanaan subkegiatan	1 dokumen	36.936.400,00	38.783.220
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang	36.936.400,00	38.783.220
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		laporan pelaksanaan subkegiatan	5 dokumen	251.557.300,00	216.885.165
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 unit	23.500.000,00	98.061.390

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Target	*Anggaran 2026*	*Prakiraan Maju 2027*
1	2	3	4	5	6	7	8	8
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	200 Orang	49.614.900,00	
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	17 orang	30.000.000,00	52.095.645
				Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	93.391.800,00	8.925.000
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	110 kawasan	55.050.600,00	57.803.130
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		laporan pelaksanaan subkegiatan	2 dokumen	515.187.700,00	540.947.085
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	478.832.300,00	502.773.915
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	36.355.400,00	38.173.170
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		laporan pelaksanaan subkegiatan	2 dokumen	88.665.300,00	93.098.565

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Target	*Anggaran 2026*	*Prakiraan Maju 2027*
1	2	3	4	5	6	7	8	8
				Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) yang dilegalkan	1 Kegiatan	19.754.400,00	20.742.120
				Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	68.910.900,00	72.356.445
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pembinaan relawan kebakaran				100 %	750.792.371,00	683.331.990
		Persentase pelayanan terhadap warga terdampak kebakaran				100 %		
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		laporan pelaksanaan subkegiatan	4 dokumen	709.025.671,00	639.476.955
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	582.952.000,00	612.099.600
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 dokumen	4.620.000,00	4.851.000
				Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	10 laporan	100.000.000,00	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk	10 Unit	21.453.671,00	22.526.355

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Target	*Anggaran 2026*	*Prakiraan Maju 2027*
1	2	3	4	5	6	7	8	8
				Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		laporan pelaksanaan subkegiatan	2 dokumen	41.766.700,00	43.855.035
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	28.134.400,00	29.541.120
				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 desa	13.632.300,00	14.313.915
JUMLAH							**3.948.898.000**	**3.994.092.900**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta berpedoman pada dokumen Rancangan Rencana Strategis BPBD Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024. Penyusunan Renja ini juga mempertimbangkan isu strategis, capaian kinerja sebelumnya, aspirasi pemangku kepentingan, dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional serta prioritas pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renja dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi internal yang melibatkan seluruh seksi teknis di lingkungan BPBD, serta konsultasi dan sinkronisasi dengan Bapperida Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, materi perencanaan telah terkoordinasi secara menyeluruh dan menggambarkan kebutuhan riil organisasi berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Renja ini selanjutnya menjadi dokumen utama perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai dasar penyusunan anggaran, pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, serta tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah. Akuntabilitas pelaksanaan tugas diwujudkan melalui perencanaan yang berorientasi hasil (result-oriented planning) yang mengutamakan keterukuran pada seluruh tahapan, mulai dari input, output, outcome, benefit, hingga impact dari program yang dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan perhatian serius terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Program dan kegiatan yang telah dirancang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik. Koordinasi lintas sektor, kejelasan peran pelaksana, serta kelengkapan perangkat kebijakan operasional harus diperkuat agar target kinerja dapat dicapai secara maksimal.

Sebagai langkah tindak lanjut dari dokumen ini, BPBD akan segera menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang lebih rinci serta mendorong peningkatan kapasitas pelaksana program di lapangan. Penguatan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi teknis, kalurahan, masyarakat, serta dunia usaha, menjadi bagian penting untuk memperluas cakupan layanan kebencanaan dan membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Diharapkan melalui pelaksanaan Rencana Kerja ini, BPBD Kabupaten Kulon Progo mampu mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih siap, tanggap, dan tangguh, serta memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kehidupan dan penghidupan masyarakat Kulon Progo di masa mendatang.

Wates, 29 Juli 2025

Plt. Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kulon Progo

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

HERI DARMAWAN, A.P., MM.

NIP. 19740421 199311 1 001

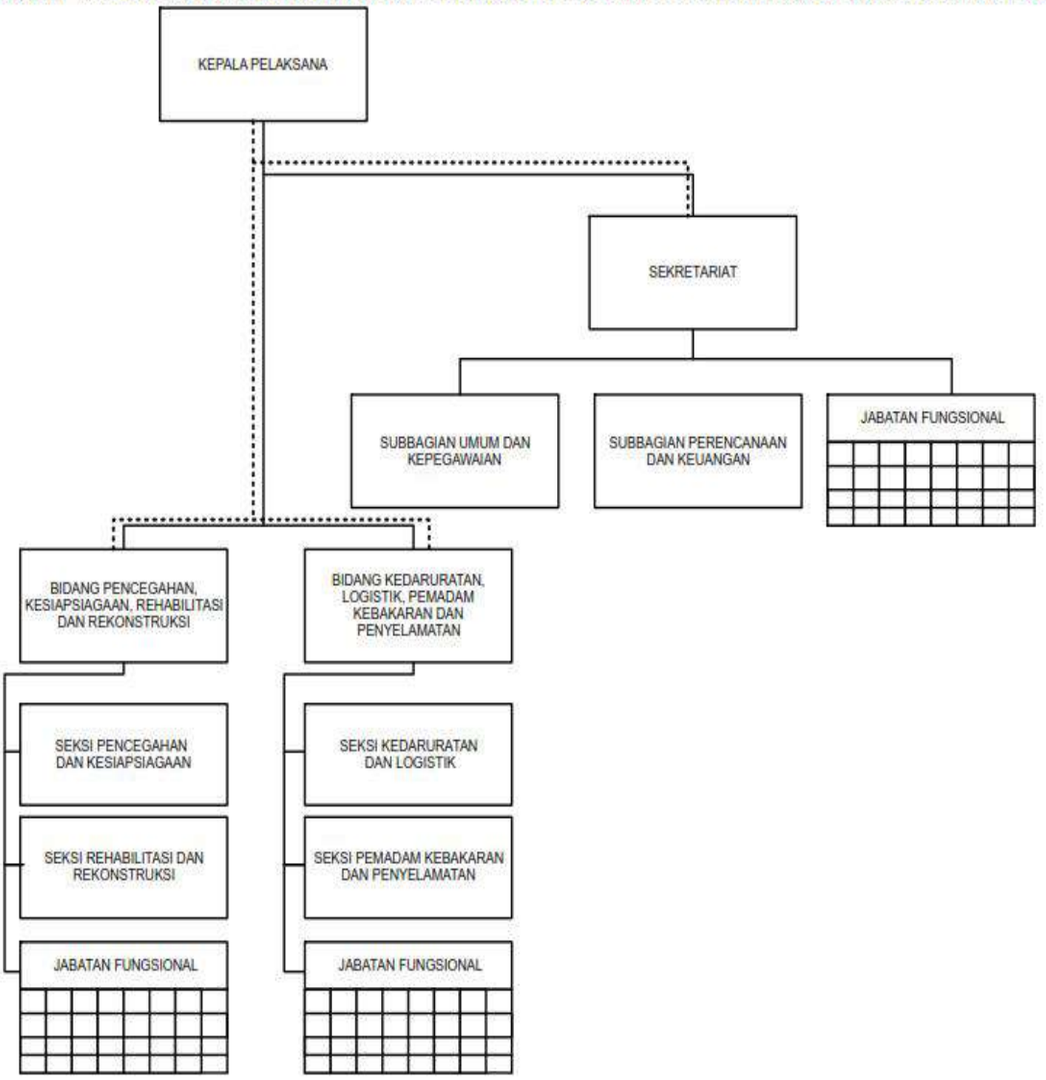
Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BERDASARKAN :

PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN

RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KULON PROGO

Alamat : Jalan Sugiman No. 03 Wates Kulon Progo Telp./Fax. (0274)773026
Email : dinsos@kulonprogokab.go.id
Website : dinsos.kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

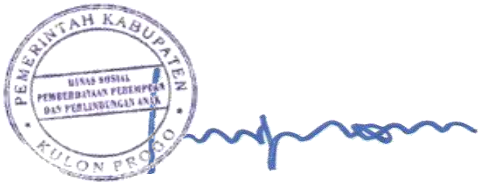
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dapat kami susun. Rencana Kerja ini disusun guna memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan sekaligus sebagai dokumen program kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2022-2026 ,Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat daerah tahun 2023-2026, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mohon masukan guna Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dan karyawati Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka melaksanakan tugas di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Wates, 29 Juli 2025

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo,



Drs. LUCIUS BOWO PRISTIYANTO

Pembina Utama Muda, IV/c

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

HALAMAN JUDUL .....

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GRAFIK v

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024).... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah..... 12

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Perangkat Daerah..... 26

2.4. Review Terhadap RKPD..... 37

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 56

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH..... 60

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 60

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinsos PPPA..... 61

3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 62

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 64

BAB. V PENUTUP 71

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 ……..	7
Tabel 2.2	Pengukuran Kinerja Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024	8
Tabel 2.3	Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024……..	9
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Provinsi/Kabupaten/Kota Kulon Progo……	10
Tabel 2.2/ T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo……..	13
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026.....	23
Tabel 2.4	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial 2024.....	24
Tabel 2.5	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial 2024.....	25
Tabel 2.6	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial 2024.....	27
Tabel 2.7	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 2024...	28
Tabel 2.8	Persentase Perlindungan Sosial 2024.....	28
Tabel 2.9	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan	

	pengarusutamaan gender Tahun 2024.....	28
Tabel 2.10	OPD Yang telah melaksanakan PPRG & ARG Tahun 2024.....	31
Tabel 2.11	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2024.....	32
Tabel 2.12	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layana Dari Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Tahun 2024.....	33
Tabel 2.13	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2024.....	34
Tabel 2.4/T-C.31.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo.....	37
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	56
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026	61
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Progam Dinas Sosial PPPA Tahun 2026.....	62
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)	65

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, , Proses penyusunan Renja Perangkat daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. oleh karena itu dalam rangka pemenuhan ketentuan tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah serta Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaa perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan kebijakan, program, kegiatan Perangkat Daerah bangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Keterkaitan Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial PPPA Tahun 2026 disusun berdasarkan dokumen RKPD Tahun 2026, yang mengacu pada dokumen Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 serta Rancangan Renstra Dinas sosial PPPA Tahun 2025-2029.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial PPPA Tahun 2026 akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial PPPA yang kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 disusun dengan proses sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
5. Telaah terhadap rancangan awal Perangkat Daerah
6. Perumusan tujuan dan sasaran
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah
10. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah
11. Pembahasan forum Perangkat Daerah
12. Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ‘
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah beberapakali diuabh terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganggant Undang=Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta karya menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Kedua atass Keputusan Menteri dalam Negeri negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peratrran Gubernur DIY nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 tahun 2024 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon progo Tahun 2026;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud : Rencana Kerja Dinas Sosial PPPA Tahun 2026 di susun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan mengintegrasikan program-program pembangunan dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

2. Tujuan :

a) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Daerah;
b) Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2026 dan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)) Tahun Anggaran 2026,
c) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi urusan melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.
d) Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 memuat program dan kegiatan Dinas sosial PPPA Tahun 2026.

Sistematikan penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial PPPA Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo mendukung pencapaian sasaran Daerah "Meningkatnya Pendapatan masyarakat" dan sasaran "Meningkatnya kualitas penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel."

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas, dinas melaksanakan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2026 melaksanakan 10 program dan 13 kegiatan

Hasil pengukuran dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dalam dokumen Renja Tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2024. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2024, sedangkan jumlah Anggaran (Rupiah) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024. Selengkapnya hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial PPPA Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran/ Kinerja PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya pemenuhan perlindungan jaminan sosial masyarakat	Indeks perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	73,61	75,94
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	85,12	85,12
		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata rata prosentase pencapaian program pada masing masing perangkat daerah	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024 yaitu Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan Indikator Kinerja :

Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan target 73.01 tercapai 75.94;

Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dengan target 85.12 tercapai 85.12;

Presentase Pencapaian Program pada masing masing perangkat Daerah dengan target 100 tercapai 100.

Faktor Pendorong terhadap ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah antara lain :

Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala,

Verifikasi dan validasi data dalam penyaluran bantuan sosial, memperkuat jejaring dalam penangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,

Masyarakat sudah berani untuk melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan Tindakan yang tepat terhadap kasus yang terjadi

Tabel 2.2.
Pengukuran Kinerja Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Progam Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	57.78	61,40
2.	Program Rehabilitasi sosial	Presentase Pelayanan Dasar Urusan wajib Bidang Sosial	100	100
3.	Program Penanganan Bencana	Presentase Pelayanan Dasar Urusan wajib Bidang Sosial	100	100
4.	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan TMP	100	100
5.	Program Perlindungan sosial	Persentase Perlindungan sosial	31.20	32.52
6.	Program Pemberdayaan Peempuan dan Pengarusutamaan Gender	Persentase Pemberdayaan Perempuan dan PUG	63,90	73,98
7.	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan	99,99	99,99
8.	Program Pemenuhan Hak anak	Persentase Pemenuhan Hak anak	31,03	31,03

Sumber : Dinas Sosial PPPA Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 8 Program yang dilaksanakan pada Tahun 2024, semua Program tercapai dan ada yang melebihi target.

Faktor Pendorong dari ketercapaian Program adalah memperbanyak jejaring dengan Perangkat Daerah terkait maupun stockholder dan pilar pilar sosial yang banyak membantu dalam pelaksanaan Program di Dinas Sosial PPPA.

Dampak terhadap ketercapaian Program dan Kegiatan adalah masyarakat dan Penerima Manfaat dari Bantuan Sosial maupun pemberdayaan masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Tabel 2.3.
Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024

No	Uraian	2024		
		Alokasi	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	19.071.727.678	18.598.253.538	97.52
2.	Belanja Modal	40.861.264	39.020.017	95.49
	Jumlah	**19.112.588.942**	**18.637.273.555**	**97.51**

Sumber : Dinas Sosial PPPA Tahun 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran pada Tahun 2024 sangat tinggi yaitu sebesar 97.51. adapun sisa dari yang tidak tercapai karena selisih antara SHBJ dengan harga pasar.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian Renja untuk Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum tabel 2.4 / Tabel T-C.29.

Tabel 2.4/
Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	13.472,04		3.542,60	3.396,26	0,96	3.748,06		
1	01			*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*								
1	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,38	9,2	11,20	10,31	0,92	18,68	38.19	9.55
1	01	01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74,19	7,8	8,77	7,96	0,91	8,52	24.28	6.07
1	01	01	02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN*								

1	01	01	03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9.877,17	2.381,56	2.788,96	2.677,06	0,96	2.828,51	7.887,13	1.971,78
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	209,62	4.89	49,23	46,05	0,94	49,23	100.17	25.04
1	01	02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	49,67	9,38	10,80	10,54	0,98	10,50	30.42	7.60
1	01	02	01	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen administrasi umum*								
1	01	02	02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288,90	24,56	52,80	37,09	0,70	44,78	106.43	26.60
1	01	02	03	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah penambahan aset*								
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	670,80	0	35,58	33,74	0,95	-	33.74	8.43
1	01	03		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan*				-				

					Daerah Kabupaten/Kota								
1	01	03	01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1.473,28	357,17	386,81	384,33	0,99	386,38	1.127,88	281.97
1	01	03	02	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*				-				
1	01	03	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya yang diperlihara/direhabilitasi	768,03	173,69	198,45	189,18	0,95	401,45	764.32	191.08
				Program Pemberdayaan Sosial	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial**	340,36		83,76	75,78	0,90	91,62	167.4	41.85
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial*								
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	35,80	6,61	13,92	13,64	0,98	6,64	26.89	6.7
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial*								
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat	43,00	12,74	8,04	7,98	0,99	12,10	32.82	8.20

					Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota								
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	57,86	77,44	12,40	12,34	0,99	9,70	99.48	24.87
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	203,69	12,36	49,40	41,82	0,85	63,17	117.35	29.33
				Program Rehabilitasi Sosial	**Presentase Pelayanan Dasar urusan wajib bidang sosial**	58.366,50		653,68	574,19	0,88	611,08		
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosia*								
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2.109,82	333,80	429,14	352,08	0,82	429,14	.1.115.02	278.75
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga	200,53	23,81	25,70	25,20	0,98	29,63	78.64	19.66

					Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota								
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	311,66	867,49	79,76	79,08	0,99	51,33	.997.9	249.47
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	212,17	26,30	26,60	26,55	1,00	26,10	78.95	19.73
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	112,21	11,27	12,34	12,33	1,00	12,00	35.6	8.9
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	98,72	15,75	15,86	15,31	0,97	15,86	46.92	11.73
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	438,30	87,08	58,30	57,76	0,99	36,80	181.64	45.41
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	*Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib*								

				(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Bidang Sosial*								
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	93,01	16,31	6,00	5,88	0,98	10,24	32.43	8.10
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Persentase Perlindungan Sosial**	5.103,83		13.526,56	13.395,08	0,99	13.688,25	27.083,33	6.770.83
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perlindungan Sosial*								
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Didata	2.842,00	199,38	169,63	135,99	0,80	103,18	438.55	109.63
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Program Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	2.261,83	155,21	159,81	126,12	0,79	121,58	402.91	100.72
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (5.104 Keluarga,) Bansos BPNT APBD 4.400 KPM + Bansos Cukai	-	13.031,42	13.197,12	13.132,97	1,00	13.463,49	39.627.88	9.906,97

					Rokok 704 orang								
				Program Penanganan Bencana	**Presentase Pelayanan Dasar urusan wajib bidang sosial**	184,93		170,54	168,71	0,99	153,15	321.86	80.46
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial*								
				Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian kewenangan Kab/Kota)	127,45	30,04	30,04	29,58	0,98	32,12	91.74	22.93
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosia*								
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	57,48	13,21	13,74	13,69	1,00	3,49	30.39	7.597
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	296,39	91,69	126,76	125,45	0,99	117,54	334.68	83.67
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**Persentase Cakupan Pemeliharaan**	85,26		41,34	36,64	0,89	43,91	80.55	20.13

					Taman Makam Pahlawan								
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	85,27	40,65	41,34	36,64	0,89	43,91	121.2	30.3
				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
				Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	**Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender**	167,37		112,81	108,65	0,96		108.65	27.16
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota									
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		0	50,66	49,49	0,98	50,25	99.74	24.93
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender*								
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan	51,58	21,58	21,25	19,68	0,93	21,36	62.62	15.65

				Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas								
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	115,78	138,60	40,90	39,48	0,97	40,34	218.42	54.60
				Program Perlindungan Perempuan	**Presentase perlindungan perempuan**	551,44		629,82	565,19	0,90		565.19	141.29
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perlindungan Perempuan*								
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	551,45	37,78	227,35	224,24	0,99	217,87	479.89	119.97
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-								

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	367,61	249,11	332,70	271,64	0,82	360,07	880.82	220.20
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumberdaya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas		0,00	69,77	69,32	0,99	72,38	141.7	35.42
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**Presentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	830,07		176,48	169,47	0,96		169.47	42.36
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	830,07	172,72	176,48	169,47	0,96	146,84	489.03	122.25

					Kabupaten/Kota								
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	**Cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	49,74		0,00	0,00				
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender*								
				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5,27	5,18					5.18	1.29
				Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	44,47	43,97					43.97	10.99
				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		17.213,46		175,00	172,29	0,98		172.29	43.07
				Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya									
				Pengembangan Ekonomi Perempuan			0	175,00	172,29	0,98		172.29	43.07

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan Dan Anak dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. berdasarkan atas hasil capaian indikator standar kebutuhan pelayanan. Hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana Tabel 2.2 atau Tabel T-C.30.

Tabel 2.2
Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo

V	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti											
	Jumlah Yang Harus Dilayani											
1	Layanan data dan pengaduan ***layanan data*** *yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS),* ***layanan pengaduan*** *merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial*	V		519	50	50		519				SPM
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat ***layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat*** *merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar*	V		2	2	2		2				SPM
3	Penyediaan permakanan *(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan*	V		5063	350	370		5063				SPM

	difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)											
4	Penyediaan sandang *(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)*	V		225	300	300		225				SPM
5	Penyediaan alat bantu *(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)*	V		30	30	30		30				SPM
6	Penyediaan perbekalan kesehatan *(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)*	V		371	0	0		371				SPM
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial *(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)* ***bimbingan fisik** adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym,* ***bimbingan mental dan spiritual** adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual,* ***bimbingan sosial** adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial*	V		463	320	300		463				SPM
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar *(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan* *difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)*	V		463	320	300		463				SPM

9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	V		1	0	0		1				SPM
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar *(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)*	V		24	25	24		24				SPM
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga *(pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)*	V		1	1	1		1				SPM
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga *(pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)*	V		1	1	1		1				SPM
13	Layanan rujukan *(layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)*	V		279	315	300		279				SPM
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti											
	Jumlah Yang Harus Dilayani			1202				1202				SPM
1	Layanan data dan pengaduan ***layanan data*** *yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);* ***layanan pengaduan*** *merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial*	V		604	300	300		604				SPM
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	V		1	0	0		1				SPM
3	Penyediaan permakanan *(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan*	V		979	440	430		979				SPM

	disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)											
4	Penyediaan sandang *(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)*	V		604	200	200		604				SPM
5	Penyediaan perbekalan kesehatan *(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)*	V		1	0	0		1				SPM
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial *(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)* ***bimbingan fisik** adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym,* ***bimbingan mental dan spiritual** adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual,* ***bimbingan sosial** adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial*	V		979	400	400		979				SPM
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	V		93	440	430		93				SPM
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	V		1	0	0		1				SPM
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar *(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)*	V		1	0	0		1				SPM
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan	V		1	0	0		1				SPM

	reunifikasi)											
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	V		1	0	0		1				SPM
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	V		1	200	200		1				SPM
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti											
	Jumlah Yang Harus Dilayani			3233				3233				
1	Layanan data dan pengaduan ***layanan data*** *yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);* ***layanan pengaduan*** *merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial*	V		1154	120	125		1154				SPM
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	V		1	2	1		1				SPM
3	Penyediaan permakanan *(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)*	V		2679	1000	952		2679				SPM
4	Penyediaan sandang *(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)*	V		345	200	200		345				SPM

5	Penyediaan alat bantu *(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)*	V		25	20	15		25				SPM
6	Penyediaan perbekalan kesehatan *(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)*	V		345	0	0		345				SPM
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial *(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)* ***bimbingan fisik** adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym,* ***bimbingan mental dan spiritual** adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual,* ***bimbingan sosial** adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial*	V		1154	900	900		1154				SPM
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	V		681	900	900		681				SPM
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	V		1	0	0		1				SPM
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar *(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)*	V		2304	0	0		2304				SPM
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	V		1	0	0		1				SPM
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia	V		1	1	0		1				SPM

	terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)											
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	V		417	200	200		417				SPM
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti											
	Jumlah Yang Harus Dilayani			44				44				SPM
1	Layanan data dan pengaduan ***layanan data*** *yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);* ***layanan pengaduan*** *merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial*	V		44	40	36		44				SPM
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	V		15	2	2		15				SPM
3	Penyediaan permakanan *(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)*	V		12	14	23		12				SPM
4	Penyediaan sandang *(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan*	V		1	2	4		1				SPM

	kebutuhan lainnya)											
5	Penyediaan perbekalan kesehatan *(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)*	V		4	0	0		4				SPM
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial *(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)* ***bimbingan fisik** adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym,* ***bimbingan mental dan spiritual** adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual,* ***bimbingan sosial** adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial*	V		9	9	9		9				SPM
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	V		6	7	7		6				SPM
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	V		1	0	0		1				SPM
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar *(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)*	V		5	2	2		5				SPM
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	V		21	30	30		21				SPM
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat	V		21	28	30		21				SPM

	memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)											
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	V		27	20	20		27				SPM
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota											
	Jumlah Yang Harus Dilayani											
1	Penyediaan permakanan *(penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)*	V		267	160	200		267				SPM
2	Penyediaan sandang *(pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)*	V		7	0	0		7				SPM
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi *(tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)*	V		22	0	0		22				SPM
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan *(merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)*	V		25	0	0		25				SPM
5	Pelayanan dukungan Psikososial *(upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi*	V		164	100	150		164				SPM

	kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)											
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)		V	100	100	100		100	100	100		IKK
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		V	100	100	100		100	100	100		IKK
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		V	6,44	-	-		6,44	-	-		IKK
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota		V	100	-	-		100	100	100		IKK
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		V	36,10	-	-		36,10	-	-		IKK

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program 2024

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	51.95	61,40	118.1%
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial	100	100	100%
3	Program Penanganan Bencana	Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial	100	100	100%
4	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100	100	100%
5	Program Perlindungan Sosial	Persentase Perlindungan Sosial	31.20	32.52	104.23%
6	Program Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	63,90	73,98	115.77%
7	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perlindungan perempuan	99,99	99,99	100%
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	31,03	31,03	100%

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2025

Dijelaskan persentasenya tarcapai tidak tercapainnya, kalua tidak tercapai langkah apa yang dilakukan ,

1) Program Pemberdayaan Sosial

Indikator KinerjaPermberdayaan sosial adalah Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial dengan perhitungan Sebagai berikut

(((Jumlah PSKS Individu yang mendapat pembinaan / Jumnlah PSKS Individu) x 100) x 40) + (((Jumlah PSKS Kelembagaan yang mendapat pembinaan / Jumlah PSKS Kelembagaan) x 100) x 60)

Tabel 2.4

Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2024	
		Target	Realisasi
1	Jumlah PSKS Individu yang mendapat pembinaan	170	142
2	Jumnlah PSKS Individu	316	316
3	Jumlah PSKS Kelembagaan yang mendapat pembinaan	110	132
4	Jumlah PSKS Kelembagaan	182	182
	Capaian	**51.95**	**61.40**

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2025

2. Program Rehabilitasi Sosial

Indikator Kinerja Rehabilitasi Sosial adalah Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial dengan perhitungan sebagai berikut :

((Jumlah anak terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah anak terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak) x 25%) + (Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar x 25%) + (Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar) x 25%) + ((Jumlah tuna sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar/ Jumlah tuna sosial diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak) x 25%)

Tabel 2.5

Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2024	
		Target	Realisasi
1	(Jumlah anak terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah anak terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak)	100,00	100
2	Jumlah anak terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	2716	1202
3	Jumlah anak terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak	2716	1202
4	(Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak)	100,00	100
5	Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	5451	5347
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak	5451	5347

7	(Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak)	100,00	100
8	Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	4203	3233
9	Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak	4203	3233
10	(Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak)	100,00	100
11	Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	30	40
12	Jumlah tuna sosial terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak	30	40
	Capaian	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

3. Program Penanganan Bencana

Indikator Kinerja Penanganan Bencana adalah Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial dengan perhitungan sebagai berikut :

(((jumlah korban tanggap darurat bencana alam dan sosial kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasar/ jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten) x 50%) + (jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang ditangani/ jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang masuk x 50%)

Tabel 2.6

Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2024	
		Target	Realisasi
1	(jumlah korban tanggap darurat bencana alam dan sosial kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasar/ jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/ Jumlah Tanggap Darurat bencana)	100,00	100
2	Jenis kejadian tanggap darurat bencana alam dan sosial kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasar	2	2
3	Jenis kejadian bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten	2	2
4	jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang ditangani/ jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang masuk	100,00	100
5	jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang ditangani	2	397
6	jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang masuk	2	397
	Capaian	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

4. Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Indikator Kinerja Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan adalah Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dengan perhitungan sebagai berikut :

(Jumlah taman makam pahlawan yang dilakukan pemeliharaan / jumlah taman makam pahlawan) x 100.

Tabel 2.7

Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2024	
		Target	Realisasi
1	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Dilakukan Pemeliharaan	1	1
2	Jumlah Taman Pahlawan terpenuhi kebutuhan dasar	1	1
	Capaian	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

5. Program Perlindungan Sosial

Indikator Kinerja Perlindungan Sosial adalah Persentase Perlindungan Sosial dengan perhitungan sebagai berikut :

((Jumlah Fasilitasi KK Yang Mendapat Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar / Jumlah Penduduk) x 100) + ((Jumlah KK Yang Mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar / Jumlah Penduduk) x 100)

Tabel 2.8

Persentase Perlindungan Sosial 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2024	
		Target	Realisasi
1	Jumlah Fasilitasi KK Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	43.320	47.106
2	Jumlah KK Kabupaten Kulon Progo	154.383	156.824
3	Jumlah KK Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.000	4.365
4	Jumlah KK	154.383	156.824
	Capaian	**31.30**	**32.52**

Sumber Data : Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

6. Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender adalah Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dengan perhitungan sebagai berikut :

(((Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG / jumlah OPD) x 50%) + ((Jumlah desa yang melaksanakan PUG / Jumlah desa) x 30%) + ((jumlah desa prima kondisi baik / Jumlah desa prima) x 20%)) x 100.

Tabel 2.9
Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2024	
		Target	Realisasi
1	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG	40	41
2	Jumlah OPD	42	42
3	Jumlah Kalurahan yang melaksanakan PUG	15	15
4	Jumlah Kalurahan	87	87
5	Jumlah desa prima kondisi baik	12	31
6	Jumlah desa prima	27	31
	Capaian	**63.90**	**73.98**

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2025

tDalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota, telah dilaksanakan kegiatan pelatihan manajemen organisasi Pendidikan Politik Perempuan. Data Organisasi Perempuan yang aktif adalah :

1. Gabungan Organisasi Wanita;
2. PD Aisyah;
3. Muslimat NU;

4. Ikatan Bidan Indonesia;
5. persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia;
6. wanita Islam;
7. persatuan Wanita Olahraga Indonesia;
8. wanota Katholik Indonesia;
9. Persatuan Istri Tentara (PERSIT)
10. Kerukunan Wanita Werdatama Republik Indonesia (Kerta Werdhatama PWRI)
11. Dharma Wanita Persatuan Kemenag
12. dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan;
13. Puspita Nada;
14. Perempuan wira Usaha;
15. persatuan Istri Purnawirawan;
16. persatuan Wanita Kristen Indonesia;
17. dian Kemala;
18. PC Salimah;
19. bhayangkari;
20. ikatan Adhyaksa Darma Kartini;
21. perempuan Berkebaya Kulon Progo
22. Komunitas Kain Kebaya Indonesia (KKI)
23. Persatuan Srikandi kreatif Indonesia
24. FPKK Kapanewon Temon
25. Forum Perlindungan korban kekerasan FPKK Kab Kulon Progo
26. FPKK Kapanewon Wates
27. FPKK Kapanewon Galur
28. FPKK Kapanewon Sentolo
29. FPKK Kapanewon Pengasih
30. FPKK Kapanewon Lendah
31. FPKK Kapanewon Girimulyo
32. FPKK Kapanewon Nanggulan
33. FPKK Kapanewon Kalibawanng
34. FPKK Kapanewon Samigaluh
35. FPKK Kapanewon Kokap
36. Forum Anak Kulon Progo

Peran serta perempuan dalam pembangunan didukung dengan kegiatan Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data dan kewenangan kabupaten atau kota, Peningkatan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Resonsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten atau kota. Data terpilah Gender dan Anak merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pengarusutamaan gender dan mendukung perencanaan dan penganggaran yang responsif gender OPD yang telah melaksanakan PPRG dan ARG dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.10
OPD Yang telah melaksanakan PPRG & ARG Tahun 2024

NO	OPD	NO.	OPD
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	19.	Bappeda
2.	Dinas Kesehatan	20.	BKAD
3.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.	BKPP
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	22.	Inspektorat Daerah
5.	Dinas Sosial PP dan PA	23.	Kapanewon Girimulyo
6.	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	24.	Kapanewon Temon
7.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	25.	Kapanewon Sentolo
8.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	26.	Kapanewon Lendah
9.	Dinas Lingkungan Hidup	27.	Kapanewon Wates
10	RSUD Wates	28.	Kapanewon Panjatan
11.	RSUD Nyi Ageng Serang	29.	Kapanewon Galur
12.	Dinas Kesbangpol	30.	Kapanewon Pengasih
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	31.	Kapanewon Kokap
14.	Dinas Kebudayaan	33.	Kapanewon Samigaluh
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33.	Kapanewon Nanggulan
16.	Dinas Pariwisata	34.	Kapanewon Kalibawang
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	35.	Bappeda Kulon Progo
18.	Dinas Perhubungan	36	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		37.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2025

7. Program Perlindungan perempuan dan Anak

Indikator kinerja dari Program Perlindungan Permpuan dan anak adalah Persentase Perlindungan Perempuan dan anak , dengan perhitungan sebagai berikut :

((Jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif / Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) x 25) + ((Jumlah Kecamatan yang ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak / Jumlah seluruh kecamatan) x 30) + ((Jumlah Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sebagai desa dan kelurahan layak anak / Jumlah desa dan kelurahan) x 30) + ((1 - (Jumlah kasus KDRT / jumlah keluarga))x15)

Persentase Perlindungan Perempuan dan anak , target dan realisasinya sebagai berikut :

TabeL. 2.11
Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2024	
		Target	Realisasi
1	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif	46	88
2	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	46	88
3	Jumlah kasus KDRT	22	32
4	Jumlah Keluarga	154.383	155.824
	Capaian	99.99	99.99

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2025

Tabel 2.12
Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan Dari Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Tahun 2024

No	Jejaring FPKK	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Layanan Dari FPKK Khusus		
		Perempuan	Anak	Jumlah Korban
1	UPPA POLRES	4	13	17
2	RSUD Wates	9	5	14
3	Dinas Kesehatan	3	2	5
4	UPTD PPA	25	21	46
5	Dinsospppa (Peksos)	0	0	0
6	RSUD Nyi Ageng Serang	2	4	6
7	RS PKU Muhammadiyah Nanggulan	0	0	0
8	RS Kharisma Paramadika Wates	0	0	0
9	RS Rizki Amalia Medika Lendah	0	0	0
	Jumlah Kasus Baru	**43**	**45**	**88**

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo 2025

8. Program Perlindungan perempuan dan Anak

Indikator kinerja dari Program Pemenuhan anak adalah Persentase Pemenuhan Hak anak , dengan perhitungan sebagai berikut :

((Jumlah Peraturan Desa/Kalurahan Layak Anak / Jumlah Desa / Kalurahan) x 50)+((Jumlah Desa dan Kalurahan yang Telah Menyususn Gugus Tugas Layak Anak/Jumlah Gugus Tugas Desa dan Kalurahan)x50)

TabeL. 2.13
Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2024	
		Target	Realisasi
1	Jumlah Peraturan Kalurahan Layak Anak	6	6
2	Jumlah Desa atau Kalurahan	87	87
3	Jumlah Desa atau Kalurahan yang Telah Menyusun Gugus Tugas Layak Anak	48	48
4	Jumlah Gugus Tugas Desa dan Kalurahan	87	87
	Capaian	31.03	31.03

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2025

Dalam rangka peningkatan Pemenuhan hak anak, telah dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan :

1. Evaluasi dan Monitoring PMTAS;
2. Pembinaan Desa Layak Anak sejumlah 6 Desa
3. Pembinaan Kecamatan Layak Anak ;
4. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah di Keluarga Miskin 370 anak
5. Memverifikasi Kabupaten Layak Anak
6. Memfasilitasi Forum Anak Kabupaten;
7. Memfasilitasi Forum Anak Kecamatan
8. Memfasilitasi Peringatan Hari Anak
9. Melaksanakan Pelatihan Konvensi Hak Anak
10. Melaksanakan Pembinaan Kabupaten Layak Anak
11. menyun kebijakan tentang pengembangan Kabupaten Layak.

Kebijakan tentang Kabupaten Layak anak telah diproses penyusunan Peraturan Bupati oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo.

Selain kegiatan tersebut, Dinas Sosial juga dilaksanakan peenyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan yaitu dengan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak

yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota. Serta melakukan pendampingan anak yang memerlukan pendampingan khusus.

Sebagai langkah Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan menyosialisasikan pencegahan terhadap anak dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang .

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak di masa datang.

Isu-isu strategis serta permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah yang menjadi tantangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 masih tergolong tinggi dengan capaian 15,62%, turun sedikit dari tahun 2023 yakni 15,64%.
2. Data penerima bansos perlu perbaikan secara mandiri. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemeringkatan warga miskin yang menjadi sasaran bantuan sosial. Perbaikan yang mungkindilakukan adalah dengan meningkatkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinantingkat kapanewon dan tingkat kalurahan/ kelurahan. Peran TKPK Kapanewon dan Kalurahandalam pendataan adalah dengan mengoptimalkan musyawarah kalurahan dan kelurahandalam pembahasan data penerima bantuan sosial.
3. Pembiayaan urusan sosial baik logistik kebencanaan, konsumsi piket tagana, dan saranaprasarana pendukung layanan
4. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara komprehensif tahun2024 terdapat sebanyak 88 korban kekerasan. Telah dilakukan penanganan.pendampingandan penjangkauan dan juga pencegahan perkawinan anak.

5. Sulitnya mendeteksi kasus KDRT dan penelantaran anak kecuali yang terlaporkan. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak,dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
6. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual,dan penipuan. Ditambah dengan masih adanya kejahatan jalanan yang dilakukan anak, damunculnya kerentanan TPPO baik sebagai lokasi asal, transit, maupun tujuan.

Isu strategis serta permasalahan tersebut akan dikelola sebagai bahan Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini ditujukan untuk:

a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan

Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah dalam bentuk :

e. penyuluhan, bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PPKS;
f. pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial;
g. penyediaan akses pelayanan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial;

Dalam upaya penanganan permasalahhan sosial Dinas Sosial PPPa mengoptimalkan kerja sama dengan jejaring maupun stokcholder lainnya seperti :

a. Jejaring kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti dengan LSM/NGO, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PMKS;
b. kader penanggulangan kemiskinan yang fungsinya sebagai pendamping sosial bagi PPKS dalam mengakses berbagai informasi dan sumber pelayanan yang ada.
c. Tagana, TKSK maupun PSM yang memiliki Semangat kesetiakawanan sosial yang perlu terus dikembangkan kepada seluruh elemen, sehingga nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong-royong mampu menjadi modal sosial yang kuat dalam upaya penanganan berbagai masalah sosial.

d. Sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, seperti Panti Sosial. Secara kelembagaan sudah ada , namun sarana prasarana pendukung belum ada.

2.4 Review terhadap RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas sosial PPPA tahun 2026 disusun mulai dari Rancangan Awal Rencana Kerja dengan pagu yang mengacu dari Renstra Tahun 2023-2026. Setelah melalui proses forum Perangkat Daerah kemudian ditetapkan Pagu OPD kemudian, proses selanjutnya adalah menganalisa dan melakukan kajian terhadap prioritas anggaran untuk masing masing program dan kegiatan dengan memperhatikan usulan serta pokok pikiran dari DPRD, usulan dari kelompok masyarakat maupun lembaga. Selain itu juga memperhatikan ketentuamenjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal renja tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Secara rinci reviu terhadap Rancangan Awal Dinas sosial PPPA. Dapat dilihat pada table 2.4. atau Tabel T-C.31

Tabel 2.4
Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				13.019.724.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				13.154.994.553,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.211.768.400	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.494.533.253,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				12.211.768.400	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				12.494.533.253,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	3.770.090.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	3.574.382.553,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	32.407.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	24.065.600,00	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.682.300			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.754.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	11.724.700			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	7.311.600,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 Dokumen	2.922.024.962	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 Dokumen	2.908.138.462,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	2.856.796.562			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	2.856.796.562,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	49.225.000			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	41.405.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,				

	Semesteran SKPD	Semua Kel/Desa				Semesteran SKPD	Semua Kel/Desa				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14 Laporan	16.003.400			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14 Laporan	9.936.900,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	52.802.000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	33.223.400,00	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.075.400,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	52.802.000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	27.148.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	125.482.454	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	13.647.400,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua				

		Kel/Desa					Kel/Desa				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	125.482.454			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	13.647.400,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	418.006.884	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	462.871.811,00	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	63.260.627,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	12 Laporan	418.006.884			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	399.611.184,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	219.366.700	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	132.435.880,00	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua				

						Operasional atau Lapangan	Kel/Desa				
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	115.352.980,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	219.366.700			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	17.082.900,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	59.02 %	101.592.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	59.02 %	70.792.900,00	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	13.916.400	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	4.321.300,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	13.916.400			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	4.321.300,00	

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	87.675.600	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	66.471.600,00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembaga	63.170.800			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	49.359.600,00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	66 Orang	24.504.800			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	66 Orang	17.112.000,00	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100 %	654.610.700	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100 %	555.625.400,00	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang		Laporan Pelaksanaan Sub	7 Dokumen	644.374.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang		Laporan Pelaksanaan Sub	7 Dokumen	550.669.100,00	

	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Kegiatan			Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Kegiatan			
	Penyediaan Permakanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Penyediaan Permakanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	462 Orang	429.135.000			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	462 Orang	425.160.000,00	
	Penyediaan Alat Bantu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Penyediaan Alat Bantu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	44.226.000			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	21.876.000,00	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	250 Orang	79.758.000			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	240 Orang	38.626.300,00	

			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250Orang	26.603.000			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	11.000.600,00	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	12.000.000			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	12.000.000,00	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Pemberian Layanan Kedaruratan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	15.855.700			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	14.175.700,00	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	36.796.300			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	27.830.500,00	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	10.236.700	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	4.956.300,00	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	10.236.700			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	4.956.300,00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	29.13 %	7.355.668.600	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	29.13 %	8.007.159.200,00	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin		Laporan Pelaksanaan Sub	3 Dokumen	7.355.668.600	Pengelolaan Data Fakir Miskin		Laporan Pelaksanaan Sub	3 Dokumen	8.007.159.200,00	

	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan			Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan			
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	18.400 Orang	103.177.400			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	71000 Orang	67.796.300,00	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.083 Orang	7.130.910.900			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3271 Orang	7.869.339.400,00	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	40000 Usulan	121.580.300			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	40000 Usulan	70.023.500,00	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Penanganan Korban Bencana	100 %	233.889.100	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Penanganan Korban Bencana	100 %	210.408.600,00	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	46.057.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	32.119.900,00	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Makanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Penyediaan Makanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	46.057.000			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	32.119.900,00	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	177.832.100	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	178.288.700,00	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Kampung	14.739.000			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Kampung	13.396.400,00	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				

			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	163.093.100			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	164.892.300,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	100 %	105.918.000	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	100 %	76.164.600,00	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	105.918.000	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	76.164.600,00	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	105.918.000			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	76.164.600,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				807.955.600	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				660.461.300,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				605.881.600	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				458.387.300,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Indeks Pemberdayaan Gender	71.7 nilai	73.518.800	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN**		Indeks Pemberdayaan Gender	71.7 nilai	99.921.300,00	

						PEREMPUAN					
	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/kota		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	73.518.800	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	45.320.500,00	
	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	5 Laporan	73.518.800			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	6 Laporan	45.320.500,00	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				68.755.600	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**				54.600.800,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	68.755.600	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	54.600.800,00	
	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan	31 Lembaga	68.755.600			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan	31 Lembaga	54.600.800,00	

			perempuan yang mendapatkan pendampingan					perempuan yang mendapatkan pendampingan			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	10.24 per 100.000 prmpuan	213.184.200	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	10.24 per 100.000 prmpuan	237.324.500,00	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	48.454.800,00	
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP DAN TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan kab /kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta kab kota	70 lembaga	92.499.300			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	3 laporan	48.454.800,00	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	120.684.900	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	120.034.400,00	
	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,			120.684.900	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,				

	Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa				Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa				
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	70 orang	120.684.900			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	80 orang	120.034.400,00	
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	68.835.300,00	
						pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
								jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	180 Orang	68.835.300,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				61.586.200						
	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/kota				61.586.200						

	Layanan rujukan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup kab/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa									
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan lingkup kab/kota	50 orang	61.586.200						
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Kalurahan Layak Anak	11,49 %	162.940.900	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		Persentase Kalurahan Layak Anak	11,49 %	106.476.300,00	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	162.940.900	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	106.476.300,00	
	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	50 Lembaga	162.940.900			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	52 Lembaga	106.476.300,00	

			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.02 %	25.895.900	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.02 %	14.665.200,00	
	Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	25.895.900	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	14.665.200,00	
	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	5 dokumen	25.895.900			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	28 Orang	14.665.200,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				202.074.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				202.074.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	0.040 %	202.074.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	0.040 %	202.074.000,00	

	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	202.074.000,00	
	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	70 Orang	202.074.000	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	70 Orang		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rencana kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kapanewon.

Pada forum Perangkat daerah terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Perangkat Daerah. usulan tersebut berasal dari kelompok masyarakat maupun dari individu, LSM, Perguruan Tinggi, dan Perangkat Daerah terkait lainnya. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Usulan – usulan tersebut kami sajikan pada Tabel 2.5:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

USULAN	MASALAH	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI SKPD
Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima	Pelatihan Batik untuk kelompok	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran
Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima	Sosialisasi Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya bagi Kader Posyandu sekelurahan	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran

	(PRIORITAS 19)			
Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima	Sosialisasi Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Nagi Kader Posyandu se Kelurahan	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran
Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima	Sosialisasi Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Nagi Kader Posyandu se Kelurahan	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran
Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Bantuan bagi Binaan Luar Panti LKS	Pembinaan anak-anak Disabilitas Zafa	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran
Bantuan pangan non tunai	PKH Lansia a.n Tukidi NIK. 301071008540005 Kedungsogo Rt 33 Rw 16 Kedungsari, Pengasih	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran

	(PRIORITAS 7)			
Bantuan pangan non tunai	Bantuan PKH a.n Rukinem 3401104104500001 Jambon, Donomulyo, Nanggulan	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran
Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Bantuan bagi Binaan Luar Panti LKS	Masalah kesehatan dan PMT lansia	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran
Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Bantuan bagi Binaan Luar Panti LKS	Kesejahteraan kader posyandu, lansia	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran
Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima	Pelatihan wirausaha peternakan	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran

Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima	Pelatihan Kewirausahaan Karang Taruna Jatirejo	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran
Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima	Pelatihan dalam mengolah hasil pertanian yang bernilai lebih (pembuatan frozen food) dan pengadaan frezer dan food prosesor	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran
Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima	Pelatihan Budidaya Jamur Merang	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran
Pelatihan kewirausahaan P2WKSS dan Desa Prima	Pembinaan kelompok pengrajin khususnya pemasaran eksport	Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dapat diakomodir dengan mempertimbangan prioritas dan plafon anggaran

BAB III
TUJUAN DAN SASARA PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tantangan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejateraan sosial bagi PPKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Daeri kompleknya peermasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, dapat diidentifikasikan dalam isu strategis yaitu Kemiskinan, Ketimpangan gender dan kekerasan terhadap anak dan perempuan.Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial maupun pemberdayaan perempaun melalui kebijakan, Program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial maupun pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial antara lain, Fakir miskin, Lanjut usia terlantar, Penyandang cacat, Anak terlantar, Anak jalanan, Anak berkebutuhan khusus, Gelandangan, Pengemis dan Tunawisma.

Pembangunan Urusan kesejahteraan sosial adalah :

1) Melindungi PPKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
2) Mewujudkan aksesbilitas PPKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
3) Menjamin PPKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk medapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;
4) Menjamin penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia potensial;
5) Menjamin Eks penderita /penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
6) Tmewujudkan masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;
7) Memberikan penjangkauan dan jaminan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PPKS di semua propinsi dan Kabupaten /Kota.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung sasarn Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Sosial mendukung sasaran "Meningkatnya Taraf Hidup masyarakat: Tujuan dan sasaran pada Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakTahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Target Kinerja
	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat		Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan	Ribu Rupiah	11.487,60
			Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	nilai	A (85,3)
			Indeks maturitas SPIP	nilai	3,23
		Meningkatnya Pemenuhan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	nilai	0,6
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender	nilai	0,126
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat daerah	nilai	A (>80-90)

		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP perangkat daerah	nilai	2,0-3,0

3.3. Program dan Kegiatan

Bahwa berdasarkan analisa dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinsos PPPA 2026 dari Tahapan mulai dari pengumpulan data, menampung usulan dari masyarakat serta forum Perangkat Daerah, dapat kami sampaikan bahwa pada Tahun 2026 Dinas Sosial PPPA mengusulkan 9 Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026. Secara rinci program dan kegiatan dimaksud tercantum dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Progam Dinas Sosial PPPA Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	59,02
2	Program Rehabilitasi Sosial	prsentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi Sosial di luar panti	%	100
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100
		Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100
		Persentase gelandangan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	29,13

4	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	%	100
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	prsentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	%	100
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	nilai	71,7
7	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk perempuan	10,24
8	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kalurahan Layak Anak	%	11,49
9	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang dilindungi	%	0,02
10	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	%	0,04
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase Subkegiatan pada perangkat daerah berkinerja sngat tinggi	%	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 adalah ”**Penguatan fondasi pembangunan dengan peningkatan pembangunan ekonomi Inklusif dan Pengembangan Industri Lokal Menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan”,** dengan prioritas yang ditetapkan meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
4. Pengembangan Kawasan Aerotropolis
5. Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan,

Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD tetap dikendalikan sesui dengan tujuan dan manfaat yang dicapai dan beriringan dengan ketersediaan anggaran.

Adapun Secara rinci usulan Program dan kegiatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 (terlampir).

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tahun 2026 disusun berdasarkan pelaksanaan dari Perubahan Renstra Dinas Sosial PPPA 2023-2026 serta Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2026. Penyusunan Renja OPD ini dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mencapai program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dilakukan secara partisipatif dengan memperhatikan usulan dari masyarakat, usulan Musrenbang Tingkat Kapanewon, dan pemangku kepentingan lainnya yang telah menghasilkan prioritas kegiatan dan sasaran yang menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. hasil pembahasan dari Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilanjutkan dalam Forum Musrenbang untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan APBD Tahun 2026 .

Agar realisasi Program dan Kegiatan tepat sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen serta kedisiplinan yang tinggi dari pelaksana kegiatan dan segenap pemangku kepentingan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Demikan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 ini disusun agar dapat dipergunakan sebagai pedoman dan acuan perencanaan maupun pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tahun 2026.

Wates, 29 Juli 2025

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo,



Drs. LUCIUS BOWO PRISTIYANTOi
Pembina Utama Muda, IV/c

TABEL 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKAB. KULON PROGO

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						13.154.994.553,00							248.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.494.533.253,00							0,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						12.494.533.253,00							0,00	
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	-			100 %	3.574.382.553,00						-	0,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	24.065.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA	-	0,00	
	1	06	01	2.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	16.754.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	7.311.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	2.908.138.462,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA	-	0,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	2.856.796.562,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	41.405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	9.936.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	33.223.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA	-	0,00	
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.075.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	27.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	13.647.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA	-	0,00	
	1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	13.647.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	462.871.811,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN dan Non Dinas Sosial PPPA	-	0,00	
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	63.260.627,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN dan Non Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	399.611.184,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN dan Non Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	132.435.880,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA	-	0,00	
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	115.352.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	17.082.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	-			59.02 %	70.792.900,00						-	0,00	
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	4.321.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Organisasi Kemasyarakatan	-	0,00	
	1	06	02	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	4.321.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Organisasi Kemasyarakatan		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	66.471.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	psks kelembagaan dan psks perseorangan	-	0,00	
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Lembaga	49.359.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	psks kelembagaan dan psks perseorangan		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				66 Orang	17.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	psks kelembagaan dan psks perseorangan		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	-			100 %	555.625.400,00						-	0,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			7 Dokumen	550.669.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, LKS	-	0,00	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				462 Orang	425.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, LKS		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	21.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, LKS		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				240 Orang	38.626.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, LKS		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	11.000.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, LKS		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, LKS		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	14.175.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, LKS		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan															
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	27.830.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, LKS		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	4.956.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	LKS	-	0,00	
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				5 Dokumen	4.956.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	LKS		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	-			29.13 %	8.007.159.200,00						-	0,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	8.007.159.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Penerima Manfaat,	-	0,00	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				71000 Orang	67.796.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Penerima Manfaat,		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga															
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3271 Orang	7.869.339.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Penerima Manfaat,		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				40000 Usulan	70.023.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Penerima Manfaat,		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana	-			100 %	210.408.600,00						-	0,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	32.119.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Non Alam	-	0,00	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan															
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				160 Orang	32.119.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Non Alam		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	178.288.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	tagana, KSB	-	0,00	
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana															

							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Kampung	13.396.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	tagana, KSB		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	164.892.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	tagana, KSB		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	-			100 %	76.164.600,00						-	0,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	76.164.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat	-	0,00	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	76.164.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						660.461.300,00							248.000.000,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						458.387.300,00							248.000.000,00	
7	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender	-			71.7 nilai	99.921.300,00						-	28.000.000,00	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	45.320.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	OPD, Kalurahan, GOW,Masyarakat	-	0,00	
	2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				6 Laporan	45.320.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	OPD, Kalurahan, GOW,Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	54.600.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Desa Prima, P2WKSS, Industri Rumahan, Masyarakat,GOW	-	28.000.000,00	
	2	08	02	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
							jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				31 Lembaga	54.600.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Desa Prima, P2WKSS, Industri Rumahan, Masyarakat,GOW		28.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	-			10.24 per 100.000 prmpuan	237.324.500,00						-	0,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	48.454.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	perempuan dan anak	-	0,00	
	2	08	03	2.01	0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota														

							jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				3 laporan	48.454.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	perempuan dan anak		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	120.034.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Perempuan Korban Kekerasan	-	0,00	
	2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				80 orang	120.034.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Perempuan Korban Kekerasan		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	68.835.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Perempuan	-	0,00	
	2	08	03	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
							jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan				180 Orang	68.835.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Perempuan		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kalurahan Layak Anak	-			11,49 %	106.476.300,00						-	220.000.000,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	106.476.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	OPD, LSM, Stakeholder,Forum Anak, Kalurahan	-	220.000.000,00	
	2	08	06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				52 Lembaga	106.476.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	OPD, LSM, Stakeholder,Forum Anak, Kalurahan		220.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
##	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	-			0.02 %	14.665.200,00						-	0,00	
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	14.665.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	anak	-	0,00	
	2	08	07	2.02	0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				28 Orang	14.665.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	anak		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						202.074.000,00							0,00	
##	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	-			0.040 %	202.074.000,00						-	0,00	
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	202.074.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	desa prima	-	0,00	
	2	22	08	5.07	0015	Pengembangan Ekonomi Perempuan														

							Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya				70 Orang	202.074.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	desa prima		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
										J U M L A H	**13.154.994.553,00**							**248.000.000,00**	

DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KULON PROGO

RENCANA KERJA

2026



0274-774639

nakertrans@kulonprogokab.go.id

https://disnaker.kulonprogokab.go.id/

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DINAS TENAGA KERJA

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 26

2.4. Review terhadap RKPD.....

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 38

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 38

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 39

3.3. Program dan Kegiatan.....

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 42

BAB V PENUTUP 49

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 7

Tabel 2.2. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Program Tahun 2024 7

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2024 8

Tabel 2.4. Rekapiltulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024..... 10

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan..... 20

Tabel 2.6. Cakupan Perlindungan Ketenagakerjan Tahun 2024 23

Tabel 2.7. Cakupan Penempatan dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Tahun 2024 24

Tabel 2.8. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 – 2024 26

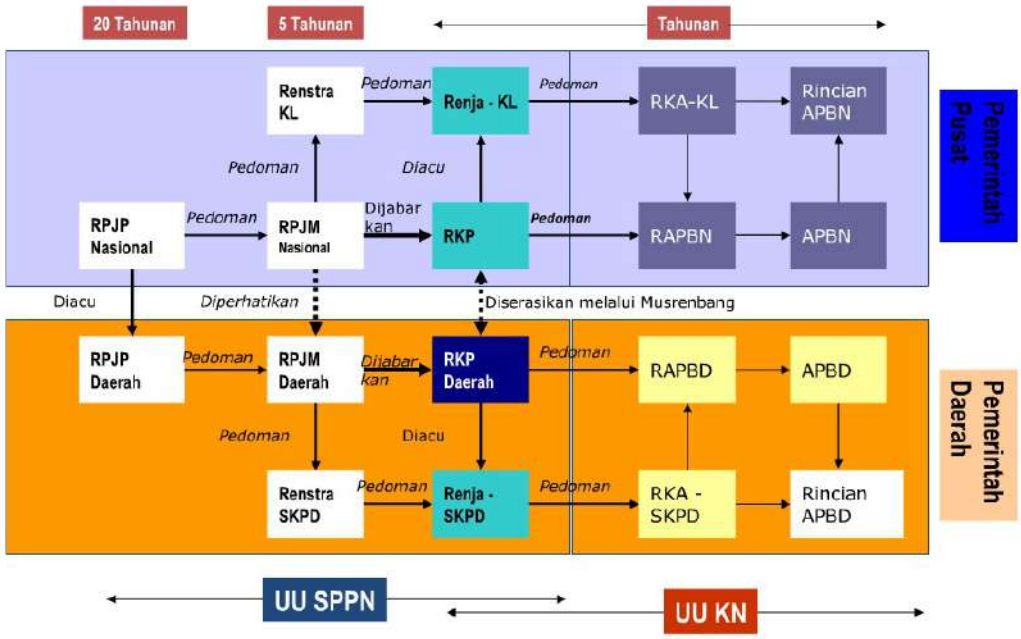
Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan, pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunannya disinergikan dengan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029, Rancangan Renstra 2025-2029. Keterkaitan dokumen – dokumen tersebut sebagaimana gambar dibawah.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguann Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 124 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;

12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuannya adalah :

a. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas PD tahun anggaran 2026 dan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Tahun Anggaran 2026.

b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi urusan melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.

c. Menjadi acuan dalam penyusunan laporan tahunan, LKjIP, serta informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi rencana kerja PD, proses penyusunan renstra, aturan perundangan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi serta pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Juga penjelasan maksud

dan tujuan penyusunan renja serta sistematika penyusunan renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menguraikan capaian pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 jika diselaraskan dengan rencana kerja, RKPD dan Renstra yang telah ditetapkan. Beserta analisis kinerja pelayanan dan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas fungsi PD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan telaah terhadap kebijakan nasional dan propinsi, tujuan dan sasaran rencana kerja beserta program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rencana kerja beserta keluaran dan pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan Renja PD merupakan telaah terhadap hasil evaluasi pencapaian target kinerja program/kegiatan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja PD, setelah selesai pelaksanaan dilakukan evaluasi/review agar pelaksanaan tahun mendatang dapat diidentifikasi realisasi program/kegiatan yang memenuhi atau melampaui target dan yang tidak memenuhi target serta kendala – kendala yang dihadapi.

Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 2 urusan, terdiri atas 6 program, 13 kegiatan dan 19 sub kegiatan, yaitu :

I. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

A. Bidang Tenaga Kerja

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota : 7 kegiatan 10 sub kegiatan
2. Program Hubungan Industrial : 2 kegiatan 2 sub kegiatan
3. Program Perencanaan Tenaga Kerja : 1 kegiatan 2 sub kegiatan
4. Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja : 1 kegiatan 2 sub kegiatan
5. Program Penempatan Tenaga Kerja 1 kegiatan 2 sub kegiatan

II. Urusan Pilihan

B. Bidang Transmigrasi

1. Program Pembangunan kawasan transmigrasi 1 kegiatan 1 sub kegiatan

Perjanjian Kinerja Utama tahun 2024, target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja PD Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI
1	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	100	100
2	Pengurangan pengangguran	Penempatan tenaga kerja	3.464 orang	3.464 orang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator utama penempatan tenaga kerja sesuai target, salah satu penyebabnya adalah tercapainya penempatan tenaga kerja dan pencari kerja terdaftar, kenaikan prosentase kepesertaan BPJS pekerja.

Tabel 2.2

Target dan realisasi Perjanjian Kinerja Program Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Pengurangan pengangguran	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen
	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi	95,00 %	92,86 %
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	81,02 %	82,40 %
	Persentase perusahan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak	48,25 %	35,12 %
	Persentase transmigran yang ditempatkan	100 %	100 %

Pada tabel diatas, dari lima indikator kinerja ada dua indikator yang belum sesuai target. Indikator kinerja yang memenuhi target adalah Dokumen rencana

tenaga kerja yang tersusun, Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dan Persentase transmigran yang ditempatkan. Sedang yang belum memenuhi target adalah indikator Persentase peserta pelatihan bersertifikasi dan Persentase perusahan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak.

Indikator Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun merupakan indikator kinerja Program Perencanaan Tenaga Kerja. Program ini menyusun dokumen data pilah yang merupakan data lulusan siswa SMA/K dan data Ketenagakerjaan, yang berisikan data – data yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan merupakan indikator Program Penempatan Tenaga Kerja, memenuhi target karena tercapainya target pencari kerja yang ditempatkan atau mendapatkan pekerjaan. Persentase transmigran yang ditempatkan, terpenuhinya target jumlah transmigran (2 KK) sesuai kuota yang didapat dan semuanya mendapatkan bantuan sosial masing – masing sebesar Rp. 14.000.000 per Kepala Keluarga

Persentase peserta pelatihan bersertifikasi belum memenuhi target karena ada peserta ujian kompetensi yang tidak mengikuti ujian karena pada waktu pelaksanaan ujian sudah mendapatkan pekerjaan. Persentase perusahan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak merupakan indikator kinerja Program Hubungan Industrial, belum memenuhi target karena perusahaan yang memenuhi imnimal tiga sarana hubungan industrial (Peraturan Perusahaa (PP) atau Perjanjian Kerjasama (PKB), kepesertaan BPJS, struktur dan skala upah, LKS Bipartit) beum memenuhi target. Hal ini disebabkan kesadaran perusahaan terhadap kepatuhan terhadap aturan perundangan tentang ketenagakerjaan belum tinggi. Untuk itu dilakukan upaya pendampingan intensif oleh Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Dari sisi pendanaan realisasinya adalah sebagai berkut :

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.509.321.154,00	4.358.893.493	93,50
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	109.941.400,00	109.789.400	96,03
3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.070.757.300,00	1.061.432.300	94,18
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	14.188.339.400,00	14.178.720.100	97,05
5	Program Hubungan Industrial	108.089.100,00	105.314.100	96,93
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	151.961.100,00	142.235.100	93,04
	Jumlah	**20.850.383.954**	**19.956.384.493**	**96,10**

Sisa anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berasal dari kegiatan Administrasi Keuangan sub kegiatan Tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Realisasi keuangan Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja berasal dari perbedaan harga realisasi dengan dokumen anggaran, pembayaran premi asuransi karena peserta pelatihan sudah ditanggung oleh pemerintah. Sisa anggaran Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi berasal dari rekening perjalanan dinas. Perjalanan dinas untuk cek lokasi semula 2 lokasi direalisasikan 1 lokasi karena penempatan transmigrans 2 KK sama

Adapun hasil capaian pelaksanaan rencana kerja dan rencana strategis sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024

Nama PD : Dinas Tenaga Kerja

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				**URUSAN KETENAGAKERJAAN**									
	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	100	100	**100**
		1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja	92	**47**	**23**	**23**	100	23	70	
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	**5**	**2**	**2**	100	2	7	
			2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	**42**	**21**	**21**	100	21	63	
		2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian administrasi keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	90	45	45	100	45	135	
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	24	12	12	100	12	36	
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	14	14	14	100	14	42	
		3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	4	2	1	1	100	1	3	
			1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	1	1	1	100	1	3	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15		7	14	200	-	14	
		4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	18	12	6	6	100	6	18	
			1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	6	6	100	6	6	100
			2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	**12**	**12**	**12**	100	12	12	100
		5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12		3	3	100	1	1	
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12		3	3	100	1	1	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	72	24	12	12	100	18	42	
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	24	12	12	100	12	36	
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	12	6	6	100	6	18	
		7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	185					46	46	
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80					20	20	
			2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1 -	2	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	104					26	26	
	2			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1	**1**	**1**	**1**	**100**	1	1	**100**
		1		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1	**1**	**1**	**1**	**100**	1	1	**100**
			1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	1	1	1	100	1	1	100
			2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	18	**5**	**3**	**3**	**100**	3	8	
	3			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi	83,59	81,25				82,81	81,25	
		1		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	prosentase peserta pelatihan yang kompeten	6,60					5,89	5,89	
			1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis	192	128	128	128	100	96	96	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kompetensi pada Tahun (orang)								
			2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja(unit)	12					3	3	
		2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8		2	2	100	2	2	
			1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	8		2	2	100	2	2	
		3		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4		1	1	100	1	1	
			1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4		1	1	100	1	1	
	4			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	64,86					62,86	62,86	
		1		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan	7.200					1.680	1.680	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan								
			1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	7.200					1.680	1.680	
			2	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	2.520					600	600	
		2		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	14.880				-	3.600	3.600	
			1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	14.880					3.600	3.600	
	5			Program Hubungan Industrial	Persentase perusahan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak	50,79					47,3	47,3	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		1		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6	6	6	6	100	6	6	
			1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6	6	6	6	100	6	6	
		2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	20	2	2	2	100	5	5	
			1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	Jumlah Perselisihan yang dicegah	20	2	2	2	100	5	5	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			2	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	19	18	18	18	100	18	18	18
3	03			**URUSAN TRANSMIGRASI**									
	3			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang ditempatkan	100	**100**	**100**	**100**	**100**	100	100	**100**
		3		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	prosentase transmigran yang ditempatkan	100	**100**	**100**	**100**	**100**	100	100	**100**
			1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	15	4	2	2	100	2	6	
				Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan	100		100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Asal	Penyuluhan								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan PD berupa kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan target kinerja dan dampak atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pulihnya perekonomian yang ditandai dengan menggeliatnya dunia usaha dan salah satu dampak bandara adalah banyak investor masuk dan beroperasinya perusahaan baru terutama hotel - hotel, menambah potensi penempatan tenaga kerja. Selain itu, mulai dibukanya pengiriman pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja meningkat.

Untuk membantu tercapainya target, sesuai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yaitu mengurangi pengangguran melalui penempatan teanaga kerja dengan mangadakan pelatihan dan bekerja sama dengan perusahaan – perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dilakukan melalui website Disnaker serta media sosial yang ada. Dengan demikian diharapkan masyarakat mengetahui informasi apabila menginginkan informasi pelatihan, lowongan kerja maupun transmigrasi.

Hal tersebut berdampak pada capaian indikator kinerja, sehingga diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	SPM	IKK	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota			100	100	100		100	25	100		
2	jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja			23	23	24		23		23		
3	Jumlah Dokumen Perencanaan PDaerah			2	2	3		2		4		
4	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21	21	21		21		21		
5	capaian administrasi keuangan			100	100	100		100	25	100		
6	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			44	44	43		45	42	42		
7	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12	12	12		12	3	12		
8	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			14	14	14		14	3	14		
9	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai			1	1	1		1		1		
10	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1	1	1		1		1	-	

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	SPM	IKK	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
11	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			15	15			14			-	
12	jumlah laporan administrasi umum PD			18	18	18		18	4	18		
13	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6	6	6		6	6	6		
14	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	12	12		12	3	12		
15	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3	3			3	1			
16	jumlah laporan penyediaan jasa penunjang			18	18	18		18	9	18		
17	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	12	12		12	3	12		
18	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6	6	6		6	6	6		
19	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah			47	46	46		46	20	46		
20	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			20	20	20		20	5	20		
21	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			1	-					1		
22	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			26	26	26		26	5	26		

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	SPM	IKK	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
23	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		V	1	1	1		1		100		
24	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro			1	1	1		1		1		
25	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro		V	5	5			3		3		
26	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi		V	82,03	82,81	83,59		92,86		93,75		
27	prosentase peserta pelatihan yang kompeten			6,14	6,43							
28	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		V	128	160					128		
29	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja			3	3							
30	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			2	2			2		2		
31	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah			1	1			1		1		
32	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan		V	63,98	64,27	64,86		79,83	76,25	79,92		
33	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			1.680	1.920							
34	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			620	640							
45	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		V	3.600	3.840			3.464				
46	Persentase perusahan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak		V	48,25	49,21	50,79		35,12	35,71	38,69		

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	SPM	IKK	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
37	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			6	6	6		6		6		
38	Jumlah Perselisihan yang dicegah			5	5	1		2		5		
39	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi			-	19					18		
40	prosentase transmigran yang ditempatkan			100	100	100		100		100		
41	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan			4	3	2		2		2		
42	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan			100	100	100		-		100		

Dalam melaksanakan kegiatan, Dinas Tenga Kerja didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja

No	Unit Kerja	L		P		Jumlah		Total
		PNS	THL	PNS	THL	PNS	THL	
1.	Kepala Dinas	1		-		1		1
2.	Sekretariat	4	4	6		10	4	14
4.	Bidang HIT	3		3	1	6	1	7
5.	Bidang PPTK	1	1	4	4	5	5	10
7.	UPTD BLK	8	1	6	3	14	4	18
JUMLAH		**17**	**6**	**19**	**8**	**36**	**14**	**50**

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Disnaker KP

Sarana dan Prasarana yang dimiliki pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja

Nomor	Nama Bidang Barang	Jumlah
1.	Alat Besar	13
2.	Alat Angkutan	24
3.	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	142
4.	Alat Pertanian	7
5.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	873
6.	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	58
7.	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	4
8.	Alat Laboratorium	89
9.	Komputer	124
10.	Alat Keselamatan Kerja	20
11.	Alat Peraga	7
12.	Peralatan Proses/produksi	7

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disnaker KP

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga berdampak terjadinya pengangguran. Sehingga perlu merumuskan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja serta mengupayakan peningkatan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja sehingga tercipta kesempatan kerja yang luas, kondusif serta mendukung penyiapan tenaga kerja yang mandiri, berdaya saing serta sejahtera.

Untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan upaya peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan pelayanan ketenagakerjaan. Untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja diupayakan melalui peningkatan perlindungan tenaga kerja. Melalui berbagai program dan kebijakan tersebut diharapkan tenaga kerja yang terserap makin meningkat, sehingga tingkat pengangguran makin berkurang.

Tabel 2.9

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2024

No.	Tahun	Besaran (%)	
		DIY	Kulon Progo
1	2017	3.02	1,99
2	2018	3,35	1,49
3	2019	3,14	1,80
4	2020	4,57	3,71
5	2021	4,56	3,69
6	2022	4,06	2,80
7	2023	3,69	2,40
8	2024	3,48	2,01

Sumber : Data Sakernas 2017-2024 BPS DIY

Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja. Hasil

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan BPS DIY menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Kulon dalam kurun waktu 2017 hingga 2024 fluktuatif. Setelah tahun 2020 naik siginifikans karena adanya pandemi, mulai tahun 2021 sampai 2024 turun menjadi 2,01 persen.

Salah satu cara menangani pengangguran adalah bekerja sama dengan pihak – pihak lain untuk pelatihan, penempatan dan pemagangan tenaga kerja. Selain itu juga dengan pelatihan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dengan anggaran dari APBD, APBN maupun sumber lain.

Dalam mendukung ketercapaian SDG's, harus meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan dan semangat / motivasi agar dapat bersaing dengan pencari kerja dari luar daerah. Dalam rangka meningkatkan penempatan tenaga kerja dilakukan jejaring dengan dunia industri – pasar kerja agar terdapat kesesuaian antara kebutuhan dengan ketersediaan pencari kerja. Untuk mendukung hal tersebut telah dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) dan TKDV (Tim Koordinasi Daerah Vokasi) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta sudah menyusun rencana aksi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Isu-isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

1) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
2) Kurangnya perlindungan tenaga kerja baik sektor formal maupun informal.

2.4. Review Terhadap RKPD

Dari RKPD Tahun 2024, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan tidak dilaksanakan karena tidak disetujui oleh Paniradya. Adapun hasil evaluasi selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.10

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

NO	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUAHN DANA (Rp.)	
	Dinas Tenaga Kerja				9.609.799.751,00					13.028.623.971,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.533.878.051,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.954.716.271,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8.474.119.051,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				11.894.957.371,00	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				3.615.827.851,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				3.613.607.671,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja	23 Dokumen	11.999.900,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja	23 Dokumen	12.009.800,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Lporan	5.999.900,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Lporan	6.009.800,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		capaian administrasi keuangan	100%	2.998.447.267,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		capaian administrasi keuangan	100%	2.998.447.067,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	2.950.034.367,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	2.950.034.367,00	

NO	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUAHN DANA (Rp.)	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	42.412.900,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	42.412.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 Laporan	5.999.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 Laporan	5.999.800,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	18 dokumen	70.785.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	18 dokumen	70.785.600,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	25.850.600,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	25.850.600,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	44.935.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	44.935.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.277.900,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.277.900,00	

NO	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUAHN DANA (Rp.)	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangnan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.277.900,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangnan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.277.900,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	18 laporan	362.046.204,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	18 laporan	362.046.204,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	189.246.720,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	189.246.720,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	172.799.484,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	172.799.484,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah		jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	20 Unit	165.041.100,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah		jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	20 Unit	165.041.100,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	135.006.800,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	135.006.800,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	30.034.300,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	30.034.300,00	

NO	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUAHN DANA (Rp.)	
II	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			1 Dokumen	116.811.500,00	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			1 Dokumen	116.811.500,00	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1 Dokumen	116.811.500,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1 Dokumen	116.811.500,00	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	106.198.800,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	106.198.800,00	
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	5 Orang	10.612.700,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	5 Orang	10.612.700,00	
III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1.225.922.000,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1.225.922.000,00	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		prosentase peserta pelatihan yang kompeten		1.101.106.100,00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		prosentase peserta pelatihan yang kompeten		1.101.106.100,00	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Keja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48 Orang	1.060.006.300,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Keja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48 Orang	1.060.006.300,00	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada tahun n	2 Lembaga	10.000.000,00	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada tahun n	2 Lembaga	10.000.000,00	

NO	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUAHN DANA (Rp.)	
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	31.099.800,00	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	31.099.800,00	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 Lembaga	115.703.200,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 Lembaga	115.703.200,00	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 Lembaga	115.703.200,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 Lembaga	115.703.200,00	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	9.112.700,00	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	9.112.700,00	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	9.112.700,00	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	9.112.700,00	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				6.302.943.600,00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				6.302.943.600,00	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		6.161.776.600,00	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		6.161.776.600,00	
	Penyuluhan dan BimbinganJabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1920 Orang	106.325.100,00	Penyuluhan dan BimbinganJabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1920 Orang	106.325.100,00	

NO	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUAHN DANA (Rp.)	
	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	640 Orang	6.055.451.500,00	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	640 Orang	6.055.451.500,00	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		141.167.000,00	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		141.167.000,00	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2510 Orang	141.167.000,00	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2510 Orang	141.167.000,00	
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				635.672.600,00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				635.672.600,00	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		59.139.300,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		59.139.300,00	

NO	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUAHN DANA (Rp.)	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 Laporan	59.139.300,00	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 Laporan	59.139.300,00	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang dicegah		576.533.300,00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang dicegah		576.533.300,00	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	2 Perkara	34.406.500,00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara	34.406.500,00	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2641 Orang	542.126.800,00	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2641 Orang	542.126.800,00	
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.059.758.900,00					1.059.758.900,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				1.059.758.900,00					1.059.758.900,00	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				1.059.758.900,00					1.059.758.900,00	

NO	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUAHN DANA (Rp.)	
	Pengembangan Industri Kreatif		Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	112 unit	1.059.758.900,00				112 unit	1.059.758.900,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				73.907.700,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				73.907.700,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				73.907.700,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				73.907.700,00	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				73.907.700,00	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				73.907.700,00	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		prosentase transmigran yang ditempatkan		73.907.700,00	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		prosentase transmigran yang ditempatkan		73.907.700,00	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	2 Kepala Keluarga	73.907.700,00	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	2 Kepala Keluarga	73.907.700,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari pemangku kepentingan dan musrenbang Kapanewon lebih banyak berupa padat karya infrastruktur. Usulan dari pokok pikiran DPRD sebanyak 25 lokasi dengan lokasi tersebar di :

- Kalurahan Ngargosari Kapanewon Samigaluh,
- Kalurahan Banjarharjo, Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang,
- Kalurahan Donomulyo, Kalurahan Tanjungharjo, Kalurahan Jatisarono Kapanewon Nanggulan
- Kalurahan Triharjo Kapanewon Wates
- Kalurahan Pengasih, Kalurahan Sidomulyo Kalurahan Karangsari, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih
- Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan
- Kalurahan Bumirejo, Kapanewon Lendah
- Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo
- Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap
- Kalurahan Kaliagung, Kapanewon Sentolo,

Tabel 2.13

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Kulon Progo

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kulon Progo	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	936 orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan antara lain :

1. mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif;
2. meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
3. meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
4. mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan

Sasarannya adalah Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dilakukan melalui:

1. Mmeningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga erja
2. Meningkatkan tenaga kerja yang ditempatkan, melalui perluasan kesempatan kerja terhadap penyediaan lapangan kerja
3. Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya
4. Meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja

Sasaran Renstra DIY adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja
2. Terwujudnya kesempatan kerja
3. Meningkatnya layanan ketransmigrasian

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas , rencana kerja Disnaker Kab. Kulon Progo sudah sesuai sebagaimana terdapat pada indicator program – program yang dilakukan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas fungsinya mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dengan mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan dan bekerja sama dengan investor agar keterampilan pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar industri yang pada akhirnya dapat menangkap peluang yang ada. Sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Selain itu memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui peningkatan harmonisasi hubungan kerja dan pemenuhan syarat – syarat hubungan industrial.

Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi kedua Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi; dan misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkannya Pemerataan Ekonomi Daerah		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,00 – 2,50
			Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	nilai	A (85,3)
			Indeks maturitas SPIP	nilai	3,231
2		Menurunya Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,44 – 78,94
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat daerah	nilai	A (>80-90)
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP perangkat daerah	nilai	2,0-3,0

3.3. Program dan Kegiatan

Tahun 2026 mengusulkan program dengan anggaran Dana Keistimewaan dan ada satu sub kegiatan menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, yaitu sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 3 urusan, 7 program, 16 kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
   1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota : 6 kegiatan 10 sub kegiatan
   2. Program Perencanaan Tenaga Kerja : 1 kegiatan 2 sub kegiatan
   3. Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja : 3 kegiatan 5 sub kegiatan
   4. Program Penempatan Tenaga Kerja 2 kegiatan 3 sub kegiatan
   5. Program Hubungan Industrial : 2 kegiatan 3 sub kegiatan

B. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
   1. Program Pembangunan kawasan transmigrasi 1 kegiatan 1 sub kegiatan

C. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
   1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Kebudayaan 1 kegiatan 1 sub kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan disini merupakan usulan program/kegiatan/sub kegiatan urusan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten. Adapun usulan program/kegiatan melalui sumber dana APBN dan APBD DIY sedang dalam proses pengusulan sampai dengan rencana kerja ini disusun. Usulan dengan sumber dana APBN seperti usulan pelatihan yang dilakukan oleh UPT Balai Latihan Kerja, dilakukan melalui usulan Bupati ke BLKPP Solo.

Program kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi 3 urusan, 7 program, 16 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 13.028.623.971,00.

Adapun rincian program kegiatan sebagaimana tabel dibawah.

-

Tabel 4.2

Rencana Program dan Kegiatan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
		Dinas Tenaga Kerja						**13.028.623.971,00**								
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						**12.954.716.271,00**								
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						**11.894.957.371,00**								
	2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	**-**			**100 %**	**3.613.607.671,00**								
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.009.**800**,00				2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah				DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
												katan daya saing daerah				
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	6.009.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.998.447.067,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah				
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	2.950.**034**.367,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	42.412.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah				
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	5.999.**800**,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah				
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						70.785.**600**,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
												dan pening katan daya saing daerah				
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.850.**600**,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah				
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	44.935.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah				
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5.277.900,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
												saing daerah				
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.277.**900**,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah				
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						362.046.**204**,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah				
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	189.**246**.720,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah				
	2.07.01.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
	08.0004															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	172.799.484,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah				
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165.041.100,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah				
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	135.006.**800**,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	30.**034**.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun				**100 %**	**116.811.500,00**						**-**	**0,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	jumlah laporan perencanaan tenaga kerja	-			1 dokumen	116.811.**500**,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				3 Dokumen	106.198.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
												saing daerah				
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				5 Orang	10.612.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase peserta pelatihan yang lulus sertifikasi	-			93,75%	**1.225.922.000,00**						-	**0,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Penerapan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dengan Kualifikasi Klaster	-			100 %	1.101.106.**100**,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksa naan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasar kan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan				192 Orang	1.060.006.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH), DBH	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
			Berbasis Kompetensi pada Tahun n						Kel/Desa	CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah				
	.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lin tas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Ins truktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				2 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				2 Unit	31.099.800,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga	Jumlah Lembaga	-			10 lembaga	115.703.200,00			-	2. Pengembangan	-	-	0,00	DINAS TENAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
		Pelatihan Kerja Swasta	Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina									kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah				KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				1 Lembaga	115.703.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	-			1 Dokumen	9.112.700,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran				1 Dokumen	9.112.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
			Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah						Semua Kel/Desa			layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah				
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	**-**			80,02%	**6.302.943.600,00**						**-**	**0,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan pelayanan antar Kerja*	-			2.183 orang	6.161.776.600,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				1920 Orang	106.325.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja				640 Orang	6.055.451.500,00	Kab. Kulon Progo,	DANA BAGI	-	2. Pengembangan	-		0,00	DINAS TENAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
			yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL (DBH), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN		kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah				KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja*	-			4.415 orang	141.167.000,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				2510 Orang	141.167.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase perusahaan yang menerapkan	**-**			44,12%	**635.672.600,00**						**-**	**0,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
			tata kelola kerja layak													
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah PP yang disahkan, PKB yang didaftarkan, LKS Bipartit, SP/SB yang dicatatkan*	-			63 PP	59.139.300,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah *Data & Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, & LKS Bipartit) & Peker ja yg Terdaftar sebagaiPeserta Jamsostek serta Pengupahan*				6 Laporan	59.139.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan/laporan yang masuk*	-			10 aduan	576.533.300,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				2 Perkara	34.406.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				2641 Orang	542.126.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.059.758.900,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	-			93,75%	**1.059.758.900,00**						-	**0,00**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-			-	1.059.758.900,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif														
			Jumlah *Industri Kreatif yang Dikembangkan*				112 Unit	1.059.758.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BKK DARI PEM DA PROVINSI	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**73.907.700,00**							**0,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**73.907.700,00**							**0,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase Kerjasama Antar Daerah Tujuan Transmigrasi	**-**			**100 %**	**73.907.700,00**						**-**	**0,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari	*-Prosentase transmigran yang ditempatkan*	-			100 %	73.907.700,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
		1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah				
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				2 Kepala Keluarga	73.907.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
			J U M L A H					**13.028.623.971,00**								

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja merupakan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk satu tahun kedepan. Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Kerja ini dihadapkan pada hal-hal yang membuat Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja mengimplementasikan isu-isu strategis dan program dan kegiatan prioritas. Padat karya masih menjadi idola pemangku kepentingan dan masyarakat karena hasilnya terlihat dan dipakai masyarakat. Salah satu ketugasan Dinas Tenaga Kerja melindungi pekerja, yaitu pekerja rentan dalam hal ini penderes dan nelayan dengan cara dibayarkan BPJS ketenagakerjaan.

Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Wates, 29 Juli 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kulon Progo,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS TENAGA KERJA

Bambang Sutrisno, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196907081996031004

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2026

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PADA TAHUN LALU 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 40
2.4. Review terhadap RKPD 43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 62
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 69
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 69
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 70
3.3. Program dan Kegiatan 71
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 74
BAB V PENUTUP 103

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan s/d Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo ……...	9
Tabel II.2	Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 ……	15
Tabel II.3	Capaian Kinerja dari Masing – masing Program yang DIlaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 ……..	17
Tabel II.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024..……..	20
Tabel II.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 ..	37
Tabel II.6	Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026	42
Tabel II.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 ……	62
Tabel III.1	Sasaran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 ..	70
Tabel IV.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 …….	75

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2026 disusun untuk melaksanakan amanat UU Nomor 25 Tahun Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu bentuk Perencanaan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang mana di tataran Perangkat Daerah. Dokumen tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2045 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kinerja SKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaranprogram dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daeraha adalah sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
d. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
e. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan ketentuan pasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, bahwa perangkat daerah menyusun Rencana Kerja 2026 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 – 2026, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Berjalan.

Dokumen Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan serta mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber dalam rangka mencapai hasil-hasil pembangunan secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renja Dinas Pertanian dan Pangan disusun sebagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera. Dokumen ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 yang pada tahun 2026 merupakan tahun terakhir dalam implementasinya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan

Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan adalah :

1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

14 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan;

15 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Pangan;

16 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 129 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Terpadu pada Dinas Pertanian dan Pangan;

17 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Tahun 2023-2026

18 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 adalah:

1. Memberikan landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi dinas dalam menyusun rencana kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kabupaten dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya dan keuangan kabupaten.
2. Mengintegrasikan program-program pembangunan pertanian dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 adalah:

1. Optimalisasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo khususnya pada urusan pertanian.

2. Sebagai acuan bagi dinas dalam merencanakan dan menentukan strategi guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas di tahun 2026.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dan Propinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Pertanian dan Pangan mendukung pencapaian misi ke-2 dan ke-3, yaitu Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang tertib, aman, dan tenteram. Guna mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2023 melaksanakan 11 program, 25 kegiatan dan 45 sub kegiatan sesuai permendagri 90 tahun 2019.

Tabel II.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****)	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh****)	3.206.992.200	2.702.607.311	
2	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	148.261.600	139.713.940	
3		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	287.500.000	282.403.085	

4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	30.500.000	20.256.050	
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	39.750.000	31.520.852	
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****)	1.658.020.300	1.167.067.602	
7		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya****)	Pengembangan Lumbung Mataraman****)	635.345.500	607.654.808	
8		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya****)	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya****)	1.458.000	1.372.828.025	
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.430.000	11.863.554	
10			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.829.100	50.957.847	
11		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.857.407.710	11.619.710.673	
12			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85.500.000	84.825.000	

13			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.486.000	12.273.130	
14		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.000.000	3.774.235	
15			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.000.000	6.960.000	
16		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.520.000	48.308.282	
17			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	35.519.248	
18		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
19		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.794.800	190.657.524	
20			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	618.837.464	616.629.967	
21		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	302.920.788	226.495.100	
22			Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.500.000	17.389.000	

23			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.900.200	42.194.543	
25	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	183.798.100	165.407.495	
26		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.099.459.600	815.304.395	
27			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	274.637.900	265.318.572	
28		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	621.595.700	582.038.462	
29	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan SInkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	428.105.500	420.816.558	
30			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	683.373.200	663.840.694	

31		Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.573.172.000	1.554.421.005	
32			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.644.728.100	3.596.066.681	
33			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	513.365.300	508.960.671	
34			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.597.809.000	1.151.616.384	
35	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	247.572.400	238.208.263	
36			Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	99.700.000	71.349.468	
37		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan / atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	163.437.300	158.140.594	
38			Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	96.700.000	67.725.105	
39		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2.299.992.500	2.090.051.770	

		Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				
40		Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	75.000.000	74.118.639	
41			Pembinaan dan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Registrasi Produk Hewan Segar Berkemasan	181.441.800	178.397.588	
42	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pengendalian	643.027.700	595.612.957	
43	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	329.576.400	326.060.271	
44			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	380.444.000	359.049.852	
45			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	153.999.800	135.480.706	
				36.097.431.962	33.308.595.942	

Berdasarkan tabel II.1 diatas, pagu Anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 36.097.431.962,00. Pada pelaksanaan pencapaian kinerja, kinerja fisik tercapai 100%, dengan realisasi sampai dengan Desember 2023 adalah Rp.33.308.595.942,00 (92,27%). Realisasi anggaran tidak tercapai 100% karena adanya sisa kontrak pengadaan barang dan jasa serta penyesuaian harga menurut harga pasar.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Pangan dan Pertanian berupa produksi padi, produksi jagung, produksi kedelai, produksi cabe merah, produksi bawang merah, produksi melon, produksi durian, produksi jahe, produksi cengkeh, produksi kakao, produksi daging, produksi telur, produksi karbohidrat non beras, capaian ketersediaan protein nabati, capaian ketersediaan protein hewani/unggas dan jumlah kelompok tani yang naik kelas. Berdasarkan indikator tersebut, pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 seperti terlihat pada Tabel II.2 berikut dan bisa terlihat proyeksi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan.

Tabel II.2. Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Cara Perhitungan	2024		
				Target	Realisasi	%-ase
Meningkatnya produksi pertanian	Produksi Padi dan Palawija		Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan 0,5% pertahun			
		ton	Padi Sawah	131.399	124.230	94,54
		ton	Jagung	24.724	23.471	94,93
		ton	Kedelai	2.939	3.027	100,13
	Produksi Tanaman Sayuran		Peningkatan Produksi Komoditas Utama Sayuran 5% pertahun			
		kuintal	Bawang Merah	128.342	128.346	100
		kuintal	Cabe merah	379.122	379.192	100,02

	Produksi Tanaman Buah		Peningkatan Produksi Komoditas Utama Buah 5% pertahun			
		kuintal	Alpukat	24.950	36.533	146,42
		kuintal	Durian	59.622	59.639	100,03
		kuintal	Klengkeng	8.142	11.580	142,23
	Produksi Tanaman Biofarmaka		Peningkatan Produksi Komoditas Utama Biofarmaka 2% pertahun			
		kg	Jahe	4.654.392	4.677.370	100,49
	Produksi Tanaman Perkebunan		Peningkatan Produksi Komoditas Utama Perkebunan 1,5% pertahun			
		ton	Kelapa	26.970	27.067	100,35
		ton	Kopi	3.370	3.37	100,24
		ton	Kakao	1.444	1.446	100,14
Meningkatnya produksi peternakan	Produksi daging	kg	Peningkatan Produksi Daging 5% pertahun	16.843.491	16.866.635	100,14
	Produksi telur	kg	Peningkatan Produksi Telur 5% pertahun	16.018.664	17.904.616	111,77
Meningkatnya pola pangan harapan	skor pola pangan harapan	%	total penjumlahan proporsi kecukupan konsumsi energi dari 9 kelompok pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain)	93,70	93,77	100,07

Dari tabel II.2 dapat dilihat adanya 3 (tiga) sasaran strategis yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU). Empat sasaran strategis urusan pertanian dan pangan yaitu: 1) meningkatnya produksi pertanian dituangkan dalam 12 (dua belas) indikator Kinerja Utama, 2). Meningkatnya produksi peternakan dituangkan dalam 2 (dua) indikator kinerja utama, sasaran stragegis yang ke 3) meningkatnya pola pangan harapan dituangkan ke dalam 1 (satu) indikator kinerja utama dan sasaran strategis yang ke 4) meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dari 15 (lima belas) indikator kinerja, 13 (tiga belas) indikator dapat mencapai target yaitu produksi padi, bawang merah, cabai merah, alpukat, durian, kelengkeng, jahe, kelapa, kopi, kakao, daging, telur sedangkan 2 (dua) indikator tidak dapat mencapai target yaitu produksi jagung, produksi dan kedelai.
2. Capaian Indikator kinerja tertinggi adalah untuk produksi kelengkeng yaitu 11.580 kuintal (tingkat capaian 142,23%) dan terendah adalah produksi padi yaitu 124.230 ton (tingkat capaian 94,54%). Pencapaian untuk kelengkeng sangat tinggi karena panen raya kelengkeng, terutama di Kapanewon Pengasih. Sedangkan produksi padi tidak mencapai target 2024 komoditas padi, ada serangan hama wereng batang coklat sehingga mengakibatkan pertanaman padi mengalami puso 41 hektar. Selain itu, adanya perbaikan pada Saluran Irigasi Sapon selama 1 bulan, sehingga mengakibatkan kemunduran tanam padi di wilayah Lendah, Galur dan sebagian Panjatan. Adanya kemunduran tanam seluas 1.100 hektar, mengakibatkan pertanaman padi tidak bisa di panen pada tahun 2024, dan baru akan dipanen di Januari – Februari 2025. meskipun produksinya naik dibanding tahun 2023.
3. Produksi Daging target 16.843.491 kg tercapai 16.866.635 kg atau 100,14%. Produksi telur target 16.018.664 kg tercapai 17.904.616 kg atau 111,77%. Produksi daging dapat tercapai target karena wabah PMk sudah dapat ditanggulangi 100% dengan pelaksanaan vaksinasi terhadap hewan ternak dan pengobatan terhadap ternak yang terjangkit penyakit menular, sehingga pemotongan hewan ternak kembali stabil. Produksi telur juga tercapai target kinerja. Hal ini karena peternak unggas terutama ayam petelur di wilayah sentra ternak ayam petelur mulai meregenerasi ayam petelur mereka dengan ayam yang produktif, sehingga produksi telur meningkat.

Capaian kinerja dari masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 tertuang dalam tabel II.3 berikut ini :

Tabel II.3 Capaian kinerja dari masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo tahun 2024

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET RENSTRA	TARGET RENJA	REALISASI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100,00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energi	%	102,28	102,28	99,91
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan	%	100	100	100
	persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	%	36,91	36,91	41,68
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan	%	94,33	94,33	95,42
Program Penyuluhan Pertanian	Presentase peningkatan penyuluhan pertanian	%	45,33	45,33	45,74
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan serangan OPT Tan Pangan dan hortikultura	%	0,36	0,36	1,97
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	%	13,97	13,97	14,93
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Populasi ternak		192.833	192.833	167.789
	produktivitas tanaman pangan		51,52	51,52	51,67
	produktivitas tanaman perkebunan		56,22	56,22	59,77
	produktivitas tanaman hortikultura		139,12	139,12	130,43
	persentase alat mesin pertanian yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kesehatan ternak dan kesmavet	%	0,19	0,19	0,71
	Persentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik	%	92,19	92,19	90,02
	Transaksi ternak besar dan ternak kecil	ekor	9.730	9.730	5.155
	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan	%	88,65	88,65	87,34
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Presentase pemberdayaan kelompok wanita tani	%	40	40	40
	Presentase pelestarian lahan surjan	%	5,66	5,66	5,66
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase pemberdayaan kelompok tani di kawasan perbukitan menoreh	%	6,48	6,48	6,48

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota capaian kinerjanya 100%. Capaian program memenuhi target karena asset-asset Dinas Pertanian dan Pangan dalam kondisinya baik dan terawat. Capaian kinerja program – program dapat tercapai semua.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan sampai dengan tahun 2024 tertuang dalam Tabel II.4 berikut ini :

TABEL II.4. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO

SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		INGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RENSTRA S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		ERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		3	4	5		6		7		8		9		10		11			12	13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
					p juta		p juta		Rp juta		p juta		p juta		Rp juta		p juta		p		p	K	Rp	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							-		-										-			
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	00	1.176,73	00	12.360,16	00	13.342,13		4,65	3.705,47	1,56	3.555,20	1,67	2.839,85	00	2.870,64	00	12.971,16	00	25.331,32	00,00	1,41	inas Pertanian dan Pangan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			-			***inas Pertanian dan Pangan***

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Dokumen Renja SKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja Tahun 2024 (2 dokumen)**				**5,54**		**14,43**			**3,41**		**1,27**		**3,64**		**,55**		**11,86**		**27,40**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD bulanan, triwulanan, LKjIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD, SPIP dan Laporan Statistik Pertanian**			**2**	**5,51**	**2**	**51,83**			**12,99**		**,20**		**14,03**		**4,74**	**2**	**50,96**	**2**	**136,47**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				**-**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				**2**	**0.702,61**	**3**	**11.857,41**			**3.379,74**		**.247,94**		**2.480,05**		**.515,58**	**3**	**11.623,31**	**3**	**22.325,92**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**			**2**	**5,43**		**85,50**			**21,38**		**1,38**		**21,37**		**0,70**		**84,83**		**170,26**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**			**3**	**3,51**	**3**	**13,49**			**2,15**		**,75**		**0,44**		**,93**	**3**	**12,27**	**3**	**25,78**			**inas Pertanian dan Pangan**

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				-			**inas Pertanian dan Pangan**
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**			**2**	**,50**		**4,00**			**1,36**		**,68**		**0,30**		**,44**		**3,77**		**7,27**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**			**0**	**,00**	**0**	**7,00**						**0**	**6,96**		**,00**	**0**			**5,00**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				-			**inas Pertanian dan Pangan**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**				**5,29**		**40,00**			**7,09**		**3,63**		**8,65**		**,14**		**35,52**		**70,81**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**			**2**	**4,08**	**2**	**54,52**			**13,39**		**,35**		**21,11**		**0,46**	**2**	**48,31**	**2**	**132,39**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				-			**inas Pertanian dan Pangan**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**			**2**	**74,35**	**2**	**197,79**			**44,19**		**5,10**		**45,39**		**5,97**	**2**	**190,66**	**2**	**365,01**			**inas Pertanian dan Pangan**

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**			**2**	**72,44**	**2**	**618,84**			**187,42**		**41,13**		**145,13**		**42,95**	**2**	**616,63**	**2**	**1.189,07**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya**			**41**	**77,00**	**38**	**302,92**			**22,22**	**3**	**5,39**	**0**	**68,75**	**6**	**0,14**	**38**	**226,50**	**38**	**503,50**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**				**48,41**		**17,50**			**-**		**,38**		**15,88**		**,13**		**17,39**		**265,80**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**				**7,49**	**0**	**76,90**		**4**	**10,13**		**1,00**		**8,15**		**2,92**	**0**	**42,19**	**0**	**99,68**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Presentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energi	9,7	.687,67	02,28	761,47	02,28	435,76		2,28	6,14	02,28	250,08	02,28		99,91	102,28	02,28	358,50	02,28	1.119,97	02,59	1,67	inas Pertanian dan Pangan

		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																				**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	**Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya**	**6**	**68,00**		**38,74**		**148,26**			**1,43**		**,97**		**19,24**		**17,07**		**139,71**		**278,45**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi																				**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	**Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**	**6**	**.119,67**		**22,73**		**287,50**			**4,71**		**48,11**		**23,43**		**,15**		**282,40**		**905,13**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Program Penanganan Kerawanan Pangan																							
			Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan	6,59	90,00	00	-	00	30,50		00	1,52	00	2,08	00		100,00	100,00	00	103,60	00	103,60	03,53	6,56	inas Pertanian dan Pangan

			persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	7,43		6,91		3,42			6,91		8,51		8,51		1,68	38,51	8,51		8,51	-	1,19		Dinas Pertanian dan Pangan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**-**																		**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	**Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota**	**6**	**90,00**		**,00**		**30,50**			**1,52**		**,08**		**8,45**		**,20**		**20,26**		**20,26**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan	5	25,60	4,33	9,40	4,33	9,75		6	,65	5,28	0,14	5,28	3,22	95,42	,51	5,28	1,52	5,28	20,92	00,29	3,60	inas Pertanian dan Pangan
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**-**																		**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	**Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan**				**4,70**		**39,75**			**3,65**		**10,14**		**13,22**		**,51**		**31,52**		**76,22**			**inas Pertanian dan Pangan**

		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibina**		**25,60**		**4,70**		**-**												**-**		**44,70**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian																								
			Populasi ternak	14105	0.222,00	70191	.063,80	92.833	.179,49		70191	95,56	60141	70,17	60141	.175,94	67,79	86,40	60141	.828,07	60141	.891,86	4,80	7,64	inas Pertanian dan Pangan
			produktivitas tanaman pangan	3,51		0,71		1,52			0,71		5,2		5,2		1,67	45,20	5,2		5,2	-	4,47		inas Pertanian dan Pangan
			produktivitas tanaman perkebunan	4,91		6,22		4,36					6,53		6,53		9,77	26,53	6,53		6,53	-	8,32		inas Pertanian dan Pangan
			produktivitas tanaman hortikultura	31,17		39,12		30,77					1,11		1,11		30,42	61,11	1,11		1,11	-	6,59		inas Pertanian dan Pangan
			persentase alat mesin pertanian yang berfungsi dengan baik	00		00		00			00		00		00		00	100,00	00		00	-	00,00		inas Pertanian dan Pangan
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**-**																			**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	**Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**		**,00**		**81,96**		**183,80**			**8,56**		**8,23**		**83,34**		**,28**		**165,41**		**947,37**			**inas Pertanian dan Pangan**

		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	**Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi Dan Spesifik Lokasi**		**,00**		**29,71**													**-**		**129,71**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota																				**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	**Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman**		**,00**		**.153,44**		**1.099,46**			**66,74**		**0,98**		**483,02**		**14,56**		**815,30**		**1.968,74**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	**Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman**		**,00**		**65,71**		**274,64**			**41,82**		**4,34**		**134,93**		**4,23**		**265,32**		**931,03**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**-**																			**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Jumlah benih/ bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain (Keluaran sesuai SIPD)**	**750**	**,00**	**21**	**.332,98**	**06**	**621,60**			**78,44**	**06**	**6,62**		**474,64**		**2,33**	**06**	**582,04**	**06**	**1.915,02**			**inas Pertanian dan Pangan**

		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	4	0.221,72	3,85	.295,13	3,97	.440,55		3,85	9,94	3,85	.289,66	3,85	.565,85	4,93	.000,27	3,85	.895,72	3,85	4.190,85	8,93	38,83	inas Pertanian dan Pangan
		Pengembangan Prasarana Pertanian	**-**																			**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	**Pembangunan unit olahan pakan ternak ruminansia**				**,00**		**428,11**			**-**		**3,68**		**406,17**		**,97**		**420,82**		**420,82**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	**Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola**		**.505,00**		**38,39**		**683,37**			**37,86**		**28,44**		**30,79**		**6,75**		**663,84**		**1.402,23**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pembangunan Prasarana Pertanian	**-**																			**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	**Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara**	**4**	**,00**		**.248,38**	**7**	**3.644,73**			**2,08**		**07,82**	**7**	**3.240,32**		**45,84**	**7**	**3.596,07**	**7**	**5.844,45**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	**Jumlah Dam Parit yang dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara**	**2**			**,00**		**513,37**			**-**		**08,82**		**-**		**,14**		**508,96**		**508,96**			**inas Pertanian dan Pangan**

		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya**	**0**			**.031,00**		**1.597,81**			**-**		**07,82**		**359,78**		**84,02**		**1.151,62**		**2.182,62**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	**Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi**	**0**	**,00**		**.138,68**	**0**	**1.573,17**			**-**		**3,08**	**0**	**1.528,78**		**,56**	**0**	**1.554,42**	**0**	**2.693,10**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	**Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara**	**6**	**,00**		**.138,68**															**1.138,68**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	**Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun,Direhabilitasi dan Dipelihara**		**,00**		**,00**															**-**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	**Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan sertaSarana Pendukungnya yang Dibangun,Direhabilitasidan Dipelihara**		**,00**		**,00**															**-**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																							
			Presentase kesehatan ternak dan kesmavet	,22	.645,89	,19	.154,93	,19	.163,84		,19	05,84	,38	19,19	,38	.125,40	,71	.227,56	,38	.877,99	,38	.032,92	,28	66,54	inas Pertanian dan Pangan

			Presentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik	3,11		2,19		2,19			7,23		0,83		0,83		0,02		0,83		0,83	-	24,24		Dinas Pertanian dan Pangan
			Transaksi ternak besar dan ternak kecil	040		730		730			171		495		495		155		495		495	-	9,50		Dinas Pertanian dan Pangan
			Presentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan	00		4,72		8,65			4,72		7,34		7,34		7,34		7,34		7,34	-	7,34		Dinas Pertanian dan Pangan
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**-**																			**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	**Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali**		**,00**		**4,21**		**99,70**			**4,82**		**9,52**		**5,72**		**,29**		**71,35**		**145,56**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis**				**89,53**		**247,57**			**43,32**		**6,01**		**70,82**		**8,05**		**238,21**		**727,74**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		**6**	**,00**		**89,53**																**489,53**			**inas Pertanian dan Pangan**

		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**-**																			**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	**Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)**	**6**	**,00**		**30,42**		**163,44**			**28,10**		**4,65**		**34,11**		**1,28**		**158,14**		**288,56**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	**Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM**				**,00**		**96,70**			**2,34**		**9,86**		**3,23**		**,29**		**67,73**		**67,73**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**		**,00**		**6,52**															**66,52**			**inas Pertanian dan Pangan**

		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**-**																			**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	**Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner**	**8**	**,00**	**2**	**.696,78**		**2.299,99**			**4,30**		**27,98**		**985,42**		**72,35**		**2.090,05**		**3.786,83**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**-**																			**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	**Jumlah Pengawasan Peredaran hewan dan Produk Hewan**	**2**	**,00**		**7,92**		**75,00**			**11,14**		**1,11**		**9,26**		**,61**		**74,12**		**132,04**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	**Jumlah Produk Hewan Segar Berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan**				**,00**		**181,44**			**11,82**		**0,06**		**16,84**		**39,67**		**178,40**		**178,40**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	**Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan**	**6**	**,00**		**50,02**															**150,02**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan serangan OPT Tan Pangan dan hortikultura	,24	.590,50		48,12	,36	43,03			9,84		89,74		2,70	1,97	3,33		95,61		843,73	,00	3,05	inas Pertanian dan Pangan

		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**-**																			**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	**Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan**	**39**	**.590,50**	**55**	**48,12**	**8**	**643,03**			**19,84**	**4**	**89,74**	**2**	**62,70**	**4**	**3,33**	**8**	**595,61**	**8**	**843,73**			**inas Pertanian dan Pangan**
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penyuluhan Pertanian	Presentase peningkatan penyuluhan pertanian	5,87	.629,22	5,33	64,26	5,33	64,02		5,33	3,44		93,54		37,13	5,74	6,48		20,59		.484,85	,00	2,08	inas Pertanian dan Pangan
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**-**																			**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	**Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya**	**8**	**.139,20**	**2**	**97,14**	**2**	**329,58**			**69,16**		**1,70**		**138,12**	**2**	**7,08**	**2**	**326,06**	**2**	**623,20**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	**Jumlah Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya**	**542**	**.490,00**	**4**	**67,12**	**8**	**380,44**			**24,28**		**51,84**		**163,52**	**8**	**9,41**	**8**	**359,05**	**8**	**726,17**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	**Jumlah Sarana Data dan Informasi BPP yang diadakan**				**,00**		**154,00**			**-**		**-**		**135,48**		**,00**		**135,48**		**135,48**			**inas Pertanian dan Pangan**

		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																						
			Presentase pemberdayaan kelompok wanita tani	2	.002,64	0	.485,99	0	.465,96			3,28		64,81		,00		.868,46		.146,55		.632,54	,00	3,67	inas Pertanian dan Pangan
			Presentase pelestarian lahan surjan	,43		,66		,66					,55		,55		,55	7,55	2,65		2,65	-	40,19		inas Pertanian dan Pangan
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya																				***-***			***inas Pertanian dan Pangan***
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	**Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi**				**.931,57**		**1.172,61**			**7,45**		**2,00**				**.087,62**		**1.167,07**		**3.098,64**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	**-**																			**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Pengembangan Lumbung Mataraman	**Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman**		**.200,00**		**86,85**		**635,35**			**5,83**		**36,47**				**65,35**		**607,65**		**1.394,51**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	**Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional**		**,00**		**67,57**		**1.658,00**					**6,34**				**.315,49**		**1.371,83**		**2.139,40**			**inas Pertanian dan Pangan**
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		0,19	.115,76	00	.886,60	00	.904,35			50,45		14,87		.799,38	00	37,91	00	.702,61	00	.589,21	81,35	2,60	inas Pertanian dan Pangan

		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	**-**																			**-**			***inas Pertanian dan Pangan***
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	**Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh**		**.115,76**		**.886,60**		**2.904,35**			**150,45**		**14,87**		**1.799,38**		**37,91**		**2.702,61**		**6.589,21**			**inas Pertanian dan Pangan**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Data Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 seperti terlihat pada Tabel II.5 berikut dan bisa terlihat proyeksi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan.

Tabel II.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
1	Produksi Padi (Ton)			124.195	124.816	125.440		124.230		125.440		
2	Produksi Jagung (Ton)			24.724	24.848	24.972		23.471		24.972		
3	Produksi Kedelai (Ton)			2.939	2.954	2.968		3.027		2.968		
4	produksi Cabe Merah (Ku)			128.342	134.760	141.498		128.346		141.498		
5	Produksi bawang merah (Ku)			357.071	374.924	393.670		379.192		393.670		
6	Produksi Alpukat (Ku)			19.724	20.710	21.745		36.533		21.745		
7	Produksi Durian (Ku)			56.783	59.382	62.162		59.639		62.162		
8	Produksi Kelengkeng (Ku)			7.754	5.439	5.996		11.580		5.996		
9	Produksi Jahe (Kg)			4.632.000	4.654.392	4.842.430		4.677.370		4.842.430		
10	Produksi Kelapa (Ton)			26.189	26.582	26.981		27.067		26.981		
11	Produksi kopi (Ton)			3.317	3.367	3.418		3.37		3.418		
12	Produksi Kakao (Ton)			1.408	1.430	1.451		1.446		1.451		
13	Produksi daging (kg)			15.309.036	16.074.488	16.878.212		16.866.635		16.878.212		
14	Produksi Telur (kg)			13.885.958	14.580.256	15.309.269		17.904.616		15.309.269		
15	Skor Pola Pangan Harapan (PH)			93,57	94,00	94,20		93,77		94,20		

Hasil Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dari 16 (enam belas) indikator kinerja, 14 (empat belas) indikator dapat mencapai target yaitu produksi kedelai, produksi cabai merah, produksi bawang merah,produksi alpukat, produksi kelengkeng, produksi durian, produksi jahe, produksi kelapa, produksi kopi, produksi kakao, produksi daging, produksi telur, skor pola pangan harapan, dan persentase pencapaian program pada masing - masing sekretariat perangkat daerah, sedangkan 2 (dua) indikator tidak dapat mencapai target yaitu produksi padi dan produksi jagung.
- Capaian Indikator kinerja tertinggi adalah untuk produksi alpukat yaitu 7.754 kuintal (tingkat capaian 146,42%) sedangkan capaian terendah adalah Produksi padi yaitu 124.230 ton (tingkat capaian 94,54%).
- Capaian indikator kinerja terendah adalah produksi padi, yaitu 124.230 ton dari target 131.399 ton (94,54%). Produksi padi tidak mencapai target karena ada serangan hama wereng batang coklat sehingga mengakibatkan pertanaman padi mengalami puso 41 hektar. Selain itu, adanya perbaikan pada Saluran Irigasi Sapon selama 1 bulan, sehingga mengakibatkan kemunduran tanam padi di wilayah Lendah, Galur dan sebagian Panjatan. Adanya kemunduran tanam seluas 1.100 hektar, mengakibatkan pertanaman padi tidak bisa di panen pada tahun 2024, dan baru akan dipanen di Januari – Februari 2025. Komoditas jagung tidak tercapai produksi karena banyak petani yang memanen muda pertanaman jagung untuk dijadikan pakan ternak, selain itu juga ada peralihan pertanaman dari jagung menjadi bawang merah di Sentolo dan Pengasih.
- Produksi kedelai mengalami peningkatan juga di tahun 2024 ini. Dari target produksi 3.023 ton dapat tercapai 3.027 ton (100,13%). Produksi tahun ini meningkat kurang signifikan karena relative tidak ada penambahan luas tanam dibanding tahun lalu. Meskipun luas tanam tidak bertambah, namun kondisi pertanaman yang baik, kecukupan air dan pupuk sehingga menghasilkan produksi kedelai yang bagus.
- Produksi bawang merah memenuhi target indikator kinerja tahun 2024 yaitu 128.346 kuintal dari target 128.342 kuintal, atau tercapai 100,00%.

Target produksi bawang merah tercapai 100% karena adanya penambahan luas pertanaman bawang merah terutama di daerah pesisir. Namun karena hujan yang terus menerus, kualitas dan produktivitas bawang merah menurun dibandingkan tahun lalu .Produksi cabai merah tahun 2024 sebesar 379.192 kuintal, dibanding target 379.122 kuintal (100,02%). Tercapainya produksi cabai merah karena adanya peningkatan luas panen dan juga meningkatnya produktivitas cabai merah. Intensifikasi pertanaman cabai merah terutama di lahan pesisir menyebabkan produktivitas dan produksi meningkat.

- Produksi alpukat dan durian juga melebihi target produksi di tahun 2024 ini. Animo petani menanam buah alpukat karena relative mudah dalam proses budidaya, sehingga luas panen alpukat meningkat. Target produksi sebesar 24.950 kuintal dapat tercapai 36,533 kuintal (146,42%). Sedangkan untuk buah durian, capaian produksi adalah 59.639 kuintal dari target produksi 59.622 kuital (100.03%). Kondisi panas yang panjang dan juga juga didukung tidak adanya hujan sehingga bakal buah tidak mengalami kerontokan, sehingga bakal buah durian dapat tumbuh dengan bagus dan sampai matang.
- Pertanaman biofarmaka banyak diminati oleh petani di perbukitan menoreh. Produksi jahe tahun ini sebesar 4.677.370 kilogram dari target produksi sebesar 4.654.392 kilogram (101,51%). Meskipun luas panen mengalami penurunan, namun produktivitas jahe mengalami peningkatan, karena pertanaman jahe diperhatikan selama proses budidaya. Pemupukan dan ketersediaan air serta kondisi panas yang cukup, meningkatkan produktivitas dan produksi jahe.
- Produksi Kopi dan kakao dapat melampaui target di tahun 2024. Produksi kopi sebesar 3.370 ton, tercapai 100,24%, sedangkan produksi kakao sebesar 1.446 ton atau tercapai 100,14%. Animo petani dalam pasca panen dan pengolahan komoditas kopi dan kakao, memotivasi para petani untuk lebih membudidayakan tanaman tersebut dan merawat serta memupuk dengan baik.
- Produksi Daging target 16.843.491 kg tercapai 16.866.636 kg atau 100,14%. Produksi telur target 16.018.664 kg tercapai 17.904.616 kg atau 111,77%. Produksi daging dapat tercapai target karena penyakit hewan menular yang dapat mengakibatkan kematian pada ternak sudah

terkendali. Aakhir tahun 2024 sudah tidak ada serangan penyakit hewan menular berbahaya. Produksi telur juga tercapai target kinerja. Hal ini karena peternak unggas terutama ayam petelur di wilayah sentra ternak ayam petelur mulai meregenerasi ayam petelur mereka dengan ayam yang produktif, sehingga produksi telur meningkat.

- Skor pola pangan harapan dapat mencapai target sbesar 100,07% dari target 93,70 tercapai 93,77. Ini mengindikasikan terjadi peningkatan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan di Kabupaten Kulon Progo.
- Sasaran meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator persentase peningkatan program pada masing - masing sekretariat perangkat daerah dapat tercapai 100%, mengindikasikan bahwa pelayanan di secretariat dapat terlaksana dengan baik dan sesuai target.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Peran sektor pertanian dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Kulon Progo sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan, menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Beberapa isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani yaitu :

1. Penanganan tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian;
2. Upaya peningkatan produksi masih rentan terhadap pencemaran, kerusakan, risiko bencana alam dan perubahan iklim;
3. Belum optimalnya mekanisasi pertanian sebagai sarana mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani;
4. Lemahnya kelembagaan petani yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani;
5. Kurangnya pemenuhan standar mutu hasil, industri pengolahan dan perluasan pemasaran hasil pertanian;
6. Lemahnya akses petani terhadap permodalan;

7. Harga produk pertanian yang fluktuatif akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai pemasaran produk pertanian;
8. Pengelolaan usaha tani yang berorientasi pada pasar regional dan internasional;
9. Kurangnya peran generasi muda dan kelembagaan pertanian terutama Gapoktan, Kelompok Tani, UPJA, penangkar dan produsen benih, kelompok pengolahan hasil, serta P3A/GP3A
10. Kondisi kemiskinan yang dapat berlanjut pada kerawanan pangan.
11. Diversifikasi ketersediaan dan konsumsi pangan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi antara lain :

1. Alih fungsi lahan;
2. Rendahnya posisi tawar produk pertanian dalam pemasaran;
3. Akses permodalan yang rendah menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha tani;
4. Belum optimalnya mekanisasi pertanian sebagai sarana mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani;
5. Lemahnya kelembagaan petani yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani;
6. Kurangnya pemenuhan standar mutu hasil, industri pengolahan dan perluasan pemasaran hasil pertanian;
7. Lemahnya akses petani terhadap permodalan;
8. Harga produk pertanian yang fluktuatif akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai pemasaran produk pertanian;

9. Masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karena rendahnya kemampuan daya beli/kemiskinan;
10. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan;
11. Belum terpenuhinya kebutuhan satu desa satu penyuluh.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan adalah:

1. Adanya bandara internasional Yogyakarta - YIA (*Yogyakarta International Airport*).
2. Pembangunan konektivitas infrastruktur pendukung Borobudur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
3. Akses infrastruktur pertanian yang sudah berkembang

Isu isu strategis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Penanganan tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian;
2. Meningkatkan penggunaan mesin/ mekanisasi pertanian sebagai sarana mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani;
3. Memperkuat kelembagaan petani untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani;
4. Meningkatkan pemenuhan standar mutu hasil, industri pengolahan dan perluasan pemasaran hasil pertanian;
5. Menstabilkan harga produk pertanian. fluktuatif akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai pemasaran produk pertanian;
6. Memudahkan akses petani terhadap permodalan;
7. Meningkatkan pengelolaan usaha tani yang berorientasi pada pasar regional dan internasional.

2.4. Review Terhadap RKPD

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan harus selaras dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

Hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2026 perlu dibandingkan dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran. Perbandingan dapat dilihat pada tabel II.6. Reviu terhadap Rancangan Awal Renja 2026

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				27.058.801.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				28.250.410.400,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.538.815.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.538.815.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.538.815.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.538.815.000,00	
1,	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		-	-	2.538.815.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		-	-	2.538.815.000,00	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		**-**	**-**	**2.538.815.000,00**	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**		**-**	**-**	**2.538.815.000,00**	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh					**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh**					

		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh***	**1 Dokumen**	**2.538.815.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa**	***Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh***	**1 Dokumen**	**2.538.815.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.190.506.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.190.506.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				358.400.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				358.400.000,00	
1,	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		-	-	301.858.900,00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		-	-	301.858.900,00	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		**-**	**-**	**121.858.900,00**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**		**-**	**-**	**121.858.900,00**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya***	**3 Laporan**	**121.858.900,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa**	***Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya***	**3 Laporan**	**121.858.900,00**	

	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		**-**	**-**	**180.000.000,00**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		**-**	**-**	**180.000.000,00**	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					**Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal***	**3 Laporan**	**180.000.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal***	**3 Laporan**	**208.000.000,00**	
2,	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		-	-	21.541.100,00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		-	-	21.541.100,00	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		**-**	**-**	**21.541.100,00**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**-**	**-**	**21.541.100,00**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota					**Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota***	**2 Laporan**	**21.541.100,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota***	**2 Laporan**	**21.541.100,00**	
3,	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		-	-	35.000.000,00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		-	-	35.000.000,00	

	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		**-**	**-**	**35.000.000,00**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**		**-**	**-**	**35.000.000,00**	
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					**Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan***	**1 Dokumen**	**35.000.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan***	**1 Dokumen**	**35.000.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				5.832.106.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				5.832.106.000,00	
1,	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		-	-	5.329.442.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		-	-	5.329.442.000,00	
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		**-**	**-**	**1.642.664.000,00**	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**		**-**	**-**	**1.642.664.000,00**	
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia					**Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi***	**1 Objek**	**1.642.664.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi***	**1 Objek**	**1.642.664.000,00**	

2,	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		-	-	502.664.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		-	-	502.664.000,00	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		**-**	**-**	**502.664.000,00**	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**		**-**	**-**	**502.664.000,00**	
	Pengembangan Lumbung Mataraman					**Pengembangan Lumbung Mataraman**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman***	**1 Laporan**	**502.664.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa**	***Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman***	**1 Laporan**	**502.664.000,00**	
3,	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		-	-	5.329.442.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		-	-	5.329.442.000,00	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		**-**	**-**	**3.686.778.000,00**	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**		**-**	**-**	**3.686.778.000,00**	
	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional					**Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional***	**1 Dokumen**	**3.686.778.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa**	***Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional***	**1 Dokumen**	**3.686.778.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				18.329.480.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				18.329.480.000,00	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				18.329.480.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				18.329.480.000,00	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	13.849.398.413,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	13.849.398.413,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**-**	**-**	**70.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**-**	**-**	**70.000.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***	**2 Dokumen**	**18.000.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***	**2 Dokumen**	**18.000.000,00**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**19 Laporan**	**52.000.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**19 Laporan**	**52.000.000,00**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**-**	**-**	**12.158.478.613,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**-**	**-**	**12.158.478.613,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**					

		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN***	**2338 Orang/bulan**	**12.067.478.613,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN***	**2338 Orang/bulan**	**12.067.478.613,00**	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN***	**1 Dokumen**	**79.000.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN***	**1 Dokumen**	**79.000.000,00**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD***	**14 Laporan**	**12.000.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD***	**14 Laporan**	**12.000.000,00**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**-**	**-**	**10.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**-**	**-**	**10.000.000,00**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					**Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai***	**1 Dokumen**	**3.000.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai***	**1 Dokumen**	**3.000.000,00**	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan***	**10 Orang**	**7.000.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan***	**10 Orang**	**7.000.000,00**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**-**	**-**	**95.000.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**-**	**-**	**95.000.000,00**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan***	**1 Paket**	**35.000.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan***	**1 Paket**	**35.000.000,00**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***	**12 Laporan**	**60.000.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***	**12 Laporan**	**60.000.000,00**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**-**	**-**	**34.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**34.000.000,00**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**					

		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan***	**2 Unit**	**34.000.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan***	**2 Unit**	**34.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**-**	**-**	**830.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**-**	**-**	**830.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan***	**12 Laporan**	**200.000.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan***	**12 Laporan**	**200.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan***	**12 Laporan**	**630.000.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan***	**12 Laporan**	**630.000.000,00**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**-**	**-**	**651.919.800,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**-**	**-**	**651.919.800,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**					

		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya***	**135 Unit**	**300.000.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya***	**135 Unit**	**300.000.000,00**	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi***	**2 Unit**	**281.919.800,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi***	**2 Unit**	**281.919.800,00**	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi***	**20 Unit**	**70.000.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi***	**20 Unit**	**70.000.000,00**	
2,	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		-	-	1.726.095.687,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		-	-	1.726.095.687,00	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		**-**	**-**	**178.274.700,00**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		**-**	**-**	**178.274.700,00**	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**					

		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian***	**2 Laporan**	**178.274.700,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa**	***Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian***	**2 Laporan**	**313.274.700,00**	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		**-**	**-**	**1.148.375.387,00**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		**-**	**-**	**1.148.375.387,00**	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					**Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman***	**2 Dokumen**	**985.425.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa**	***Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman***	**2 Dokumen**	**1.016.393.900,00**	
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman					**Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman***	**2 Dokumen**	**162.950.387,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa**	***Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman***	**2 Dokumen**	**162.950.387,00**	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		**-**	**-**	**399.445.600,00**	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**		**-**	**-**	**640.055.000,00**	

	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					**Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain***	**54 Ekor**	**399.445.600,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain***	**54 Ekor**	**399.445.600,00**	
3,	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		-	-	1.160.160.100,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		-	-	1.160.160.100,00	
	Pengembangan Prasarana Pertanian		**-**	**-**	**415.248.800,00**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**		**-**	**-**	**415.248.800,00**	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota					**Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola***	**2 Dokumen**	**415.248.800,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola***	**2 Dokumen**	**415.248.800,00**	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		**-**	**-**	**744.911.300,00**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**		**-**	**-**	**744.911.300,00**	

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara***	**2 Unit**	**482.951.300,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara***	**8 Unit**	**1.350.000.000,00**	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit					**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara***	**0 Unit**	**0,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara***	**0 Unit**	**0,00**	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya					**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara***	**0 Unit**	**0,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara***	**0 Unit**	**0,00**	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya**					

		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara***	**0 Unit**	**0,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa**	***Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara***	**0 Unit**	**0,00**	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi***	**1 Unit**	**160.000.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa**	***Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi***	**1 Unit**	**160.000.000,00**	
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan					**Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan**					
		Kab. Kulon Progo, Pengasih, Pengasih	***Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi***	**1 Unit**	**101.960.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Pengasih, Pengasih**	***Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi***	**1 Unit**	**101.960.000,00**	
4,	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		-	-	867.902.100,00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		-	-	867.902.100,00	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		**-**	**-**	**367.496.740,00**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**		**-**	**-**	**367.496.740,00**	
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular					**Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular**					

		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali***	**1 Laporan**	**99.512.140,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa**	***Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali***	**1 Laporan**	**99.512.140,00**	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					**Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota***	**1 Laporan**	**267.984.600,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa**	***Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota***	**1 Laporan**	**267.984.600,00**	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		**-**	**-**	**323.530.160,00**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**		**-**	**-**	**323.530.160,00**	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)					**Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM***	**4 laporan**	**153.881.500,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa**	***Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM***	**4 laporan**	**153.881.500,00**	
	Pengawasan Peredaran Produk Hewan					**Pengawasan Peredaran Produk Hewan**					

		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan***	**1 Laporan**	**70.907.900,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan***	**1 Laporan**	**70.907.900,00**	
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM					**Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM***	**1 Laporan**	**98.740.760,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM***	**1 Laporan**	**98.740.760,00**	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		**-**	**-**	**0,00**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**-**	**-**	**0,00**	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner					**Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner***	**0 Laporan**	**0,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner***	**0 Laporan**	**0,00**	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		**-**	**-**	**176.875.200,00**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**-**	**-**	**176.875.200,00**	

	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan					**Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan***	**4 Produk**	**176.875.200,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan***	**4 Produk**	**176.875.200,00**	
5,	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		-	-	99.923.800,00	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		-	-	99.923.800,00	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		**-**	**-**	**99.923.800,00**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		**-**	**-**	**99.923.800,00**	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					**Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan***	**907,8 Ha**	**99.923.800,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan***	**907,8 Ha**	**99.923.800,00**	
6,	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		-	-	625.999.900,00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		-	-	625.999.900,00	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		**-**	**-**	**625.999.900,00**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**-**	**-**	**625.999.900,00**	

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya***	**12 Unit**	**200.000.000,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa**	***Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya***	**12 Unit**	**200.000.000,00**	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa**					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya***	**1628 Unit**	**425.999.900,00**		**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa**	***Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya***	**1628 Unit**	**425.999.900,00**	
					27.058.801.000,00					28.250.410.400,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Pertanian dan Pangan didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rancangan Awal Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kapanewon dan pokok pikiran DPRD. Usulan kegiatan dari masyarakat yang masuk ke Dinas Pertanian dan Pangan berupa proposal bantuan yang disampaikan langsung ke Dinas, usulan kalurahan/ masyarakat melalui musrenbang kapanewon dan usulan reses/ pokok pikiran DPRD.

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat / pemangku kepentingan ini ada yang diakomodir, belum prioritas dan ada yang tidak diakomodir/ ditolak karena tidak sesuai kewenangan. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel II.7 di bawah ini.

Tabel II.7. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**	**Kelompok Tani "Serba Guna"No.Reg. 02/KWN/II/02 Alamat : Karangwuni, Wates**	**Bantuan Traktor Rotari (PRIORITAS 6)**	**1 Unit**	**BELUM PERNAH DAPAT BANTUAN TRAKTOR.**
2	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**	**Kelompok Tani "Ngelarangan" No.Reg : 34.01.03.CRM.KT. 04.2016 Alamat : Dusun V, Ceme, Panjatan**	**Bantuan Traktor Rotari (PRIORITAS 7)**	**1 Unit**	**BELUM PERNAH DAPAT BANTUAN TRAKTOR**

3	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**	**Kelompok Tani Sedyo Mukti No. Reg. 34.01.02.THJ.KT.21.2016 Dalangan, Triharjo, Wates**	**Bantuan Traktor Rotari (PRIORITAS 6)**	**1 Unit**	**BELUM PERNAH DAPAT BANTUAN TRAKTOR.**
4	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**	**Kelompok Ngudi Rejeki Dalangan, Triharjo, Wates**	**Bantuan Cultivator (PRIORITAS 7)**	**1 Unit**	**BELUM PERNAH DAPAT BANTUAN CULTIVATOR**
5	**Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Kelompok Tani Silayur No.Reg.34.01.01.KLGT.KT.04. 2016 Kaligintung Kidul, Kaligintung, Temon**	**Bantuan Kambing (PRIORITAS 8)**	**1 Paket**	
6	**Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Kelompok Tani Margorejo No.Reg. 34.01.11.GBR.KT.10.2016 Pedukuhan Pengos B, Garbosari, Samigaluh**	**Bantuan Ternak Kambing potong (PRIORITAS 10)**	**15 Ekor**	
7	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**	**Kelompok Tani : Sido Dadi No.Reg. 34.0107TWS.KT.07.2016 Soronanggan, Tawangsari, Pengasih**	**Bantuan Traktor G1000 (PRIORITAS 15)**	**1 Unit**	**BELUM PERNAH DAPAT BANTUAN TRAKTOR.**
8	**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tan**	**Bojong, Panjatan , Kab. Kulon Progo**	**Drainase lahan pertanian Bulak Kebaran sampai Bulak Wojowalur, Bojong, Panjatan 1000x2x0,90 meter (PRIORITAS 5)**	**1 Unit**	**Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**
9	**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tan**	**Bojong, Panjatan, Kab. Kulon Progo**	**Drainase lahan pertanian Bulak Wojowalur, Bojong, Panjatan 1000x2x0,90 meter (PRIORITAS 4)**	**1 Unit**	**Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**

10	**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tan**	**Wojowalur, Bojong, Panjatan, Kab. Kulon Progo**	**Rehab Gorong-Gorong Plat lokasi Sawah Bulak Ngasem melintang jalan Kabupaten Ngepos - Wojowalur KM 3**	**1 Unit**	**Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**
11	**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tan**	**Tangkisan II, Hargomulyo, Kokap , Kab. Kulon Progo**	**Hibah sarana prasarana produksi jamu Tradisional KWT. Barokah Tangkisan II, Hargomulyo, Kokap (PRIORITAS 10)**	**1 Paket**	**Kewenangan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**
12	**Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Karang Wetan, Donomulyo, Nanggulan, Kab. Kulon Progo**	**Permohonan Sapi Kelompok Ternak Harapan Mulya Karang Wetan, Donomulyo, Nanggulan 10 ekor (PRIORITAS 12)**	**1 paket**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
13	**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**	**Trayu, Ngargosari, Samigaluh, Kab. Kulon Progo**	**Pembangunan jalan usaha tani**	**1 Unit**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
14	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**	**Pagutan Purwoharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo**	**Bantuan Traktor Capung**	**1 Unit**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
15	**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**	**Gerbosari, Samigaluh, Kab. Kulon Progo**	**Pembangunan jalan usaha tani**	**1 Unit**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
16	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**	**Tompak, Giripurwo, Girimulyo , Kab. Kulon Progo**	**Bantuan kelompok wanita tani**	**1 Unit**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
17	**Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Paingan, Sendangsari, pengasih , Kab. Kulon Progo**	**Hibah Bibit Ternak Kambing Bligon**	**1 paket**	

18	**Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Karangasem, Sidomulyo, Pengasih , Kab. Kulon Progo**	**Hibah Bibit Ternak Kambing Bligon**	**1 Paket**	
19	**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**	**RT 78 RW 39 Kalikotes, Pedukuhan Degan, Banjararum, Kalibawang, Kab. Kulon Progo**	**JUT (Pengerasan Jalan) RT 78 RW 39 Kalikotes, Pedukuhan Degan, Banjararum, Kalibawang (prioritas 7)**	**1 Unit**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
20	**Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Bantarjo, Banguncipto, Sentolo, Kab. Kulon Progo**	**Bantuan mesin penggiling pakan kelompok ternak Tunas Sembada No Reg: 34.01.06.BGC.KT.14.2016 Bantarjo, Banguncipto, Sentolo (Prioritas 3)**	**1 paket**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
21	**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**	**RT 47, Dukuh, Donomulyo, Nanggulan, Kab. Kulon Progo**	**Jalan persawahan RT 47, Dukuh, Donomulyo, Nanggulan (Prioritas 16)**	**1 Unit**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
22	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**	**Jambon, Donomulyo, Nanggulan , Kab. Kulon Progo**	**Bantuan Pompa Diesel untuk Kelompok Tani Jambon, Donomulyo, Nanggulan , Kab. Kulon Progo (Prioritas 18)**	**1 Unit**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
23	**Peningkatan Kualitas SDG Hewan Tanaman**	**Sorogaten, Donomulyo, Nanggulan, Kab. Kulon Progo**	**Bibit buah untuk Kelompok Tani Margomulyo, Sorogaten, Donomulyo, Nanggulan (Prioritas 19)**	**1 Paket**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
24	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragam**	**Blubuk Sendangsari Pengasih , Kab. Kulon Progo**	**KWT Padukuhan Blubuk, Sendangsari**	**1 paket**	

	an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				
25	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**	**Hargowilis, Kokap, Kab. Kulon Progo**	**KWT Padukuhan Clapar 1**	**1 paket**	
26	**Peningkatan Kualitas SDG Hewan Tanaman**	**Bangeran, Bumirejo, Lendah, Kab. Kulon Progo**	**Permohonan bibit bawang merah kelompok tani Ginanjar Mukti, Bangeran, Bumirejo, Lendah**	**1 paket**	
27	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**	**Seling, Kebonrejo, Temon , Kab. Kulon Progo**	**Bantuan Traktor Rotary untuk kelompok Tani Tani Rejo 34.01.01.KBR.KT.05.2016 Padukuhan Seling, Kebonrejo, Temon**	**1 Unit**	**Sudah mendapat bantuan traktor 2016**
28	**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**	**Jatirejo RT 27 dan RT 32 Jimatan** (LANJUTAN) (PRIORITAS 1)	**Jalan Usaha Tani (JUT) Jatirejo RT 27 dan 32 Jimatan**	**850 m**	
29	**Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Lendah, Jatirejo, Lendah,, Kab. Kulon Progo**	**Bantuan ternak ayam jawa super**	**1 paket**	
30	**Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Panggang, Bumirejo, Lendah**	**Indukan sapi kelompok ternak dukuh panggang** (PRIORITAS 10)	**1 Paket**	
31	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani**	**KT REJO TANI, Banyuroto, Nanggulan,Kab. Kulon Progo**	**Pembuatan Sumur Bor Pertanian** (PRIORITAS 7)	**1 Unit**	
32	**Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**KT Sedyo Mulyo, Mendolo, Pagerharjo, Samigaluh**	**Bantuan ternak kambing untuk Kelompok Tani Sedyo Mulyo** (PRIORITAS 8)	**1 Paket**	

33	**Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Pringtali, Kebonharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo**	**Permohonan Bantuan Kambing Kelompok Suka Karya No Register: 07/KBH/VI/2003** (PRIORITAS 9)	**1 Paket**	
34	**Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Padukuhan Ngaliyan Gunung A, Ngargosari, Samigaluh**	**Permohonan Bantuan Kambing Kelompok "Wanita Tani Tuwuh" Padukuhan Ngaliyan No Reg: 34.01.11NGR.KT.35B.2016 Ketua: Yohana Suinem** (PRIORITAS 10)	**1 Paket**	
35	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**	**Kelompok Tani Roso Manunggal No. Register 34.01.01.GLG.KT.01.2016** (PRIORITAS 4)	**Bantuan Kendaraan Roda 3 untuk pengangkut hasil pertanian, tangki semprot dan selang untuk menyiram tanaman**	**1 Paket**	**USULAN KURANG SPESIFIK, JIKA HANDSPARYER 5 UNIT**
36	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**	**Kelompok Tani Hutan WONO SEGORO No Register: 34/01/01/2004/KTH.0699/2015** (PRIORITAS 6)	**Bantuan Gergaji mesin**	**1 Paket**	
37	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**	**Kelompok Tani Hutan WONO SEGORO No Register: 34/01/01/2004/KTH.0699/2015** (PRIORITAS 7)	**Mesin Pemotong Rumput Gendong**	**1 Paket**	
38	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**	**KT NGUDI BOGA No Reg: 34.01.01.GLG.KT.08.2016** (PRIORITAS 8)	**Permohonan bantuan traktor mini cultivator**	**1 Unit**	**BELUM PERNAH DAPAT BANTUAN CULTIVATOR**

39	**Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Kelompok Tani Marsudi Boga, Tegowanu, Kaliagung, Sentolo kp**	**Peternakan Kambing Modern**	**1 paket**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perumusan tema pembangunan dalam Rancangan RKPD Kulon Progo tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan DIY, dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, sebagai tindak lanjut amanat Permendagri No. 86 tahun 2017 yang termaktub pada paragraf 3 Pasal 159 dan Pasal 160, dan rancangan awal RPJMD 2025-2029 Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki makna bahwa dalam proses penyusunan rencana kerja dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah. Sampai dengan tahap penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 ini disusun, Tema Pembangunan Rancangan RKP Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Swasembada Pangan Berkelanjutan”.

Selain merujuk pada Tema Pembangunan RKP tahun 2026, Renja Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 juga memperhatikan tema pembangunan DIY sebagaimana tercantum di dalam Rancangan RKPD DIY tahun 2026, yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Mainstreaming dari tema tersebut yaitu sektor unggulan: pariwisata, pertanian, industri dan manufaktur. Di samping itu penggunaan teknologi informasi juga menjadi prioritas mainstreaming.

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi inklusif, maka prioritas pembangunan dirumuskan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Terkait pertumbuhan ekonomi inklusif tersebut, ditetapkan juga prioritas penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dibutuhkan pusat pertumbuhan baru dengan pengembangan kawasan aerotropolis. Peningkatan penatakelolaan untuk mencapai tujuan tersebut akan dilakukan dengan optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Tema Pembangunan tahun 2026 tersebut juga berpedoman pada visi bupati terpilih yaitu “terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya

yang berkelanjutan“ yang dijabarkan dalam 4 misi pembangunan Kulon Progo 2025-2029 yakni: 1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo makmur, berbudaya dan religius; 2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi; 3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis; 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, lingkungan yang lestari dan tangguh bencana.

Sesuai ketugasan pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan menitikberatkan pada tema 2 (dua) Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026

1) Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023-2026 adalah

a. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan sasaran:
   i. Meningkatnya produksi pertanian
   ii. Meningkatnya produksi peternakan
   iii. Meningkatnya pola pangan harapan (PPH)
b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.
   - Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah.

2) Sasaran

Sasaran kinerja Tahun 2026 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertera dalam tabel III.1 berikut

Tabel III.1 Sasaran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun 2026	Satuan
1	Meningkatnya produksi pertanian	Produksi Padi dan Palawija	Produksi Padi Sawah	125.440	ton
			Produksi Jagung	24.972	ton
			Produksi Kedelai	2.968	ton

		Produksi Tanaman Sayuran	Produksi Bawang Merah	141.498	kuintal
			Produksi Cabe besar	393.670	kuintal
		Produksi Tanaman Buah	Produksi Alpukat	21.745	kuintal
			Produksi Durian	62.162	kuintal
			Produksi Klengkeng	5.996	kuintal
		Produksi Tanaman Biofarmaka	Produksi Jahe	4.842.430	kg
		Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Kelapa	26.981	ton
			Produksi Kopi	3.418	ton
			Produksi Kakao	1.451	ton
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging	Produksi Daging	16.878.212	ton
		Produksi Telur	Produksi Telur	15.309.269	Ton
3	Meningkatnya Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor pola pangan harapan	Skor Pola Pangan Harapan	94,20	%

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo mengampu 3 urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian, Urusan Pangan dan Urusan Keistimewaan dengan 11 Program, 25 Kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Urusan Pertanian : 6 program 18 kegiatan, 36 sub kegiatan
2. Urusan Pangan : 3 Program 4 kegiatan 4 sub kegiatan
3. Urusan Keistimewaan : 2 Program 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan

Program di Urusan Pertanian yang dilaksanakan terdiri dari 6 program yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan (1) kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota dan (3) Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian dengan (1) kegiatan

Pengembangan Prasarana Pertanian dan (2) Pembangunan Prasarana Pertanian

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan 4 kegiatan yaitu (1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota; (2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota; (3) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota; (4) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota
5. Program Penyuluhan Pertanian dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
6. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 6 kegiatan yaitu : (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah; (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program di Urusan Pangan yang dilaksanakan terdiri dari 3 program yaitu:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri dari 2 kegiatan yaitu (1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; (2) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota.

Program di Urusan Keistimewaan yang dilaksanakan terdiri dari 2 Program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dengan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Kegiatan yaitu (1) Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya dan (2) Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yaitu tujuan dan sasaran daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan adalah meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui peningkatan produksi pertanian dan peternakan, serta peningkatan kelembagaan tani dan diversifikasi pangan. Sedangkan untuk mewujudkan misi ketiga, pemerintah daerah termasuk Dinas Pertanian dan Pangan di dalamnya, melaksanakan penyederhanaan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sehingga tercapai tujuan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Kerangka pendanaan dan target kinerja program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026 sebagaimana tabel IV.1.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KAB. KULON PROGO TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						28.250.410.400							31.124.782.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.538.815.000,00							1.736.390.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						2.538.815.000,00							1.736.390.000,00	
1,	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-	-			-	2.538.815.000,00						-	1.736.390.000,00	

	1.03.13.5.02	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**-**	**-**			**-**	**2.538.815.000,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**1.736.390.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	1.03.13.5.02.0004	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh**														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				**1 Dokumen**	**2.538.815.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**-**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**1.736.390.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.190.506.000,00							6.471.202.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						387.400.000,00							841.760.000,00	
1,	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-			-	329.858.900,00						-	680.110.000,00	

	2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**-**	**-**			**-**	**121.858.900,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**145.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	2.09.03.2.01.0003	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya**														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				**3 Laporan**	**121.858.900,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**145.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**-**	**-**			**-**	**208.000.000**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**535.110.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	2.09.03.2.04.0002	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**														

			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				**3 Laporan**	**208.000.000**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**535.110.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
2,	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-			-	21.541.100,00						-	101.000.000,00	
	2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**-**	**-**			**-**	**21.541.100,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**101.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	2.09.04.2.02.0003	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota**														

			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				**2 Laporan**	**21.541.100,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**101.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
3,	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-			-	35.000.000,00						-	60.650.000,00	
	2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**			**-**	**35.000.000,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**60.650.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	2.09.05.2.01.0009	**Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan**														

			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				**1 Dokumen**	**35.000.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**60.650.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						5.832.106.000,00							5.629.442.000,00	
1,	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	5.329.442.000,00						-	5.329.442.000,00	
	2.22.08.5.02	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	**-**	**-**			**-**	**1.642.664.000,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**	**-**	**-**	**1.642.664.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	2.22.08.5.02.0003	**Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia**														
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi				**1 Objek**	**1.642.664.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA KEISTIMEWAAN DIY**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**	**-**		**1.642.664.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

2,	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	502.664.000,00						-	300.000.000,00	
	2.22.08.5.06	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**-**	**-**			**-**	**502.664.000,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**300.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	2.22.08.5.06.0001	**Pengembangan Lumbung Mataraman**														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman				**1 Laporan**	**502.664.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA KEISTIMEWAAN DIY**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**300.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
3,	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	5.329.442.000,00						-	5.329.442.000,00	

	2.22.08.5.06	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**-**	**-**			**-**	**3.686.778.000,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**	**-**	**-**	**3.686.778.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	2.22.08.5.06.0007	**Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional**														
			Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional				**1 Dokumen**	**3.686.778.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA KEISTIMEWAAN DIY**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak**	**-**		**3.686.778.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						18.329.480.000,00							22.917.190.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						18.329.480.000,00							22.917.190.000,00	
1,	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	13.849.398.413,00						-	15.299.790.000,00	
	3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**			**-**	**70.000.000,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**101.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				**2 Dokumen**	**18.000.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**26.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**19 Laporan**	**52.000.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**75.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**			**-**	**12.158.478.613,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**12.853.790.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				**2338 Orang/bulan**	**12.067.478.613,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**12.750.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.02.0002	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				**1 Dokumen**	**79.000.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**80.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.02.0007	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				**14 Laporan**	**12.000.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**23.790.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

	3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**			**-**	**10.000.000,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**25.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.05.0005	**Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				**1 Dokumen**	**3.000.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**10.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.05.0009	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				**10 Orang**	**7.000.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**15.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

	3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**			**-**	**95.000.000,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**190.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				**1 Paket**	**35.000.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**90.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				**12 Laporan**	**60.000.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**100.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

	3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**			**-**	**34.000.000,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**200.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.07.0010	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				**2 Unit**	**34.000.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**200.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**			**-**	**830.000.000,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**1.030.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				**12 Laporan**	**200.000.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**280.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				**12 Laporan**	**630.000.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**750.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**			**-**	**651.919.800,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**900.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.09.0002	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				**135 Unit**	**300.000.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**400.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				**2 Unit**	**281.919.800,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**400.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.01.2.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				**20 Unit**	**70.000.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**100.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

2,	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	1.726.095.687,00						-	2.586.160.000,00	
	3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**-**	**-**			**-**	**178.274.700,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**300.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.02.2.01.0002	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				**2 Laporan**	**313.274.700**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**300.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

	3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**-**	**-**			**-**	**1.148.375.387,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**1.786.160.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.02.2.02.0002	**Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman**														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				**2 Dokumen**	**1.016.393.900**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**1.600.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.02.2.02.0003	**Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman**														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				**2 Dokumen**	**162.950.387,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**186.160.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

	3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**-**	**-**			**-**	**399.445.600,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**500.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.02.2.06.0003	**Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				**54 Ekor**	**640.055.000**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**500.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
3,	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	1.160.160.100,00						-	2.586.570.000,00	

	3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**-**	**-**			**-**	**415.248.800,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**650.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.03.2.01.0015	**Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota**														
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				**2 Dokumen**	**415.248.800,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**650.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**-**	**-**			**-**	**744.911.300,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**1.936.570.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.03.2.02.0003	**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**														

			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				8 Unit	1.300.000.000	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit														
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		266.570.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

	3.27.03.2.02.0009	**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya**														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				**0 Unit**	**0,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**200.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.03.2.02.0010	**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani**														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				**1 Unit**	**160.000.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**600.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.03.2.02.0015	**Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan**														

			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				**1 Unit**	**101.960.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Pengasih, Pengasih**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**120.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
4,	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	867.902.100,00						-	880.000.000,00	
	3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**			**-**	**367.496.740,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**380.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.04.2.01.0003	**Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular**														

			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				**1 Laporan**	**99.512.140,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**110.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.04.2.01.0008	**Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				**1 Laporan**	**267.984.600,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**270.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**			**-**	**323.530.160,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**320.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.04.2.02.0004	**Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)**														

			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				**4 laporan**	**153.881.500,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**150.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.04.2.02.0005	**Pengawasan Peredaran Produk Hewan**														
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				**1 Laporan**	**70.907.900,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**70.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.04.2.02.0006	**Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM**														
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				**1 Laporan**	**98.740.760,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**100.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

	3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**			**-**	**0,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**30.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.04.2.03.0002	**Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner**														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				**0 Laporan**	**0,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**30.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**-**	**-**			**-**	**176.875.200,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**150.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.04.2.04.0009	**Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan**														

			Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan				**4 Produk**	**176.875.200,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**150.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
5,	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	99.923.800,00						-	402.410.000,00	
	3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**-**	**-**			**-**	**99.923.800,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**402.410.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.05.2.01.0001	**Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**														

			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				**907,8 Ha**	**99.923.800,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**402.410.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
6,	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	625.999.900,00						-	1.162.260.000,00	
	3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**-**	**-**			**-**	**625.999.900,00**			**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**	**-**	**1.162.260.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.07.2.01.0001	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa**														

			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				**12 Unit**	**200.000.000,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**550.000.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	3.27.07.2.01.0002	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa**														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				**1628 Unit**	**425.999.900,00**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**-**	**2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**	**-**		**612.260.000,00**	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
	J U M L A H							28.250.410.400							31.124.782.000,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2026 ini disusun dalam rangka pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 - 2026. Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pertanian dan Pangan merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan dipergunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, oleh karena itu komitmen yang kuat semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar implementasi dari isi dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai dengan perencan6aan yang telah disepakati bersama.

Demikian, dokumen Rencana Kerja tahun 2026 ini disusun agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya urusan pertanian serta pembangunan perekonomian pada umumnya di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

Akhir kata, masukan dan saran sangat diharapkan demi sempurnanya dokumen ini dan besar harapan kami agar dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pengasih, 29 Juli 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KULON PROGO

drh. Drajat Purbadi, M.Si.
Pembina Tingkat I, IV b
NIP. 196905021997031005

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2026

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

KABUPATEN KULON PROGO
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Tahun 2026 dapat terwujud. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2025-2029

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Tahun 2026.

Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) dan menjadi pedoman bagi Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) untuk menyusun program dan kegiatan Tahun 2026.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan..... 4
1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 6
2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 22
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 47

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 48
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 48
3.3. Program dan Kegiatan..... 50

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 52

BAB V PENUTUP 74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta …….	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo……	22
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 …… …..	28
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo ……...	47
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2026 ……..	49
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Program Tahun 2026 ……	50
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026 …….	54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini akan digunakan sebagai bahan masukan dan arahan (*guidelines)* dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Urusan Pertanahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi yang diampu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kulon Progo.

Pengertian Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian Perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 - 2029 dan RPD 2023-2026.

Penjelasan mengenai proses penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) berdasarkan Nomenklatur kegiatan dalam rancangan awal rencana kerja (renja), selain mengacu kepada Matrik RPD 2023-2026 juga harus mengacu kepada Permendagri 59 Tahun 2007 maupun Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Sehingga diharapkan dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo ini, didapatkan panduan dan arahan yang jelas bagi penjaringan usulan kegiatan untuk Tahun 2026 pada urusan Penataan Ruang dan urusan Pertanahan.

Gambaran keterkaitan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo dengan RKPD dan Renstra Tahun

2025-2029 adalah sebagai bahan masukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 maupun Pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan bahan dasar Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan perencanaan dan penganggaran OPD adalah sebagai berikut:

1). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3). Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2023-2045

4). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

10). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

11). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12). Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045

13). Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

14). Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Daerah

15). Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045

16). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032;

17). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023 – 2026;
18). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
19). Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebagai pedoman dan arahan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan diusulkan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 dalam urusan penataan ruang dan urusan pertanahan serta lintas urusan dan lintas pemerintah daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Tersedianya pedoman penyusunan strategi pencapaian target kinerja urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Tersedianya arahan program dan kegiatan beserta beban target sasaran kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
3. Tersedianya pedoman dan bahan sinergitas program dan kegiatan dalam proses pemaduserasian usulan dalam pelaksanaan forum OPD urusan Pertanahan dan Penataan Ruang, serta urusan lain yang terkait;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika bahasan dari Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo 2026, terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan Hukum, maksud dan tujuan, dan Sistematika Penulisan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;

Bab V : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2024 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

- Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - 1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - 1.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - 1.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - 1.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - 1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - 1.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   - 1.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - 1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - 1.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
    1.1 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
    1.2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
    1.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
    1.1 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
    1.2 Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
    1.1 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
    1.2 Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan
    1.3 Penilaian Perwujudan RTR

c. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

1. Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis kasultanan dan kadipaten
    1.1 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang
    1.2 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

1. Penyelesaian Sengketa tanah Garapan dalam Daerah kabupaten/Kota
    1.1 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

e. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

1. Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

f. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

1. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah

g. Program Penatagunaan Tanah

1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota

1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

h. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan

1. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

1.1 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

1.2 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

2. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

1.1 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten

1.2 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2025, mengacu pada APBD Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Reviuw hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai rencana, namun dapat diselesaikan pada saat APBD Perubahan.

Dari 8 (delapan) program dengan 16 kegiatan, 32 Sub Kegiatan secara umum capaian kegiatan secara fisik tercapai 100%.

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2024 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Capaian indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang pada tahun 2024 sebesar 71,43% dari target 68,98 % (atau 103,55%) sampai dengan Tw.IV 2024

Capaian Indikator Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang pada tahun 2024 sebesar 84,85 % dari target 84,85% (atau 100 %) sampai dengan Tw.IV 2024

Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan pada tahun 2024 sebesar 71,35 % dari target 69,70 % (atau 102,37%) sampai dengan Tw.IV 2024

Pada Tahun 2024 hasil analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo, diuraikan sebagai berikut :

a. Persentasi kesesuaian pemanfaatan ruang Pada Tahun 2024 sebesar 88,61% Dengan target 88,60%, maka prosentase capaian sebesar 100,01%.

   Analisis pencapaian pada Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2026, dengan pencapaian 88,70 %, merupakan angka yang realistis dan optimis akan tercapai.

   Permasalahan :

   1) Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya.
   2) Meningkatnya perubahan peruntukan pemanfaatan lahan terkait pembangunan infrastruktur terkait pembangunan Rencana Jalan TOL, Rencana Jalan JOR, Jalan trase Bandara-Borobudur, Rencana Wates Baru, Pembangkit Listrik, Pelabuhan Tanjung Adikarta, pasir besi dan Bandara Kulon Progo, Embarkasi Haji.

   Solusi

   1) Meningkatkan koordinasi penataan ruang dan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), pelayanan perijinan IMB dan penegakan hukum pemanfaatan ruang.
   2) Meningkatkan monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengendalian dalam pelaksanaan rencana struktur dan pola ruang.

b. Prosentase Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN

   Untuk Tahun 2024 Jumlah bidang tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Desa yang

didaftarkan di BPN 354 bidang. Dengan target 2024 Jumlah bidang tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Desa yang belum bersertifikat 733 bidang. pada akhir Renstra optimis dapat tercapai dengan adanya program PTSL (Pensertifikatan Tanah Sistematik Lengkap) dari pemerintah pusat.

1. Permasalahan
    a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepastian hukum hak atas tanah.
    b) Tidak lengkapnya dokumen – dokumen tentang tanah sehingga menghambat proses sertifikasi tanah

2. Solusi
    a) Sosialisasi kepada masyarakat
    b) Pendampingan kegiatan pemberkasan sertifikasi tanah
    c. Rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah

Untuk Tahun 2024 rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah pencapaian realisasi apabila dibandingkan dengan akhir Renstra tercapai 100 %, dan diperkirakan target akhir Rentra bisa tercapai pada tahun 2026.

1. Permasalahan
    a) Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia.

2. Solusi
    a) Peningkatan kuantitas SDM dari ASN dan Non ASN.

Berdasarkan penilaian kinerja dari realisasi fisik dan keuangan terhadap kinerja subkegiatan yang sudah dijadwalkan dalam rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang masih rendah dikarenakan pelaksanaan kegiatan belum bisa dilaksanakan karena adanya proses efisiensi berdasarkan Surat Edaran BKAD nomor 900/0084 tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Rangka Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOMES*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	**5**	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**									
2 1 03 12	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**									
		Persentase perencanaan penataan ruang	**90,74**	**57,01**	**68,98**	**14,29**	**0,21**	**80,56**	**151,86**	**1,67**
		Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang	**97,18**	**78,39**	**84,65**	**56,02**	**0,66**	**90,91**	**225,32**	**2,32**
1 03 12 2.01	*Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*	*Persentase pelaksanaan sosialisasi kebijakan penataan ruang*							**0,00**	
1 03 12 2.01 0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		1	1	1	**1,00**			
		Persentase ketersediaan dokumen RTBL	100	0				0	**0,00**	**0,00**
		Peraturan Bupati RTBL Cangkring-Nagung (1 dokumen)	0	0				0	**0,00**	
1 03 12 2.01 5	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Persetujuan Substansi RTRW Kab/Kota		2	3	3	**1,00**			
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang	72	0				0	**0,00**	**0,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOMES*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	**5**	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang Disusun	0	0				0	**0,00**	
		Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan	4	0				0	**0,00**	**0,00**
1 03 12 2.01 0013	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi		1	144	144	**1,00**	0	**145,00**	
		Perentase ketersediaan dokumen RTBL	100	0				0	**0,00**	**0,00**
		Video Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang (1 paket)	0	0				0	**0,00**	
1 03 12 2.03	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang*				0				
1 03 12 2.03 0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		2	333	1286	**3,86**		**1288,00**	
1 03 12 2.03 0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	97,18	3	3	3	**1,00**			
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan	1352	327						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang*				0		0	**0,00**	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOMES*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	**5**	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	03	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		1	5	5	**1,00**		**6,00**	
						Persentase penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang	100	0						
1	03	12	2.04	0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan		0	370	306	**0,83**	0	**306,00**	
1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR		0	1	1	**1,00**			
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1490	457						
					Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	4	1				0	**1,00**	**0,25**
3	1	03	13		**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**	**Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati**	**100**	**25**	**50**	**50,00**	**1,00**	0	**75,00**	**0,75**
1	03	13	5.01		*Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati*						**75,00**	**75,00**	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOMES*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	**5**	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	03	13	5.01	0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang		1	2	2	**1,00**		**3,00**	
						Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	100	0						
						Penyusunan RDTR Kulon Progo Wilayah Utara	0	0				0	**0,00**	
1	03	13	5.01	0007	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	100	1				0	**1,00**	**0,01**
						Peraturan Bupati RTBL Hargorejo	0	0				0	**0,00**	
					Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	27	0				0	**0,00**	**0,00**
1	1	03	01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,00**	0	**200,00**	**2,00**
	1	03	01	2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*						**100,00**	**100,00**	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	2	**1,00**	**4,00**	**0,40**
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	21	21	21	**1,00**		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOMES*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	**5**	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 03 01 2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*								
1 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	116	12	13	13	**1,00**		**25,00**	**0,22**
1 03 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	12	12	12	**1,00**	14	**38,00**	**0,79**
1 03 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semeteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	14	14	14	**1,00**			
1 03 01 2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Dokumen administrasi umum*								
1 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		4	1	1	**1,00**		**5,00**	**#DIV/0!**
1 03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	1	1	1	**1,00**			
1 03 01 2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	_								
1 03 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	48	0	1	0	**0,00**		**0,00**	**0,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOMES*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	**5**	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 03 01 2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*						0	**0,00**	
1 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	48	12	12	12	**1,00**		**24,00**	**0,50**
1 03 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	12	1	1	**1,00**			
1 03 01 2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah laporan pemeliharaan pemeliharaan barang milik daerah*								
1 03 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipeliharadan dibayarkan pajak dan perizinan		12	15	15	**1,00**		**27,00**	
1 03 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	1	2	2	**1,00**			
1 03 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	112	11	14	14	**1,00**			
1 03 01 2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah penambahan asset*								
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	2					**2,00**	**0,50**

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOMES*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	**5**	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48	4				0	**4,00**	**0,08**
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*								
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	24	6					**6,00**	**0,25**
4	2	10	04			**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Presentase penyelesaian permasalahan pertanahan**	**100**	**100**	**100**	**20**	**0,20**	0	**120,00**	**1,20**
	2	10	04	2.01		*Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*							**100,00**	**100,00**	
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	10	10	**1,00**		**10,00**	
							Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	100	0				0	**0,00**	**0,00**
5	2	10	05			**Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**	**Presentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0,00**	0	**100,00**	**1,00**
	2	10	05	2.01		*Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan*								

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOMES*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	**5**	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaisan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	398	396	**0,99**	**100,00**	**596,00**	**5,96**
6	2	10	06			**Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee**	**Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0,00**		**100,00**	**1,00**
	2	10	06	2.01		*Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda						1		
	2	10	06	2.01	0008	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		0	3	3	**1,00**	**100,00**	**103,00**	
							ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda	100	0					**0,00**	**0,00**
7	2	10	10			**Program Penatagunaan Tanah**	**Presentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN**	**16,97**	**35,54**	**35,74**	**50,17**	**1,40**	0	**85,71**	**5,05**
	2	10	10	2.01		*Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN*						0	**0,00**	

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOMES*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	**5**	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4	0	100	27	**0,27**			
	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		0	837	837	**1,00**	**16,36**	**853,36**	
							Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN	16,97	0					**0,00**	**0,00**
8	2	10	11			**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan**	**Persentase bidang tanah kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah desa yang terdaftarkan di BPN dan terekomendasi pemanfaatannya**	**74,43**	**66,48**	**69,7**	**71,35**	**1,02**			
	2	10	11	5.01		*Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*Persentase bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN*								
	2	10	11	5.01	0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat		1	8	8	**1,00**	0	**9,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOMES*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	**5**	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	48,86	0				**72,06**	**72,06**	**1,47**
		Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten di BPN		0					**0,00**	
		Terlaksananya pembuatan dan pemasangan patok batas bidang Tanah Desa		0						
		Pendaftaran sertifikat tanah desa di BPN		0				0	**0,00**	
		Pendaftaran ukur tanah desa		0				0	**0,00**	
		Identifikasi dan verifikasi tanah kasultanan/ kadipaten/ tanah desa		0				0	**0,00**	
		Pendafataran Pencatatan perubahan sertifikat tanah desa di BPN		0				0	**0,00**	
2 10 11 5.01 0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	4	1	30	30	**1,00**	0	**31,00**	**7,75**
2 10 - 5.02	*Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	*Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa*						0	**0,00**	
2 10 - 5.02 0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten		0	20	20	**1,00**	0	**20,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOMES*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)TAHUN TERAKHIR 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAMDAN KELIARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	**5**	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	100	0						
2 10 - 5.02 0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	12	3	3	3	**1,00**		**6,00**	**0,50**
2 10 11 5.03	*Sarana dan Prasarana Keistimewaan*	*Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)*								
2 10 11 5.03 0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Pertanahan)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)	12	0				0	**0,00**	**0,00**

2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Sampai DenganTriwulan I Tahun 2025

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	-		88,60	88,65	88,70		88,61	0	88,7		IKU OPD
2	Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah Desa yang sudah didaftarkan di BPN	-		42,58	45,26	47,93		58,47	22,2	47,93		IKU OPD
3	Persentase perencanaan penataan ruang	-		68,98	80,56	90,74		71,43	78,44	90,74		IKU Program

4	Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang	-		84,65	90,91	97,18		84,65	110,97	97,18		IKU Program
5	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	-		100	100	100		100	0	100		IKU Program
6	Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan	-		100	100	100		100	0	100		IKU Program
7	Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda	-		100	100	100		100	0	100		IKU Program
8	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN	-		35,74	16,36	16,97		74,23	16,36	16,97		IKU Program
9	Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi			100	100	100		100	50	100		IKU Program

10	IKK Outcome No. 2.i.1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		√	-	-	-		100	-	100		
11	IKK Outcome No. 2.i.2 Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum		√	-	-	-		100	-	100		
12	IKK Outcome No. 2.i.3 Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		√	-	-	-		100	-	100		

13	IKK Outcome No. 2.i.4 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		√	-	-	-		-	-	-		
14	IKK Outcome No. 2.i.5 Tersedianya tanah untuk masyarakat		√	-	-	-		1.037 m2	-	1.037 m2		
14	IKK Outcome No. 2.i.6 Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		√	-	-	-		100	-	100		

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sesuai dengan fungsi Dinas yaitu penyelenggaraan dalam pertanahan dan penataan ruang terdapat beberapa isu- isu strategis berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu tersebut meliputi kondisi Kabupaten Kulon Progo pada umumnya yang merupakan salah satu Kabupaten dalam Pemerintah Daerah DIY yang sedang berkembang. Adapun Isu-isu tersebut antara lain:

1). Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

2). Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria/NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum ada pengaturan mengenai cara untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, belum ada pengaturan penentuan kriteria permasalahan khusus, dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/difungsikan sebagai penyelidikan/ pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Disamping itu pedoman-pedoman perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi masih dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan tersebut, diupayakan kaidah - kaidah atau norma tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memuaskan bagi para pihak, oleh karena itu kaidah/norma tata ruang akan dirumuskan.

3). Masih belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk dapat mewujudkan organisasi kementerian yang adaftif dan akuntabel dan penjamin tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, diperlukan kondisi organisasi yang dapat mendukung percepatan menjadikan tanah dan ruang untuk sebesar - besarnya bagi kemakmuran rakyat.

4). Tantangan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan, tertib pemanfaatan ruang, maka dilakukan pengawasan dan pengendalian IMB terhadap bangunan gedung , penataan bangunan dan lingkungan di wilayah perkotaan, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dalam penyusunan rencana tata ruang sudah mengakomodir adanya SK Bupati KP tentang KP2B.

5). Peluang ditetapkannya Undang-undang keistimewaan dan Perdais tentang Pertanahan dan Tata Ruang sehingga dalam pelaksanaan Sertifikasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa mempunyai payung hukum dalam arah Kebijakan, penegakan hukum, pengawasan serta status kepemilikan dan yang terkait Tata Ruang mulai dari Perencanaan SRS hingga Pemanfaatan ruang, Pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan kelembagaan penataan ruang di Kabupaten Kulon Progo.

2.4. Review terhadap RKPD

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2026 Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)				10.845.996.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)				10.845.996.246,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.418.731.300,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.423.746.346,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				5.418.731.300,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				5.423.746.346,00	

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	3.516.796.750,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	3.473.769.796,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	17.662.600,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	17.662.600,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	11.293.900,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	11.293.900,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	6.368.700,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	6.368.700,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	2.627.004.100,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	2.627.004.100,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	2.511.000.000,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	2.511.000.000,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	80.927.400,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	80.927.400,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					

		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	35.076.700,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	35.076.700,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	78.402.900,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	75.113.200,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.402.900,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.113.200,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					

		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	40.000.000,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	40.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	190.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	146.973.300,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	190.000.000,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	146.973.300,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	231.200.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	225.489.696,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					

		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86.200.000,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	145.000.000,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	139.289.696,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	372.527.150,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	381.526.900,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					

		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	163.727.150,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	169.434.400,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	173.800.000,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	173.800.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	35.000.000,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	38.292.500,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		-	-	1.248.332.550,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		-	-	1.296.374.550,00	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		-	-	551.610.550,00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		-	-	551.610.550,00	
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang					Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	290.000.000,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	290.000.000,00	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota					Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota					

		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	190.000.000,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	190.000.000,00	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang					Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	71.610.550,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	71.610.550,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		-	-	525.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		-	-	573.042.000,00	
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					

		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	345 Layanan	290.000.000,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	345 Layanan	290.000.000,00	
	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang					Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	235.000.000,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	283.042.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		-	-	171.722.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		-	-	171.722.000,00	
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang					Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang					

		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	5 Kasus	17.520.800,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	5 Kasus	17.520.800,00	
	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis Kawasan					Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	375 Dokumen	55.000.000,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	375 Dokumen	55.000.000,00	
	Penilaian Perwujudan RTR					Penilaian Perwujudan RTR					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	99.201.200,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	99.201.200,00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		-	-	653.602.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		-	-	653.602.000,00	

	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		-	-	653.602.000,00	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		-	-	653.602.000,00	
	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang					Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	2 Dokumen	317.782.000,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	2 Dokumen	317.782.000,00	
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten					Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	1 Dokumen	335.820.000,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	1 Dokumen	335.820.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.427.265.200,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.422.249.900,00	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				5.427.265.200,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				5.422.249.900,00	
4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		-	-	30.068.700,00	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		-	-	30.068.700,00	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	30.068.700,00	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	30.068.700,00	
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Berita Acara	30.068.700,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Berita Acara	30.068.700,00	
5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		-	-	1.593.040.300,00	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		-	-	1.593.040.300,00	

	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	1.593.040.300,00	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	1.593.040.300,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	398 Dokumen	1.593.040.300,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	398 Dokumen	1.593.040.300,00	

6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		-	-	52.500.000,00	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		-	-	
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	52.500.000,00	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	
	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah					Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah				
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	52.500.000,00					
7	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		-	-	450.591.700,00	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		-	-	498.076.400,00
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	450.591.700,00	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	498.076.400,00

	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	127.431.200,00			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1 Laporan	127.431.200,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota				
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	730 Dokumen	323.160.500,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	730 Dokumen	370.645.200,00

8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		-	-	3.301.064.500,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		-	-	3.301.064.500,00
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1.611.064.500,00	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1.611.064.500,00
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten					Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	4 Dokumen	1.313.665.000,00			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	4 Dokumen	1.313.665.000,00

9	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		-	-	297.399.500,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		-	-	297.399.500,00
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-	-	-	297.399.500,00	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-	-	-	297.399.500,00
	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa					Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	88 Dokumen	297.399.500,00		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	88 Dokumen	297.399.500,00
	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		-	-	1.690.000.000,00	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		-	-	1.690.000.000,00
	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten					Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				

			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	30 Dokumen	130.000.000,00			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	30 Dokumen	130.000.000,00
	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa					Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	80 Berita Acara	1.560.000.000,00			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	80 Berita Acara	1.560.000.000,00
					10.845.996.500,00					**10.845.996.246,00**

Review terhadap Ranwal RKPD 2026

- Rancangan Awal RKPD 2026 diperbandingkan dengan hasil analisis kebutuhan untuk anggaran awal RKPD 2026 sebesar Rp **10.845.996.500,00** menjadi Rp 10.845.996.246,00
- Ada beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut

  a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  e. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

  Berkurang jumlah anggarannya untuk menambah anggaran Sub Kegiatan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang berupa Belanja Pembuatan Aplikasi Geoportal.
- Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah pada Tahun 2026 dihilangkan, karena kegiatannya dilaksanakan di Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.

.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi,LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang diusulkan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tidak ada.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional meliputi tujuan dibidang agraria dan tata ruang umum skala nasional serta sasaran strategis nasional

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
2. Sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2015-2019, dirumuskan sebagai berikut :
   1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;
   2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
   3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada RPJMD 2025-2029 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJP Kabupaten Kulon Progo 2025- 2045. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Dokumen RPJMD 2025-2029 berada pada periode tahapan keempat dari RPJPD DIY 2025- 2045, sehingga prioritas pembangunan jangka panjang tahap keempat (2020-2025) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 ini.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mendukung Visi Kepala Daerah yaitu terwujudnya Kulon Progo yang makmur,mandiri,religius,berbudaya yang berkelanjutan dan misi keempat Kepala Daerah Kulon Progo yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, lingkungan yang lestari dan tangguh bencana serta misi ketiga Kepala Daerah yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang *good governance*, aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) mendukung tujuan pembangunan daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2023-2026 yang ke-3 yaitu: Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan. Mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan dengan meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), tujuan dan sasaran rancangan rencana kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2026

No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator** **Tujuan/Sasaran**	**Satuan**	**Target 2026**
1	Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang		Persentase Kesesuaian Pola Ruang	%	89,95
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,23
2		Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	%	50,00
			Persentase tertib administrasi pertanahan	%	72,27

3		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
4		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2026 diusulkan dalam urusan penataan ruang dan urusan pertanahan serta lintas urusan dan lintas pemerintah daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Program Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase perencanaan penataan ruang	%	71,43
2		Persentase pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	%	100
3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100
4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase tertib administrasi pemanfaatan Tanah Kalurahan	%	100
5	Program Penatagunaan Tanah	Persentase tertib administrasi tanah Pemda	%	74,10
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	%	30,00
		Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	%	NA
7	Program Penyelenggaraan Keisimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase Kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	%	72,27

		Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan	%	33,33
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan:

a. Pencapaian Visi dan Misi kepala daerah Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) telah sesuai dengan metadata IKU OPD dan IKU Program yang tersusun dalam RKPD 2026 dan RPD 2023-2026.
b. Pencapaian SDGs pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) pada program pengelolaan pertanahan telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
c. Pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) tidak secara langsung terdampak kepada masyarakat, namun secara umum merupakan pintu awal dari masuknya investor dan pelaku usaha dalam perumusan RTRW, RDTR, RTBL dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terdampak pembangunan dalam hal pembayaran pajak PBB dengan memfasilitasi pengurangan luas sertifikat yang terdampak pembangunan.
d. Pencapaian NSPK dan SPM pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan target pada IKU OPD dan IKU Program
e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo telah disusun dalam dokumen Perencanaan seperti RTRW, RDTR, RTBL dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa.
f. Pengembangan Daerah Terisolir pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo telah disusunnya perencanaan pengembangan dalam RTBL yang didanai APBD maupun DAIS terkait wilayah SRS Kasultanan, Kadipaten, Kawasan Geo Park.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Secara umum Sasaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dijabarkan di dalam Rencana Kerja Tahun 2026 ini. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2026 dengan 6 Program dari APBD dan 2 Program dari DAIS (Dana Keistimewaan Yogyakarta).
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dampak/efeknya tersebar di 12 Kapanewon terkait urusan pertanahan dan perencanaan Tata Ruang.

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut pendanaannya. Total Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2026 adalah Rp 10.845.996.246,00 (Sepuluh milyar delapan ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah)
- Adapun kebutuhan dana/pagu seperti pada tabel di bawah:

Adapun rencana kebutuhan anggaran sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KAB. KULON PROGO TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)						10.845.996.246,00							11.288.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.423.746.346,00							5.638.000.000,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						5.423.746.346,00							5.638.000.000,00	
1	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	3.473.769.796,00						-	3.623.000.000,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	17.662.600,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	19.000.000,00	

																merata dan berkelanjutan				
	1	0 3	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	11.293.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		12.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	0 3	0 1	2.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	6.368.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		7.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	0 3	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	2.627.004.100,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi Perangkat	-	2.668.000.000,00	

																tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Daerah			
	1	0 3	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/ bulan	2.511.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		2.550.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	0 3	0 1	2.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	80.927.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		82.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	0 3	0 1	2.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/														

						Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	35.076.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		36.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	75.113.200,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	89.000.000,00	
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.113.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		39.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

																merata dan berkelanjutan				
	1	0 3	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	0 3	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Dokumen	146.973.300,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	195.000.000,00	
	1	0 3	0 1	2.0 7	001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				49 Unit	146.973.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		195.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			2 Dokumen	225.489.696,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	253.000.000,00	
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	86.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		88.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum													

						Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	139.289.696,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjut An	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		165.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Dokumen	381.526.900,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjut An	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	399.000.000,00	
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	169.434.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktu	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		184.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

																r yang merata dan berkelanjutan				
	1	0 3	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	173.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		175.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	0 3	0 1	2.0 9	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	38.292.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		40.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

2	1	0 3	1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase perencanaan penataan ruang	-			11,53 %	1.296.374.550,00						-	1.335.000.000,00	
	1	0 3	1 2	2.0 1		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Laporan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-			3 Dokumen	551.610.550,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo	-	600.000.000,00	
	1	0 3	1 2	2.0 1	000 3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang													
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	290.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo		310.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	0 3	1 2	2.0 1	000 5	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota													

							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	190.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo		210.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang													
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	71.610.550,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo		80.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	-			2 Dokumen	573.042.000,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo	-	560.000.000,00	

	1	0 3	1 2	2.0 3	000 4	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang													
							Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				100 Layanan	290.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo		310.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	0 3	1 2	2.0 3	000 7	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang													
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	283.042.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo		250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	0 3	1 2	2.0 4		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-			3 Dokumen	171.722.000,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo	-	175.000.000,00	

																merata dan berkelanjutan				
	1	0 3	1 2	2.0 4	000 3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang													
							Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				5 Kasus	17.520.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo		18.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	0 3	1 2	2.0 4	001 0	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis Kawasan													
							Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				300 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo		57.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

	1	0 3	1 2	2.0 4	001 2	Penilaian Perwujudan RTR													
							Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	99.201.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
3	1	0 3	1 3			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Tata Ruang berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	653.602.000,00						-	680.000.000,00	
	1	0 3	1 3	5.0 1		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Laporan Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Satuan Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-			2 Dokumen	653.602.000,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	-	680.000.000,00	
	1	0 3	1 3	5.0 1	000 5	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang													

							Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang				2 Dokumen	317.782.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		330.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	03	13	5.01	0007	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten														
							Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten				1 Dokumen	335.820.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.422.249.900,00							5.650.000.000,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						5.422.249.900,00							5.650.000.000,00	

4	2	1 0	0 4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase bidang tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah desa yang terdaftar di BPN dan terekomendasi pemanfaatannya	-			100 %	30.068.700,00						-	35.000.000,00	
	2	1 0	0 4	2.0 1		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 80 Berita Acara	-			10 Berita Acara	30.068.700,00			-	-	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan	-	35.000.000,00	
	2	1 0	0 4	2.0 1	000 4	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Berita Acara	30.068.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		35.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
5	2	1 0	0 5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan	-			100 %	1.593.040.300,00						-	1.650.000.000,00	

	2	1 0	0 5	2.0 1		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			398 Dokumen	1.593.040.300,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	-	-	1.650.000.000,00	
	2	1 0	0 5	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				398 Dokumen	1.593.040.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	-		1.650.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
6	2	1 0	1 0			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN	-			16,36 %	498.076.400,00						-	530.000.000,00	

	2	1 0	1 0	2.0 1		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	498.076.400,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan	-	530.000.000,00	
	2	1 0	1 0	2.0 1	000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah													
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	127.431.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		130.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2	1 0	1 0	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				710 Dokumen	370.645.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

																merata dan berkelanjutan				
7	2	1 0	1 1			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Pertanahan berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	1.611.064.500,00						-	1.710.000.000,00	
	2	1 0	1 1	5.0 1		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	-			30 Dokumen	1.611.064.500,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	-	-	1.710.000.000,00	
	2	1 0	1 1	5.0 1	000 1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				4 Dokumen	1.313.665.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjut	-		1.400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

																An			
	2	1 0	1 1	5.0 1	000 4	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa													
							Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				30 Dokumen	297.399.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	-		310.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
8	2	1 0	-			-	-	-			-	1.690.000.000,00						-	1.725.000.000,00	
	2	1 0	-	5.0 2		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-	-			-	1.690.000.000,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	-	-	1.725.000.000,00	
	2	1 0	-	5.0 2	000 1	Penyiapan Bahan Pertimbangan													

						Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten													
							Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				30 Dokumen	130.000.000,00	-	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	-		145.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2	10	-	5.02	0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa													
							Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				80 Berita Acara	1.560.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutAn	-		1.580.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHANITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	JUMLAH											**10.845.96.246,00**							**11.288.000.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berisi tentang gambaran umum perangkat daerah, program-program prioritas, rencana kerja dan pendanaannya. Dokumen ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dinas dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2026 berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang merupakan acuan bagi penyempurnaan Renja Tahun 2026. Untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas agar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan komprehensif.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2026, semoga dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan yang baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 29 Juli 2025
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Kabupaten Kulon Progo



Drs. RIYADI SUNARTO
Pembina Utama Muda ; IV/c
NIP. 196710181993031004

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KULON PROGO
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dapat diselesaikan sesuai amanat perundangan yang berlaku.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami dan mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 ini belumlah sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa datang. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pengasih, 29 Juli 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo

Ir. GUSDI HARTONO, M.T.
NIP.19650806 199303 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Daftar Isi		ii
Daftar tabel		iii
BAB I. PENDAHULUAN		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....		9
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah…….….	9
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .	23
2.4	Review terhadap RKPD.....	26
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH…….....		27
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …….	27
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	29
3.3	Program dan Kegiatan.....	
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ……..		24
BAB V. PENUTUP		36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo.....	10
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo	21
Tabel 3	…….....	28
Tabel 4	Review terahap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	
	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo.....	32
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.....	28
Tabel 6	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.....	29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 dan diubah kembali dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Tata Lingkungan,
d. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan,
e. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup
f. Jabatan Fungsional,
g. UPTD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;

b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;

d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disingkat menjadi Renja DLH Tahun 2026 ini mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 dan hasil forum perangkat daerah serta Musrenbang RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 7 tahun 2024) bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja SKPD. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun ini juga mendasar pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja perangkat daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta memenuhi fungsi akuntabilitas

berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing perangkat daerah.

Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
e. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah ketentuan pasal 82 ayat (2) dan pasal 83, bahwa Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja perangkat daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing perangkat daerah.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang mengacu pada Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029. Penyusunan Renja ini memperhatikan keterpaduan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2026 serta mengakomodasi arah kebijakan dan sasaran strategis dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025–2029. Dengan demikian, Renja DLH 2026 berfungsi sebagai instrumen operasionalisasi kebijakan strategis jangka menengah ke dalam program dan kegiatan yang konkret, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Kerja DLH tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

c. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 ;

f. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI nomor 23 tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan;

m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan daerah;

n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

o. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2009;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 7 tahun 2024);

t. Peraturan Bupati 41 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas

u. Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja DLH Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 adalah :

1. Menjadi acuan / dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
2. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
3. Memuat pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang tercantum dalam Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas mengenai pengertian renja perangkat daerah, penjelasan mengenai proses penyusunan renja perangkat daerah dan menggambarkan keterkaitan renja perangkat daerah dengan RKPD dan perubahan renstra

1.2. Landasan Hukum

Mencantumkan undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan ketentuan peraturan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan tentang permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan SDGs. serta formulasi isu-isu penting.

2.4. Review Terhadap RKPD

Berisikan review terhadap RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Penjelasan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, dan total kebutuhan dana/pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini disampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 2024 melaksanakan 10 program, 19 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan dana bersumber dari APBD, DAK dan Dana Keistimewaan Yogyakarta. Program, kegiatan dan subkegiatan tersebut realisasinya ada yang sudah sesuai dengan target yang direncanakan namun ada pula yang belum memenuhi target.

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 sebesar Rp. 10.055.332.179,00 dan dapat terserap (realisasi) sebesar Rp 9.923.597.653,00 (98,69 %). Anggaran tidak dapat terserap maksimal karena belanja menyesuaikan dengan harga *riil* di toko/penyedia barang dan/atau jasa dan adanya sisa anggaran pengadaan barang dan/atau jasa.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**									
2.11.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**100,00**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**300,00**	**300,00**
2.11.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*								**-**	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 Laporan)	48	12,00	12	12,00	**100,00**	12,00	**24,00 S**	**50,00**
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (1 Laporan)	48	1,00	1	1,00	**100,00**	12,00	**13,00**	**27,08**
2.11.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*							**-**	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	96	12,00	12	12,00	**100,00**	27,00	**39,00**	**40,63**

2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan adinistrasi pelaksanaan tugas ASN	4	12,00	12	12,00	**100,00**	1,00	**13,00**	**325,00**
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	19,00	19	19,00	**100,00**	14,00	**33,00**	**58,93**
2.11.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Dokumen administrasi umum*								
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (4 paket)	4	4,00	4	4,00	**100,00**	1,00	**5,00**	**125,00**
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (12 laporan)	48	12,00	12	12,00	**100,00**	12,00	**24,00**	**50,00**
2.11.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*								
2.11.01.2.02.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	2,00	2	2,00	**100,00**	2,00	**4,00**	**40,00**
2.11.01.2.02.0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, laporan tahunan, profil kinerja OPD dan Penerapan SPIP	84	21,00	21	21,00	**100,00**	21,00	**42,00**	**50,00**
2.11.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah penambahan aset*								
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (7 unit)	12	7,00	7	7,00	**100,00**	-	**7,00**	**58,33**
2.11.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah laporan pemeliharaan pemeliharaan barang milik daerah*								
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (12 Unit)	52	12,00	12	12,00	**100,00**	13,00	**25,00**	**48,08**

2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit	4	2,00	2	2,00	**100,00**	1,00	**3,00**	**75,00**
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (50 unit)	275	50,00	50	50,00	**100,00**	67,00	**117,00**	**42,55**
2.11.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Dokumen administrasi kepegawaian*								
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik	6	-	-	-	**#DIV/0!**	30,00	**30,00**	**500,00**
2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	90	-		-	**#DIV/0!**	-	**-**	**0,00**
2.11.08	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Presentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup**	**99,30**	**93,96**	**93,75**	**93,96**	**100,22**	**95,67**	**189,63**	**190,97**
2.11.08.2.01	*Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*								
2.11.08.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10	10,00	10	10,00	**100,00**	10,00	**20,00**	**200,00**
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	1.500	375,00	375	375,00	**100,00**	100,00	**475,00**	**31,67**
2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Presentase peningkatan kajian lingkungan hidup**	**100,00**	**50,00**	**42,86**	**50,00**	**116,66**	**64,29**	**114,29**	**114,29**
2.11.02.2.01	*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*	*Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kab./Kota yang disusun*								
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kab./Kota yang disusun	10	4,00	4	4,00	**100,00**	2,00	**6,00**	**60,00**

2.11.03	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Presentase penigkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**
		presentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan	**66,67**	**35,29**	**56,02**	**35,29**	**63,00**	**59,57**	**94,86**	**142,28**
		Prosentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan	**44,68**	**27,66**	**38,30**	**27,66**	**72,22**	**40,43**	**68,09**	**152,39**
		presentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK	**100,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**100,00**	**80,00**	**140,00**	**140,00**
2.11.03.2.01	*Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	*Jumlah kumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut*								
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	421	8,00	8	8,00	**100,00**	2,00	**10,00**	**2,38**
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	18		-			-	**-**	**0,00**
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian paremeter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	56,00	2,00	2	2,00	**100,00**	18,00	**20,00**	**35,71**
2.11.03.2.02	*Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	*Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan*							**-**	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran da/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	6,00	-		-		4,00	**4,00**	**66,67**
2.11.03.2.03	*Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	*Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan*							**-**	

2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	1,00					1,00	**1,00**	**100,00**
2.11.06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan**	**52,13**	**52,54**	**48,93**	**52,54**	**107,38**	**50,11**	**102,65**	**196,91**
2.11.06.2.01	*Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah laporan dan usaha/kegiatan yang diawasi, izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota*							**-**	
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan	30	60,00	60	60,00	**100,00**	71,00	**131,00**	**436,67**
2.11.10	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**
2.11.10.2.01	*Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*	*Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani*							**-**	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	24	15,00	15	15,00	**100,00**	18,00	**33,00**	**137,50**
2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan**	**presentase peningkatan Pengelolaan Persampahan**	**31,05**	**31,04**	**27,00**	**31,04**	**114,96**	**28,00**	**59,04**	**190,14**
2.11.11.2.01	*Pengelolaan sampah*	*Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali*							**-**	
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	5,00	2,00	2	2,00	**100,00**	1,00	**3,00**	**60,00**

2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulah, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota 9 ton	76,00	9,00	9	9,00	**100,00**	20,00	**29,00**	**38,16**
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	-	15,00	15	15,00	**100,00**	**-**	**15,00**	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyaraat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	96,00					-	**-**	**0,00**
2.11.04	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup**	**1,40**	**2,80**	**1,40**	**2,80**	**200,00**	**1,40**	**4,20**	**300,00**
2.11.04.2.01	*Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*	*Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola*							**-**	
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	700	1.475,00	1.475	1.475,00	**100,00**	700,00	**2.175,00**	**310,71**
2.22.08	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Cakupan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**
2.22.08.5.07	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*Grebeg sampah*							**-**	
2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai nilai luhur dalam masyarakat	12	5,00	5	5,00	**100,00**	1,00	**6,00**	**50,00**
1.03.13	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**	**Cakupan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	**200,00**	**200,00**
1.03.13.5.01	*Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*	*Kegiatan penyusunan KLHS*							**-**	
1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang	-	1,00	1	1,00	**100,00**	2,00	**3,00**	

1.03.13.5.02	*Pemanfaatan Ruang Satan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo*	*Kegiatan konservasi*							-	
1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan kulon Progo	1		-			1,00	**1,00**	**100,00**
								99,01	**99,01**	

Capaian indikator kinerja program Urusan Lingkungan Hidup tahun 2024 dari 10 indikator program terdapat 7 indikator program dengan hasil melebihi dari target dan 3 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Indikator yang belum mencapai target adalah Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup tercapai 94,64 dari target 95,67, persentase peningkatan baku mutu lingkungan tercapai 54,32 dari target 59,57 dan persentase peningkatan pengelolaan persampahan tercapai 31,07 dari target 31,11.

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota adalah Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian kinerja program sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan. Komponen untuk perhitungan capaian indikator kinerja program meliputi jumlah bulan layanan administrasi perkantoran, Persentase jumlah dokumen perencanaan, dokumen pelaporan keuangan dan kinerja, dokumen pengendalian dan evaluasi program OPD disampaikan tepat waktu, dan persentase aset kondisi baik.

Indikator kinerja dari Program Perencanaan Lingkungan Hidup adalah Persentase Peningkatan Kajian Lingkungan Hidup, dengan perhitungan sebagai berikut: *(jumlah dokumen kajian lingkungan yang disusun / jumlah dokumen kajian yang seharusnya disusun) x 100%).* Jumlah kajian lingkungan hidup yang disusun sampai dengan tahun 2024 sebanyak 9 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 14 dokumen. Dokumen yang disusun meliputi:

1. Dokumen Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) = 2 dokumen;
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = 2 dokumen;
3. Evaluasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga = 1 dokumen;
4. KLHS RPJMD = 1 dokumen; dan
5. KLHS RDTR Kulon Progo Tengah dan Selatan = 2 dokumen.
6. Penelitian Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA) dan Alokasi Beban Pencemaran Air (ABPA) Tahun 2024 = 1 Dokumen (Bid. PPL)

Capaian indikator kinerja program perencanaan lingkungan hidup sudah sesuai target yang ditetapkan yaitu 64,29%.

Terdapat 4 (empat) Indikator kinerja dari Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yaitu:

a. Indikator Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup, dengan perhitungan sebagai berikut:

(((Jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan / jumlah pengajuan persetujuan lingkungan x 100%) + (jumlah dokumen yang disetujui atau direkomendasi / jumlah dokumen yang diajukan) x 100) + (jumlah dokumen persetujuan teknis mutu air limbah, emisi, dan limbah B3 yang diterbitkan / jumlah dokumen persetujuan teknis mutu air limbah, emisi, dan limbah B3 yang diajukan) x 100)) /3

b. Indikator Persentase Peningkatan Baku Mutu Lingkungan, dengan perhitungan sebagai berikut:

   *((jumlah titik yang memenuhi baku mutu / Jumlah titik pantau) * 100%) + (Jumlah titik yang dipantau / jumlah titik yang seharusnya dipantau) * 100%) / 2*

c. Indikator Persentase Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan, dengan perhitungan sebagai berikut:

   *(Jumlah parameter yang diuji /jumlah parameter yang seharusnya diuji)*100%)*

d. Indikator Persentase Penghapusan Penggunaan Merkuri Pada Kegiatan PESK, dengan perhitungan sebagai berikut:

*(jumlah lokasi bebas merkuri / jumlah lokasi PESK) *100*

Jumlah dokumen persetujuan lingkungan yang diterbitkan sebanyak 19 dokumen (sesuai jumlah dokumen yang diajukan), jumlah dokumen yang disetujui atau direkomendasi sebanyak 9 dokumen (sesuai jumlah dokumen yang diajukan, jumlah dokumen persetujuan teknis mutu air limbah, emisi dan limbah B3 yang diajukan sebanyak 2 dokumen (sesuai jumlah dokumen yang diajukan). Capaian indikator kinerja persentase peningkatan pelayanan perizinan lingkungan hidup sebesar 100%.

Target jumlah titik pengujian kualitas lingkungan yang dipantau sebanyak 143 titik terealisasi sebanyak 153 titik yang dilakukan pemantauan. Dari 143 titik yang dipantau tersebut hanya 94 titik yang memenuhi baku mutu.

Capaian indikator kinerja persentase peningkatan baku mutu lingkungan yaitu 54,33%, belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 59,57%. Ketidaktercapaian baku mutu lingkungan terkait dengan pengelolaan lingkungan baik dalam pengelolaan sampah, peningkatan pencemaran air yang semakin tinggi sedangkan kemampuan daya tampung dan daya dukung terbatas, peningkatan transportasi, penyediaan ruang terbuka hijau, pengawasan penggunaan bahan emisi yang tidak ramah lingkungan yang kesemuanya berpengaruh terhadap penurunan baku mutu lingkungan sehingga indikator persentase peningkatan baku mutu lingkungan tidak tercapai.

Capaian indikator Persentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan sudah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu target sebesar 40,43% dan tercapai

44,68%. Target jumlah parameter yang diuji sebanyak 19 parameter , terealisasi sebanyak 21 parameter. Untuk matriks air sungai teruji 9 parameter yaitu parameter Suhu, TSS (Zat padat tersuspensi), , DHL (Konduktifitas), pH (derajat keasaman), DO (Oksigen terlarut), Kekeruhan, Total Coliform, Coliform tinja, dan Nitrit. Untuk matriks air limbah teruji 5 parameter yaitu parameter Suhu, pH, DHL, TSS dan TDS. Untuk matriks udara ambien teruji 7 parameter yaitu parameter suhu, kelembaban, CO, Kebisingan, Debu total, Tekanan Udara dan Kecepatan Angin.

Capaian indikator kinerja penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK sebesar 100% (target 80% dan realisasi 80%). Lokasi PESK meliputi Plampang II Kalirejo, Plampang III Kalirejo, Sangon I Kalirejo, Sangon II Kalirejo, Gunung Kukusan Hargorejo. Sedangkan lokasi bebas merkuri yaitu Sangon II, Plampang III, Sangon II, dan Gunung Kukusan. Faktor pendorong tercapainya target yaitu adanya kegiatan sosialisasi bahaya merkuri kepada SD/MI/Sederajat pada 6 Lokasi, sosialisasi penghapusan merkuri kepada Koperasi Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) pada 6 Lokasi, hibah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Koperasi Hargo Selo Kencono, hibah Alat Pengolah Emas Sistem Sianidasi pada Koperasi Produsen Murih Mulyo, dan pendampingan dari Perguruan Tinggi.

Indikator kinerja dari Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) adalah Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup, dengan perhitungan sebagai berikut :

(Luas kawasan yang dikonservasi / Luas kawasan yang seharusnya dikonservasi) x 100%. Target luas kawasan yang dikonservasi seluas 6,5 hektar dan dapat terealisasi seluas 8 hektar. Kegiatan untuk penambahan luas kawasan yang dikonservasi pada tahun 2024 berupa penanaman pohon di sekitar mata air seluas 5,5 hektar (720 pohon) yang tersebar di Kalibawang, Samigaluh dan Pengasih, penanaman pohon di sempadan pantai Trisik, Galur seluas 2 hektar (500 batang) dan di Alun-alun Wates serta Taman Teteg Barat 0,5 hektar (100 batang).

Capaian indikator kinerja program sebesar 56,84% dari target 53,03%. Faktor penghambat belum tercapainya target adalah belum seluruh pelaku usaha/kegiatan yang sudah diawasi menindaklanjuti arahan/teguran terhadap hasil pengawasan. Sebagian juga ada usaha/kegiatan yang sudah tidak beroperasional lagi. Jumlah usaha/ kegiatan yang menindaklanjuti arahan /teguran hasil pengawasan pada tahun 2024 sebanyak 94 usaha/kegiatan. Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mendorong ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan agar menaati ketentuan yang

tercantum dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Target Indikator Kinerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat sebesar 94,63% dan dapat terealisasi sebesar 95,67%. Jumlah lembaga peduli lingkungan hidup yang terbentuk sampai tahun 2024 sebanyak 298 lembaga dari target 277 lembaga. Dan jumlah kelompok peduli lingkungan hidup yang aktif sebanyak 282 kelompok. Yang dimaksud dengan lembaga peduli lingkungan hidup adalah Bank Sampah, Kelompok Pengelola Sampah Mandiri, KSM pengelola sampah dan Sekolah Adiwiyata dan Kelompok Tani Hutan. Penambahan lembaga peduli lingkungan hidup yang aktif berasal dari pembentukan kelompok baru, terutama bank sampah yang merupakan dampak positif dari kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo di 12 kapanewon.

Capaian indikator kinerja masih dibawah target karena adanya lembaga / bank sampah yang tidak aktif disebabkan pengurusnya hanya bersifat sambilan atau sudah mempunyai pekerjaan tetap lainnya sehingga kegiatan bank sampah menjadi tidak aktif. Capaian indikator kinerja Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup adalah 105% sudah melebihi target yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan penanganan aduan terhadap setiap aduan yang masuk. Jumlah aduan yang masuk ke Dinas lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebanyak 19 aduan dan semuanya telah ditindaklanjuti.

Capaian indikator kinerja program pengelolaan persampahan sebesar 31,11% dan realisasinya kurang target yaitu 31,07%. Capaian ini diperoleh dari jumlah pengurangan sampah sebesar 24.868,05 ton dibagi dengan jumlah timbulan sampah yaitu sebesar 80.033,09 ton. Tidak tercapainya target disebabkan adanya bank sampah dan kelompok masyarakat pengolah sampah yang tidak aktif sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah pengurangan sampah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten			62,84	63,15	63,46		68,15		63,15	63,46	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten			99%	99%	99%		45,24		99%	99%	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten			100%	100%	100%		100%		100%	100%	
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			100%	100%	100%		100%		100%	100%	
5	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan			Ada	Ada	Ada		Ada		Ada	Ada	
6	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah			Ada	Ada	Ada		Ada		Ada	Ada	
1	Hasil perhitungan kabupaten terhadap:											
	a. Indeks Kualitas Air (IKA)			35,5	36	36,5		44,24		36	36,5	

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)			87,3	87,6	87,9		92,06		87,6	87,9	
	c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)			64,56	64,56	64,57		53,51		64,56	64,57	
2	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten			100%	100%	100%		100%		100%	100%	
3	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten			0,77%	0,34%	0,32%		0,33%		0,34%	0,32%	
4	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten			0	0	0		0		0	0	Tidak ada MHA
5	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat			0	0	0		0		0	0	Tidak ada MHA

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
6	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat											
7	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten yang ditangani			100%	100%	100%		100%		100%	100%	

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan selama 2 (dua) periode pada tahun anggaran 2024 oleh UPT Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Pemantauan kualitas air sungai selama 2 (dua) periode merepresentasikan kondisi pada musim penghujan dan musim kemarau. Kegiatan pemantauan kualitas air sungai dilakukan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) titik pantau per periode pemantauan, dengan jumlah total titik pantau dalam setahun sebanyak 66 (enam puluh enam) titik pantau. Berdasarkan hasil analisis perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), diperoleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 sebesar 44,24 dengan kategori Kurang.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung menggunakan data hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan selama 2 (dua) periode pada tahun anggaran 2024 oleh Pihak Ketiga yang telah ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Pemantauan kualitas udara ambien oleh APBN dan APBD dilakukan selama 2 (dua) periode yang dilakukan pada beberapa titik lokasi pemantauan di Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien untuk APBN

dilakukan sebanyak 4 (empat) titik pantau per periode pemantauan serta untuk APBD dilakukan sebanyak 9 (sembilan) titik pantau per periode pemantauan, dengan jumlah total titik pantau dalam setahun sebanyak 13 (tiga belas) titik pantau. Data hasil pemantauan kualitas udara ambien pada APBN dan APBD Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil analisis perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 sebesar 91,62 dengan kategori Sangat Baik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagaimana berikut ini :

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pengelolaan sampah yang belum sempurna / belum terkelola dengan baik;
    a. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah menggunakan metode 3R (Reuse-Reduce-Recycle) masih rendah;
    b. Kurangnya cakupan layanan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten;
    c. Keterbatasan TPA Banyuroto;
    d. Kurang optimalnya fungsi pengelolaan sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah;
    e. Kurang optimalnya fungsi ekonomi sirkuler dari pengelola sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah; dan
    f. Kurang optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pengelola sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah.
2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat menurunnya fungsi konservasi lingkungan

a. Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap sumber-sumber air local;

b. Belum optimalnya upaya konservasi sumberdaya alam terutama konservasi air melalui upaya konservasi alami maupun melalui rekayasa teknis;

c. Belum optimalnya inventarisasi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati (hewan-tumbuhan-mikroorganisme) yang ada di Kulon Progo;

d. Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan di bidang konservasi dengan OPD lain di tingkat Kabupaten-Provinsi-Kementerian/Lembaga; dan

e. Kurangnya kapasitas komunitas-komunitas masyarakat di bidang konservasi lingkungan.

3. Perubahan kualitas lingkungan akibat meningkatnya kegiatan usaha

a. Perubahan kualitas lingkungan baik sosial, biotik, maupun fisik karena meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang merupakan multiplayer efek dari adanya Bandara YIA dan program KSN lainnya;

b. Mendesaknya kebutuhan penyediaan fasilitas umum sanitasi lingkungan perkotaan dan area disekitar bandara YIA (ex: saluran drainase, saluran air limbah, dan sistem pengelolaan sampah);

c. Kemudahan dalam berusaha yang difasilitasi melalui sistem OSS-RBA diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan, penanganan aduan, dan penaatan persetujuan lingkungan di berbagai sector; dan

d. Belum optimalnya fungsi laboratorium lingkungan.

Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kulaitas Air (IKA) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan komponen utama yang mencerminkan capaian pembangunan lingkungan secara holistik. IKLH

dihitung berdasarkan tiga komponen utama, yaitu kualitas udara ambien, kualitas air sungai, dan tutupan lahan, sesuai dengan pedoman perhitungan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu indikator kunci dalam mendukung pencapaian sasaran daerah tahun 2026, yaitu *"Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup"*. IKLH mengukur kondisi lingkungan dari aspek kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan, yang mencerminkan integrasi upaya pengendalian pencemaran, perlindungan ekosistem, serta pengelolaan ruang secara berkelanjutan.

Peningkatan nilai IKLH memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan layak huni. Nilai IKLH juga menjadi salah satu **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Pemerintah Daerah dalam dokumen RPJMD dan RKPD, sehingga capaian indikator ini tidak hanya merefleksikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dampak capaian IKLH terhadap sasaran daerah antara lain:

- **Kesehatan masyarakat meningkat** akibat membaiknya kualitas udara dan air, serta berkurangnya paparan pencemaran.
- **Ketahanan lingkungan terhadap bencana** (banjir, kekeringan, tanah longsor) terjaga melalui penguatan tutupan lahan dan pelestarian kawasan lindung.
- **Kualitas tata ruang dan investasi daerah meningkat**, seiring dengan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam setiap perizinan usaha dan pembangunan.

Oleh karena itu, peningkatan nilai IKLH menjadi prioritas dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026, melalui program pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, perlindungan keanekaragaman hayati, serta edukasi dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat peran DLH dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kulon

Berdasarkan data tahun 2024, nilai IKLH Kabupaten Kulon Progo berada pada angka 65,46 (kategori sedang). Sasaran pembangunan lingkungan hidup dalam RPJMD 2025–2029 menargetkan peningkatan nilai IKLH hingga mencapai minimal 71,00 pada tahun 2026 dan 73,00 pada akhir periode tahun 2029, dengan tujuan mendorong terciptanya kualitas lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai target tersebut, Dinas Lingkungan Hidup merancang program dan kegiatan prioritas yang mencakup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah B3, serta penguatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. Kinerja IKLH ini juga menjadi bagian dari sasaran strategis daerah dalam memperkuat daya dukung lingkungan guna mendukung pembangunan sektor lain secara berkelanjutan.

Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah harus dihadapi dan dijadikan sebagai tantangan dan peluang. Permasalahan dan hambatan yang tidak dikelola dan dicari solusinya dapat menghambat capaian program nasional/ internasional seperti NSPK dan SDGs (Suistanable Development Goals).

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

Tantangan :

a. Penurunan kuantitas dan kualitas air akibat meningkatnya pencemaran di badan air/ sungai oleh limbah domestik, kegiatan industri, kegiatan pariwisata dan lain-lain ;
b. Penurunan kualitas udara dan tanah;
c. Adanya alih fungsi lahan;
d. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan air limbah;
e. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, mata air dan sungai);
f. Menurunnya tata kelola TPA Banyuroto;
g. Belum adanya kader lingkungan di tingkat kapanewon sebagai perpanjangan tangan Dinas Lingkungan Hidup & pegiat lingkungan;

h. Belum semua kalurahan memberikan konstribusi dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan melalui peraturan kalurahan dan APBKal;
i. Pengembangan Laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Peluang :

a. Peraturan Menteri Desa Tertinggal tentang Alokasi Dana Desa;
b. Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kalurahan yang memberikan peluang kepada pemerintah kalurahan berperan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup;
c. Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya;
d. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam hal penelitian dan pengkajian, KKN tematik, pengabdian masyarakat dan penerapan teknologi tepat guna; dan

Berdasarkan analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan tantangan dan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup di masa 4 (empat) tahun mendatang maka dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis yaitu **"Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup"**.

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

2.4. Review terhadap RKPD

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Renja DLH harus selaras dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Hasil analisis kebutuhan

DLH tahun 2026 perlu dibandingkan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 untuk mengetahui kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran.

Usulan anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada rancangan awal RKPD tahun 2026 sebesar Rp. 26.174.780.000,00. Sedangkan anggaran yang disetujui sampai pada tahap Rencana Kerja tahun 2026 adalah sebesar Rp. 13.184.470.000,00. Demikian juga terkait jumlah program, kegiatan dan subkegiatan,serta keluaran subkegiatan antara rancangan awal RKPD dengan Rencana Kerja terdapat perbedaan karena menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Pada rancangan awal RKPD terdapat 10 program, 19 kegiatan dan 33 subkegiatan, sedangkan pada Rencana Kerja terdapat 10 program, 16 kegiatan dan 25 subkegiatan.

Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang pada awalnya diusulkan, namun sampai pada tahap pembahasan di Paniradya program tersebut tidak diakomodir. Demikian juga dengan program/ kegiatan/ subkegiatan yang pendanaanya bersumber dari APBD, ada beberapa subkegiatan yang tidak diakomodir yaitu subkegiatan:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim
e. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
f. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
g. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Adapun data hasil analisis kebutuhan DLH Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 disandingkan dengan Rancangan Awal RKPD tahun 2026 selengkapnya disajikan pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026 *(diambilkan dari softfile ranwal / RKPD di SIPD)*					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN *(diambilkan dari RKPD di SIPD)*					CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp000)**	**PROGRAM/ KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA (Rp000)**	
2	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG										
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten										
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan kulon Progo	1 dokumen	1.147.156						**Tidak diakomodir**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu***			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		***Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu***			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 dokumen	47.655	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 dokumen	44.608	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	21 laporan	9.931	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	21 laporan	10.116	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu***			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		***Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu***			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	26 orang/ bulan	2.041.503	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	26 orang/ bulan	1.904.706	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 dokumen	56.100	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 dokumen	46.650	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	14 laporan	6.627	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	14 laporan	4.907	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		***Dokumen administrasi kepegawaian***			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		***Dokumen administrasi kepegawaian***			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	12 orang	33.530	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	30 orang	55.000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Dokumen administrasi umum***			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		***Dokumen administrasi umum***			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	2 paket	38.836						Tidak diakomodir
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 paket	22.899	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 paket	20.058	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 bulan	75.890	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 laporan	83.136	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**					
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo	*Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	8 unit	1.461.000						Tidak diakomodir
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 unit	5.376.000						Tidak diakomodir
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kulon Progo	*Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan*	99 unit	454.238	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kulon Progo	*Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan*	6 unit	52.976	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Layanan jasa penunjang***			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Layanan jasa penunjang***			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 laporan	77.217	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 laporan	129.605	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 laporan	147.018	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 laporan	142.612	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah***			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah***			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	13 unit	153.537	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	14 unit	131.014	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 unit	470.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 unit	191.875	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	67 unit	27.860	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	34 unit	19.492	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		***Persentase peningkatan kajian lingkungan hidup***			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		***Persentase peningkatan kajian lingkungan hidup***			
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		***Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/kota yang disusun***			**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**		***Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/kota yang disusun***			
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	*jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi*	2 dokumen	47.166	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	*jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi*	2 dokumen	50.763	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		***Persentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan*** ***Persentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan*** ***Persentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup*** ***Persentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK***			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		***Persentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan*** ***Persentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan*** ***Persentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup*** ***Persentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK***			

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		***Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut***			**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		***Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut***			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*	4 dokumen	458.518	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*	2 dokumen	258.985	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim	Kab. Kulon Progo		1 dokumen	611.471						Tidak diakomodir
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Kulon Progo	*Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan*	8 dokumen	3.005.304	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Kulon Progo	*Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan*	5 dokumen	532.773	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		***Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/ kota yang dilaksanakan***			**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		***Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/ kota yang dilaksanakan***			
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*	4 laporan	2.461.627	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*	4 laporan	1.528.576	

Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		***Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/ atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan***			**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		***Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/ atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan***			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan*	1 dokumen	107.745						Tidak diakomodir
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		***Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup***			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		***Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup***			
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		***Jumlah sarana dan prasarana keanekaragama n hayati yang dikelola***			**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**		***Jumlah sarana dan prasarana keanekaragama n hayati yang dikelola***			
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun*	1 dokumen	98.000						Tidak diakomodir
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola*	2.030 unit	639.162	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola*	2240 unigt	424.987	

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		***Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjut i arahan dan atau teguran hasil pengawasan***			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		***Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjut i arahan dan atau teguran hasil pengawasan***			
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		***Jumlah laporan dari usaha/kegiatan yang diawasi , izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota***			**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		***Jumlah laporan dari usaha/kegiatan yang diawasi , izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota***			
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*	81 badan usaha	48.892	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*	81 badan usaha	27.096	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		***Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup***			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		***Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup***			
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		***Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH***			**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		***Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH***			

Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat*	375 orang	32.120	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat*	250 orang	53.174	
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kab. Kulon Progo	*Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*	10 lembaga	119.843	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kab. Kulon Progo	*Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*	5 lembaga	127.323	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		***Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup***			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		***Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup***			
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		***Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota yang ditindaklanjuti/ ditangani***			**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**		***Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota yang ditindaklanjuti/ ditangani***			
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani*	21 pengaduan	28.362	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani*	15 aduan	22.874	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		***Persentase peningkatan pengelolaan persampahan***			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		***Persentase peningkatan pengelolaan persampahan***			
Pengelolaan Sampah		***Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan Kembali***			**Pengelolaan Sampah**		***Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan Kembali***			

Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Kulon Progo	*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan*	20 ton	2.771.128				-		Tidak diakomodir
Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah*	1 laporan	98.445	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah*	1 laporan	156.950	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		***Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat***			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		***Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat***			
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		***Grebeg sampah***			**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		***Grebeg sampah***			
Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Kab. Kulon Progo				Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Kab. Kulon Progo				
		Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1 laporan	4.000.000			*Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat*	1 laporan	789.720	
				26.174.780					**6.809.976**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja DLH didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rancangan Awal Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kapanewon dan pokok pikiran DPRD. Usulan kegiatan dari masyarakat yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup berupa proposal bantuan yang disampaikan langsung ke Dinas, usulan kalurahan/ masyarakat melalui musrenbang kapanewon dan usulan reses/ pokok pikiran DPRD. Program dan kegiatan yang diusulkan ini sesuai dengan isu strategis yaitu kelestarian fungsi lingkungan hidup. Usulan-usulan tersebut ada yang diakomodir, belum prioritas dan ada yang tidak diakomodir/ ditolak karena tidak sesuai kewenangan.

Usulan permasalahan yang ditujukan untuk Dinas Lingkungan Hidup meliputi :

1. Fasilitasi sarana prasarana persampahan untuk bank sampah
2. Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Pembangunan Instalasi Pemanen Air Hujan (IPAH)
4. Pembangunan IPAL Industri maupun rumah tangga
5. Pembangunan Sumur Resapan

Tabel 4.
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup

No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Margosari, Pengasih. Kab. Kulon Progo	Pembangunan IPAL rumah tangga	50 titik	

		RT 18 & RT 1 (Keboan dan Karangrejo) Karangwuni, Wates, Kab. Kulon Progo	Pembangunan IPAL permukiman	2 unit	
		Pedukuhan Bugel 8, Bugel 9, dan Bugel 10, Panjatan, Kab. Kulon Progo	SPAL Pedukuhan Bugel	1 paket	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**				
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	RT 22 RW 08 Pundak Tegal, Kembang, Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Pembangunan IPAH	250 meter	
		Gunung Kukusan, Hargorejo, Kokap,, Kab. Kulon Progo	Pembangunan IPAH	1 titik	
		Dusun Sangkrek, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Pembangunan IPAH	10 unit	
		Talunombo, Sidomulyo, Pengasih, Kab. Kulon Progo	Pembangunan IPAH	5000 Ltr	
		Rt 35 /17 Talunombo, Sidomulyo, Pengasih, Kab. Kulon Progo	Pembangunan IPAH	1 paket	
		Margosari,Pengasih,, Kab. Kulon Progo	Sumur Resapan	50 titik	
		Nyemani, Sidoharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Pembuatan DAM Pengendali Sungai Ngobaran	60 m3	
3	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Ngentakrejo dan Gulurejo, Lendah, Kab. Kulon Progo	Sosialisasi tentang lingkungan hidup	100 peserta	

		Kalurahan Bugel, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Pelatihan pengolahan bank sampah	1 paket	
		Kriyan, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 titik	
		Kal Pendoworejo, Girimulyo, Kab. Kulon Progo	Pengembangan dan pelatihan bank sampah di kalurahan pendoworejo	1 paket	
		RW 02 Beji, Wates, Kab. Kulon Progo	Pelatihan Pengelolaan Sampah	5 paket	
		Sidorejo, Lendah, Kab. Kulon Progo	Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 paket	
		Karangasem, Sidomulyo, Pengasih, Kab. Kulon Progo , Kab. Kulon Progo	Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 paket	
		Pendem, SIdomulyo, Pengasih, Kab. Kulon Progo , Kab. Kulon Progo	Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 paket	
		Desa Kembang, Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 paket	
		Kapanewon Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 peserta	
		Karang Taruna Kalipetir Lor Desa Margosari Desa Margosari, Pengasih, Kab. Kulon Progo	Pelatihan Pengelolaan Sampah	1 paket	
		Kalipetir Kidul,Margosari,Pengasih , Kab. Kulon Progo	Pelatihan Pengelolaan Sampah	1 paket	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				
	Pengelolaan Sampah				
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kelompok Tani Sumber Resik Seworan, Triharjo, Wates No.Reg.104?BT/Triharjo, Kab. Kulon Progo	Motor Roda 3	2 unit	
		Kelompok Dadi Asri Kleworan, RT 21 RW 09 Triharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	Motor Roda 3	2 unit	

		Kelompok Tani Sumber Resik Seworan, Triharjo, Wates No.Reg.104/BT/Triharjo , Kab. Kulon Progo	Timbangan	2 unit	
		Kelompok Dadi Asri Kleworan, RT 21 RW 09 Triharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	Timbangan	2 unit	
		Kularan,Triharjo, Wates (Bank Sampah Dadi Resik), Kab. Kulon Progo	Komposter dan TPS 3 R	20 paket	
		RT 12 RW 06 Tambak, Kab. Kulon Progo	TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu)	20 paket	
		Kranggan, Galur, Kab. Kulon Progo	Alat pembakar sampah 1 unit bagi KSM kranggan sehat	1 unit	
		Ngestiharjo Wates Kulon Progo	Alat Pengolah Sampah KSM	1 paket	
		Bumirejo, Lendah, Kab. Kulon Progo	Kendaraan roda 3 pengangkut sampah	15 unit	
		Temon Wetan, Temon Kulon Progo	Alat Pengolah Sampah KSM Temon Wetan	1 paket	
		Temon Wetan, Temon, Kab. Kulon Progo	Bantuan pengolahan sampah "TPS 3R" temon wetan temon	1 paket	
		Tobanan Pengasih, Kab. Kulon Progo	Kendaraan roda 3 (pengangkut sampah) TPS Sampoerna Asih	1 paket	
		Terbah RT 25 RW 10 Pengasih, Pengasih, Kab. Kulon Progo	Kendaraan roda 3 (pengangkut sampah) Kelompok "SELAWE MAJU"	1 unit	
		Karangrejo, Karangwuni, Wates, Kab. Kulon Progo	Pembangunan TPS 3R	1 unit	
		Sogan, Wates, Kab. Kulon Progo	sarana prasarana persampahan untuk tertib pengelolaan sampah	1 titik	
		Karangwuni, Wates, Kab. Kulon Progo	Pembersihan Kali untuk penanggulangan banjir dan pengairan	1 titik	
		Bank Sampah Sidoharjo, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Permohonan Gedung untuk usaha Bank Sampah "Bank Sampah Sedulur Sinorowedi"	1 paket	
		Pedukuhan Timpang, Pengasih. , Kab. Kulon Progo	Peralayan komposter	1 paket	
		Pedukuhan Timpang, Pengasih , Kab. Kulon Progo	Peralatan komposter	1 paket	

		Bendungan, Wates, Kab. Kulon Progo	Hanggar TPS3R Bendungan, Wates	1 paket	
		Garongan , Panjatan,, Kab. Kulon Progo	Bantuan alat pengolahan sampah KM Lestari Mulya	1 paket	
		Kedungpring , Giripeni, Wates , Kab. Kulon Progo	Alat pengolahan sampah KM Kensi	1 paket	
		Garongan, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Alat pengolahan sampah KM Lestari Mulya	1 paket	
		Kedungpring, Giripeni, Wates, Kab. Kulon Progo	Alat pengolahan sampah KM Kensi	1 paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh DLH diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Renja yang disusun oleh perangkat daerah sinergi dengan RKP 2026 dan Renstra Kementrian LHK

Untuk Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah: **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".**

Tema Pembangunan Tahun 2026 merujuk pada Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 juga memperhatikan Tema pembangunan DIY sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan RKPD DIY Tahun 2026 yaitu " Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjabarkan dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam satu tahun anggaran mendukung visi Kepala Daerah yaitu terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi ke empat Kepala Daerah Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana serta misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjabarkan dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam satu tahun anggaran

Tujuan dan sasaran Renja 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo seperti pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Target Kinerja
	Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	69,84
		Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	72,10
			Indeks Kualitas Udara	Nilai	75,71
			Persentase Capaian Program Pengelolaan Persampahan	%	50,13
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	nilai	A (85,3)
			Indeks maturitas SPIP	nilai	3,231
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat daerah	nilai	A (>80-90)

		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP perangkat daerah	nilai	2,0-3,0

3.3. Program dan Kegiatan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	%	54,29
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Parameter Uji Laboratorium Lingkungan	Parameter	29
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen kajian lingkungan hidup	%	100
4	Program Pengelolaan Persampahan	Proporsi cakupan layanan pengelolaan sampah	%	27,82
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup	%	54,72
		Persentase Taman Kondisi Baik	%	77,55
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Capaian penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup	%	77,11
8	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase pengurangan sampah	%	33,07

9	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase penanganan sampah	%	15,29
		Prosentase Lahan Terkonservasi di Wilayah Pantai Selatan	%	6,13

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan yang di rencanakan pada tahun 2026 berdasarkan pertimbangan pentingnya program dan kegiatan tersebut untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah khususnya di bidang lingkungan hidup, serta mempertimbangkan realisasi target kinerja hasil program, realisasi rencana kerja perangkat daerah, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Total kebutuhan dana / pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp. 13.184.470.000 (Tiga belas milyard seratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Kulon Progo dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rincian nama Rumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**13.184.470.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**0,00**							**0,00**	
1,	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**					-	**0,00**							**0,00**	
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.13.5.01.0008	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1,	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					-	**4.284.831.578,00**							**0,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	51.798.900,00			-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	42.309.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.489.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.936.110.644,00			-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	2.872.951.544,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), P BJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	55.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	8.059.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	52.325.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	52.325.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	82.025.700,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.661.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	63.364.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	38.415.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	38.415.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	602.584.724,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	259.237.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	343.347.024,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	521.571.010,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	410.208.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	87.699.710,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	23.663.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2,	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**					**-**	**48.645.700,00**							**0,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	48.645.700,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				2 Dokumen	48.645.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3,	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**					**-**	**1.007.934.400,00**							**0,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	975.683.100,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	275.145.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota															
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				5 Dokumen	700.537.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	32.251.300,00			Melanjutkan hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat															
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	32.251.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4,	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**					-	**1.435.559.500,00**							**0,00**		
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	1.435.559.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				8,6 Ha	1.240.099.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1259 Unit	195.460.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5,	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**					-	**33.122.300,00**							**0,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	33.122.300,00			Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				70 Badan Usaha	33.122.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6,	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					-	**149.485.600,00**							**0,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	149.485.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				180 Orang	42.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														

			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				10 Lembaga	107.485.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7,	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**					-	**20.024.000,00**							**0,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	20.024.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				15 Pengaduan	20.024.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**					-	**5.225.868.622,00**							**0,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	5.225.868.622,00			Melanjutkan hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				0 Kelompok	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				0 Ton	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah														

			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	270.999.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				12045 Ton	4.954.868.822,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**978.998.300,00**							**0,00**	
1,	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**					**-**	**978.998.300,00**							**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	978.998.300,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				1 Laporan	978.998.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 ini didasarkan pada RKPD 2026 yang telah ditetapkan dan berisi program dan kegiatan tahun 2026 serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi serta kondisi, juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan pelayanan dan fasilitasi Dinas Lingkungan Hidup.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah, berisi tentang gambaran umum perangkat daerah, program prioritas pembangunan perangkat daerah dan rencana kerja, pendanaan/ pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini nantinya akan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan umum anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai perencanaan dan target sasaran yang telah ditetapkan serta berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Permasalahan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan perlu diantisipasi dengan baik agar dapat diminimalisir serta tidak terulang lagi untuk masa yang akan datang. terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di Dinas Lingkungan

Hidup secara intensif, sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pengasih, 29 Juli 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo



Ir. GUSDI HARTONO, M.T.
NIP.19650806 199303 1 004

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KULON PROGO

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo
Telp. (0274) 773404, Kode Pos 55652
email : dukcapil@kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat disusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2026. Rencana Kerja merupakan suatu landasan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026 dengan fokus pada bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan dan sasaran dapat diwujudkan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 29 Juli 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Ir. ASPIYAH, M.Si.

Pembina Utama Muda ; IV/c

NIP. 19680121 199603 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **II**
DAFTAR ISI ..... **III**
DAFTAR TABEL ..... **IV**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 ..... **6**
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 14
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 20
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2026 23
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **34**
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 34
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 36
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **39**
BAB V PENUTUP **54**
LAMPIRAN **56**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Lalu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo 18
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil..... 24
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo Nama SKPD: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... 33
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 37
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 .. 38
Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas yang menjadi dasar/acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo setiap tahun/kinerja tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi dasar acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan awal Renja**,** yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah, evaluasi Renja tahun sebelumnya, dan kebijakan pembangunan daerah serta nasional. Rancangan awal ini menjadi bahan pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah**,** yang bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan antar-perangkat daerah serta menjaring masukan dari pemangku kepentingan. Setelah forum dilaksanakan, perangkat daerah menyusun rancangan Renja yang telah disempurnakan, lalu diserahkan kepada Bappeda untuk disinkronkan dengan rancangan RKPD. Tahapan akhir adalah penetapan Renja oleh kepala perangkat daerah sebagai dasar penyusunan RKA SKPD dan pelaksanaan program tahunan.

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026 dengan fokus pada bidang urusan Administrasi Kependudukan. Program dan kegiatan tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Adapun nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026 serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Kemudian dokumen Renja Perangkat Daerah akan menjadi perdoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administras Kependudukan;

10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 114);
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 nomor 13);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122);
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud agar tercipta keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, serta sebagai tolak ukur pencapaian sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.

Penyusunan Rencana Kerja OPD ini bertujuan untuk:

i. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
ii. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
iii. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2026;
iv. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) OPD ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas, maka Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari: Kepala Dinas yang membawahi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan ditunjang oleh Sekretariat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dievaluasi melalui analisa pencapaian kerja dan aspek penyerapan anggaran secara lebih rinci. Capaian kerja didasarkan pada indikator kerja dan capaian indikator atas pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka mewujudkan visi dan misi OPD. Indikator yang dimaksudkan meliputi kelompok masukan *(inputs)*, keluaran *(outputs)*, hasil *(outcomes)*, manfaat *(benefit)*, dan dampak *(impacts)*.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2024 berjalan baik dan lancar. Target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan penyerapan anggaran yang mencapai 87,80%. Tingkat penyerapan anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan adanya penyesuaian perbedaan antara harga barang/jasa di DPA/DPPA dengan harga riil pasar, sehingga pertanggungjawaban disesuaikan harga pasar. Sisa anggaran merupakan selisih harga barang/jasa di DPA dengan di pasar serta sisa lelang dikembalikan ke kas Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun anggaran 2024 telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik secara daring maupun luring relatif tinggi dan berjalan efektif.

Review hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2024, jika dilihat dari perbandingan antara target dengan realisasi sebagai berikut:

1. Realisasi fisik menunjukkan kesesuaian antara realisasi dengan target di Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), devisiasi (gap) sebesar 0 persen. Pelaksanaan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.
2. Realisasi keuangan menunjukkan ketidaksesuaian antara realisasi dengan target di Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), deviasi (gap) sebesar –9,57 persen. Ada sisa belanja karena disesuaikan kebutuhan maupun

penyesuaian harga pasar serta efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Pemkab Nomor 900/1626 tentang Rasionalisasi & Efisiensi Belanja Tahun 2024.

B. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024

Berdasarkan penilaian kinerja dari realisasi fisik dan keuangan terhadap kinerja 25 Sub Kegiatan yang sudah dijadwalkan dalam Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 diperoleh rerata nilai (score) kinerja kegiatan sebesar 100 dengan predikat **Sangat Tinggi**.

NO		FISIK	KEUANGAN	PELAPORAN
		(%)	(Rp.)	(Keg)
1.	Target	100	2.062.165.706	25
2.	Realisasi	100	1.864.813.532	25
Capaian (%)		**40,00**	**40,00**	**20,00**
Total Capaian (%)		**100**		
		Sangat Tinggi		

**Sumber: Catatan Atas Pelaksanaan APBD Triwulan IV TA 2024*

C. Faktor Pendorong, Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 antara lain:

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;
2. Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
3. Adanya dukungan pendanaan dari APBN, Pemda DIY dan sumber dana lainnya seperti CSR, Perguruan Tinggi, dan sebagainya;
4. Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD.

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Beberapa Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah tidak tercapai sesuai dengan target;
2. Adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik pada pekerjaan konstruksi;
3. Pengendalian internal PD belum optimal sehingga pelaksanaan kegiatan belum sesuai target;
4. Belum optimalnya pemanfaatan output kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan untuk meningkatkan dampak bagi masyarakat.

Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain:

1. Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal;

2. Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk menghindari keterlambataan dalam pelaksanaan pekerjaan;
3. Perlu koordinasi dan optimalisasi capaian kinerja tujuan, sasaran daerah, IKU Perangkat Daerah, serta Program RPD 2023-2026 untuk mendukung pencapaian target RPD di tahun 2025.
4. Perangkat Daerah perlu melakukan evaluasi hasil (outcame) dari kegiatan/subkegiatan yang telah dilaksanakan serta bisa berkolaborasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan output kegiatan/subkegiatan untuk meningkatkan dampak manfaatnya bagi masyarakat.

Data capaian kinerja sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Lalu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegitan	Indikator kinerjs Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Darerah s/d Tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**12**					**Urusan wajib Bukan pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
2	**12**					**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**									
2	**12**	**2**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
2	**12**	**2**	**01**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Penganggaran evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**88**	**23**	**23**	**23**	**100,00%**	**24**		
2	12	**2**	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	2	2	2	**100,00%**	3		

2	12	2	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77	21	21	21	**100,00%**	21		
2	**12**	**2**	**01**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**152**	**38**	**38**	**38**	**100,00%**	**38**		
2	12	2	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	48	12	12	12	**100,00%**	12		
2	12	2	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	12	12	12	**100,00%**	12		
2	12	2	01	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	56	14	14	14	**100,00%**	14		
2	**12**	**2**	**01**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**196**	**5**	**5**	**5**	**100,00%**	**0**		
2	12	2	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	196	5	5	5	**100,00%**	0		
2	**12**	**2**	**01**	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**48**	**12**	**50**	**12**	**24,00%**	**4**		
2	12	2	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	48	12	50	12	**24,00%**	4		

2	**12**	**2**	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**49**	**19**	**5**	**5**	**100,00%**	**3**		
2	12	2	01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	32	8	4	4	**100,00%**	3		
2	12	2	01	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor serta Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	16	11	1	1	**100,00%**	0		
2	12	2	01	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	0	0	0	**0,00%**	0		
2	**12**	**2**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**96**	**49**	**28**	**37**	**132,14%**	**28**		
2	12	2	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	36	12	12	**100,00%**	12		
2	12	2	01	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	13	13	13	**100,00%**	13		
2	12	2	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		0	3	12	**400,00%**	3		

2	**12**	**2**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**386**	**31**	**60**	**48**	**80,00%**	**41**		
2	12	2	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	9	7	7	**100,00%**	7		
2	12	2	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	17	17	17	17	**100,00%**	17		
2	12	2	01	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi	340	5	36	24	**66,67%**	0		
2	12	2	01	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi	17		0	0	**0,00%**	17		
2	**12**	**2**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Presentase peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk**	**100,00%**	**99,60%**	**100,00%**	**99,73%**	**99,73%**	**100,00%**		
2	**12**	**2**	**02**	**01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**48**	**24**	**12**	**12**	**100,00%**	**12**		
2	12	2	02	01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4	1	7	7	**100,00%**	1		

2	12	2	02	01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	184.000	72.534	48.000	76.737	**159,87%**	48.000		
2	12	2	02	01	07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	9.212	8.206	2.303	8.438	**366,39%**	2.303		
2	**12**	**2**	**03**			**Program Pencatatan Sipil**	**Presentase peningkatan pelayanan pencatatan sipil**	**97,21%**	**99,58%**	**97,17%**	**99,58%**	**102,48%**	**97,20%**		
2	**12**	**2**	**03**	**01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Terlaksanananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**48**	**24**	**12**	**12**	**100,00%**	**12**		
2	12	2	03	01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.000	6.276	5.000	5.724	**114,48%**	5.000		
2	12	2	03	01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	24.000	5.688	6.000	7.137	**118,95%**	6.000		
2	**12**	**2**	**03**	**02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Terlaksanananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**48**	**24**	**12**	**12**	**100,00%**	**12**		
2	12	2	03	02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	580	161	135	146	**108,15%**	135		
2	**12**	**2**	**04**			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		

2	**12**	**2**	**04**	**01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan**	**48**	**24**	**12**	**12**	**100,00%**	**12**		
2	12	2	04	01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	182	2	2	**100,00%**	2		
2	**12**	**2**	**04**	**03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**48**	**24**	**12**	**12**	**100,00%**	**12**		
2	12	2	04	03	**04**	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	4	281	3	3	**100,00%**	3		
2	12	2	04	03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengolahan Informasi Administasi Kependudukan	36	*4*	3	3	**100,00%**	3		
2	**12**	**2**	**04**	**04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**48**	**24**	**12**	**12**	**100,00%**	**12**		
2	12	2	04	04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12	3	3	3	**100,00%**	3		
2	**12**	**2**	**05**			**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi Profil Kependudukan**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
2	**12**	**2**	**05**	**01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kependuukan**	**48**	**24**	**12**	**12**	**100,00%**	**12**		

2	12	2	05	01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	4	4	1	1	**100,00%**	1		

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2024 berjalan baik dan lancar. Target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan penyerapan anggaran yang mencapai 40%, capaian fisik mencapai 40%, serta pelaporan mencapai 20% dengan total capaian sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh Sub Kegiatan yang telah mencapai target fisik. Hal ini merupakan bentuk komitmen dari pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah. Serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta mendukung visi misi daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil menjadi salah satu urusan wajib bagi kewenangan/tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo melaksanakan ketugasannya dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama yakni pada nilai survey Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) yang merupakan hasil penilaian masyarakat yang diolah oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

   Berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan cara melakukan survei kepada masyarakat, hasil Indeks Kepuasan Masyarakat melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu mendapat nilai 89,189 dengan predikat mutu pelayanan **Sangat Baik** dari target 83,113 (tercapai 107,31% dari target).

2. **Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

   Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil untuk tahun 2024 terealisasi sebesar 96,13% dari target sebesar 97,31% (tercapai 98,79% dari target), yang meliputi:

   a. Persentase Jumlah Penduduk yang ber-KTP dengan target 100% terealisasi 99,46% (tercapai 99,46% dari target);
   b. Persentase Jumlah Kartu Keluarga yang Diterbitkan dengan target 100% terealisasi 100% (tercapai 100% dari target);
   c. Persentase Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun dengan target 96,25% terealisasi 99,48% (tercapai 103,36% dari target);
   d. Persentase Jumlah Akte Kematian yang Diterbitkan dengan target 98,15% terealisasi 100% (tercapai 101,88% dari target);
   e. Persentase Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan dengan target 92,14% terealisasi 81,71% (tercapai 88,68% dari target).

Target capaian kinerja pada indikator persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya: masih ditemukannya data ganda pada *database* kependudukan bagi sebagian masyarakat. Selain itu, faktor lainnya yaitu ketidaktahuan dari masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan dokumen administrasi kependudukan yang bersifat valid. Masyarakat tidak mengetahui jika data yang dimiliki ternyata ganda dengan NIK lain dan tidak melakukan permohonan penghapusan NIK ganda.

Selain pemenuhan pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya juga melaksanakan pemenuhan pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Program (IKP), dengan rincian sebagai berikut:

A. Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Persentase Jumlah Penduduk yang ber KTP

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el dibagi dengan seluruh wajib KTP-el yang ada.

Pada tahun 2024 penduduk yang telah memiliki KTP-el di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 346.467 orang, dengan jumlah penduduk usia wajib KTP sebanyak 348.351 maka persentase penduduk ber-KTP el sebesar 99,46 %. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 99,46 % (Belum memenuhi dari target yang ditetapkan). Hal ini disebabkan karena masih adanya penduduk yang database kependudukannya tercatat di Kabupaten Kulon Progo akan tetapi berdomisili berada di luar kabupaten Kulon Progo dan belum melakukan perekaman KTP-el.

2. Persentase jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) yang pengukurannya di dasarkan pada jumlah kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dibagi dengan jumlah Kepala keluarga (KK) yang ada. Pada tahun 2024 jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 157.726 dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 157.726, maka persentase jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan sebesar 100% .

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 100%. (sesuai dengan target yang ditetapkan). Cakupan penerbitan Kartu Keluarga sesuai dengan target yang ditetapkan Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan Kartu Keluarga juga meningkat.

B. Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Persentase Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0-18 Tahun

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun.

Pada tahun 2024 jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun sebanyak 102.524 orang dengan jumlah penduduk usia 0-18 Tahun sebanyak 103.062 orang, maka persentase jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 99,48%. Apabila dibandingkan dengan dengan target 2024 sebesar 96,25% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 103,36% (melebihi dari target yang diharapkan)

2. Persentase Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah Akta Kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan yang pengukurannya didasarkan pada jumlah Akta Kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan dibagi dengan jumlah kematian di tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2024 jumlah Akta Kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan sejumlah 6.993 dengan jumlah kematian di tahun yang bersangkutan sejumlah 6.993 maka persentase jumlah akta kematian yang diterbitkan di tahun yang bersangkutan sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 98,15% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 101,88% (melampaui target yang ditetapkan). Hal ini dikarenakan keberhasilan program dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara daring maupun tatap muka, pelayanan secara daring maupun datang langsung, dan berbagai kegiatan pelayanan jemput bola dokumen kependudukan.

C. Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Persentase Jumlah sarana SIAK yang terpelihara

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah sarana SIAK yang terpelihara pengukurannya di dasarkan pada jumlah sarana SIAK yang yang terpelihara dibagi dengan jumlah sarana SIAK yang ada.

Pada tahun 2024 jumlah sarana SIAK yang terpelihara sejumlah 17 dengan jumlah sarana SIAK yang ada sejumlah 17, maka persentase jumlah sarana SIAK yang terpelihara sebesar 100%.

2. Persentase Jumlah Buku Agregat Kependudukan Semesteran yang tersusun

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah buku agregat kependudukan semesteran yang tersusun yang pengukurannya didasarkan dengan jumlah buku agregat kependudukan semesteran yang disusun dibagi jumlah buku agregat kependudukan semesteran yang seharusnya disusun.

Pada tahun 2024 jumlah buku agregat kependudukan semesteran yang disusun sejumlah 2, dengan jumlah buku Agregat Kependudukan Semesteran yang seharusnya disusun sejumlah 2, maka persentase jumlah buku yang tersusun sebesar 100%.

D. Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Profil Kependudukan

1. Persentase Jumlah Laporan Perkembangan Kependudukan Semesteran dan tahunan yang tersusun

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah laporan perkembangan kependudukan semesteran dan tahunan yang tersusun pengukurannya di dasarkan pada jumlah laporan perkembangan kependudukan semesteran dan tahunan yang tersusun dibagi jumlah laporan perkembangan kependudukan semesteran dan tahunan yang seharusnya disusun.

Pada tahun 2024 jumlah laporan perkembangan kependudukan semesteran dan tahunan yang tersusun sejumlah 3 dengan jumlah laporan perkembangan kependudukan semesteran dan tahunan yang seharusnya disusun sejumlah 3, maka persentase jumlah laporan perkembangan kependudukan semesteran dan tahunan yang tersusun sebesar 100%.

2. Persentase Jumlah Laporan Profil Kependudukan yang tersusun

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun yang pengukurannya didasarkan dengan jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun dibagi jumlah laporan profil kependudukan yang seharusnya disusun.

Pada tahun 2024 jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun sejumlah 1 dengan jumlah laporan profil kependudukan yang seharusnya disusun sejumlah 1, maka persentase jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun sebesar 100%.

Dari analisa kerja pelayanan tersebut dapat dilihat bahwa capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah mencapai target yang ditetapkan kecuali pada indikator cakupan kepemilikan KTP-el. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :

1. Masih adanya penduduk yang berada di luar negeri;
2. Masih ada sebagian penduduk yang belum melakukan perekaman;
3. Masih berlangsungnya proses konsolidasi;
4. Masih ada sebagian penduduk yang memiliki data ganda;
5. Masih kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Secara rinci pencapaian kerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi capaian		Catatan analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	**Indikator Kinerja Utama PD**											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			83,113	83,114	83,115		89,189	83,114	83,115		
2	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatn Sipil			97,31	97,42	97,49		96,13	97,42	97,49		
II	**Indikator Kinerja Program PD**											
1	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			100	100	100		99,73	100	100		
2	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil			99,75	97,2	97,21		99,74	97,2	97,21		
3	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100	100	100		100	100	100		
4	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Profil Kependudukan			100	100	100		100	100	100		
III	**Indikator Kinerja Kunci PD**											
1			Perekaman KTP Elektronik					99,46				
2			Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiiki KIA					81,71				

3			Kepemilikan akta kelahiran					99,48				
4			Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama					26,83				

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang ada dan proyeksi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat dikemukakan sebagai berikut:

Permasalahan yang ada :

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    a. Tingkat tertib waktu pelaporan pengurusan KTP dan dokumen kependudukan lainnya yang tepat waktu masih belum optimal;
    b. Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga masih belum optimal, terlihat masih banyak terjadi perubahan biodata penduduk dan status kependudukan karena kelahiran, perkawinan, kematian, cerai hidup, cerai mati pindah datang tetapi belum melaporkan;
    c. Tingkat kesadaran penduduk tentang arti pentingnyamemiliki dokumen kependudukan masih belum optimal;
    d. Masih adanya penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP;
    e. Tingkat validitas laporan kependudukan dari Desa/Kelurahan, Kecamatan belum optimal;
2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    a. Database Kependudukan belum seluruhnya akurat dan mutakhir;
    b. Database kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah;
    c. Pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum semuanya bersifat digital;
    d. Belum semua *stakeholders* memanfaatkan data kependudukan;
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
    a. Adanya permasalahan pengurusan akta pencatatan sipil yang bersifat lintas sektoral;
    b. Pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dilakukan dengan Sistem Layanan *Three In One* dan *On-Line*untuk Kelahiran dan kematian;
4. Sekretariat
    a. Terbatasnya ruang/gedung dinas untuk penyelenggaraan program dan kegiatan rutin kantor;
    b. Terbatasnya personil baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menunjang kegiatan bidang-bidang dan sekretariat SKPD;
    c. Tempat ruang khusus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil saat ini belum mencukupi/ representatif dari segi keamanan dan kerahasiaan dokumen pencatatan sipil.

Kondisi Yang diinginkan dan Proyeksi Kedepan

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    a. Tingkat tertib waktu pelaporan pengurusan KTP dan dokumen kependudukan lainnya yang tepat waktu menjadi optimal;
    b. Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga menjadi optimal,dimana setiap terjadi perubahan biodata penduduk dan status

kependudukan karena kelahiran, perkawinan, kematian, cerai hidup, cerai mati pindah datang selalu dilaporkan oleh penduduk;

c. Tingkat kesadaran penduduk tentang arti pentingnyamemiliki dokumen kependudukan menjadi optimal;
d. Semua penduduk wajib KTP-el telah melakukan perekaman KTP-el;
e. Tingkat validitas laporan kependudukan dari Desa/kelurahan, Kecamatan menjadi optimal;

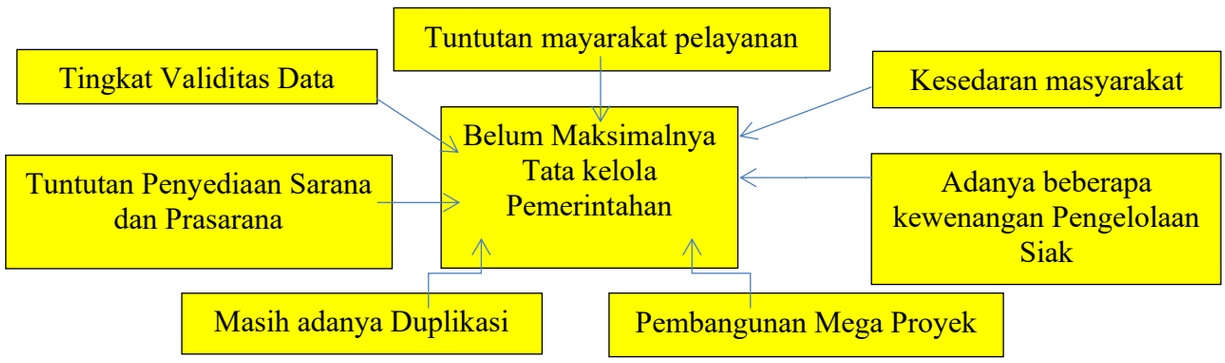
2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   a. Data dan informasi kependudukan akurat dan mutakhir;
   b. Data dan informasi kependudukan dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah;
   c. Pemanfaatan data oleh semua *stakeholders*;
   d. Pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil semuanya dalam format manual dan Digital;
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
   a. Teratasinya permasalahan pengurusan akta pencatatan sipil yang bersifat lintas sektoral;
   b. Peningkatan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dengan Sistem Layanan *Three In One* dan *On-Line*untuk Kelahiran dan kematian
4. Sekretariat
   a. Tersedianya ruang/gedung dinas untuk penyelenggaraan program dan kegiatan rutin kantor yang lebih representatif;
   b. Terpenuhinya personil baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menunjang kegiatan bidang-bidang dan sekretariat OPD;
   c. Tersedianya tempat ruang khusus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang representatif dari segi keamanan dan kerahasiaandokumen pencatatan sipil.

Isu strategis Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 yang ke-4 diantaranya adalah Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah, belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik serta belum optimalnya digitalisasi pelayanan publik sehingga dirumuskan tujuan dan sasarannnya adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian Tujuan tahun 2023- 2026 Pembangunan Daerah misi ke - 4 yakni Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi,yakni :

a. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;
b. Masih adanya duplikasi penggunaan data kependudukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan;

c. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara cepat, murah, mudah, nyaman dan akuntabel;
d. Pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo diprediksikan akan berimplikasi pada pelayanan administrasi kependudukan;
e. Tuntutan penyediaan sarana prasarana pelayanan yang representative;
f. Adanya beberapa kewenangan pengelolaan SIAK yang masih menjadi domain pusat;
g. Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga masih kurang terlihat dari masih banyak terjadi perubahan biodata penduduk dan status kependudukan karena Kelahiran, Perkawinan, Kematian, cerai hidup, cerai mati pindah datang tetapi belum melaporkan.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memiliki wacana dan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Implementasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *Three In One*;
2. Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan SIAK Terpusat;
3. Pembangunan Gedung untuk penyimpanan arsip/dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih representatif;
4. Peningkatan Sarana Prasarana khususnya untuk pelayanan publik kepada masyarakat;
5. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan;
6. Pemutakhiran Data Penduduk pada 12 Kecamatan secara bertahap dan berkelanjutan;
7. Implementasi azas domisili, stelsel aktif dan sistem *on-line* dalam pencatatan sipil;
8. Pembaharuan dan inovasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Melakukan pelayanan keliling/ jemput bola dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
10. Meningkatkan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan dengan melibatkan instansi terkait;
11. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui sosialisasi ke Desa /Kelurahan,media luar ruang, media elektronik, media cetak maupun melakukan kerjasama dengan instansi terkait.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2026

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 dibuat dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo 2026 dan dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029.

Rincian kegiatan yang ada pada Rancangan Renstra tersebut mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 yaitu **"Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, yang Berkelanjutan"**.

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu strategi untuk mendukung dari misi ketiga yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance*, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.**

Adapun hasil analisa kebutuhan program dan kegiatan tersebut secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analsis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6.615.467.948**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.633.906.714**	**-**
2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**6.615.467.948**	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**4.633.906.714**	**-**
1.2.12.01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	**Kabupaten Kulon Progo**	***Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	***100%***	**4.713.769.698**	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	**Kabupaten Kulon Progo**	***Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	***100%***	**3.978.364.464**	**-**
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**33.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**11.470.800**	**-**
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	22.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	9.127.200	**-**
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 laporan	11.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	2.343.600	**-**
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.385.100.561**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.045.904.909**	**-**

2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	616 orang/bulan	3.298.400.561	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	3.000.847.209	-
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASn	12 dokumen	74.700.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASn	1 dokumen	42.010.300	-
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 laporan	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 laporan	3.047.400	-
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**50.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**1 Dokumen**	**3.623.600**	**-**
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang	3.623.600	-
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**58.296.654**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**2 Dokumen**	**33.873.200**	**-**

2.12.01.2.06.0002	-	-	-	-	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.679.200	Hasil pemutakhiran terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	58.296.654	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	18.194.000	-
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**388.080.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**2 Dokumen**	**136.791.400**	-
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kulon Progo	*Jumlah Unit Peralatan Mesin Laiinnya yang disediakan*	*4 unit*	180.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kulon Progo	*Jumlah Unit Peralatan Mesin Laiinnya yang disediakan*	*13 unit*	128.227.800	-
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasara Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	146.080.000	Pengadaan Sarana dan Prasara Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	8.563.600	-
2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kulon Progo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*	1 unit	62.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kulon Progo	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*	1 unit	0	-

2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**413.796.567**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**2 Dokumen**	**576.270.255**	**-**
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumberdaya air dan listrik	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan			Penyediaan jasa Komunikasi ,sumberdaya air dan listrik	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	109.987.944	**-**
2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor`	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 laporan	413.796.567						Hasil pemutakhiran terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
2.12.01.2.08.0004	-	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 laporan	466.282.311	Hasil pemutakhiran terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				385.495.916	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3 dokumen	170.430.300	-
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanagan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinananya	8 unit	45.000.000						Nomenklatur sub kegiatan akan disesuaikan pada tahap KUA-PPAS.
2.12.01.2.09.0004						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	8 unit	61.669.100	Nomenklatur sub kegiatan akan disesuaikan pada tahap KUA-PPAS.
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	17 unit	44.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	17 unit	88.762.400	-
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	296.495.916	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	296.495.916	-

2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	17 unit		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	19 unit	19.998.800	
2.2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**100%**	**1.080.198.250**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**92,20%**	**438.041.100**	**-**
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**				**1.080.198.250**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**			**3 dokumen**	**438.041.100**	**-**
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 dokumen	31.717.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 dokumen	20.156.400	-
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	48.000 dokumen	983.981.250	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	48.000 dokumen	407.625.300	-
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2.303 dokumen	64.500.000	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2.303 laporan	10.259.400	-

3.2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**97,21%**	**448.000.000**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**99,55%**	**109.957.500**	**-**
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**				**240.000.000**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**			**2 Dokumen**	**81.560.400**	**-**
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5.000 dokumen	130.000.000	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5.000 dokumen	32.770.500	**-**
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6.002 layanan	110.000.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5000 layanan	48.789.900	**-**
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**				**208.000.000**	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**			**1 dokumen**	**28.397.100**	**-**
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	135 laporan	208.000.000	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	135 laporan	28.397.100	**-**
4.2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan**	**100%**	**288.500.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Kabupaten Kulon Progo**		**2 Inovasi**	**84.437.800**	**-**

2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**				**100.000.000**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**			**1 dokumen**	**39.752.650**	**-**
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	2 dokumen	100.000.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	2 dokumen	39.752.650	-
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				136.000.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			2 dokumen	31.422.750	-
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah dokumen penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3 dokumen	36.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah dokumen penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3 dokumen	10.159.950	-
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK	3 laporan	100.000.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 laporan	21.262.800	-
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				52.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1 dokumen	13.262.400	-
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait PIAK kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	2 laporan	52.500.000	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait PIAK kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	1 laporan	13.262.400	-

5.2.12.05	**Program Pengelolaan Profil Kependuukan**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100%**	**85.000.000**	**Program Pengelolaan Profil Kependuukan**	**Kabupaten Kulon Progo**	**Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100%**	**23.105.850**	**-**
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependuukan**				**85.000.000**	**Penyusunan Profil Kependuukan**			**1 dokumen**	**23.105.850**	**-**
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 dokumen	85.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 dokumen	23.105.850	**-**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses perencanaan program/ kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo selama ini tidak mengakomodir rencana kegiatan yang diajukan oleh masyarakat dikarenakan pada proses Musrenbang atau proposal kepada Bupati dan pokok pikiran di tingkat Kapanewon karena memang belum ada usulan yang masuk terkait kegiatan di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil dari kalangan masyarakat.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Kulon Progo

Nama SKPD: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	==========	NIHIL====	======	==========	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sampai dengan tahap penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini disusun, Tema Pembangunan Rancangan RKP Tahun 2026 adalah "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**".

Selain merujuk pada Tema Pembangunan RKP tahun 2026, Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 juga memperhatikan tema pembangunan DIY sebagaimana tercantum di dalam Rancangan RKPD DIY tahun 2026, yaitu **"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi".** *Mainstreaming* dari tema tersebut yaitu sektor unggulan: pariwisata, pertanian, industri dan manufaktur. Di samping itu penggunaan teknologi informasi juga menjadi prioritas *mainstreaming*.

Berdasarkan analisis isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di wilayah Kabupaten Kulon Progo ke depan serta memperhatikan Tema Pembangunan pada Rancangan Awal RKP Tahun 2026 dan tema pembangunan DIY Tahun 2026 sebagaimana tercantum di dalam Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2026, maka disepakati untuk Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah:

"Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pengembangan Industri Lokal menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan"

Fondasi Pembangunan, berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sumber daya manusia dan infrastruktur adalah fondasi perekonomian Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2024). Mendasar pada hal tersebut, maka prioritas dari fondasi pembangunan adalah **peningkatan kualitas sumber daya manusia** dan **pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan**.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mengacu pada program nasional tahun 2023-2026 yakni Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas tahun 2023-2026 yakni Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan dan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam skala nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, maka Pemerintah dengan dukungan DPR RI telah memprogramkan 3 (tiga) program strategis nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan KTP elektronik.

Tiga program strategis nasional tersebut merupakan reformasi mandasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan public, peningkatan keamanan Negara dan efektivitas perencanaan pembangunan serta perumusan kebijakan pemerintahan. Dengan program tersebut, maka terbangun pula database kependudukan yang online di Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat.

Melalui akurasi database kependudukan yang berbasis NIK, maka dapat diterbitkan KTP elektronik yang berlaku secara nasional, sehingga tidak diperlukan lagi KTP daerah/ lokal sebagai persyaratan pelayanan publik. KTP elektronik juga mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat karena tidak dapat dipalsu-kan, sehingga dapat membantu meningkatkan keamanan Negara karena secara otomatis akan mempersempit ruang gerak tindakan criminal, teroris, TKI illegal, perdagangan orang dan manipulasi dokumen perbankan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan beberapa perubahan. Pada pasal 79A disebutkan bahwa "*Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya".* Sebagai implikasi dari amanat Undang-undang tersebut maka terhitung mulai tanggal 27 Januari 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menghentikan pemungutan retribusi dari pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.

1) Telaahan terhadap kebijakan Kementrian Dalam Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwasetiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kementerian/ lembaga yang mengurusi kewajiban tersebut di tingkat Pemerintah Pusat adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan meliputi:

a) koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;
b) penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
c) sosialisasi Administrasi Kependudukan;
d) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
e) pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional: dan pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan

2) Telaahan terhadap kebijakan Provinsi

Telaah Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

a) Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/ Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren. Indikator dari sasaran pertama ini yaitu meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan /Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren yang direspon dengan kebijakan. Target tahunan dari sasaran ini bersifat absolut yaitu 100% setiap tahunnya.
b) Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Indikator dari sasaran kedua ini adalah persentase kepemilikan dokumen penting kependudukan. Formulasi penentuan target kinerja sasaran pada tiap tahunnya didapatkan dari rerata cakupan kepemilikan dokumen penting kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Dasar penentuan target kinerja sasaran mempertimbangkan pada target kinerja sasaran baik nasional maupun kabupaten /kota
c) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah. Sasaran ketiga merupakan sasaran yang bersifat mandatory dan harus dicantumkan dalam renstra setiap instansi pemerintah. Indikator dari sasaran ketiga adalah kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan target empat tahun ke depan masuk dalam kategori A atau sangat baik secara berturut-turut.

Dengan demikian, sudah terbangun sinergitas antara program di pemerintah pusat (Kemendagri) dengan pemerintah daerah (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY) dalam upaya peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahandan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan serta misi ketiga Kepala Daerah yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance*, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis**.

Dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah tahun 2025-2029 Kabupaten Kulon Progo, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memiliki program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan daerah yaitu **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik** serta mendukung sasaran daerah yaitu **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel**. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berarti memiliki tanggung jawab dalam tugas pokok dan fungsi mewujudkan tata kelola pelayanan publik dalam pelayanan administrasi kependudukan. Masyarakat juga

dihimbau terkait ketertiban dalam pelaporan peristiwa penting terkait kependudukan dan pencatatan sipil agar segera dilaporkan dengan tertib. Karena sampai dengan saat ini kesadaran masyarakat akan masalah pelaporan peristiwa kependudukan masih kurang optimal, sehingga berakibat pada kepemilikan dokumen kependudukan yang belum memenuhi target.

Untuk tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,90
2		-	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
3		-	Indeks maturitas SPIP	Nilai	3,23
4		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	89,191
5		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nikai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
6		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0

3.3 Program dan Kegiatan

Yang menjadi pertimbangan pengajuan kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2026 ini adalah untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka mendukung tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 yakni **Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pengembangan Industri Lokal menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan**. Urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan hak setiap warga negara.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2026 meliputi 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 4.633.906.714,00. Berikut ini tabel Indikator Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026:

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk memiliki kartu identitas	%	92,20
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk memiliki akta kelahiran	%	99,55
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Inovasi pelayanan	Satuan inovasi	2
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	%	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijkan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 yang selaras dengan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, maka dilaksanakan rencana program dan kegiatan, prioritas daerah, sasaran daerah, indikator kerja, dan pendanaan indikatif.

Untuk mencapai indikator kerja sasaran dan program OPD sesuai dengan urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga didukung program dan kegiatan setiap OPD yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan kerja OPD.

Yang menjadi pertimbangan pengajuan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini adalah untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka mendukung tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 yakni **Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pengembangan Industri Lokal menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan**. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan hak setiap warga negara.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2026 meliputi 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 4.633.906.714,00. Selanjutnya rincian program dan kegiatan, prioritas daerah, sasaran daerah, indikator kerja dan pendanaan indikatif APBD tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**4.633.906.714,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.633.906.714,00**							**0,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**4.633.906.714,00**							**0,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi***	**-**			**100 %**	**3.978.364.464,00**						**-**	**0,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	11.470.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.127.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	2.343.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	3.045.904.909,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	3.000.847.209,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	42.010.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.047.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	3.623.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				56 Orang	3.623.600,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	33.873.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.679.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-				-	18.194.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	136.791.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	128.227.800,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	8.563.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	576.270.255,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	109.987.944,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	466.282.311,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	170.430.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				8 Unit	61.669.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	88.762.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Unit	19.998.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase Penduduk memiliki kartu identitas***	**-**			**92,20 %**	**438.041.100,00**						**-**	**0,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	438.041.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	20.156.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				48000 Dokumen	407.625.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				2303 Laporan	10.259.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Persentase Penduduk memiliki akta kelahiran***	**-**			**99,55 %**	**109.957.500,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	81.560.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				5000 Dokumen	32.770.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5000 Layanan	48.789.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	28.397.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				135 Laporan	28.397.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Inovasi pelayanan***	**-**			**2 Inovasi**	**84.437.800,00**						**-**	**0,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	39.752.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	39.752.650,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	31.422.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				3 Dokumen	10.159.950,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	21.262.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	13.262.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	13.262.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan***	**-**			**100 %**	**23.105.850,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	23.105.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	23.105.850,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H							**4.633.906.714,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen penting yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Dokumen ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tahun 2026. Capaian kinerja yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo belum mencapai hasil yang optimal sehingga diperlukan upaya terus menerus untuk dapat mencapai target yang diharapkan. Selain perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai kebijakan administrasi kependudukan perlu terus dilakukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai administrasi kependudukan. Disamping itu perbaikan dalam hal sarana prasarana maupun mutu SDM juga perlu dilakukan. Peningkatan kinerja mutlak dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan, disamping juga meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terwujud. Mengingat hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rencana Kerja (Renja) ini memuat rencana program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten;
2. Organisasi Perangkat Daerah dan *stakeholders* berkewajiban melaksanakan program - program dalam Rencana Kerja dengan sebaik-baiknya;
3. Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

Untuk rencana tindak lanjut dalam menjawab rekomendasi hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memperkuat pengendalian internal melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendalian dan pelaporan kinerja, melakukan monitoring rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan setiap bulan, serta melaksanakan evaluasi capaian kinerja fisik, keuangan, dan IKU secara triwulanan. Identifikasi terhadap hambatan internal maupun eksternal juga akan dilakukan secara sistematis sebagai dasar penyusunan solusi percepatan kinerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa melalui penyusunan rencana pengadaan secara tepat waktu di awal tahun, memperkuat koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Kabupaten Kulon Progo, serta memanfaatkan sistem e-purchasing dan katalog elektronik lokal untuk meminimalkan keterlambatan.

Optimalisasi capaian kinerja akan dilakukan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi lintas bidang terhadap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja, baik di tingkat OPD maupun dengan Bappeda. Sinkronisasi antara IKU Perangkat Daerah dengan target RPD 2023–2026 juga akan dilakukan melalui penyesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi internal.

Evaluasi terhadap hasil (outcome) kegiatan akan dilakukan secara menyeluruh untuk menilai sejauh mana manfaat dari output kegiatan terhadap masyarakat. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan program dan disertai dengan strategi kolaboratif lintas sektor untuk memaksimalkan pemanfaatan hasil kegiatan, seperti dokumen kependudukan, data statistik, dan layanan jemput bola.

Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini disusun untuk dapat dijadikan acuan bagi segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk diketahui oleh para stakeholder yang berkepentingan.

Wates, 29 Juli 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ir. ASPIYAH, M.Si.

Pembina Utama Muda ; IV/c

NIP. 19680121 199603 2 001

LAMPIRAN

2026

RENCANA KERJA (RENJA)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kulon Progo



KATA PENGANTAR

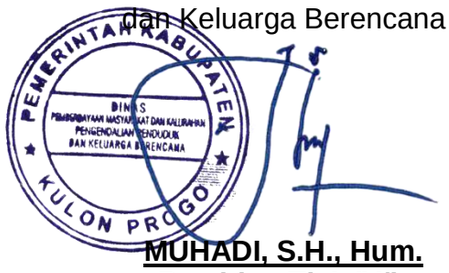
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat disusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Rencana Kerja merupakan suatu landasan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo menyusun Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026.

Adapun nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan dan sasaran dapat diwujudkan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 29 Juli 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Kalurahan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



MUHADI, S.H., Hum.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19720822 199503 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PMKAL DALDUK KB TAHUN LALU (TAHUN 2024) **6**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PMKal Dalduk KB 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB 31

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PMKal Dalduk KB 33

2.4 Review terhadap Ranwal RKPD 2026 35

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 43

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PMKAL DALDUK KB **45**

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 45

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMKal Dalduk KB 45

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **49**

BAB V PENUTUP **74**

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	6
Tabel	2.2	Pengukuran Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	8
Tabel	2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	11
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB.....	31
Tabel	2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	35
Tabel	2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026.....	43
Tabel	3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas PMKal Dalduk dan KB 2026.....	45
Tabel	3.2	Indikator Kinerja Progam Dinas PMKal Dalduk KB Tahun 2026.....	47
Tabel	4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kulon Progo Tahun 2026….....	51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunnan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan RPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, Renja Kementerian dalam Negeri, serta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dan BKKBN.

Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Pembangunuan (RKPD) Tahun 2026, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeah (RPJMD) 2025-2029 dan berdasar Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 serta tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Tahun 2026 merupakan tahun ke-4 (terakhir) perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada RPD 2023-2026.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelakasanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali terahir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasaan Urusan Keistimewaan;

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Gubernur Nomor 52 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas.
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023- 2026;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023-2026;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo adalah untuk :

a. Menjabarkan rencana strategis tahun 2025- 2029 ke dalam rencana operasional;

b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
d. Menyediakan informasi pemenuhan laporam evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pentingnya penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai bagian dari siklus perencanaan tahunan, untuk menjamin program dan kegiatan selaras dengan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029, Rancangan Renstra Dinas PMKal Dalduk KB Tahun 2025-2029, serta RKPD tahun 2026

1.2 Landasan Hukum

Merinci dasar hukum yang mendasari penyusunan Renja 2026 Dinas PMKal Dalduk KB

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan disusunnya Renja 2026 Dinas PMKal Dalduk KB

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan susunan isi dokumen mulai dari pendahuluan, hasil evaluasi tahun sebelumnya, hingga rencana program/kegiatan tahun 2026

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Mengulas realisasi program/kegiatan tahun 2024: capaian indikator kinerja, tingkat serapan anggaran, dan dampaknya terhadap target Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menilai kualitas dan efektivitas pelayanan publik yang telah diberikan tahun 2024, termasuk inovasi pelayanan dan hambatan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan strategis dan tantangan internal/eksternal yang memengaruhi pencapaian kinerja perangkat daerah

2.4. Review terhadap RKPD

Menilai kesesuaian pelaksanaan Renja 2024 dengan RKPD 2024, dan melihat arahan RKPD 2026 sebagai acuan penyusunan Renja 2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengkaji aspirasi masyarakat (dari Musrenbang, pokir, dsb.) untuk memastikan program/kegiatan yang diusulkan relevan, prioritas, dan mendukung visi pembangunan daerah

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan garis besar mengenai program dan kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KULON PROGO TAHUN LALU (TAHUN 2024)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo mendukung pencapaian sasaran nomor 4 "**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat"** dan sasaran nomor 10 **"Meningkatnya kualitas penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel."**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas, dinas melaksanakan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 melaksanakan 8 program dan 14 kegiatan terdiri dari 1 program dengan 5 kegiatan pendukung, 2 program dengan 2 kegiatan keistimewaan, serta 5 program dengan 7 kegiatan utama.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka harapan hidup	Capaian Ketahanan Keluarga	47,25%	62,10%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi
	masyarakat				
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Capaian Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	92,96%	97,80%
		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100%	45,45%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.1 menggambarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024, beserta indikator kinerja, target yang direncanakan, dan realisasi capaian yang telah diperoleh.

Tujuan pertama adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran berupa peningkatan angka harapan hidup. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Capaian Ketahanan Keluarga, dengan target sebesar 47,25%. Realisasi capaian pada tahun berjalan menunjukkan hasil sebesar 62,10%, yang berarti target telah terlampaui secara signifikan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan dalam ketahanan keluarga yang berdampak positif terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan kedua adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel, yang terdiri dari dua sasaran.
Sasaran pertama yaitu peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, diukur melalui indikator Capaian Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Target capaian untuk indikator ini adalah 92,96%, dengan realisasi sebesar 97,80%. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan pemerintahan desa telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan.

Sasaran kedua adalah meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah, yang diukur melalui indikator Persentase pencapaian program

pada masing-masing perangkat daerah. Target yang ditetapkan adalah 100%, namun realisasi capaian hanya mencapai 45,45%. Realisasi yang masih jauh dari target ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program di lingkup perangkat daerah, yang memerlukan evaluasi lebih lanjut serta strategi perbaikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal di masa mendatang.

Secara keseluruhan, capaian indikator menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran strategis telah terlaksana dengan baik, meskipun terdapat beberapa aspek yang masih perlu mendapat perhatian khusus untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penguatan Kelembagaan Desa	75,02%	75,13%
		Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	84,74%	89,27%
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	70,88%	100%
3.	Progam Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,90	0,64
		Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate/TFR)*	1,90	1,98
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun *(Age Spesific Fertility Rate/ASFR)*	3,65	2,58
4.	Program Keluarga Berencana	Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana	50,20%	56,47%
		Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK	48,48%	69,32%

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
5.	Program Pemberdayaandan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	28,23%	30,36%
6.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kalurahan yang menerapkan kelmbagaan asli	59,48%	58,33%
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	42,53%	37,93%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.2 menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada masing-masing program, dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian.

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa menunjukkan hasil yang baik, dengan capaian indikator Persentase Penguatan Kelembagaan Desa sebesar 75,13%, sedikit melampaui target sebesar 75,02%. Sementara itu, indikator Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa terealisasi sebesar 89,27% dari target 84,74%.
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat menunjukkan kinerja yang sangat baik. Indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan mencapai 100%, melampaui target sebesar 70,88%.
3. Pada Program Pengendalian Penduduk, indikator yang diukur meliputi:
   a. Laju Pertumbuhan Penduduk menunjukkan realisasi 0,64, lebih rendah dari target 0,90.

b. Angka Kelahiran Total (TFR) terealisasi sebesar 1,98, sedikit di atas target 1,90.
c. Angka Kelahiran Remaja Usia 15–19 Tahun (ASFR) mencapai 2,58, lebih rendah dari target 3,65.

4. Program Keluarga Berencana menunjukkan capaian yang cukup baik. Indikator Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana mencapai 56,47% dari target 50,20%, sedangkan Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK terealisasi sebesar 69,32%, jauh di atas target 48,48%.
5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) juga menunjukkan peningkatan, dengan capaian 30,36%, sedikit melebihi target sebesar 28,23%.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berhasil mencapai target secara penuh, yaitu 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.
7. Pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, indikator Persentase Kalurahan yang Menerapkan Kelembagaan Asli terealisasi sebesar 58,33%, sedikit di bawah target sebesar 59,48%.
8. Terakhir, pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, indikator Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten mencapai 37,93%, belum memenuhi target sebesar 42,53%.

Secara umum, sebagian besar program menunjukkan capaian kinerja yang positif dengan beberapa indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa program yang perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pada tahun-tahun mendatang, khususnya pada program-program yang belum mencapai target kinerja yang diharapkan.

Jumlah anggaran kegiatan tahun 2024 : Rp 14.286.465.833,00
Jumlah realisasi anggaran kegiatan tahun 2024 : Rp 13.739.184.657,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 2.3

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS PMKAL DALDUK DAN KB

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**																
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**13.395,89**	**100**	**308.121,53**	**100**	**3.390,14**	**100**	**3.266,17**	**100**	**96,3**	**100,00**	**706,13**	**37,10**	**308.930,28**	**37,10**	**2.306,16**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														-		

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	26,97	4	502,06	2	3,31	2	3,06	100	92,4	4	17,71	4	502,06		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	47,47	24	1.087,30	12	6,70	12	6,30	100	94,0	21	55,45	29	1.087,30		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												4,12		-		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	149	13.180,24	25	252.842,30	13	2.787,22	13	2.707,30	100	99,4	14	17,71	29	253.592,34		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	320,79	24	5.980,83	12	55,45	12	52,83	100	95,27	12	55,45	27	5.980,83		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	23,42	4	16,11	2	9,88	2	7,75	100	78,44	2	4,12	4	16,11		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														-		

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	129,41	24	2.796,39	12	27,98	12	22,39	100	80,02	12	17,71	26	2.796,39		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan pengadaan Peralatan dan Mesin																
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														-		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	-	-	24	10.145,08	12	122,05	12	110,08	100	90,16	12	121,09	26	10.168,57		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	48	952,75	24	1.767,13	12	20,61	12	18,13	100	87,97	12	19,01	26	1.767,23		

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
		disediakan																
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-	-	24	17.744,51	12	188,35	12	187,51	100	99,46	12	187,09	26	17.779,30		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi														-		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	282	664,98	141	14.089,16	69	134,54	69	131,16	100	97,76	69	125,05	143	14.089,35		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0,00	69	134,54	69	131,16	100		12	-		-		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah laporan pemeliharaan	148	-	69	1.150,66	12	20,06	12	19,66	100	98,00	12	20,18	71	1.150,81		

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	**Rata-rata Ketercapaian**																
		Persentase Penguatan Kelembagaan Desa	**76,43**	**9.144,95**	**55,87**	**4.052,84**	**75,02**	**2.319,14**	**75,02**	**2.319,14**	**55,87**	**2.027,95**	**0,74**	**2.088,57**	**0,47**	**4.493,07**	**0,61**	**49,13**
		Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	**89,62**		**62,02**	**0,00**	**89,89**		**89,89**		**62,02**		**0,87**		**0,20**	**-**	**0,23**	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	348	285,20	174	84,72	87	34,12	87	32,82	100	96,19	87	26,37	174	84,72		
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	348	219,60	174	38,65	87	19,55	87	18,94	100	96,88	87	17,21	174	38,65		

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	348	6.732,40	174	3.299,33	87	1.945,08	87	1.708,59	100	87,81	87	1.824,23	174	3.730,11		
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	348	411,80	174	105,29	87	55,05	87	37,24	100	67,6	87	24,18	202	105,29		
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	160	324,60	44	80,70	4	32,89	4	28,80	100	87,8	4	15,35	44	80,70		
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	8	571,90	3	212,36	1	108,66	1	90,89	100	83,64	1	64,74	3	220,09		
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	348	179,80	174	66,64	87	35,11	87	25,65	100	73,05	87	26,74	174	66,64		
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	52	367,90	26	165,15	13	88,68	13	85,01	100	96,5	13	89,74	26	166,87		
	Program Pemberdayaan	**Persentase peningkatan pemberdayaan Lembaga**	**74,71**	**4.528,59**	**100**	**4.084,11**	**100**	**1.156,62**	**100**	**1.143,13**	**100**	**98,87**	**0,73**	**1.121,72**	**1,00**	**4.467,67**	**1,34**	**98,65**

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	**Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat**																
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatanyang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota															-		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	12	396,37	6	1.540,94	3	298,59	3	293,75	100	98,37	3	274,98	7	1.742,00		

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
	RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Adat Desa/Kelurahandan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya																
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	64	3.210,82	32	2.543,16	16	858,03	16	849,38	100	98,99	16	846,74	33	2.725,66		
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaran Gerakan Pemberdayaann Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0	910,00	0	0,00		-	0	-	0	0	0	-	0	-		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		0			0,00			**0,7**	**283,14**						-		
	Program Pengendalian	**Rata-rata Ketercapaian**							**1,27**									

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
	Penduduk																	
		Indeks laju pertumbuhan penduduk	**1**	**212,32**	**0,7**	**573,95**	**0,9**	**288,73**	**0,7**	**283,14**	**77.7**	**98,06**	**1,00**	**422,56**	**0,64**	**598,34**	**64,05**	**281,81**
		Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	**2,1**		**1,27**	**0,00**	**1,9**		**1,27**		**66,8**		**2,00**		**1,22**	**-**	**58,10**	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR)	**3,29**		**2,97**	**0,00**	**3,65**		**2,97**		**122,8**		**3,36**		**2,58**	**-**	**78,50**	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															-		
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	4	73,50	3	249,79	1	134,85	1	131,16	100	97,26	1	136,56	3	254,79		
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	-	-	2	187,15	1	115,20	1	115,15	100	100	1	144,00	2	199,13		
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan	-	-	24	73,06	12	38,68	12	36,83	100	100	12	34,00	26	80,46		

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
	Pelaporan Program Bangga Kencana	pengawasan program Bangga Kencana																
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraaan Sistem Informasi Keluarga	-	-		63,95			**54,05**	**3.478,46**			1	108,00		63,95		
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**Rata-rata Ketercapaian**							**46,41**									
		Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana	**51,18**	**20.713,72**	**54,05**	**7.061,39**	**56,25**	**3.512,87**	**54,05**	**3.478,46**	**54,05**		**0,51**	**6.921,20**	**0,57**	**7.298,70**	**1,11**	**35,24**
		Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK	**51,4**		**46,41**	**0,00**	**68,89**		**46,41**		**46,41**		**0,50**		**0,70**	**-**	**1,37**	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal															-		
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program	-	-	2	219,36	1	140,00	1	139,65	100	99,75	0	-	2	219,36		

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
		KKBPK																
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	-	-	2	1.084,23	1	509,80	1	507,74	100	99,59	1	586,80	2	1.160,13		
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-	2	333,39	1	177,60	1	177,51	100	100	1	240,00	2	357,38		
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Mefia Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang lainnya	-	-	2	297,83	1	150,00	1	148,40	100	98.6	1	110,00	2	297,83		

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana kepaa stakehorder dan Mkitra Kerja	-	-	7	602,25	1	449,44	1	440,36	100	97,99	6	286,12	7	602,25		
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal yang dilaksanakan	24	4.669,42		0,00							2	15,00		-		
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)															-		
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader IMP	-	-	264	440,00	176	264,00	176	264,00	100	100	88	264,00	352	466,40		
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan Kader IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga	-	-		161,89			1	37,86			0	-		161,89		

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
		Berencana) di lini Lapangan oleh PKB/PLKB																
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana							3394	1.196,68	100		1	1.768,27				
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota															-		
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan	-	-	2	75,66	1	42,33	1	37,86	100		1	45,00	2	77,71		

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
	Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	-	6773	2.724,90	3394	1.206,74	3394	1.196,68	100	99,16	4396	3.128,29	7.546	2.815,33		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	48	218,08	13	85,94	1	41,75	1	41,39	100	100	1	31,62	13	93,00		
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	4	15.780,05	2	189,28	1	112,87	1	107,38	100	95,5	1	96,77	2	200,76		

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
		dan Jejaringnya																
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB															-		
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	8	46,08	3	24,72	1	6,40	1	6,33	100	100	1	7,73	3	24,72		
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	-	-	2	12,71	1	3,77	1	3,77	100	100	0	-	2	12,71		
	Pelaksanaan dan	Jumlah kampung KB yang	-	-	114	809,23	88	408,17	88	407,41	100	99,98	61	341,60	114	809,23		

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
	Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana																
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**28,73**	**439,10**	**24,05**	**3.665,87**			**4**	**50,79**			**0,28**	**2.269,40**	**0,28**	**3.717,55**	**0,98**	**846,63**
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga															-		
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan usia seeta pengelolaan keuangan Keluarga)	4	703,49	2	122,05	1	80,55	1	80,21	100	100	1	39,66	2	122,05		

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	4	703,49	5	107,10	4	50,87	4	50,79	100	100	1	492,34	5	158,78		
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	45	551,65	25	300,00	25	299,96	25	99,99	10	130,00	45	551,65		
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (Kader)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Lesejateraan Keluarga				1.442,70			88	755,70			0	-		1.442,70		

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
	Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(BKB. BKR, BKL, PPKS PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS sebanyak 16 orang																
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Ketahanan keluarga melalui PPKS							**37,93**	**378,01**			1	96,00				
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														0	-		
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja	Jumlah Cakupan Pemantauan data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting	0	0,00	88	686,67	88	687,00	88	686,67	100	99,99	1	824,40	88	686,67		

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
	Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	(Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapatkan pendampingan	0	0,00	88	755,70	88	755,70	88	755,70	100	100	1	687,00	88	755,70		
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	**Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten**	**65,52**	**1.875,00**	**37,93**	**674,55**	**42,53**	**382,72**	**37,93**	**378,01**		**98,95**	**0,54**	**237,76**	**0,38**	**674,55**	**0,58**	**35,98**
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten															-		
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka	0	0,00	1	674,55	1	382,72	1	378,01	100	98,95	2	237,76	1	674,55		

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs) Sub kegiatan	Terget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Keigatan (Renja Perankat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp. juta	K	Rp. juta	K	Rp.	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
		Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat																
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase kalurahan yang menerapkan kelembagaan asli**	**91,67**	**4.984,41**	**58,33**	**2.394,43**	**59,48**	**1.285,22**	**58,33**	**1.276,85**	**59,48**	**99,29**	**0,76**	**269,21**	**0,00**	**2.394,43**	**0,00**	**48,04**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan															-		
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	54	0,00	20	2.394,43	2	1.285,22	2	1.276,85	100	99,29	2	269,21	20	2.394,43		

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari faktor pendorong yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, peran kader pembangunan masyarakat di desa/kalurahan, serta peran penyuluh keluarga berencana di lini lapangan. Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah adalah terbatasnya anggaran daerah.

Tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo antara lain:

1. Melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal;
2. Melakukan koordinasi dan optimalisasi capaian kinerja tujuan, sasaran daerah, IKU Perangkat Daerah, serta program untuk mendukung pencapaian target di tahun 2025;
3. Melakukan evaluasi hasil *(outcome)* dari kegiatan/ subkegiatan yang telah dilaksanakan serta bisa berkolaborasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan output kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan dampak manfaatnya bagi masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMKal Dalduk KB

No.	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Capaian Ketahanan Keluarga			47,25%	48,16%	49,07%		62,10%	48,16%	-		
2	TFR		v	-	-	-		1,98	-	-		
3	ASFR		v	-	-	-		2,58	-	-		
4	LPP		v	-	-	-		0,64	-	-		
5	MCPR		v	-	-	-		68,24%	-	-		
6	Unmet Need		v	-	-	-		8,57%	-	-		
7	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern		v	-	-	-		68,24%	-	-		
8	Capaian Pembinaan Penyelengga			92,96%	95,27%	98,34%		97,80%	95,27%	-		

No.	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	raan Pemerintahan Desa											
9	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri		v	-	-	-		57,14%	-	-		

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan data realisasi capaian tahun 2024, terlihat bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo menunjukkan kinerja yang cukup signifikan.

Indikator Capaian Ketahanan Keluarga menunjukkan hasil yang bagus. Dengan target sebesar 47,25% pada tahun 2024, realisasi capaian justru melampaui target hingga mencapai 62,10%. Ini menggambarkan bahwa upaya peningkatan ketahanan keluarga melalui program-program penguatan peran keluarga dan ketahanan sosial berjalan dengan baik.

Pada indikator Total Fertility Rate (TFR) dan Age Specific Fertility Rate (ASFR), masing-masing tercatat sebesar 1,22 dan 2,58. Nilai TFR di Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 berada pada angka 1,22. Dengan demikian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kulon Progo masih belum seimbang. Tahun 2024 angka ASFR di Kabupaten Kulon Progo sebesar 2,58.Untuk menjaga kualitas penduduk agar lebih baik lagi maka angka ASFR ini perlu ditekan serendah mungkin dengan banyak memberikan Advokasi dan KIE kepada generasi muda tentang pengetahuan kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

Sementara itu, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 0,64 *dan Modern Contraceptive Prevalence Rat*e (MCPR) sebesar 68,24%. Keberadaan unmetneed di Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 sudah menurun bila dilihat dari komposisinya didominasi pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi. Capaian Unmetneed Tahun 2024 8,57%. Hal ini menunjukkan pelayanan KB yang lebih baik. Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan jumlah unmet need diawali dengan melakukan update data jumlah PUS *by name by address* kemudian melakukan pemetaan pelayanan, melakukan KIE dan selanjutnya memberikan layanan KB melalui kegiatan bakti sosial reguler yang dilakukan secara rutin terstruktur dan dengan target yang pasti.

Pada indikator Capaian Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terlihat capaian yang baik. Target sebesar 92,98% di tahun 2024 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 97,80%.

Terakhir, indikator Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri menunjukkan capaian sebesar 57,14%. Capaian ini sudah menunjukkan tren positif dan dapat ditingkatkan melalui program pemberdayaan desa dan pendampingan pembangunan berbasis potensi lokal.

Secara umum, kinerja dinas sudah baik, dengan 2 indikator kinerja utama yang telah melampaui target. Proyeksi untuk tahun-tahun mendatang juga perlu dipastikan berbasis pada capaian aktual dan memperhatikan dinamika di lapangan agar target yang ditetapkan tetap realistis dan terukur.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PMKal Dalduk KB

Dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo menghadapi kendala dan permasalahan antara lain:

1. Kualitas penduduk dan pengendalian kuantitasnya masih perlu ditingkatkan.
   Hal itu berdasarkan pada gambaran permasalahan :
   - Pertumbuhan penduduk tidak seimbang dilihat dari TFR yang jauh dari nilai 2.1. Artinya bahwa rata rata jumlah anak dalam keluarga kurang dari 2, perkembangan generasi kedepan pertumbuhannya kurang seimbang
   - Kelahiran remaja dibawah usia 19 tahun semakin menurun dan terkendali perlu dipertahankan
2. Tingkat Penguatan kelembagaan desa masih lemah disimpulkan dari analisis permasalahan sebagai berikut :
   - Lembaga ekonomi desa perannya belum optimal dalam perekonomian desa (data tahun 2024 menunjukkan bahwa Bumdes dalam kondisi baik ada sebanyak 56 Bumdes dari 87 Bumdes).
3. Belum optimalnya kinerja pemerintah desa disimpulkan dari analisis permasalahan sebagai berikut :
   - Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pemerintahan desa yang harus segera dilaksanakan sedangkan kesiapan perangkat desa kurang.

Sesuai dengan fungsi dan tugas urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo mencakup lingkup yang luas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemberdayaan pemerintahan desa, kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mendatang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo menghadapi tantangan sebagai berikut:

- Pelaksanaan program KB semakin berat tantangannya karena kesadaran masyarakat untuk ber-KB masih rendah (8 fungsi keluarga, terlebih reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan kurang dipahami).
- Lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan di desa belum dioptimalkan perannya dalam pembangunan desa sementara itu dana pembangunan di desa semakin besar.

Adapun peluang dalam menjalankan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo tahun mendatang :

- Banyak terdapat lembaga di masyarakat yang bisa disasar program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
- Adanya kemauan dari masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berupa usulan program pemberdayaan.
- Tambahan dana pembangunan desa melalui peningkatan Dana Desa.

Hasil analisis perkembangan dan masalah pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana keluarga sejahtera selanjutnya dipadukan dengan tugas dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, maka isu isu strategis yang dapat dirumuskan dan akan ditindaklanjuti dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

- Ketahanan keluarga perlu ditingkatkan dengan peningkatan pembinaan kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, BKL, PIK Remaja) dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKS dan KAKB.
- Program-program pemberdayaan masyarakat bertujuan agar dapat menurunkan angka kemiskinan.
- Peran lembaga ekonomi dan masyarakat desa masih perlu ditingkatkan.
- Perubahan regulasi pemerintahan desa yang dinamis dan SDM perangkat desa sebagian besar masih rendah perlu pembinaan dan pendampingan.

2.4. Review terhadap Ranwal RKPD 2026

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		**Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**		**Persentase garis batas kalurahan yang tersinkronisasi**	**76,14%**		
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		*umlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat*			*Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*		*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*1 dokumen*		
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	1 dokumen	-	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat*	2 dokumen	182.765.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Rata-rata Prosentase Pencapaian program pada massing masing perangkat daerah**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi***	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat*			*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*2 dokumen*		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	6.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	12.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	6.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi keuangan*			*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*3 dokumen*		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua	umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	2.900.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	40 orang/bulan	3.118.397.351	

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kecamatan, Semua Kel/Desa					n, Semua Kel/Desa	Tunjangan ASN			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	umlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	55.447.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	35.747.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	2 laporan	9.884.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	14 laporan	3.002.200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*			*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*2 dokumen*		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	15.320.200	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	35.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	15.052.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Jumlah Laporan penyelenggaraan administrasi umum*			*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*2 dokumen*		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	116.274.602	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	121.217.780	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	20.607.200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	188.352.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	134.397.808	

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah					*Pengadaan Barang Milik Daerah*		-	-		
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laptop	5 unit	55.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	-	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah Pemeliharaan bangunan gedung Kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa perkantoran Jumlah barang milih daerah yang dipelihara*			*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*2 dokumen*		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah barang milih daerah yang dipelihara	68 unit	134.542.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 unit	100.483.900	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemeliharaan bangunan gedung Kantor Penggantian papan nama dinas	1 unit 3 unit	225.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	-	-	-	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan jasa perkantoran Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	10 unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	17.371.400	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		**Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase penguatan kelembagaan desa**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase BUMDes Kategori Maju Persentase Kalurahan kategori TDD**	**20,69 % 48,28 %**		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa*			*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*		*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*8 dokumen*		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	87 dokumen	34.117.800	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	25.092.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kel/Desa									
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	87 dokumen	23.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	87 dokumen	14.809.500	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	87 dokumen	1.806.087.940	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	87 dokumen	1.788.806.044	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	87 dokumen	55.046.800	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	87 dokumen	20.036.900	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 laporan	51.822.700	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 laporan	18.085.400	
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 dokumen	108.662.300	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 dokumen	33.136.100	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	87 dokumen	35.107.900	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	87 dokumen	20.841.800	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 dokumen	88.680.300	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	72.375.600	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		**Persentase peningkatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		***Persentase Swadaya Masyarakat dalam Program TMMD dan Karya Bakti***	**14%**		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan		*Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa*			*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan*		*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*2 dokumen*		

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					*Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*					
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 lembaga	298.588.400	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	2.997.196.600	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	16 laporan	1.666.230.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	16 Laporan	1.685.551.100	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		**Indeks Laju Pertumbuhan Penduduk Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Angka Kelahiran Remaja umur 15- 19 tahun (Age Spesific Fertility Rate(ASFR)**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**Persentase Rumah Data Kependudukan di kampung KB**	**82,95%**		
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk*			*Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*		*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*2 dokumen*		
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	35.000.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	25.360.500	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	12 laporan	42.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 laporan	48.458.700	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA		**Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**		**Persentase Unmeet Need Persentase Pemakaian Alat**	**14,55 % 60,10 %**		

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(KB)		**Berencana Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK**			**(KB)**		**Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)**			
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		*Jumlah Laporan advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK*			*Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal*		*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*1 dokumen*		
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 organisasi	230.000.000	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 organisasi	60.505.700	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Laporan Hasil Pelayanan KB*			*Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*		*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*2 dokumen*		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 dokumen	41.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 dokumen	32.823.600	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	200.600.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	61.800.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		*Jumlah Organisasi yang berperan serta dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB*			*Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*		-	-		

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 organisasi	20.000.000	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	-	0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		**Persentase Peningkatan Pemberdayaaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**Persentase Peningkatan Keluarga yang Terlayani Konseling Keluarga Sejahtera**	**6,57 %**		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		*Jumlah Laporan Pembinan Ketahanan Keluarga*			*Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*		*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*1 dokumen*		
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 laporan		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	-	-	-	0	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 laporan	52.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 laporan	77.276.500	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*1 dokumen*		
	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata		-	0	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan	1 laporan	7.314.800	

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	n, Semua Kel/Desa				Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Semua Kel/Desa	dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		**Prosentase kalurahan yang menerapkan kelembagaan asli**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase Kalurahan dengan Aparatur Pemerintah Kalurahan yang Profesional**	**11,49 %**		
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		*Jumlah Laporan Hasil Penataan kelembagaan dan katatalaksanaan keistimeawaan*			*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*		*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*1 dokumen*		
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen		Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	1 lembaga	269.210.000	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo telah melakukan telaah dan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Review ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab perencanaan strategis tahunan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, nasional, serta pencapaian target RPJMD.

Secara umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo memandang bahwa arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 telah sejalan dengan tugas dan fungsi dinas.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Salamrejo, Sentolo	Rabat beton	Rp. 182.500.000	TMMD Sengkuyung Tahap I
		Sidorejo, Lendah	Rabat beton	Rp. 1.000.000.000	TMMD Reguler
		Kalirejo, Kokap	Rabat beton	Rp. 182.500.000	TMMD Sengkuyung Tahap III
		Jatimulyo, Girimulyo	Rabat beton	Rp. 182.500.000	TMMD Sengkuyung Tahap IV
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten	Hibah untuk operasional Kegiatan TP PKK Kabupaten	Rp. 200.000.000	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan telah melakukan penelaahan terhadap usulan kegiatan masyarakat yang disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun melalui kanal aspirasi lainnya. Salah satu bentuk fasilitasi yang diusulkan dan telah terakomodir adalah program Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), yang bertujuan untuk memperkuat semangat gotong royong dan meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan melalui kerja bakti masyarakat.

Berdasarkan hasil penelaahan, usulan masyarakat yang terfokus pada pembangunan rabat beton telah diterima dan telah diverifikasi ke lapangan, direncanakan untuk dilaksanakan di beberapa lokasi strategis sebagai berikut:

1. Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo

   Kegiatan rabat beton dengan alokasi anggaran sebesar Rp182.500.000, direncanakan sebagai bagian dari TMMD Sengkuyung Tahap I.
2. Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah

   Lokasi ini mendapatkan alokasi terbesar sebesar Rp1.000.000.000 untuk rabat beton dalam rangka TMMD Reguler, mengingat kebutuhan pembangunan akses jalan yang lebih besar dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar.

3. Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap

   Kegiatan rabat beton senilai Rp182.500.000 akan dilaksanakan pada TMMD Sengkuyung Tahap III, sesuai dengan urutan prioritas dan kesiapan teknis.

4. Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo

   Usulan masyarakat untuk rabat beton telah difasilitasi dengan besaran Rp182.500.000, yang akan diimplementasikan dalam TMMD Sengkuyung Tahap IV.

Dari penelaahan ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh usulan masyarakat yang bersifat teknis, relevan dengan kebutuhan dasar infrastruktur, dan telah memenuhi syarat kelayakan teknis serta administratif, telah diakomodir dalam rencana kegiatan BBGRM yang berkolaborasi dengan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Pelibatan TMMD tidak hanya mempercepat pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat pertahanan dalam mendukung pembangunan desa.

Dinas akan terus memantau pelaksanaan kegiatan ini agar tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan gotong royong.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS PMKAL DALDUK KB

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini telah selaras dengan kebijakan pemerintah sesuai dengan bidang tugas yang diberikan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMKal Dalduk KB

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas PMKal Dalduk dan KB 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel serta derajat kesehatan masyarakat		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	nilai	A (85,3)
			Indeks Maturitas SPIP	nilai	3,23
			Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	75,58-79,83
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase Desa (Kalurahan) Mandiri	%	89,66
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat daerah	nilai	A (>80-90)
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP perangkat daerah	nilai	2,0-3,0
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate/TFR)*	angka	2,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan arah kebijakan dan rencana kerja tahun 2026 yang berfokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam empat sasaran utama yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target yang terukur, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel

   Untuk mendukung otonomi desa dan penguatan kapasitas kelembagaan kalurahan, ditetapkan indikator persentase Desa (Kalurahan) Mandiri dengan satuan persen dan target sebesar 89,66%. Target ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong peningkatan status desa menuju kemandirian melalui program pemberdayaan dan pendampingan yang berkelanjutan.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

   Guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, digunakan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target nilai A (85,3). Nilai ini mencerminkan kesungguhan perangkat daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara konsisten dan berbasis data.
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah

   Sebagai bentuk penguatan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mitigasi risiko dan pencegahan penyimpangan, digunakan Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan target nilai 3,231. Peningkatan nilai SPIP menjadi tolok ukur bahwa perangkat daerah telah menjalankan fungsi pengawasan internal secara memadai dan sistematis.
4. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga

   Sasaran ini diukur melalui indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dengan satuan angka dan target sebesar 2,00 pada tahun 2026. Target ini ditetapkan sebagai bagian dari strategi pengendalian penduduk yang sejalan dengan kebijakan nasional dalam mewujudkan keluarga berkualitas serta mendukung bonus demografi yang produktif dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, indikator dan target yang ditetapkan dalam rencana kerja ini telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta prioritas daerah. Dinas PMKal Dalduk dan KB berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara efektif dan efisien guna mendukung pencapaian target yang telah ditentukan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kulon Progo.

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Progam Dinas PMKal Dalduk KB Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Rumah Data Kependudukan di kampung KB	%	82,95
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian alat kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	%	60,10
		Persentase unmet need	%	14,55
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Peningkatan Keluarga yang terlayani konseling keluarga sejahtera	%	6,57
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kalurahan kategori TDD	%	48,28
		Persentase BUMDes kategori Maju	%	20,69
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Swadaya masyarakat dalam program TMMD dan Karya Bakti	%	14
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase garis batas kalurahan yang tersinkronisasi	%	76,14
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	%	11,49

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja dan hasil, Dinas PMKal Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo menetapkan sejumlah indikator program yang menjadi prioritas untuk tahun 2026. Indikator-indikator tersebut bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program, serta menjadi dasar dalam evaluasi dan pengambilan kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
   a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
   a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengendalian Penduduk
   a. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
   a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
   b. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
   a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
   a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
    a. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Untuk mendukung pencapaian pelaksanaan tugas dan kegiatan tersebut perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Beberapa sarana parasarana dinas yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo kurang dan sebagian sudah menurun fungsinya karena sudah lama usianya. Kondisi sarana prasarana tersebut adalah sebagai berikut:

- Gedung bidang KB yang terletak di Jl. Sugiman luasnya 350 m^2 hanya bisa digunakan oleh 1 bidang KB dengan jumlah orang 9 orang dan ruang rapat saja hal ini dikarenakan penataannya yang kurang optimal serta bentuk bangunan yang hanya tambal sulam (Ruang rapat disekat dengan lemari). Kebutuhan ruangan sangat besar karena jumlah pegawai banyak dan dokumen dokumen juga banyak.
- Tempat parkir sepeda motor perlu atap karena durasi parkir pegawai dan tamu-tamu yang lama supaya terlindung dari panas dan hujan.
- Laptop untuk pengganti laptop perencanaan (2014) dan laptop pengurus barang (2014) laptop Kepala Bidang 4 Unit (2017) sudah tidak layak lagi.
- Kendaraan dinas roda 2 tidak mencukupi, sehingga masih meminjam kendaraan operasional penyuluh KB selama PKB tidak menggunakan karena personil belum terisi.

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 yang dibiayai dari APBD II, APBD I dan APBN disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

TABEL 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KULON PROGO TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**11.011.435.483,00**							**11.664.017.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.742.225.483,00**							**11.464.017.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**182.765.000,00**							**183.400.000,00**	
1.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	***Persentase garis batas kalurahan yang tersinkronisasi***	**-**			**76,14 %**	**182.765.000,00**						**-**	**183.400.000,00**	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			1 dokumen	182.765.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	183.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				2 Dokumen	182.765.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		183.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**10.245.920.683,00**							**10.812.028.400,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi***	**-**			**100 %**	**3.569.989.639,00**						**-**	**3.594.687.000,00**	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		7.127.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			3 dokumen	3.157.146.551,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	3.546.660.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	3.118.397.351,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.543.210.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	35.747.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.002.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			2 dokumen	30.372.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	34.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	15.320.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		17.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	15.052.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		17.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			2 dokumen	255.615.588,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	121.217.780,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	134.397.808,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			2 dokumen	117.855.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				68 Unit	100.483.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	17.371.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase BUMDes Kategori Maju Persentase Kalurahan kategori TDD***	**-**			**20,69 % 48,28 %**	**1.993.183.344,00**						**-**	**2.066.671.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			8 dokumen	1.993.183.344,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	2.066.671.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	25.092.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		29.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				87 Dokumen	14.809.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				87 Dokumen	1.788.806.044,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				87 Dokumen	20.036.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		17.821.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				4 Laporan	18.085.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		20.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	33.136.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		35.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				87 Dokumen	20.841.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		21.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 dokumen Dokumen	72.375.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		73.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentase Swadaya Masyarakat dalam Program TMMD dan Karya Bakti***	**-**			**14 %**	**4.682.747.700,00**						**-**	**5.150.670.100,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			2 dokumen	4.682.747.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	5.150.670.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	2.997.196.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.465.119.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				16 Laporan	1.685.551.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		1.685.551.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**313.539.800,00**							**468.588.600,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Persentase Rumah Data Kependudukan di kampung KB***	**-**			**82,95 %**	**73.819.200,00**						**-**	**262.443.400,00**	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			2 dokumen	73.819.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	262.443.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	25.360.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		131.221.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				1 Laporan	48.458.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		131.221.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Persentase Unmeet Need Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)***	**-**			**14,55 % 60,10 %**	**155.129.300,00**						**-**	**206.145.200,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			1 dokumen	60.505.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				5 Organisasi	60.505.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			2 dokumen	94.623.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	126.145.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	32.823.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		32.785.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	61.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		93.360.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Persentase Peningkatan Keluarga yang Terlayani Konseling Keluarga Sejahtera***	**-**			**6,57 %**	**84.591.300,00**						**-**	**0,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			1 dokumen	77.276.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	77.276.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			1 dokumen	7.314.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				1 Laporan	7.314.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**269.210.000,00**							**200.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**269.210.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Kalurahan dengan Aparatur Pemerintah Kalurahan yang Profesional***	**-**			**11,49 %**	**269.210.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			1 dokumen	269.210.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				1 Lembaga	269.210.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H							**11.011.435.483,00**							**11.664.017.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Nomenklatur kegiatan menyesuaiakan Keputuan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 tahun 2024 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Hal yang menjadi prioritas utama adalah Pembinaan Karang Taruna berupa hibah untuk sarana prasarana kegiatan olahraga bagi Karang Taruna dan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler. Untuk program dan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih mengandalkan sumber dana dari DAK Fisik maupun Non Fisik. Namun alokasi DAK Non Fisik Tahun 2026 menurun. Pada tahun 2025, alokasi DAK Non Fisik ada 5 menu, sedangkan pada tahun 2026 alokasi DAK Non Fisik hanya ada 2 menu. Dengan menu yang terbatas tersebut sehingga ada kegiatan yang belum mempunyai anggaran diantaranya 1) Koordinasi stunting TPPS, 2) Lokmin kapanewon, 3) Kegiatan POKTAN (Kelompok kegiatan BKB, BKL, PIKR, UPPKA dll). Selain itu keberlanjutan SDM THL yang selama ini dibiayai dengan DAK, untuk tahun 2026 belum ada kejelasan. Sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum menjadi prioritas karena terbatasnya anggaran sehingga sarpras yang ada digunakan seoptimal mungkin.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini disusun, semoga dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026.

Wates, 29 Juli 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Kalurahan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

MUHADI, S.H., Hum.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19720822 199503 1 003

2026

RENCANA KERJA (RENJA)



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KULON PROGO

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan umum, memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan program-program yang mendukung pembangunan. Banyak hal yang harus dijalankan untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut. Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat diberikan apabila didukung oleh kelembagaan yang mantap, aparatur yang profesional dan sarana serta prasarana pelayanan yang memadai.

Demikian ringkasan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 kami buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 29 Juli 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KULON PROGO

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERHUBUNGAN

DRS. ARIADI, M.M.

Pembina Utama Muda ; IV/c

NIP.19700701 199003 1006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR …….. i

DAFTAR ISI ……..... ii

BAB I PENDAHULUAN …….... 1

1.1. Latar Belakang …… 1

1.2. Landasan Hukum …… 2

1.3. Maksud dan Tujuan ……. 3

1.4. Sistematika Penulisan ……... 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 …….. 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ……..….. 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ……. 18

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD/Renstra OPD …….. 20

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …… 31

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.. 33

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …… 33

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ……. 35

3.3 Program dan Kegiatan …… 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH …… 40

BAB V PENUTUP ……..... 52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Setiap tahun Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja, dimana Rencana Kerja dimaksud merupakan bahan bagi Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga arah dan kebijakan serta program kerja Perangkat Daerah dapat diketahui secara langsung oleh para pembuat kebijakan, sehingga diharapkan perencanaan program kerja Perangkat Daerah dapat terlaksana secara berkelanjutan, berjalan dengan baik dan berguna bagi masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Perhubungan Kulon Progo disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Dinas Perhubungan Kulon Progo, serta berpedoman pada Renja Kementerian dan Renja Dinas Perhubungan DIY.

Disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Akhir Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 didasarkan pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Rancangan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026.

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
c. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045;

i. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo;
j. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud

   Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan oleh Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

   a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo tahun 2026;
   b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026;
   c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD/Renstra OPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, visi pembangunan urusan Perhubungan adalah: Terwujudnya Sistem Transportasi yang Aman, Selamat, Tertib dan Lancar yang Menjunjung Etika dan Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Kulon Progo.

Misi yang akan dicapai pada urusan Perhubungan adalah:

1. Meningkatkan keselamatan, kelancaran dan ketertiban transportasi.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo khususnya urusan Perhubungan pada tahun 2024 melaksanakan 1 urusan, 2 program, 13 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

      3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

   1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

      1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

   1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

2. 2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

2.3.Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

2.4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2) Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

2.6. Persetujuan Hasil Analisi Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

1) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin

2.7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

- Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 16.816.096.407,00
- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan sd Triwulan IV Tahun 2024 : Rp. 15.892.192.284, (94,51%).

Secara khusus, hambatan dan kendala yang dihadapi pada masing-masing kegiatan dalam pencapaian target dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi 99,16%, tidak ada kendala, selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA:
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi 88,82% , Realisasi keuangan tidak sesuai target disebabkan belanja gaji dan tunjangan ASN menyesuaikan dengan kebutuhan yang harus dibayarkan, dikarenakan adanya Perubahan terkait mutasi ASN ,
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, realisasi 96,92 % tidak ada kendala, selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, realisasi 97,31%, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi 94,96%, tidak ada kendala selisih anggaran disebabkan realisasi belanja tagihan listrik, air dan telepon kantor sesuai dengan tagihan .
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi 96,73 %, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA serta sisa belanja pemeliharaan kendaraan truk crane ;

7. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, realisasi 96,61%, Realisasi keuangan tidak sesuai target disebabkan adanya sisa Belanja Pengadaan serta adanya Sisa Belanja Bahan/Material Pemeliharaan LPJU dan perlengkapan jalan.
8. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C realisasi 99,90%, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA;
9. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, realisasi 99,21%, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA;
10. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, realisasi 97,17 %, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA serta adanya efisiensi anggaran belanja makan minum aktivitas lapangan;
11. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, realisasi 98,69%, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA serta adanya efisiensi anggaran belanja makan minum aktivitas lapangan dan belanja perjalanan dinas;
12. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, realisasi 99,44%, tidak ada kendala selisih anggaran adalah selisih harga pasar dengan DPA;
13. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi 91,33%, realisasi tidak dapat sesuai target disebabkan adanya selisih harga DPA dengan harga pasar BBM dexlite (operasional bus sekolah), serta realisasi sesuai kebutuhan untuk operasional bus.;

Pengukuran Kinerja Utama dan Kinerja Program Tahun 2024 didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1

Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2024 Berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian (%)
Meningkatnya layanan Infrastruktur Perhubungan	Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan	18,82	19,21

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024 Berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian (%)
Meningkatnya layanan Infrastruktur Perhubungan	Pesentase Pelayanan Sarana Prasarana perhubungan	86,75	89,42
	Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan	54,84	61,89

Capaian sasaran strategis "Meningkatnya layanan Infrastruktur Perhubungan" :

- Diukur dengan indikator kinerja utama Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 18,82%; sampai dengan akhir Tahun 2024 terealisasi sebesar 19,21% atau 102,07% dari target.
- Capaian Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di ukur dengan 2 indikator kinerja program yaitu : Pesentase pelayanan sarana prasarana perhubungan dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 89,42% dari target yang diharapkan sebesar 86,75 % dan Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 61,89 % dari target yang diharapkan sebesar 54,84 %.

Hal-hal yang menyebabkan terpenuhinya capaian target dan tidak terpenuhinya capaian target :

- Adanya dukungan APBD tahun 2024 untuk pembangunan dan penyediaan perlengkapan jalan dapat meningkatkan pencapaian target tersedianya perlengkapan jalan yang ada.

- Adanya dukungan APBD tahun 2024 untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas pendukung pelayanan pada terminal tipe C sehingga mengakibatkan capaian penyediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang tersedia dapat memenuhi target.

- Pada tahun 2024 pelaksanaan pengawasan jalan kabupaten dilaksanakan secara intensif dan terpadu dengan dilaksanakannya operasi yustisi dan PPNS sehingga capaian kegiatan dapat melebihi target operasi pengawasan yang sudah ditentukan.

- Pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor tidak dapat mencapai target KBWU disebabkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya uji kendaraan masih kurang , kapasitas pintu gedung uji kendaraan tidak dapat untuk kendaraan besar sehingga direkomendasikan untuk menguji di luar daerah serta adanya Rehab gedung (pintu) Pengujian kendaraan pada bulan Oktober sd November 2024 sehingga pelayanan ditutup 1 bulan mengakibatkan penurunan jumlah pelayanan pengujian kendaraan .

Evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan yang telah diupayakan secara optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang paling penting adalah perlu disusunnya kajian-kajian terkait dengan transportasi darat untuk mendukung dan mengantisipasi perkembangan pembangunan yang sedemikian pesat di Kabupaten Kulon Progo seperti keberadaan bandara YIA, dilaksanakannya pembangunan tol YIA – Yogyakarta – Bawen dan Yogyakarta – Solo diharapkan akan menimbulkan multiplier effect dan seharusnya menjadi acuan pembangunan bidang Perhubungan ke depan. Pencapaian target kinerja dan sasaran akan terus dioptimalkan dan diupayakan peningkatannya pada tahun yang akan datang.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah urusan Perhubungan dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah urusan Perhubungan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target kinerja Capaian program Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Tahun ke-n) yang dievaluasi	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1					**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**									
1	**3**				**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
1	**3**	**13**			**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**									
1	3	13	5.02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang StrategisKasultanan dan Kadipaten									
1	3	13	5.02	4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang StrategisPerbukitan Menoreh	Cermin Lalu Lintas	114	26				-	26	
						Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan	43	9				-	9	
						Rambu Lalu Lintas	250	55				-	55	
						Pagar Pengaman Jalan/Guardrail	2,076	416				-	416	
2	**15**				**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**									
2	**15**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100.00**		**100.00**			**100.00**	100	

2	15	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-								
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	2	2	2	100	3	7	
2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72	18	18	18	100	18	54	
2	**15**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-								
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	12	12	12	100	12	36	
2	15	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	12	12	12	100	12	36	
2	15	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwu lanan/semest e SKPD dan Laporan Koordina Penyusunan Laporan Keuang bulanan/triwu lanan/semest e SKPD	56	14	14	11	79	14	42	
2	**15**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
2	15	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20	5	5	5	100	5	15	
2	**15**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
2	15	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	1	1	1	100	1	3	
2	**15**	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	*48*	12	*12*	12	100	*12*	36	
2	15	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									

2	**15**	1	2.07	#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	91	20	-	-	-	6	26	
2	15	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
2	**15**	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	
2	15	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	2	2	2	100	2	6	
2	**15**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-								
2	15	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	12	12	12	100	12	36	
2	**15**	1	2.09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi	*228*	77	*30*	30	100	*69*	176	
2	**15**	**2**			**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Presentase pelayanan sarana prasarana perhubungan**	**81.67**		**86,75**	89,42	103	**76,17**	**76,17**	
						Presentase Tertib Lalu Lintas Jalan	**69.77**		**54,84**	61,89	113	**54,48**	**54,48**	
2	**15**	**2**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlengkapan Jalan yang Ada**								
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yang Terbangun	800	116	201	201	100	152	469	
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yang Tersedia	-	56	49	49	100	48	153	

2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan		3487	3548	3548	100	3548	9782	
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-	313	212	212	100	212	717	
2	**15**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang Tersedia**	**16**	4	**4**	4	100	**4**	**12**	
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	16	4	4	4	100	4	12	
2	**15**	**2**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah Titik Parkir On Street yang Tertata**	***180***	**77**	***45***	**77**	**171**	***55***	**209**	
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggar aan dan Terbangunny a Fasilitas Parkir Kewenangan	16	4	4	4	100	4	9	
2	**15**	**2**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Kendaraan yang Diuji**	8290		8290			8530		
2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	*17,060*		8530	5489	64	8530	14019	
2	**15**	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	81	21	21	21	100	21	63	
2	**15**	**2**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kendaraan Terperiksa Operasi Yustisi**	9,600	2461	2,400	2749	106	2,800	8010	
2	**15**	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	16	4	4	4	100	4	12	

2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	*12*	3	*3*	3	100	*3*	9	
2	**15**	**2**	2.07		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)**	**Monitoring dan Evaluasi Andalalin, Rekomendasi Andalalin**	8	2	2	2	100	2	6	
2	15	2	2.07	1	Penetapan Kebijakan Tata KelolaAndalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	*8*	2	*2*	2	100	*2*	6	
2	**15**	**2**	2.09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Dokumen Load Factor,**	8	2	2	2	100	2	6	
						Terlaksananya Operasional Bis Sekolah	8	2	2	2	100	2	6	
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	3	3	3	100	3	9	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja Pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. IKU berdasarkan Perubahan Renstra 2023 – 2026 : Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan.
2. Indikator Kinerja Program berdasarkan Perubahan Renstra Transisi 2023-2026 : Persentase pelayanan sarana prasarana perhubungan.
3. Indikator Kinerja Program berdasarkan Renstra Transisi 2023-2026 : Persentase tertib lalu lintas jalan perhubungan.

Berikut ini capaian indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**Indikator Kinerja RPD**										
	IKU berdasarkan Renstra 2023 – 2026 : **Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan**			18,82	18,04	18,65	19,21	19,21	18,65		
1	Cakupan peningkatan sarana prasarana perhubungan										
	Perubahan target : berdasarkan Renstra Transisi 2023-2026 Persentase pelayanan sarana prasarana perhubungan			86,75	78,92	81,67	89,42	89,42	81,67		
2	Cakupan tertib lalu lintas jalan										
	Perubahan target : berdasarkan Renstra Transisi 2023-2026 Persentase tertib lalulintas jalan			54,84	61,53	69,77	61,89	36,20	69,77		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan infrastruktur wilayah di Kabupaten Kulon Progo menjadi perhatian serius sejak dibangunnya BIY dan juga persiapan pembangunan jalan tol. Pembangunan BIY dan aerotropolis ditingkatkan dari sisi pelayanan kesehatan dengan pembangunan RSUD Wates berstandar internasional. Kesinambungan antar moda transportasi umum di BIY juga menjadi perhatian serius dengan diaktifkan ulang nya stasiun Kedundang di Kapanewon Temon. Kesinambungan antar moda transportasi ini akan menunjang semakin berkembangnya transportasi massal yang saling terkoneksi atau Transit Oriented Development (TOD) di sekitar kawasan stasiun Wates dan Stasiun Kedundang.

Selain infrastruktur jalan, sarana yang dibutuhkan dalam transportasi adalah adanya alat transportasi baik armada maupun prasarana jalan yang berupa terminal atau halte. Kewenangan Kabupaten untuk pengelolaan terminal adalah terminal penumpang tipe C yang saat ini jumlahnya ada empat. Untuk menunjang fungsi terminal dibutuhkan halte sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pembangunan dimasa yang akan datang menghadapi banyak hambatan dan tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan pemerintahan urusan perhubungan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan .

Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya:

a. Keterbatasan anggaran yang ada pada urusan Perhubungan;
b. Fasilitas pengaturan, pengawasan dan pengamanan lalu lintas masih terbatas;
c. Pelayanan angkutan umum belum memadai;

d. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;
e. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan di wilayah Kabupaten;
f. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;
g. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidang Perhubungan;

Dampak dari hambatan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Daerah adalah dapat mengakibatkan tidak tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Kulon Progo. Selain itu hambatan juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian program Pemerintah Pusat. Hal ini terjadi karena pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan harus sesuai dengan pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Pusat.

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan adalah:

a. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo;
b. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas;
c. Perlunya Peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;

Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah adalah:

a. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai dalam pelaksanaan tugas.
b. Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan Perhubungan.
c. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.

d. Kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Dinas Perhubungan dengan institusi terkait.
e. Rencana dan pelaksanaan pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo, berupa pembangunan Jalan tol Yogyakarta-YIA, sebagai sarana prasarana pendukung Bandara Kulon Progo.

Berdasarkan isu-isu diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 akan melaksanakan beberapa kebijakan teknis berikut :

a. Meningkatkan perencanaan teknis bidang perhubungan dalam rangka optimalisasi kebijakan teknis bidang perhubungan.
b. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi sesuai tugas dan fungsinya.
c. Peningkatan peran Forum LLAJ sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
d. Meningkatkan pelayanan umum dibidang perhubungan
e. Melaksanakan kajian-kajian teknis dibidang perhubungan dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Kulon Progo sebagai wilayah aerotropolis.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPD/RPJMD yang memuat :

a) rancangan kerangka ekonomi daerah;
b) program prioritas pembangunan daerah dan;
c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rancangan RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan. Membandingkan rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan analisis kebutuhan Perangkat daerah sangat

penting untuk memastikan bahwa rancangan tersebut realistis dan sesuai dengan prioritas serta permasalahan yang ada di daerah. Hal ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang direncanakan dan apa yang sebenarnya dibutuhkan, sehingga RKPD dapat menjadi dokumen perencanaan yang efektif dan berdampak positif.

Hasil telaahan terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 bahwa belum semua usulan program kegiatan pada Dinas Perhubungan dapat terakomodir, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran pada tahun 2026. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten kulon Progo tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**4,379,813,500**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG**				**749.487.000**	
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**				**4,379,813,500**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN TATA RUANG**				**749.487.000**	
1	**Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang**				**1.912.091.200**					**-**	
1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Kab. Kulon Progo,	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang tersedia	1 unit	1.912.091.200	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Kab. Kulon Progo,	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang tersedia	-	-	Belum terakomodir dalam program/kegiatan DAIS 2026
2	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan danKadipaten**				**2.467.722.300**	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**				**749.487.000**	
2.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Kab. Kulon Progo, kawasan perbukitan Menoreh	Jumlah Pembangunan LPJU bernuansa budaya	25 Unit	750.000.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Kab. Kulon Progo, kawasan perbukitan menoreh	Jumlah Pembangunan LPJU bernuansa budaya	- Unit	-	Belum terakomodir dalam program/kegiatan DAIS 2026

2.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Kabupaten Kulon Progo, Makam Girigondo	Jumlah Pembangunan LPJU bernuansa budaya, Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo Sermo-Wates	50 Unit 1 dokumen	1.542.667.800	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Kabupaten Kulon Progo, Makam Girigondo	Jumlah Pembangunan LPJU bernuansa budaya, Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo Sermo-Wates	25 Unit	749.487.000	
2.3	Pemanfaatan Ruang satuan Ruang strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Kabupaten Kulon Progo, Makam Girigondo	Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang satuan Ruang strategis Pantai Selatan Kulon Progo	1 dokumen	175,054,500	Pemanfaatan Ruang satuan Ruang strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Kabupaten Kulon Progo, Makam Girigondo	Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang satuan Ruang strategis Pantai Selatan Kulon Progo	-	-	Belum terakomodir dalam program/kegiatan DAIS 2026
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**283,411,700**					-	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN KEBUDAYAAN**				**283,411,700**						
1	**Pendidikan Berbasis Budaya**				**283,411,700**					-	
1.1	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Kabupaten Kulon Progo,	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	6 unit, 14 sekolah	283,411,700	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Kabupaten Kulon Progo,	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	-	-	Belum terakomodir dalam program/kegiatan DAIS 2026
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				**18,735,204,600**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**16.511.325.200**	

III	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6,214,991,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA**				**4.270.145.762**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**41,555,600**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**23.414.400**	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16,920,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.506.400	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	24,635,600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	13.908.000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3,462,691,500**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.387.834.070**	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bul an	3,370,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bul an	3,328,492,870	

2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	12 dokumen	72,518,500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	45.559.400	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwu lanan/semest e SKPD dan Laporan Koordina Penyusunan LaporanKeuang bulanan/triwu lanan/semest e SKPD	14 Laporan	20,173,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwu lanan/semest e SKPD dan Laporan Koordina Penyusunan Laporan Keuang bulanan/triwu lanan/semest e SKPD	14 Laporan	13.781.800	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**2,200,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**2,200,000**	
3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian KinerjaPegawai	5 dokumen	2,200,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 dokumen	2,200,000	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**86,705,500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**59.905.500**	
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah PaketPeralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	31,869,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	21,869,500	

4.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	54,836,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	38.036.000	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**1,783,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**56.253.100**	
5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Unit Saranadan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	1,783,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Unit Sarana danPrasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**6 Unit**	**56.253.100**	Pengadaan hanya merealisasikan usulan pengadaan tahun 2025 yang di refokusing
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**343,021,500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**349.647.192**	
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	190,054,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	187,054,500	
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	152,967,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	162.592.692	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**495,816,900**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**390.891.500**	

7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yangDipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	352,872,400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	327,439,530	
7.2	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi	69 Unit	142,944,500	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi	30 Unit	63.458.500	
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				**12,520,213,600**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				**12.241.179.438**	
1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**				**10,317,183,400**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**				**10.131.051.338**	
1.1	Pembangunan PrasaranaJalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah PrasaranaJalan di Jalan Kabupaten/K otayang Terbangun	204 unit	3,207,289,900	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yang Terbangun	170 unit	2.980.108.238	
1.2	Penyediaan PerlengkapanJalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yang Tersedia	52 unit	506,000,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yang Tersedia	110 unit	721.915.000	

1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan PrasaranaJalan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah PrasaranaJalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3548 Unit	393,463,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Prasarana Jalanyang Terehabilitasi dan Terpelihara	3548 Unit	360,184,000	
1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	212 Unit	6,210,430,500	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	212 Unit	6,068,000,000	
2	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**				**462,000,000**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**				**331.840.300**	
2.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal(Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	462,000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	331.840.300	
3	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**				**354,000,000**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**				**331,200,000**	
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi PengawasanPelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggar aan dan Terbangunny aFasilitas Parkir Kewenangan	4 laporan	354,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi PengawasanPelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggar aan dan Terbangunny a Fasilitas Parkir Kewenangan	4 laporan	331,200,000	
4	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**				**320,915,200**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**				**289,365,600**	

4.1	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotoryang Terdaftar	4.265 unit	205,049,600	Registrasi KendaraanWajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	4.265 unit	180,500,000	
4.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	21 Unit	115,865,600	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	21 Unit	108,865,600	
5	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**				**694,900,000**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**				**660.755.000**	
5.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/K ota	4 laporan	376,300,000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/K ota	4 laporan	387.755.000	
5.2	Pengawasan dan Pengendalian EfektivitasPelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/K ota	3 laporan	318,600,000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas PelaksanaanKebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/K ota	3 laporan	273,000,000	
6	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**				**25,540,000**	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**				**20,540,000**	
6.1	Penetapan Kebijakan TataKelola Andalalin	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalinyang Ditetapkan	2 dokumen	25,540,000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	2 dokumen	20,540,000	
7	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**345,675,000**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atauBarang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah**				**476.427.300**	

						Kabupaten/Kota					
7.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa AngkutanOrang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/K	3 laporan	345,675,000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/K	3 laporan	476.427.300	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat secara *bottom up* sehingga diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan secara berjenjang musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) di semua tingkatan mulai dari dusun, kalurahan dan kapanewon telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan Forum OPD tahun 2026 tingkat Kabupaten Kulon Progo.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang OPD Kabupaten di Kapanewon serta usulan masyarakat melalui perwakilan di DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Melihat proses musrenbang yang telah dilakukan di semua tingkatan telah sesuai dengan prosedur dan hasilnya pun telah sesuai dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Masalah pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas dalam rencana kerja tahun 2026 dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Kulon Progo urusan perhubungan sebagaimana Tabel 2. 6

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
	Penyediaan Perlengkapan				

	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kulon Progo	Pembangunan LPJU	177 titik	Dishub dan Usulan Masyarakat/ anggota DPRD
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kulon Progo	Rambu lalu lintas	93 unit	Dishub dan Usulan Masyarakat/ anggota DPRD
		Wilayah Kulon Progo	Cermin Tikungan	14 unit	Dishub dan Usulan Masyarakat/ anggota DPRD
		Wilayah Kulon Progo	Guardrail	72 meter	Dishub dan Usulan Masyarakat

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RKPD dan Kebijakan Nasional. Kebijakan Nasional pada setiap tahun tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026 meliputi:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi .
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas .
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri .
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan .
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan .

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sesuai Peraturan Menteri perhubungan Nomor 80 tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementrian Perhubungan Tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) agenda baru Kementrian Perhubungan untuk mempercepat pencapaian prioritas nasional, yaitu :

a. Dukungan terhadap Aksesibilitas Pariwisata;

b. Penguatan Rantai logistic;

c. Dukungan Aksesibilitas pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK);

d. Pembangunan Sistem Transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Kebijakan Umum Kementrian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi (2020-2024) meliputi strategi sebagai berikut :

a. Terwujudnya konektivitas Nasional;

b. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi;

c. Meningkatnya keselamatan transportasi;

d. Meningkatnya kualitas tata Kelola kebijakan, regulasi, dan hukum;

e. Meningkatnya kualitas SDM transportasi yang kompeten;

f. Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan ;

g. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian;

h. Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2023, bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perhubungan. Hal ini mempertegas peran Dinas Perhubungan yang merupakan Perangkat Daerah namun mempunyai peran penting dalam

menjalankan dan mensukseskan program-program nasional di daerah terutama dalam bidang perhubungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, tujuan rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2026 adalah : **Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah**.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026

Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah		Tingkat Pelayanan Jalan (*level of service)*	Nilai	A / Arus Bebas (0-0,2)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
		Indeks maturitas SPIP	Nilai	3,23
	Meningkatnya Kualitas layanan transportasi daerah	Tingkat kualitas layanan transportasi	%	100
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
	Meningkatnya kualitas pengendalian	Nilai Maturitas SPIP Perangkat	Level	2,0-3,0

Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	internal perangkat daerah	Daerah		

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target (%)
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	%	57,86
		Ketersediaan Perlengkapan Jalan	%	20,08
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	%	17,01
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sub kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran daerah setiap perangkat daerah melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan di masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah tidak lepas dari tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka di tahun 2026 Dinas Perhubungan mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dan mengacu pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikas dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara garis besar rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2026 dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 Program yang terdiri atas 15 kegiatan dan 26 sub kegiatan untuk anggaran Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 .

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
   - 1.1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
     - 1) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kiskendo-Sermo-Wates
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - 2.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD
     - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - 2.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
     - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   - 2.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

2.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

3.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3.2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

3.3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

3.4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

3.5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2) Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

3.6. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

1) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin

3.7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2026 Dinas Perhubungan mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan Rancangan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 , Rancangan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan mengacu pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikas dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara garis besar rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2026 dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 Program yang terdiri atas 15 kegiatan dan 26 sub kegiatan untuk anggaran Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 .

Rencana program Dinas Perhubungan dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dibidang perhubungan.

Rumusan rencana kerja program , kegiatan dan pendanaan perangkat daerah tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten dan APBN , secara detail dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut;

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dan Prakiraan Maju 2027

NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						**17.260.812.200,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**749.487.000,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**749.487.000,00**							**0,00**	
1,	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis***	**-**			**16,96 %**	**749.487.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Laporan pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 dokumen	749.487.000,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0011	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates				1 Dokumen	749.487.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.511.325.200,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**16.511.325.200,00**							**0,00**	
1,	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**4.270.145.762,00**						**-**	**0,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			20 dokumen	23.414.400,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.506.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			0				18 0	13.908.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 laporan	3.387.834.070,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	3.328.492.870,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	45.559.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	13.781.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*	-			5 dokumen	2.200.000,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	2.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah*	-			12 dokumen	59.905.500,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.869.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	38.036.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Aset*	-			6 Unit	56.253.100,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	56.253.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah*	-			6 laporan	349.647.192,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	187.054.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	162.592.692,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Aset dalam kondisi baik*	-			66 Unit	390.891.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	327.433.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	63.458.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2,	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Ketersediaan Perlengkapan Jalan***	**-**			**20,08 %**	**12.241.179.438,00**						**-**	**0,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah perlengkapan jalan yang ada*	-			10998 Unit	10.131.051.338,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				170 Unit	2.980.108.238,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				110 Unit	721.915.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
				TARGET	REALISASI	PRAKIRAAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				3548 Unit	360.184.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				212 Unit	6.068.844.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)*	-			4 Unit	331.840.300,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				4 Unit	331.840.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Titik Parkir On Street yang Tertata*	-			60 titik	331.200.000,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
				TARGET	REALISASI	PRAKIRAAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	331.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor*	-			5.589 Unit	289.365.500,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														

				TARGET	REALISASI	PRAKIRAAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				4265 Unit	180.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				21 Unit	108.865.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
				TARGET	REALISASI	PRAKIRAAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Kendaraan Terperiksa Operasi Yustisi Jumlah Ruas Jalan yang sudah di VC Ratio*	-			3000 Unit 177 ruas	660.755.000,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				3 Laporan	273.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				4 Laporan	387.755.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin*	-			2 Laporan	20.540.000,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
				TARGET	REALISASI	PRAKIRAAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				2 Laporan	20.540.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Operasional Bis Sekolah* *Tersedianya Dokumen Load Factor*	-			2 Unit 2 dokumen	476.427.300,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	476.427.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H							**17.260.812.200,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas DIY maupun nasional.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan tahun 2026 telah kami susun berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, untuk selanjutnya perlu disajikan catatan penting sebagai berikut :

1. Untuk usulan program/kegiatan APBD Kabupaten Kulon Progo, jika pagu indikatif yang ditetapkan ternyata lebih kecil dari usulan kami, maka kami akan melakukan efisiensi dengan mengurangi volume / komponen-komponen biaya tanpa mengurangi capaian kinerja program/kegiatan yang sudah direncanakan.
2. Rencana Kerja (Renja) 2026 kemudian akan menjadi materi dalam penentuan KUA - PPAS Kabupaten Kulon Progo, dan setelah ditetapkan menjadi Rencana Kerja, maka akan kami jadikan dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2026.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang, UPT , ASN dan Non ASN Dinas Perhubungan secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk:
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja tahun 2026.

Dinas Perhubungan telah berupaya maksimal dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sebagai rencana tindak lanjut Dinas Perhubungan berkomitmen akan melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan.

Rencana Kerja (Renja) ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026. Dokumen Renja ini diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Hal ini untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Wates, 29 Juli 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KULON PROGO

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERHUBUNGAN

DRS. ARIADI, M.M.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19700701 199003 1006

PEMERINTAH KABUPATEN
KULON PROGO

RENJA

Rencana Kerja Perangkat Daerah

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KULON PROGO

2026



RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAEARAH
TAHUN 2026

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Tamtama Nomor 03 Wates Kulon Progo Kode Pos 5611
Telp (0274) 773208
Website : kominfo.kulonprogokab.go.id email : kominfo@kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita, yang juga atas perkenan-Nya, sehingga Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sebagai pelaksanaan dan penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.

Terimakasih pula kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini.

Dokumen Rancangan Rencana kerja (Renja) ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan dan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2026.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan……..... 4

1.4. Sistematika Penulisan……..... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024) 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 24

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……. 34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 36

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 36

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah……. 37

3.3. Program dan Kegiatan 40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43

BAB V PENUTUP..... 51

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan pencapaian Renstra s.d Triwulan II Tahun 2025….. 9

2.2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo …..... 20

2.3 Tabel Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo..... 26

2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo…..... 35

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kominfo Tahun 2026 39

3.2 Indikator Kinerja Program Tahun 2026……. 42

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo…..... 44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

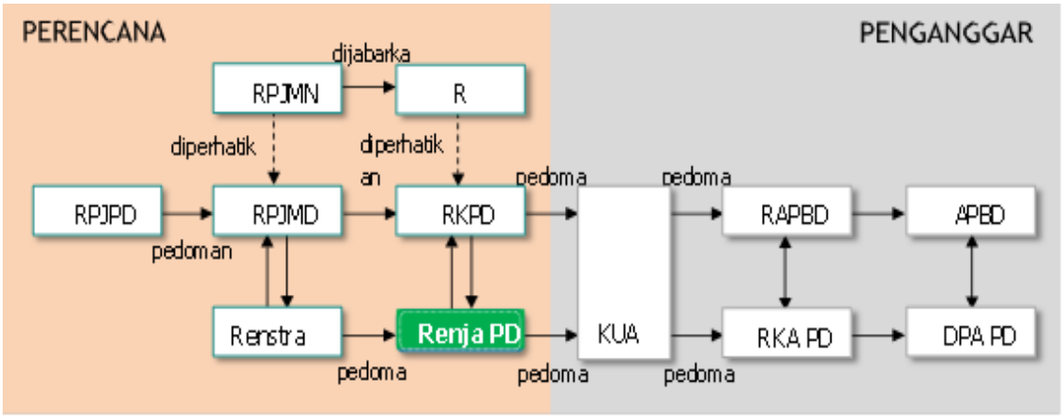
Berdasarkan Permendagri No : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 138, bahwa perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencananaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (Satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo.

Proses penyusunan Renja Kominfo didasarkan pada Renstra Kominfo 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026. Sehingga diharapkan dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo ini, didapatkan panduan dan arahan yang jelas bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan bahan dasar Penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan Renja OPD disusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD, untuk selanjutnya dijadikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD) Kabupaten. Keterkaitan antar dokumen terlihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan dan Proses Penyusunan RAPBD

Renja (Rencana Kerja) Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan tahunan yang merinci program dan kegiatan spesifik untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan rencana strategis 5 tahunan berisi visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Dengan demikian, Renja Kabupaten Kulon Progo memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, karena Renja merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD.Oleh karena itu, implementasi Renja Kabupaten Kulon Progo harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan perencanaan dan penganggaran OPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya undang-undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2024;

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;.
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas
21. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud : Untuk mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. Dalam urusan Pengelolaan e-Gov, Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi serta lintas urusan dan lintas pemerintah daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
2. Tujuan :
   a. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026;
   b. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2026;
   c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka mencapai visi misi Bupati dimana Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi mewujudkan misi ke 3 yaitu "***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratif".*** Serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2023 melaksanakan 4 Urusan dengan 7 Program, 13 Kegiatan dan 24 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
   a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
   b. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
   b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
   c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah.
   a. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
   b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   a. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
   a. Pelayanan Informasi Publik
   b. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Pengelolaan e-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
   a. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
   b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
   c. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
   a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
   a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

VI. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta

1. Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
   a. Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital

VII. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**

1**.** Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan

a. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025 disajikan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2025 (Tahun berjalan)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika									
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang***								
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu***								

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan		12 Bulan	12 Bulan				
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan		14 Laporan	6 Laporan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah dokumen administrasi umum***								
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Laporan	0 Laporan	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 paket	1 paket		1 Paket	0 Paket	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu***								
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan		21 Dokumen	21 Dokumen		21 Laporan	11 Laporan	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah penambahan aset***								
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	29 Unit		32 unit	32 unit		29 Unit	16 Unit	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	16 Unit		16 unit	16 unit		16 Unit	8 Unit	

				Dinas Operasional atau lapangan	perijinannya								
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit		1 unit	1 unit		1 Unit	1 Unit	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Penambahan Aset**								
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit					4 Unit	4 Unit	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Jumlah dokumen administrasi kepegawaian***								
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		7 orang	7 orang		4 Orang	0 Orang	
				Program Informasi Dan Komunikasi Publik	**Presentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi**	88.10%		**100%**	**91,67%**				
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyebarluasan informasi daerah	88.10%							
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	6 Permohonan		6 Dokumen	6 Dokumen		7 Dokumen	1 Dokumen	
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	6 Media		24 Dokumen	24 Dokumen		4 Media	0 Media	

				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik (%)**	82.50%		**74,82%**	**71,97%**	**79.80%**			
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase layanan Infrastruktur TIK (%)**	82.50%							
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen				
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan			2 Unit	2 Unit				
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			1 Dokumen	-				
				Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan					0 Laporan	0 Laporan	
				Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen					0 Dokumen	0 Dokumen	

				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi					0 Aplikasi	0 Aplikasi	
				Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	1 unit					0 unit	0 unit	
				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	40 Perangkat Daerah					0 Daerah	0 Daerah	
				Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan					0 Layanan	0 Layanan	
				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Persentase data sektoral yang dipublikasi (%)**	98.06%		**100%**	**100%**	**100%**			
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase data sektoral yang dipublikasi (%)**	98.06%							

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			3 Dokumen	3 Dokumen				
				Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase					0 Persentase	0 Persentase	
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen					0 Dokumen	0 Dokumen	
				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan (%)**	55.61%		**50,84%**	**54,71%**	**85,06%**			
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase SIM yang diamankan (%)**	84.48%							
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan		42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah		0 Laporan	0 Laporan	
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan (%)**								
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	42 Perangkat Daerah		2 Laporan	2 Laporan		0 Daerah	0 Daerah	
				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									

				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan**			**100%**	**100%**	**100%**			
				Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Jumlah Perencanaan dan Pengendalian Kelembagaan**								
				Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen hasil pendataan sosial ekonomi			1 Dokumen	1 Dokumen		0	0	
				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan**			**100%**	**100%**	**100%**			
				Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Perencanaan dan Pengendalian Kelembagaan								
				Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen hasil pendataan sosial ekonomi			1 Dokumen	1 Dokumen				

Pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar perkantoran yang sifatnya rutin, Manfaat program ini meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 subkegiatan yaitu: 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 93,85% dan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%.

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah diarahkan untuk penyediaan rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD. Manfaat program ini meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan yaitu: 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 2) Penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 84,45% dan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%.

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diarahkan untuk penyediaan administrasi dan pelaporan keuangan. Manfaat kegiatan ini meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 subkegiatan yaitu:, 1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan. Realisasi keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD s.d TW IV Kegiatan ini sebesar 97,03% dan realisasi fisik program ini mencapai 100%.

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran. Manfaat Program ini adalah meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 subkegiatan yaitu: 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan

Dinas Operasional atau Lapangan. 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 97,28% dan realisasi fisik program ini mencapai 99.66%.

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pegawai sehingga mempunyai dedikasi dan kemampuan. Manfaat program ini adalah meningkatnya kelancaran kinerja pelaksanaan tugas. Kegiatan ini didukung 2 subkegiatan yaitu: Monitoring evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai dan Pendidikan dan Peatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 99,20 % dan fisik mencapai 100%.

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyusun perencanaan, anggaran dan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban SKPD. Kegiatan ini didukung 2 subkegiatan yaitu : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Manfaat program ini meningkatnya kualitas perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja SKPD. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini tercapai 97,11% dan realisasi fisik mencapai 100%.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Kegiatan Pengelolaan e-goverment dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator sasaran meningkatnya Kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik Manfaat program ini meningkatnya layanan TIK dan Integrasi layanan secara elektronik . Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 subkegiatan yaitu: 1) Kegiatan Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah daerah. 2) Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. 3) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini sebesar 97,88% dan realisasi fisik mencapai 100%.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota mempunyai indikator sasaran meningkatnya Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan. Manfaat program meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 subkegiatan yaitu 1) kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik. 2) Kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota. Realisasi keuangan s.d TW 4 kegiatan ini sebesar 95,80% dan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota. Manfaat program ini adalah meningkatnya layanan data sektoral dan informasi daerah. Kegiatan ini didukung oleh 2 subkegiatan yaitu berupa : 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, 2) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 95,84% sedang realisasi fisik mencapai 94,50%.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota. Manfaat program ini adalah meningkatnya layanan data sektoral dan informasi daerah. Kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan yaitu berupa : Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 96,73% sedang realisasi fisik mencapai 99%.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan. Manfaat program ini adalah Tersedianya sarana layanan akses internet publik. Kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan yaitu berupa : Kegiatan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 99,63% sedang realisasi fisik mencapai 100%.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan. Manfaat program ini adalah Tersedianya Data Sosial dan Ekonomi Berbasis Keluarga. Kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan yaitu berupa : Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan. Realisasi keuangan s.d TW IV kegiatan ini sebesar 95,21% sedang realisasi fisik mencapai 98%.

Dari aspek keuangan kinerja program dan kegiatan tahun 2024 belum tercapai target 100%, total alokasi anggaran belanja langsung Rp. 8.799.353.308,- dan terealisasi Rp. 8.563.644.757,- atau 97,32%.

Namun dari keseluruhan anggaran tersebut tidak dapat terealisasi secara keseluruhan karena adanya Surat Edaran Terkait Rasionalisasi dan Efisiensi belanja tahun 2024 untuk menjaga likuiditas kas daerah karena terjadinya perubahan regulasi dan penurunan pendapatan daerah secara signifikan yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dilaksanakan secara selektif diutamakan yang ada Undangan, Makanan dan minuman rapat/jamuan tamu hanya diperbolehkan untuk makanan dan minuman rapat kecil serta adanya sisa dari pengadaan belanja karena hasil negosiasi harga.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Indikator sasaran dilakukan melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pengelolaan Iformasi dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoaral dan Program Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika											
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		V	100	100	100		100	-	-		Tercapai
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		V	100	100	100		100	-	-		Tercapai
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		V	100	100	100		100	-	-		Tercapai
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		V	100	100	100		100	-	-		Tercapai

5	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		V	100	100	100		100	-	-		Tercapai
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah		V	68,06	47,05	48,05		68,06	-	-		Tercapai
	Indikator Kinerja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika											
1	Rata-Rata Prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah			100	100	100		100	100	100		Tercapai
2	Indeks SPBE			4,08	3,62	3,72		3,91	3.91	3,79		Tercapai
3	Persentase layanan data dan informasi kinerja daerah			100	91,42	93,65		94,44	88,50	95.52		Belum tercapai
	Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi dan Informatika											
1	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota			100	100	100		100	100	100,00		Tercapai
2	Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik			74,82	82,5	90,18		71,97	82,71	91,98		tercapai
3	Persentase pengembangan komunikasi media massa dan informasi			100	88,10	90,48		91,67	91.67	92,2896		Tercapai
4	Persentase data sektoral yang dipublikasi			100	98,06	100		100	82,19	100		Belum Tercapai
5	Persentase SIM dan ruangan pemerintah daerah yang diamankan			50,84	55,61	64,36		54,71	57,99	65,64		Tercapai

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran s.d TW II Tahun 2025 yang merupakan IKU Dinas memenuhi target yang ditetapkan. Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas, sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Indeks SPBE dari target capaian 3,62% terealisasi sebesar 3,91%. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 663 Tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian Evaluasi SPBE dari kemenpan RB.

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di D.I Yogyakarta

	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,53	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bantul	4,18	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sleman	4,30	Memuaskan
4	Pemerintah Kab. Gunung Kidul	3,96	Sangat Baik
5	**Pemerintah Kab. Kulon Progo**	**3,91**	**Sangat Baik**
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	3,50	Sangat Baik

Sumber : *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 663 Tahun 2024 tentang hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.*

Persentase layanan data dan informasi kinerja daerah dari target capaian 91,42% terealisasi sebesar 88,50%. Hal ini karena adanya pergantian komisioner KID DIY sehingga kriteria penilaian jadi berbeda semuanya. Penilaian hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berhasil memperoleh 35 PPID Pembantu dengan kategori informatif dan 7 PPID Pembantu dengan katagori yang tidak informatif.

Capaian kinerja Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat Daerah tercapai sesuai target dengan capaian 100 (100%). Faktor pendukung tercapainya karena terlaksananya pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang, Jumlah dokumen atau surat yang

dihasilkan dan diarsipkan, Terlaksananya perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Terlaksananya penyusunan program dan kegiatan sekretariat, Terlaksananya penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kinerja tahunan, Terlaksananya penyusunan rencana kerja anggaran, Terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran.

Indikator kinerja program informasi dan komunikasi publik (Persentase pengembangan komunikasi media massa dan informasi) s.d TW II memenuhi target yaitu dari target 88,10% terealisasi 91,67% Hal ini di dukung oleh desiminasi informasi pada media elektronik dan media sosial sudah dilakukan secara optimal.

Indikator kinerja program Aplikasi Informatika (Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik) s.d TW II memenuhi target yaitu dari target 82,50% terealisasi 82,71%. Hal ini didukung dengan tersediannya Infrastruktur TIK yaitu layanan bandwiith yang lebih besar sesuai harga yang tercantum dalam ecatalog pengadaan barang dan jasa. Layanan bandwith yang besar mampu meningkatkan performa layanan diseluruh perangkat daerah dan ruang publik.

Indikator kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral (Persentase data sektoral yang dipublikasi) s.d TW II belum memenuhi target yaitu dari target 98,06% terealisasi 82,19%. Hal ini karena masih dalam proses pengumpulan dan verifikasi data.

Indikator kinerja program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi (Persentase SIM dan ruangan pemerintah daerah yang diamankan) s.d TW II sudah melebihi target yaitu dari target 55,61% terealisasi 57,99%. Hal ini karena adanya koordinasi dan kerjasama yang terjalin baik dengan Kominfo DIY perihal bantuan fasilitas peralatan dan pendampingan Counter Surveillance (pelaksanaan kegiatan pengamanan ruang kerja dan pimpinan) dan Counter Surveillance pelaksanaan nya berjalan lancar sesuai jadwal yaitu di bulan oktober . Selain itu untuk ruang yang diamankan merupakan ruangan baru atau kata lain ruang yg belum pernah diamankan dari tahun sebelumnya.

Terhadap hasil kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika s.d TW II Tahun 2025 sebagaimana tersebut diatas, maka kebijakan/tindakan

perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

1. Perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal;
2. Percepatan Proses pengadaan barang dan jasa untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan;
3. Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah adanya pergeseram mendahului perubahan;
4. Melakukan penyesuaian ROPK dan Anggaran Kas pada Aplikasi Monevku untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Triwulan II;
5. Memperhatikan pengisian Monevku setiap awal bulan berikutnya dengan dengan batas waktu s.d. tanggal 05 bulan berikutnya

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan OPD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

a. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang.
b. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar. Dalam hubungannya dengan urusan komunikasi dan informatika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, beberapa isu strategis urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

a. Keterbatasan infrastruktur TIK Jaringan Intra Pemerintah, Pusat Data dan Sistem Penghubung yang belum semua memenuhi standar.
b. Meningkatnya kebutuhan penggunaan internet di perangkat Daerah.
c. Belum terintegrasinya berbagai aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan.
d. Sebagian infrastruktur jaringan Local Area Network pada Perangkat Daerah belum sesuai standar.
e. Belum tersedianya perangkat dan aplikasi untuk keamanan jaringan.
f. Diseminasi informasi yang belum optimal.
g. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan keamanan informasi, peliputan dan pelayanan informasi komunikasi publik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam Proses penyempurnaan dilakukan penyesuian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Kominfo.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Kulon Progo

	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()
	-2	-3	-4	-5	-6	-2	-3	-4	-5	-6
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**9,062,645,544.00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**9,669,204,000.00**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**9,062,645,544.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**9,636,496,900.00**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**8,705,155,544.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**8,742,012,800.00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**4,287,055,544.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)***	**100 %**	**3,427,955,616.00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	21,657,132.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	43,553,800.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14,624,221.00			*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	5,900,000.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	7,032,911.00			*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	12 Laporan	37,653,800.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3,786,308,173.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	3,050,454,388.00

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3,720,635,291.00			*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	14 Orang/bulan	3,000,093,888.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	58,347,293.00			*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	43,900,200.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	14 Laporan	7,325,589.00			*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	14 Laporan	6,460,300.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	28,102,772.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	20,400,000.00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2,494,329.00					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	25,608,443.00			*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	4 Orang	20,400,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	86,392,911.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	62,580,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	86,392,911.00			*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	19,182,000.00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	30,713,503.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	43,398,000.00
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	30,713,503.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	35,363,800.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	159,189,254.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	35,363,800.00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29,496,160.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	135,594,528.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 Laporan	129,693,094.00			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	18,205,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	174,691,799.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	117,389,528.00

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	174,691,799.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	80,009,100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				**653,890,000.00**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial (%)*	90.48 %	653,890,000.00			*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	14 Unit	80,009,100.00
	Pelayanan Informasi Publik					**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		***Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi (%)***	**90.48 %**	**1,313,142,784.00**
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	6 Permohonan	239,995,817.00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial (%)*	90.48 %	1,313,142,784.00
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik					Pelayanan Informasi Publik				
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	6 Media	413,894,183.00			*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*	1 Permohonan	802,932,784.00
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				**3,764,210,000.00**	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3,764,210,000.00			*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*	6 Media	510,210,000.00
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		**-**	**-**	**4,000,914,400.00**
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	40 Perangkat Daerah	2,955,071,400.00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	4,000,914,400.00

	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi					Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	89,876,400.00			*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*	40 Perangkat Daerah	3,116,904,000.00
	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE					Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi	81,224,200.00			*Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional*	1 Layanan	84,989,200.00
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah					Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				
			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	385,661,800.00			*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE*	2 Aplikasi	110,697,900.00
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE					Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	107,372,700.00			*Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali*	1 Laporan	412,812,500.00
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas					Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				

			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	145,003,500.00			*Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE*	1 Laporan	182,689,200.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				**333,630,000.00**	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				**333,630,000.00**			*Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas*	1 Dokumen	92,821,600.00
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	333,630,000.00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**157,821,800.00**
	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia					**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**-**	**-**	**157,821,800.00**
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	0 %	22,430,000.00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		-	-	157,821,800.00
	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral					Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	311,200,000.00			*Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk*	80 %	16,872,900.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				**23,860,000.00**	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				**23,860,000.00**			*Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.*	80 %	140,948,900.00

	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	13,696,424.00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**324,177,400.00**
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		**-**	**-**	**324,177,400.00**
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	13,696,424.00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	305,224,700.00
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	10,163,576.00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				
	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah							*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	3 Laporan	305,224,700.00
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	0 Kegiatan	10,163,576.00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	18,952,700.00
						Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				
								Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	18,952,700.00

						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**412,484,900.00**
						PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		**-**	**-**	**412,484,900.00**
						Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan		-	-	412,484,900.00
						Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital				
								Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	1 Objek	412,484,900.00
						NON URUSAN				**32,707,100.00**
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				**32,707,100.00**
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**-**	**-**	**32,707,100.00**
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	32,707,100.00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,000,000.00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	22,707,100.00

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Proses penelaahan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat diharapkan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok OPD. Hal ini akan diperoleh pada saat dilaksanakannya Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten Kulon Progo.

Pelaksanaan Musrenbang merupakan wadah bersama antar para pelaku (*stakeholder*) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan OPD serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) OPD untuk tahun anggaran 2026.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh *stakeholder* dengan berpedoman kepada matrik Renstra 2023-2026 yang akan segera disusun, tema dan prioritas pembangunan 2026 serta didasari review capaian kinerja OPD berdasarkan amanat target kinerja pada Renstra. Dari proses regulasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2025 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik Renstra, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Gabungan OPD urusan pengelolaan persandian, pengembangan e-Gove, pengembangan komunikasi media massa dan Data/Informasi/Statistik, memang masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan yang harus dibahas serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kulon Progo bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 bahwa sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Transformasi Digital:
   - Menciptakan iklim industri yang sehat dan efisien dengan perlindungan konsumen melalui kebijakan dan regulasi progresif
   - Mengembangkan industri pos dan logistik dalam mendukung ekonomi digital
   - Meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi dan penyiaran digital
2. Perkuatan Fondasi Transformasi Digital:
   - Memastikan ketersediaan infrastruktur konektivitas digital yang andal, terjangkau, dan merata
   - Mengawal migrasi TV analog ke TV digital dan Analog Switch Off (ASO)
3. Pelayanan Publik Berbasis Digital:
   - Memberikan layanan publik di bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran, termasuk akses telekomunikasi terkait kebencanaan dan kedaruratan
4. Pengembangan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran:
   - Meningkatkan kualitas dan standar layanan Fixed Broadband (FBB), Mobile Broadband (MBB), dan penyiaran digital
5. Kesiapan Menghadapi Tantangan Digital:
   - Menyiapkan rencana strategis untuk mengintegrasikan perkembangan teknologi ke dalam kerangka pembangunan nasional, khususnya bidang digital.

Dalam menyusun program dan kegiatan di tahun 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kulon Progo berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi DIY. Kebijakan nasional dan provinsi DIY menjadi acuan bagi Kominfo Kabupaten Kulon Progo dalam menentukan prioritas dan arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan mempertimbangkan kebijakan nasional dan provinsi DIY, Kominfo Kabupaten Kulon Progo dapat menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah, serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena

itu, Kominfo Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk terus memantau dan mengupdate kebijakan nasional dan provinsi DIY guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang disusun dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis dan tantangan pembangunan daerah, maka ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, yaitu



Gambar 3.1 **Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029**

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yang hendak dicapai dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2029 adalah Visi "***Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan"*** mencerminkan komitmen Kabupaten Kulon Progo dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara inklusif, memperkuat kemandirian ekonomi, menjaga nilai-nilai budaya dan religiusitas, serta memastikan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029, maka dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan. Pernyataan misi pembangunan tersebut dijelaskan secara terperinci dalam uraian berikut untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait arah dan fokus pembangunan yang akan dicapai.

Misi Pertama: Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.

Pembangunan lima tahun mendatang diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang makmur, di mana setiap individu dapat menikmati kesejahteraan lahir dan batin. Upaya ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan pendapatan yang layak. Selain itu, masyarakat Kulon Progo diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesantunan, kesopanan, dan penghormatan terhadap adat istiadat. Di sisi lain, penguatan nilai-nilai religius yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga menjadi prioritas, guna menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan harmonis dalam kehidupan beragama. Religius pada misi pertama ini tidak secara spesifik hanya mencakup misi ini, namun juga menjiwai keseluruhan misi.

Misi Kedua: Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi.

Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengembangan sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, industri, dan pariwisata, yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Pembangunan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat agar memiliki keterampilan dan kapasitas untuk berkontribusi dalam perekonomian lokal. Dengan peningkatan daya saing produk daerah yang bernilai tambah tinggi, diharapkan ekonomi daerah dapat berkembang secara merata, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

Misi Ketiga: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Pembangunan lima tahun mendatang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dalam lingkungan yang aman dan demokratis, masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan damai. Stabilitas sosial akan dijaga melalui penegakan hukum yang adil, konsisten, dan non diskriminatif, dengan menumbuhkan rasa percaya antar-stakeholder pembangunan. Demokrasi yang sehat akan

mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Misi Keempat: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pemerataan antarwilayah, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar-pusat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang berkualitas akan mempercepat distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, memperhatikan pelestarian lingkungan, serta mitigasi risiko bencana alam. Sebagai daerah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan menjamin keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang. Infrastruktur tangguh yang dirancang sesuai dengan potensi dan risiko daerah akan menjadi dasar bagi terciptanya lingkungan yang aman dan produktif.

Dalam rangka mendukung misi ketiga kepala daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang good government, aspiratif, serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kominfo Kabupaten Kulon Progo akan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah dalam mengelola informasi dan komunikasi publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah melalui platform digital. Dengan demikian, diharapkan Kominfo Kabupaten Kulon Progo dapat berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, aspiratif, dan demokratis, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Dengan Demikain dapat disimpulkan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi ke 3 Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo serta misi ketiga Kepala Daerah,

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran (%)
1	Meningkatnya Tatata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)*	Nilai	1,41-1,50
		Meningkatnya layanan publik berbasis digital	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif
			Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (>80-90)
			Indeks maturitas SPIP	Nilai	2,0 - 3,0

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan Program dan Kegiatan di Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (terutama misi ke-3) dan pengetasan kemiskinan. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 mencakup 6 Program terdiri 14 kegiatan dan 27 sub kegiatan yaitu :

I. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
   a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
   b. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
   b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
   c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
   b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung atau bangunan lainnya

II. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Pelayanan Informasi Publik
   b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Pengelolaan e-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
   b. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
   c. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
   d. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
   e. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
   f. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

a. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia.
b. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerahkabupaten/Kota
   a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
   a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

VI. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

1. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
   a. Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Program Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Koneksi Internet Pemerintah Daerah	%	27,40
		Persentase Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	%	40.91
2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	%	40.91
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Informasi Publik	%	61.90
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Dilengkapi Metadata	%	71.43
5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik	%	74.22
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menghadapi era globalisasi saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan mutu yang cepat, tepat dan terpadu, serta berperan penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, akurat dan mudah dijangkau. Selain itu juga harus mempersiapkan kerangka acuan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (e-Government) untuk menuju implementasi konsep smart city di Kabupaten Kulon Progo. Serta mendukung penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) dalam tata kelola pemerintahan yang saat ini bukan lagi menjadi suatu pilihan tetapi sudah menjadi suatu keharusan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan TIK mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kulon Progo telah menyusun rencana kerja dan pendanaan yang komprehensif untuk tahun 2026. Rencana kerja ini mencakup program-program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah. Pendanaan untuk program-program ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo, serta sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah. Dengan rencana kerja dan pendanaan yang matang, Kominfo Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo merumuskan rencana program dan kegiatan Tahun 2026 seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun	
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1		3	4	8	9	10	11	15	16
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**9,669,204,000.00**				**9,862,588,080.00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**9,636,496,900.00**				**9,829,226,838.00**
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**8,742,012,800.00**				**8,916,853,056.00**
	2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)***	**100 %**	**3,427,955,616.00**			**100 %**	**3,496,514,728.32**
	2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	43,553,800.00			-	44,424,876.00
1	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,900,000.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2 Dokumen	6,018,000.00
2	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	37,653,800.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	12 Laporan	38,406,876.00
	2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	3,050,454,388.00			-	3,111,463,475.76
3	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3,000,093,888.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Orang/bulan	3,060,095,765.76

						Semua Kel/Desa			
4	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	43,900,200.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Dokumen	44,778,204.00
5	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	14 Laporan	6,460,300.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	14 Laporan	6,589,506.00
	2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	20,400,000.00			-	20,808,000.00
6	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20,400,000.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	4 Orang	20,808,000.00
	2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	62,580,000.00			-	63,831,600.00
7	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19,182,000.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Paket	19,565,640.00
8	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	43,398,000.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	44,265,960.00
	2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	35,363,800.00			-	36,071,076.00
9	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	35,363,800.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	4 Unit	36,071,076.00

						Semua Kel/Desa			
	2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	135,594,528.00			-	138,306,418.56
10	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	18,205,000.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	18,569,100.00
11	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	117,389,528.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	119,737,318.56
	2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	80,009,100.00			-	81,609,282.00
12	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	80,009,100.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Unit	81,609,282.00
	2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi (%)***	**90.48 %**	**1,313,142,784.00**			**90.48 %**	**1,339,405,639.68**
	2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	*Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial (%)*	90.48 %	1,313,142,784.00			90.48 %	1,339,405,639.68
13	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik							
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	802,932,784.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Permohonan	818,991,439.68
14	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik							
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	6 Media	510,210,000.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Media	520,414,200.00
	2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**	**-**	**4,000,914,400.00**			**-**	**4,080,932,688.00**
	2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup**	-	-	4,000,914,400.00			-	4,080,932,688.00

		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
15	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota							
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	40 Perangkat Daerah	3,116,904,000.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Perangkat Daerah	3,179,242,080.00
16	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi							
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	84,989,200.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Layanan	86,688,984.00
17	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE							
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi	110,697,900.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Aplikasi	112,911,858.00
18	2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah							
			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	412,812,500.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	421,068,750.00
19	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE							
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	182,689,200.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	186,342,984.00
20	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas							
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	92,821,600.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	94,678,032.00

	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**157,821,800.00**				**160,978,236.00**
	2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**	**-**	**157,821,800.00**			**-**	160,978,236.00
	2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	157,821,800.00			-	160,978,236.00
21	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia							
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	80 %	16,872,900.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	80 %	17,210,358.00
22	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral							
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	80 %	140,948,900.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	80 %	143,767,878.00
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**324,177,400.00**				330,660,948.00
	2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**	**-**	**324,177,400.00**			**-**	330,660,948.00
	2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	305,224,700.00			-	311,329,194.00
23	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	305,224,700.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	311,329,194.00
	2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	18,952,700.00			-	19,331,754.00
24	2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah							
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi	1 Kegiatan	18,952,700.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Kegiatan	19,331,754.00

			pemerintah Daerah.						
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**412,484,900.00**				**420,734,598.00**
	2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**	**412,484,900.00**			**-**	**420,734,598.00**
	2.22.08.5.04	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	-	-	412,484,900.00			-	420,734,598.00
25	2.22.08.5.04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital							
			Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	1 Objek	412,484,900.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	1 Objek	420,734,598.00
	X	**NON URUSAN**			**32,707,100.00**				**33,361,242.00**
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**32,707,100.00**				**33,361,242.00**
	X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**32,707,100.00**			**-**	**33,361,242.00**
	X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	32,707,100.00			-	33,361,242.00
26	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,000,000.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	10,200,000.00
27	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	22,707,100.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	3 Unit	23,161,242.00

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis tahun 2025-2029. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Wates, 29 Juli 2025

Kepala



AGUNG KURNIAWAN, S.IP,. M.Si

Pembina Utama Muda ; IV/c

NIP. 196808051996031005

Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2026

DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KULON PROGO



DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KULON PROGO

P Pg K Kjjedja
m P P P
m t P P

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat Nya Rencana Kerja Dinas Perindustrian Koperasi UKM Tahun 2026 dapat kami susun.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu rangkaian dalam perencanaan pembangunan daerah Kulon Progo sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Besar harapan kami semoga dengan disajikannya Rencana Kerja Dinas Perindustrian Koperasi UKM Tahun 2026 ini dapat digunakan sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wates, 29 Juli 2025.

Kepala

IFFAH MUFIDATI, S.H., MM.
Pembina Utama Muda, IV c
NIP. 19700117 199603 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum……. 2

1.3 Maksud dan Tujuan……. 4

1.4 Sistematika Penulisan……. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah……. 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah……. 20

2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah…….. 33

2.4 Review terhadap Ranwal RKPD 2026……. 36

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…….. 47

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional……. 49

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah……. 50

3.2 Program dan Kegiatan……. 52

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 53

BAB V PENUTUP 65

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DisperinKopUKM) adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang memiliki peranan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah, didukung oleh aparatur yang handal dan profesional di bidangnya. Guna mengantisipasi dalam upaya mewujudkan demokrasi lokal dan pelayanan kepada publik sekarang ini maka kebutuhan pelayanan yang berkualitas dapat mengurangi kesenjangan antara kebijakan yang ditempuh dengan pelaksanaan yang dilakukan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam Perencanaan Pembangunan baik di tingkat nasional, regional dan daerah.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam peraturan tersebut di atas, DisperinKopUKM berupaya untuk mensinergikan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas, antara lain dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan rangkaian dari sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo sesuai Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Daerah dan Peraturan Bupati No. 87 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Perencanaan kinerja tahunan disusun dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategik. Langkah- langkah penyusunan yang ditempuh yaitu: Pertama, menyusun usulan program/ kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan potensi sumber daya

masing-masing urusan dan perkembangan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Kedua, usulan tersebut dipaduserasikan dengan daftar program/ kegiatan masyarakat bersama Pemerintah Kecamatan/ Kapanewon. Langkah terakhir yaitu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang merupakan prioritas usulan program/ kegiatan. Rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) 2025-2029 yang mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rancangan Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023-2026;
18. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
19. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025
20. Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026

21. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja :

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 yaitu sebagai upaya mensinergikan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menumbuhkan peranan yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah :

- Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
- Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, intansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
- Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo.
- Memudahkan seluruh jajaraan aparatur Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional dalam rentang waktu satu tahun.
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional dalam rentang waktu satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja perangkat daerah .

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokuman.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 (tahun-2)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat

daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian tujuan sasaran, tantangan dan peluang serta formulasi isu isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap RKPD

Berisikan perbandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta penjelasannya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan tentang uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional memuat arah dan kebijakan prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan rencana kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan daerah, pencapaian target kinerja dengan indikator kunci kinerja, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, penguatan kesiapan industri, koperasi dan UKM, dan peningkatan pendapatan industri, koperasi dan UKM.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rincian program dan kegiatan serta pendanaan.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan urusan Industri, Koperasi dan UMKM mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri serta Peraturan Menteri yang menyertainya. Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kulon Progo yang sejahtera dengan berbasis pada Industri, Koperasi dan UMKM.

Dalam mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2024 melaksanakan 7 Program, 12 Kegiatan, dan 25 Sub Kegiatan. Pengukuran Kinerja Dinas didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaiaman pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMKM	Nilai rata-rata volume usaha koperasi	Rupiah	687.217.981	1.119.929.540
	Pertumbuhan omzet UMKM yang difasilitasi	Rupiah	84.155.805.000	117.012.999.696
Meningkatnya nilai usaha industri	Nilai usaha industri	Rupiah	2.065.250.250.000	2.730.916.038.000

Tabel II.2
Pengukuran Indikator Kinerja Program Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	63,93	54,76
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi	%	96,19	95,54
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	%	5,94	9,23
Program Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan UMKM	%	1,79	2,00
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah industri baru tahun ke n	Unit	130	130
	Persentase sentra industri aktif	%	41,18	50

Dari uraian diatas, capaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Capaian indikator kinerja utama rata-rata volume usaha koperasi dalam satu daerah tahun 2024 adalah Rp. 1.119.929.540 juta dari target RKPD Perubahan sebesar Rp. 1.162.005.542 juta. Capaian rata-rata volume usaha koperasi dalam satu daerah dipengaruhi oleh indikator kinerja program persentase peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan persentase peningkatan pendidikan dan latihan koperasi dengan berbagai indikator yang menjadi pendukung ketercapaian di

dalamnya. Kedua indikator kinerja program tersebut juga tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena jumlah koperasi aktif tahun 2024 menurun sebanyak 6 koperasi dan terdapat 2 koperasi besar yang pindah Badan Hukum dari Kabupaten ke Provinsi, sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah volume usaha koperasi secara keseluruhan. Berbagai upaya peningkatan kualitas koperasi tetap dilakukan pada tahun 2024, namun upaya peningkatan kualitas koperasi tersebut masih akan belum optimal jika beberapa koperasi dengan pengurus yang sudah lanjut usia tidak melakukan regenerasi kepengurusan koperasi. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilakukan akan dijelaskan beserta dengan penjelasan capaian tiap indikator kinerja program.

Sedangkan untuk indikator kinerja utama jumlah omzet umkm yang difasilitasi OPD mengalami peningkatan di tahun 2024. Peningkatan omzet umkm yang difasilitasi OPD dipengaruhi oleh indikator kinerja program persentase peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) dan persentase pengembangan umkm. Menurunnya peningkatan ini terjadi karena ketika tahun 2023 terdapat banyak fasilitasi umkm dari program pemerintah berupa subsidi bunga pinjaman kepada pelaku usaha mikro, dimana debitur pada program ini terdapat sebanyak 946 pelaku usaha mikro. Sedangkan pada tahun 2024 yang hanya meneruskan subsidi bunga pinjaman bagi debitur tahun 2023 tersisa sebanyak 855 pelaku usaha mikro. Sebanyak 91 pelaku usaha mikro yang telah selesai pinjamannya ini sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya capaian jumlah omzet umkm yang difasilitasi oleh OPD. Fasilitasi terhadap umkm tetap dilaksanakan pada tahun 2024 baik berupa pelatihan, kurasi produk dan membuat inovasi berupa program Bela Beli Kulon Progo. Dimana fasilitasi ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap meningkatnya omzet umkm Kulon Progo.

Indikator kinerja utama meningkatnya nilai usaha industri dipengaruhi oleh jumlah industri baru dan persentase sentra industri aktif. Indikator ini

tercapai sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa segala upaya yang telah dilakukan baik berupa pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi terhadap industri untuk meningkatkan nilai usaha industri telah berhasil meskipun masih harus tetap ditingkatkan agar rasio peningkatan lebih besar di tahun-tahun berikutnya.

2.1.1 Realisasi Pelaksanaan Urusan Industri Koperasi dan UMKM

Penyelenggaraan Urusan Industri, Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya.

A. Industri

Pencapaian perkembangan industri kecil sampai dengan tahun 2024 diperlihatkan di tabel berikut :

Tabel II.3
Data Industri Kecil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan Target 2025-2026

No.	Kriteria	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
1.	Sentra	34	34	35	35
2.	Unit Usaha	16.092	16.092	16.565	17.053
3.	Tenaga Kerja (orang)	61.476	61.476	63.284	65.145
4.	Nilai Investasi (Rp.)	198.771.425.000	198.771.425.000	204.617.643.382	210.635.809.364
5.	Nilai Produksi (Rp.)	2.645.751.753.000	2.645.751.753.000	2.723.567.981.029	2.803.672.921.648
6.	Nilai Bahan baku/ Penolong (Rp.)	973.080.847.000	973.080.847.000	1.001.700.871.912	1.031.162.662.262
7.	Nilai Tambah (Rp.)	2.217.848.562.000	2.217.848.562.000	2.283.079.402.059	2.350.228.796.237

B. Koperasi

Secara umum jumlah koperasi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan target 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel II.4
Data Koperasi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan target 2025-2026

No	Uraian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	Jumlah	*Unit*	287	286	287	288
2	Anggota	*Org*	83.126	74.856	75.118	75.381
3	Simpanan	*Rp (000)*	192.237.866	187.215.525	187.870.779	188.528.327
4	Modal Sendiri	*Rp (000)*	157.234.115	158.017.002	158.570.061	159.125.056
5	Modal Luar	*Rp (000)*	258.387.249	247.156.506	248.021.554	248.889.629
6	Volume Usaha	*Rp (000)*	291.034.528	320.299.848	321.420.897	322.545.870
7	SHU	*Rp (000)*	6.034.223	5.173.002	5.191.107	5.209.276
8	Asset	*Rp (000)*	422.134.275	405.173.509	406.591616	408.014.687

Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2024

Dari data tersebut terlihat bahwa pada Tahun 2024 jumlah koperasi mencapai 286 koperasi dari target sebanyak 287 koperasi. Ditargetkan pada tahun 2025 jumlah koperasi bertambah sebanyak 1 koperasi atau ditargetkan terdapat 287 koperasi dan pada Tahun 2026 ditargetkan terdapat 288 koperasi. Jumlah anggota koperasi, simpanan anggota, modal luar, dan asset tidak mencapai jumlah yang telah ditargetkan, hal ini disebabkan oleh beberapa koperasi yang berpindah Badan Hukum ke Provinsi dan Nasional pada Tahun 2022. Jumlah koperasi yang berpindah Badan Hukum memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap capaian jumlah anggota, simpanan anggota, modal luar, dan asset . Selain itu penambahan jumlah koperasi pada Tahun 2024 hanya sebanyak 2 koperasi. Meskipun begitu, penambahan 2 koperasi baru ini dapat meningkatkan modal sendiri pada koperasi, sehingga jumlah modal sendiri koperasi dapat tercapai melebihi

target dan terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel II.5
Data Koperasi Aktif Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2024 dan Target Tahun 2025-2026

No.	Kecamatan	Target 2024			Realisasi 2024			Target 2025			Target 2026		
		Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%
1.	Temon	26	30	86,66	20	28	71,43	21	29	72,41	21	29	72,41
2.	Wates	64	71	90,14	47	68	69,12	47	68	69,12	66	73	90,41
3.	Panjatan	8	11	72,72	7	12	58,33	7	12	58,33	9	12	72,72
4.	Galur	11	16	68,75	12	18	66,67	12	18	66,67	12	17	68,75
5.	Lendah	15	16	93,75	12	15	80,00	12	15	80,00	16	17	93,75
6.	Sentolo	20	23	86,95	13	21	61,90	13	21	61,90	22	25	87,50
7.	Pengasih	37	39	94,87	31	42	73,81	31	42	73,81	38	40	94,87
8.	Kokap	23	23	100,00	21	26	80,77	21	26	80,77	24	24	100,00
9.	Girimulyo	7	9	77,77	6	9	66,67	6	9	66,67	7	9	77,77
10.	Nanggulan	14	16	87,50	12	15	80,00	12	15	80,00	14	16	87,50
11.	Kalibawang	15	16	93,75	10	14	71,43	10	14	71,43	16	17	94,11
12.	Samigaluh	15	17	88,23	15	18	83,33	15	18	83,33	15	17	88,23
Jumlah		**255**	**287**	**88,85**	**206**	**286**	**72,03**	**207**	**287**	**72,12**	**208**	**288**	**72,22**

Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo, 2023

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam proses pembinaan selama ini ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian yaitu terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi umkm, antara lain :

1. Kurangnya kemampuan dan akses umkm pada sumber-sumber informasi
2. Kurangnya kemampuan umkm untuk meningkatkan akses dan pangsa pasar
3. Kurangnya kemampuan dan akses umkm dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi

4. Kurangnya kemampuan umkm dalam mengembangkan manajemen
5. Kurangnya kemampuan umkm dalam menjalin kemitraan dan mengembangkan jaringan usaha.

Oleh karena itu pengembangan umkm oleh Dinas Perindustrian Koperasi UKM dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi umkm dalam aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

Berikut data UMKM Kabupaten Kulon Progo yang diperoleh dari kompilasi dari berbagai sumber :

Tabel II.6
Data UMKM Tahun 2024 dan Target 2025-2026

No	*Sektor Ekonomi*	*Target 2024*	*Realisasi 2024*	*Target 2025*	*Target 2026*
1	Pertanian, Peternakan				
	Kehutanan dan Perikanan	3.763	6.712	6.824	6.938
2	Pertambangan dan Penggalian				
3	Industri Pengolahan	17.783	16.293	16.565	16.842
4	Bangunan	299	154	157	159
5	Perdagangan, Hotel dan Restoran :				
	a. Hotel dan Restoran	814	648	659	670
	b. Pedagang Pasar	9.269	9.469	9.627	9.788
	c. Pedagang di luar pasar	11.649	15.468	15.726	15.989
	d. Pedaki	2.211	3.010	3.060	3.111
6	Pengangkutan dan Komunikasi	778	574	584	593
7	Jasa-jasa	499	549	558	567
	Jumlah	47.065	52.877	53.760	54.658

Sumber : Kompilasi dan olahan berbagai sumber Tahun 2024

Dari data di atas dapat diketahui jumlah umkm yang diperoleh dari data kompilasi dan olahan berbagai sumber, pada tahun 2024 sebanyak 52.877 umkm yang tersebar dalam bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan serta pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, dan jasa-jasa.

Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo mulai melakukan perbaikan data UMKM terhadap sejumlah 52.877 UMKM yang disajikan pada tahun 2024. Perbaikan data dilakukan dengan mengambil data UMKM yang tercatat secara jelas nama dan alamat UMKM. Dari hasil perbaikan data UMKM tersebut, diperoleh jumlah UMKM tahun 2024 sebanyak 44.527 UMKM dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel II.7
Data UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Hasil Perbaikan Data

No	Keterangan	JUMLAH
1	A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)	4.943
2	B (Pertambangan dan Penggalian)	4
3	C (Industri Pengolahan)	20.567
4	D (Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin)	7
5	E (Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah dan Aktivitas Remediasi)	1
6	F (Kosntruksi)	161
7	G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor)	15.244
8	H (Pengangkutan dan Pergudangan)	72
9	I (Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum)	1.266
10	J (Informasi dan Komunikasi)	311
11	K (Aktivitas Keuangan dan Asuransi)	12

12	L (Real Estate)	2
13	M (Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis)	41
14	N (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya)	348
15	P (Pendidikan)	2
16	Q (Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial)	353
17	R (Kesenian, Hiburan dan Rekreasi)	141
18	S (Aktivitas Jasa Lainnya)	1.052
19	T (Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri)	1
TOTAL		**44.527**

Sumber data : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, tahun 2024

Data UMKM tahun 2024 sebanyak 44.527 unit usaha di atas digunakan sebagai basis data UMKM tahun 2024 sebagai salah satu dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2026

Tabel II.8
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025
Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)* / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
							K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp
2					**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**							-								
2	17				**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**															
2	17	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**9.098,96**	**100**	**11.944,19**	**100,00**	**12.804,79**	**100,00**	**10.461,05**	100,00	81,70	100,00	2.537,52	24.942,76	274,13
2	17	01	2,01		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*														
2	17	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	152,00	2	15,98	2	15,98	2	15,73	100,00	98,44	4	13,03	44,74	29,44
2	17	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	51,72	21	7,45	21	7,45	21	7,17	100,00	96,24	21	6,97	21,59	41,75
2	17	01	2,02		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*														
2	17	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.296	7.464,71	12	2.296,03	12	2.296,03	12	1.974,57	100,00	86,00	14	2.461,26	6.731,86	90,18
2	17	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	155,30	12	36,90	12	36,90	12	36,45	100,00	98,78	12	38,25	111,60	71,86
2	17	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	76	52,81	19	9,35	19	9,35	19	9,02	100,00	96,47	19	8,38	26,75	50,66
2	17	01	2,06		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen administrasi umum*														
2	17	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	67,06	5	16,16	5	16,16	5	13,91	100,00	86,08	5	15,07	45,14	67,31
2	17	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	156,18	12	34,13	12	34,13	12	32,54	100,00	95,34	12	31,88	98,55	63,10
2	17	01	2,07		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah penambahan aset*														
2	17	01	2,07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.983,90	1	6.725,57	1	4.823,93	100,00	71,73	1	1.729,94	12.537,77	#DIV/0!
2	17	01	2,07	;0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukun Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	55,26	9	3.312,36	1.045	3.431,31	1.045	3.334,67	100,00	97,18	1	250,00	6.897,03	12.481,05
2	17	01	2,08		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*														

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)* / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	17	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	157,51	3	59,90	12	59,89	12	43,53	100,00	72,68	12	177,64	281,07	178,44
2	17	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-	-	12	93,48	12	93,48	12	93,05	100,00	99,54	12	93,54	280,07	#VALUE!
2	17	01	2,09		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*														
2	17	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	64	235,09	16	61,32	16	61,32	16	59,54	100,00	97,10	16	77,19	198,05	84,24
2	17	01	2,09	;0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	123	155,12	21	17,22	33	17,22	33	16,94	100,00	98,37	17	25,50	59,66	38,46
2	17	01	2,09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	25,76	-	-							-	-		
2	**17**	**03**			**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	**Presentase peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**67,52**	**1.512,75**		**95,56**	**63,93**	**20,00**	**54,76**	**19,06**	**85,66**	**95,30**	**65,69**	**17,84**	132,46	8,76
2	17	03	2,01		*Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota*	*Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi*														
2	17	03	2,01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi					12,00	108	12,00	128	11,28	118,52	94,00	108	11,46	34,74	#DIV/0!
2	17	03	2,01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					8,00	5	8,00	16	7,78	320,00	97,25	5	6,38	22,16	#DIV/0!
2	17	03	2,01	0001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan PengawasanKekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	463	903,87	136	40,91							-	-	40,91	4,53
2	17	03	2,01	0002	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	52	608,88	13	34,65							-	-	34,65	5,69
2	**17**	**05**			**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Presentase peningkatan pendidikan dan latihan koperasi**	**98,46**	**800,00**		**581,91**	**96,19**	**354,35**	**95,54**	**347,95**	**99,32**	**98,19**	**97,31**	**90,93**	1.020,79	127,60
2	17	05	2,01		*Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota*	*Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi*													-	#DIV/0!
2	17	05	2,01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		2.260	1.634,75	585	354,35	212	354,35	212	347,95	100,00	98,19	93	90,93	793,23	48,52

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)* / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	17	05	2,02		*Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi*														
2	17	05	2,02	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami UKM	540	782,05	135	227,56	-	-	-	-	-	-	-	-	227,56	29,10
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usahaa Mikro (UMKM)**	**Presentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**	**5,67**	**457,27**		**2.165,90**	**5,94**	**2.115,87**	**9,23**	**2.107,70**	**155,39**	**99,61**	**4,73**	**1.984,17**	6.257,77	1.368,51
2	17	07	2,01		*Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan*	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM)*														
2	17	07	2,01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	480	109,33	170	1.778,81	1.176	1.778,81	1.085	1.777,60	92,26	99,93	946	1.766,26	5.322,67	4.868,44
2	17	07	2,01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	672,000	258,60	186	25,00	15	25,00	27	24,72	180,00	98,88	55	210,73	260,45	100,72
2	17	07	2,01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	-	-		14,83	100	14,83	52.877	14,19	52.877,00	95,68	57.335	7,19	36,21	#VALUE!
2	17	07	2,01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	-	-		297,23	110	297,23	110	291,19	100,00	97,97	-	-	588,42	#VALUE!
2	17	07	2,01	0001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisai Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39	89,34	39.000	50,03	-	-	-	-	-	-	-	-	50,03	56,00
						Profil KUMKM	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
2	17	08			**Program Pengembangan UMKM**	**Persentase Pengembangan UMKM**	**2,39**	**801,13**		**494,04**	**1,79**	**76,38**	**2,00**	**68,66**	**111,73**	**89,89**	**2,09**	**468,63**	1.031,33	128,73
2	17	08	2,01		*Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil*	*Persentase Pengembangan UMKM*													-	#DIV/0!
2	17	08	2,01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1.000	801,13		76,38	150	76,38	150	68,66	100,00	89,89	100	468,63	613,67	76,60
2	17	08	2,01	0001	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.000	801,13	446	417,66	-	-	-	-	-	-	-	-	417,66	52,13

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* / Kegiatan *(output)* / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	22				**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**														-	#DIV/0!
2	**22**	**08**			**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan industri kreatif berbasis budaya**	**100,00**	**886,37**		**230,00**	**100,00**	**219,45**	**100,00**	**216,62**	**100,00**	**98,71**	**#N/A**	**1.734,93**	2.181,55	246,12
2	22	08	5,06		*Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya*	*Capaian Penyelenggaraan KeistimewaanYogyakarta Urusan Kebudayaan*													-	#DIV/0!
2	22	08	5,06	0003	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Industri Kreatif	460	886,36	115	230,00	75	219,45	75	216,62	100,00	98,71	290	1.734,93	2.181,55	246,12
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**														-	#DIV/0!
3	31				**Urusan Pemerintahan Bidang Industri**														-	#DIV/0!
3	**31**	**02**			**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Jumlah Industri Baru tahun ke n**	**175**	**13.281,68**			**130**	**1.733,87**	**67**	**1.674,88**	**51,54**	**96,60**	**150**	**876,63**	2.551,51	19,21
						Persentase sentra industri aktif	52,94				41,18		47		114,28		47,06		-	#DIV/0!
3	31	02	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														-	#DIV/0!
3	31	02	2,01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya	24	928,20			5	247,97	5	244,63	100,00	98,65	1	94,34	338,97	36,52
3	31	02	2,01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan	76	951,41			4	179,73	4	152,24	100,00	84,70	8	203,87	356,11	37,43
3	31	02	2,01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Indsutri dan Peran Serta Masyarakat	96	11.402,09			4,00	1.306,16	5	1.278,01	125,00	97,84	5	578,42	1.856,43	16,28

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian tahun 2024 dapat tercapai semua. Beberapa sub kegiatan realisasi anggarannya tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan harga pasar dan realisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2024 Dinas Koperasi UKM mendapatkan tambahan anggaran dari Dana Insentif Fiskal sebesar Rp. 860.618.000,- yang digunakan untuk kelengkapan pembangunan gedung PLUT berupa master fire alarm, LPJU, penambahan daya listrik, pembangunan IPAL dan Pagar. Pelaksanaan pembangunan pagar gedung PLUT akan dilaksanakan di tahun 2025. Perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran agar dapat disusun solusi untuk pengoptimalisasian pelaksanaan anggaran dan belanja serta pencapaian indikator kinerja program Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang Perindustrian dan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
- Pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
- Pelaksanaan administrasi pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo mengampu Urusan Perindustrian Koperasi dan UMKM dengan 3 bidang, yakni Bidang Koperasi, Bidang Perindustrian dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro serta satu Sekretariat.

Tugas masing-masing Bidang adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

   Mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.

b. Bidang Koperasi

   Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan Lembaga, pengelolaan data dan informasi pengawasan Koperasi.

c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

   Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia dan pemberdayaan usaha.

d. Bidang Perindustrian

   Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

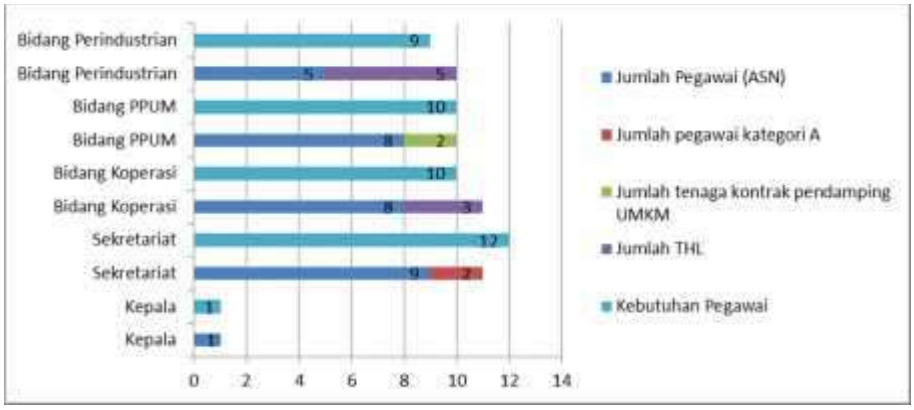
Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo pada Januari 2025, pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 31 pegawai, tenaga kontrak kategori A (Non ASN) sebanyak 2 pegawai, tenaga kontrak pendamping UMKM sebanyak 2 pegawai dan tenaga harian lepas (THL) sebanyak 8 orang. Mendasar pada analisis beban kerja, jumlah pegawai yang ideal untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo adalah sejumlah 42 orang. Data ini dapat dilihat secara rinci pada diagram berikut ini :

Tabel II.8
Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

	Kepala	Sekretariat	Bidang Koperasi	Bidang PPUM	Bidang Perindustrian
Jumlah Pegawai (ASN)	1	9	8	8	5
Jumlah pegawai kategori A		2			
Jumlah tenaga kontrak pendamping UMKM				2	
Jumlah THL			3		5
Kebutuhan Pegawai	1	12	10	10	9

Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025



Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, per Januari 2025

Gambar 2.2
Diagram Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Kondisi Sarana Prasarana

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.9
Kondisi Aset Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

No	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik	Kondisi Buruk
1	Tanah untuk bangunan industri	1	1	-
2	Gedung Kantor	1	1	-
3	Kendaraan Dinas Roda 4	3	3	-
4	Kendaraan Dinas Roda 2	16	16	-
5	Mesin Ketik	4	4	-
6	Alat Komputer	80	75	5
7	Televisi	9	8	1
8	AC Split	27	27	-
9	Kamera	4	4	-
10	Facsimile	1	1	-
11	Aset Lainnya dalam KIB B	746	745	1
JUMLAH		892	885	7

Sumber data : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel II.10
Kondisi Aset Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PLUT) Tahun 2024

No	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik	Kondisi Buruk
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	1	-
2	Mesin Proses	3	3	-
3	Electric Generating Set	1	1	-
4	Alat Ukur	2	2	-
5	Alat Processing	13	13	-
6	Alat Pengolah Lainnya	2	2	
7	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	35	35	
8	Alat Kantor Lainnya	9	9	
9	Mebel	336	336	

10	Alat Pendingin	30	30	
11	Alat Dapur	22	22	
12	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20	20	
13	Peralatan Studio Audio	12	12	
14	Peralatan Studio Video dan Film	10	10	
15	Peralatan Cetak	12	12	
16	Laboratory Safety Equipment	1	1	
17	Personal Computer	26	26	
18	Peralatan Mini Computer	1	1	
19	Peralatan Personal Computer	9	9	
20	Peralatan Komputer Lainnya	4	4	
21	Rambu Tidak Bersuar	11	11	
JUMLAH		560	560	-

Sumber data : Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo sebagai unsur pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan fungsi pelayanan kepada masyarakat, terutama urusan perindustrian, dan urusan koperasi dan UMKM.

1. **Fasilitas Pendukung Pelayanan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo**

   Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik untuk urusan industri, koperasi maupun UMKM mulai dari tahun 2025 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo didukung oleh adanya gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM. Gedung PLUT KUMKM ini dibangun pada tahun 2024 yang bertujuan untuk memfasilitasi industri, koperasi maupun UMKM baik dari kelembagaannya, produktivitas, kualitas maupun pemasaran produknya. Layanan yang ada dalam gedung PLUT

KUMKM ini berupa Konsultasi , inkubasi dan pendampingan oleh konsultan produksi, konsultan pemasaran, konsultan sdm, konsultan kelembagaan dan konsultan pembiayaan dengan fasilitas yang ada berupa ruang pelatihan, ruang aula, ruang kemasan, ruang multimedia, co-working space, ruang inkubator kuliner, ruang inkubator digital, ruang inkubator kriya, galeri produk dan cafe. Gedung ini bertempat di Jl. Wates-Purworejo, Sogan, Wates, Kulon Progo

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kemandirian dan daya saing daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana yang tercantum dalam Renstra 2025-2029 sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029 yang terkait dalam urusan pemerintahan, perindustrian, koperasi dan UMKM maka telah ditetapkan indikator tujuan berupa indeks reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen.

Sedangkan dalam rangka mencapai sasaran RPJMD 2025-2029 yakni meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel dan meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UMKM serta daya saing industri maka telah ditetapkan beberapa indikator kinerja urusan pemerintahan, perindustrian, koperasi dan UMKM, yakni meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang responsive dan akuntabel dan meningkatnya nilai usaha industri, persentase koperasi berkualitas dan jumlah UMKM yang naik sub kelas serta indikator program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator persentase subkegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan indikator persentase koperasi sehat, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dengan indikator persentase usaha mikro yang mempunyai legalitas, program pengembangan UMKM dengan indikator

omzet usaha mikro, program pengembangan industri kreatif dengan indikator jumlah pelaku usaha KUMKM binaan yang naik kelas serta program perencanaan dan pembangunan industri dengan indikator jumlah industri kecil dan menengah tahun ke-n.

Tabel II.11

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM

Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (Thn n-2)	**Tahun 2025 (Thn n-1)**	**Tahun 2026 (Thn n)**	**Tahun 2027 (Thn n+1)**	**Tahun 2024 (Thn n-2)**	**Tahun 2025 (Thn n-1)**	**Tahun 2026 (Thn n)**	**Tahun 2027 (Thn n+1)**	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	[redacted]	(13)
1	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah			100	100	100	[redacted]	50	100*)	100*)	[redacted]	
2	Nilai rata-rata volume usaha koperasi			1.162.005.542	688.616.929	690.149.936	[redacted]	1.119.929.540	1.231.922.494*)	1.355.114.743*)	[redacted]	
3	Pertumbuhan jumlah omset UMKM yang difasilitasi			105.321.385.000	92.344.485.500	101.472.659.000	[redacted]	117.012.999.696	128.714.299.665*)	141.585.729.632*)	[redacted]	
4	Nilai Usaha Industri			2.065.250.250.000	2.840.559.750.000	3.010.993.335.000	[redacted]	2.730.916.038.000	2.840.559.750.000*)	3.010.993.335.000*)	[redacted]	
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		√	-	-	-	[redacted]	76,21	-	-	[redacted]	
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		√	-	-	-	[redacted]	100	-	-	[redacted]	

	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		√	-	-	-		0,814	-	-	
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		√	-	-	-		107,92	-	-	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait							0,6	-	-	

	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait						[redacted]	0	-	-	[redacted]
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota						[redacted]	0	-	-	[redacted]

	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkin							115	-	-		

Dalam tabel di atas, target indikator kinerja terdiri dari target indikator kinerja sesuai dengan Renstra 2023- 2026 Dinas Perindustrian Koperasi UKM. Realisasi indikator kinerja utama Dinas Koperasi UKM Tahun 2024 tercapai melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini sebagai bukti keberhasilan dari hasil usaha Dinas Perindustrian Koperasi UKM berupa pendampingan maupun pelatihan dan bimbingan yang diberikan kepada industri, koperasi dan UMKM. Selain itu kemauan dan kemampuan baik industri, koperasi dan UMKM yang lebih baik dari sebelumnya. Dapat dilihat bahwa omset baik industri, koperasi maupun UMKM terealisasi melebihi target yang telah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2025 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang Perindustrian dan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Pengembangan dan Pemberdayaan industri, koperasi dan UMKM akan menciptakan industri yang berdaya saing dan koperasi serta UMKM yang tangguh, kuat dan mandiri yang akan menjadi salah satu pemicu dan pemacu bergeraknya roda perekonomian daerah. Untuk mencapai hal tersebut maka optimalisasi pembinaan dan penggiatan industri, koperasi dan UMKM menjadi satu kunci pokok. Selain itu terdapat beberapa tantangan dan sekaligus peluang untuk mencapai hal tersebut.

Peluang :

a. Komitmen dalam pemberdayaan industri koperasi dan UMKM
b. Tersedianya potensi usaha dan investasi
c. Adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menyebabkan pangsa pasar yang semakin terbuka
d. Berkembangnya produk unggulan daerah
e. Akses permodalan luas
f. Berdirinya kelompok/organisasi berbasis umkm
g. Tersedianya SDM/SDA yang relatif besar
h. Perkembangan teknologi informasi
i. Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwira usaha cukup besar
j. Jumlah industri koperasi dan UMKM yang terus berkembang;

k. Adanya Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo
l. Dibukanya jalur bedah menorah di Kabupaten Kulon Progo
m. Adanya kawasan industri
n. Kebijakan dan regulasi pemerintah dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan industri koperasi dan UMKM

Tantangan :

a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen, keuangan dan mekanisme kerja koperasi
b. Penciptaan iklim usaha yang kondusif, pengembangan usaha dan Pembiayaan bagi UMKM
c. Adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menyebabkan persaingan ketat, kemajuan teknologi cepat, pasar semakin demanding dan dinamis
d. Semakin meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna
e. Peningkatan pembinaan atau pendampinga terhadap izin usaha industrI dan kualitas produk IKM.

Secara umum permasalahan stategis yang dihadapi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

a. Masih rendahnya daya saing usaha mikro/ Industri Kecil Menengah (IKM) dalam legalitas, kualitas, jiwa wirausaha dan pemasaran.
b. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman umkm terhadap akses permodalan.
c. Lemahnya tata kelola koperasi.
d. Terbatasnya bahan baku industri di dalam daerah
e. Belum diterapkannya prinsip industri hijau pada sebagian besar pelaku usaha

2.3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Melalui pencermatan terhadap tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dapat disimpulkan bahwa isu strategis yang dihadapi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo adalah “Rendahnya Daya Saing Industri dan Rendahnya Kualitas Koperasi dan UMKM”.

2.3.3 Solusi

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan tugas dan fungsinya, maka beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya penanganan permasalahn tersebut adalah :

1) Pemberdayaan usaha mikro/ IKM dari hulu ke hilir berupa pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi IKM dan Sentra IKM, mulai dari peningkatan kualitas produk, kemasan, sampai dengan pemasarannya, serta melakukan upaya digitalisasi pengelolaan IKM dan Sentra IKM
2) Pelatihan terhadap umkm sesuai dengan sektor potensial yang dihasilkan oleh setiap wilayah masing-masing
3) Fasilitasi berupa pendampingan terhadap kualitas, legalitas maupun pemasaran kepada UMKM baik secara offline maupun online
4) Fasilitasi jaringan kerjasama dengan sumber-sumber permodalan dan pemantauan/ pendampingan pengelolaan permodalan
5) Peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, peningkatan pengawasan kepada koperasi, dan peningkatan kapasitas sdm koperasi melalui pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan pendampingan

2.4 Review Terhadap Ranwal RKPD 2026

Hasil review terhadap Ranwal RKPD Tahun 2026 dibandingkan dengan analisa kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.12
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kulon Progo

PD : Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***100%***	**2.382.590.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kulon Progo**	**Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi**	***100%***	**3.004.571.637**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu**	**24 Dokumen**	**53.340.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu**	**100%**	**10.876.100**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	39.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.783.200	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	21 Laporan	13.540.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan	5.092.900	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**43 Laporan**	**1.986.990.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu**	**100%**	**2.525.434.735**	

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	*324 Orang/Bulan*	1.932.490.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*30 Orang/bulan*	2.485.876.035	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	*12 Dokumen*	40.670.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	*1 Dokumen*	33.200.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD	19 Laporan	13.830.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD	14 Laporan	6.358.700	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**30.000.000**	-		-	-		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000						
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi umum**	**2 Dokumen**	**58.460.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**	**100%**	**41.688.900**	

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	*5 Paket*	17.560.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	*1 Paket*	18.018.900	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	*12 Laporan*	40.900.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	*1 Laporan*	23.670.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Penambahan Aset**	**3 Unit**	**14.470.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Penambahan Aset**	**100%**	**18.322.900**	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	14.470.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	18.322.900	

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**	***24 laporan***	**125.980.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	***100%***	**300.266.902**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	*12 Laporan*	41.250.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	*1 Laporan*	190.243.714	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	*12 Laporan*	89.150.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	*1 Laporan*	110.023.188	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	***3 Laporan***	**108.930.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	***100%***	**107.982.100**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak atau perizinannya	*16 Unit*	61.560.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	*16 Unit*	62.349.600	

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	*31 Unit*	47.370.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*49 Unit*	45.632.500	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	**Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	***67,52%***	**396.090.000**	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Koperasi Sehat**	***24,04 %***	**108.595.000**	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	***67,52%***	**396.090.000**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**				**108.595.000**	
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan koperasi		Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	*120 Unit Usaha*	236.660.000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan koperasi		Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	*13 Unit Usaha*	97.888.900	

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	*13 Unit Usaha*	159.430.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	*60 Unit Usaha*	10.706.100,00	
Program Penddikan dan Latihan Perkoperasian		**Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi**	***98,46%***	**437.690.000**						
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi**	***98,46%***	**437.690.000**						
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	*565 Orang*	437.690.000						

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	**Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	***5,67%***	**315.230.000**	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Kulon Progo**	**Persentase pemberdayaan usaha mikro**	***54,01 %***	**909.968.809**	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalu Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Prizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	***5,67%***	**315.230.000**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalu Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Prizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		**-**	**-**	**909.968.809**	
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		Jumlah unit usaha mikro terdata	*39.000 Unit Usaha*	24.280.000	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		Jumlah unit usaha mikro terdata	*49724 Unit Usaha*	7.778.900	
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	*120 Unt Usaha*	29.270.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	*640 Unit Usaha*	841.989.909	
Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro		Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	*168 Unit Usaha*	66.170.000	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro		Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	*175 Unit Usaha*	60.200.000	

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
Program Pengembangan UMKM		**Persentase Pengembangan UMKM**	***2,39%***	**227.900.000**	**Program Pengembangan UMKM**		**Peningkatan Omzet Usaha Mikro**	***6.000.000 Rupiah***	**481.970.030**	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		**Persentase Pengembangan UMKM**	***2,39%***	**227.900.000**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**		-	-	**481.970.030**	
Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	*250 Unit Usaha*	227.900.000	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	*100 Unit Usaha*	481.970.030	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN										
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		**Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	***1 Kali***	**221.590.000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**umlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas**	***2 Pelaku Usaha***	**3.478.584.800**	
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		**Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	***1 Kali***	**221.590.000**	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**				**3.478.584.800**	
Pengembangan Industri Kreatif		Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	*115 Unit*	221.590.000	Pengembangan Industri Kreatif		Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan		3.478.584.800	

Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuan					Catatan penting
Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	**Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program**	**Target capaian kinerja**	**Kebutuhan dana/Pagu Indikatif**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		**Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun ke-n**	***0,83%***	**423.169.300**	
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				**423.169.300**	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*4 Dokumen*	63.726.000	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	*3 Dokumen*	76.830.700	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*3 Dokumen*	282.612.600	

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 sub kegiatan dari Rancangan Awal RKPD yang tidak dilaksanakan di Rencana Kerja 2026, hal ini dilakukan karena menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang dilakukan di tahun 2026. Selain itu terdapat 3 sub kegiatan baru dari urusan pemerintahan bidang perindustrian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas. Dimana berdasarkan PerBup tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berubah menjadi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan tugas serta fungsinya bertambah satu, yakni urusan pemerintahan bidang perindustrian.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan ditahun 2026 dari Pokok Pikiran DPRD yang terangkum dalam Rancangan Akhir Renja 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel II.13
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Kulon Progo

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian Koperasi UKM

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Wates	Meningkatnya kapasitas SDM Koperasi	1 Kelompok	Pokok pikiran DPRD
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalu Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Prizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Lendah	Meningkatnya manajemen usaha umkm	1 Kelompok	Pokok pikiran DPRD
3	Program Pengembangan UMKM				
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Wates	Meningkatnya kapasitas SDM Koperasi	1 Kelompok	Pokok pikiran DPRD
	Pengembangan Usaha Mikro	Kokap, Galur	Meningkatnya kualitas produk umkm	2 Kelompok	Pokok pikiran DPRD
		Galur	Meningkatnya pemasaran produk umkm	1 Kelompok	Pokok pikiran DPRD
4	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kokap, Wates	Meningkatnya jumlah industri	3 Kelompok	Pokok pikiran DPRD
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Galur	Meningkatnya kualitas kemasan produk industri	1 Kelompok	Pokok pikiran DPRD
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Galur	Meningkatnya kualitas produk industri	1 Kelompok	Pokok pikiran DPRD
		Wates, Sentolo, Lendah	Meningkatnya kapasitas industri	3 Kelompok	Pokok pikiran DPRD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun berpedoman pada RKPD dan kebijakan nasional. RPJMN 2025-2029 bertujuan untuk mewujudkan visi berupa " Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" dengan fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Terdapat 8 prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 :

1. Ideologi Pancasila dan Demokrasi

   Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

2. Kemandirian Bangsa

   Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi.

3. Pengembangan Infrastruktur

   Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas.

4. Pembangunan SDM

   Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan.

5. Hilirisasi Industri

   Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Pembangunan dari Desa

   Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

7. Reformasi Politik dan Hukum

   Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

8. Harmonisasi dengan Lingkungan

   Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya.

Dari 8 priotitas nasional tersebut terdapat 3 prioritas yang berkaitan dengan industri, koperasi dan UMKM, yakni Kemandirian Bangsa, Hilirisasi Industri, dan Pembangunan dari Desa yang dituangkan menjadi tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah dan diturunkan kembali menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi kedua Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi serta misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.. Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian Koperasi UKM
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1	Meningkatnya Kemandirian Daerah		PDRB Per Kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	42.865-43.357
2	Meningkatnya Daya Saing Daerah		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Miliar rupiah	2.048,17-2.159,39
		Meningkatnya koperasi dan UMKM yang berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	%	32,69
			Jumlah UMKM MIkro yang naik subkelas	Unit Usaha	20.653
		Meningkatnya nilai usaha industri	Nilai usaha industri	Rp	2.735.445.369.346
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang responsive dan akuntabel		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	A
			Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini BPK	WTP
			Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	86,90
		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100

Tujuan dan sasaran di atas telah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteris (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo.

3.2 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sendiri sekaligus tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Rencana kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sub Kegiatan Pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	24,04
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai legalitas	%	47,99
4.	Program Pengembangan UMKM	Omzet usaha mikro	Rp	177.600.000.000
5.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun ke-n	Unit	16.357
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas	Pelaku Usaha	5

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan rencana kegiatan merupakan representasi dari gerak dan langkah PD dalam kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Untuk penyusunan rencana pelaksanaan program maupun kegiatan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain yaitu :

a. Kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dengan proritas yang sesuai dengan tupoksi Dinas Perindustrian Koperasi UKM yaitu: pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah, penanggulangan kemiskinan, pengembangan kawasan aerotropolis dan optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
b. Pencapaian target kinerja dengan Indikator Kunci Kinerja (IKK) yaitu urusan koperasi dan UMKM (IKM dan Usaha Mikro) dengan capaian target yang telah ditentukan.
c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah khususnya optimalisasi pengembangan produk lokal yang menjadi ciri khas daerah dan merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat. Dengan pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mereduksi kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
d. Penguatan kesiapan industri, koperasi dan UMKM dalam rangka menangkap peluang beroperasinya bandara YIA dan kawasan ekonomi khusus serta bedah menoreh.
e. Peningkatan pendapatan industri, koperasi dan UKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo memuat 6 program, 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan (termasuk eks BAU) yang memiliki sasaran Industri, Koperasi dan UMKM yang tersebar di 12 Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1
Usulan Pendanaan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						**8.406.859.576,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.983.690.276,00**							**0,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**4.505.105.476,00**							**0,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi***	**-**			**1001100 %**	**3.004.571.637,00**						**-**	**0,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.876.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			0				2 0	5.783.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	5.092.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.525.434.735,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2.485.876.035,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	33.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	6.358.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	41.688.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.018.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	23.670.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	18.322.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	18.322.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	300.266.902,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	190.243.714,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	110.023.188,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	107.982.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	62.349.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				49 Unit	45.632.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase Peningkatan Koperasi Sehat***	**-**			**24,04 %**	**108.595.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	108.595.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUMKM	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				13 Unit Usaha	97.888.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			0				60 0	10.706.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase pemberdayaan usaha mikro***	**-**			**54,01 %**	**909.968.809,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	909.968.809,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	UMKM	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				640 Unit Usaha	841.989.909,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	UMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				175 Unit Usaha	60.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	UMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				49724 Unit Usaha	7.778.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	UMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Peningkatan Omzet Usaha Mikro***	**-**			**6000000 Rupiah**	**481.970.030,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	481.970.030,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	UMKM	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				100 Unit Usaha	481.970.030,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	UMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**3.478.584.800,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas***	**-**			**2 Pelaku Usaha**	**3.478.584.800,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-			-	3.478.584.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUMKM	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif														
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				200 Unit	3.478.584.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**423.169.300,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**423.169.300,00**							**0,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah tahun ke-n***	**-**			**0,83 %**	**423.169.300,00**						**-**	**0,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	423.169.300,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Industri Kecil	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				4 Dokumen	63.726.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Industri Kecil		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				3 Dokumen	76.830.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Industri Kecil		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				3 Dokumen	282.612.600,00	-	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Industri Kecil		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	J U M L A H							**8.406.859.576,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pembinaan dan pengembangan industri, koperasi dan UMKM sangat kompleks karena jumlahnya yang besar dan tersebar di seluruh wilayah dengan tingkat kemajuan yang beraneka ragam dan dihadapkan pada masalah dalam berbagai aspek. Untuk mensukseskan pembinaan dan pengembangan perlu difokuskan pada jejaring kerjasama yang saling mendukung antar instansi, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat.

Industri, koperasi dan UMKM harus aktif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan berbagai peluang dan kesempatan usaha yang ada. Reorientasi pembinaan dengan pendekatan sosial ke arah prinsip bisnis dan kemandirian, lembaga-lembaga pembina baik pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat perlu meningkatkan profesionalisme dan kemandirian. Selain itu pengoptimalan keberadaan PLUT, sinergitas dengan Lembaga Keuangan, Peran serta masyarakat, monitoring keberlanjutan KDMP dan penanganan hilirisasi Perindustrian juga perlu untuk ditingkatkan.

Dalam kenyataannya sektor industri, koperasi dan UMKM memiliki banyak peluang untuk berkembang karena memiliki banyak potensi yang mendukung, baik dari sisi SDM, sumber daya alam maupun produk-produk lokal yang memiliki daya saing dan juga keunggulan komparatif. Namun potensi tersebut belum dapat digali dan dipromosikan secara optimal serta belum difasilitasi secara maksimal oleh Pemerintah Daerah karena keterbatasan sarana-prasarana dan juga dana, serta belum didukung jiwa *entrepreneurship* masyarakat. Namun demikian berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut yaitu antara lain melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan serta bantuan usaha.

Perencanaan dan pengembangan industri, koperasi dan UMKM merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, yang berfungsi untuk memberikan gambaran ke depan tentang arah pembangunan industr di Kabupaten Kulon Progo dalam periode satu tahun.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2026, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan atas Renja dinas ini. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wates, 29 Juli 2025
Kepala Dinas Perindustrian Koperasi UKM
Kabupaten Kulon Progo

IFRAH MUFIDATI, S.H., MM.
Pembina Utama Muda, IV c
NIP. 19001171996032004

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO



RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2026

JL. KH Ahmad Dahlan KM 1, Wates, Wates, Kulon Progo

(0274)774402

dpmptsp.kulonprogo.go.id

dpmptsp@kulonprogokab.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR TABEL 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Pokok 22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN 35
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 36
3.3. Program dan Kegiatan 36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 38
BAB V PENUTUP 48

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Pengukuran Sasaran Renja Tahun 2024 8
Tabel 2. 2 Pengukuran Sasaran Renja Tahun 2024 11
Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024 12
Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 13
Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo 21
Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 25
Tabel 2. 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 33
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 36
Tabel 3. 2 Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2026 37
Tabel 4. 1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratiran Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

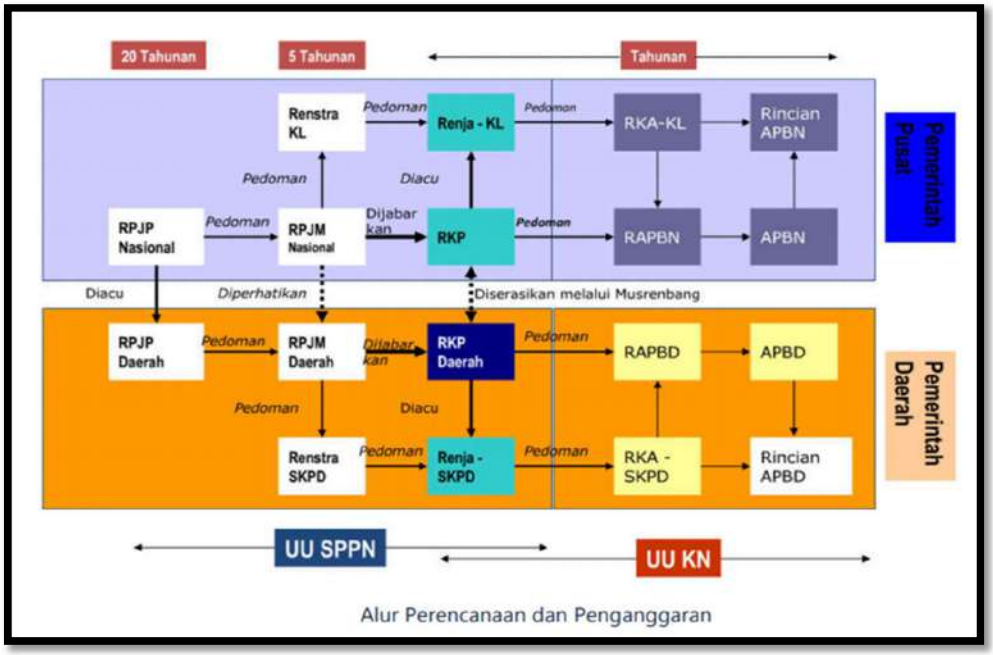
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 mengacu kepada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rankhir RPJMD) Tahun 2025–2029 yang dijabarkan pada Rancangan Rencana Strategis (Rancangan Renstra) DPMPTSP Tahun 2025–2029. Selain itu, dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 juga mengacu kepada Rencana Kerja Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPMRI) dan Renstra DPMPTSP DIY Tahun 2022-2027. Renja DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun sebagi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo

yang dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPD) Tahun 2026. Dalam penyusunan Renja diperhatikan kondisi internal dan eksternal yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan DIY.

Renja disusun sebagai acuan Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran tahun 2026 yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Renja Perangkat Dearah menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) melalui penetapan APBD Kabupaten. Alur yang dilakukan adalah sebagai berikut.



Alur Perencanaan dan Penganggaran

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu (Renja DPMPTSP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahtentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029
i. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
j. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas;
k. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026;
l. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo;
m. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja DPMPTSP Tahun 2026 adalah sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan dan pengendalian, bahan koordinasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026. Disamping itu maksud dan tujuan disusunnya Renja DPMPTSP Tahun 2026 adalah untuk merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2026 beserta rencana anggaran tahunan secara sistematis yang berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan bidang urusan, kebutuhan dan kemampuan keuangan/ anggaran daerah yang tersedia guna mencapai sasaran dan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi PD.

Tujuan penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2026 berdasarkan RKPD tahun 2026 dan RPD tahun 2023-2026.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.

3. Mengupayakan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan DPMPTSP.
5. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra-PD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra PD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Realisasi keuangan program dan kegiatan tahun 2024 mencapai 96,78%. Secara umum, semua kegiatan telah berjalan lancar dan memenuhi target yang telah ditetapkan baik secara keluaran, fisik maupun anggaran. Realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada table 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Tabel Pengukuran Sasaran Renja Tahun 2024

No	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET 2024		REALISASI Tahun 2024	
				KINERJA	KEUANGAN (Rp.)	KINERJA	KEUANGAN (Rp.)
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**		**2.785.287.822**		**2.655.096.631**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu*			*19.647.900*		*19.502.109*
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	15.050.800	2	14.940.643
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	21	4.597.100	21	4.561.466
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*			*2.018.751.802*		*1.898.758.944*
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	orang /bulan	30	1.966.528.802	27	1.848.203.178
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	47.700.000	12	46.125.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	14	4.523.000	14	4.430.766
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Layanan koordinasi dan perjalanan dinas kota*			*106.395.700*		*104.387.145*
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	5	25.892.700	5	23.891.799
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	80.503.000	12	80.495.346
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*			*37.787.600*		*37.700.000*

No	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET 2024		REALISASI Tahun 2024	
				KINERJA	KEUANGAN (Rp.)	KINERJA	KEUANGAN (Rp.)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	4	37.787.600	4	37.700.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Layanan administrasi perkantoran*			*389.800.920*		*383.885.739*
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	145.060.740	12	140.113.467
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	12	244.740.180	12	243.772.272
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah aset kondisi baik*			*212.903.900*		*210.862.694*
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	16	99.404.600	16	98.728.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1	52.900.000	1	52.378.089
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	91	60.599.300	91	59.756.605
2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Capaian Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**100%**		**127.441.500**	**100%**	**126.162.551**
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Capaian pengembangan iklim penanaman modal*			*127.441.500*		*126.162.551*
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	dokumen	1	127.441.500	1	126.162.551
3.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Capaian Peningkatan Promosi Penanaman Modal**	**30,00%**		**204.770.800**	**33,33%**	**204.539.523**
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian peningkatan promosi penanaman modal*			*204.770.800*		*204.539.523*
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	3	204.770.800	3	204.539.523
4.	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Capaian Pelayanan Penanaman Modal**	**100%**		**336.400.900**	**100%**	**334.239.638**
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Capaian Pelayanan Penanaman Modal*			*336.400.900*		*334.239.638*

No	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET 2024		REALISASI Tahun 2024	
				KINERJA	KEUANGAN (Rp.)	KINERJA	KEUANGAN (Rp.)
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	pelaku usaha	2550	297.528.000	10.287	295.953.006
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	pelaku usaha	10	8.813.000	41	8.727.236
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	kegiatan usaha	600	30.059.900	1.268	29.559.396
5.	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANANAMAN MODAL**	**Capaian Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100%**		**37.781.900**	**100%**	**37.762.817**
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal*			*37.781.900*		*37.762.817*
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	2	37.781.900	2	37.762.817
6.	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Capaian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**93,14%**		**838.315.648**	**100%**	**830.898.536**
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*			*838.315.648*		*830.898.536*
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	kegiatan usaha	15	18.300.000	15	18.252.120
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	pelaku usaha	300	738.147.892	300	731.049.139
	Pengawasan Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal	kegiatan usaha	30	81.867.756	30	81.597.277
7.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**			**100.000.000**		**98.440.541**

No	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET 2024		REALISASI Tahun 2024	
				KINERJA	KEUANGAN (Rp.)	KINERJA	KEUANGAN (Rp.)
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY*	*dokumen*	*1*	*100.000.000*	*1*	*98.440.541*
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	dokumen	1	100.000.000	1	98.440.541
	jumlah				**4.429.998.570**		**4.287.140.237**

Realisasi kinerja keuangan di tahun 2024 mencapai 96,78%, sedangkan untuk capaian fisik mencapai 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPMPTSP terdiri dari faktor eksternal dan internal. Faktor internal antara lain adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan dukungan dana. Meskipun ada keterbatasan SDM yang hanya terpenuhi sekitar 53%, akan tetapi tidak mengurangi kinerja Dinas. Hal ini dapat diatasi dengan keikutsertaan pegawai dalam peningkatan kapasitas pegawai, baik melalui pelatihan informal maupun diklat.

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja antara lain adalah ketersediaan aturan, resistensi masyarakat terhadap investasi serta koordinasi dengan PD teknis lain. Untuk solusi dalam permasalahan ini adalah dengan menjalin komunikasi dengan pihak ketiga, yaitu masyarakat dan PD teknis lain.

Pengukuran kinerja DPMPTSP didasarkan pada pencapaian sasaran sebagaimana pada table 2.2 dan table 2.3 berikut:

Tabel 2. 2 Pengukuran Sasaran Renja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai Investasi	juta Rp	350.000	354.782	101
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,5	89,73	100
3	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100	100	100

Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program	
			Target 2024	Realisasi 2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Iklim Penanaman Modal	100	100
3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	30,00	33,33
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Penanaman Modal	100	100
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanamanan Modal	100	100
6	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	93,14	100

Dari table 2.2 dan table 2.3 di atas terlihat bahwa di tahun 2024 semua sasaran renja dan kinerja program mampu mencapai 100%, bahkan secara umum telah melebihi dari target. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa kinerja PD cukup tinggi. Beberapa keterbatasan sumber daya dan sumber dana tidak menjadi kendala yang berarti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD.

Pelaksanaan Renja DPMPTSP sampai dengan TW 1 Tahun 2025 dan pencapaian Renstra PD tahun 2024 disajikan dalam table 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				**URUSAN PENANAMAN MODAL**									
1	1			**BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL**									
1	1	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**							
1	1	1	1	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*								
1	1	1	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	2	2	2	100	4	**8**	**80**
1	1	1	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84 dokumen	21	21	21	100	21	**63**	**75**
1	1	1	4	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*								
1	1	1	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 OB	28	28	28	100	27	**83**	**72**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	1	6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 dokumen	12	12	12	100	12	**36**	**75**
1	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56 laporan	14	14	14	100	14	**42**	**75**
1	1	1	8	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*								
1	1	1	8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	0	0	0	0	0	**0**	**0**
1	1	1	9	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen administrasi umum*								
1	1	1	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	12	12	12	100	12	**36**	**75**
1	1	1	11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 paket	12	12	12	100	12	**36**	**75**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	1	12	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah penambahan aset*								
1	1	1	13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	29 unit	47	4	4	100	1	**52**	**179**
1	1	1	14	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*								
1	1	1	15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	12	12	12	100	12	**36**	**75**
1	1	1	16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan	12	12	12	100	12	**36**	**75**
1	1	1	17	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*								
1	1	1	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 unit	16	16	16	100	15	**47**	**73**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	1	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	1	1	1	100	1	**3**	**75**
1	1	1	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	364 unit	91	91	91	100	34	**216**	**59**
1	1	2		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**100%**							
1	1	1	*1*	**Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**	**Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**								
1	1	1	1	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	1 dokumen							
1	1	2	*1*	*Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*	*Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal*								
1	1	2	*2*	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (tidak dipakai)	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 dokumen	1	1	1	100	1	**3**	**75**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	3		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal**	**40%**							
1	1	3	*1*	*Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal*								
1	1	3	*2*	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	12 dokumen	3	3	3	100	3	**9**	**75**
1	1	4		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelayanan Penanaman Modal**	**88,33%**							
1	1	4	*1*	*Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*	*Persentase Pelayanan Penanaman Modal*								
1	1	4	*2*	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10300 pelaku usaha	12524	2750	10287	374,07273	16.829	**39640**	**385**
1	1	4	*3*	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	2700 kegiatan usaha	1064	600	1268	211,33333	897	**3229**	**120**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha								
1	1	4	*4*	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan	40 aduan	12	10	41	410	12	**65**	**163**
1	1	5		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**88,33%**							
1	1	5	*1*	*Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal*								
1	1	5	*2*	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	150 kegiatan usaha	30	15	15	100	30	**75**	**50**
1	1	5	*3*	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	480 pelaku usaha	120	300	300	100	120	**540**	**113**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	1	5	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	200 kegiatan usaha	50	50	50	100	50	**150**	**75**
1	1	5		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100%**							
1	1	5	*1*	*Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal*								
1	1	5	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 dokumen	2	2	2	100	2	**6**	**75**

Wates, Juli 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

R. HERIYANTO, SH., MM.
NIP 196806061995011001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029, maka Kinerja DPMPTSP pada periode tahun ke dua RPJMD 2023-2026 telah melampaui dari target kinerja yang ditetapkan,

- Sasaran meningkatnya daya saing investasi daerah, dengan indikator Nilai investasi PMA/PMDN sebesar Rp 354.782.000.000,00 atau tercapai 101% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 350,000,000,000,00
- Sasaran meningkatnya pelayanan perizinan terpadu dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,73 % atau tercapai 100% dari target yang ditetapkan 89,5 %
- Capaian Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah adalah 100%. Hal ini didukung oleh semua kegiatan di sekretariat dapat dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditentukan

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 27 pegawai atau 53 % dari kebutuhan 51 pegawai tidak menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk kondisi asset yang di miliki sampai semester 1 tahun 2025 adalah sejumlah 594 barang dengan nilai Rp 9.102.609.753,00.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selama Periode Renstra 2023-2026 dan Target pada Rancangan Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	IKU OPD											
1	Nilai investasi (Juta Rp.)			350.000	160.000	170.000	180.000	354.782		190.000	200.000	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah				A	A	A			A	A	
3	Nilai SPIP Perangkat Daerah				2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0			2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	
	IKP											
1	Persentase Promosi Penanaman Modal			30	25	30	35	33,33		40	45	
2	Persentase Peta Potensi yang Tersusun			100	100	100	100	100		100	100	
3	Persentase Kegiatan Usaha Berisiko yang diawasi			93,14	85,71	85,71	88,57	100		88,57	91,43	
4	Persentase dokumen data investasi yang disajikan			100	100	100	100	100		100	100	
5	IKM Pelayanan dan Perizinan			89,5	84.75-89.82	85-89.85	85.25-89.9	89,79		85.5-89.95	85.75-90	
6	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik			100	100	100	100	100		100	100	

Untuk pencapaian kinerja tahun n-2 atau tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 di atas. Kinerja tahun 2024 secara umum, baik indikator kinerja OPD maupun indikator kinerja program dapat mencapai 100 persen, bahkan lebih. Pencapaian ini di dukung oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

Metadata indikator kinerja utama maupaun indikator kinerja program di tahun 2024 berbeda dengan tahun 2025 sampai 2027, karena pada tahun 2025 memasuki periode Renstra 2025-2029. Perubahan metadata ini telah di sesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada, sehingga di harapkan lebih mampu mengakomodir semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan institusi yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat berupa penanaman modal dan perizinan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, DPMPTSP mempunyai beberapa hambatan baik berasal dari internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan di DPMPTSP dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal antara lain adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan dukungan dana. Kebutuhan SDM hanya terpenuhi 27 orang dari kebutuhan 51 orang atau sekitar 53%. Meskipun ada keterbatasan SDM, akan tetapi tidak mengurangi kinerja Dinas. Hal ini dapat diatasi dengan keikutsertaan pegawai dalam peningkatan kapasitas pegawai, baik melalui pelatihan maupun diklat.

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja antara lain adalah ketersediaan aturan, resistensi masyarakat terhadap investasi serta koordinasi dengan PD teknis lain. Untuk solusi dalam permasalahan ini adalah dengan menjalin komunikasi dengan pihak ketiga, yaitu masyarakat dan PD teknis lain.

Beberapa hambatan yang ada tersebut sejauh ini tidak mengurangi kinerja DPMPTSP dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta membawa Kabupaten Kulon Progo menjadi lebih baik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tantangan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya promosi investasi baik melalui pameran, media sosial, elektronik, dan papan informasi lainnya;
2. Masih terbatasnya kajian investasi di masing-masing kawasan strategis;
3. Sulitnya mencari lahan untuk investasi besar yang membutuhkan lahan luas;
4. Lokasi yang diminati investor sudah di tetapkan sebagai kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan kawasan LSD (Lahan Sawah Dilindung) sehingga tidak bisa alih fungsi lahan;
5. Topografi wilayah yang berupa perbukitan sehingga biaya *Land Clearing* yang cukup tinggi;
6. Belum adanya bangunan falisitas umum di beberapa kawasan yang representatif sebagai pematik investasi;
7. Belum terealisasinya penambangan pasir besi beserta pendirian pabrik baja sehingga wilayah kontrak karya di sepanjang pantai selatan karangwuni antara Sungai Progo – Sungai Serang tidak dapat digunakan investasi lain.

Beberapa hambatan tersebut diatas secara umum dapat menghambat investasi di Kabupaten Kulon Progo. Akan tetapi DPMPTSP berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir hambatan tersebut dengan memanfaatkan beberapa peluang yang ada dalam mendukung investasi dan pengembangan pelayanan adalah:

1. Keberadaan Bandara YIA di Kulon Progo;
2. Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan pelaku usaha secara elektronik;
3. Potensi alam dan keindahan panorama Kulon Progo;
4. Tersedianya RDTR kawasan sektor bandar;
5. Tersedianya Kawasan Industri Sentolo;
6. Rencana pembangunan infrastruktur bedah menorah;
7. Meningkatnya minat terhadap produk kerajinan Kulon Progo baik dari dalam maupun luar negeri;
8. Perkembangan teknologi informasi;
9. Rencana pembangunan Embarkasi Haji;

Adanya hambatan yang di hadapi serta peluang yang dimiliki oleh DPMPTSP tersebut menjadi dasar dalam menyusun perencanaan PD. Baik dalam penyusunan kegiatan dan sub kegiatan maupun perumusan indikator serta target kinerja PD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja-PD disamping mengacu pada Renstra-PD juga berdasarkan realisasi dan plafon anggaran tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan analisis kebutuhan dan beban kerja. Disamping itu, Revew Renstra PD terhadap Program dan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok PD, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran PD dengan melihat perkembangan perkembangan lingkungan organisasi agar pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran PD.

Berikut tabel 2.6 Penyandingan RKPD terhadap Rancangan Awal anggaran dan kegiatan tahun 2026.

Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**3.928.700**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi**	**100%**	**2.611.06**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kulon Progo	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*		56.300	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab.Kulon Progo	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	2	12.478
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	53.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	7.258
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	3.100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	5.219
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Kulon Progo	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*		2.751.400	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Kab.Kulon Progo	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	3	1.942.771
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	2.693.400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	1.937.191
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	51.700	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	30.300

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14	6.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semest eran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	14	5.579
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Kulon Progo	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*		*15.000*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Kab.Kulon Progo	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*		15.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	15.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Kulon Progo	Jumlah dokumen administrasi umum		217.200	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Kab.Kulon Progo	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	2	75.802
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12	95.300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1	52.252
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	121.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	23.550
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Jumlah penambahan aset*		106.400	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	1	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	106.400	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kulon Progo	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang		340.600	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kab.Kulon Progo	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	2	387.476
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12	114.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	162.588
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	225.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	224.888
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kulon Progo	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah		441.800	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kab.Kulon Progo	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	3	192.537
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	113.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	81.791
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	66.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	52.850

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	91	262.100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38	57.896
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Kab.Kulon Progo**	**Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**100%**	**462.100**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Kab.Kulon Progo**	**Persentase Peta Potensi yang Tersusun**	**100%**	**120.341**
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal		262.100	*Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*		*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	*1*	120.341
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (tidak dipakai)		Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	262.100	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	120.341
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				*200.000*	*Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenanga Daerah Kabupaten/Kota*			*0*	*0*
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam	1	200.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam		
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Kab.Kulon Progo**	**Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**	**40,00%**	**385.500**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Kab.Kulon Progo**	**Persentase Promosi Penanaman Modal**	**30,00%**	**161.206**

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal*		385.500	*Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*		*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	1	161.206
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	385.500	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	161.206
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		**Persentase Pelayanan Penanaman Modal**	**87.88%**	**691.600**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**IKM Pelayanan dan Perizinan**	**84.75-89.82 %**	**261.686**
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Kulon Progo	*Persentase Pelayanan Penanaman Modal*		691.600	*Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*	Kab.Kulon Progo	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	3	261.686
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	2650	385.500	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	2650	235.435

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	750	154.200	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	400	17.438
	Koordinasi danSinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	10	99.800					
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab.Kulon Progo	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10	52.100	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab.Kulon Progo	Tersedianya pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	10	8.813
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		**Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**88.33%**	**186.200**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**Persentase Kegiatan Usaha Beresiko yang diawasi**	**85,71%**	**10.517**

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal*		186.200	*Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*		*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	1	10.517
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab.Kulon Progo	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	45	53.200	Pengawasan penanaman modal	Kab.Kulon Progo	Terlaksananya pengawasan penanaman modal	20	10.517
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	120	79.800					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	50	53.200					
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		**Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100%**	**213.900**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Kab.Kulon Progo	**Persentase dokumen data investasi yang disajikan**	**100%**	**40.081**

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal*		213.900	*Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	1	40.081
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2	213.900	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	40.081
						PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kab.Kulon Progo			
						Peningkatan Budaya Pemerintahan		Laporan pelaksanaan sub kegiatan	1	
						Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1	440.777
					5.868.000					**3.675.977**

Beberapa perubahan yang terjadi dalam proses analisis kebutuhan adalah sebagai berikut:

1. Tambahan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
2. Pagu anggaran gaji menyesuaikan riil berdasarkan anggaran gaji Tahun 2025.
3. Peniadaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
4. Perubahan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta targetnya menyesuaikan RKPD Tahun 2026.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan pada tahun 2024, terdapat beberapa usulan dari peserta yang berasal dari pelaku usaha, masyarakat serta asosiasi. Usulan dari masyarakat dan asosiasi adalah sebagai berikut pada table 2.7

Tabel 2. 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Penanaman Modal/Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Mobil untuk pelayanan bergerak	1	Belum teranggarkan
2	Program Pelayanan Penanaman Modal/Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Pengembangan Mal Pelayanan Publik	1	Belum teranggarkan

Usulan yang di sampaikan tersebut mendasar kepada kebutuhan masyarakat akan adanya fasilitas layanan bergerak berupa kendaraan roda

empat yang melayani perizinan usaha di berbagai wilayah, seperti adanya layanan SIM maupun SAMSAT di desa atau di pusat keramaian. Selain itu kondisi pelayanan MPP di hari-hari tertentu mengalami kepadatan pengunjung, sehingga kurang nyaman karena tempat duduk yang terbatas, sehingga di harapkan adanya pengembangan MPP untuk meningkatkan pelayanan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal, Persebaranan penamanam modal, fokus pengembangan pangan infrastruktur, dan energi, Penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM), Pemberian fasilitas kemudahaan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, merumuskan visi sebagai berikut, "**BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.".** Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut: 1) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 2) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu: 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Tujuan dan sasaran DPMPTSP mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi ke dua Kepala Daerah yaitu Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi serta misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam periode Renstra 2025-2029 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2026
1	Meningkatnya Kemandirian Daerah		Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	41,03 - 42,23
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
			Indeks Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	3,23
		Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai investasi	Juta Rp	170.000
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
		Meningkatnya kualitas pengendalian Internal	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 disusun dengan mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029

dan RKPD tahun 2026, dengan memperhatikan jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif tahun 2026 serta mempertimbangkan kebutuhan. Berikut program dan indikator kinerja program pada Renja Tahun 2026:

Tabel 3. 2 Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
1	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	%	100
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	35
3	Program Pengembangan IklimPenanaman Modal	Persentase Peta Potensi yang Tersusun	%	100
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Usaha Berisiko yang diawasi	%	85,71
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase dokumen data investasi yang disajikan	%	100
6	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Pelayanan dan Perizinan	Nilai	85-89.85
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan adalah pencapaian tujuan dan sasaran PD. Selain itu adalah dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi PD sebagai PD pelayanan publik yang mengacu kepada pencapaian Standart Pelayanan Minimal serta target Realisasi Investasi yang telah di tetapkan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka terdapat 7 program dan 11 kegiatan serta 19 sub kegiatan. Adanya rumusan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD dikarenakan adanya efisiensi anggaran serta perubahan nomenklatur.

Indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						3.675.977.650,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.204.906.650,00							0,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						3.204.906.650,00							0,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.611.067.250,00						-	0,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.478.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentukan kemakinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			0				2 0	7.258.900,00	-	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentukan kemakinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	5.219.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentukan kemakinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.942.771.299,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	1.937.191.599,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	5.579.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	75.802.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.550.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	52.252.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	387.476.951,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	162.588.395,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	224.888.656,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	192.537.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	81.791.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	52.850.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				38 Unit	57.896.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Perurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Persentase Peta Potensi yang Tersusun***	-			**100 Persen**	**120.341.500,00**						-	**0,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	120.341.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Perurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	120.341.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Perurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Persentase Promosi Penanaman Modal***	-			**30 Persen**	**161.206.400,00**						-	**0,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	161.206.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Perurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	161.206.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***IKM Pelayanan dan Perizinan***	-			**84,75-89,82 Persen**	**261.686.400,00**						-	**0,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	261.686.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2650 Pelaku Usaha	235.435.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	8.813.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasaan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Untuk Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				400 Kegiatan Usaha	17.438.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	-	-			-	**10.517.500,00**						-	**0,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.517.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Ditelaah Inspeksi Lapangan ; serta Ditelaah Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				20 Kegiatan Usaha	10.517.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	-	-			-	**40.081.600,00**						-	**0,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.081.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														

INU	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KPI OPD/UK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 Dokumen	40.081.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**440.777.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**440.777.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-			-	**440.777.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	440.777.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	440.777.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X	**NON URUSAN**						**30.300.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**30.300.000,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**30.300.000,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	30.300.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	30.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	JUMLAH							**3.675.977.650,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja PD adalah merupakan dokumen Perencanaan, sebagai acuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian, bahan Koordinasi dan Evaluasi yang berisi Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta rencana Anggaran dalam satu Tahun Anggaran sebagai implementasi dan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Pokok PD serta dalam mencapaian tujuan dan sasaran PD yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang harus menjadi catatan dalam pelaksanaan program kegiatan adalah sinkronisasi dan kerjasama antar PD dengan masyarakat, dalam hal ini adalah pelaku usaha untuk bersama-sama membangun Kulon Progo dari sektor ekonomi. Dukungan terhadap kerjasama dan promosi serta kemudahan perizinan yang di berikan oleh PD harapannya mampu meningkatkan minat pelaku usaha untuk melaksanakan investasi di Kabupaten Kulon Progo. Sehingga target PD maupun daerah dapat tercapai.

Untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan PD dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka iperlukan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta tindaklanjutnya.

Wates, 29 Juli 2025

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



R. HERIYANTO, SH., MM.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP 19680606 199501 1 001

DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)
KABUPATEN KULON PROGO

RENCANA KERJA

DINAS KEBUDAYAAN
(*KUNDHA KABUDAYAN*)
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 telah selesai dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyusunan ini.

Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, memuat diantaranya tujuan, sasaran serta target capaian kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2026. Dalam rangka mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua unit kerja berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 secara konsisten. Selanjutnya, diharapkan dengan adanya dokumen Renja ini dapat mendeskripsikan kondisi aktual dan akselerasi pencapaian kinerja perencanaan pembangunan khususnya di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo.

Demikian, semoga dokumen Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dapat menghasilkan perencanaan yang implementatif untuk mendukung "*Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religious, Berbudaya yang Berkelanjutan*".

Kulon Progo, 29 Juli 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
(*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo

Drs. Eka Pranyata
Pembina Utama Muda; IV/c
196507231986021004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 11
2.1 Hasil Evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024..... 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 24
2.4 Review Terhadap RKPD 32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 50
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 53
3.3 Program dan Kegiatan 57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 62
BAB V PENUTUP 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2

Gambar 1.2 Tata Kelola Keuangan Daerah berdasarkan PP 12 Tahun 2019 4

Gambar 3.1 Isu Strategi dan Permasalahan Bidang Kebudayaan 26

Gambar 3.2 Keselaran Prioritas Pembangunan 28

Gambar 3.3 Keselarasan Visi 31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo 12

Tabel 2.2 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo 21

Tabel 2.3 Permasalahan dan Hambatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 25

Tabel 2.4 Tatangan Utama dan Peluang Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 28

Tabel 2.5 Formulasi Isu Isu Pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 30

Tabel 2.6 T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 34

Tabel 2.7 Proses Usulan dan Kesesuaian usulan dentan Isu-Isu Strategis dan Tupoksi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 45

Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo 48

Tabel 3. 1 Keselarasan Tujuan dan Sasasaran dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026..... 54

Tabel 3.2 T-C.32Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 60

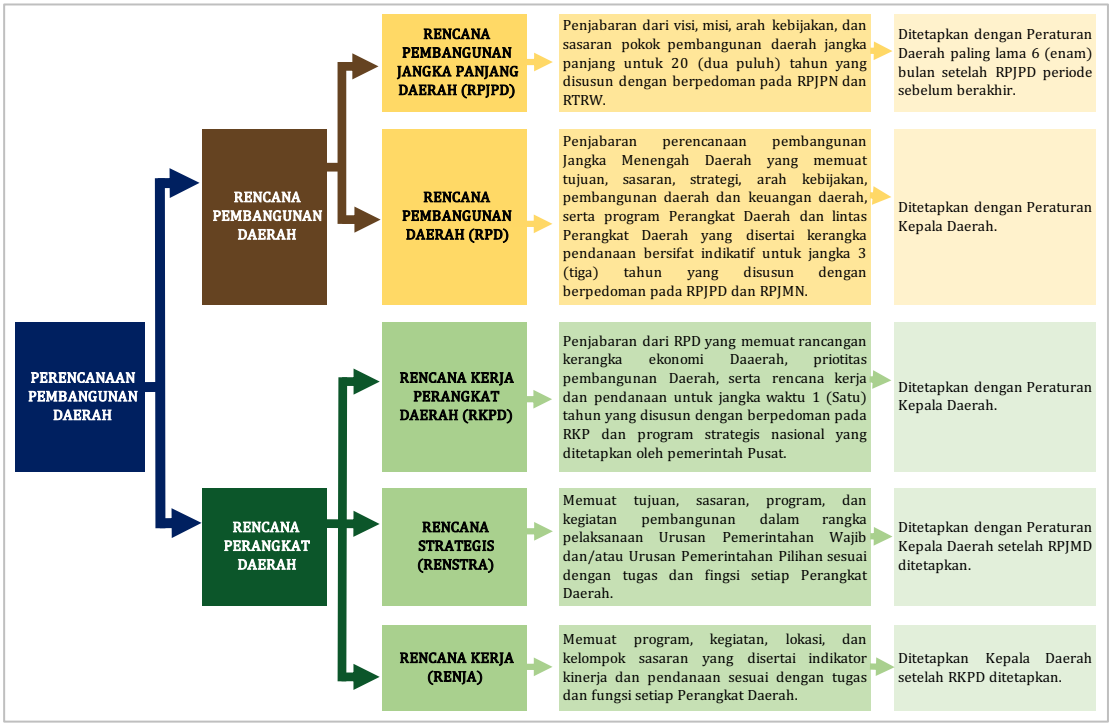
Tabel 3.3 Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 63

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan segala potensi, permasalahan dan tantangan yang ada. Peran strategis perencanaan ini diperkuat dengan terbitnya Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (selanjutnya disebut Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dokumen Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja dan kebutuhan pendanaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun.



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, diolah Tahun 2025.

Gambar 1.1

Alur Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Kedudukan Renja Perangkat Daerah sangat strategis dalam menerjemahkan perencanaan Perangkat Daerah. Hal ini didasari oleh proses penyusunan Renja yang telah melalui proses sinkronisasi atau penyelarasan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai bentuk implementasi Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan instrumen dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah.

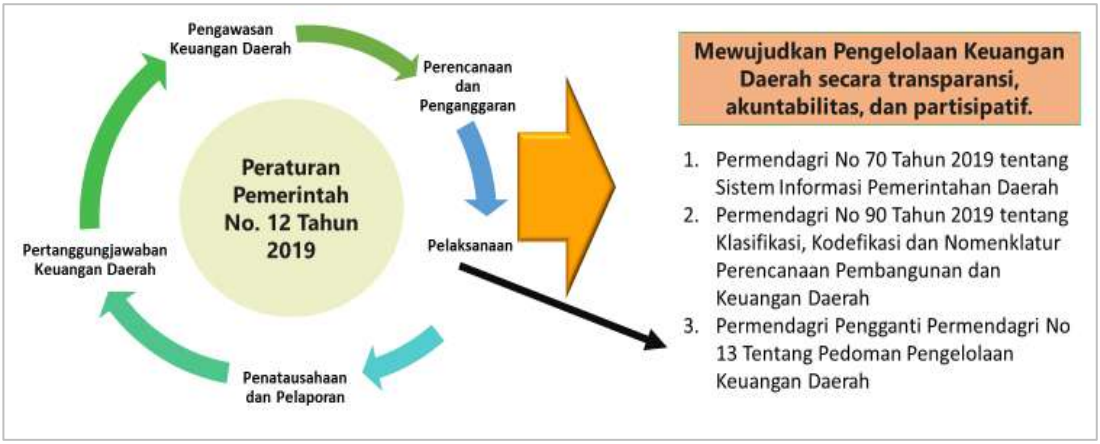
Secara sistematis, Renja Perangkat Daerah memuat kondisi ideal yang seharusnya diciptakan dengan disertai penjabaran mengenai cara pencapaiannya. Dengan demikian, substansi yang dimuat dalam Renja

Perangkat Daerah dapat memberikan gambaran konkret terkait pengukuran target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Kesinambungan dan keselarasan antara program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, menjadi tolok ukur dan menjadi tantangan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki andil dalam ketercapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo wajib untuk menyusun dokumen Renja Tahun 2026. Dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dijadikan pedoman untuk perumusan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 yang berfokus untuk prioritas pembangunan, khususnya melalui penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan e-government. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, turut berperan dalam menyelesaikan target-target yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Pengelolaan keuangan daerah mengalami penyesuaian seiring terbitnya regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Seluruh regulasi tersebut merupakan langkah pembaharuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah diterapkan dan diberlakukan pada tahun anggaran 2026.



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, diolah.

Gambar 1.2

Tata Kelola Keuangan Daerah berdasarkan PP 12 Tahun 2019

Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dan telah diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Daerah. Selanjutnya, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya turut memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Kebijakan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Renja Dinas Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Tahun 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran negara nomor 6794);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022- 2027;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042;

17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan daerah secara komprehensif.

b. Tujuan

Adapun tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional: Mengonversi sasaran dan arah kebijakan dalam dokumen Renstra Dinas Kebudayaan ke dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang konkret dan terukur.

2) Memelihara konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan: Menjamin keselarasan antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan sasaran tahunan pembangunan bidang kebudayaan.
3) Menjadi pedoman internal perangkat daerah: Memberikan acuan bagi Dinas Kebudayaan dalam menyusun dan melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4) Mengukur kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan: Memastikan capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan fungsi dan urusan wajib maupun pilihan daerah.
5) Penyedia informasi untuk laporan evaluasi: Mendukung tersedianya informasi kinerja yang diperlukan dalam penyusunan laporan evaluasi pembangunan, baik internal maupun eksternal..

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1.1 Hasil Evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024

Menjelaskan realisasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi.

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan analisis kinerja pelayanan organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menjelaskan isu-isu penting terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo.

1.3 Review Terhadap RKPD

Menjelaskan Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 ke dalam Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

1.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2026 ke dalam Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional ke dalam Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan melalui penilaian atas pemenuhan target program atau kegiatan. Dengan melaksanakan evaluasi terhadap pemenuhan target program atau kegiatan tersebut, selanjutnya dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab target kinerja program/kegiatan tidak tercapai/tidak terpenuhi/terpenuhi/terlampaui;
2. Implikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 menilai pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 yang dibandingkan dengan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 dan merujuk RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.

2.1 Hasil Evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024

Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 telah dilakukan secara optimal dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 merencanakan 3 program, 12 kegiatan, dan 34 sub kegiatan. Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Rankir Renja 2026		Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
									K	Rp (dalam juta)	K	Rp (dalam juta)	K	Rp (dalam juta)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp (dalam juta)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Triwulan I 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
															K	Rp (dalam juta)	K	Rp (dalam juta)	K	Rp			K	Rp (dalam juta)	K	Rp
1						2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(7+11+15)	18=(8+10+12)	19	20=(18/(6+8+10+16))*100
DINAS KEBUDAYAAN (*KHUNDA KABUDAYAN*) KABUPATEN KULON PROGO										**42.281,41**		**37.484,36**		**36.605,00**		**27.449,43**		**26.931,86**		**98,11**		**53.562,26**		**159.380,52**		**99,13**
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**42.281,41**		**37.484,36**		**36.605,00**		**27.449,43**		**26.931,86**		**98,11**		**53.562,26**		**159.380,52**		**99,13**
	2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**42.281,41**		**37.484,36**		**36.605,00**		**27.449,43**		**26.931,86**		**98,11**		**53.562,26**		**159.380,52**		**99,13**
1	**2**	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**100,00**	**3.326,18**	**100,00**	**3.760,95**	**100,00**	**3.309,92**	**100,00**	**3.778,90**	**100,00**	**3.493,57**	**100,00**	**92,45**	**100,00**	**3.565,16**	**100,00**	**13.694,83**	**100,00**	**94,90**
	2	*22*	*01*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan Tepat Waktu*	*Dokumen*																-		
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	17,38	2	9,43	2	9,90	3	124,28	2	117,94	66,67	94,90	4	23,69	10	168,91	90,91	96,64
	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	21,79	21	5,87	21	6,00	21	13,87	21	10,92	100,00	78,73	21	10,00	75	48,71	100,00	94,53
	2	*22*	*01*	*2.02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.*	*Laporan*																-		
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	39	2.495,34	12	2.560,60	12	2.507,20	13	2.779,67	13	2.601,34	100,00	93,58	37	2.605,88	101	10.209,76	100,00	97,78
	2	22	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	61,37	12	67,70	12	66,95	1	74,47	1	70,18	100,00	94,24	14	73,27	28	271,77	100,00	98,18
	2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	4,99	14	6,10	14	5,91	14	8,14	14	7,04	100,00	86,49	14	8,14	56	26,08	100,00	95,29
2	*22*	*01*	*2*	*05*		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Laporan*															-	-	-	-
2	22	01	2	05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	22	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	*22*	*01*	*2.06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah.*	*Dokumen*															-	-	-	-
	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	16,61	12	29,97	12	14,46	2	20,00	2	19,77	100,00	98,85	2	26,21	17	77,05	100,00	83,04
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	45,67	12	14,20	12	30,04	12	49,98	12	43,11	100,00	86,25	12	46,49	37	165,32	100,00	105,74
	2	*22*	*01*	*2.07*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.*	*Unit*																-		
	2	22	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	19,04	*6*	95,44	*6*	94,55	-	-	-	-	-	-	1	19,28	11	132,87	100,00	99,33
	2	*22*	*01*	*2.08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	*Laporan*																-		
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	78,85	12	62,51	12	60,08	12	117,58	12	89,26	100,00	75,91	12	101,06	37	329,25	100,00	91,46
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	197,04	12	134,66	12	133,70	12	140,48	12	139,40	100,00	99,23	12	128,40	37	598,53	100,00	99,66
	2	*22*	*01*	*2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	*Laporan*																		
	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	86,99	17	72,51	17	69,91	17	87,50	17	67,17	100,00	76,77	17	87,50	68	311,56	100,00	93,14
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	258,00	1	7,45	1	7,44	1	39,44	1	38,41	100,00	97,39	1	166,99	4	470,84	100,00	99,78
	2	22	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	23,11	15	6,91	15	6,91	15	8,42	15	6,88	100,00	81,71	15	8,42	46	45,32	100,00	96,71
	2	22	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	1	687,60	1	296,87	1	315,07	1	282,15	100,00	89,55	1	259,83	9	838,85	300,00	66,44
2	**2**	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Penonton Pertunjukan Seni di Taman Budaya.**	**Orang**	**22.000**	**260,09**		-		-		**1.290,70**		**1.228,05**		**95,15**		**1.296,10**		**2.784,24**	**100,00**	**97,80**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Rankir Renja 2026		Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
									K	Rp (dalam juta)	K	Rp (dalam juta)	K	Rp (dalam juta)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp (dalam juta)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Triwulan I 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
															K	Rp (dalam juta)	K	Rp (dalam juta)	K	Rp			K	Rp (dalam juta)	K	Rp
1						2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(7+11+15)	18=(8+10+12)	19	20=(18/(6+8+10+16))*100
	2	22	02	2.01		*Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.*	*Objek*	*1*															-		
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	3	260,09	-	-	-	-	1	1.290,70	1	1.228,05	100,00	95,15	1	1.296,10	1	2.784,24	20,00	97,80
2	**2**	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pelestaria sejarah, bahasa,sastra dan permuseuman.**	**%**	**100,00**	**38.695,13**	**100,00**	**33.723,41**	**100,00**	**33.295,08**	**100,00**	**22.379,83**	**100,00**	**22.210,24**	**100,00**	**99,24**	**100,00**	**48.701,00**	**100**	**142.901,45**	**100,00**	**99,58**
							Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan warisan budaya.	**%**	**69,17**		**63,18**		**63,18**		**65,14**		**65,86**		**101,11**		**67,18**				**94,56**	
							Cakupan pengelolaan taman Budaya.	**%**	**100,00**		**96,93**		**96,93**		**98,25**		**98,25**		**100,00**		**98,70**				**97,96**	
							Cakupan kemandirian grup kesenian dan rintisan desa budaya.	**%**	**39,27**		**31,09**		**31,09**		**33,37**		**34,00**		**101,89**		**36,33**				**86,09**	
	2	22	08	5.01		*Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman.*	*Laporan*															-		
	2	22	08	5.01	0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen	3	650,00	9	772,00	9	769,33	17	1.021,56	17	999,48	100,00	97,84	2	2.116,00	31	4.534,81	100,00	99,46
	2	22	08	5.01	0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	Laporan	4	1.600,00	20	1.229,98	20	1.216,67	10	617,74	10	615,76	100,00	99,68	2	3.891,91	36	7.324,34	100,00	99,79
	2	22	08	5.01	0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Unit	1	591,67	1	433,03	1	421,02	5	391,72	5	380,10	100,00	97,03	1	500,00	8	1.892,79	100,00	98,77
	2	22	08	5.02		*Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelestarian Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya.*	*Objek*																		
	2	22	08	5.02	0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	Objek	1	12.027,00													1	12.027,00	100,00	100,00
	2	22	08	5.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Objek	20	549,07	30	584,49	30	575,59	22	635,93	22	631,95	100,00	99,37	21	1.677,40	93	3.434,01	100,00	99,63
	2	22	08	5.02	0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	Objek	2	257,62													2	257,62	100,00	100,00
	2	22	08	5.03		*Pengelolaan Taman Budaya*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Taman Budaya.*	*Objek*																-		
	2	22	08	5.03	0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	Objek	1	3.500,00	1	4.199,48	1	4.012,15	1	3.690,53	1	3.637,70	100,00	98,57	1	6.363,45	1	17.513,30	25,00	98,65
	2	22	08	5.04		*Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya.*	*Unit*																-		
	2	22	08	5.04	0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Unit	20	1.000,00	60	844,96	60	838,59	15	1.202,54	15	1.178,09	100,00	97,97	1	1.357,80	96	4.374,48	100,00	99,30
	2	22	08	5.07		*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya.*	*Laporan*																-		
	2	22	08	5.07	0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Laporan	2	1.340,00	2	1.562,28	2	1.561,30	2	1.287,48	2	1.286,03	100,00	99,89	2	2.877,66	8	7.064,99	100,00	99,97
	2	22	08	5.07	0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	Lembaga	2	1.064,25	1	667,09	1	665,71	1	600,00	1	599,63	100,00	99,94	1	1.076,77	5	3.406,36	100,00	99,95
	2	22	08	5.07	0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Laporan	3	1.254,43	4	1.369,27	4	1.268,09	3	907,62	3	883,81	100,00	97,38	2	2.606,95	12	6.013,29	100,00	97,96
	2	22	08	5.07	0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	Orang	5	350,00	8	313,00	8	308,25	5	300,00	5	290,66	100,00	96,89	5	376,35	23	1.325,26	100,00	98,95
	2	22	08	5.07	0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan	3	500,00	3	500,00	3	495,95	3	496,49	3	496,29	100,00	99,96	3	600,00	12	2.092,24	100,00	99,80
	2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	10	6.465,29	8	4.487,88	8	4.467,00	7	4.364,68	8	4.359,34	114,29	99,88	5	5.000,00	31	20.291,63	103,33	99,87
	2	22	08	5.07	0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen	2	200,00	9	299,58	9	293,59	2	225,00	2	224,56	100,00	99,80	2	637,10	15	1.355,25	100,00	99,53
	2	22	08	5.07	0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Orang	75	294,74	75	887,05	75	885,51	75	833,96	75	833,12	100,00	99,90	75	1.617,38	300	3.630,75	100,00	99,93
	2	22	08	5.07	0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	5	1.665,26	8	1.662,84	8	1.643,40	9	1.719,40	9	1.717,68	100,00	99,90	6	6.000,00	28	11.026,34	100,00	99,81
	2	22	08	5.07	0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	Laporan	3	2.654,33	3	2.993,23	3	2.965,03	3	2.450,43	3	2.447,00	100,00	99,86	2	5.812,34	11	13.878,69	100,00	99,77
	2	22	08	5.07	0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan	5	2.731,47	5	10.917,25	5	10.907,90	5	1.634,75	5	1.629,04	100,00	99,65	2	6.189,89	17	21.458,30	100,00	99,93

Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo pada Triwulan IV Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan telah mencapai target kinerja hasil atau keluaran (output dan outcome) sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Capaian ini tercermin dari seluruh program strategis, teknis, maupun administratif yang menunjukkan realisasi output sesuai target.

1) *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang berperan penting dalam mendukung kelancaran aspek administratif dan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang bersifat pendukung, seperti penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, evaluasi kinerja, pengelolaan administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang kerja.

Seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun, baik dari segi jumlah dokumen maupun kegiatan yang dihasilkan. Persentase capaian kinerja untuk seluruh kegiatan dalam program ini mencapai 100%, yang mencerminkan bahwa seluruh indikator seperti jumlah laporan evaluasi, kelengkapan dokumen administrasi ASN, dan penyelenggaraan koordinasi antarunit kerja telah terpenuhi sepenuhnya. Capaian ini menandakan bahwa fungsi penunjang kelembagaan Dinas Kebudayaan telah berjalan secara optimal hingga akhir tahun anggaran 2024.

2) *Program Pengembangan Kebudayaan*

Program Pengembangan Kebudayaan merupakan salah satu program strategis yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo dalam upaya melestarikan,

mengembangkan, serta memanfaatkan potensi budaya daerah secara berkelanjutan. Program ini mencakup berbagai kegiatan utama, seperti pembinaan bahasa dan sastra sebanyak 17 kegiatan, pengelolaan permuseuman sebanyak 5 kegiatan, serta berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan lembaga seni, pelaksanaan misi kebudayaan, penyelenggaraan festival budaya, publikasi seni, penguatan nilai-nilai luhur, dan event kebudayaan lokal.

Seluruh kegiatan dalam program ini telah berhasil direalisasikan sesuai dengan jumlah target yang direncanakan pada awal tahun, dengan capaian kinerja mencapai 100%. Tingkat partisipasi masyarakat dan komunitas budaya yang tinggi, ditambah dukungan dari berbagai pihak lintas sektor, menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program ini. Beberapa kegiatan bahkan memberikan dampak langsung terhadap revitalisasi dan penguatan identitas budaya lokal, menunjukkan bahwa program ini tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pemajuan kebudayaan di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

3) *Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan*

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan merupakan wujud implementasi dari mandat kekhususan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam bidang kebudayaan, yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya lokal. Fokus utama program ini mencakup pelestarian sejarah, bahasa, sastra, permuseuman, pengelolaan taman budaya, serta pelindungan dan pengembangan warisan budaya.

Target kegiatan dalam program ini terdiri atas cakupan pelestarian nilai budaya dengan target kualitatif sebesar 100%, cakupan pengelolaan taman budaya yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan, serta penguatan kemandirian grup kesenian dan desa

budaya yang diukur melalui indikator kuantitatif. Seluruh indikator dan kegiatan yang direncanakan telah berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga persentase capaian kinerja program ini mencapai 100%. Meskipun sebagian indikator bersifat kualitatif, seperti pelestarian nilai budaya, pelaksanaannya tetap menunjukkan pencapaian penuh dengan dukungan pelaku budaya dan lembaga adat. Hal ini mencerminkan bahwa nilai-nilai keistimewaan yang menjadi ciri khas DIY telah berhasil dijalankan dan dihidupkan melalui kegiatan-kegiatan konkret sepanjang tahun 2024.

Faktor-Faktor Penyebab Tercapainya Seluruh Target Kinerja

Tercapainya seluruh target kinerja program dan kegiatan Dinas Kebudayaan sesuai dengan perencanaan pada Triwulan IV Tahun 2024 merupakan hasil dari berbagai faktor pendukung strategis, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun dukungan eksternal.

1) Pertama, keberhasilan tersebut ditopang oleh perencanaan kegiatan yang realistis dan berbasis data, di mana target yang ditetapkan disesuaikan dengan kapasitas anggaran, kemampuan pelaksana, dan kebutuhan riil di lapangan. Perencanaan yang baik ini memungkinkan kegiatan dapat dijalankan secara terukur dan terarah sejak awal tahun.
2) Kedua, adanya penguatan koordinasi lintas unit dan lintas sektor, termasuk antara Dinas Kebudayaan dengan lembaga adat, komunitas seni, serta pemerintah desa dan kelurahan, menciptakan sinergi yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan. Koordinasi ini mempercepat penyelesaian hambatan teknis dan memungkinkan fleksibilitas pelaksanaan kegiatan di lapangan.
3) Ketiga, komitmen dan kedisiplinan pelaksana program, baik dari sisi pimpinan maupun pelaksana teknis, menjadi motor penggerak dalam menjaga jadwal pelaksanaan agar tetap sesuai dengan rencana. Monitoring dan evaluasi rutin juga berperan penting dalam memastikan kegiatan tetap berada dalam jalur pencapaian target.

4) Keempat, tingginya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan kebudayaan, khususnya pada kegiatan yang bersifat pelestarian, pembinaan komunitas, dan pengembangan nilai-nilai lokal, mendorong kelancaran dan efektivitas implementasi program.
5) Kelima, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam beberapa aspek pelaksanaan program, seperti dokumentasi, pelaporan, hingga publikasi kegiatan, turut meningkatkan efisiensi pelaksanaan dan mempercepat proses administrasi.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian ini mencerminkan tata kelola program kebudayaan yang responsif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan.

Implikasi dari Tercapainya Seluruh Target Kinerja Program/Kegiatan

Tercapainya seluruh target kinerja program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten (*Kundha Kabudayan*) Kulon Progo pada Triwulan IV Tahun 2024 memberikan sejumlah implikasi positif yang signifikan, baik terhadap pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan maupun terhadap perencanaan strategis jangka menengah. Implikasi tersebut antara lain:

1) Konsistensi terhadap Arah Pencapaian Renstra
   Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Renja tahun berjalan telah berada pada jalur yang konsisten dengan sasaran dan indikator Renstra Dinas Kebudayaan 2022–2026. Hal ini memperkuat posisi Dinas Kebudayaan dalam menjamin ketercapaian tujuan strategis jangka menengah, serta memberikan keyakinan bahwa target akhir periode RPD Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal.
2) Meningkatnya Kredibilitas Perencanaan dan Pelaksanaan
   Capaian penuh terhadap target kinerja juga menjadi indikator bahwa proses perencanaan dan implementasi program telah dilaksanakan dengan baik, akurat, dan realistis. Hal ini meningkatkan kepercayaan internal dan eksternal, baik dari

pemerintah daerah, mitra kerja, maupun masyarakat terhadap kredibilitas tata kelola Dinas Kebudayaan.

3) Efisiensi Penggunaan Anggaran

   Dengan tercapainya target yang telah ditetapkan, dapat diinterpretasikan bahwa penggunaan sumber daya, khususnya anggaran, telah dilakukan secara efisien dan efektif. Ini memberikan ruang untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam program-program prioritas ke depan, serta menjadi bukti akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

4) Peningkatan Dampak Nyata di Masyarakat

   Keberhasilan pelaksanaan seluruh kegiatan berdampak langsung pada peningkatan nilai tambah pelayanan publik di bidang kebudayaan, seperti terpeliharanya nilai-nilai budaya, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan berkembangnya kelembagaan budaya lokal. Ini turut memperkuat ketahanan budaya daerah dan mendukung agenda pemajuan kebudayaan.

5) Landasan Kuat untuk Inovasi Tahun Berikutnya

   Capaian maksimal ini memberikan momentum dan landasan strategis bagi Dinas Kebudayaan untuk mengembangkan program-program baru, melakukan inovasi dalam pelestarian budaya, serta memperluas skala kegiatan dengan pendekatan yang lebih transformatif, adaptif, dan inklusif pada tahun perencanaan berikutnya.

Dengan demikian, pencapaian menyeluruh terhadap target kinerja di tahun 2024 bukan hanya menandai keberhasilan teknis administratif, tetapi juga berperan sebagai katalisator untuk pencapaian misi kebudayaan yang lebih luas dan berkelanjutan di masa depan.

Rekomendasi Kebijakan dan Tindakan

Berdasarkan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo pada Triwulan IV Tahun 2024, berikut adalah rekomendasi kebijakan dan

tindakan strategis yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat kinerja ke depan serta menjamin kesinambungan capaian target Renstra hingga tahun 2026:

1) Penguatan Sistem Perencanaan Berbasis Kinerja

   Dinas Kebudayaan perlu terus memperkuat sistem perencanaan tahunan yang berbasis pada analisis capaian, evaluasi dampak, dan proyeksi kebutuhan riil masyarakat. Penyusunan target indikator sebaiknya semakin terukur, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan didukung dengan data yang valid serta partisipatif.

2) Pengembangan Model Pelaksanaan Program yang Fleksibel

   Untuk menjaga ketepatan waktu dan efisiensi, disarankan menerapkan pola pelaksanaan kegiatan yang lebih fleksibel, seperti pemanfaatan teknologi digital, sistem kontrak payung untuk kegiatan berulang, dan optimalisasi jadwal pelaksanaan sejak awal tahun anggaran.

3) Peningkatan Kapasitas SDM dan Mitra Pelaksana

   Kegiatan peningkatan kapasitas teknis dan manajerial bagi pelaksana program, termasuk komunitas budaya dan mitra kerja, perlu diperkuat. Hal ini untuk mencegah keterlambatan atau ketidakefisienan dalam eksekusi kegiatan serta memastikan kualitas output yang dihasilkan.

4) Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Wilayah

   Disarankan adanya peningkatan koordinasi dan integrasi program antara Dinas Kebudayaan dengan perangkat daerah lain, pemerintah desa, komunitas seni, serta lembaga adat dan pendidikan. Pendekatan kolaboratif ini dapat memperluas dampak kegiatan dan menghindari duplikasi program.

5) Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala

   Perlu diterapkan sistem pemantauan dan evaluasi (monev) secara lebih intensif dan periodik, terutama pada kegiatan strategis dan beranggaran besar. Monitoring tidak hanya bersifat administratif, namun juga substantif—untuk memastikan bahwa capaian kinerja berdampak langsung terhadap masyarakat.

6) Penyiapan Program Inovatif Berbasis Kearifan Lokal

Realisasi target yang sudah optimal menjadi peluang bagi Dinas Kebudayaan untuk merancang program inovatif berbasis potensi lokal, seperti digitalisasi arsip budaya, festival tematik desa, atau inkubasi seni tradisional. Ini penting untuk menjawab tantangan modernisasi dan regenerasi pelaku budaya.

7) Replikasi dan Skalabilitas Program yang Sukses

Program atau kegiatan yang terbukti berhasil dan berdampak tinggi—seperti pembinaan nilai-nilai luhur atau pengembangan bahasa dan sastra—perlu didorong untuk direplikasi di wilayah atau komunitas lain, serta ditingkatkan skala pelaksanaannya agar manfaatnya lebih luas.

Rekomendasi ini diharapkan menjadi pijakan dalam penyusunan Renja Tahun 2026 dan penguatan arah kebijakan kebudayaan Kabupaten Kulon Progo secara berkelanjutan, inklusif, dan berbasis hasil evaluasi yang objektif.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan). Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo bertipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kebudayaan dan sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja dinas;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan;

c. Penyelengaraan pemajuan warisan budaya;
d. Penyelengaraan pemajuan bahasa, sastra, sejarah dan permuseuman;
e. Penyelengaraan pemajuan adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
f. Pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
g. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan;
h. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2
T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah.	-	-	52,23	54,97	57,67	60,33	52,8	55,64	57,67	55,28	IKU OPD
2	Rata-rata Prosentase Pencapaian Program Pada Masing-masing Perangkat Daerah	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU OPD
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	-	v	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	

Dalam rangka mendukung penguatan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelayanan publik, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo melakukan evaluasi capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator-indikator yang selaras dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, meskipun hingga saat ini belum terdapat indikator yang ditetapkan secara normatif dalam NSPK maupun Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan kebudayaan. Oleh karena itu, evaluasi ini menggunakan pendekatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, serta tolok ukur yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis daerah (Renstra).

1) Indikator: *Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah*

Target kinerja pelestarian dan pengembangan budaya daerah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana. Pada tahun 2023, target ditetapkan sebesar 52,23% dan berhasil direalisasikan sedikit melampaui ekspektasi, yaitu sebesar 52,8%. Tahun 2024 mengalami kenaikan target menjadi 54,97%, dengan capaian aktual yang lebih tinggi, yaitu 55,64%. Hal ini mencerminkan upaya yang konsisten dan efektif dalam pelaksanaan program pelestarian budaya oleh Dinas Kebudayaan.

Untuk tahun 2025, target ditingkatkan menjadi 57,67%, dan berdasarkan tren capaian sebelumnya, proyeksi menunjukkan bahwa target ini dapat dicapai secara optimal. Namun, pada tahun 2026, meskipun target Renstra meningkat signifikan menjadi 60,33%, proyeksi capaian justru menunjukkan penurunan menjadi 55,28%. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan dan efektivitas program pelestarian budaya ke depan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menggambarkan kinerja yang baik dan sejalan dengan perencanaan strategis perangkat daerah, namun tetap diperlukan antisipasi dan penyesuaian kebijakan agar target yang lebih ambisius di tahun mendatang dapat tercapai secara maksimal..

2) Indikator: *Rata-rata Prosentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah*

Indikator “Rata-rata Prosentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah” menunjukkan performa kinerja yang konsisten dan maksimal dalam rentang waktu empat tahun. Target yang ditetapkan dalam Renstra, yaitu sebesar 100% untuk tahun 2023 hingga 2026, telah berhasil direalisasikan secara penuh pada setiap tahunnya, tanpa deviasi sedikit pun. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh program yang dirancang oleh perangkat daerah, khususnya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo, telah dilaksanakan dengan

efektif dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Capaian ini juga mencerminkan tingkat disiplin, komitmen, dan akuntabilitas yang tinggi dari unit kerja dalam pengelolaan program pembangunan daerah. Proyeksi ke depan juga menunjukkan capaian yang stabil di angka 100%, mengindikasikan optimisme dan kesiapan perangkat daerah dalam mempertahankan kualitas kinerja dan pencapaian program secara berkelanjutan. Indikator ini menjadi bukti keberhasilan pelaksanaan fungsi manajerial dan perencanaan yang baik dalam mendukung sasaran strategis pembangunan daerah.

3) Indikator:

Pelestarian cagar budaya merupakan aspek strategis dalam menjaga kontinuitas warisan sejarah dan memperkuat jati diri masyarakat lokal. Di Kabupaten Kulon Progo, indikator "Terlestarikannya Cagar Budaya" menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program kebudayaan. Sebagai salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK), keberhasilan pelestarian cagar budaya ini merupakan kontribusi penting dalam menjaga identitas lokal dan memperkuat ketahanan budaya daerah. Indikator ini tidak hanya merepresentasikan keberhasilan teknis dalam konservasi objek budaya, tetapi juga menunjukkan komitmen Dinas Kebudayaan terhadap pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana edukatif, pemersatu sosial, dan daya ungkit pembangunan berbasis nilai-nilai lokal. Capaian dan proyeksi indikator ini menjadi cerminan keberlanjutan program pelestarian yang dilaksanakan secara konsisten dan terukur.

Pada tahun 2024, pelestarian cagar budaya mencapai realisasi sebesar 100%, yang berarti seluruh objek cagar budaya yang direncanakan untuk dilindungi, dirawat, atau dikembangkan telah terlaksana dengan optimal. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program yang konsisten dan selaras

dengan fungsi Dinas Kebudayaan dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai sejarah dan budaya lokal.

Untuk tahun 2025 dan 2026, proyeksi kinerja tetap berada di angka 100%, menandakan optimisme yang tinggi bahwa pelestarian cagar budaya akan terus dijalankan dengan kualitas dan jangkauan yang sama. Proyeksi ini juga menunjukkan adanya keberlanjutan program dan kesiapan sumber daya dalam menjamin bahwa seluruh objek cagar budaya tetap terawat, terlindungi, dan dimanfaatkan secara tepat guna sebagai bagian dari upaya penguatan identitas budaya daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo berada pada posisi strategis dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan kebudayaan tidak hanya dituntut untuk menjaga kelestarian warisan budaya, namun juga berperan dalam membangun karakter masyarakat, memperkuat identitas daerah, dan berkontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional maupun global.

Namun, dalam pelaksanaannya, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo menghadapi berbagai hambatan baik secara struktural, teknis, maupun kultural. Permasalahan tersebut berdampak pada efektivitas program dan pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan, baik dalam kerangka Renstra perangkat daerah, kesesuaian dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Kunci (IKK), maupun relevansinya terhadap tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi permasalahan, menilai tantangan dan peluang, serta merumuskan isu strategis dan

rekomendasi sebagai dasar perumusan program dan kegiatan prioritas ke depan.

a. Permasalahan dan Hambatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi urusan kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo menghadapi sejumlah permasalahan yang saling berkaitan dengan tantangan zaman dan dinamika sosial budaya. Permasalahan-permasalahan ini muncul baik sebagai dampak dari perubahan global maupun akibat keterbatasan internal, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan minimnya kolaborasi lintas sektor. Untuk memahami lebih komprehensif kondisi tersebut, permasalahan ini perlu dianalisis bersama hambatan-hambatan yang menyertainya guna merumuskan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pelestarian budaya.

Tabel 2.3

Permasalahan dan Hambatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo

No	Permasalahan	Hambatan
1	Menurunnya apresiasi terhadap nilai-nilai lokal dan tradisi di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.	Dominasi budaya populer global dan kurangnya wadah representatif untuk ekspresi dan revitalisasi budaya lokal.
2	Transformasi digital belum optimal dimanfaatkan dalam pelestarian, edukasi, dan promosi budaya.	Keterbatasan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi dalam pengelolaan konten budaya digital.
3	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan dan pelestarian cagar budaya serta warisan takbenda.	Minimnya literasi budaya dan edukasi publik yang berkelanjutan, serta belum maksimalnya sinergi dengan media komunitas.
4	Belum tersedia museum daerah sebagai ruang edukasi dan	Belum menjadi prioritas pembangunan daerah dan keterbatasan anggaran

No	Permasalahan	Hambatan
	ekspresi budaya bagi generasi muda.	infrastruktur budaya representatif.
5	Lemahnya integrasi kebudayaan dalam lintas sektor pembangunan daerah.	Minimnya kolaborasi antara instansi kebudayaan dengan sektor pariwisata, pendidikan, pertanian, dan ekonomi kreatif.
6	Keterbatasan infrastruktur budaya di tingkat kapanewon dan kalurahan.	Belum meratanya alokasi pendanaan dan perencanaan infrastruktur budaya, terutama di wilayah perdesaan.
7	Ketidakhadiran pusat pelestarian budaya berbasis museum yang merepresentasikan identitas dan lanskap budaya lokal.	Belum ada sistem kelembagaan dan manajemen yang mendukung pengembangan museum berbasis komunitas dan edukasi.

Tabel di atas menggambarkan bahwa tantangan utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo bersumber dari kombinasi antara faktor internal (seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, dan anggaran) serta faktor eksternal (seperti pengaruh globalisasi dan minimnya integrasi lintas sektor). Menurunnya apresiasi terhadap budaya lokal, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, hingga belum adanya museum daerah sebagai pusat edukasi budaya menunjukkan lemahnya ekosistem pendukung budaya yang holistik. Hambatan-hambatan struktural dan teknis tersebut memperlihatkan pentingnya perencanaan strategis yang melibatkan sinergi antarinstansi, pemberdayaan komunitas, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar kebudayaan tidak hanya lestari, tetapi juga mampu menjadi daya ungkit pembangunan berbasis identitas lokal.

b. Dampak

Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak langsung terhadap pencapaian:

1) Visi dan misi kepala daerah**,** khususnya dalam misi "*memperkuat identitas dan karakter budaya Kulon Progo berbasis potensi lokal dan nilai-nilai kearifan lokal.*"
2) Tujuan pembangunan daerah yang mencantumkan pelestarian budaya sebagai pilar pembangunan berkelanjutan di sektor sosial.
3) Program nasional dan standar teknis**,** seperti ketidaksesuaian dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) urusan kebudayaan, belum optimalnya pemenuhan indikator IKK, serta belum teridentifikasinya kontribusi terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kebudayaan karena ketiadaan SPM khusus untuk urusan ini.
4) Agenda global (SDGs) terutama pada:
   - *SDG 4*: Pendidikan berkualitas — belum optimalnya integrasi warisan budaya dalam sistem pendidikan.
   - *SDG 11.4*: Perlindungan warisan budaya dan alam dunia — belum seluruhnya terdata dan terkelola secara sistematis.
   - *SDG 8.9*: Peningkatan ekonomi kreatif berbasis budaya — belum terbentuk sistem dukungan berkelanjutan untuk seniman lokal dan pelaku budaya sebagai pelaku ekonomi kreatif.

c. Tantangan dan Peluang

Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo menghadapi tantangan globalisasi, dominasi budaya populer, dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital serta kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya. Meski demikian, peluang strategis terbuka melalui tumbuhnya komunitas budaya lokal, potensi kawasan geo-kultural Menoreh, dukungan Dana Keistimewaan Yogyakarta, dan

kemajuan teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk penguatan SDM dan infrastruktur budaya.

Tabel 2.4

Tatangan Utama dan Peluang Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo

No.	Tantangan Utama	Peluang yang Tersedia
1	Globalisasi budaya dan dominasi budaya populer yang mengikis apresiasi terhadap nilai-nilai lokal dan tradisi.	Tumbuhnya komunitas budaya dan inisiatif lokal di tingkat kalurahan yang bisa dimitrakan secara strategis dalam revitalisasi budaya lokal.
2	Perubahan generasi dan transformasi digital yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk edukasi, promosi, dan dokumentasi budaya.	Kemajuan teknologi digital yang memungkinkan pengembangan virtual museum, arsip budaya digital, platform edukatif berbasis budaya, dan media sosial kreatif.
3	Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelindungan cagar budaya dan warisan takbenda, serta rendahnya partisipasi pelibatan publik.	Penguatan literasi budaya melalui pendidikan formal dan informal, serta kampanye publik dengan dukungan komunitas dan media digital.
4	Minimnya ruang representatif untuk ekspresi budaya generasi muda, termasuk belum adanya museum daerah sebagai sarana edukasi budaya.	Potensi pengembangan Museum Lanskap Budaya Menoreh dan ruang ekspresi budaya interaktif berbasis komunitas dan pendidikan.
5	Kurangnya kolaborasi lintas sektor dalam pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan.	Peluang kolaborasi dengan sektor pariwisata, pendidikan, pertanian, dan ekonomi kreatif untuk memperkuat posisi budaya sebagai pilar pembangunan.

No.	Tantangan Utama	Peluang yang Tersedia
6	Keterbatasan infrastruktur budaya yang merata dan memadai, khususnya di wilayah pedesaan atau kalurahan.	Dukungan Dana Keistimewaan Yogyakarta (Danais) yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur budaya dan penguatan SDM.
7	Belum tersedianya museum daerah sebagai pusat edukasi, pelestarian, dan dokumentasi budaya lokal secara representatif.	Pengembangan Museum Lanskap Budaya Menoreh sebagai pusat interpretasi budaya Kulon Progo yang terintegrasi dengan pelestarian situs, edukasi sejarah, dan pemberdayaan komunitas lokal.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo menghadapi berbagai tantangan strategis dalam pelestarian dan pengembangan budaya, mulai dari pengaruh globalisasi, rendahnya literasi budaya, hingga keterbatasan infrastruktur dan sarana ekspresi budaya generasi muda. Namun demikian, terdapat sejumlah peluang signifikan yang dapat dimanfaatkan secara strategis, seperti kemajuan teknologi digital, tumbuhnya komunitas budaya lokal, potensi pengembangan Museum Lanskap Budaya Menoreh, serta dukungan Dana Keistimewaan Yogyakarta (Danais). Dengan menyinergikan tantangan dan peluang tersebut, arah pembangunan kebudayaan Kulon Progo dapat diarahkan pada penguatan ekosistem budaya yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

d. Formulasi Isu-Isu

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo, diperlukan identifikasi dan perumusan isu-isu strategis yang menjadi tantangan utama dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah. Isu-isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelemahan

struktural dan fungsional perangkat daerah, tetapi juga mencerminkan kebutuhan akan transformasi kelembagaan, penguatan kapasitas sumber daya, serta integrasi program dengan arah pembangunan nasional dan global.

Sebagai bagian dari proses perencanaan yang responsif dan berbasis masalah, pemetaan isu strategis dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang bersifat konkret, adaptif, dan menjawab kebutuhan masa depan. Rekomendasi yang disusun diarahkan untuk membangun fondasi sistem pelayanan kebudayaan yang lebih tangguh, terintegrasi, serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda dan komunitas budaya lokal.

Tabel 2.5
Formulasi Isu Isu Pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo

Isu Strategis	Rekomendasi Tindak Lanjut
Ketiadaan sistem data budaya terpadu	Pengembangan basis data budaya Kulon Progo melalui sistem digital terintegrasi dengan data pelaku, komunitas, situs, dan event budaya.
Kelembagaan dan SDM belum adaptif	Peningkatan kapasitas SDM bidang kebudayaan melalui pelatihan teknis, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan program magang budaya.
Belum optimalnya fungsi Taman Budaya Kulon Progo sebagai pusat pengembangan seni dan budaya	Penguatan peran dan fungsi Taman Budaya Kulon Progo sebagai simpul aktivitas seni, pendidikan budaya, pelatihan, serta promosi karya seni lokal.
Lemahnya partisipasi generasi muda	Integrasi program kebudayaan dalam pendidikan formal dan informal; lomba, festival, dan pelatihan yang berbasis komunitas sekolah dan pemuda.
Minimnya keterhubungan antar sektor	Penguatan kolaborasi lintas OPD (pariwisata, pendidikan, pertanian) untuk sinergi program budaya dengan pembangunan daerah.

Isu Strategis	Rekomendasi Tindak Lanjut
Ketidakterhubungan dengan agenda nasional dan SDGs	Penyelarasan program dengan indikator SDGs dan program nasional, termasuk penyusunan indikator lokal yang mengarah ke capaian global.
Belum tersedianya museum budaya daerah sebagai media pelestarian dan edukasi budaya	Perencanaan dan pembangunan museum budaya daerah yang memuat narasi sejarah, ekologi budaya, dan warisan budaya takbenda sebagai sarana pembelajaran lintas generasi.
Belum tersedia ruang ekspresi budaya yang representatif bagi peserta didik dan generasi muda	Pengadaan dan pengelolaan ruang ekspresi seni dan budaya berbasis komunitas serta institusi pendidikan, guna mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam pelestarian budaya.

Berbagai isu strategis dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi kelembagaan, infrastruktur, serta ekosistem budaya yang adaptif dan inklusif. Ketiadaan sistem data budaya terpadu, keterbatasan SDM dan kelembagaan, serta belum optimalnya peran Taman Budaya Kulon Progo menjadi penghambat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kebudayaan yang berbasis bukti dan partisipatif. Selain itu, belum tersedianya museum daerah serta ruang ekspresi budaya yang representatif bagi peserta didik dan generasi muda menjadi indikator lemahnya sarana edukasi dan pewarisan nilai budaya lokal. Tantangan ini diperkuat oleh minimnya keterhubungan antar sektor serta kurangnya penyelarasan program dengan agenda nasional dan global seperti SDGs.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pembangunan infrastruktur budaya yang kontekstual (seperti museum dan ruang ekspresi interaktif), penguatan Taman Budaya Kulon Progo sebagai simpul aktivitas budaya, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi program budaya dalam pendidikan dan lintas sektor. Upaya

ini bertujuan untuk mewujudkan ekosistem budaya yang hidup, relevan dengan zaman, dan berpihak pada pelestarian serta pengembangan identitas budaya lokal yang kuat..

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026 dilaksanakan sebagai bagian dari proses penting dalam penyelarasan perencanaan tahunan Perangkat Daerah, khususnya Dinas Kebudayaan, dengan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh. Proses ini menjadi tahap strategis untuk memastikan bahwa seluruh usulan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kebudayaan memiliki relevansi, kontribusi, dan sinergi yang kuat terhadap prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari review ini adalah untuk menilai sejauh mana isu-isu strategis dan kebutuhan sektoral di bidang kebudayaan telah terakomodasi dalam Ranwal RKPD 2026. Kesesuaian ini penting untuk menjamin bahwa arah pembangunan kebudayaan tidak berjalan secara terpisah atau sektoral semata, tetapi menjadi bagian integral dari sistem pembangunan daerah yang holistik dan berkelanjutan. Metodologi yang digunakan dalam review ini dilakukan dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan Ranwal RKPD 2026 dengan hasil analisis kebutuhan faktual Dinas Kebudayaan. Proses ini mencakup beberapa tahap, antara lain:

1) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, termasuk capaian indikator kinerja serta kendala pelaksanaan.
2) Identifikasi kebutuhan aktual Dinas Kebudayaan, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, maupun dukungan program strategis.
3) Pemetaan isu strategis sektoral kebudayaan yang berkembang di masyarakat, termasuk kebutuhan generasi muda, komunitas budaya, dan pelestarian warisan budaya daerah.

4) Penyesuaian dan harmonisasi terhadap kebijakan pembangunan nasional dan regional, seperti RPJMN, RPJMD DIY, RPD Kabupaten Kulon Progo, serta arah capaian SDGs.

Hasil dari proses ini menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja (Renja) yang lebih tepat sasaran, terukur, dan adaptif terhadap kebutuhan nyata di lapangan, serta memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam rangka memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan makro dan mikro di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, telah dilakukan reviu terhadap dua dokumen utama tahun perencanaan 2026, yakni Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah DaerahTahun 2026 dan Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo. Reviu ini bertujuan untuk menilai konsistensi substansi, kecukupan indikator kinerja, kelayakan anggaran, serta tingkat integrasi antara rencana strategis kabupaten dan kebutuhan teknis perangkat daerah. Hasil reviu disajikan secara sistematis guna memberikan dasar pertimbangan dalam proses penajaman, penyempurnaan, dan pengambilan keputusan pada tahapan perencanaan berikutnya.

Tabel 2.6

Tabel T-C.31Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					NO	RENJA DINAS KEBUDAYAAN 2026					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	3	10	4	8	9	1	3	10		8	9	
	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)				**42.091.405.000,00**		**DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)**				**42.281.405.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**42.091.405.000,00**		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**42.281.405.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**42.091.405.000,00**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**42.281.405.000,00**	
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		-	-	**3.396.274.000,00**	I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi.***	**100 %**	**3.326.179.468,00**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan Tepat Waktu*	2 Dokumen	40.940.000,00	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan Tepat Waktu*	2 Laporan	39.167.059,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	24.240.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	17.380.000,00	Penataan kebutuhan anggaran dengan mengurangkan sebesar Rp6.860.000,00 dalam pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	21 Laporan	16.700.000,00			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	12 Laporan	21.787.059,00	Penambahan anggaran sebesar Rp5.087.059,00 dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu.*	14 Laporan	2.566.860.000,00	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.*	3 Laporan	2.561.699.700,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	39 Orang/bulan	2.495.342.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	39 Orang/bulan	2.495.342.000,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	66.527.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	61.366.700,00	Penataan kebutuhan anggaran dengan mengurangkan sebesar Rp6.860.000,00 dalam pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					NO	RENJA DINAS KEBUDAYAAN 2026					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	3	10	4	8	9	1	3	10		8	9	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	14 Laporan	4.991.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	14 Laporan	4.991.000,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	0 Dokumen	0,00	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.*	0 Laporan	0,00	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	0 Dokumen	0,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	0 Dokumen	0,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah*	0 Laporan	0,00	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah*	0 Laporan	0,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	0 Dokumen	0,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	0 Dokumen	0,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	0 Orang	0,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	0 Orang	0,00	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Adminstrasi Umum*	2 Dokumen	48.923.000,00	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah.*	2 Laporan	62.284.400,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	16.611.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	16.611.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	32.312.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	45.673.400,00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	4 Unit	18.100.000,00	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.*	1 Laporan	19.041.100,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					NO	RENJA DINAS KEBUDAYAAN 2026					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	3	10	4	8	9	1	3	10		8	9	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	60 Unit	18.100.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	19.041.100,00	Penambahan anggaran sebesar Rp5.087.059,00 dalam pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	2 Laporan	281.815.000,00	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	2 Laporan	275.885.309,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	78.850.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	78.849.013,00	Penataan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan aktivitas.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	202.965.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	197.036.296,00	Penataan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan aktivitas.
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	4 Laporan	439.636.000,00	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	4 Laporan	368.101.900,00	Penataan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan aktivitas.
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	12 Unit	86.991.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	17 Unit	86.989.200,00	Penataan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan aktivitas.
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	84.127.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	*258.000.000,00*	Penambahan anggaran dalam rangka usulan rehabilitasi atap bangunan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo.
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	8.422.000,00			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	23.112.700,00	Penataan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan aktivitas.
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					NO	RENJA DINAS KEBUDAYAAN 2026					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	3	10	4	8	9	1	3	10		8	9	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	23 Unit	260.096.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0,00	Penyesuaian Sub Kegiatan semula Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, menjadi Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, dalam rangka kesesusain pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi pencaipan Indikator Kinerja Program.
II.						**II.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		***Jumlah Penonton Pertunjukan seni di Taman Budaya***	**71.300 Orang**	**260.094.532,00**	
9						9	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.*	1 Laporan	260.094.532,00	
							Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					
								Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Pengasih	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	3 Objek	260.094.532,00	Penyesuaian Sub Kegiatan semula Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, menjadi Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, dalam rangka kesesusain pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi pencaipan Indikator Kinerja Program.
III.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		-	-	38.695.131.000,00	III.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		*Warisan Budaya yang Sudah Ditetapkan.* *Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya dan Rintisan Keluarahan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang.* *Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik* *Jumlah Aktifitas Pelestarian Sumber Sejarah, Karya Bahasa, Sastra, dan Permuseuman*	233 Warisan Budaya 64 Keluraha n/Kalurahan 82,56 % 8 Kegiatan	38.695.131.000,00	Pagu indigatif yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasar Surat Paniradya Kaistimewaan Nomor B/100.1.5.1/1652/PANI Tanggal 06 Maret 2025 Perihal Pemberitahuan Entry Dana Keistimewaan TA 2026.

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					NO	RENJA DINAS KEBUDAYAAN 2026					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	3	10	4	8	9	1	3	10		8	9	
10	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		Jumlah laporan pembinaan sejarah bahasa sastra dan permuseuman	3 Laporan	2.841.671.000,00	10	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman.*	3 Laporan	2.841.671.000,00	Pagu indigatif yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasar Surat Paniradya Kaistimewaan Nomor B/100.1.5.1/1652/PANI Tanggal 06 Maret 2025 Perihal Pemberitahuan Entry Dana Keistimewaan TA 2026.
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan						Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan*	3 Dokumen	650.000.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan*	3 Dokumen	650.000.000,00	
	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra						Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra					
		Kab. Kulon Progo, Semua	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra*	4 Laporan	1.600.000.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan,	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra*	4 Laporan	1.600.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman						Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman					
		Kab. Kulon Progo, Semua	*Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola*	1 Unit	591.671.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan,	*Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola*	1 Unit	591.671.000,00	
11	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		*Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan.*	20 Objek	12.833.685.000,00	11	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelestarian Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya.*	3 Laporan	12.833.685.000,00	Pagu indigatif yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasar Surat Paniradya Kaistimewaan Nomor B/100.1.5.1/1652/PANI Tanggal 06 Maret 2025 Perihal Pemberitahuan Entry Dana Keistimewaan TA 2026.
	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya						Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola*	1 Objek	12.027.000.000,00			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola*	1 Objek	12.027.000.000,00	
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya						Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya					
		Kab. Kulon Progo, Semua	*Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang*	20 Objek	549.070.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan,	*Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang*	20 Objek	549.070.000,00	
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia						Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi*	2 Objek	257.615.000,00			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi*	2 Objek	257.615.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					NO	RENJA DINAS KEBUDAYAAN 2026					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	3	10	4	8	9	1	3	10		8	9	
12	Pengelolaan Taman Budaya		*Jumlah Taman Budaya Kab/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan.*	1 Objek	3.500.000.000,00	12	Pengelolaan Taman Budaya		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Taman Budaya.*	1 Laporan	3.500.000.000,00	Pagu indigatif yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasar Surat Paniradya Kaistimewaan Nomor B/100.1.5.1/1652/PANI Tanggal 06 Maret 2025 Perihal Pemberitahuan Entry Dana Keistimewaan TA 2026.
	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota						Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan*	1 Objek	3.500.000.000,00			Kab. Kulon Progo, Pengasih, Pengasih	*Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan*	1 Objek	3.500.000.000,00	
13	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan		*Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya.*	20 Unit	1.000.000.000,00	13	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya*	1 Laporan	1.000.000.000,00	Pagu indigatif yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasar Surat Paniradya Kaistimewaan Nomor B/100.1.5.1/1652/PANI Tanggal 06 Maret 2025 Perihal Pemberitahuan Entry Dana Keistimewaan TA 2026.
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya						Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya					
		Kab. Kulon Progo, Semua	*Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya*	20 Unit	1.000.000.000,00			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	*Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya*	20 Unit	1.000.000.000,00	
14	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		*Jumlah Laporan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya*	11 Laporan	18.519.775.000,00	14	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya.*	11 Laporan	18.519.775.000,00	Pagu indigatif yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasar Surat Paniradya Kaistimewaan Nomor B/100.1.5.1/1652/PANI Tanggal 06 Maret 2025 Perihal Pemberitahuan Entry Dana Keistimewaan TA 2026.
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya						Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya*	2 Laporan	1.340.000.000,00			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya*	2 Laporan	1.340.000.000,00	
	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni						Pembinaan Lembaga Penggiat Seni					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina*	2 Lembaga	1.064.250.000,00			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina*	2 Lembaga	1.064.250.000,00	
	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya						Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya*	3 Laporan	1.254.433.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya*	3 Laporan	1.254.433.000,00	
	Penghargaan Seniman dan Budayawan						Penghargaan Seniman dan Budayawan					

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					NO	RENJA DINAS KEBUDAYAAN 2026					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	3	10	4	8	9	1	3	10		8	9	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan*	5 Orang	350.000.000,00			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan*	5 Orang	350.000.000,00	
	Festival Kebudayaan Yogyakarta						Festival Kebudayaan Yogyakarta					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta*	3 Laporan	500.000.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta*	3 Laporan	500.000.000,00	
	Gelar Budaya Jogja						Gelar Budaya Jogja					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	10 Laporan	6.465.293.000,00			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	10 Laporan	6.465.293.000,00	
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah						Publikasi Seni dan Budaya Daerah					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah*	2 Dokumen	200.000.000,00			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah*	2 Dokumen	200.000.000,00	
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi						Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina*	75 Orang	294.738.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina*	75 Orang	294.738.000,00	
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat						Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat*	5 Laporan	1.665.261.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat*	5 Laporan	1.665.261.000,00	
	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni						Penyelenggaraan Event Penggiat Seni					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Even Penggiat Seni*	3 Laporan	2.654.327.000,00			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Even Penggiat Seni*	3 Laporan	2.654.327.000,00	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi						Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi					
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi*	5 Laporan	2.731.473.000,00			Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi*	5 Laporan	2.731.473.000,00	

Berdasarkan hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dan Analisis Kebutuhan Anggaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tahun 2026, ditemukan beberapa catatan penting dan perbedaan substansial yang relevan untuk dianalisis dalam konteks penyusunan perencanaan kerja. Analisis ini mencakup kecocokan substansi program/kegiatan serta ketidaksesuaian dalam hal besaran anggaran dan perumusan sub-kegiatan.

1) Perbedaan dalam Besaran Anggaran:

   Beberapa program dan kegiatan pada Renja Dinas Kebudayaan memiliki kesesuaian substansi dengan RKPD, namun terdapat perbedaan nilai anggaran yang cukup signifikan. Misalnya, pada sub-kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, tercatat perbedaan anggaran sebesar Rp6.860.000,00 dari RKPD (Rp24.240.000,00) menjadi Rp17.380.000,00 dalam Renja Disbud. Penyesuaian ini dijelaskan sebagai hasil penataan kebutuhan dalam pelaksanaan rapat rutin.

2) Reformulasi Sub-Kegiatan:

   Terdapat reformulasi terhadap substansi kegiatan yang berimplikasi pada perubahan indikator dan pendekatan pelaksanaan. Sebagai contoh, pada awalnya terdapat sub-kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor, yang dalam Renja Disbud 2026 diubah menjadi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian terhadap kebutuhan substansial kebijakan pelestarian budaya dan optimalisasi capaian indikator kinerja.

3) Penambahan Usulan Kegiatan Baru:

   Ditemukan pula adanya penguatan fokus terhadap beberapa kegiatan strategis kebudayaan yang tidak secara eksplisit termuat dalam RKPD. Contohnya adalah rencana rehabilitasi atap bangunan Dinas Kebudayaan yang mencerminkan kebutuhan

infrastruktur mendesak. Hal ini diakomodasi dalam Renja dengan kenaikan anggaran dari Rp84.127.000,00 menjadi Rp258.000.000,00.

4) Optimalisasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan:
   Program-program yang bersumber dari Dana Keistimewaan seperti pelestarian warisan budaya, pengelolaan taman budaya, pembinaan rintisan desa budaya, dan pemberdayaan lembaga seni tetap menjadi fokus dengan alokasi anggaran yang signifikan dan indikator capaian yang jelas. Secara umum, sasaran capaian tetap konsisten, tetapi alokasi dan teknis pelaksanaan disesuaikan dengan hasil evaluasi dan kebutuhan yang berkembang.

Hasil reviu ini menunjukkan bahwa Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2026 memiliki garis besar yang sinkron dengan arah kebijakan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, namun memuat beberapa penyesuaian dalam aspek anggaran, prioritas sub-kegiatan, serta respons terhadap kebutuhan aktual di lapangan. Perbedaan tersebut bukan merupakan ketidaksesuaian, melainkan bentuk dinamis dari penyesuaian perencanaan berbasis kebutuhan, relevansi, dan efisiensi dalam mendukung pencapaian indikator kinerja kebudayaan daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan di bidang kebudayaan dihimpun melalui berbagai mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat secara luas. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo secara aktif membuka ruang dialog, konsultasi, dan penjaringan aspirasi dari berbagai pihak, antara lain:

1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
   Usulan masyarakat muncul dari forum Musrenbang tingkat kalurahan, kapanewon, hingga kabupaten. Dalam forum ini, kelompok-kelompok seni, tokoh adat, penghayat kepercayaan, dan

masyarakat umum menyampaikan kebutuhan yang berkaitan dengan pelestarian nilai, ekspresi budaya, hingga infrastruktur pendukung kegiatan budaya.

2) Forum Komunikasi Budaya dan Pertemuan Tematik

   Dinas menyelenggarakan forum komunikasi kebudayaan bersama pelaku budaya, pengelola sanggar, komunitas sejarah, serta pelestari cagar budaya. Dalam forum ini, usulan muncul secara lebih tematik dan mendalam, berdasarkan analisis kebutuhan spesifik di lapangan.

3) Proposal dan Audiensi Langsung

   Beberapa komunitas budaya, lembaga adat, dan pegiat budaya mengajukan proposal kegiatan secara langsung kepada Dinas. Proposal ini kemudian diverifikasi secara administratif dan substantif sesuai dengan tupoksi Dinas Kebudayaan.

4) Observasi Lapangan dan Penjaringan Informal

   Melalui kunjungan lapangan, pendampingan kegiatan seni, atau agenda pelestarian budaya lainnya, petugas Dinas mencatat aspirasi dan kebutuhan langsung dari pelaku budaya. Metode ini memungkinkan diperolehnya data empirik yang tidak selalu terungkap dalam forum formal.

5) Koordinasi Lintas Perangkat Daerah dan Mitra Strategis

   Beberapa usulan juga berasal dari hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain, perguruan tinggi, atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki keterlibatan dalam program budaya, edukasi sejarah, pariwisata berbasis budaya, dan pengembangan wilayah berbasis potensi lokal.

Seluruh usulan yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, dan dikaji untuk menilai kelayakan, urgensi, serta keterkaitannya dengan arah kebijakan kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan Dinas benar-benar bersumber dari kebutuhan riil masyarakat budaya dan dapat mendorong keberlanjutan ekosistem budaya lokal.

Setiap usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan dianalisis dan diseleksi berdasarkan kesesuaiannya dengan isu-isu strategis pembangunan kebudayaan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang diakomodasi tidak hanya mencerminkan aspirasi masyarakat, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan kelembagaan. Dinas Kebudayaan memiliki mandat dalam pelestarian nilai-nilai budaya lokal, penguatan identitas daerah, pembinaan seni dan tradisi, perlindungan warisan budaya (baik benda maupun takbenda), serta pengembangan ekosistem kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan utama dalam menilai kesesuaian usulan antara lain:

1) Menurunnya Apresiasi terhadap Budaya Lokal

   Usulan yang mendorong edukasi, regenerasi pelaku seni, dan revitalisasi tradisi lokal dianggap strategis dalam menjawab tantangan melemahnya partisipasi generasi muda terhadap warisan budaya.

2) Keterbatasan Akses dan Ruang Ekspresi Budaya

   Banyak usulan yang datang dari kalurahan atau kapanewon terkait pembangunan atau rehabilitasi balai budaya, sanggar seni, dan fasilitas pertunjukan. Hal ini selaras dengan fungsi Dinas dalam menyediakan sarana-prasarana penunjang aktivitas kebudayaan.

3) Minimnya Dokumentasi dan Pendataan Warisan Budaya

   Usulan terkait pemetaan, digitalisasi, dan pendokumentasian tradisi, situs sejarah, bahasa lokal, serta produk budaya takbenda mendukung tugas Dinas dalam perlindungan dan pengelolaan cagar budaya serta kekayaan budaya nonfisik.

4) Kebutuhan Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Budaya

   Berbagai permintaan pelatihan, workshop, hingga studi banding untuk pelaku budaya dan pengelola komunitas menjadi bagian

penting dari strategi pengembangan kapasitas budaya lokal yang menjadi tanggung jawab Dinas.

5) Belum Optimalnya Integrasi Budaya dalam Pembangunan Wilayah Usulan yang mengaitkan kebudayaan dengan pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata berbasis budaya, dan pemanfaatan lanskap budaya seperti kawasan Menoreh memperkuat peran kebudayaan sebagai penggerak pembangunan daerah yang berkarakter.

Dengan mempertimbangkan keterkaitan usulan-usulan tersebut terhadap fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan, maka proses seleksi dilakukan secara objektif, dengan mendahulukan program/kegiatan yang paling strategis, berdampak luas, dan memiliki kesinambungan. Hasil akhir dari proses ini adalah tersusunnya rencana kerja yang berakar pada kebutuhan nyata masyarakat budaya, sekaligus mendukung pencapaian visi Kabupaten Kulon Progo sebagai wilayah dengan identitas budaya yang kuat dan lestari.

Tabel 2.7 Proses Usulan dan Kesesuaian usulan dentan Isu-Isu Strategis dan Tupoksi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)* Kabupaten Kulon Progo

No	Proses Usulan	Kesesuaian Usulan dengan Isu Strategis dan Tupoksi Dinas
1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Usulan dari masyarakat melalui forum Musrenbang di tingkat kalurahan, kapanewon, hingga kabupaten.	Usulan museum biasanya muncul dalam bentuk permintaan rintisan museum lokal, rumah budaya, atau ruang edukasi sejarah di wilayah tertentu. Hal ini mendukung isu menurunnya apresiasi budaya lokal dan keterbatasan ruang ekspresi budaya, serta selaras dengan tupoksi pelestarian warisan budaya dan edukasi masyarakat.

No	Proses Usulan	Kesesuaian Usulan dengan Isu Strategis dan Tupoksi Dinas
2	Forum Komunikasi Budaya dan Pertemuan TematikForum bersama pelaku budaya, pengelola sanggar, komunitas sejarah, dan pelestari budaya.	Muncul usulan untuk revitalisasi koleksi sejarah lokal, kurasi museum desa, serta sinergi antara sanggar seni dan ruang pamer. Mendukung isu minimnya dokumentasi dan pendataan budaya, serta memperkuat fungsi museum sebagai sarana diseminasi nilai budaya.
3	Proposal dan Audiensi LangsungPengajuan langsung dari komunitas, lembaga adat, dan pelaku budaya.	Beberapa komunitas mengajukan proposal rintisan museum berbasis lanskap budaya, pengumpulan koleksi sejarah lokal, serta digitalisasi arsip budaya. Sangat relevan dengan isu penguatan kapasitas kelembagaan budaya dan pengelolaan museum berbasis masyarakat.
4	Observasi Lapangan dan Penjaringan InformalHasil kunjungan, pendampingan kegiatan seni, dan interaksi langsung dengan pelaku budaya.	Petugas mencatat potensi koleksi budaya, bangunan cagar budaya yang layak difungsikan sebagai ruang museum, serta inisiatif masyarakat untuk menciptakan ruang belajar sejarah lokal. Mendukung isu belum optimalnya pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana edukatif dan pemetaan potensi budaya berbasis wilayah.
5	Koordinasi Lintas Perangkat Daerah dan Mitra Strategis Kolaborasi dengan OPD lain, perguruan tinggi, dan LSM.	Usulan pengembangan museum dikaitkan dengan program pendidikan karakter, destinasi wisata edukatif, dan pelestarian lanskap budaya Menoreh.

No	Proses Usulan	Kesesuaian Usulan dengan Isu Strategis dan Tupoksi Dinas
		Sejalan dengan isu integrasi kebudayaan dalam pembangunan wilayah, dan mendukung branding Kulon Progo melalui penguatan peran museum.

Berdasarkan hasil identifikasi dari berbagai jalur usulan, baik melalui forum formal seperti Musrenbang maupun mekanisme partisipatif lainnya, terlihat bahwa pengembangan museum sebagai ruang pelestarian dan edukasi budaya telah menjadi kebutuhan yang muncul secara luas dan konsisten dari berbagai lapisan masyarakat. Setiap kanal usulan, mulai dari Musrenbang, forum komunikasi budaya, hingga observasi lapangan dan koordinasi lintas sektor, menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan isu strategis seperti rendahnya apresiasi budaya lokal, keterbatasan ruang ekspresi budaya, belum optimalnya dokumentasi, serta kebutuhan penguatan kelembagaan budaya berbasis masyarakat. Selain itu, keseluruhan usulan juga sejalan dengan tugas pokok Dinas Kebudayaan dalam pelestarian warisan budaya, edukasi publik, serta penguatan identitas dan integrasi budaya dalam pembangunan wilayah. Dengan demikian, pengembangan museum tidak hanya relevan secara teknis dan substansial, tetapi juga memiliki dukungan sosial dan legitimasi dari akar rumput, sekaligus memperkuat arah kebijakan strategis daerah di bidang kebudayaan.

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo senantiasa melaksanakan proses *bottom-up* yaitu diantaranya melalui Forum Perangkat Daerah yang melibatkan unsur pentahelix dengan tema yang selaras dengan tema RKPD. Selanjutnya hasil pembahasan dan berbagai usulan program dan kegiatan yang mengemuka dalam Forum Dinas Kebudayaan maupun Musrenbang Kabupaten menjadi input untuk telaahan dalam menentukan program dan kegiatan lingkup Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon

Progo. Rencana kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)* Kabupaten Kulon Progo didiskusikan dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan/Kapanewon dan Pokok Pokiran Kebudayaan Sebagai berikut:

Tabel 2.8

T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume			Catatn
				Satuan	Target	Usulan Pagu	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					10.215.000.000,00	Usulan Pokir DPRD Kabupaten Kulon Progo
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelestarian Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya.*	Laporan	1	8.300.000.000,00	
	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	Objek	4	8.300.000.000,00	Usulan Pokir DPRD Kabupaten Kulon Progo
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan		*Jumlah Laporan Pelaksanaan*	Laporan	*1*	*1.915.000.000,00*	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Unit	32	1.915.000.000,00	Usulan Pokir DPRD Kabupaten Kulon Progo

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo menerima dukungan signifikan dalam rangka pelaksanaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Total usulan anggaran mencapai Rp10.215.000.000,00, yang sebagian besar berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Salah satu komponen utama dari usulan tersebut adalah kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, dengan indikator berupa 1 laporan pelaksanaan kegiatan dan usulan pagu sebesar Rp8.300.000.000,00. Dalam subkegiatan ini juga terdapat program Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya, yang ditargetkan mengelola 4 objek cagar budaya dengan nilai usulan yang sama, yaitu Rp8.300.000.000,00, yang menunjukkan tumpang tindih

angka namun menggambarkan konsistensi prioritas pemangku kepentingan terhadap aspek pelestarian dan tata kelola cagar budaya. Selain itu, bidang Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan juga menjadi perhatian penting. Terdapat usulan pengadaan 32 unit sarana dan prasarana lembaga budaya di wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan pagu sebesar Rp1.915.000.000,00. Indikator yang digunakan adalah jumlah laporan pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, dengan target sebanyak 1 laporan.

Secara keseluruhan, usulan ini menunjukkan komitmen DPRD dan pemangku kepentingan terhadap upaya pelestarian dan penguatan kelembagaan budaya melalui program keistimewaan DIY. Dukungan anggaran yang besar, serta target yang terukur, mempertegas pentingnya peran kebudayaan dalam pembangunan daerah yang berbasis kearifan lokal. Usulan ini juga diharapkan mendorong implementasi kegiatan yang berdampak langsung terhadap pelestarian nilai budaya dan peningkatan infrastruktur kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo..

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah mutlak diperlukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, bersinergi, holistik dan terintegrasi. Guna merespon berbagai dinamika yang ada, Pemerintah Daerah dituntut untuk terus bertransformasi, berpikiran terbuka dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.



Gambar 3.1 Isu Strategi dan Permasalahan Bidang Kebudayaan

Perubahan yang terjadi dan mempengaruhi arah kebijakan di Daerah diantaranya seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa adanya pengalihan beberapa kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, dari Provinsi ke Pusat dan sebaliknya. Selanjutnya dalam rangka penjabaran dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, telah ditetapkan beberapa peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Implikasi dari berbagai kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat tersebut berdampak pada kewenangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang bertambah serta adanya perubahan pada skema pengelolaan keuangan daerah. Untuk memastikan pembangunan khususnya pada Bidang Kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan terarah dan efektif, diperlukan rencana pembangunan tahunan yang sistematis yang dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, atas bawah dan bawah atas serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan turut mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengampu urusan bidang kebudayaan, dan sebagian urusan keistimewaan berkewajiban untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Bidang Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo dengan perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional pada Tahun 2026. Sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, Prioritas Nasional (PN) menjadi salah satu acuan dalam RKP Tahun 2026 yang dituangkan di dalamnya. Kesesuaian Prioritas Pembangunan tersebut diuraikan lebih lanjut dengan dirumuskannya keterkaitan indikator sasaran

pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2026; tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2026 dengan sasaran PN RKP Tahun 2026; keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan PN RKP Tahun 2026 serta tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2026.

Keselarasan prioritas, dalam konteks perencanaan pembangunan, berarti memastikan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah selaras dengan Pemerintah Pusat. Prioritas Kementerian Kebudayaan mendasar pada Program Prioritas Nasional Tahun 2025 – 2029 (Asta Cita) yang berfokus pada Bidang Kebudayaan adalah "*Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur*".

Kemudian, Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 DIY yang berfokus pada Bidang Kebudayaan adalah Ukuran Keterwujudan Pancamulia : Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, melalui Indikasi Prioritas Pembangunan : "Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta". Pada Indikasi Prioritas Pembangunan terdapat 13 dimensi Arah Kebijakan, dan yang terkait dengan Kebudayaan adalah 4 dimensi (dimensi 5, 7, 10, dan 12). Selanjutnya, prioritas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dengan fokus Bidang Kebudayaan pada Prioritas "*Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*".



Gambar 3.2 Keselaran Prioritas Pembangunan

Rumusan prioritas Bidang Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 tersebut telah memperhatikan program prioritas nasional yang tertuang di dalam RKP Tahun 2026 serta didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022 serta situasi dan kondisi eksternal (global).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tema pembangunan tahun 2026 sesuai dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo yaitu "*Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan*". Penetapan Indikator kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2024 bertujuan untuk memberi gambaran awal tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan sehingga target pencapaian menjadi jelas dan terukur. Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan sebagai *critical success factor* terhadap pencapaian sasaran kinerja pemerintah daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 sehingga terbangun korelasi yang jelas antara kinerja pemerintah daerah dengan kinerja perangkat daerah.

Tema ini mengandung makna bahwa pembangunan diarahkan untuk memperkuat aspek fundamental daerah, baik dari sisi infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, maupun pemanfaatan potensi lokal secara inklusif dan berkelanjutan. Dalam mendukung pencapaian tema pembangunan tersebut, sasaran pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang relevan dengan bidang kebudayaan adalah "*Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan*".

Tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi pertama Kepala Daerah yaitu Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius, serta misi ketiga Kepala Daerah yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.

Tabel 3.1
Keselarasan Tujuan dan Sasasaran dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat.		Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan.	Nilai	60,50 - 61,50

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
		Nilai AKIP Perangkat Daerah.	Nilai	A (85,3)
		Nilai SPIP Perangkat Daerah.	Nilai	3,23
	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.	Persentase Warisan Budaya yang sudah ditetapkan.	%	54,69
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat daerah	Predikat	A (>80-90)
	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP perangkat daerah	Level	2,0-3,0

Sumber: RKPD Kabupaten Kulon Progo, 2026.

Dalam rangka mewujudkan pelestarian dan pengembangan kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo menetapkan Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo adalah terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang berbudaya dan religius, dengan sasaran utama yaitu meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah persentase warisan budaya yang sudah ditetapkan, dengan satuan persen (%). Pada tahun 2024, realisasi capaian indikator ini mencapai 50,80%, mencerminkan bahwa lebih dari setengah objek budaya telah ditetapkan secara formal sebagai warisan budaya. Target capaian indikator ini terus ditingkatkan, yaitu menjadi 52,82% pada tahun 2025 dan 54,69% pada tahun 2026, yang menunjukkan komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam

mempercepat proses identifikasi, dokumentasi, dan legalisasi warisan budaya. Kenaikan target dari tahun ke tahun ini juga mencerminkan arah kebijakan strategis dalam memperkuat identitas budaya lokal sebagai bagian penting dari pembangunan daerah yang berkarakter dan berkelanjutan.

Tujuan yang kedua merupakan tujuan bersama seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kulon Progo, termasuk Dinas Kebudayaan, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, serta memastikan bahwa setiap perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai prinsip good governance.

Tujuan yang ingin dicapai dalam konteks tata kelola pemerintahan adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang diterjemahkan ke dalam dua sasaran utama. Pertama, sasaran berupa meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang diukur melalui indikator nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan satuan predikat. Pada tahun 2024, realisasi nilai AKIP mencapai predikat A, yang menunjukkan skor dalam rentang 80–90. Capaian ini mencerminkan bahwa perangkat daerah telah memiliki sistem pengelolaan kinerja yang baik, serta mampu menunjukkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan secara akuntabel. Target untuk tahun 2025 dan 2026 tetap mempertahankan predikat A, sebagai wujud konsistensi dalam menjaga efektivitas dan transparansi birokrasi.

Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah, dengan indikator kinerja berupa nilai SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang diukur dalam satuan level. Realisasi tahun 2024 menunjukkan pencapaian pada level 2,0 – 3,0, dan target untuk tahun 2025 dan 2026 tetap berada pada rentang level yang sama. Rentang level ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di lingkungan perangkat daerah telah

berkembang menuju tingkat kematangan. Artinya, proses pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas telah dijalankan dengan cukup baik, meskipun masih perlu diperkuat. Capaian ini penting sebagai pondasi untuk menjamin efektivitas pengelolaan anggaran, meningkatkan integritas pelayanan publik, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh indikator sasaran kinerja untuk tahun 2024 telah mencapai hasil yang positif dan on track menuju target 2026. Baik dari sisi substansi kebudayaan (pelestarian warisan budaya) maupun tata kelola pemerintahan (AKIP dan SPIP), Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo telah menunjukkan kinerja yang stabil, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan

Visi menjadi landasan dan tujuan utama. Dalam penetapan visi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo dengan mempertimbangkan keselarasan antara Visi Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, pemerintah daerah yaitu Dinas Kebudayaan DIY, dan visi Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo. Hal tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa semua rancangan rencana kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dapat berjalan seiring, dan tidak ada tumpang tindih atau bahkan bertentangan dengan visi pemda dan pemerintah pusat.



Gambar 3.3 Keselarasan Visi

Tahun 2026 ini, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo menetapkan Visi "*Melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya lokal, serta mentransformasikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda, untuk memperkuat identitas daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan*". Makna dari visi tersebut adalah:

- Melestarikan Nilai-nilai Luhur memiliki makna mengamankan dan menjaga nilai-nilai luhur budaya seperti adat istiadat, seni tradisi, dan ahasa daerah, dan Melakukan kajian tentang sejarah dan kebudayaan Kulon Progo, serta pelestarian benda-benda bersejarah, situs cagar budaya, dan artefak budaya;
- Mengembangkan Keberagaman Budaya memiliki makna meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan seni budaya, seperti museum, perpustakaan, dan pusat kegiatan seni, dan mempromosikan dan menghargai keberagaman budaya di Kulon Progo, termasuk budaya lokal;
- Memperkuat Identitas Daerah: Mempertebal rasa cinta dan bangga terhadap budaya Kulon Progo, serta menjadikannya sebagai identitas yang kuat dengan mentransformasikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda agar mereka tetap mencintai dan menjaga warisan budaya;

- Menggunakan kebudayaan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui pengembangan kerajinan tangan, pertunjukan seni, dan kegiatan budaya lainnya, dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 mempertimbangkan isu strategis serta berbagai usulan yang masuk dalam berbagai forum koordinasi, diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualias Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia merupakan modal utama penentu keberhasilan pembangunan. Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang besar seiring dengan pembangunan Yogyakarta International Airpot. Agar potensi ini dapat dioptimalkan,

   Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo telah menyiapkan langkah strategis dari sisi perencanaan yang tentunya diselaraskan dan dikolaborasikan pada Bidang Kebudayaan, yaitu diantaranya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), seringkali disebutkan bahwa pelestarian warisan budaya semestinya dapat ikut berperan untuk mendukung pencapaian beberapa SDGs, di antaranya SDG keempat tentang Pendidikan Berkualitas dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional dalam pendidikan, dan SDG 11 tentang Kota Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan daapat dicapai dengan melestarikan kawasan bersejarah dan budaya. Selain itu, pelibatan komunitas lokal dalam upaya pelestarian dan pengembangan warisan budaya juga dapat mendukung SDG 16 tentang Kedamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penguatan identitas budaya mereka. Melalui keterkaitannya dengan SDGs, warisan budaya menjadi salah satu pilar utama dalam

mencapai tujuan pembangunan global secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2. Peningkatan Pelestarian Budaya.

   Peningkatan pelestarian budaya bertujuan untuk menjaga identitas, memperkaya warisan, dan meningkatkan ketahanan budaya bangsa di tengah peradaban dunia, serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyaraka. Peningkatan pelestarian budaya di Kabupaten Kulon Progo, bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendukung kegiatan seni budaya lokal, mempromosikan bahasa dan pakaian adat, serta melibatkan generasi muda dalam kegiatan pelestarian.

3.3.2 Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja, maka langkah selanjutnya yaitu menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan. Adapun uraian program dan kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 3 program dan 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, untuk Tahun Anggaran 2026 di dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa

penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 sudah harus mempedomani peraturan tersebut.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan sejumlah indikator kinerja program yang mencerminkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya istimewa daerah. Program ini merupakan bagian penting dalam mendukung amanat kekhususan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fokus pada kegiatan pelestarian sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman, penetapan warisan budaya, pengembangan Kalurahan Budaya, serta penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan dalam kondisi baik.

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2024	Target	
					2025	2026
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa, sastra, dan permuseuman.	Kegiatan	7	7	8
		Warisan Budaya yang sudah ditetapkan.	Warisan Budaya	216	225	233
		Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya dan Rintisan Kelurahan / Kalurahan Budaya Kategori Berkembang	Kelurahan/Kalurahan	57	62	64
		Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	%	79,84	81,2	82,56
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penonton pertunjukan seni di Taman Budaya	Orang	69230	70300	71.300

Sumber: Hasil analisis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo, 2025.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan seluruh program dan kegiatan kebudayaan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran 2026.

Perencanaan program dan kegiatan dalam dokumen ini telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta mendukung pencapaian prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten. Fokus utama terletak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing, pelestarian dan pemanfaatan budaya lokal, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis kebudayaan. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) menetapkan 3 program utama dengan 14 kegiatan dan 37 subkegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Setiap subkegiatan telah dirancang secara sistematis dengan pendekatan SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound*) yang menjelaskan capaian output dan outcome, estimasi waktu pelaksanaan, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur secara objektif.

Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari Dana Keistimewaan serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dialokasikan secara proporsional sesuai dengan skala prioritas, urgensi program, serta kapasitas fiskal daerah. Setiap kegiatan difokuskan untuk memberikan dampak nyata, baik dari sisi sosial, budaya, maupun ekonomi, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebudayaan secara berkelanjutan.

Tabel 3.3

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)						**42.281.405.000,00**							**83.420.671.259,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**42.281.405.000,00**							**83.420.671.259,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**42.281.405.000,00**							**83.420.671.259,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi.***	**-**			**100 %**	**3.326.179.468,00**						**-**	**5.667.221.259,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan Tepat Waktu*	-			2 Laporan	39.167.059,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah	-	59.167.059,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	17.380.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		27.380.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	61.366.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.991.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.*	-			0 Laporan	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Masyarakat Dalam Daerah	-	380.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	21.787.059,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		31.787.059,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.*	-			3 Laporan	2.561.699.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah	-	3.625.342.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	2.495.342.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		3.495.342.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Masyarakat Dalam Daerah		380.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			0 Laporan	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Masyarakat Dalam Daerah	-	50.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Masyarakat Dalam Daerah		15.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				3 Laporan	2.654.327.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		3.654.327.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi														
			Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				5 Laporan	2.731.473.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		3.731.473.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	J U M L A H							**42.281.405.000,00**							**83.420.671.259,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				75 Orang	294.738.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		1.294.738.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				5 Laporan	1.665.261.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		4.560.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				10 Laporan	6.465.293.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		7.465.293.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah														
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				5 Orang	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		1.350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta														
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				3 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				2 Lembaga	1.064.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		2.064.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				3 Laporan	1.254.433.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		2.254.433.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya.*	-			11 Laporan	18.519.775.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni	-	30.714.514.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya														
			Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				2 Laporan	1.340.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		2.340.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya*	-			1 Laporan	1.000.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo	-	2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.04.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				20 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo		2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Taman Budaya.*	-			1 Laporan	3.500.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo	-	6.530.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota														
			Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	3.500.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Pengasih	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo		6.530.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				20 Objek	549.070.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo		973.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia														
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi				2 Objek	257.615.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo		1.257.615.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelestarian Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya.*	-			3 Laporan	12.833.685.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo	-	24.258.215.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				1 Objek	12.027.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo		22.027.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra				4 Laporan	1.600.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo		2.600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman														
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				1 Unit	591.671.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo		1.591.671.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Warisan Budaya yang Sudah Ditetapkan. Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya dan Rintisan Keluarahan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang. Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik Jumlah Aktifitas Pelestarian Sumber Sejarah, Karya Bahasa, Sastra, dan Permuseuman.***	**-**			**233 Warisan Budaya 64 Kelurahan/Kalurahan 82,56 % 8 Kegiatan**	**38.695.131.000,00**						**-**	**75.898.450.000,00**	
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman.*	-			3 Laporan	2.841.671.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo	-	12.395.721.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				3 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo		8.204.050.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		425.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah Penonton Pertunjukan seni di Taman Budaya***	**-**			**71.300 Orang**	**260.094.532,00**						**-**	**1.855.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.*	-			1 Laporan	260.094.532,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni	-	1.855.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				3 Objek	260.094.532,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Pengasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		1.855.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	86.989.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	258.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	23.112.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		33.112.200,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	78.849.013,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	197.036.296,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			4 Laporan	368.101.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah	-	918.112.200,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	45.673.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		90.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.*	-			1 Laporan	19.041.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah	-	38.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	19.041.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		38.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			2 Laporan	275.885.309,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah	-	450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Masyarakat Dalam Daerah		35.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah.*	-			2 Laporan	62.284.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah	-	146.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.611.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		56.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

Berdasarkan hasil penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan pembangunan kebudayaan difokuskan untuk mendukung pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Dokumen ini merinci 3 program, 14 kegiatan, dan 37 subkegiatan yang disusun secara sistematis dan selaras dengan RKPD Tahun 2026. Setiap subkegiatan telah dilengkapi dengan indikator output dan outcome, target capaian kinerja, serta estimasi waktu pelaksanaan bulanan yang menggambarkan keterikatan waktu dan sasaran kinerja secara terukur. Sumber pendanaan berasal dari Dana Keistimewaan DIY serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dialokasikan berdasarkan skala prioritas, efektivitas program, serta kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan daerah. Total alokasi anggaran disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan diarahkan untuk memberikan dampak nyata dari sisi sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan melalui kegiatan perencanaan, evaluasi, administrasi keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Pada tahun 2026, program ini memiliki alokasi pagu sebesar Rp3.326.179.468,00 dengan target kinerja berupa penyusunan dua dokumen perencanaan, evaluasi terhadap 12 laporan kinerja perangkat daerah, serta penyusunan laporan administrasi keuangan dan kepegawaian secara rutin. Sub kegiatan seperti Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Penyediaan Gaji ASN.

Program Pengembangan Kebudayaan bertujuan untuk mendorong pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku seni. Kegiatan utamanya mencakup pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek budaya dengan target pada tahun 2026 sebanyak 3 objek serta satu laporan pelaksanaan kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp260.094.532,00. Sub kegiatan ini dilaksanakan di seluruh kecamatan, termasuk Pengasih, dengan sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan mencakup berbagai aspek strategis pelestarian budaya istimewa, seperti sejarah, bahasa, sastra, permuseuman, pelestarian cagar budaya, pengelolaan taman budaya, penguatan kelembagaan adat, hingga diplomasi budaya. Pada tahun 2026, program ini memiliki total pagu indikatif sebesar Rp38.695.131.000,00 dan menargetkan antara lain 233 warisan budaya, 64 kalurahan budaya, 8 kegiatan pelestarian sumber sejarah, dan 82,56% kondisi sarana prasarana yang baik. Kegiatan prioritas mencakup Pembinaan Kesejarahan, Bahasa dan Sastra, Permuseuman, Tata Kelola Cagar Budaya, serta Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia. Di bidang kelembagaan, Dinas menargetkan 75 orang penghayat kepercayaan dibina, 10 laporan kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta, serta publikasi dua dokumen seni dan budaya daerah, dengan dukungan dana keistimewaan dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi DIY.

Dengan demikian, dokumen Rencana Kerja dan Pendanaan ini menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pelaksanaan program kebudayaan tahun 2026 secara terintegrasi, terukur, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan Kulon Progo yang berkarakter dan berjati diri budaya.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Sebagai bagian dari penyusunan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) memiliki peran penting dalam menjamin keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan berkewajiban menyelaraskan rencana kerjanya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026 menjadi acuan dalam menjamin efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:

1. Pelaksanaan Program Secara Bertanggung Jawab: Setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2026 harus dilaksanakan secara optimal, bertanggung jawab, dan tepat sasaran, dengan tetap melibatkan masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat : Masyarakat luas didorong untuk turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan kebudayaan, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik.
3. Pemantauan dan Tindakan Korektif Berkala: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan mengambil tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan, serta menyampaikan laporan hasil pemantauan tersebut kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Evaluasi Akhir Tahun Anggaran: Pada akhir Tahun Anggaran 2026, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan, mencakup pencapaian target, kesesuaian dengan anggaran APBD, ketercapaian target RPD, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai catatan dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, pagu indikatif yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) mengacu pada Surat Paniradya Kaistimewaan Nomor B/100.1.5.1/1652/PANI Tanggal 06 Maret 2025 Perihal Pemberitahuan Entry Dana Keistimewaan TA 2026. Hal ini menunjukkan bahwa pagu tersebut masih bersifat sementara dan dapat mengalami penyesuaian seiring dengan proses finalisasi dan kesepakatan resmi bersama pihak terkait dalam penetapan Dana Keistimewaan Tahun 2026.

Pelaksanaan rencana pembangunan kebudayaan menuntut kerja keras, komitmen, partisipasi aktif, dan disiplin tinggi dari seluruh pelaksana serta pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengendalian dan evaluasi program dilaksanakan secara berkala dan menyeluruh, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo.

Kulon Progo, 29 Juli 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
(*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEBUDAYAAN

Drs. Eka Pranyata
Pembina Utama Muda; IV/c
196507231986021004

DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KABUPATEN KULON PROGO
JL. SUGIMAN NO.19, SERUT, WATES, KEC. PENGASIH, KABUPATEN KULON PROGO,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 55651

PEMERINTAH
KABUPATEN
KULON PROGO

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2026

Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo

(0274) 774553

https://perpustakaan.kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dengan baik.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini merupakan penjabaran pelaksanaan program/kegiatan serta tujuan dan sasaran strategis dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2029.

Rencana Kerja ini juga dibuat untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta memuat evaluasi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024.

Akhirnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan Rencana Kerja Tahun 2026 ini. Semoga Rencana Kerja Tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR ISI

kata Pengantar i
Daftar Isi.....ii
Daftar Tabel.....iii
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud Dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3
Bab Ii Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2024.. 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.....4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19
2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 23
Bab Iii Tujuan Dan Sasaran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 38
3.1 Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Dan Arsip Nasional Republik Indonesia 38
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Skpd 39
3.3 Program Dan Kegiatan.....40
Bab Iv Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 41
Bab V Penutup..... 61

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo 5
Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Indikator Kinerja Yang Sudah Ditetapkan Terhadap Ikk Dari Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabpaten Kulon Progo Tahun 2024 20
Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2026..... 27
Tabel 3. 1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2026... 39
Tabel 4. 1 Target Indikator Program Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 41
Tabel 4. 2 Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Kulon Progo Tahun 2026..... 44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang salah satu tujuan dan sasaran daerahnya memerlukan perhatian khusus yaitu belum optimalnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, walaupun indeks pembangunan manusia mampu mencapai target yang ditetapkan namun masih dibawah rata-rata DIY, sehingga prioritas Pembangunan SDM juga harus ditingkatkan. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan tahapan transisi tahun terakhir Renstra 2023-2026 dan tahapan pertama Renstra 2025-2029. Dokumen ini merupakan bagian dari sub sistem dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Propinsi DIY Tahun 2025-2045, berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045, RPJMD 2025-2029, serta Rancangan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun dengan proses sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu berdasarkan renstra perangkat daerah
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
5. Telaah terhadap rancangan awal RKPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran
7. Perumusan kegiatan prioritas

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
8. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Kepmendagri Nomor 900.1.15.53406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas;

16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara teratur dan terarah serta menyediakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai pedoman, menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional, memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanan dan penganggaran tahunan Dinas Perpustakaan dan kearsipan, mengukur kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi dan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II.HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kabijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Realisasi program/kegiatan dengan target kinerja yang direncanakan atas pelaksaanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024:

- Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan tahun 2024 diukur melalui indikator persentanse pelayanan perpustakaan. Terdapat perubahan target kinerja bidang perpustakaan dari 49,34% menjadi 57,32%, sedangkan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 61,66%. Layanan perpustakaan secara umum diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan cara membudayakan gemar membaca kepada masyarakat melalui beberapa langkah mencakup pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana perpustakaan, menambah koleksi dan judul bahan pustaka, perawatan terhadap koleksi bahan pustaka yang rusak, pengelolaan otomasi bahan pustaka, melakukan pembinaan perpustakaan kalurahan, lomba bercerita bagi anak SD/MI tingkat Kabupaten Kulon Progo, melaksanakan bedah buku tematik, penerbitan buletin dan pameran perpustakaan, melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan, menyelenggarakan perpustakaan keliling serta pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.
- Capaian Kinerja Bidang Kearsipan 2024 diukur melalui indikator cakupan pengelolaan kearsipan. Indikator kinerja bidang kearsipan juga mengalami perubahan target kinerja dari 67,70% menjadi 70,46% dengan realisasi sampai dengan triwulan sebesar 71,86%. Cakupan pengelolaan kearsipan dilaksanakan melalui sub kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, Pengawasan Arsip Dinamis dan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 disajikan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kulon Progo

Tabel T-C.29.
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					Urusan Perpustakaan									
2	23				Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan									
2	23	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	100	100	100	100	100	100
2	23	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	23	1	02.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	2	100	4	8	80
2	23	1	02.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	21	21	21	100	21	63	75
2	23	1	02.02		Keuangan Perangkat Daerah									
2	23	1	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148	37	37	37	100	37	111	75
2	23	1	02.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	4	1	1	1	100	1	3	75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pelaksanaan Tugas ASN								
2	23	1	02.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	14	14	14	100	14	42	75
2	23	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	23	1	02.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	1	1	1	100	1	3	75
2	23	1	02.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	2	2	2	100	2	6	85
2	23	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	23	1	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	5	5	5	100	5	15	75
2	23	1	02.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	12	12	12	100	12	36	75
2	23	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	23	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	39	47	3	3	100	2	52	133
2	23	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	23	1	02.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
2	23	1	02.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	23	1	02.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	75
2	23	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	23	1	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44	12	11	11	100	12	35	79
2	23	1	02.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	1	2	2	100	1	4	57
2	23	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	101	212	38	38	100	35	285	282
2	23	2			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan Layanan Perpustakaan	49,65	57,13	57,32	61,66	107,57	49,49	61,66	124,19
2	23	2	02.01		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	23	2	02.01	02	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat daerah	4	1	1	1	100	1	3	75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya								
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan									
						Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	16	4	4	4	100	4	12	75
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1.200	1.036	850	850	100	300	2.186	182
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka									
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4.800	1.500	1.250	1.250	100	1.200	3.950	81
2	23	02	2.02		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
2	23	02	2.02	04	Sub Kegiatan Pengembangan									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Literasi Berbasis Inklusi Sosial									
						Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	4	1	1	1	100	1	3	75
2	24	02			Program Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan pengelolaan Kearsipan	81,94	69,17	70,46	71,86	101,99	74,20	74,20	90,55
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota									
2	24	02	2.01	02	Pemelihraan dan Penyusutan Arsip Dinamis									
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan	74.000	33.751	14.000	14.000	100	18.800	66.551	90

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Penyusutan Arsip Dinamis								
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20	5	5	5	100	5	15	75
2	4	2	02.02		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota									
2	4	2	02.02	2	Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis									
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Akuisisi,	56.400	5.654	14.000	14.000	100	14.000	30.654	74,5

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2. 2 Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan terhadap IKK dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabpaten Kulon Progo Tahun 2024

Tabel T-C.30.

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Indikator Kinerja Kunci											
	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	Ada	-	-	-	-	74,5	-	-	-	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	Ada	-	-	-	-	96,23	-	-	-	
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	-	Ada	-	-	-	-	59,48	-	-	-	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	Ada	-	-	-	-	81,49	-	-	-	
II	Indikator Kinerja Utama											
	Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	-	-	34,49	34,48	34,47	-	34,47	-	34,48	34,47	
	Penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan	-	-	59,31	69,05	80,37	-	69,38	-	80,37	80,37	
	Rata-rata prosentase pencapaian program pada	-	-	100	100	100	-	86,90	-	100	100	

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	masing-masing Perangkat Daerah											

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TA 2024 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan yakni :

1. Indikator Kinerja Kunci :
   - Nilai Tingkat kegemaran Membaca Masyarakat

     Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat yaitu tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media dalam jangka waktu tertentu. Metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah : Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat pada tahun 2024 adalah 74,5 dengan kategori sedang.
   - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yaitu data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaannya, dalam rangka membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dan meningkatkan literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo adalah 96,23.
   - Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional. Indikator yang digunakan dalam menghitung tingkat ketersediaan arasip yaitu jumlah arsip aktif dan arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik dan persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN. Nilai Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional tahun 2024 yaitu 59,48.
   - Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Indikator dalam menghitung Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip yaitu tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip, tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, dan tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK. Adapun nilai tahun 2024 adalah 81,49.
2. Indikator Kinerja Utama
   - Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan

Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung ke perpustakaan dibandingkan dengan jumlah populasi yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2024 capaian pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebesar 49,23%.

- Penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan

  Indikator Penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan berbeda dengan indikator tahun lalu yaitumenghitung jumlah Perangkat Daerah dengan desa yang telah menerapkan kaidah kearsipan. Sedangkan untuk tahun 2023-2026 Penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan dengan indikator volume arsip yang sudah dibuatkan daftar arsip dibanding volume arsip, jumlah Perangkat Daerah yang memindahkan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan dibanding jumlah Perangkat Daerah, jumlah Perangkat Daerah yang menyerahkan arsip ke LKD dibandingkan dengan jumlah Perangkat Daerah. Capaian penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan tahun 2024 sebesar 78,88%.

- Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing Perangkat Daerah

  Indikator Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing Perangkat Daerah dihitung jumlah indikator program Perangkat Daerah yang mencapai target dibandingkan dengan jumlah indikator program Perangkat Daerah. Capaian indikator tahun 2024 sebesar 100%.

2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo menghadapi kendala dan permasalahan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur
2. Gedung dan sarana prasarana belum memadai untuk layanan perpustakaan dengan belum adanya beberapa fasilitas ruangan yang memenuhi standar pelayanan (gudang, arena bermain anak, ruang laktasi, ruang pelestarian bahan pustaka, ruang pengolahan, kantin).
3. Belum semua pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk perpustakaan kalurahan;
4. Sebagian besar penyelenggaraan Perpustakaan Kalurahan belum optimal;
5. Masih ada masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan perpustakaan karena terbatasnya akses internet;
6. Penambahan koleksi bahan pustaka yang belum sesuai ketentuan Standar Nasional Perpustakaan;
7. Masih banyak boks arsip inaktif maupun arsip statis yang belum disimpan sesuai kaidah karena keterbatasan sarana prasarana;

8. Pengelolaan arsip di perangkat daerah kurang optimal karena pengelola arsip lebih banyak menjalankan tugas selain pengelolaan arsip;
9. Petugas arsip yang ada sering berganti personil;
10. Koleksi arsip statis (arsip yang bernilai historis) yang dimiliki LKD sangat minim;
11. Pegawai bidang kearsipan belum mengikuti diklat teknis karena terkendala biaya;
12. Perangkat Daerah tidak mempunyai sarpras untuk penataan arsip dinamis.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahuan 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kendala yang dihadapi dapat menghambat secara tidak langsung terhadap pencapaian tujuan daerah yaitu meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat karena meningkatkan ilmu pengetahuan dengan layanan pemustaka tidak optimal, serta tidak optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel karena penataan arsip yang kurang optimal.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dimasa yang akan datang, tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan sarana prasarana selama ini sudah diatasi dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada. Meskipun belum optimal namun harus dilaksanakan mengingat hampir semua perangkat daerah juga menghadapi kendala keterbatasan sarana prasarana.
2. Keterbatasan pelayanan keliling karena armada dan *driver* berkurang juga keterbatasan penambahan koleksi sangat terasa karena untuk pelayanan keliling tingkat peminjaman tinggi. Karena frekuensi tinggi dan peminjamnya anak-anak sehingga tingkat kerusakan tinggi.
3. Keterbatasan SDM yang menguasai teknologi informasi dicukupi dengan diklat/bimtek dan kerja sama dengan dinas teknis.

4. Keterbatasan pustakawan dalam teknis pelayanan dicukupi dengan mengoptimalkan jabatan struktural/pelaksana maupun tenaga tidak tetap dalam pelayanan perpustakaan dengan pengawasan dari pustakawan.
5. Keterbatasan jumlah arsiparis khususnya di perangkat daerah menjadikan pengelolaan kearsipan di perangkat daerah belum bisa optimal. Untuk itu pendampingan arsip di perangkat daerah dengan melibatkan THL Kearsipan menjadi pilihan. Meskipun cara ini belum efektif untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan arsip di perangkat daerah paling tidak bisa mengurangi tumpukan arsip di perangkat daerah yang belum diolah. Arsip yang belum diolah menyebabkan tidak mungkin adanya penyerahan arsip statis ke lembaga kerasipan daerah. Padahal aspek ini juga merupakan salah satu aspek penilaian ekstrernal kearsipan. Jika sudah semakin tertata maka pengawasan internal kearsipan sangat terbuka untuk dilakukan.
6. Kesadaran pengelolaan arsip dan prioritas pengelolaan arsip yang dianggap kegiatan tidak prioritas ditempuh dengan menjadikan pengelolaan arsip menjadi salah satu aspek penilaian kinerja perangkat daerah dalam perolehan TPP. Dengan ini perangkat daerah seperti dipaksa untuk melakukan pengelolaan arsipnya.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan antara lain:

a. Peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, dan seminar.
b. Penambahan sarana dan prasarana kantor dalam rangka pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas dinas.
c. Peningkatan pemenuhan sarana prasarana bagi pemustaka seperti ruang audio visual, ruang baca anak yang lebih luas untuk ajang ekspresi, ruang laktasi, kantin dan sarana prasarana perpustakaan antara lain gudang, ruang pelestarian bahan pustaka serta ruang pengolahan.
d. Penyediaan ebook agar pemustaka memiliki bacaan yang bermutu melalui pemanfaatan *gadget*.
e. Implementasi SRIKANDI secara konsisten pada semua Perangkat Daerah.
f. Prioritas keberadaan THL kearsipan untuk menata arsip dengan volume arsip kacau dan belum tertata.
g. Tetap menjadikan penataan arsip menjadi salah satu indikator nilai kinerja perangkat daerah, sehingga perangkat daerah yang melakukan penataan arsipnya dengan adanya daftar arsip tersebut, maka nilai kinerja kearsipan juga baik.
h. Pemantauan dan pendampingan secara intensif terhadap pengelolaan arsip desa, baik melalui pembuatan daftar arsip di *google spreadsheet* maupun memantau penataan langsung.

2.4 Review Terhadap Ranwal RKPD

RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja PD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap RKPD dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

PD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan					**4.432.625**	**Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan**				**4.432.625**	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					**4.432.625**	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				**4.432.625**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					**139.296**	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**				**139.296**	
I	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan			***Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka bersejarah yang dilindungi dan dikonservasi***		**139.296**	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		***Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka bersejarah yang dilindungi dan dikonservasi***		**139.296**	
	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman			*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*		139.296	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*		139.296	
		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Kab KP	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	1 Dokumen	139.296		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	1 Dokumen	139.296	
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. KP	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	3.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	3.500	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. KP	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	3.686,8		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	3.686,8	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. KP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	2.970.978, 342	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	2.970.978, 342	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. KP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	26.897,4		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	26.897,4	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. KP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	3.984,6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	3.984,6	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. KP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	0	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. KP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	10.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	10.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. KP	Jumlah Paket Peralatan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	21.708	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	21.708	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. KP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	25.936		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	25.936	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. KP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	87.150	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	87.150	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	107.429,76	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	107.429,76	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. KP	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	259.108,944		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	259.108,944	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. KP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	114.049,15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	114.049,15	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	177.459,7		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	177.459,7	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. KP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 unit	43.529,9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 unit	43.529,9	
III	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan	Kab. KP	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar	4 perpustakaan	12.370,8	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan	4 perpustakaan	12.370,8	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan		dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			
		Pengembangan Perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota	Kab. KP	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangka di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	90.938,8		Pengembangan Perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangka di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenanganny a	1 Perpustakaan	90.938,8	
		Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. KP	Jumlah Perpustakaan Umum dan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	5.889,2		Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Umum dan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota Sesuai Kewenanganny a	1 Perpustakaan	5.889,2	
		Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oeh Masyarakat	Kab. KP	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	36.000 Eksemplar	3.102,5		Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oeh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	36.000 Eksemplar	3.102,5	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Kab. KP	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	0 Dokumen	0		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	0 Dokumen	0	
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Kab. KP	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1.500 eksemplar	72.826		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1.500 eksemplar	72.826	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab KP	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	25.489,2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	25.489,2	
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab KP	Jumlah Sarana Perpustakaan yang Dibangun dan Dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kora	0 Perpustakaan	0		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Perpustakaan yang Dibangun dan Dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kora	0 Perpustakaan	0	
		Pemberian Penghargaan Gerakan	Kab KP	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan	0 Lokus	0		Pemberian Penghargaan Gerakan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan	0 Lokus	0	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Budaya Gemar Membaca		Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				Budaya Gemar Membaca	Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			
IV	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno						Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno					
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. KP	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	50 orang	1.198,4	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	50 orang	1.198,4	
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kab KP	Jumlah naskah kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar	1.013		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar	1.013	
V	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. KP	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan	18.700 berkas	158.410,9	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan	18.700 berkas	158.410,9	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan dan Penyusutan					Pemeliharaan dan Penyusutan			
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. KP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 laporan	36.698,3		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 laporan	36.698,3	
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. KP	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	15.000 arsip	50.503,5	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	15.000 arsip	50.503,5	
3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kab. KP	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 pengguna	10.351,9	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 pengguna	10.351,9	
				Jumlah		4.432.625,096			Jumlah		4.432.625,096	

Ranwal RKPD memuat arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan yang tercantum pada Ranwal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat berasal dari usulan kapanewon dan usulan reses (pokir dewan). Dari usulan yang disampikan beberapa kegiatan dapat diakomodir namun beberapa kegiatan lain belum bisa diakomodir karena beberapa alasan, misal kurang jelasnya sasaran yang diusulkan atau bukan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Perlunya evaluasi dari musrenbang kapanewon agar usulan disampaikan secara lengkap, baik lokasi, sasaran, maupun jenis bantuan yang diminta agar semakin banyak usulan masyarakat yang dapat terakomodir.

Adapun usulan di tahun 2026 yang terangkum dalam rencana kerja 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2026
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				
	Sosialisasi Minat Baca	Kapanewon Girimulyo, Kab. Kulon Progo	Sosialisasi Minat Baca dan Literasi	50	Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
2.	Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				
	Sosialisasi Minat Baca	Kapanewon Kalibawang, Kab. Kulon Progo	Sosialisasi Minat Baca dan Literasi	50	Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
3.	Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Sosialisasi Minat Baca	Kapanewon Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Sosialisasi Minat Baca dan Literasi dan Kerasipan	100	Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
4.	Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				
	Bimtek Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Degolan, Bumirejo, Lendah, Kab. Kulon Progo	Bantuan Buku Taman Baca Masyarakat Mutiara Ilmu Degolan,Bumirejo, Lendah (CP: 085729318293)	1	Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
5.	Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Bedah Buku	Kalurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kab. Kulon Progo	Bedah Buku (Perpusda), Kalurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah	1	Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
6.	Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Bedah Buku	Kalurahan Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Bedah Buku (Perpusda) Kalurahan Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan (Prioritas 10)	1	Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
7.	Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				
	Sosialisasi Minat Baca	Ngrojo, Kembang, Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Sosialisasi Minat Baca Ngrojo, Kembang, Nanggulan (Prioritas 11)	1	Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
8.	Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan di				

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Bedah Buku	Selo, Hargorejo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Bedah Buku di Selo Hargorejo	1	Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
9.	Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Bedah Buku	Wijimulyo, Nanggulan , Kab. Kulon Progo	Bedah buku Wijimulyo, Nanggulan (Prioritas 20)	1	Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)
10.	Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				
	Sosialisasi Minat Baca	Wonobroto, Tuksono, Sentolo , Kab. Kulon Progo	Sosialisasi minat baca Wonobroto, Tuksono, Sentolo (Prioritas 23)	1	Dapat diakomodir (mohon ditambahkan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui usulan pokir dewan karena kegiatan rutin tidak bisa mengakamodir)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

3.1 Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Perpustakaan Nasional RI diantaranya adalah peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan melalui pengembangan koleksi perpustakaan nasional, kemitraan dengan penerbit, pengarang, lembaga/instansi pemerintah dan swasta juga sejalan dengan yang dilakukan Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan Mewujudkan tersedianya koleksi bahan pustaka dalam jumlah yang memadai dan berkualitas, serta pelaksana akuisisi hasil terbitan di Kabupaten Kulon Progo & Kulonprogosiana. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo juga mengacu kebijakan ditingkat nasional.

Demikian pula Peningkatan Promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan yang dilaksanakan Perpustakaan Nasional juga akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo melalui kebijakan pengembangan minat baca secara terintegrasi di tingkat kabupaten.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia akan melakukan pengembangan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan yang meliputi pustakawan, tenaga teknis dan tenaga ahli, berkaitan dengan hal tersebut juga melakukan hal sama dan sinergis ditingkat kabupaten oleh Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo.

Dalam melaksanakan revitalisasi perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melakukan pengembangan layanan jasa perpustakaan dan informasi termasuk diversifikasi layanan berbasis teknologi melalui pemanfaatan teknologi informasi, untuk Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan perpustakaan yakni dengan Program unggulan yang akan dilaksanakan perpustakaan elektronik (e-Library) yaitu mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada pemustaka dengan layanan otomasi perpustakaan yaitu komputerisasi dalam layanan peminjaman/pengembalian bahan pustaka baik dalam layanan perpustakaan.

Arah kebijakan dan strategi Arsip Nasional RI diantaranya adalah mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan sejalan dengan yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan memberikan pembinaan ke perangkat daerah dan juga dengan melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan kearsipan ke perangkat daerah serta menyusun pedoman dalam pengelolaan arsip di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Arsip Nasional RI juga melaksanakan kegiatan yang mewujudkan usaha penyelamatan dan pelestarian arsip, hal ini juga dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo dengan upaya-upaya melakukan akuisisi arsip statis tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten dan juga pemeliharaan perawatan serta memberikan layanan bagi para pemanfaat arsip tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi ke 1 Kepala Daerah yaitu mewujudkan masyarakat Kulon Progo Makmur, berbudaya dan religius, serta misi ke 3 Kepala Daerah yaitu Meweujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance* Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan yang hendak dicapai sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026

Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Target Kinerja
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		Harapan lama sekolah	tahun	14,7-15,79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	nilai	A (85,3)
		Indeks maturitas SPIP	nilai	3,231
	Meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai TGM	nilai	75,50
	Meningkatnya pengelolaan kearsipan	Nilai ASKE	nilai	86
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A(>80-90)
	Menigkatnya	Nilai SPIP	Level	2,0-3,0

Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Target Kinerja
	kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Perangkat Daerah		

3.3 Program dan Kegiatan

Tahun 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo melaksanakan 5 program, 14 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.432.625.096,00. Kegiatan yang dilakukan dibidang perpustakaan antara lain melaksanakan pelayanan di kantor, perpustakaan keliling, pembinaan perpustakaan kalurahan, pendampingan akreditasi sekolah, wisata buku, penambahan dan pemeliharaan koleksi bahan pustaka serta melaksanakan bimtek dalam rangka perpustakaan berbasis inklusi sosial. Layanan perpustakaan keliling dilaksanakan pada TK, SD, SMP di 12 Kapanewon dengan dasar Mou. Tahun 2026 melaksanakan sosialisasi naskah kuno bagi masyarakat.

Bidang Kearsipan akan melaksanakan kegiatan pendampingan monitoring penataan arsip maupun pelaksanaan SRIKANDI di perangkat daerah dan kalurahan di Kab. Kulon Progo, penilaian audit kinerja kearsipan internal, audit kinerja kearsipan eksternal dan pengelolaan arsip statis di LKD. Tabel rencana program ditampilkan pada BAB selanjutnya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Setiap program dan kegiatan harus selaras dengan arah strategis organisasi. Program harus berkontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran (target spesifik yang terukur). Target Indikator Kinerja Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 **Target Indikator Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100
2.	Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	219.032
3.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Naskah Kuno yang Terdata	Naskah	12
4.	Pengelolaan Arsip	Nilai ASKI Perangkat Daerah	Nilai	87
5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	Dokumen	200

Pada tahun 2026 terdapat tambahan sub kegiatan hasil rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan 2025 dan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistmewaan. Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.3.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pembinaan Perpustakaan

2.1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan

2.1.2. Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

2.1.3. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota

2.1.4. Sub Kegiatan Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat

2.1.5. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

2.2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota

2.2.1. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

3. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

3.1. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno

3.1.2. Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

4. Program Pengelolaan Arsip

4.1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

4.1.2. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

4.2. Kegiatan Pengelolaan Simpul Statis Daerah Kabupaten/Kota

4.2.1. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dam Akses Arsip Statis

4.3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

4.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN

5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

5.1. Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman

5.1.1 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan

Tabel 4. 2 RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. KULON PROGO TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**4.432.625.096,00**							**4.332.986.700,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.432.625.096,00**							**4.332.986.700,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**139.296.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka bersejarah yang dilindungi dan dikonservasi***	**-**			**200 Dokumen**	**139.296.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			1 Dokumen	139.296.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				1 Dokumen	139.296.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**4.037.364.496,00**							**3.990.676.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi***	**-**			**100 %**	**3.824.536.596,00**						**-**	**3.748.324.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			2 Dokumen	7.186.800,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	13.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		6.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	3.686.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			3 Dokumen	2.970.978.342,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	2.976.620.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	2.940.096.342,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		2.931.620.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	26.897.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		39.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.984.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			2 Dokumen	10.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												sumber daya manusia				
	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0,00	-	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			2 Dokumen	47.644.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.708.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25.936.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			1 Dokumen	87.150.000,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	87.150.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			2 Dokumen	366.538.704,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	394.204.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	107.429.760,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		118.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	259.108.944,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		276.204.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			3 Dokumen	335.038.750,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	258.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	114.049.150,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		170.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	177.459.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				42 Unit	43.529.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		48.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Jumlah Pengunjung Perpustakaan***	**-**			**219.032 Pengunju ng**	**210.616.500,00**						**-**	**242.352.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			5 Dokumen	185.127.300,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo	-	215.332.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				4 Perpustak a an	12.370.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		13.830.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustaka an	90.938.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		118.960.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan				1 Perpustaka an	5.889.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				36000 Eksemplar	3.102.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1500 Eksemplar	72.826.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		82.542.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			1 Dokumen	25.489.200,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo	-	27.020.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				1 Perpustaka an	25.489.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		27.020.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0 Perpustaka an	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				0 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				0 Lokus	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	***Naskah kuno yang terdata***	**-**			**12 Naskah**	**2.211.400,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			2 Dokumen	2.211.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Pemilik Naskah Kuno	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				50 Orang	1.198.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Pemilik Naskah Kuno		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				1 Eksemplar	1.013.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Pemilik Naskah Kuno		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**255.964.600,00**							**342.310.700,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Nilai ASKI Perangkat Daerah***	**-**			**87 Nilai**	**255.964.600,00**						**-**	**342.310.700,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			2 Dokumen	195.109.200,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Perangkat Daerah di Kab. Kulon Progo, K alurahan/Kelurahan, BUMD	-	238.410.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			0				18700 0	158.410.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi,	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Perangkat Daerah di Kab. Kulon Progo, K alurahan/Kelurahan, BUMD		158.410.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan pe nyeludupan					
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Laporan	36.698.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Perangkat Daerah di Kab. Kulon Progo, K alurahan/Kelurahan, BUMD		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			1 Dokumen	50.503.500,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Perangkat Daerah di Kab. Kulon Progo, K alurahan/Kelurahan, BUMD	-	103.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				15000 Arsip	50.503.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Perangkat Daerah di Kab. Kulon Progo, K alurahan/Kelurahan, BUMD		103.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			1 Dokumen	10.351.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				100 Pengguna	10.351.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BAB V
PENUTUP

Rencana program dan kegiatan tahun 2026 berbeda dari tahun sebelumnya karena ada tambahan sub kegiatan baru hasil rakortek yang harus dimunculkan dalam struktur APBD yaitu Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota, Subkegiatan Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat, Subkegiatan Peran Serta Masyarakat dalam penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pedaftaran naskah Kuno, dan Subkegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan, Subkegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN . Selain itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk pertama kalinya mendapat anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan pada Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan sehingga diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsi dinas secara lebih baik.

Sangat disadari apabila ada program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan dikarenakan kemampuan anggaran yang tidak mencukupi maka akan ditindak lanjuti pada tahun-tahun selanjutnya.

Dengan disusunnya dokumen perencanaan teknis operasional kerja ini, semoga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan pada tahun 2026 yang nantinya akan membantu kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 29 Juli 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Drs. Duana Heru Supriyanta, MM.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19740122 199311 1 002

DINAS
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2026

0274-773-126
www.dkp.kulonprogo.go.id
dkp@kulonprogokab.go.id
Jl. Purbowinoto 118 Pengasih, Kulon Progo, 55652



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI II
DAFTAR TABEL III
DAFTAR GAMBAR III

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. LANDASAN HUKUM 3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 6
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 16
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 18
2.4. REVIEW TERHADAP RKPD 19
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 31
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 33
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 34

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 35
BAB VI PENUTUP 49

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 KABUPATEN KULON PROGO 7
TABEL II.2 PENCAPAIAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024 - 2027 16
TABEL II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024. 17
TABEL II.4 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN KULON PROGO 21
TABEL II.5 USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026 KABUPATEN KULON PROGO 29
TABEL III.1 TUJUAN DAN SASARAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 33
TABEL III.1 PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 34
TABEL IV.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 37

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I-1. ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH SECARA UMUM SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. 2
GAMBAR I-2 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LAINNYA 3

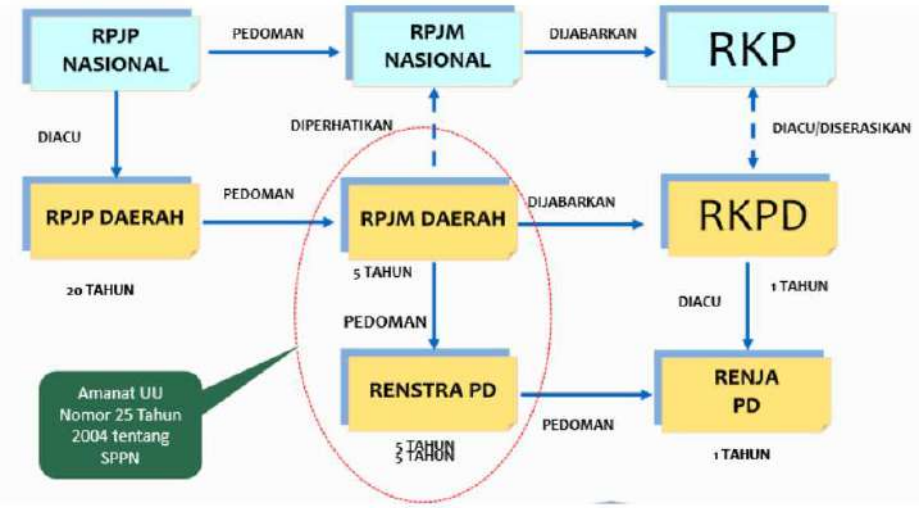
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rankhir Renja 2026 mendasar pada RKPD 2026 dan mendasar pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029, dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, hasil forum PD 2025, RKPD 2026, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting yang ada, evaluasi pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas.

Renja PD memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Daerah DIY dan Nasional. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renja secara umum sampai dengan proses ditetapkannya Renja PD dapat dilihat pada gambar berikut ini.



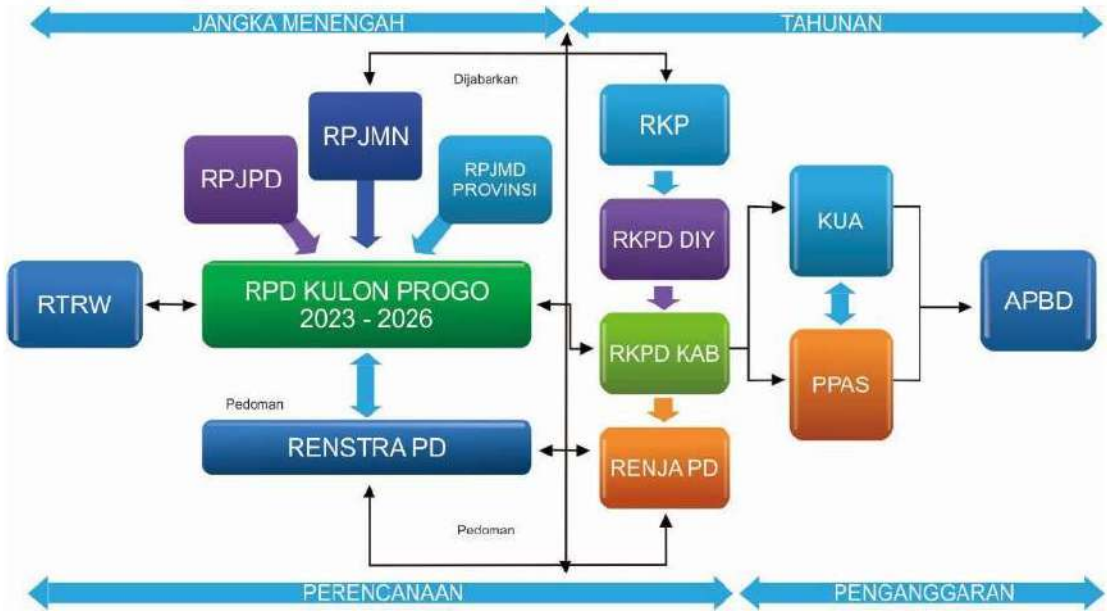
Gambar I-1. Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renja Perangkat Daerah secara umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
e. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah ketentuan pasal 82 ayat (2) dan pasal 83, bahwa Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

Gambaran tentang hubungan antara Renja PD Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar I-2 Hubungan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 100);
7. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2017 tentang tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Tempat Pelellangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
8. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
9. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas.
11. Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 adalah untuk mengintegrasikan program-program pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah.

Adapun tujuan disusunnya Renja PD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai acuan bagi dinas dalam merencanakan dan menentukan strategi guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas di Tahun 2026.

2. Sebagai bahan Penyusunan RAPBD Tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
- 2.4. Review Terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IVPENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan kelautan dan perikanan terdiri atas 6 program dan 18 kegiatan yang terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2023 - 2026, realisasi program dan kegiatan telah mencapai target yang dicanangkan seperti terlihat pada rekapitulasi hasil evaluasi hasil RKPD Kab Kulon Progo.

Salah satu poin penting pada evaluasi pelaksanan adalah dalam produksi perikanan. Kinerja produksi ini terealisasi sebagai akibat kinerja pelaku usaha perikanan yang baik pada TA 2023 dengan dukungan penyelesaian program dan kegiatan. Tercatat bahwa seluruh indikator kinerja progrmm dapat melebihi target baik di tahun 2024 dan mengalami kenaikan dari Tahun 2023.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan III tahun 2024 seperti terlihat pada Tabel II.1 berikut ini.

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan			25.471 ,45		33.936 ,56		9.410,34		9.167,94		97,42		4.900 ,97		34,762 90		136,48
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**12.553 ,65**	**100**	**3.002, 00**	**100,00**	**3.002,00**	**100,00**	**2.867,05**	**100,00**	**95,50**	**100, 00**	**3.098 ,42**	**37,10**	**784,27**	**100,00**	**95,50**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			22	4,34	2	4,34	2,00	3,68	**100,00**	**84,89**	4,00	10,30	-	0,30	100,00	84,89
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6,34	21	6,34	21,00	5,93	**100,00**	**93,52**	21,0 0	5,47	6,00	0,30	100,00	93,52
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12	2.515, 86	13	2.515,86	13,00	2.415,50	**100,00**	**96,01**	14,0 0	2.653 ,13	4,00	729,16	100,00	96,01

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12	63,30	1	63,30	1,00	60,23	**100,00**	**95,14**	1,00	55,95	-	6,40	100,00	95,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			19	3,29	22	3,29	22,00	2,75	**100,00**	**83,48**	14,00	3,30	2,00	-	100,00	83,48
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai			-	3,07	1	3,07	1,00	2,50	**100,00**	**81,29**	1	2,032	0	0	100,00	81,29
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			-	10,00	3	10,00	2,00	4,00	**66,67**	**40,00**	1	2	0	0	66,67	40,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			4	10,11	1	10,11	1,00	9,28	**100,00**	**91,84**	15,00	13,31	-	0,50	100,00	91,84
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12	60,15	1	60,15	1,00	55,33	**100,00**	**91,98**	12,00	29,21	3,00	4,83	100,00	91,98

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			1	48,70	1	48,70	1,00	42,97	**100,00**	**88,23**	12	45,72 2681	3	8,7407 18	100,00	88,23
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			2	141,80	1	141,80	1,00	141,49	**100,00**	**99,78**	12	154,5 6311 6	3	20,059 962	100,00	99,78
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara dengan baik dan dibayarkan pajak dan perizinannya			47	119,54	49,00	*119,54*	49,00	110,61	**100,00**	**92,53**	47,0 0	110,4 5			100,00	92,53
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					28,00	*15,49*	24,00	12,79	**85,71**	**82,53**	**11,0 0**	**7,99**	**5,00**	**1,45**		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			60	15,49	2.184	194,25	913,15	1.533,64	**41,81**	**789,5 3**	1,00	5,02			41,81	789,53

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Produksi perikanan tangkap**	**2.125,00**	**778,85**	**2.183,85**	**194,25**	**2.183,85**	**194,24**	**2.190,032**	**167,39**	**100,28**	**86,18**	2.100,00	161,16		16,79	**-**	**-**
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentasi Sarana prasarana TPI kondisi baik (%) diganti pencatatan produksi perikanan tangkap PUD - dokumen*					*60*	*33,23*	60,00	28,09	**100,00**	**84,52**						
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	80	159,11	41	33,23							8,00	17,73	-	-	-	-
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah kelompok nelayan yang aktif (%)*					*20,00*	*45,00*	20,00	43,08	**100,00**	**95,73**						
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	200	267,74	50	45,00							75,00	37,09	-	-	-	-
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*					*1*	*116,02*	1,00	96,22	**100,00**	**82,94**						
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4	325,00	1	116,02	16.805	286,77	8.653,61	13.067,20	**51,49**	**4.556,67**	1,00	106,34	-	16,79	51,49	4.556,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Produksi perikanan budidaya**	**16.910,00**	**3.495,42**	**16.803,44**	**286,77**	**16.805**	**286,78**	**16.968,626**	**261,58**	**100,97**	**91,21**	16.855,00	488,98		24,78	**-**	**-**
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah kawasan sentra produksi perikanan (KSPP)*					*3,00*	*133,34*	3,00	117,34	**100,00**	**88,00**						
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas			34	133,34							9,00	325,09	-	1,17	-	-
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Realisasi kesehatan lingkungan budidaya kondisi baik (%)*					*59*	*71,43*	59,00	70,49	**100,00**	**98,69**						
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			59	71,43	1	82,00	1,00	73,75	**100,00**	**89,94**	**59,00**	**92,88**	**-**	**23,62**	100,00	89,94
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan			-	82,00	94	27,38	96,88	119,80	**102,58**	**437,47**	1,00	71,01	-	-	102,58	437,47
	Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	**Persentase peningkatan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan**	**92,59**	**421,10**	**92,59**	**27,38**	**92.00**	**27,38**	**96,97**	***25,098***	**1,05**	**91,66**	92,31	42,22	96,97	-	**-**	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Persentase temuan kasus pelanggaran penangkapan ikan di perairan umum (%)*					*1*	*27,38*	1,00	25,10	**100,00**	**91,65**						
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4	421,00	1	27,38							30,00	42,22	-	-	-	-
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	**Presentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar**	**70,42**	**943,43**	**44,37**	**205,11**	**52.82**	**205,1108**	**59,09**	**198,862844**	**111,89**	**96,95**	63,38	110,18	59,09	0,49	**106,66**	**52,29**
		Produksi pengolahan ikan (kg)	**145.000**		166.420		**145.000**		**182.571**		**52,00**		150.000,00			-	**52,00**	**-**
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Prosentase Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang*																

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	100	376,63	70	75,38	70	75,38	70,00	74,19	**100,00**	**98,42**	**70,00**	**65,29**	**-**	**0,49**	100,00	98,42
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah pengolahan ikan per tahun (kg)*																
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitsi	80	571,80	24	129,73	3	129,73	3,00	124,67	**100,00**	**96,10**	20,00	44,89	2,00	-	100,00	96,10
	Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase pengembangan budaya bahari**	**100,00**	**7.279,00**	**101,90**	**5.110,59**	**100,00**	**5.694,83**	**85,05**	**5.647,62**	**85,05**	**99,17**	100,00	1.000,00	50,00	-	**85,05**	**99,17**
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Jumlah Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi*																

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
		Budaya yang dikembangkan																
	Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah obyek budaya bahari yang dikembangkan	108	7.279,00	63	5.110,59	15	5.694,83	15,00	5.647,62	**100,00**	**99,17**	6	1000	0	0	100,00	99,17

Dari tabel tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja program pengelolaan perikanan tangkap yaitu produksi perikanan tangkap dari target 2024 dapat tercapai 2.190,032 ton atau mencapai 100,28% dari target produksi 2.183,85 ton. Produksi tangkap tahun 2024 di dominasi oleh produksi perikanan tangkap di perairan umum yaitu sebesar 60,72% dari total produksi perikanan tangkap, sedangkan produksi tangkap laut sebesar 39,28% dari total produksi perikanan tangkap. Capaian indikator kinerja program pengelolaan perikanan budidayan yaitu Produksi perikanan budidaya tahun 2024 melebihi target yaitu dari target 16.805 ton tercapai 16,968,526 atau sebesar 100,97% dari target.

Tingginya produksi perikanan dipengaruhi oleh intensifikasi perikanan budidaya penumbuhan kelompok pembudidaya baru yang juga adanya fasilitasi baik dari dana APBD murni maupun Dana Keistimewaan. Demikian juga dengan produksi tangkap dapat melebihi target karena selain didukung oleh cuaca yang bersahabat juga didukung oleh fasilitasi dari dana APBD murni maupun Dana Keistimewaan.

Capaian indicator kinerja program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yaitu Persentase Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan tercapai 96,97% dari target 94,44% atau tercapai 102,68%. Demikian juga pada program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan indicator kinerjanya juga melebihi target. Pengawasan terhadap sumber daya ikan di perairan umum dilakukan kerjasama yang baik dengan masyarakat khususnya kelompok masyarkat pengawas yang ikut mengawasi perairan umum agar dapat mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran.

Indikator kinerja program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan teridiri dari 2 indikator yaitu 1) prosentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standard dan 2) produksi pegolahan ikan. Prosentase peningkatan peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar tercapai 59,09% dari target 52,82% atau tercapai 111,87% dari target. Produksi pengolahan ikan tercapai *182.570,5* kg dari target 145.000 kg atau tercapai 125,91%. Kenaikan baik pada prosentase pelaku usaha melakukan usaha sesuai standar, kenaikan jumlah pelaku usaha dan kenaikan jumlah produksi hasil olahan perikanan mengindikasikan kenaikan daya saing sektor P2HP. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan daya saing ini adalah tumbuhnya poklahsar wanita yang menambah jumlah pelaku usaha, pembinaan kepada pelaku usaha dan fasilitasi bantuan sarana prasarana usaha. Penumbuhan pelaku usaha terutama ditunjang oleh kegiatan penumbuhan poklahsar.

Secara garis besar, capaian kinerja Dinas kelautan dan perikanan kabupaten kulon progo sampai dengan tahun 2024 seluruhnya tercapai atau melebihi target. Dari sisi

keuangan, realisasi target pada tahun 2024 sebesar Rp.9.167,94 juta dari target Rp.9.410,34 juta. Atau sebesar 97,42% dari target. Sedangkan sampai dengan tahun 2025 realisasi keuangan dari tahun 2024 sudah tercapai sebesar Rp.34.762juta melebihi target sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp.25.471,45 juta. Kelebihan dari anggaran tersebut terutama disebabkan adanya dana keistimewaan yang cukup tinggi sehingga menjadi salah satu factor pendorong peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan secara umum meliputi 2 indikator, terdiri dari 1 indikator kinerja kunci dan 2 indikator kinerja dinas urusan kelautan dan perikanan seperti terlihat pada Tabel II.2 di bawah ini.

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 - 2027

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Indikator Kinerja Kunci											
	Outcome:											
	Produksi Perikanan (Ton)		v	18.988,85	19.184	19.244		19.158,66		19.244		
II	Indikator Kinerja Dinas											
	Nilai Produksi Perikanan (Rp)			472.678.263.851,90	474.150.259.525,28	486.843.198.094,14		492.348.349.500		493.536.453.500		
	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah (%)			100	100	100		100		100		

Indikator Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Kelautan dan Perikanan berupa nilai produksi perikanan dan Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah. Tabel II.2. menunjukkan bahwa nilai produksi ikan Tahun 2024 sebesar Rp. 492.348.349.500 atau tercapai 104,16% terhadap target Tahun 2024 Rp.472.678.263.851,90 dan bisa disimpulkan realisasi kinerjanya Sangat Tinggi. Faktor yang menyebabkan tingginya nilai produksi perikanan adalah karena tingginya produksi perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Terlihat dalam table tersebut bahwa produksi perikanan tahun 2024 terealisasi 19.158,66 ton dari target 18.988,85 atau tercapai 104,04% dari target. Tingginya produksi perikanan dipengaruhi oleh intensifikasi perikanan budidaya penumbuhan kelompok pembudidaya baru yang juga adanya fasilitasi baik dari dana APBD murni maupun Dana Keistimewaan. Demikian juga dengan produksi tangkap dapat melebihi target karena selain didukung oleh cuaca yang bersahabat juga didukung oleh fasilitasi dari dana APBD murni maupun Dana Keistimewaan.

Tabel II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kineja sasaran Daerah / IKU Perangkat Daerah	Satuan	Taerget 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Target 2025
Meningkatnya pendapatan Masyarakat	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai Produksi perikanan	Rp	472.678.263.851,90	492.348.349.500	104,24	492.738.184.000
Meningkatnya kualitas penyelenggaan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100	100	100	100

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui 5 (lima) program utama yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Program, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sektor kelautan dan perikanan memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Kulon Progo. Sektor ini mempunyai peluang antara lain :

- Peluang pasar terbuka lebar dimulai dari budidaya sampai dengan pengolahan dan pemasaran ikan serta wisata edukasi perikanan
- Penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarta
- Universitas yang menyediakan IPTEK
- CSR dari lembaga-lembaga swasta

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Perikanan (KSPP)
2. Upgrading kapasitas SDM nelayan
3. Pengembangan kelembagaan perikanan
4. Pengembangan kawasan Minapolitan
5. Kekancingan penggunaan tanah PAG untuk optimalisasi TPI

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan diantaranya:

1. Tambahan dana keistimewaan Yogyakarta dalam meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan
2. Inovasi Gerbang Segoro (Gerakan Membangun dengan Semangat Gotong Royong) menambah antusiasme masyarakat dalam membangun kelautan dan perikanan
3. Adanya sarana dan prasarana pendukung produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang masih dapat dimanfaatkan dan dikembangkan.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan sumber daya ikan.
5. Produksi bibit ikan air tawar yang masih perlu ditingkatkan baik kulaitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan pembudidayaan ikan air tawar.

Di sisi lain pembangunan sektor kelautan dan perikanan menghadapi beberapa tantangan yang harus ditanggulangi dengan beberapa strategi. Tantangan tersebut antara lain :

1. Persaingan produk perikanan daerah lain yang lebih kompetitif
2. Bencana alam (global warming, abrasi, ketersediaan air/ kekeringan)
3. Kompetisi dengan aktifitas perkonomian dan daerah lainnya
4. Kapasitas SDM pelaku usaha masih rendah

Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan adalah seperti berikut :

1. Sebagian besar usaha perikanan merupakan usaha sampingan.
2. Pemberdayaan SDM kelautan dan perikanan belum optimal.
3. Kemampuan manajemen usaha masih kurang.
4. Harga sarana produksi dan pakan yang tinggi.
5. Kurangnya sinkronisasi dalam pemanfaatan lahan oleh pemangku kepentingan.
6. Ketersediaan air untuk pembudidayaan ikan kurang optimal

2.4. Review Terhadap RKPD

Jumlah program/ kegiatan dalam renstra SKPD 6 program, 19 kegiatan dengan jumlah kebutuhan dana Rp. 6.729.384.000,-. Dari hasil review jumlah kebutuhan dana Rp6.338.114,- dengan jumlah program 6 program dan kegiatan 19 kegiatan. Rincian review terhadap RKPD seperti pada Tabel II.5.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemetaan dilakukan dengan jalan membandingkan antara RKPD Kab Kulon Progo dengan hasil analisis kebutuhan penyelenggaraan pengusahaan bidang kelautan dan perikanan di Kulon Progo. Proses ini dilakukan pada tiap program, kegiatan, sub kegiatan yang ada di OPD. Penyandingan juga dilakukan pada tiap calon lokasi penerima, indikator kinerja, target capaian serta pagu indikatif yang melekat pada tiap sub kegiatan.

Hasil pemetaan yang telah dilakukan menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Hasil pemetaan tersebut dapat dilihat dalam Tabel II.5.

Tabel II.4 Review terhadap RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo

NO	Rancangan RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				**6.729.384**	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**6.338.114**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**1.955.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.591.231**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**1.955.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**2.591.231**	
1,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**-**	**-**	**1.955.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**-**	**-**	**2.591.231**	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		-	-	**1.955.000**	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		-	-	**2.591.231**	
	Pengembangan Budaya Bahari				**-**	Pengembangan Budaya Bahari				**-**	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan*	28 Objek	**1.955.000**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan*	15 Objek	**2.591.231**	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**4.774.384**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**3.746.883**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				**4.774.384**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**3.746.883**	
1,	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**-**	**-**	**3.288.214**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**-**	**-**	**3.135.411**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	**42.300**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	**6.907**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				**-**	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	**4.300**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	**2.353**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**-**	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	21 Laporan	38.000		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	21 Laporan	**4.554**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	37 Orang/Bulan	**2.472.814**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	37 Orang/Bulan	**2.727.932**	

NO	Rancangan RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				-	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	518 Orang/bulan	2.405.214		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	518 Orang/bulan	**2.679.657**	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	**63.000**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	**45.900**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				-	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	14 Laporan	4.600		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	14 Laporan	**2.374**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		***Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai***	**1 Dokumen**	**2.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		***Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai***	**1 Dokumen**	**1.216**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	1 Dokumen	1.000		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	1 Dokumen	**1.216**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti*	1 Orang	**1.000**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti*	1 Orang	-	

NO	Rancangan RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7
			Pendidikan dan Pelatihan					*Pendidikan dan Pelatihan*			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan***	**1 Paket**	**89.500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		***Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan***	**1 Paket**	**56.091**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	**13.000**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	**11.272**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	**76.500**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	**44.819**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan***	**12 Laporan**	**181.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan***	**12 Laporan**	**207.506**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	**44.500**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	**60.480**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	**137.000**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	**147.026**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**149.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-	

NO	Rancangan RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**					
		Kab. Kulon Progo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	**149.000**		Kab. Kulon Progo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		**-**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor***	**1 Paket**	**351.100**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor***	**1 Paket**	**135.759**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				**-**	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Laporan	**130.000**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	47 Unit	**123.172**	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				**-**	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	**200.000**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	**4.602**	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				**-**	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Laporan	**21.100**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang*	12 Unit	**7.986**	

NO	Rancangan RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7
								Dipelihara/Direhabilitasi			
2,	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**-**	**-**	**203.930**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**-**	**-**	**157.261**	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		***Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia***	**8 Unit**	**42.000**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		***Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia***	**8 Unit**	**52.509**	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				**-**	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia*	8 unit	**42.000**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia*	16 Unit	**52.509**	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya*	75 Orang	**71.930**	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya*	75 Orang	**24.906**	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil					Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				**-**	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya*	75 Orang	**71.930**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya*	75 Orang	**24.906**	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		***Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)***	**1 Layanan**	**90.000**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**		***Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)***	**1 Layanan**	**79.846**	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				**-**	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	1 Layanan	**90.000**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	1 Layanan	**79.846**	
3,	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**-**	**-**	**915.220**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**-**	**-**	**318.990**	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		***Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti***	**3 Kelompok**	**730.220**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		***Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti***	**3 Kelompok**	**178.947**	

NO	Rancangan RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7
			Pengembangan Kapasitas					***Pengembangan Kapasitas***			
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil					Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				**-**	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas*	3 Kelompok	**730.220**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas*	3 Kelompok	**178.947**	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		***Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	**59 Unit**	**185.000**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		***Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	**59 Unit**	**140.044**	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				**-**	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan*	1 Dokumen	**115.000**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan*	1 Dokumen	**63.218**	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				**-**	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*0*	59 0	**70.000**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*0*	59 0	**76.825**	
4,	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**-**	**-**	**120.000**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**-**	**-**	**38.340**	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		***Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota***	**30 Pelaku Usaha**	**120.000**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**		***Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota***	**30 Pelaku Usaha**	**38.340**	

NO	Rancangan RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota					Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				-	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	30 0	**120.000**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota*	30 Pelaku Usaha	**38.340**	
5,	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**-**	**-**	**247.020**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**-**	**-**	**96.882**	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		***Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko***	**35 Unit Usaha**	**100.020**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**		***Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko***	**45 Unit Usaha**	**41.417**	
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko					Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				-	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan*	105 Unit Usaha	**100.020**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan*	45 Unit Usaha	**41.417**	

NO	Rancangan RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7
			Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko					*Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko*			
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		***Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi***	**20 Pelaku Usaha**	**147.000**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		***Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi***	**20 Pelaku Usaha**	**55.464**	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				**-**	
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi*	6 Pelaku Usaha	**147.000**		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi*	20 Pelaku Usaha	**55.464**	
					6.729.384					**6.338.114**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan program kegiatan dilaksanakan dengan memadukan usulan dri bawah/ masyarakat (*bottom up*) dan usulan yang bersifat kebijakan dari pemerintah (*top down*). Keterpaduan usulan program kegiatan tersebut diharapkan dapat meminimalisir isu-isu yang berkembang sehingga dapat mendukung kinerja dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rincian data usulan program kegiatan Tahun 2026 seperti terlihat pada Tabel II.6 di bawah ini.

Tabel II.5 Usulan Program Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Kulon Progo

No	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		**-**	**-**	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		***Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia***	**8 Unit**	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia*	16 Unit	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya*	75 Orang	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya*	75 Orang	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		***Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)***	**1 Layanan**	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	1 Layanan	
3,	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**-**	**-**	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		***Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas***	**3 Kelompok**	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas*	3 Kelompok	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		***Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	**59 Unit**	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah*	1 Dokumen	

No	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan		
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*0*	59 0	
4,	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**-**	**-**	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		***Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota***	**30 Pelaku Usaha**	
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota*	30 Pelaku Usaha	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		**-**	**-**	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		***Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko***	**45 Unit Usaha**	
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko*	45 Unit Usaha	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		***Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi***	**20 Pelaku Usaha**	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi*	20 Pelaku Usaha	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perumusan tema pembangunan dalam Renja PD tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan DIY, dokumen RPJPD 2025-2045, sebagai tindak lanjut amanat Permendagri No. 86 tahun 2017 yang termaktub pada paragraf 3 Pasal 159 dan Pasal 160. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki makna bahwa dalam proses penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Sampai dengan tahap penyusunan Renja PD Tahun 2026 ini disusun, Tema Pembangunan Rancangan RKP Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026.

Sampai dengan tahap penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini disusun, Tema Pembangunan Rancangan RKP Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”.

Selain merujuk pada Tema Pembangunan RKP tahun 2026, RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 juga memperhatikan tema pembangunan DIY sebagaimana tercantum di dalam Rancangan RKPD DIY tahun 2026, yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Mainstreaming dari tema tersebut yaitu sektor unggulan: pariwisata, pertanian, industri dan manufaktur. Di samping itu penggunaan teknologi informasi juga menjadi prioritas mainstreaming. Berdasarkan analisis isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di wilayah Kabupaten Kulon Progo ke depan serta memperhatikan Tema Pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2026 dantema pembanguna n DIY Tahun 2026 sebagaimana tercantum di dalam Rancangan RKPD DIY Tahun 2026, maka disepakati untuk Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah:

“Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan”

Fondasi Pembangunan, berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sumber daya manusia dan infrastruktur adalah fondasi perekonomian Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2024). Mendasar pada hal tersebut, maka prioritas dari fondasi pembangunan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, Pemerintah Republik Indonesia melalui Bappenas telah merilis Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan guna mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif memuat tiga pilar utama:

1. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
2. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan
3. Perluasan akses dan kesempatan

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi inklusif, maka prioritas pembangunan dirumuskan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Terkait pertumbuhan ekonomi inklusif tersebut, ditetapkan juga prioritas penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dibutuhkan pusat pertumbuhan baru dengan pengembangan kawasan aerotropolis. Peningkatan penatakelolaan untuk mencapai tujuan tersebut akan dilakukan dengan optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Tema Pembangunan tahun 2026 tersebut juga berpedoman pada visi bupati terpilih yaitu

“terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan“

yang dijabarkan dalam 4 misi pembangunan Kulon Progo 2025-2029 yakni:

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo makmur, berbudaya dan religius;
2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance, aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, lingkungan yang lestari dan tangguh bencana.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi ke dua Kepala Daerah Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi serta misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.

1) Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2026 sebagai berikut :

"Meningkatnya Kemandirian Daerah"

2) Sasaran

Sasaran kinerja Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-2026
Meningkatnya Kemandirian Daerah		PDRB Per Kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	42.865-43.357
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
		Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,231
	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai Produksi perikanan	Rupiah	493.536.453.500
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 - 3,0

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo didukung oleh pencapain program-program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.2 Program dan Indikator Kinerja Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	2.200,00
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	ton	17.044,00
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	%	67
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi pengolahan ikan	Kg	184.000
5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Persentase rata-rata peningkatan kapasitaspelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	%	68,66
		Persentase sarana prasarana TPI yang berfungsi dengan baik	%	50
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	%	100

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yaitu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui peningkatan produksi ikan dan pendapatan pelaku usaha perikanan. Proses usulan program kegiatan dilaksanakan dengan memadukan usulan dari bawah/ masyarakat (*bottom up*) dan usulan yang bersifat kebijakan dari pemerintah (*top down*). Keterpaduan usulan program kegiatan tersebut diharapkan dapat meminimalisir isu-isu yang berkembang sehingga dapat mendukung kinerja dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan 5 (lima) program utama, dengan rincian :

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap,
  - Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
    - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
  - Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
  - Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
    - Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya,
  - Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
    - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
  - Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
    - Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
  - Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

        - Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan
    - Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
        - Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
    - Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
        - Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan.
    - Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
        - Sub Kegiatan Pengembangan Budaya Bahari

Susunan organisasi OPD diatur pada Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2024 tentang kedudukan fungsi dan tugas serta tata kerja pada Dinas. Peraturan bupati ini membagi OPD DKP KP menjadi satu sekretariat dengan tiga bidang utama : Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,

Program dan kegiatan adalah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 terdiri dari 6 program 15 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 6.338.114.051,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. 4 program utama dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 611.472.551,00
b. 1 Program yang berasal dari Dana Keistimewaan Rp. 2.591.231.000,00
c. 1 program penunjang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.135.410.500,00 di dalamnya termasuk Gaji dan Tunjangan ASN.

Rincian rencana program dan kegiatan Tahun 2026 seperti terlihat pada tabel IV.1 sebagai berikut:

Tabel V.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**6.338.114.051,00**							**482.989.629,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.591.231.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.591.231.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-	-			-	**2.591.231.000,00**						-	**0,00**	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-			-	2.591.231.000,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.06.0005	Pengembangan Budaya Bahari														
			Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan				15 Objek	2.591.231.000,00	Kab. Kulon Progo. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**3.746.883.051,00**							**482.989.629,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**3.746.883.051,00**							**482.989.629,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**3.135.410.500,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	6.907.300,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.352.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	4.554.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			37 Orang/Bulan	2.727.931.706,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				518 Orang/bulan	2.679.657.306,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	45.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	2.374.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	-			1 Dokumen	1.215.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1.215.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			1 Paket	56.091.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.272.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	44.819.250,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	-			12 Laporan	207.505.544,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	60.479.544,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	147.026.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor*	-			1 Paket	135.759.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	123.171.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.601.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	7.965.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	-	-			-	**157.261.072,00**						-	**40.060.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terfamin dan Tersedia*	-			8 Unit	52.509.300,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUB Nelayan	-	15.154.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terfamin dan Tersedia				16 Unit	52.509.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUB Nelayan		15.154.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya*	-			75 Orang	24.905.700,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUB Nelayan	-	24.905.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				75 Orang	24.905.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUB Nelayan		24.905.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	-			1 Layanan	79.846.072,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUB Nelayan	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	79.846.072,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUB Nelayan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	-	-			-	**318.990.179,00**						-	**307.706.229,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas*	-			3 Kelompok	178.946.600,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Pokdakan	-	167.664.650,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				3 Kelompok	178.946.606,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Pokdakan		167.664.650,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			59 Unit	140.043.579,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Pokdakan	-	140.043.579,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terujl Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	63.218.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Pokdakan		63.218.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			0				59 0	76.825.179,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Pokdakan		76.825.179,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	-	-			-	**38.339.600,00**						-	**38.339.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota*	-			30 Pelaku Usaha	38.339.600,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUB Nelayan	-	38.339.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
			0				30 0	38.339.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUB Nelayan		38.339.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**	**-**			**-**	**96.881.700,00**						**-**	**96.881.700,00**	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko*	-			45 Unit Usaha	41.417.300,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Poklahsar	-	41.417.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				45 Unit Usaha	41.417.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Poklahsar		41.417.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi*	-			20 Pelaku Usaha	55.464.400,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Poklahsar	-	55.464.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				20 Pelaku Usaha	55.464.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Poklahsar		55.464.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	J U M L A H							**8.338.114.051,00**							**482.989.629,00**	

BAB VI
PENUTUP

Implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 lebih konkrit akan dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan, berikut jumlah dana/ biaya yang diperlukan serta sumber pendanaan yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya rencana program/ kegiatan.

Untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan adanya pengendalian, monitoring dan evaluasi dengan menggunakan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Unsur pelaksana program dan kegiatan pada dinas yaitu bidang-bidang teknis agar melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksnaaan program dan kegiatan.
3. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, maka setiap unsur pelaksana/ bidang wajib melakukan tindakan koreksi serta melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas.
4. Pada akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan.

Akhirnya kami berharap bahwa rencana program/ kegiatan yang kami susun sangat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam menentukan kebijakan penganggaran khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Kulon Progo, 29 Juli 2025

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ir. Trenggono Trimulyo, MT
Pembina Tingkat I; IV/b
NIP. 196607111995031001

0274-773-126
www.dkp.kulonprogo.go.id
dkp@kulonprogokab.go.id
Jl. Purbowinoto 118 Pengasih, Kulon
Progo, 55652

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KULON PROGO

Jl. Sugiman Margosari Pengasih Kulon Progo

Kode Pos 55611 Telp/Fax (0274) 773095

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah . 14

2.4 Review terhadap RKPD 15

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 15

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 16

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 16

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 16

3.3 Program dan Kegiatan 17

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20

BAB V. PENUTUP 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati 41 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata;
d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Pariwisata; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Pariwisata diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2026 ini mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, RPJMD 2025-2029, Renstra 2025-2029 (dasar : Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029), hasil forum perangkat daerah serta Musrenbang RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan kerja Perangkat

Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja SKPD.

Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
d. Pelaksanaan Forum Perangkat daerah
e. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah ketentuan pasal 82 ayat (2) dan pasal 83, bahwa Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja perangkat daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana kerja Pemerintah tahun 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 7 tahun 2024).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah:

1. Menjadi acuan / dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo.
2. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
3. Memuat pengukuran kinerja Dinas Pariwisata sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud danTujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo beserta target capaian realisasi dirinci seperti pada tabel berikut:

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026 (Rp juta)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (Rp juta)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) (Rp juta)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp juta)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp juta)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (Rp juta)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					Urusan Pemerintahan Pilihan									
1	01				Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
1	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**11.368,27**	**2.627,74**	**3.035,91**	**2.882,08**	**95%**	**3.154,79**	**8.664,61**	**76%**
1	**01**	**01**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
1	01	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3,26	5,00	4,74	95%	10,58	18,58	
1	01	01	01	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4,42	4,52	4,23	94%	4,34	12,99	
1	**01**	**01**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
1	01	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		2.095,89	2.460,89	2.339,40	95%	2.457,78	6.893,07	
1	01	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		63,83	60,30	60,30	100%	57,04	181,17	
1	01	01	02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2,81	2,98	2,79	94%	4,03	9,63	
1	**01**	**01**	**03**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
1	01	01	03	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		26,88	34,21	31,15	91%	28,22	86,25	
1	01	01	03	02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		58,37	101,25	97,52	96%	47,92	203,81	
1	**01**	**01**	**04**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
1	01	01	04	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah sarana dan prasarana		121,83				6,16	127,99	

					Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor yang diadakan								
1	**01**	**01**	**05**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
1	01	01	05	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		76,61	112,45	109,91	98%	270,55	457,07	
1	01	01	05	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		62,09	107,55	107,35	100%	148,69	318,13	
1	**01**	**01**	**06**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
1	01	01	06	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		81,30	109,09	88,96	82%	86,00	256,26	
1	01	01	06	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		3,63	5,41		0%	5,41	9,04	
1	01	01	06	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		26,82	32,26	30,91	96%	28,07	85,80	
1	**01**	**02**			**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**	**9.386,92**	**4.314,89**	**6.239,92**	**1.640,56**	**26%**	**4.020,73**	**9.976,18**	**106%**
1	**01**	**02**	**01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengelolaan daya tarik wisata**								
1	01	02	01	01	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	4.693,46	2.015,26	3.431,27	2.922,11	85%	3.951,66	8.889,03	189%
1	**01**	**02**	**02**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengeloaan destinasi pariwisata**								
1	01	02	02	01	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4.693,46	2.299,63	2.808,64	2.336,57	83%	69,07	4.705,27	100%
1	**01**	**03**			**Program Pemasaran Pariwisata**	**Persentase peningkajtan Pemasaran Pariwisata**	**1.946,97**	**213,77**	**241,05**	**239,11**	**99%**	**227,79**	**680,67**	**35%**
1	**01**	**03**	**01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**"Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata"**								
1	01	03	01	01	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	973,49	137,12	155,86	155,09	100%	156,46	448,67	46%
1	01	03	01	02	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi	973,49	76,65	85,19	84,88	100%	71,33	232,86	24%

						Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri								
1	**01**	**04**			**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**3.864,65**		**1.395,79**	**675,73**	**48%**	**203,93**	**879,66**	**23%**
1	**01**	**04**	**01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar**								
1	01	04	01	01	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1.932,33	158,28	151,45	150,13	99%	106,50	414,91	21%
1	01	04	01	02	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	1.932,33	1.407,33	1.244,34	1.207,77	97%	97,43	2.712,53	140%
2					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**									
2	**01**				**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudaaan**									
2	**01**	**01**			**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Rata-rata Ketercapaian**								
						Cakupan Publikasi seni dan budaya daerah	**8.066,06**	**12.453,93**	**32.520,17**	**31.899,60**	**98%**	**36.288,98**	**80.642,51**	**1000%**
						Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat	**100.983,98**	**19.360,54**	**21.225,90**	**4.965,14**	**23%**		**24.325,68**	**24%**
2	**01**	**01**	**01**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**									
2	01	01	01	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya			5.005,66	4.887,97	98%		4.887,97	1500%
2	**01**	**01**	**02**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**jumlah even pariwisata**								
2	01	01	02	01	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	4.033,03	19.360,54	16.220,24	15.926,44	98%	25.210,22	60.497,20	177%
2	01	01	02	02	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	4.033,03					7.130,00	7.130,00	
2	**01**	**01**	**03**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Jumlah media promosi pariwisata**								
2	01	01	03	01	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	50.491,99	7.340,64	8.045,29	7.867,28	98%	2.298,76	17.506,68	35%
2	01	01	03	02	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai - Nilai Luhur dalam Masyarakat	50.491,99	5.113,30	3.248,98	3.217,92	99%	1.650,00	9.981,22	20%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk melaksanakan pelayanan Dinas Pariwisata telah melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan dan 22 sub kegiatan, dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Cakupan Publikasi Seni dan Budaya Daerah
2. Cakupan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
3. Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
5. Cakupan Pemasaran Pariwisata.
6. Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Melalui indikator-indikator di atas kinerja pelayanan Dinas Pariwisata yang akan di capai adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata.

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	-	Peningkatan jumlah kunjungan wisata	2.621.067	2.835.041	3.068.004		1.926.051	2.835.041	3.068.004		
2	Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata	-	Peningkatan pendapatan sektor pariwisata	1,92	1,95	1,96		2,05	1,95	1,96		

Kunjungan wisatawan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan target 2.621.067 orang tercapai sebesar 1.926.051,00 orang atau 73,48% dengan kriteria Sedang. Capaian tersebuat masih dibawah target, namun demikian untuk jumlah kunjungan wisata tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan data tahun 2023 yaitu sejumlah 1.923.606 atau meningkat sebesar 0,1%. Sedangkan untuk jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan, tahun 2023 sejumlah 11.459 dan tahun 2024 sebesar 7.992 atau menurun sebesar 30%.

Jumlah pendapatan sektor pariwisata juga meningkat dengan target 1,92 tercapai sebesar 2,05% dengan kriteria Sangat Tinggi, namun demikian bila dilihat dari target Pendapatan Asli daerah (PAD) sektor pariwisata, target

Rp8.754.690.218,50 hanya tercapai sebesar Rp7.378.133.000,00 atau 84,28%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang yang akan dihadapi Dinas Pariwisata Kulon Progo dalam beberapa tahun mendatang antara lain:

Tantangan:

a. Pengembangan destinasi pariwisata terkendala dengan status *clear and clean* kepemilikan tanah;
b. Pemenuhan sarana prasarana dasar kebutuhan wisatawan;
c. Tata ruang peruntukan pengembangan pariwisata belum sepenuhnya dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata;
d. Destinasi wisata di perbukitan menoreh rawan bencana alam;
e. Sektor pariwisata belum menarik pihak swasta (investor) untuk mengembangkan usaha jasa pariwisata;
f. Penyelenggaraan event rutin sebagai daya tarik wisata lintas sektor belum terjalin;
g. Jangkauan jaringan komunikasi belum merata;
h. Implementasi pelaku pariwisata terhadap pelayanan wisatawan dilapangan perlu ditingkatkan;
i. Hasil ekonomi kreatif belum menjadi brand suatu destinasi wisata.

Peluang:

a. Keberadaan Bandar Udara YIA;
b. Kulon Progo sebagai penyangga Kawasan Super Prioritas Nasional Borobudur;
c. Potensi daya tarik wisata yang lengkap.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pariwisata. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kulon Progo, yaitu:

1. Sarana prasarana pariwisata dan infrastruktur pendukung kurang memadai;
2. Sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif belum kompeten;
3. Promosi pariwisata melalui media elektronik, cetak dan media lainnya belum optimal.

Permasalahan di atas dapat berdampak pada pencapaian terhadap tujuan dan sasaran daerah, antara lain:

1. Menurunkan kepuasan dan lama tinggal wisatawan, sehingga mengurangi potensi belanja wisata serta menghambat investasi swasta dan pengembangan ekonomi lokal.
2. Menurunkan daya saing destinasi dibandingkan daerah lain yang infrastrukturnya lebih baik.
3. Program pengembangan ekonomi kreatif tidak berdampak karena pelaku belum punya keterampilan yang relevan serta dapat menurunkan pengalaman wisatawan karena kualitas layanan wisata rendah.
4. Daya tarik dan potensi wisata tidak dikenal secara luas, baik nasional maupun internasional dan peningkatan kunjungan wisata minim.
5. Target peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDRB daerah tidak tercapai karena branding daerah yang lemah sehingga kalah bersaing dengan destinasi lain.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis yaitu sarana prasarana pariwisata dan infrastruktur pendukung yang kurang memadai.

2.4. Review terhadap RKPD

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata periode 2025-2029 yang telah disusun atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata merupakan kebutuhan dan menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan. Hal tersebut sebagai upaya mengakomodir rencana kerja Dinas Pariwisata guna mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Kulon Progo.

RKPD disusun berdasarkan prioritas nasional, Renstra, atau kebijakan sektoral sedangkan analisis kebutuhan disusun berdasarkan data lapangan, aspirasi masyarakat, dan tren ekonomi-sosial yang mencerminkan masalah aktual di masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana kerja perlu proses membandingkan antara Ranwal RKPD 2026 dengan hasil analisis kebutuhan agar program yang direncanakan dan dana yang dibutuhkan bisa sesuai dengan kebutuhan riil. Hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata tahun 2026 perlu dibandingkan dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui kesesuaian program, kegiatan, dan

anggaran.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Ranwal RKPD 2026 telah relevan dan responsif terhadap kebutuhan, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Sinergi antara kebutuhan dan perencanaan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan identitas budaya lokal.

Hasil perbandingan secara detail dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel II.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Kulon Progo

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.100.943.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.100.943.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				19.100.943.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				19.100.943.000,00	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				19.100.943.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				19.100.943.000,00	
2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				296.000.000,00	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				296.000.000,00	
2.22.08.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	1 Unit	296.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	1 Unit	296.000.000,00	

2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				10.569.796.000,00	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				10.569.796.000,00	
2.22.08.5.06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	13 Objek	10.569.796.000,00	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	13 Objek	10.569.796.000,00	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				8.235.147.000,00	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				8.235.147.000,00	
2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	13 Dokumen	5.585.147.000,00	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	13 Dokumen	5.585.147.000,00	
2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	5 Laporan	2.650.000.000,00	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	5 Laporan	2.650.000.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.126.860.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.126.860.000,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				7.126.860.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				7.126.860.000,00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.142.227.763,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.142.227.763,00	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.456.400,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.456.400,00	
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.400.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.400.000,00	
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	5.056.400,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	5.056.400,00	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.507.820.360,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.507.820.360,00	

3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	2.448.043.860,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	2.448.043.860,00	
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	55.742.200,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	55.742.200,00	
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD	14 Laporan	4.034.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD	14 Laporan	4.034.300,00	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				67.018.769,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				67.018.769,00	
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	28.680.769,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	28.680.769,00	
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	38.338.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	38.338.000,00	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90.484.900,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90.484.900,00	
3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	90.484.900,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	90.484.900,00	

3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				320.016.134,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				320.016.134,00	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.826.570,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.826.570,00	
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	181.189.564,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	181.189.564,00	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				144.431.200,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				144.431.200,00	
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	90.962.900,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	90.962.900,00	
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.403.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.403.000,00	
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	28.065.300,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	28.065.300,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				3.467.003.537,00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				3.467.003.537,00	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				3.180.041.737,00	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				3.180.041.737,00	
3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan	1 Dokumen	3.180.041.737,00	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan	1 Dokumen	3.180.041.737,00	

		Semua Kel/Desa	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota					Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				286.961.800,00	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				286.961.800,00	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8 Unit	286.961.800,00	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8 Unit	286.961.800,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				260.970.200,00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				260.970.200,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				260.970.200,00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				260.970.200,00	
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Neger	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	165.341.300,00	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Neger	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	165.341.300,00	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	95.628.900,00	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	95.628.900,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				256.658.500,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				256.658.500,00	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan				256.658.500,00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan				256.658.500,00	

	Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
256.658.500,00	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	35 Orang	159.228.700,00	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	35 Orang	159.228.700,00	
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	50 Orang	97.429.800,00	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	50 Orang	97.429.800,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Pariwisata didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kapanewon dan pokok pikiran DPRD. Usulan kegiatan dari masyarakat yang masuk ke Dinas Pariwisata berupa proposal bantuan yang disampaikan langsung ke Dinas, usulan kalurahan/masyarakat melalui musrenbang kapanewon dan usulan reses/ pokok pikiran DPRD. Usulan-usulan tersebut ada yang diakomodir, belum prioritas dan ada yang ditolak karena tidak sesuai kewenangan.

Tabel II.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Kulon Progo

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pengembangan Desa Wisata		Rp 60.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Pariwisata melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Renja yang disusun oleh perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan kebijakan nasional. Agenda pembangunan nasional yang termuat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana kerja Pemerintah tahun 2026 dengan tema pembangunan: ”**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**” adalah meliputi :

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;

h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tema pembangunan nasional yaitu ”Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Pariwisata mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi kedua Kepala Daerah, Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi serta misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.

Tabel III.1

Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2026 Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2026 (Indeks)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	100
2.	Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	3.068.004
3.	Terwujudnya peningkatan jumlah pendapatan sektor pariwisata	Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata	Peningkatan pendapatan sektor pariwisata	1,96

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 akan melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulo Progo sebagai berikut:

Tabel III.1

Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Lokasi	3
3	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah	Orang	2.043.348
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang Tersertifikasi	Pelaku Usaha	186
5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	Orang	129.097

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 berdasarkan pertimbangan pentingnya program dan kegiatan tersebut untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah khususnya di bidang pariwisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 akan melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Pariwisata sehingga kegiatannya hanya dilaksanakan di lingkungan kantor saja. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dilaksanakan di seluruh Kapanewon yang ada di Kabupaten Kulon Progo, khususnya yang ada daya tarik pariwisata, dan program ini bersumber dari Dana Keistimewaan Yogyakarta.

Sedangkan program-program lainnya seperti Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lokasi kegiatannya tersebar di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Rincian nama rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

Tabel IV.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
		target	(Rp.)	target	(Rp.)	target	(juta Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**3.041.952.035**	**100**		**100**	**11.368,25**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu**	**25 dokumen**	**14.916.100**	**23 dokumen**		**94 dokumen**	**1.894,71**
Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	10.579.700	2 dokumen	7.400.000	10 dokumen	947,35
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	21 dokumen	4.336.400	21 dokumen	5.056.400	84 dokumen	947,35
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	14 laporan	**2.422.343.079**	14 laporan		56 laporan	**1.894,71**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bulan	2.361.266.379	36 orang/bulan	2.448.043.860	36 orang/bulan	631,57
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	57.042.400	1 dokumen	55.742.200	4 dokumen	631,57

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	14 laporan	4.034.300	14 laporan	4.034.300	56 laporan	631,57
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi umum**	**2 dokumen**	**80.655.100**	**2 dokumen**		**8 dokumen**	**1.894,71**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	30.735.100	4 paket	28.680.769	16 paket	947,35
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	49.920.000	12 laporan	38.338.000	48 laporan	947,35
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah penambahan aset**	**7 unit**	**25.456.000**	**7 unit**		**28 unit**	**1.894,71**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	7 unit	25.456.000	7 unit	90.484.900	28 unit	1.894,71
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Layanan jasa penunjang**	**12 bulan**	**379.100.056**	**12 bulan**		**12 bulan**	**1.894,71**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	270.549.596	12 laporan	138.826.570	12 laporan	947,35
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	108.550.460	12 laporan	181.189.564	12 laporan	947,35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	**3 laporan**	**119.481.700**	**3 laporan**		**3 laporan**	**1.894,71**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	86.002.700	15 unit	90.962.900	15 unit	631,57
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	5.408.200	4 unit	25.403.000	4 unit	631,57
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	69 unit	28.070.800	69 unit	28.065.300	69 unit	631,57
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	**Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**	**100,00**	**4.077.510.904**	**100,00**		**100,00**	**9.386,92**
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Jumlah pengelolaan daya tarik wisata**	**10 lokasi**	**4.005.040.004**	**10 lokasi**		**10 lokasi**	**4.693,46**
Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	10 lokasi	4.005.040.004	10 lolasi	3.180.041.737	10 lokasi	4.693,46
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah pengeloaan destinasi pariwisata**	**8 unit**	**72.470.900**	**8 unit**		**8 unit**	**4.693,46**
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	8 init	72.470.900	8 unit	286.961.800	8 unit	4.693,46
Program Pemasaran Pariwisata	**Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata**	**100,00**	**230.042.000**	**100,00**		**100,00**	**1.946,97**

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah pemasaran pariwisata**	**6 dokumen**	**230.042.000**	**6 dokumen**		**6 dokumen**	**1.946,97**
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	3 dokumen	73.078.900	3 dokumen	95.628.900	3 dokumen	973,49
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	3 dokumen	156.963.100	3 dokumen	165.341.300	3 dokumen	973,49
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	**Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**21,94**	**244.881.100**	**23,47**		**23,47**	**3.864,65**
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar**	**85 orang**	**244.881.100**	**85 orang**		**340 orang**	**3.864,65**
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata berbasis SKKNI	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	50 orang	100.429.800	50 orang	97.429.800	200 orang	1.932,33
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	35 orang	144.451.300	35 orang	159.228.700	140 orang	1.932,33
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Cakupan publikasi seni dan budaya daerah**	**100,00**	**26.227.317.900**	**100,00**		**100,00**	**8.066,06**

	Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat	**100,00**	**13.273.153.900**	**100,00**		**100,00**	**100.983,98**
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	**Jumlah sarana dan prasarana budaya**			**100,00**		**100,00**	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah sarana dan prasarana budaya				296.000.000		
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	**Jumlah even pariwisata**	**100,00**	**26.227.317.900**	**100,00**		**100,00**	**8.066,06**
Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah objek atraksi wisata budaya yang dikembangkan	30 objek	26.227.317.900	30 objek	10.569.796.000	30 objek	4033,03
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Jumlah media promosi pariwisata**	**100,00**	**13.273.153.900**	**100,00**		**100,00**	**100.983,98**
Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah dokumen publikasi seni dan budaya daerah	10 dokumen	8.273.541.200	10 dokumen	5.585.147.000	10 dokumen	50.491,99
Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	6 laporan	4.999.612.700	6 laporan	2.650.000.000	6 laporan	50.491,99
Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah laporan even penggiat seni	12 laporan	15.891.885.900	12 laporan	-	12 laporan	4033,03

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2026 ini didasarkan pada RKPD 2026 yang telah ditetapkan dan berisi program dan kegiatan tahun 2026. Berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi serta kondisi, juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan pelayanan dan fasilitasi Dinas Pariwisata.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini nantinya akan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan umum anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai perencanaan dan target sasaran yang telah ditetapkan serta berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya.

Permasalahan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan perlu diantisipasi dengan baik agar tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di Dinas Pariwisata secara intensif.

Kulon Progo, 29 Juli 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KULON PROGO

Joko Mursito, S.Sn., MA
NIP. 19720704 199703 1006

Rencana Kerja 2026

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KULON PROGO



Jl. Ki Josuto, Wates, Kulon Progo
e-mail: perdagangan@kulonprogokab.go.id
Telp (0274) 773073

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rencana Kerja digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pagu indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunnya dokumen ini dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kulon Progo, 29 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Perdagangan

Drs. RIYADI SUNARTO
Pembina Utama Muda;IV/c
NIP. 196710181993031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1Latar Belakang 1

1.2Landasan Hukum 1

1.3Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II 4

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 4

TAHUN LALU (2024) 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16

2.4.Review terhadap RKPD 17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III 25

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 25

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 25

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 26

3.3 Program dan Kegiatan 27

BAB IV 29

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 29

BAB V 40

PENUTUP 40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024.....	4
Tabel 2.2	Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024.....	4
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaPerangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan IV Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo	6
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo.....	14
Tabel 2.5	Review terhadap RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo.....	18
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo.....	24
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026.....	26
Tabel 3.2	Program dan Indikator Kinerja Program Dinas Perdagangan Tahun 2026.....	27
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Kulon Progo Sumber Dana APBD Kabupaten.....	30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunnan Daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam undang-undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan didalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, menyelaraskan kegiatan perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Renja Dinas Perdagangan disusun berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 serta Rancangan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan-tahapan persiapan seperti pembentukan tim dan pengumpulan data dan informasi, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, serta penetapan.

1.2Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023-2026;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antara urusan pilihan yang diampu perangkat daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yaitu:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kabupaten dengan

memperhatikan kemampuan sumber daya dan keuangan kabupaten;

3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan Perangkat Daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Perdagangan yang memuat :

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan tujuan
1.4. Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap :

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra
2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan
2.4. Review terhadap RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini diuraikan tentang

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU (2024)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing. Guna mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2024 melaksanakan 7 program, 14 kegiatan, dan 25 sub kegiatan.

Pengukuran kinerja dinas didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel 2.1 di bawah :

Tabel 2.1. Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi s.d. Tw IV
Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100	100
Meningkatnya nilai usaha perdagangan	Nilai usaha perdagangan	Ribu rupiah	2.705.295.000	2.708.643.963

Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi s.d TW IV
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	nilai	32%	36%
Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	7,75	4,89
Program pengembangan ekspor	Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n	Rupiah	236.113.493.009	247.563.011.770
Program standardisasi dan	Persentase standardisasi dan	%	74,86	78,71

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi s.d TW IV
perlindungan konsumen	perlindungan konsumen			

Dari tabel di atas, capaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Seluruh target kinerja dapat terlampaui. Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan tercapai 36% dari target sebesar 32%. Target tercapai dikarenakan jumlah pasar rakyat dengan sarana prasarana kondisi baik pada tahun 2024 bertambah 2 pasar yaitu Pasar Jombokan dan Pasar Kasihan.
b. Target persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting tercapai dengan nilai realisasi 4,89 dari batas atas yang ditetapkan yaitu 7,75. Nilai persentase koefisien variasi harga antar waktu yang semakin kecil menunjukkan stabilitas harga yang semakin baik.
c. Indikator nilai perdagangan luar daerah tahun 2024 tercapai melampaui target yakni sebesar Rp247.563.011.770. Kendati volume beberapa komoditi ekspor mengalami penurunan, nilai ekspor tercatat meningkat karena diuntungkan dari sisi nilai tukar mata uang rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat.
d. Indikator persentase standardisasi dan perlindungan konsumen tercapai 78,71%. Nilai ini berada di atas target sebesar 74,86%.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan didukung anggaran untuk operasional. Pada tahun 2024 pagu anggaran belanja murni senilai Rp 13.249.547.303,00. Kemudian ada beberapa penyesuaian seperti penambahan anggaran untuk operasi pasar, pembayaran sampah pasar rakyat, dana keistimewaan, penyesuaian upah THL, serta biaya operasional ex BAU, sehingga sampai dengan triwulan IV tahun 2024 jumlah anggaran belanja mencapai Rp 14.793.525.427,00 atau mengalami penambahan sebesar 11,65%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya (tahun n-2/ tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2024) disajikan pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Triwulan IV Tahun 2024
Kabupaten Kulon Progo

Dinas Perdagangan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3				Urusan Pemerintahan Pilihan									
3	30			Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
3	30	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100,00	100	100	100
3	30	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu								
3	30	01	2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	2	100	4	8	80,000
3	30	01	2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	21	21	21	100	21	63	75,000
3	30	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu								
3	30	01	2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		720	720	720	720	100	720	2160	300,000
3	30	01	2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	12	12	12	100	4	28	700,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	01	2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	19	14	14	100	14	47	83,93
3	30	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian								
3	30	01	2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	10	4	4	100	0	14	35,00
3	30	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum								
3	30	01	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	5	5	5	100	5	15	93,75
3	30	01	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	2	2	2	100	2	6	12,50
3	30	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	30	01	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	4	4	4	100	12	20	41,67
3	30	01	2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor yang disediakan	48	2	2	2	100	12	16	33,33

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah								
3	30	01	2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	25	25	25	100	25	75	300,00
3	30	01	2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	2	1	1	100	0	3	100,00
3	30	01	2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	24	18	18	100	11	53	331,25
3	30	03		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	41,67	25,93	32	36	112,5	32	36	86,39
3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan								
3	30	03	2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	12	4	4	4	100	1	9	75,00
3	30	03	2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10	10	26	26	100	25	61	610,00
3	30	03	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah dokkume hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	03	2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10802	2588	2588	2688	103,86	2738	8014	74,19
3	30	03	2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah DokumenHasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	15904	3826	3926	4610	117,42	4026	12462	78,36
3	30	04		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Presentase Tabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	15,2	8,8	10,55	4,89	46,35	12,67	0,24	
3	30	04	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat								
3	30	04	2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	3	3	4	133,33	4	11	91,67

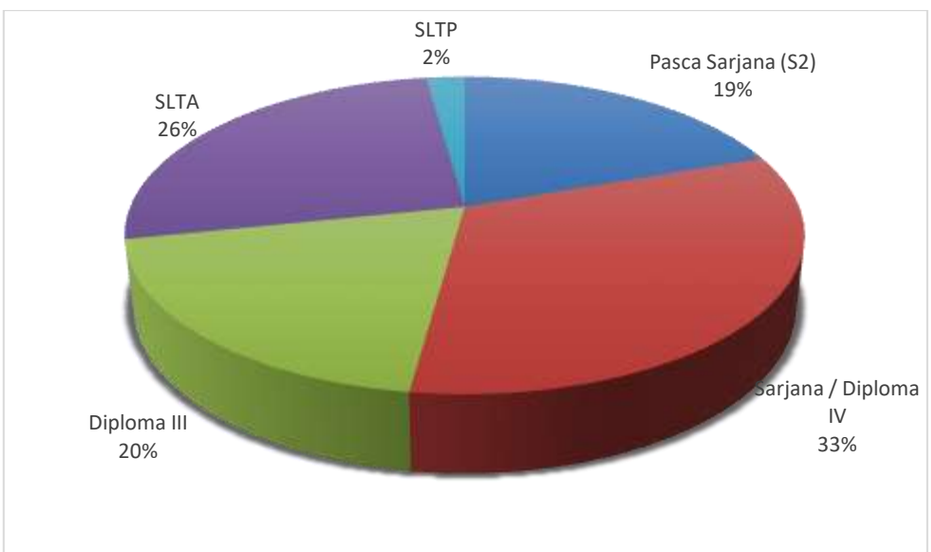
Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi dalam 1(satu) Kabupaten/Kota								
3	30	04	2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	144	25	12	12	100,00	13	50	34,72
3	30	05		Program Pengembangan Ekspor	Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n (miliar rupiah)	352,83	190,12	220,81	247,56	112,11			
3	30	05	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggarannya monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor kabupaten kulon progo 12 kec (perusahaan)								
3	30	05	2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi	120	90	100	100	100,00	110	300	250,00
3	30	06		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Presentase standardisasi dan perlindungan konsumen	95,11	62,41	74,86	78,71	105,14	86,7	39,15	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan									
3	30	06	2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10700	4915	8160	6139	75,23	6000	17054	159,38

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo mengampu urusan pilihan yang belum mempunyai SPM, maka indikator kinerja pelayanan disesuaikan pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam upaya pelayanan perangkat daerah, Dinas Perdagangan didukung oleh 46 karyawan dengan deskripsi sebagai berikut:



Dari diagram tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo didominasi oleh kualifikasi Pendidikan D IV/ S1 sebanyak 33% atau 15 orang, diikuti pendidikan SLTA sebanyak 26% atau 12 orang, pendidikan S2 sebanyak 20% atau 9 orang, serta pendidikan D I/II/III sebanyak 20% atau 9 orang. Masih terdapat pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SLTP sebanyak 2% atau 1 orang yang bertugas sebagai juru pungut retribusi pasar.

Sementara itu untuk kondisi asset Dinas Perdagangan adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah item
1	Aset tetap intra komptabel	116.353.500.827	1.025
2	Aset tetap ekstra komptabel	25.051.095	250
	Jumlah	116.378.551.922	1.275

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan

Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Kinerja Utama											
1	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah (%)			100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		
2	Nilai usaha perdagangan (Juta rupiah)			2.705.295,00	2.840.559,75	3.010.993,34		2.708.643,96	2.759.400,90	2.814.588,92		
	Indikator Kinerja Program											
1	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (%)			100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		
2	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan (%)			32,00	37,50	41,67		36,00	37,50	41,67		

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)			10,55	12,67	15,20		4,89	7,70	7,65		
4	Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n (Juta rupiah)			220.811,19	235.216,78	352.825,17		247.563,01	252.641,44	270.326,34		
5	Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen (%)			74,86	86,70	95,11		78,71	86,70	95,11		

2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan mencakup lingkup yang luas. Dinas Perdagangan mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang usaha perdagangan dan sarana perdagangan.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Dinas Perdagangan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

A. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan sektor perdagangan di Kulon Progo antara lain

1. Penataan PKL
2. Cakupan pelayanan kemetrologian
3. Berkembangnya pasar modern dan *online marketplace* yang mengancam pedagang tradisional
4. Daya saing usaha perdagangan

B . Permasalahan

1. Kualitas Pasar rakyat masih perlu peningkatan

   Setelah dilakukan upaya-upaya untuk revitalisasi Pasar rakyat, kondisi sarana prasarana fisik Pasar rakyat mayoritas bisa disimpulkan cukup representatif, namun masih perlu adanya anggaran pemeliharaan yang memadai agar sarana prasarana yang telah direvitalisasi tetap berfungsi baik.
2. Belum terdapat kawasan yang diperuntukkan khusus pagi PKL (pedagang kreatif lapangan). Banyak pelaku usaha PKL yang menempati lokasi yang tidak seharusnya dipergunakan untuk berdagang seperti trotoar, hingga bahu jalan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan adalah:

1. Peningkatan dan pengembangan pasar dengan adanya rencana pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
2. Perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern melalui regulasi.

2.4. Review terhadap RKPD

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 itu sendiri disusun atas dasar Rancangan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045. Review terhadap RKPD menghasilkan beberapa hal selengkapnya tersaji pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

Review terhadap RKPD Tahun 2026

Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
3.30.01	**Program Penunjang Urusan Pemeirntahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**100%**	**6.283,41**	**Program Penunjang Urusan Pemeirntahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**100**	**4.222,94**	
3.30.01.2.01	**Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**2**	**19,43**	**Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**2**	**14,64**	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	8,78	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	6,96	
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	21 laporan	10,65	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12	7,68	
3.30.01.2.02	**Keg. Administrasi keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**3**	**4.807,54**	**Keg. Administrasi keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**3**	**3.633,25**	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	720 orang/bulan	4.680,16	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	47	3.552,39	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	112,74	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	58,60	
3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	14 dokumen	14,64	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	14	22,25	
3.30.01.2.05	**Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**55,00**	**Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**0,00**	
3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	10 orang	55,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	0	0,00	
3.30.01.2.06	**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**2**	**39,05**	**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**2**	**39,05**	
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	30,61	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	18,46	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	84,70	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	20,60	
3.30.01.2.07	**Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**1**	**18,37**	**Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**1**	**18,37**	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.01.2.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	25 unit	718,74	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3	18,37	
3.30.01.2.08	**Keg. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**2**	**346,64**	**Keg. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**2**	**346,64**	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	212,96	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	172,20	
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	239,58	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	174,44	
3.30.01.2.09	**Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**2**	**170,99**	**Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**2**	**170,99**	
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25 unit	186,34	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21	144,94	
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	106,48						

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	16 unit	33,28	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	14	26,05	
3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**		**Persentase Pasar Rakyat Kondisi Baik**	**40,00**	**2.974,55**	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**		**Persentase Pasar Rakyat Kondisi Baik**	**40,00**	**9.051,27**	
3.30.03.2.01	**Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**2**	**2.714,55**	**Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**2**	**8.613,88**	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana distribusi perdagangan	3 unit	1.544,55	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana distribusi perdagangan	2	6.315,69	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	10 unit	1.170,00	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	25	2.298,19	
3.30.03.2.02	**Keg. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**2**	**260,00**	**Keg. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**2**	**437,39**	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	2.788 dok	110,00	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	2.788	197,77	
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan,	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana	4.126 dok	150,00	Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Kab. Kulon Progo, Semua	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana	4.086	239,62	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kel/Desa	distribusi perdagangan				Kecamatan, Semua Kel/Desa	distribusi perdagangan			
3.30.04	**Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**		**Stabilitas Harga Bahan Pokok Antar Waktu**	**5,87%**	**572,33**	**Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**		**Stabilitas Harga Bahan Pokok Antar Waktu**	**5,87%**	**303,77**	
3.30.04.2.01	**Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**1**	**439,23**	**Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**1**	**53,37**	
3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tiingkat agen dan pasar rakyat	3 laporan	439,23	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tiingkat agen dan pasar rakyat	2	53,37	
3.30.04.2.02	**Keg. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**1**	**133,10**	**Keg. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**1**	**250,40**	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	36 laporan	133,10	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	13	250,40	
3.30.05	**Program Pengembangan Ekspor**		**Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi dan Misi Dagang**	**15 orang**	**537,53**	**Program Pengembangan Ekspor**		**Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi dan Misi Dagang**	**15 orang**	**151,20**	
3.30.05.2.01	**Keg. Penyelenggaraan Promosi Dagang**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**1**	**537,53**	**Keg. Penyelenggaraan Promosi Dagang**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**1**	**151,20**	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	Program/ Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	PAGU INDIKATIF (Rp Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					**melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**					
3.30.05.2.01.01	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	120 produk	537,53	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	120	151,20	
3.30.06	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**		**Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen**	**91,74%**	**102,06**	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**		**Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen**	**91,74%**	**139,61**	
3.30.06.2.01	**Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**1**	**102,06**	**Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**		**Jumlah laporan Pelaksanaan subkegiatan**	**1**	**139,61**	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	10.700 unit	102,06	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	6.020	139,61	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat berasal dari usulan kecamatan/kalurahan, serta aspirasi maupun pokok pikiran dewan. Usulan-usulan yang masuk belum bisa diakomodir karena beberapa alasan, misal kurang jelasnya sasaran yang diusulkan, permintaan bantuan yang bukan merupakan prioritas OPD, keterbatasan anggaran daerah, dan beberapa sasaran bukan merupakan kewenangan OPD. Perlunya evaluasi pada musrenbang kecamatan agar usulan yang disampaikan bisa utuh dan jelas, baik lokasi, sasaran, maupun jenis bantuan yang diminta agar semakin banyak usulan masyarakat dapat terakomodir.

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kementerian Perdagangan :

Program pembangunan bidang perdagangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergiskan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak. Regulasi nasional yang berimplikasi langsung pada Dinas Perdagangan adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana urusan kemetrologian menjadi tugas pemerintah kabupaten untuk mengampunya.

Kementerian Perdagangan merumuskan 14 (empat belas) tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN);
8. Optimalisasi/ penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja Perdagangan;
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian

Berdasarkan telaah dari Kementerian Perdagangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai Rancangan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 bahwa visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo adalah terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan. Guna mencapai visi tersebut, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo makmur, berbudaya dan religius;
2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis; serta
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, lingkungan yang lestari dan tangguh bencana.

Tujuann dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi kedua Kepala Daerah yaitu meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi serta misi ketiga kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.

Guna mendukung hal tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran tersaji dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Perdagangan Tahun 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN
1	Meningkatnya kemandirian daerah		PDRB per kapita (ADHB)	Ribu rupiah	42.865-43.357
			Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN
			Indeks maturitas SPIP	Nilai	3,231
		Meningkatnya nilai usaha perdagangan	Nilai usaha perdagangan	Rupiah	2.865.527.205.476
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat daerah	Nilai	A (>80-90)
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP perangkat daerah	Nilai	2,0-3,0

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo sesuai Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026 mencakup 5 program, 12 kegiatan, dan 20 sub kegiatan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Program dan Indikator Kinerja Program
Dinas Perdagangan Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat Kondisi Baik	%	40,00
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilitas Harga Bahan Pokok Antar Waktu	%	5,87
3	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi dan Misi Dagang	Orang	15

4	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	%	91,74
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten secara detail dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju tahun 2027
Kabupaten Kulon Progo

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERDAGANGAN KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERDAGANGAN						**13.868.778.800,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**13.868.778.800,00**							**0,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**13.868.778.800,00**							**0,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi***	**-**			**100 %**	**4.222.940.673,00**						**-**	**0,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan*	-			2 dokumen	14.635.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	7.680.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan*	-			3 dokumen	3.633.247.488,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	3.552.393.488,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	58.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	22.254.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan*	-			2 dokumen	39.053.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.455.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	20.598.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan*	-			1 dokumen	18.371.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	18.371.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan*	-			2 dokumen	346.643.385,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	172.199.409,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	174.443.976,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan*	-			2 dokumen	170.988.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	144.936.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	26.052.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase Pasar Rakyat Kondisi Baik***	**-**			**40 %**	**9.051.267.327,00**						**-**	**0,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan*	-			2 dokumen	8.613.878.927,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	6.315.693.027,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				25 Unit	2.298.185.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan*	-			2 dokumen	437.388.400,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2788 Dokumen	197.772.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				4086 Dokumen	239.615.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Stabilitas Harga Bahan Pokok Antar Waktu***	**-**			**5,87 %**	**303.767.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan*	-			1 dokumen	53.367.000,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				2 Laporan	53.367.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan*	-			1 dokumen	250.400.000,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				13 Laporan	250.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi dan Misi Dagang***	**-**			**15 orang**	**151.197.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan*	-			1 dokumen	151.197.000,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				120 Produk	151.197.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen***	**-**			**91,74 %**	**139.606.800,00**						**-**	**0,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan*	-			1 dokumen	139.606.800,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				6020 Unit	139.606.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	J U M L A H							**13.868.778.800,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun pertama periode renstra 2025-2029 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian selama pelaksanaan Renja tahun 2026 di antaranya pengendalian inflasi, penataan PKL, salah satunya dengan upaya mewujudkan pembangunan Sentra Kuliner Kulon Progo, serta penataan/ rehabilitasi pasar rakyat.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2026. Keberhasilan penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 yang dapat kami susun. Demi kesempurnaan dokumen ini, kami sangat mengharap masukan dan saran sehingga akan terwujud perencanaan yang berkualitas.

Kulon Progo, 29 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Perdagangan

Drs. RIYADI SUNARTO
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 196710181993031004

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2026

Jalan Perwakilan No. 1, Wates, Kulon Progo
(0274) 773010
setda.kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang menjadi komitmen segenap pegawai Sekretariat Daerah untuk melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan guna mencapai visi misi daerah.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo di masa yang akan datang pada khususnya.

Wates, 29 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

TRIYONO, S.IP, M.SI.
Pembina Utama Madya; IV/d
NIP. 196611151966031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar…….. i
Daftar isi……. ii
Daftar Tabel…….. iii
Daftar Gambar…..…….. iv
BAB I PENDAHULUAN……... 1
1.1 Latar Belakang…… 1
1.2 Landasan Hukum…… 2
1.3 Maksud dan Tujuan……..... 3
1.4 Sistematika Penulisan……..... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU……. 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah…… 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah……. 16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah…….. 19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD…….. 21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……... 30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH…… 32
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional……..…… 32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah…… 32
3.3 Program dan Kegiatan……. 37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……... 39
BAB V PENUTUP……. 58

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024….....	7
Tabel II.2	Rekapitulasi Capaian Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024…….	15
Tabel II.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo……....	17
Tabel II.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026……...	22
Tabel II.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026…….	31
Tabel III.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029…..	33
Tabel III.2	Kontribusi Sekretariat Daerah terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029……	35
Tabel III.3	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026…….	36
Tabel III.4	Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026……..	37
Tabel IV.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026……..	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen perencanaan lainnya……. 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

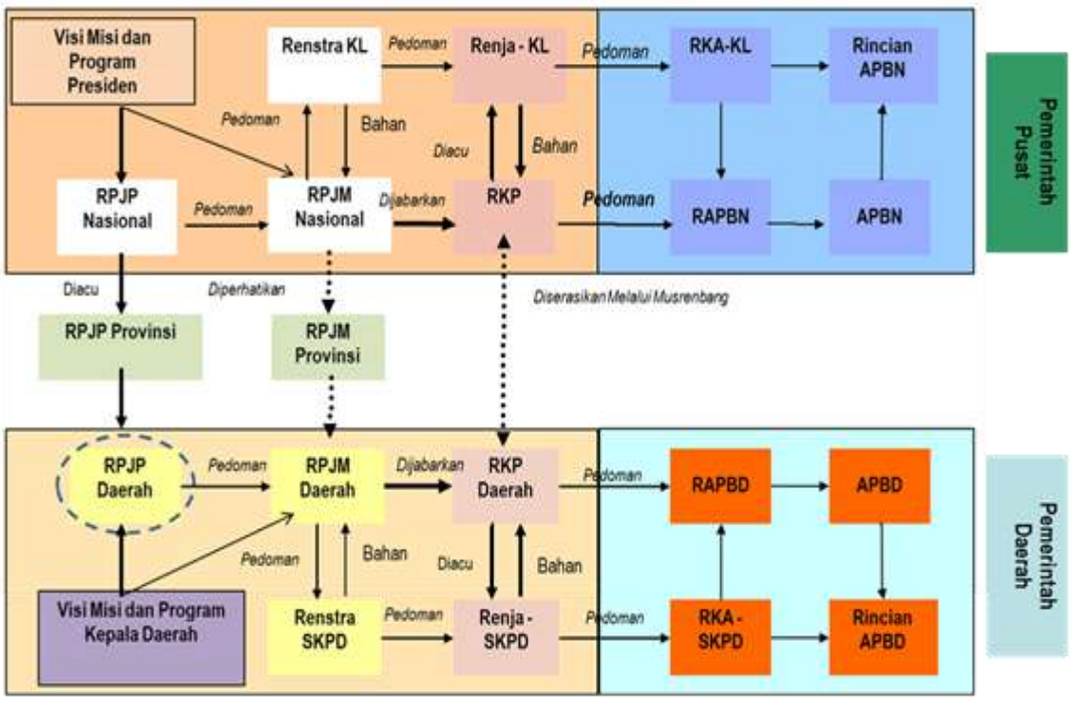
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Sekretariat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dan Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Tahun 2026 dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Tahun 2026 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo.

Gambar 1.1

Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen perencanaan lainnya



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 119 tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 2025 Nomor 435);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2024);
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 71);
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Daerah Nomor 23 Tahun 2025);
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 31).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman pelaksanaan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah :

   a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4.Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk :

1. Menilai capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dilaksanakan, baik dalam jangka pendek (Renja) maupun jangka menengah (Renstra), terhadap target yang telah ditetapkan;
2. Mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan faktor pendukung dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan dan rencana strategis;
3. Menyediakan umpan balik (feedback) untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pada periode selanjutnya, agar lebih tepat sasaran, efisien, dan efektif;
4. Menjamin konsistensi, keterpaduan, dan kesinambungan antara dokumen perencanaan tahunan (Renja), dokumen strategis (Renstra), serta dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan RPJMD;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka hal tersebut di atas, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 perlu adanya kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), reviu sebagaimana berikut dalam tabel berikut :

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kulon Progo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TERAKHIR) 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100**	**115,4**	**100**	**106,34**	**106,34**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*									
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	10	2	2	2	100,00	4,00	8,00	80,00
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	21	21	21	100,00	21,00	63,00	300,00
4.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat*									
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		544	12	13	13	100,00	13,00	38,00	6,99
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	48	12	12	12	100,00	12,00	36,00	75,00
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	56	14	14	14	100,00	14,00	42,00	75,00
4.01.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*									
4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,	8	2	2	2	100,00	0,00	4,00	50,00
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	2	2	2	100,00	2,00	6,00	75,00
4.01.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*									
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	9	9	9	100,00	9,00	27,00	75,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	48	12	12	12	100,00	12,00	36,00	75,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TERAKHIR) 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*									
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198	78	17	17	100,00	27,00	122,00	61,62
4.01.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*									
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	12	12	12	100,00	12,00	36,00	75,00
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	48	11	12	12	100,00	12,00	35,00	72,92
4.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*									
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	336	84	84	84	100,00	88,00	256,00	76,19
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	260	65	65	65	100,00	65,00	195,00	75,00
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1761	411	425	425	100,00	425,00	1.261,00	71,61
4.01.01.2.11	*Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional*								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TERAKHIR) 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	3	13	13	100,00	13,00	29,00	483,33
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	35	8	8	8	100,00	10,00	26,00	74,29
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	4	4	2	50,00	8,00	14,00	58,33
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	160	3	12	12	100,00	12,00	27,00	16,88
4.01.01.2.12	*Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*								
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	3	3	3	100,00	3,00	9,00	75,00
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	0		0	0,00	3,00	3,00	50,00
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8	2	2	2	100,00	2,00	6,00	75,00
4.01.01.2.13	*Penataan Organisasi*	*Jumlah Dokumen Penataan*								
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8	2	2	2	100,00	2,00	6,00	75,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TERAKHIR) 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20	5	5	5	100,00	4,00	14,00	70,00
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	28	7	7	7	100,00	7,00	21,00	75,00
4.01.01.2.14	*Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi*								
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	48	12	12	12	100,00	12,00	36,00	75,00
4.01.02	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**Presentase peningkatan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100**	**105,82**	**94,91**	**113,74**	**113,74**	**97,45**	**100,00**	**100,00**
4.01.02.2.01	*Administrasi Tata Pemerintahan*									
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12	3	3	3	100,00	3,00	9,00	75,00
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	16	5	3	3	100,00	3,00	11,00	68,75
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	21	5	5	5	100,00	5,00	15,00	71,43
4.01.02.2.02	*Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*									
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	44	11	12	12	100,00	11,00	34,00	77,27

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TERAKHIR) 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	40	10	10	10	100,00	10,00	30,00	75,00
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait KesejahteraanMasyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	20	1	5	5	100,00	5,00	11,00	55,00
4.01.02.2.03	*Fasilitasi dan Koordinasi Hukum*	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Hukum*								
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1890	642	470	666	141,70	480,00	1.788,00	94,60
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20	11	12	13	108,33	12,00	36,00	180,00
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1910	681	470	666	141,70	480,00	1.827,00	95,65

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TERAKHIR) 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.02.2.04	*Fasilitasi Kerja Sama Daerah*	*Fasilitasi Kerja Sama*								
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	16	4	4	4	100,00	4,00	12,00	75,00
4.01.03	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	**Persentase peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan**	**100**	**108,33**	**100**	**111,83**	**111,83**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4.01.03.2.01	*Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian*	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian*								
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20	5	5	12	240,00	5,00	22,00	110,00
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	48	12	12	12	100,00	12,00	36,00	75,00
4.01.03.2.02	*Pelaksanaan Administrasi Pembangunan*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan*								
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12	3	3	3	100,00	3,00	9,00	75,00
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	24	6	6	6	100,00	6,00	18,00	75,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TERAKHIR) 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	8	2	2	2	100,00	3,00	7,00	87,50
	Keistimewaan Yogyakarta									
4.01.04	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**	**Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan**	**92**	**92,68**	**91,83**	**92,85**	**101,11**	**91,92**	**91,92**	**99,91**
4.01.04.5.01	*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*Jumlah Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota*								
4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	56	14	7	7	100,00	8,00	29,00	51,79
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	1	1	1	100,00	1,00	3,00	75,00
4.01.04.5.01.04	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	8	2						
4.01.04.5.02	*Peningkatan Budaya Pemerintahan*	*Jumlah Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan*								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*) / SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TERAKHIR) 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	20	1	2	2	100,00	3,00	6,00	30,00
I.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala; 2. Tingginya komitmen Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; 3. Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD.									
II.	Faktor penghambat keberhasilan kinerja : 1. Banyaknya kendala dalam penggunaan SIPD sebagai penatausahaan keuangan menyebabkan banyak sub kegiatan yang capaian keuangan tidak optimal; 2. Pengendalian internal PD belum optimal sehingga pelaksanaan kegiatan belum sesuai target; 4.Adanya efisiensi belanja sehingga beberapa kegiatan harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang boleh digunakan.									

Sumber data : RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

Dari tabel di atas diperoleh hasil sebagaimana berikut :

1. Tidak terdapat realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
2. Tidak terdapat realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
3. Semua program sejumlah 4 (empat) program melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.2
Rekapitulasi Capain Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Program	Target	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	106,34	106,34
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	113,74	113,74
3.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	100	111,83	111,83
4.	Program Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan	91,83	92,85	101,11

Sumber data : RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

4. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/ kegiatan adalah :
   - ✓ Pelaksanaan program/kegiatan berjalan lebih efektif dan efisien dari yang diperkirakan;
   - ✓ Terdapat optimalisasi anggaran dan sumber daya;
   - ✓ Adanya bantuan dari pihak ketiga (LSM, swasta, atau masyarakat);
   - ✓ Antusiasme dan keterlibatan masyarakat lebih tinggi dari perkiraan;
   - ✓ Inovasi atau digitalisasi mempercepat pelaksanaan dan memperluas jangkauan kegiatan;
   - ✓ Tenaga pelaksana yang kompeten dan memiliki semangat kerja tinggi;
   - ✓ Pengawasan ketat dan tindak lanjut cepat atas hambatan, sehingga program lebih cepat mencapai hasil;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah:
   - ✓ Capaian yang melebihi target dapat mencerminkan kinerja organisasi yang baik, efisien, dan efektif;
   - ✓ Keberhasilan melebihi target berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah;

- ✓ Keberhasilan melebihi target berpotensi meningkatkan dukungan anggaran lebih besar;
- ✓ Kinerja yang melampaui target dapat dijadikan dasar untuk penyesuaian target (revisi Renstra) agar lebih realistis dan progresif di tahun berikutnya;
- ✓ Kinerja yang melampaui target tentunya berkonstribusi positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk lebih meningkatkan lagi capaian program kegiatan yang sudah melebihi target adalah:
   - ✓ Menyusun target tahunan yang lebih dinamis, realistis, namun tetap progresif berdasarkan capaian tahun sebelumnya dan potensi sumber daya;
   - ✓ Mengoptimalkan pemanfaatan data dan *evidence-based planning* untuk penentuan target dan strategi;
   - ✓ Membangun kemitraan antar perangkat daerah dan dengan stakeholder eksternal;
   - ✓ Peningkatan kompetensi ASN dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan;
   - ✓ Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk efektivitas pelaksanaan program;
   - ✓ Meningkatkan sistem monev yang responsif untuk mengidentifikasi percepatan dan hambatan pencapaian target.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Ada beberapa indikator kinerja yang menjadi dasar Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah. Secara umum capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana yang ditargetkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026 dapat tercapai dengan baik.

Berikut ini disajikan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun tahun 2024 (n-2) serta tahun 2025 (tahun n-1) serta capaian proyeksi tahun 2026 (tahun n) dan tahun 2027 (tahun n+1)

Tabel II.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (Tahun n-2)	Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tahun 2026 (Tahun n)	Tahun 2027 (Tahun n+1)	Tahun 2024 (Tahun n-2)	Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tahun 2026 (Tahun n)	Tahun 2027 (Tahun-n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)											
1	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama Tahun -n		IKK	0	0	0		0	N/A	0		Pada tahun 2024 realisasi capaian 0 (nol), sedangkan tahun 2025 belum ada angka realisasi capaian yang bisa disajikan, sedangkan tahun 2026 ditargetkan juga 0 (nol)
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif tahun -n		IKK	0,15	0,64	0,59		0,15	N/A	0,59		Realisasi capaian tahun 2024 sesuai target, untuk tahun 2025 realiasi capaian belum tersedian/ belum bisa disajikan
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		IKK	100,00	100,00	100,00		100,00	N/A	100,00		Realisasi capaian tahun 2024 sesuai target, untuk tahun 2025 realisasi capaian belum tersedia/ belum bisa disajikan
4	Prosentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemeintah Daerah		IKK	68,60	69,00	69,50		68,60	N/A	69,50		Realisasi capaian tahun 2024 sesuai target, untuk tahun 2025 capaian realisasi belum tersedia/ belum bisa disajikan
	Indikator Kinerja Perangkat Daerah											
1	Persentase peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah			100,00	100,00	100,00		107,29	61,46	100,00		Realisasi capaian tahun 2024 melebihi target, sedangkan untuk capaian tahun 2025 data s.d Tw II
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			85,10	85,20	85,30		84,813	N/A	85,30		Realisasi capaian 2024 dibawah target, sehingga diperlukan upaya-upaya perbaikan ke depannya terutama pada fasilitas layanan umum, sedangkan untuk tahun 2025 data belum tersedia / belum bisa disajikan
3	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah			100,00	100,00	100,00		100,00	N/A	100,00		Realisasi capaian 2024 mencapai target sedangkan untuk tahun 2025 data belum tersedia/ belum bisa disajikan

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (Tahun n-2)	Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tahun 2026 (Tahun n)	Tahun 2027 (Tahun n+1)	Tahun 2024 (Tahun n-2)	Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tahun 2026 (Tahun n)	Tahun 2027 (Tahun-n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Kinerja Program											
1	Persentase Peningkatan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			94,91	97,45	100,00		105,82	47,69	100,00		Capaian realisasi tahun 2024 dapat melebihi target yang telah rencanakan, untuk tahun 2025 realisasi capaian s.d Tw II
2	Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan			100,00	100,00	100,00		108,33	18,97	100,00		Capaian realisasi tahun 2024 dapat melebihi target yang telah rencanakan, untuk tahun 2025 realisasi capaian s.d Tw II
3	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan			92,77	91,92	92,00		92,85	0,00	92,00		Capaian realisasi tahun 2024 dapat melebihi target yang telah direncanakan, capaian realisasi tahun 2025 s.d Tw II
4	Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota			100,00	100,00	100,00		106,34	48,78	100,00		Capaian realisasi tahun 2024 dapat melebihi target yang telah direncanakan, capaian realisasi tahun 2025 s.d Tw II

Sumber data : Sekretariat Daerah, 2025

Dari tabel di atas yang terdiri dari Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Program, pada tahun 2024 telah mencapai target bahkan beberapa ada yang melebihi target, ini menggabarkan bahwa kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan berjalan dengan sangat baik, ditunjang dengan adanya koordinasi internal dan eksternal juga berjalan dengan baik. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Perangkat Daerah ada 1 (satu) indikator yang tidak tercapai adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), ada beberapa indikator penilaian yang masih kurang memuaskan terutama pada sarana prasarana layanan, sehingga perlu ada perbaikan secara bertahap untuk ke depannya. Untuk realisasi capaian tahun 2025 (tahun berjalan) sebagian bisa disajikan s.d triwulan II namun ada juga yang harus menunggu sampai dengan tahun anggaran berakhr.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam pelaksanaan tupoksi tentunya terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana berikut :

a. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencaaan pembangunan dan mekanisme pendanaan daerah;
b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
c. Keterbatasan SDM ASN dan penempatan aparatur belum sesuai dengan keahliannya;
d. Masih terdapatnya tumpang tindih tusi antar perangkat daerah.

Permasalahan dan hambatan di atas apabila tidak segera diatasi tentunya akan sangat berdampak pada capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah yang terdiri dari IKK, IK Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program yang selanjutnya juga akan berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selain permasalahan dan hambatan di atas Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo juga memiliki tantangan. Tantangan merupakan situasi yang mengancam bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Penataan Kelembagaan yang sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan tata kelola pelayanan publik;
c. Optimalisasi tata kelola pemerintahan;
d. Peningkatan pendayagunaan sumber daya aparatur daerah dalam rangka memenuhi tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima *(service excellent) ;*

e. Responsibilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam menyikapi perubahan kebijakan dari pemerintah pusat;
f. Peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang profesional dan handal;
g. Optimalisasi kualitas dan kuantitas produk kebijakan bidang pemerintahan/ kesra dan bidang perekonomian dan pembangunan;
h. Peningkatan kapasitas pengelola BUMD dan Lembaga Keuangan.

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

a. Adanya dukungan dan arahan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja sekretariat daerah;
b. Adanya landasan hukum yang kuat sebagai dasar perumusan kebijakan daerah;
c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dapat dihimpun sebagai bahan perumus kebijakan;
d. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh komponen perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan organisasi;
e. Adanya berbagai mega proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kulon Progo;
f. Adanya konsistensi dan kreatifitas seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi;
g. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan memungkinkan dukungan positif bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
h. Adanya kerja sama antar pemerintah daerah yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :

1. Optimalisasi kinerja pemerintah daerah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Optimalisasi kualitas layanan publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Optimalisasi penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
4. Optimalisasi penyusunan perumusan dan monev kebijakan;
5. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui digitalisasi; dan
6. Meningkatkan kolaborasi antar sektor/ *stakeholders*.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target rencana strategis perangkat daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/ kegiatan/ subkegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap perangkat daerah berdasarkan RKPD.

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD meliputi : identifikasi prioritas, indikator kinerja, tolok ukur atau target, serta pagu indiktif program/ kegiatan/ subkegiatan. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD sebagaimana pada tabel II.4 berikut :

Tabel II.4

Reviev Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Kulon Progo

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sekretariat Daerah				**29.949.651.820,00**	**Sekretariat Daerah**				**23.396.591.658,00**	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**29.949.651.820,00**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**23.396.591.658,00**	
	SEKRETARIAT DAERAH				**29.949.651.820,00**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**23.396.591.658,00**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100 %**	**22.411.525.720,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***1. Persentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi ; 2. Persentase fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan; 3.Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi ; 4. Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota***	**100 %**	**18.305.844.731,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu**	**23 Dokumen**	**37.600.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**2 dokumen**	**13.797.800,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.250.900,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	12.600.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	5.546.900,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**14 Laporan**	**10.311.842.000,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**3 dokumen**	**9.701.028.522,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 Orang/bulan	10.110.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 orang	9.548.259.122,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	190.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	146.200.000,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	11.842.000,00	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	6.569.400,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**	**1 Dokumen**	**7.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**1 Dokumen**	**7.000.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	7.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	7.000.000,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**	**2 Dokumen**	**1.641.000.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**2 Dokumen**	**1.078.770.100,00**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	441.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	425.162.600,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.200.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	653.607.500,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah Penambahan Aset	**50 Unit**	**2.000.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**1 Dokumen**	**74.614.352,00**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	2.000.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	74.614.352,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**24 Laporan**	**2.750.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**2 Dokumen**	**3.015.003.957,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	800.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	734.945.501,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.950.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.280.058.456,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**3 Laporan**	**2.610.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**3 Dokumen**	**2.016.947.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84 Unit	1.260.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit	962.096.100,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	900.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	706.241.800,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	425 Unit	450.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	240 Unit	348.609.100,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional**	**3 Laporan**	**966.155.720,00**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**4 Dokumen**	**924.630.300,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	181.155.720,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	178.797.000,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	160.000.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	129.790.100,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	25.000.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	16.043.200,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40 Orang/Bulan	600.000.000,00	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang/Bulan	600.000.000,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		**Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan**	**3 Laporan**	**503.500.000,00**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**3 Dokumen**	**360.553.400,00**	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	262.500.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	197.435.100,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	220.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	147.995.900,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	21.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	15.122.400,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penataan Organisasi		**Jumlah Dokumen Penataan Organisasi**	**9 Dokumen**	**380.000.000,00**	**Penataan Organisasi**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**3 Dokumen**	**155.324.800,00**	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	86.000.000,00	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	45.500.000,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	190.000.000,00	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	52.000.000,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7 Dokumen	104.000.000,00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	8 Dokumen	57.824.800,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		**Jumah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi**	**12 Laporan**	**1.204.428.000,00**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**1 Dokumen**	**958.174.500,00**	
	Fasilitasi Keprotokolan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	1.204.428.000,00	Fasilitasi Keprotokolan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	958.174.500,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**97,45%**	**5.389.756.100,00**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**1. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; 2. Persentase perumusan dan monev kebijakan pemerintahan, dokumen kerjasama dan laporan pemerintahan; 3. Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat**	**100,00%**	**4.426.697.200,00**	
	Administrasi Tata Pemerintahan		**Jumlah Dokumen Tata Pemerintahan**	**12 Dokumen**	**975.101.100,00**	**Administrasi Tata Pemerintahan**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**3 Dokumen**	**541.402.000,00**	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	400.000.000,00	Penataan Administrasi Pemerintahan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	254.993.700,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	238.000.000,00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	133.414.200,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	337.101.100,00	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	152.994.100,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		**Jumlah Dokumen Kebijakan Kesra**	**26 Dokumen**	**2.947.000.000,00**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**3 Dokumen**	**2.715.758.400,00**	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11 Dokumen	1.500.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	1.485.700.000,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11 Dokumen	1.300.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	9 Dokumen	1.116.801.300,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	147.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	113.257.100,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		**Jumlah Dokumen Fasilitasi Hukum**	**480 Dokumen**	**1.421.655.000,00**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**3 Dokumen**	**1.133.003.500,00**	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	480 Dokumen	135.585.000,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	420 Dokumen	80.992.700,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Bantuan Hukum	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	1.128.750.000,00	Fasilitasi Bantuan Hukum	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	984.189.600,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	480 Dokumen	157.320.000,00	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	420 Dokumen	67.821.200,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		**Fasilitasi Kerjasama**	**4 Dokumen**	**46.000.000,00**	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**1 Dokumen**	**36.533.300,00**	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	46.000.000,00	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	36.533.300,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan**	**100 %**	**1.548.370.000,00**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**1. Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian; 2. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 3. Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan**	**100 %**	**592.555.727,00**	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**17 Dokumen**	**318.752.000,00**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**2 Dokumen**	**209.520.127,00**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	162.467.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	108.483.127,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	156.285.000,00	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	101.037.000,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**13 Laporan**	**344.425.000,00**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**3 Dokumen**	**83.135.400,00**	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	111.300.000,00	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	37.781.800,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 Laporan	119.025.000,00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	27.289.300,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	114.100.000,00	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	18.064.300,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**149 Dokumen**	**551.188.000,00**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**3 Dokumen**	**229.355.200,00**	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	149 Dokumen	367.500.000,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60 Dokumen	150.951.100,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	83.500.000,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	33.569.800,000	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	240 Orang	100.188.000,00	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	240 Orang	44.834.300,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		**Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**12 Dokumen**	**334.005.000,00**	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**3 Dokumen**	**70.545.000,00**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	6 Dokumen	111.335.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	18.136.000,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	111.335.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	22.409.000,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	3 Dokumen	111.335.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	30.000.000,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan**	**91,92%**	**600.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Kematangan Perangkat Daerah; Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**49,05 ; 100 Nilai Kemat angan ; %**	**71.494.000,00**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		**Jumlah Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota**	**8 Lembaga**	**425.000.000,00**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**2 Dokumen**	**53.994.000,00**	
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	8 Lembaga	300.000.000,00	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	18 Lembaga	28.122.000,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1 Dokumen	125.000.000,00	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1 Dokumen	25.872.000,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan
	Peningkatan Budaya Pemerintahan		**Implementasi Budaya Pemerintahan Kulon Progo**	**5 dokumen**	**175.000.000,00**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**		**Laporan Pelaksanaan Subkegiatan**	**1 Dokumen**	**17.500.000,00**	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	175.000.000,00	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	- Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	17.500.000,00	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan meyesuaikan kebutuhan

Sumber Data : Ranwal RKPD kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dan RKPD Kulon Progo Tahun 2026

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo salah satunya mempunyai tugas dan wewenang menyalurkan bantuan /hibah berupa uang. Hibah yang disalurkan terdapat beberapa mekanisme berupa : usulan dari masyarakat melalui proposal yang ditujukan langsung kepada bupati, dari pokok-pokok pikiran dewan dan dari hasil musyawarah rencana pembangunan kapanewon. Usulan-usulan tersebut selanjutnya diverifikasi oleh mitra Bapperida dan perangkat daerah dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Usulan yang lolos verifikasi/ memenuhi syarat selanjutnya diinput dalam RKA/ DPA Sekretariat Daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Khusus untuk hibah masjid tidak dapat diberikan secara berturut-turut untuk setiap tahunnya, hal ini mengingat cukup banyaknya jumlah masjid yang ada di Kabupaten Kulon Progo sehingga perlu adanya pemerataan. Adapun hibah yang akan disalurkan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel II.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Kulon Progo

No	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Lokasi	Pada tahun anggaran 2026 TAPD Kulon Progo mengalokasikan 4 (empat) gereja untuk mendapat hibah bantuan berupa uang. Bantuan kepada 5 (lima) gereja ini telah melalui proses verifikasi dari Mitra Bappeda dan perangkat daerah pengampu (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo).dengan jumlah bantuan kepada gereja masing-masing Rp15.000.000,00 per tahun
				35 Lokasi	Pada tahun anggaran 2026 TAPD Kulon Progo mengalokasikan 35 (tiga puluh lima) masjid untuk mendapat hibah bantuan berupa uang. Bantuan kepada 35 (tiga pulih lima) masjid ini telah melalui proses verifikasi dari Mitra Bappeda dan perangkat daerah pengampu (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo), jumlah bantuan kepada masjid masing-masing Rp15.000.000,00 per tahun
				10 Lokasi	Pada tahun anggaran 2025 TAPD Kulon Progo mengalokasikan 10 (sepuluh) lokasi pondok pesantren untuk mendapat hibah bantuan berupa uang. Bantuan kepada 10 (sepuluh) pondok pesantren ini berasal dari usulan masyarakat dan telah melalui proses verifikasi dari Mitra Bappeda dan perangkat daerah pengampu (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo). Pondok pesantren mendapat bantuan masing-masing Rp10.000.000,00 per tahun
				1 Lokasi	Pada tahun anggaran 2025 TAPD Kulon Progo mengalokasikan 1 (satu) lokasi vihara untuk mendapat hibah bantuan berupa uang. Bantuan kepada 1 (satu) vihara ini berasal dari usulan masyarakat dan telah melalui proses verifikasi dari Mitra Bappeda dan perangkat daerah pengampu (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo). Vihara ini mendapat bantuan senilai Rp15.000.000,00 per tahun
				15 Lokasi	Pada tahun anggaran 2025 TAPD Kulon Progo mengalokasikan 15 (lima belas) lokasi madarasah tsanawiyah untuk mendapat hibah bantuan berupa uang. Bantuan kepada 15 (satu) vihara ini berasal dari usulan masyarakat dan telah melalui proses verifikasi dari Mitra Bappeda dan perangkat daerah pengampu (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo). Madrasah tsanawiyah ini mendapat bantuan senilai masing-masing Rp5.000.000,00 per tahun
				1 lokasi	Pada tahun anggaran 2025 TAPD Kulon Progo mengalokasikan hibah kepada PMI Kulon Progo berupa uang senilai Rp75.000.000,00 per tahun
				200 anak	Pada tahun anggaran 2025 TAPD Kulon Progo mengalokasikan bantuan sosial berupa uang kepada 200 (dua ratus) anak yatim piyatu yang merupakan usulan dari masyarakat dan telah diverifikasi oleh perangkat daerah pengampu (Setda), masing-masing anak mendapat bantuan uang senilai Rp1.000.000,00 per tahun

Sumber data : Bagian Kesejahtearaan Rakyat Setda Kabupaten Kulon Progo, 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 yang disusun berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (RKP Tahun 2026) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026 meliputi:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dari prioritas nasional di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan di daerah harus mampu mengikuti perkembangan-perkembangan nasional, seluruh kebijakan yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo harus selaras dan mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Adapun kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai atau menghambat harus segera dihapus/direvisi. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis juga perlu adanya koordinasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Segala hambatan, perkembangan, permasalahan yang dihadapi perangkat daerah teknis harus dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2025-2029

VISI:							
TERWUJUDNYA KULON PROGO YANG MAKMUR, MANDIRI, RELIGIUS, BERBUDAYA YANG BERKELANJUTAN							
MISI		**TUJUAN**		**SASARAN**		**INDIKATOR**	
M1	**MEWUJUDKAN MASYARAKAT KULON PROGO MAKMUR, BERBUDAYA DAN RELIGIUS**	M1.T1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	M1.T1.S1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	M1.T1.S1.I1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
						M1.T1.S1.I2	Usia Harapan Hidup (UHH)
				M1.T1.S2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	M1.T1.S2.I1	Harapan Lama Sekolah (HLS)
		M1.T2	Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kulon Progo	M1.T2.S1	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	M1.T2.S1.I1	Tingkat Kemiskinan
						M1.T2.S1.I2	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan
		M1.T3	Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius	M1.T3.S1	Meningkatnya Peran Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	M1.T3.S1.I1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
						M1.T3.S1.I2	Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan
M2	**MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING DAERAH SERTA MENCIPTAKAN PEMERATAAN EKONOMI**	M2.T1	Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah	M2.T1.S1	Meningkatnya Kemandirian Daerah	M2.T1.S1.I1	Pertumbuhan Ekonomi
						M2.T1.S1.I2	Pembentukan Modal Tetap Bruto
				M2.T1.S2	Meningkatnya Daya Saing Daerah	M2.T1.S2.I1	PDRB Per Kapita (ADHB)
						M2.T1.S2.I2	Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum
						M2.T1.S2.I3	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan
		M2.T2	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah	M2.T2.S1	Menurunnya Pengangguran	M2.T2.S1.I1	Rasio Gini
						M2.T2.S1.I2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	
M3	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG GOOD GOVERNANCE, ASPIRATIF SERTA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN DAN DEMOKRATIS	M3.T1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	M3.T1.S1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	M3.T1.S1.I1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)
						M3.T1.S1.I2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)
						M3.T1.S1.I3	Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK)
						M3.T1.S1.I4	Indeks Kepuasan Masyarakat
						M3.T1.S1.I5	Indeks Maturitas SPIP
		M3.T2	Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis	M3.T2.S1	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	M3.T2.S1.I2	Crime Rate
						M3.T2.S1.I3	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA
M4	MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN TANGGUH BENCANA	M4.T1	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	M4.T1.S1	Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang	M4.T1.S1.I1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
						M4.T1.S1.I2	Persentase Kesesuaian Pola Ruang
				M4.T1.S2	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah	M4.T1.S2.I1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
		M4.T2	Meningkatnya Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana	M4.T2.S1	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	M4.T2.S1.I1	Tingkat Pelayanan Jalan (level of service)
						M4.T2.S1.I2	Indeks Risiko Bencana
						M4.T2.S1.I3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
				M4.T2.S2	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	M4.T2.S2.I1	Indeks Ketahanan Daerah

Sumber : RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 di atas, sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo berkonstribusi sebagai berikut :

Tabel III.2

Konstribusi Sekretariat Daerah terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025- 2029

Visi							
Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius Bebudaya dan Berkelanjutan							
Misi		Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	
M3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Good Gorvenance, Aspiratis serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.	M3.T1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	M3.T1.S1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel.	M3.T1.S1.I1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP).
						M3.T1.S1.I2	Indeks Maturitas SPIP

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sekaligus mendasar pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

Tabel III.3

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA
I	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,30)
			Indreks Maturitas SPIP	Nilai	3,231
1		Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai/ Kategori	Sedang (3,3274)
			Nilai Kinerja TPID	Nilai	95,00
			Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Nilai	12,73
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	82,70
2		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,10
3		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
4		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 - 3,0

Sumber : RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 terdapat 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator sasaran, target tahun 2026 yang ditetapkan sedikit di atas capaian tahun 2024 dan target tahun 2025, hal ini guna memacu Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo terus meningkatkan kinerjanya.

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada dasarnya diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini mencakup 4 (empat) program dan sumber dana program/kegiatan/subkegiatan dari APBD Kabupaten dan APBD DIY, dengan pagu total senilai Rp.23.396.591.658,00, dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.4
Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi	%	100
		Persentase Fasilitasi Layanan Keprotokolan dan Kerumahtanggaan Pimpinan	%	100
		Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%	100
		Persentase Perumusan dan Monev Kebijakan Pemerintahan, Dokumen Kerjasama dan Laporan Pemerintahan	%	100
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat	%	100
3.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	%	100
		Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	100
		Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	%	100

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
4.	Program Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan	Persentase Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo	%	N/A
		Kematangan Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi	49,07
		Indeks Rata-rata Hasil Evaluasi Kinerja 12 Kapanewon	Nilai	N/A
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan dengan Regulasi	%	100

Sumber data : RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2026 terdapat 4 (empat) program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja program, target yang ditetapkan berdasarkan capaian tahun 2024 dan target tahun 2025.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, lokasi pelaksanaan, target capaian, dan kebutuhan pendanaan Dokumen ini menjadi bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Adapun Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

TABEL IV.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SEKRETARIAT DAERAH KAB. KULON PROGO TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						**23.396.591.658,00**							**26.172.969.690,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**23.396.591.658,00**							**26.172.969.690,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**23.396.591.658,00**							**26.172.969.690,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. Persentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi ; 2. Persentase fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan; 3.Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi ; 4. Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota***	-			**100; 100, 100, 100 %**	**18.305.844.731,00**						**-**	**20.293.985.696,25**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 dokumen	13.797.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	23.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8.250.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		10.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	5.546.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		12.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 dokumen	9.701.028.522,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Setda, Penatausaha Keuangan dan Barang Setda	-	10.242.895.658,10	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				133 Orang/bulan	9.548.259.122,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Setda, Penatausaha Keuangan dan Barang Setda		10.045.664.078,10	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	146.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Setda, Penatausaha Keuangan dan Barang Setda		186.165.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	6.569.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN Setda, Penatausaha Keuangan dan Barang Setda		11.066.580,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 dokumen	7.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	-	8.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	7.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	ASN Lingkup Sekretariat Daerah		8.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 dokumen	1.078.770.100,00			Membangun desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah	-	1.611.232.665,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	425.162.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah		517.507.515,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	653.607.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah		1.093.725.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 dokumen	74.614.352,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Lingkup Sekretariat Daerah	-	210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	74.614.352,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Lingkup Sekretariat Daerah		210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 dokumen	3.015.003.957,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Lingkup Sekretariat Daerah	-	3.001.744.780,65	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	734.945.501,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Lingkup Sekretariat Daerah		807.824.888,85	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.280.058.456,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Sekretariat Daerah		2.193.919.891,80	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 dokumen	2.016.947.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	2.254.875.671,50	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				72 Unit	962.096.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		1.061.311.282,50	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	706.241.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		912.961.119,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				240 Unit	348.609.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		280.603.470,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			4 dokumen	924.630.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati dan Wakil Bupati	-	1.015.557.921,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	178.797.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati dan Wakil Bupati		190.213.506,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				9 Paket	129.790.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati dan Wakil Bupati		178.499.055,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	16.043.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati dan Wakil Bupati		16.845.360,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				10 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati dan Wakil Bupati		630.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 dokumen	360.553.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretariat Daerah	-	405.177.780,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	197.435.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretariat Daerah		223.428.870,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	147.995.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretariat Daerah		161.260.680,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	15.122.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretariat Daerah		20.488.230,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Dokumen Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 dokumen	155.324.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo	-	261.001.020,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	45.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		78.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				5 Laporan	52.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		92.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				8 Dokumen	57.824.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		89.851.020,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 dokumen	958.174.500,00			Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	1.260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 dokumen	958.174.500,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	1.260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	958.174.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo		1.260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2,	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***1. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; 2. Persentase perumusan dan monev kebijakan pemerintahan, dokumen kerjasama dan laporan pemerintahan; 3. Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat***	-			**100%; 100%; 100%**	**4.426.697.200,00**						-	**4.876.819.907,40**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 dokumen	541.402.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon	-	707.039.340,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	254.993.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon		290.453.625,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				4 Dokumen	133.414.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon		169.509.060,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	152.994.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon		247.076.655,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 dokumen	2.715.758.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan	-	2.805.227.027,40	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spirituel				10 Dokumen	1.485.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan		1.363.173.840,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				9 Dokumen	1.116.801.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan		1.293.207.930,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	113.257.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan		148.845.257,40	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 dokumen	1.133.003.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolahan	-	1.320.365.865,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				420 Dokumen	80.992.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolahan		125.370.735,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				12 Kasus	984.189.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolahan		1.079.581.230,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				420 Dokumen	67.821.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolahan		115.413.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 dokumen	36.533.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemkab Kulon Progo	-	44.187.675,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				4 Dokumen	36.533.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemkab Kulon Progo		44.187.675,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***1. Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian; 2. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 3. Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan***	-			**100%; 100%; 100%**	**592.555.727,00**						-	**927.095.386,35**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 dokumen	209.520.127,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Koperasi, UMKM, BUMDesa, OPD Terkait, BUMD, BLUD, LKD	-	261.007.978,35	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				5 Dokumen	108.483.127,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Koperasi, UMKM, BUMDesa, OPD Terkait, BUMD, BLUD, LKD		129.832.423,35	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				12 Dokumen	101.037.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Koperasi, UMKM, BUMDesa, OPD Terkait, BUMD, BLUD, LKD		131.175.555,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 dokumen	83.135.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Terkait	-	123.637.290,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	37.781.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Terkait		45.152.940,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	27.289.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Terkait		46.984.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	18.064.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Terkait		31.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 dokumen	229.355.200,00			Membangun dan desa dan dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo	-	336.473.025,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				60 Dokumen	150.951.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		226.600.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	33.569.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		54.008.430,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				240 Orang	44.834.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		55.864.095,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 dokumen	70.545.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Perangkat Daerah Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani Hutan	-	205.977.093,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				4 Dokumen	18.136.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Perangkat Daerah Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani Hutan		153.477.093,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	22.409.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Perangkat Daerah Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani Hutan		21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Perangkat Daerah Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani Hutan		31.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Kematangan Perangkat Daerah; Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi***	-			**49,05 ; 100 Nilai Kematangan ; %**	**71.494.000,00**						-	**75.068.700,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 dokumen	53.994.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo	-	56.693.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				18 Lembaga	28.122.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		29.528.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	25.872.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		27.165.600,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 dokumen	17.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, Pamong Kalurahan, Pejabat Struktural	-	18.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, Pamong Kalurahan, Pejabat Struktural		18.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			JUMLAH					**23.396.591.658,00**							**26.172.969.690,00**	

Sumber data : RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara terarah, bertahap dan berkesinambungan serta mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Dalam hal ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dapat berdampak pada tidak tercapainya target-target yang telah ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang akhirnya berdampak juga pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, selain itu Rencana Kerja Tahun 2026 ini juga digunakan sebagai dasar Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Evaluasi dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan penyusunan rencana dimasa yang akan datang oleh para pimpinan dan seluruh komponen Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dibuat dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya karena mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dibebankan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Wates, 29 Juli 2025
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kulon Progo



TRIYONO, S.IP, M.SI.
Pembina Utama Madya; IV/d
NIP. 196611151966031002

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KULON PROGO

2026

RENCANA KERJA

0274 - 773271

@humassetwan.kulonprogo setwan.kulonprogokab.go.id Setwan Kulon Progo @humassetwan_kp

RENCANA KERJA
TAHUN 2026

SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Jl. Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, DI Yogyakarta,
Telp. (0274) 773271, Fax. (0274) 773271
E-mail : setwan@kulonprogokab.go.id, Website : setwan.kulonprogokab.go.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

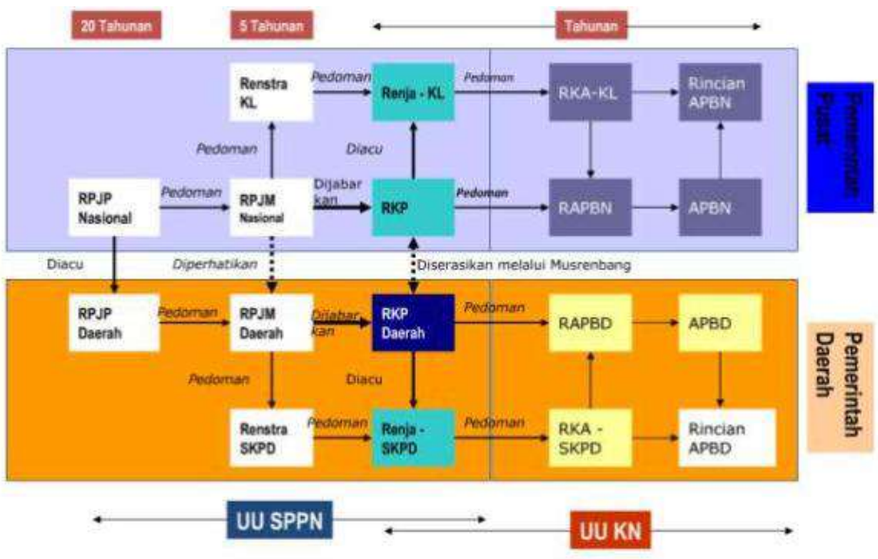
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas enam tahapan yaitu :

- ✓ persiapan penyusunan
- ✓ penyusunan rancangan awal
- ✓ penyusunan rancangan
- ✓ penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- ✓ penyusunan
- ✓ penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD disusun berpedoman pada RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 dan mendasar pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang tertuang dalam RKPD.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2026 dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Alur Perencanaan dan Penganggaran

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 mendasarkan pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-undang (UU) Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yograkarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 7 tahun 2024);

10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2026 adalah menjamin keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan serta sub kegiatan di Sekretariat DPRD.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2026 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo, untuk mengukur tercapainya kinerja yang digunakan sebagai evaluasi, sehingga bisa digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun Sistematika Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Realisasi keuangan program dan kegiatan tahun 2024 mencapai 93,41% dan realisasi fisik mencapai 100%. Secara umum, semua kegiatan telah berjalan lancar dan memenuhi target yang telah ditetapkan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.1

Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2024

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / SUB KEGIATAN (Output)	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN (Rp.)			
						TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
SEKRETARIAT DPRD (UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN)									**49.186.415.014**	**45.946.021.375**	**22.575.035.139**	**93,41**
1				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**100**	**100**	**100**	**24.484.426.058**	**23.927.706.147**	**556.719.911**	**97,73**
	1			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu**	**Dokumen**	**23**	**23**	**100**	**17.249.400**	**17.075.240**	**174.160**	**98,99**
		1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100	9.612.700	9.530.620	82.080	99,15
		2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	21	100	7.636.700	7.544.620	92.080	98,79
	2			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**Laporan**	**14**	**14**	**100**	**2.121.338.004**	**2.051.534.778**	**69.803.226**	**96,71**
		3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	29	29	100	2.062.002.504	1.993.568.245	68.434.259	96,68
		4		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100	50.948.200	49.683.313	1.264.887	97,52
		5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	14	100	8.387.300	8.283.220	104.080	98,76
	3			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**	**Dokumen**	**2**	**2**	**100**	**15.771.300**	**15.709.288**	**62.012**	**99,61**
		6		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	2	100	3.051.300	2.989.288	62.012	97,97
		7		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	8	100	12.720.000	12.720.000	-	100,00
	4			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi umum**	**Dokumen**	**24**	**24**	**100**	**190.539.100**	**179.458.078**	**11.081.022**	**94,18**
		8		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	110.564.100	101.072.654	9.491.446	91,42
		9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	79.975.000	78.385.424	1.589.576	98,01
	5			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**Unit**	**501**	**501**	**100**	**132.820.800**	**131.220.000**	**1.600.800**	**98,79**
		10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penambahan Aset	Unit	501	501	100	132.820.800	131.220.000	1.600.800	98,79
	6			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**	**Laporan**	**24**	**24**	**100**	**550.562.800**	**516.049.367**	**34.513.433**	**93,73**
		11		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	200.753.944	175.798.511	24.955.433	87,57
		12		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	349.808.856	340.250.856	9.558.000	97,27
	7			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	**Laporan**	**2**	**2**	**100**	**1.498.422.800**	**1.404.173.491**	**94.249.309**	**93,71**
		13		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	25	100	719.692.000	648.699.983	70.992.017	90,14
		14		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100	684.040.100	678.752.900	5.287.200	99,23
		15		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	90	90	100	94.690.700	76.720.608	17.970.092	81,02
	8			**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Jumlah dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Dokumen**	**14**	**14**	**100**	**19.827.324.854**	**19.500.336.066**	**326.988.788**	**98,35**
		16		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	40	40	100	19.236.419.654	19.071.978.242	164.441.412	99,15
		17		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	200	200	100	553.905.200	406.157.824	147.747.376	73,33
		18		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	40	24	60	37.000.000	22.200.000	14.800.000	60,00
	9			**Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah dokumen Layanan Administrasi DPRD**	**Dokumen**	**6**	**6**	**100**	**130.397.000**	**112.149.839**	**18.247.161**	**86,01**
		19		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	6	6	100	130.397.000	112.149.839	18.247.161	86,01

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) / SUB KEGIATAN (Output)	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN (Rp.)			
						TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**%**	**100**	**100**	**100**	**24.701.988.956**	**22.018.315.228**	**22.018.315.228**	**89,14**
	10		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Dokumen**	**14**	**14**	**100**	**3.964.649.900**	**3.534.796.231**	**3.534.796.231**	**89,16**
		20	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	2	2	100	291.678.700	263.856.971	27.821.729	90,46
		21	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	8	8	100	2.843.682.300	2.479.833.627	363.848.673	87,21
		22	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	1	1	100	290.238.800	277.387.194	12.851.606	95,57
		23	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	3	3	100	539.050.100	513.718.439	25.331.661	95,30
	11		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah Dokumen kebijakan anggaran yang dibahas**	**Dokumen**	**6**	**6**	**100**	**3.615.011.800**	**3.319.682.758**	**3.319.682.758**	**91,83**
		24	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	6	6	100	3.615.011.800	3.319.682.758	295.329.042	91,83
	12		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan**	**Dokumen**	**14**	**14**	**100**	**4.756.940.300**	**4.145.957.708**	**4.145.957.708**	**87,16**
		25	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	1	100	386.497.900	337.374.540	49.123.360	87,29
		26	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	12	12	100	3.746.528.800	3.194.438.598	552.090.202	85,26
		27	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	1	100	623.913.600	614.144.570	9.769.030	98,43
	13		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah Dokumen peningkatan kapasitas DPRD dan Publikasi Kinerja DPRD**	**Dokumen**	**210**	**210**	**100**	**2.891.946.400**	**2.716.945.341**	**2.716.945.341**	**93,95**
		28	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	1	100	356.307.500	343.508.385	12.799.115	96,41
		29	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	3	3	100	1.521.834.100	1.374.776.567	147.057.533	90,34
		30	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	206	206	100	1.013.804.800	998.660.389	15.144.411	98,51
	14		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah dokumen penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Dokumen**	**5**	**5**	**100**	**581.407.800**	**527.165.868**	**527.165.868**	**90,67**
		31	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	5	5	100	581.407.800	527.165.868	54.241.932	90,67
	15		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Laporan**	**4**	**4**	**100**	**159.791.500**	**151.168.846**	**151.168.846**	**94,60**
		32	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	4	4	100	159.791.500	151.168.846	8.622.654	94,60
	16		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Dokumen**	**8**	**8**	**100**	**2.506.109.600**	**2.406.853.164**	**2.406.853.164**	**96,04**
		33	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	8	8	100	2.506.109.600	2.406.853.164	99.256.436	96,04
	17		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD**	**Dokumen**	**149**	**149**	**100**	**6.226.131.656**	**5.215.745.312**	**5.215.745.312**	**83,77**
		34	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	39	39	100	2.058.812.200	1.609.569.301	449.242.899	78,18
		35	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	91	91	100	1.898.301.456	1.755.806.510	142.494.946	92,49
		36	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	13	13	100	315.192.700	292.746.576	22.446.124	92,88
		37	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	6	6	100	1.953.825.300	1.557.622.925	396.202.375	79,72

Pada sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, target kinerja tidak tercapai, karena dari 40 kuota MCU, Anggota DPRD yang melakukan MCU sebanyak 24 orang. 16 orang tidak melakukan MCU karena kurangnya animo dan khawatir akan temuan kesehatan, serta sebagian lagi merasa belum mendesak untuk melakukan MCU.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;
2. Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
3. Komitmen dan Integritas yang tinggi dari Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Sekretariat DPRD dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
4. Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :

1. Adanya dinamika perubahan yang cepat atas regulasi yang ada dan materi yang akan dibahas, mempengaruhi ketepatan waktu penjadwalan kegiatan;
2. Capaian kinerja keuangan pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan belum optimal karena adanya kendala internal maupun eksternal serta keterlambatan pelaksanaan kegiatan triwulan sebelumnya;
3. Adanya tambahan tahapan dalam Pembahasan Raperda yaitu proses Pengharmonisasian, Pemantapan Konsepsi oleh Kemenkumham (sesuai UU No 13 Tahun 2022)

Tabel 2.1.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.02	SEKRETARIAT DPRD									
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 **%**							
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu**								
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	2	2	2	100	3	7	77,78
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77 Laporan	21	21	21	100	21	63	81,82
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**								
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/ Bulan	30	29	29	100	30	89	74,17
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	4	4	4	100	12	20	50,00
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	56 Laporan	14	14	14	100	14	42	75,00
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**								
4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	1	2	2	100		3	75,00
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan FungsI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	12	8	8	100	8	28	127,27
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi umum**								
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12	12	12	100	12	36	100,00
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	12	12	12	100	12	36	75,00
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penambahan aset**								
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	-	0	0	#DIV/0!	3	3	100,00
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2030 Unit	764	501	501	100	409	1.674	82,46
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**								
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	12	12	12	100	12	36	75,00
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	12	12	100	12	36	300,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	12	12	12	100	12	36	75,00
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**								
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	25	25	25	100	25	75	75,00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1	2	2	100	1	4	200,00
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	292 Unit	75	90	90	100	62	227	77,74
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Jumlah laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**								
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	160 Orang/ Bulan	40	40	40	100	40	120	75,00
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	560 Paket	80	200	200	100	80	360	64,29
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	160 Orang	4	40	24	60	40	68	42,50
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah laporan Layanan Administrasi DPRD**								
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30 Laporan	6	6	6	100	10	22	73,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
4.02.02	**ROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	100 **%**							
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**								
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	3	2	2	100	2	7	87,50
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	36 Dokumen	6	8	8	100	6	20	55,56
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	8 Dokumen	11	1	1	100	2	14	175,00
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	9 Dokumen	5	3	3	100	3	11	122,22
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas**								
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	24 Dokumen	6	6	6	100	6	18	75,00
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**								
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4 Dokumen	1	1	1	100	1	3	75,00
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	48 Dokumen	12	12	12	100	8	32	66,67
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4 Dokumen	1	1	1	100	1	3	75,00
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD dan Publikasi Kinerja DPRD**								
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	-	1	1	100	-	1	100,00
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	23 Dokumen	6	3	3	100	4	13	56,52
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	675 Dokumen	398	206	206	100	200	804	119,11
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**								
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	19 Dokumen	5	5	5	100	4	14	73,68
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD**								
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	16 Laporan	5	5	5	100	4	14	87,50
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah**								
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	16 Dokumen	8	8	8	100	4	20	125,00
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD**								
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	85 Dokumen	28	39	39	100	36	103	121,18
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	300 Dokumen	104	91	91	100	73	268	89,33
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	52 Dokumen	14	13	13	100	13	40	76,92
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	20 Dokumen	8	6	6	100	3	17	85,00

Pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas adanya faktor-faktor yang mendukung dan sangat membantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan adanya saling komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar bagian di Sekretariat DPRD dan juga dengan Eksekutif dan DPRD maupun pihak ketiga; Komitmen dan Integritas yang tinggi dari Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Sekretariat DPRD dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Tapi di sisi lain juga masih adanya beberapa faktor penghambat yaitu keterbatasan sarana prasarana dan pegawai, adanya dinamika perubahan yang cepat atas regulasi yang ada dan materi yang akan dibahas, mempengaruhi ketepatan waktu penjadwalan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD yang tugas pokoknya adalah memberikan dukungan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dimana kondisi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang mempunyai latar belakang pendidikan, usia, partai politik yang berbeda-beda serta mempunyai tugas dan fungsi yang sangat berat karena sebagai wakil rakyat maka harus betul-betul didukung oleh keberadaan Sekretariat DPRD dengan sumber daya yang mempunyai kompetensi yang memadai dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai pula.

Pelayanan diupayakan dapat dilaksanakan secara optimal dengan memberdayakan sumber daya yang ada tersebut, sehingga tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan efektif dan efisien.

Capaian indikator kinerja program untuk urusan pemerintahan Tahun 2024 berdasarkan RKPD 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024	
			Target	Realisasi
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	100
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100

Indikator kinerja dari Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dengan perhitungan sebagai berikut:

(((Jumlah raperda yang ditetapkan / Jumlah raperda dalam Propemperda) x 100%) + ((Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang ditetapkan / Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang direncanakan) x 100%)) + ((Jumlah kebijakan perencanaan & anggaran yang disepakati tepat waktu / Jumlah kebijakan perencanaan & anggaran yang seharusnya disepakati) x 100%) + ((Jumlah rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati / Jumlah rekomendasi DPRD kepada Bupati yang direncanakan) x 100%))/4

Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Tahun 2024

No.	Uraian	Capaian Kinerja Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1.	Jumlah Raperda yang ditetapkan	12	11
2.	Jumlah Raperda dalam Propemperda	12	11
3.	Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang ditetapkan	5	6
4.	Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang direncanakan	5	6
5.	Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati tepat waktu	5	5
6.	Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang seharusnya disepakati	5	5
7.	Jumlah Rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati	12	12
8.	Jumlah Rekomendasi DPRD kepada Bupati yang direncanakan	12	12
Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		**100**	**100**

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian indikator kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Tahun 2024 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 11 Raperda dan 6 Non Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD yang terdiri dari:

1) Raperda :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 – 2045
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pengendalian Penduduk
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pengelolaan Sampah
8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024
9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025

10. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda)
11. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

2) Non Raperda Keputusan DPRD/Peraturan DPRD:

1. Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025
2. Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Eks Dinas Kesehatan
3. Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Eks UPTD PAUD dan Dikdas Temon
4. Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Tata Tertib
5. Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo
6. Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo

3) Jumlah kebijakan perencanaan & anggaran yang disepakati tepat waktu :

1. Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023, tanggal 21 Mei 2024
2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) & Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2024, tanggal 26 Juli 2024
3. Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024; tanggal 8 Agustus 2024
4. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, tanggal 8 Agustus 2024
5. Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025, tanggal 26 November 2024

4) *Jumlah Rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati sebanyak 12 dokumen.*

Rekomendasi DPRD tersebut merupakan hasil pengawasan terhadap kebijakan dan pembangunan daerah sebagai implementasi Fungsi Pengawasan DPRD, dalam hal ini dilaksanakan oleh Komisi sesuai dengan bidang tugasnya.

Tabel 2.1.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025 (s.d TW II)	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	---	---	100	100	100		100	50,00	100		
2	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	---	---	100	100	100		100	50,28	100		
	- Jumlah Raperda yang ditetapkan			11	12	12		11	1	12		
	- Jumlah Raperda dalam Propemperda			11	12	12		11	9	12		
	- Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang ditetapkan			6	5	5		6	3	5		
	- Jumlah Keputusan DPRD/Persetujuan Bersama yang direncanakan			6	5	5		6	3	5		
	- Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati tepat waktu			5	5	5		5	5	5		
	- Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang seharusnya disepakati			5	5	5		5	5	5		
	- Jumlah Rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati			12	12	12		12	4	12		
	- Jumlah Rekomendasi DPRD kepada Bupati yang direncanakan			12	12	12		12	8	12		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Pada prinsipnya peran Sekretariat DPRD adalah mengemban tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik di bidang legislasi. anggaran maupun pengawasan. Sebagai institusi pendukung dan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD. tentu tidak hanya dituntut secara administratif saja tetapi juga secara teknis operasional dan keahlian serta profesionalitas aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dukungan profesionalitas, kehandalan dan keterpaduan adalah dukungan yang diisi oleh tenaga-tenaga yang mampu melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik demi menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang cukup dinamis. padat dan berdimensi politis.

Oleh karena itu tentunya sangat penting untuk upaya meningkatkan kapasitas kemampuan dari Sumber Daya Manusianya seperti kegiatan formal / peningkatan derajat pendidikan formal dan juga berbagai program pendidikan dan latihan profesi bagi para pegawai.

Perlu disadari bahwa tugas dan peran Sekretariat DPRD memang cukup berat dan mengemban amanat yang cukup besar. Karena hal itu tentu dalam rangka mensukseskan tugas- tugas dan kegiatan anggota DPRD. Hal itu dimulai dari proses kesekretariatan. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan. penyelenggaraan rapat dan risalah. pelaksanaan kegiatan rumah tangga sampai dengan ketatatusahaan.

Sedangkan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana. Sekretariat DPRD juga harus memperhatikan kebutuhan akan ruangan yang baik. perlengkapan ruangan yang memadai yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi anggota DPRD. untuk fasilitas alat kengkapan Dewan dan juga untuk kegiatanDewan. Hal ini karena masalah fasilitas kerja akan mempengaruhi motivasi para anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Keberadaan Sekretariat DPRD sama penting sebagaimana keberadaan DPRD. oleh karena itu dituntut kinerja yang baik dan profesional. Sebab apabila pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kurang memuaskan atau bahkan tidak memuaskan maka tentunya hal itu menjadi kendala bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Oleh karenanya Sekretariat DPRD harus terus menerus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada DPRD dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja baik dari unsur pegawainya maupun kinerja lembaga secara keseluruhan.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang optimal sebagai institusi pendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD yang telah diuraikan maka isu isu strategis sebagai berikut :

1. Komitmen anggota DPRD terhadap kepatuhan peraturan perundangan sangat diperlukan untuk melaksanakan tugas fungsi DPRD (Legislasi. Penganggaran dan Pengawasan)
2. Tuntutan anggota DPRD terhadap peningkatan pelayanan dimana adanya keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD baik kualitas maupun kuantitas

3. Kesiapan Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD yang mana perlu dukungan Naskah Akademik yang memadai.
4. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang ditetapkan
5. Peran ganda Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang melayani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekaligus sebagai OPD di bawah Bupati atau Pemerintahan Daerah dimana kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda yaitu sebagai legislatif dan sebagai eksekutif oleh karena itu Sekretariat DPRD harus bisa menjadi mediator.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD tentunya mendasarkan pada dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD yang telah disusun karena menjadi acuan dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD. Dimana Perubahan Renstra Sekretariat DPRD berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan (RPD).

Rencana Kerja mengakomodir Program dan kegiatan yang diusulkan baik oleh DPRD dan Sekretariat DPRD guna mendukung fungsi pembentukan produk hukum daerah, fungsi Penganggaran dan fungsi pengawasan. Rencana program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 secara umum sama dengan program kegiatan yang telah disusun dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam tabel berikut:

Tabel

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN KULON PROGO

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DPRD				**45.811.546.784**	SEKRETARIAT DPRD				**35.930.046.100**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Lingkup Kab Kulon Progo	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**24.972.702.784**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Lingkup Kab Kulon Progo	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**23.900.575.356**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu**		**20.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu**		**6.404.600**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.568.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	9.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	2.836.100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**		**2.108.486.784**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**		**2.120.247.915**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.033.986.784	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	2.070.451.715	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	64.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	46.760.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3.036.100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**		**22.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**		**20.308.000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan FungsI		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	22.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan FungsI		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	20.308.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi umum**		**230.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi umum**		**221.750.000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	95.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	95.568.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	135.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	126.182.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah penambahan aset**		**340.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah penambahan aset**		**144.968.600**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	404 Unit	340.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	304 Unit	144.968.600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**		**1.515.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**		**1.666.591.712**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	215.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	217.660.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.300.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.448.931.712	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**		**737.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**		**573.484.600**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	460.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	444.308.200	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	162.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	39.109.100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	62 Unit	115.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	61 Unit	90.067.300	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		**Jumlah laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**19.695.216.000**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**Jumlah laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**18.947.391.929**	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/bulan	19.420.000.000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/bulan	18.674.688.629	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	80 Paket	195.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	80 Paket	192.463.300	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	80.216.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	80.240.000	
	Layanan Administrasi DPRD		**Jumlah laporan Layanan Administrasi DPRD**		**305.000.000**	**Layanan Administrasi DPRD**		**Jumlah laporan Layanan Administrasi DPRD**		**199.428.000**	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	10 Laporan	305.000.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	10 Laporan	199.428.000	
	ROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Lingkup Kab Kulon Progo	**Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**		**20.838.844.000**	**ROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Lingkup Kab Kulon Progo	**Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**		**12.029.470.744**	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		**Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**4.065.000.000**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**1.993.390.100**	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	215.000.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	177.721.700	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	1.600.000.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	1.072.982.300	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1.700.000.000						
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	550.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	134.456.700	
						Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerahi	4000 orang	608.229.400	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		**Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas**		**2.350.000.000**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas**		**1.465.085.000**	
	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6 Dokumen	2.350.000.000	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6 Dokumen	1.465.085.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		**Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**3.405.000.000**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**1.786.888.400**	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	245.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	241.129.100	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	8 Dokumen	2.800.000.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	1.225.676.600	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	360.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	320.082.700	
	Peningkatan Kapasitas DPRD		**Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD dan Publikasi Kinerja DPRD**		**3.300.000.000**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD dan Publikasi Kinerja DPRD**		**682.744.900**	
	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.500.000.000	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	277.145.700	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	150 Dokumen	800.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	133 Dokumen	405.599.200	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		**Jumlah dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**2.550.000.000**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**Jumlah dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**1.763.860.400**	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	5 Dokumen	2.550.000.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	1.182.604.800	
						Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	4000 orang	581.255.600	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		**Jumlah laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD**		**177.000.000**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**Jumlah laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD**		**149.544.100**	
	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4 Laporan	177.000.000	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4 Dokumen	149.544.100	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah		**Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah**		**880.000.000**	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**		**Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah**		**-**	
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4 Dokumen	880.000.000						
	Fasilitasi Tugas DPRD		**Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD**		**4.111.844.000**	**Fasilitasi Tugas DPRD**		**Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD**		**4.187.957.844**	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	45 Dokumen	2.041.844.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	22 Dokumen	1.724.302.800	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	73 Laporan	1.015.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	73 Laporan	1.454.323.044	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	13 Dokumen	300.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	258.652.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 Dokumen	755.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 Dokumen	750.680.000	

Beberapa perubahan yang terjadi dalam proses analisis kebutuhan adalah karena Penyesuaian dengan Rencana Kerja DPRD Tahun 2026 dengan kemampuan keuangan daerah yang ada.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD pada dasarnya merupakan usulan Perangkat Daerah dan bukan usulan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat secara eksplisit. Tetapi secara implisit karena Anggota DPRD merupakan wakil masyarakat yang notabene menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama dari daerah pemilihannya, memfasilitasi anggota DPRD melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan, sedangkan program kegiatan yang mengakomodir kepentingan masyarakat dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2026.

Tabel 2.5.1

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				Usulan dari masyarakat tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Racangan Akhir Renja yang disusun berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional yang terkait dengan salah satu prioritas nasional yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD khususnya dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan senantiasa selalu ditingkatkan. Karena DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Nasional. Di samping itu dalam menentukan Kebijakan Daerah juga harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah Propinsi, dan terkait dengan salah satu prioritas daerah yaitu Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan Kawasan aerotropolis.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis

Untuk mewujudkan tujuan tersebut sekretariat DPRD menetapkan sasaran.

Perubahan Renstra

Tabel 3.2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	nilai	A (85,3)
			Indeks maturitas SPIP	nilai	3,23
		Terfasilitasinya Kinerja DPRD	Persentase Kinerja DPRD yang terselesaikan	%	100
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat daerah	nilai	A (>80-90)
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP perangkat daerah	nilai	2,0-3,0

3.3. Program dan Kegiatan

Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan terakhir dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-5406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa :

"Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Sehingga, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 yang disusun ini tidak terlepas dan mendasar pula pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya.

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RKPD 2026
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan perda	%	100,00
		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait Penganggaran dan Pengawasan	%	100,00
		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100,00
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00

Rumusan program dan kegiatan sesuai dengan Rancangan awal RKPD, namun mengingat dinamika pembahasan anggaran yang ada dan menyesuaikan dengan skala prioritas program dan kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta kemampuan keuangan daerah sehingga terdapat perbedaan pada keluaran dan jumlah dana.

Kebutuhan dana dihitung sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa tahun 2026, dan indikator kinerja masing-masing sub kegiatan. Prakiraan maju program dan kegiatan Tahun 2026 tentunya akan disesuaikan kembali ketika Rencana Kerja DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 telah ditetapkan diwaktu mendatang serta dinamika yang ada.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 yang akan datang merencanakan melaksanakan 2 program, 17 kegiatan, 36 sub kegiatan. Hal itu dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada DPRD agar dalam melaksanakan fungsinya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan juga upaya mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel yang mempunyai dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2026 secara umum dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kulon Progo berupa rapat-rapat dan pengawasan kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Selain itu untuk mendukung wawasan, pemahaman, pengetahuan dan informasi berkaitan dengan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan konsultasi, koordinasi, study banding, study referensi dan kerjasama antara DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Pemerintah Pusat/Kementerian maupun dengan Pemerintah Daerah lain. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan diluar wilayah Kulon Progo antara lain di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan luar Jawa.

Optimalisasi fungsi pengawasan dilakukan evaluasi/sosialisasi Peraturan Daerah dengan meningkatkan akses masyarakat dalam memberikan masukan terhadap peraturan-peraturan daerah dan mendekatkan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk mewujudkan lembaga DPRD yang aspiratif dan akuntabel dilakukan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta meningkatkan sistem informasi ASPIRASIKU untuk menjaring masukan dan aspirasi masyarakat sehingga pada saatnya diproses pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kulon Progo yang cermat dan tepat waktu.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						**35.930.046.100,00**							**48.908.053.257,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.930.046.100,00**							**48.908.053.257,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**35.930.046.100,00**							**48.908.053.257,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Subkegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi***	-			**100 Persen**	**23.900.575.356,00**						-	**25.290.601.462,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	6.404.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD	-	28.006.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.568.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		14.715.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	2.836.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		13.290.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	2.120.247.915,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD	-	2.139.993.262,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	2.070.451.715,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		2.064.493.262,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	46.760.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		64.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.036.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		11.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	20.308.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD	-	24.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	20.308.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		24.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	221.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD	-	253.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	95.568.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		104.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	126.182.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		148.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	144.968.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD	-	524.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				304 Unit	144.968.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		524.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	1.666.591.712,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD	-	1.666.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	217.660.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		236.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.448.931.712,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		1.430.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	573.484.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD	-	810.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	444.308.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		506.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	39.109.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		178.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				61 Unit	90.067.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		126.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	18.947.391.929,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD, Sekretariat DPRD	-	19.509.402.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	18.674.688.629,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD, Sekretariat DPRD		19.420.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				80 Paket	192.463.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD, Sekretariat DPRD		1.164.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	80.240.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD, Sekretariat DPRD		88.237.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	199.428.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD	-	335.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				10 Laporan	199.428.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		335.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembentukan Perda Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Penganggaran dan Pengawasan Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD***	-			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**12.029.470.744,00**						-	**23.617.451.795,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			4 Dokumen	1.993.390.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD	-	3.741.158.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	177.721.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		205.212.700,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Dokumen	1.072.982.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		1.646.831.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	134.456.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		219.314.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				4000 Orang	608.229.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		1.669.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	1.465.085.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD	-	2.744.872.295,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				4 Dokumen	1.465.085.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		2.744.872.295,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	1.786.888.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD	-	3.915.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	241.129.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		281.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				4 Dokumen	1.225.676.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		3.220.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	320.082.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		414.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	682.744.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD	-	3.795.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	277.145.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		2.875.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				133 Dokumen	405.599.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		920.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	1.763.860.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD	-	3.489.100.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	1.182.604.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		2.932.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				4000 Orang	581.255.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		556.600.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	149.544.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD	-	203.550.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				4 Laporan	149.544.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		203.550.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	-			-	0,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	1.020.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		1.020.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			4 Dokumen	4.187.957.844,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD	-	4.708.020.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				22 Dokumen	1.724.302.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		2.327.520.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				73 Laporan	1.454.323.044,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		1.167.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	258.652.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		345.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				3 Dokumen	750.680.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		868.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	JUMLAH							**35.930.046.100,00**							**48.908.053.257,00**	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 mendasar pada Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo 2023-2026 dan RKPD Tahun Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 yang berisi program dan kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi terhadap dukungan pelayanan dan fasilitasi DPRD.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen di Sekretariat DPRD yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan DPRD dan OPD yang kompeten, sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal, serta disesuaikan dengan Rencana Kerja DPRD Tahun 2026 khususunya pada Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran PPAS Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan.

Pada prinsipnya diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Pelaksanaannya betul-betul mendasarkan pada perencanaan yang telah ditetapkan, tepat waktu, tepat sasaran.

Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan betul-betul dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di Sekretariat DPRD secara intensif.

Pengasih, 29 Juli 2025
Sekretaris DPRD

SARJI, S.I.P., M.A.P.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700716 199101 1 001

2026



RENJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Kabupaten
KULON PROGO



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya, Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembanguan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dapat kami selesaikan. Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, sinergisitas program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah agar pelaksanaan pembangunan daerah konsisten dengan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 serta Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 agar selaras dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah serta dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Demikian dokumen ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahun 2026.

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 23

2.4. Reviu Terhadap RKPD 24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masrarakat 29

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 31

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 31

3.3. Program dan Kegiatan 34

BAB IV.RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38

BAB IV.PENUTUP 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

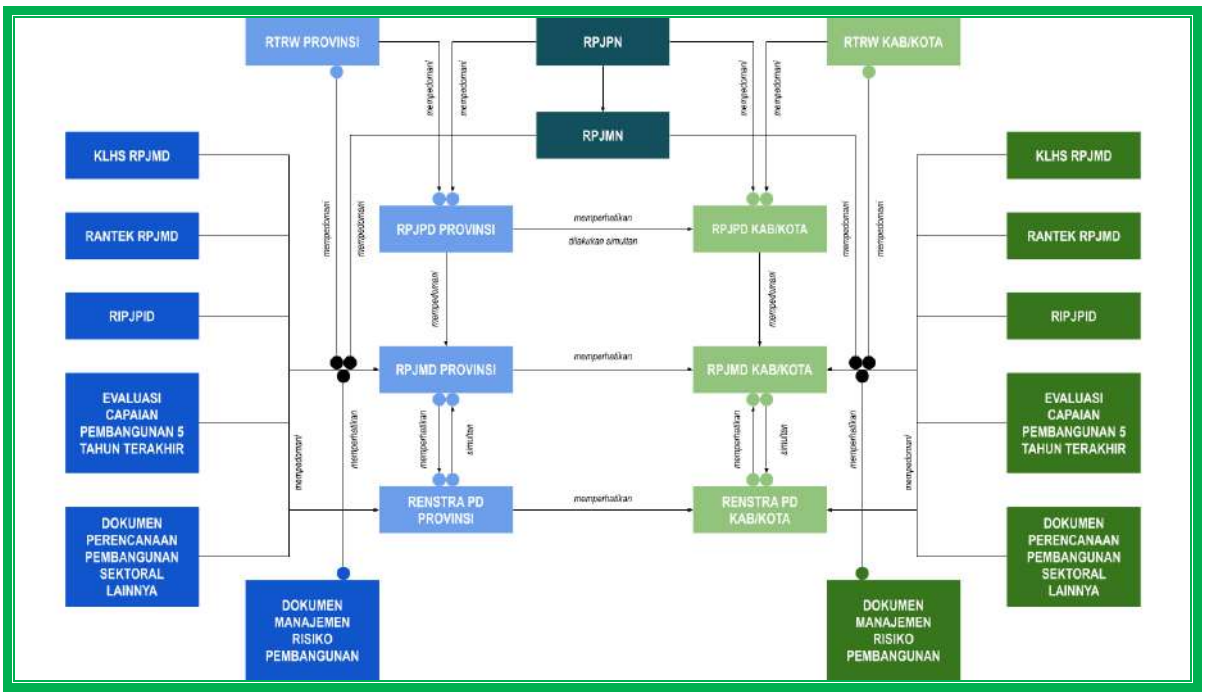
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

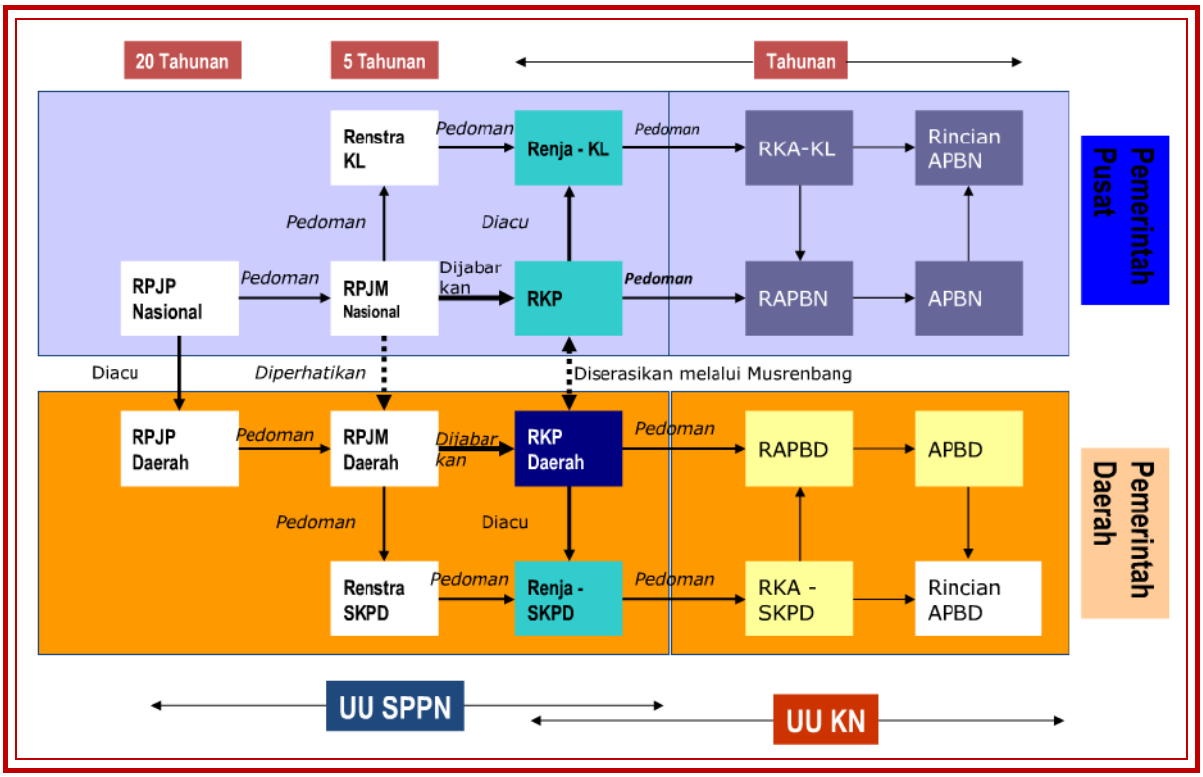
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Bapperida Kulon Progo disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Bapperida Kulon Progo, serta berpedoman pada Renja Kementerian PPN/Bappenas dan Renja Bapperida DIY.

Penyusunan Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 berada pada tahapan transisi yaitu akhir Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan tahapan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Proses penyusunan Renja Bapperida Tahun 2026 didasarkan pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026. Tahun 2026 merupakan tahun Pertama

perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada RPJMD 2025-2029. Dokumen Renja Tahun 2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida serta sejalan dengan Visi RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029 yaitu "***Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan***" yang sudah diselaraskan dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yaitu "***Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya dan Berkelanjutan (SEMARAK)***".

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.





Alur Perencanaan dan Penganggaran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, rancangan akhir RPJMD 2025-2029, dan rancangan Renstra 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat. RKPD Tahun 2026 menjadi penjabaran tahunan dari RPJMD 2025-2029, sementara Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan tingkat perangkat daerah yang mendukung pencapaian tujuan RPJMD dan operasionalisasi RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah:

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 ;
o. Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2025;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
s. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045;
t. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan;
u. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026;

v. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026.

1.3. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Di dalamnya mencakup :

a. Memberikan informasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan triwulan IV;
b. Menjabarkan kegiatan, Sub Kegiatan, target dan indikator kinerja serta pagu indikatif pendanaan tahun anggaran 2026;
c. Memberikan pedoman pelaksanaan program kegiatan, sub kegiatan tahun anggaran 2026.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 adalah untuk:

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2026;
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun berdasar Permendagri No. 86 Tahun 2017 dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan
Bab II. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bapperida menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan, penelitian dan pengembangan. Bapperida dipimpin kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan.

Bapperida mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, riset dan inovasi. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 melaksanakan 6 program, 16 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.1

Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
I	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**
I.	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**
I	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
	UNSUR PENDUKUNG USUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELEMBAGAAN
	SEKRETARIAT DAERAH
II	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**
2.	**Perencanaan dan pengendalian Pelaksanaan kegiatan Keistimewaan**

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	PERENCANAAN
III	**Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota**
3.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
4	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan / semesteran
8	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
5.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
9	Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
10	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
6.	**Administrasi Umum dan Perangkat Daerah**
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
7.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.	**Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**
14	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
15	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
9.	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya
18	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
IV	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
10.	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**
19	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
20	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
11.	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
21	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
12.	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan**
22	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
23	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
V	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
13.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**
24	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
25	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
26	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
14.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**
27	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
28	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
15.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**
29	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
30	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
VI	**Program Penelitian dan Pengembangan**
16.	**Pengembangan Inovasi dan teknologi**
31	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
32	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Pengukuran kinerja Bapperida didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2

Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Bapperida Kulon Progo Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan	Persentasi Indikator kinerja sasaran perangkat daerah dalam RPD yang mencapai target	%	85,71	68,25	79,36
3	Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan	Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% - 100%)	%	100	95,24	100
4	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah	Satuan inovasi daerah yang matang	Satinov	70	74	87

Tabel 2.1.3

Pengukuran Kinerja Program Bapperida Kulon Progo Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024	
						Target	Realisasi s/d TW IV
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	%	100	100	100	100
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100
3		Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	%	99,76	99,91	99,73	99,86

4	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu	%	100	100	100	100
5		Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu	%	100	100	100	100
6		Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu	%	100	100	100	100
7	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian inovasi daerah	Satinov	187	190	129	208
8		Capaian penelitian dan pengembangan	Dok	6	6	7	8
9	Program : Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase perencanaan keistimewaan	%	100	100	100	100
10		Persentase pengendalian kegiatan keistimewaan	%	100	100	100	100

Alokasi anggaran Belanja Langsung Bapperida Kabupaten Kulon Progo pada APBD Anggaran Perubahan 2024 sebesar Rp. 7.305.800.976,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 7.303.500.976,- dan belanja modal sebesar Rp. 2.300.000,-. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV 2024 sebesar Rp. 6.946.822.724,44 atau 95,09%.

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 untuk target fisik kegiatan semua tercapai sesuai target, sedangkan di sisi keuangan ada beberapa kegiatan yang tidak direalisasikan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya selisih harga di Mbizmarket pada ATK, makan minum rapat, honorarium THL yang tidak bisa dicairkan karena pindah ketugasan, belanja gaji dan tunjangan sesuai dengan kebutuhan pegawai, uang lembur dan Belanja perjalanan sesuai kebutuhan.

Dampak dari ketidak tercapaian realisasi keuangan atas kegiatan tersebut akan menambah Silpa anggaran pada akhir tahun dan akan digunakan sebagai cadangan pada tahun berikutnya.

Sedangkan kebijakan perencanaan dan penganggaran mengatasi faktor-faktor penyebab ketidak tercapaian penganggaran, perlu dilakukan beberapa kebijakan dan tindakan, termasuk prioritisasi anggaran pada program dan kegiatan yang berdampak signifikan, perbaikan pemahaman dan korelasi antara sasaran, tujuan, dan indeks, serta penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan evaluasi kinerja. Selain itu, perlu juga dilakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap perubahan, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang tidak mencapai target kinerja mendapatkan perhatian khusus dan tindakan perbaikan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Bapperida Kulon Progo sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 2.1.4

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025
BAPPEDA KABUPATEN KULON PROGO

Kode					Unsur / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (oucomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja PD tahun 2024		Tingkat realisasi				Realisasi capaian Program Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K		Rp
								26.571.390.000		6.593.083.946		7.305.242.976	0	6.946.822.724				7.081.592.060		20.770.322.130	0,78
2					**UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							247.846.500	0	239.473.391		97					
2	22				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**		**0**	**0**	**-**	**0**		**247.846.500**		**239.473.391**		**96,62**		**0**	**-**	**239.473.391**	**-**
2	22		08		**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN**	**Presentase situs warisan geologi yang terkelola**	**100**				**100%**	**247.846.500**	**100**	**239.473.391**	**100**	**96,62**	**-**	**0**	**100**	**239.473.391**	-
2	22		08		**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	**Cakupan pengelolaan situs warisan geologi kabupaten**	**100**				**100%**	**247.846.500**	**100**	**239.473.391**	**100**	**96,62**	**-**	**-**	**100**	**239.473.391**	-
2	22		08	003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah obyek warisanbudaya nasional dan dunia yang masuk nominasi	0				**5**	247.846.500	5	239.473.391	**100**	**96,62**	-	-	**5**	**239.473.391**	-
4					**UNSUR PENDUKUNG USUSAN PEMERINTAHAN**			**1.403.740.000**		**190.026.149**		**234.880.000**		**227.736.898**		**96,96**	**-**	**319.026.800**		**736.789.847**	0,52
4	01				**SEKRETARIAT DAERAH**															-	
4	01		04		**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Persentase Perencanaan Keistimewaan**	**100**	**1.403.740.000**	100	**190.026.149**	**100%**	**234.880.000**	100	**227.736.898**	**100**	**96,96**	**100**	**319.026.800**	**200**	**736.789.847**	0,52
						Persentase Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	**100**		100		100%		100		**100**		**100**		**100**	-	
					Perencanaan dan pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	**Jumlah dokumen rencana program kegiatan keistimewaan Urusan Tata Ruang**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**148.823.400**	**3**	**736.789.847**	**-**
					Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Laporan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	148.823.400	**3**	**148.823.400**	-
4	01		04		**Perencanaan dan pengendalian Pelaksanaan kegiatan Keistimewaan**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan**	**32**	**1.403.740.000**	8	**190.026.149**	**8**	**234.880.000**	**8**	**227.736.898**	**100**	**96,96**	**2**	**170.203.400**	**18**	**587.966.447**	0,42
4	01	04	5.06	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Se-DIY	16	661.280.000	4	126.312.186	4	165.260.000	4	160.613.353	**100**	**97,19**	4	117.294.000	**12**	**404.219.539**	0,61
4	01	04	5.06	2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	16	742.460.000	4	63.713.963	4	69.620.000	4	67.123.545	**100**	**96,41**	4	52.909.400	**12**	**183.746.908**	0,25



Kode					Unsur / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (oucomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja PD tahun 2024		Tingkat realisasi				Realisasi capaian Program Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K		Rp
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**25.167.650.000**		**6.403.057.797**		**6.822.516.476**		**6.479.612.435**		**94,97**		**6.762.565.260**		**19.645.235.492**	0,78
5	01				**PERENCANAAN**			**23.936.170.000**		**6.169.454.967**		**6.553.906.376**		**6.249.802.456**		**95,36**		**6.511.779.760**		**18.931.037.183**	0,79
5	01	01			**Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**16.680.320.000**	100	**4.077.649.715**	**100**	**4.540.930.876**	100	**4.368.815.535**	**100**	**96,21**	**100**	**4.712.927.960**	100	**13.159.393.210**	0,79
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja di sampaikan tepat waktu**	**94**	**222.860.000**	**23**	**54.954.806**	**23**	**53.195.800**	**23**	**44.197.489**	**100**	**83,08**	**25**	**20.657.000**	**71**	**119.809.295**	**0,54**
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	173.950.000	2	42.855.497	2	42.196.400	2	34.318.377	**100**	**81,33**	**4**	13.567.600	6	**90.741.474**	0,52
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	84	48.910.000	21	12.099.309	21	10.999.400	21	9.879.112	**100**	**89,82**	**21**	7.089.400	42	**29.067.821**	0,59
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**56**	**13.976.380.000**	**14**	**3.241.324.018**	**14**	**3.716.123.128**	**14**	**3.619.714.947**	**100**	**97,41**	**14**	**3.914.151.766**	**28**	**10.775.190.731**	**0,77**
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	188	13.550.130.000	47	3.143.586.590	**47**	3.617.455.828	47	3.522.612.325	**100**	**97,38**	47	3.835.794.466	94	**10.501.993.381**	0,78
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	170.160.000	17	41.269.562	14	41.949.600	14	41.890.072	**100**	**99,86**	**14**	32.889.600	31	**116.049.234**	0,68
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	256.090.000	1	56.467.866	1	56.717.700	1	55.212.550	**100**	**97,35**	**1**	45.467.700	2	**157.148.116**	0,61
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian**	**8**	**134.060.000**	**2**	**26.993.256**	**2**	**34.209.900**	**2**	**33.480.563**	**100**	**97,87**	**2**	**29.206.000**	**4**	**89.679.819**	**0,67**
5	01	01	2.05	0005	Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4	8.510.000	1	1.746.725	1	2.000.000	1	1.756.202	**100**	**87,81**	1	2.000.000	2	**5.502.927**	0,65
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	140	125.550.000	35	25.246.531	35	32.209.900	35	31.724.361	**100**	**98,49**	35	27.206.000	70	**84.176.892**	0,67
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi umum**	**8**	**422.480.000**	**2**	**185.573.144**	**2**	**204.616.000**	**2**	**185.624.163**	**100**	**90,72**	**2**	**197.414.500**	**4**	**568.611.807**	**1,35**
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	297.810.000	12	159.110.517	12	175.388.000	12	158.749.818	**100**	**90,51**	12	171.109.500	24	**488.969.835**	1,64
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16	124.670.000	4	26.462.627	4	29.228.000	4	26.874.345	**100**	**91,95**	4	26.305.000	8	**79.641.972**	0,64
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**jumlah penambahan aset**	**27**	**170.170.000**	**14**	**128.141.097**	**14**	**2.300.000**	**1**	**1.550.000**	**7**	**67,39**	**3**	**28.394.400**	**17**	**158.085.497**	**0,93**
5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang disediakan	27	170.170.000	14	128.141.097	14	2.300.000	1	1.550.000	**7**	**67,39**	3	28.394.400	17	**158.085.497**	0,93
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang**	**96**	**892.330.000**	**24**	**246.967.931**	**24**	**306.406.948**	**24**	**290.427.412**	**100**	**94,78**	**14**	**296.614.144**	**38**	**834.009.487**	**0,93**

Kode					Unsur / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (oucomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja PD tahun 2024		Tingkat realisasi				Realisasi capaian Program Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K		Rp
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	251.010.000	12	59.400.872	12	94.518.912	12	87.444.774	**100**	**92,52**	12	95.043.240	24	**241.888.886**	0,96
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	641.320.000	12	187.567.059	12	211.888.036	12	202.982.638	**100**	**95,80**	12	201.570.904	24	**592.120.601**	0,92
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	**12**	**862.040.000**	**3**	**193.695.463**	**3**	**224.079.100**	**3**	**193.820.961**	**3**	**86,50**	**3**	**226.490.150**	**6**	**614.006.574**	**0,71**
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	108	595.610.000	12	142.100.363	27	180.859.500	27	155.767.361	**100**	**86,13**	27	183.441.650	39	**481.309.374**	0,81
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	40.420.000	1	16.137.600	1	7.733.200	1	7.733.200	**100**	**100,00**	1	14.000.000	2	**37.870.800**	0,94
5	01	01	2.19	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	200	226.010.000	12	35.457.500	50	35.486.400	50	30.320.400	**100**	**85,44**	50	29.048.500	62	**94.826.400**	0,42
5	01	02			**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Capaian perencanaan pembangunan daerah**	**100**	**4.421.760.000**	**100**	**1.199.828.426**	**100**	**1.250.322.600**	100	**1.163.767.712**	**100**	**93,08**	**100**	**1.100.584.100**	**100**	**3.464.180.238**	0,78
						persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	**99,8**		**99,63**		**99,73**		99,86		**100**	**-**	**99,86**		**100**	**-**	
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**26**	**2.607.880.000**	**6**	**748.906.921**	**6**	**925.910.200**	**6**	**884.024.122**	**100**	**95,48**	**7**	**834.631.600**	**13**	**2.467.562.643**	**0,95**
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	14	2.429.430.000	3	709.310.107	4	878.110.200	4	843.193.192	**100**	**96,02**	4	789.960.600	7	**2.342.463.899**	0,96
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	12	178.450.000	3	39.596.814	3	47.800.000	3	40.830.930	**100**	**85,42**	3	44.671.000	6	**125.098.744**	0,70
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**17**	**565.600.000**	**17**	**78.176.587**	**3**	**51.331.000**	**3**	**42.816.500**	**100**	**83,41**	**3**	**47.504.100**	**20**	**168.497.187**	**0,30**
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	17	565.600.000	17	78.176.587	4	51.331.000	4	42.816.500	**100**	**83,41**	3	47.504.100	20	**168.497.187**	0,30

Kode					Unsur / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (oucomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja PD tahun 2024		Tingkat realisasi				Realisasi capaian Program Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K		Rp
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan**	**Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi daerah**	**89**	**1.248.280.000**	**23**	**372.744.918**	**22**	**273.081.400**	**22**	**236.927.090**	**100**	**86,76**	**22**	**218.448.400**	**45**	**828.120.408**	**0,66**
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	41	959.060.000	11	307.613.512	10	218.455.400	10	197.474.866	**100**	**90,40**	10	161.959.000	21	**667.047.378**	0,70
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	48	289.220.000	12	65.131.406	12	54.626.000	12	39.452.224	**100**	**72,22**	12	56.489.400	24	**161.073.030**	0,56
5	01	03			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu** **Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu** **Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan**	**100** **100** **100**	**2.834.090.000**	**100** **100** **100**	**891.976.826**	**100%** **100%** **100%**	**762.652.900**	**100,00** **100,00** **100,00**	**717.219.209**	**-**	**94,04**	**100,00** **100,00** **100,00**	**698.267.700**	**100** **100** **100**	**2.307.463.735**	0,81
5	01	03	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**84**	**1.474.130.000**	**20**	**342.761.965**	**20**	**419.242.500**	**16**	**400.906.536**	**80**	**95,63**	**25**	**295.447.800**	45	**1.039.116.301**	0,70
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26	460.870.000	6	111.031.045	6	79.309.900	6	73.960.336	**100**	**93,25**	8	59.991.200	14	**244.982.581**	0,53
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	32	601.810.000	8	142.832.282	8	247.580.600	8	238.947.397	**100**	**96,51**	9	151.495.200	17	**533.274.879**	0,89
5	01	03	2.10	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	26	411.450.000	6	88.898.638	6	92.352.000	6	87.998.803	**100**	**95,29**	8	83.961.400	14	**260.858.841**	0,63
5	01	03	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**56**	**627.570.000**	**17**	**145.878.286**	**12**	**123.431.400**	**12**	**105.200.080**	**100**	**85,23**	**26**	**196.995.700**	43	**448.074.066**	0,71
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	26	324.340.000	6	69.882.616	6	44.333.800	6	32.677.514	**100**	**73,71**	8	37.695.600	14	**140.255.730**	0,43

Kode					Unsur / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (oucomes)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)						Target program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja PD tahun 2024		Tingkat realisasi				Realisasi capaian Program Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K		Rp
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	26	303.230.000	6	75.995.670	6	79.097.600	6	72.522.566	**100**	**91,69**	9	159.300.100	15	**307.818.336**	1,02
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**52**	**732.390.000**	**14**	**403.336.575**	**12**	**219.979.000**	**12**	**211.112.593**	**100**	**95,97**	**16**	**205.824.200**	**30**	**820.273.368**	**1,12**
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	26	375.510.000	7	252.947.440	6	117.292.200	6	113.492.987	**100**	**96,76**	8	108.530.600	**40**	**474.971.027**	1,26
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	26	356.880.000	7	150.389.135	6	102.686.800	6	97.619.606	**100**	**95,07**	8	97.293.600	**40**	**345.302.341**	0,97
5	05				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																
5	05	02			**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Capaian Inovasi Daerah**	**138**	**1.231.480.000**	195	**233.602.830**	**129**	**268.610.100**	208	**229.809.979**	**161**	**85,56**	**195**	**250.785.500**	390	**714.198.309**	0,58
						Capaian penelitian dan pengembangan	**7**		6		**6**		8		**133**	-	8		14	-	
5	05	02	2.04		**Pengembangan Inovasi dan teknologi**	**Jumlah inovasi daerah yang masih eksis**	**138**	**1.231.480.000**	190	**233.602.830**	**129**	**268.610.100**	**208**	**229.809.979**	**161**	**85,56**	**195**	**250.785.500**	385	**714.198.309**	0,58
5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	72	270.200.000	18	56.230.190	18	58.673.600	18	53.460.382	**100**	**91,11**	18	55.081.900	**108**	**164.772.472**	0,61
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	19	961.280.000	4	177.372.640	4	209.936.500	5	176.349.597	**125**	**84,00**	5	195.703.600	**29**	**549.425.837**	0,57

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi serta koordinasi yang baik secara internal maupun eksternal. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, diantaranya seperti:

a. Adanya kendala aplikasi keuangan yang berpengaruh terhadap keterlambatan administrasi keuangan

b. Beberapa laporan dilaksanakan secara tahunan sehingga capaiannya akan terlihat pada triwulan ke-4, Terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan mundur pelaksanaannya.

c. Tahun 2024 merupakan masa transisi proses penetapan RPJPD 2025-2045 dan Penyusunan RPJMD 2025-2029

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2024 Bapperida telah melaksanakan 6 program, 16 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Target indikator program di tahun 2024 telah disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

- *Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

  Indikator ini merupakan indikator dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berisi kegiatan rutin setiap perangkat daerah dengan target 100%.

- *Capaian Perencanaan Pembangunan Daerah*

  Indikator ini merupakan indikator dari Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berisi capaian dari pelaksanaan perencanaan berupa dokumen perencanaan yang dikeluarkan seperti RKPD, Perubahan RKPD, DAK Fisik, DAIS serta dokumen perencanaan lainnya (RPJPD dan RPJMD) dengan target 100%.

- *Persentase Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah*

  Indikator ini merupakan indikator dari Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berisi realisasi fisik sub kegiatan terhadap ROPD yang disusun dengan target sebesar 99,73%.

- *Persentase Perencanaan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tepat Waktu*

  Indikator ini merupakan salah satu indikator dari Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berisi capaian bahan kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan target 100%.

- *Persentase Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tepat Waktu*

  Indikator ini merupakan salah satu indikator dari Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berisi capaian bahan kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan target 100%.

- *Persentase Perencanaan dan Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tepat Waktu*

  Indikator ini merupakan salah satu indikator dari Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berisi capaian bahan kebiajakan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan target 100%.

- *Capaian Inovasi Daerah*

  Indikator ini merupakan indikator dari Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berisi capaian dari jumlah inovasi daerah yang masih eksis/berjalan pada tahun 2024 dan ditetapkan oleh SK Bupati dengan target 129 satinov.

- *Capaian Penelitian dan Pengembangan*

  Indikator ini merupakan indikator dari Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berisi capaian terhadap jumlah kajian/penelitian yang didiseminasi pada tahun 2024 yang dapat berupa penelitian/kajian kelitbangan/TTG/fasilitasi penerapan hasil litbang terpilih yang diterpakan/diseminasi kajian/penelitian/PPM/inovasi/TTG yang dapat diterapkan dengan target 7 dokumen.

- *Persentase Perencanaan Keistimewaan*

  Indikator ini merupakan indikator dari Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang berisi capaian terhadap

perencanaan keistimewaan berupa dokumen perencanaan keistimewaan seperti BA I, BA II, Redesign 1, Redesign 2, Usulan n+2 dengan target 100%.

- *Persentase Pengendalian Kegiatan Keistimewaan*

  Indikator ini merupakan indikator dari Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang berisi capaian terhadap pengendalian keistimewaan berupa dokumen pengendalian urusan keistimewaan seperti dokumen verifikasi tahap 3 n-1, tahap 1 tahun n, tahap 2 tahun n, dan tahap akhir tahun n dengan target 100%.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2.1 berikut ini.

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	
	Indikator Kinerja Perangkat Daerah											
1	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	-	-	100	100	100		100	100	100		
2	Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan	-	-	68,25	69,84	71,43		79,36	69,84	71,43		
3	Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan	-	-	95,24	97,62	100		100	97,62	100		
4	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah	-	-	74	77	80		87	77	80		
	Indikator Kinerja Program											
1	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100	100	100		100	100	100		
2	Capaian perencanaan pembangunan daerah			100	100	100		100	100	100		
3	Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah			99,73	99,74	99,75		99,86	99,74	99,75		
4	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tepat waktu			100	100	100		100	100	100		
5	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang perekonomian dan sumber daya alam tepat waktu			100	100	100		100	100	100		
6	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah tepat waktu			100	100	100		100	100	100		
7	Capaian inovasi daerah			129	134	138		208	134	138		
8	Capaian penelitian dan pengembangan			7	7	7		8	7	7		
9	Persentase perencanaan keistimewaan			100	100	100		100	100	100		
10	Persentase pengendalian keistimewaan			100	100	100		100	100	100		

Dari tabel di atas dari 4 (empat) idikator perangkat daerah dan indikator kinerja program sebanyak (10) Indikator program pada tahun 2024 dapat terealisasi semuanya sesuai dengan perencanaan yang dilakukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bapperida memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bapperida memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bapperida didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Dalam rangka mewujudkan good governance, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting sehingga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Renja Bapperida harus melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, baik internal (staf dan pimpinan) maupun eksternal (masyarakat, akademisi, dan dunia usaha). Dokumen serta kegiatan Bapperida selalu dipublikasikan melalui media sosial Bapperida dengan prinsip terbuka, akurat, tepat waktu dan konsisten.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapperida, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan pengendalian;
- Adanya kebijakan baru dari pusat yang berdampak pada perubahan keluaran program;
- Masih kurangnya penelitian dan riset yang dilakukan untuk dapat diimplementasikan dan digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs. Adanya beberapa capaian indikator kinerja perangkat daerah yang dipengaruhi oleh realisasi sasaran OPD berakibat pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah Bapperida. Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bapperida di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Bapperida dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

- Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- Persentase kemiskinan yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY;
- Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.

Sedangkan peluang bagi Bapperida dalam melaksanakan ketugasannya adalah:

- Keterpaduan perencanaan antar kabupaten;
- Tawaran diklat dari Bappenas, lembaga diklat, dan perguruan tinggi;
- Program prioritas nasional dan DIY yang berada di Kulon Progo.

Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya adalah adanya kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan sistem yang belum terintegrasi antara sistem perencanaan dan penganggaran secara langsung perlu di buatkan sistem antara yang bisa menjebatani keduannya. Perlunya menyesuaikan kebijakan baru dari pusat yang berdampak pada perubahan keluaran program. Sedangkan dalam bidang penelitian dan riset daerah, Pemerintah Daerah perlu mengimplementasikan hasil penelitian yang bersifat terapan untuk kepentingan masyarakat khususnya di Kabupaten Kulon Progo.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026

Penetapan RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Bapperida. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.1

Tabel 2.4.1

REVIU TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN KULON PROGO

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembanguan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo

No.	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Perencanaan Pembanguan Riset dan Inovasi Daerah				**7.792,87**	**Badan Perencanaan Pembanguan Riset dan Inovasi Daerah**				**6.738,36**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**620,43**					**0,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**620,43**					**0,00**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo**	Persentase situs warisan geologi yang terkelola	**100%**	**620,43**					**0,00**	
	Pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo		5 objek	**620,43**						
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah obyek warisan budaya nasional dan dunia yang	5 objek	367,89						
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**252,54**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**275,841**	
	SEKRETARIAT DAERAH				**252,54**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**275,841**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**)**	**Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo**	Persentase pengendalian kegiatan keistimewaan	**100%**	**252,54**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)**	**Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	**100%**	**275,841**	
			Persentase Perencanaan Keistimewaan	**100%**							
						Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 dokumen	**112,586**	
						Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun	3 dokumen	112,59	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	8 dokumen	252,54	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 dokumen	163,255	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan*)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah laporan hasil penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan se _DIY	4 dokumen	161,00	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan*)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah laporan hasil penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan se _DIY	4 dokumen	121,30	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan*)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	4 laporan	91,54	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan*)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	3 laporan	41,958	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**6.919,90**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**6.462,52**	
	PERENCANAAN				**6.652,14**	**PERENCANAAN**				**5.954,18**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 persen	**4.692,43**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 persen**	**4.772,13**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu	25 dokumen	61,14	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 dokumen	11,03	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	50,64	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	6,09	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 laporan	10,50	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	4,94	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	14 dokumen	3.853,60	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 laporan	3.958,36	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan	3.766,19	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan	3.881,69	
	penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	45,47	penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	41,89	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	41,95	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	34,77	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian	2 dokumen	29,21	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 dokumen	26,69	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	2,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	-	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	57 orang	27,21	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	40 orang	26,69	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah dokumen administrasi umum	2 dokumen	201,43	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 dokumen	149,37	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 paket	26,31	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	21,47	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	175,12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	127,90	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Penambahan Aset	3 unit	19,80	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 dokumen	107,50	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan atau bangunan lainya yang disediakan	3 unit	19,80	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan atau bangunan lainya yang disediakan	11 unit	107,50	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	24 Laporan	297,94	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 dokumen	301,76	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	95,04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	95,04	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	202,89	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	206,71	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	3 laporan	229,32	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 dokumen	217,44	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	186,85	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	128,74	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	7,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	28,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	76 unit	35,46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	76 unit	60,70	
	PERENCANAAN					**PERENCANAAN**					
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo**	**Capaian perencanaan pembangunan daerah**	**100 persen**	**1.172,30**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		**Capaian perencanaan pembangunan daerah**	**100 persen 99,88 persen**	**680,69**	
			persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	**99,74 persen**							
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8 dokumen	**881,46**	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 dokumen	**438,24**	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dokumen	49,06	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dokumen	24,67	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Derah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 dokumen	832,40	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Derah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen	413,58	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	6 dokumen	49,94	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 dokumen	35,99	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 dokumen	49,94	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 dokumen	35,99	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi daerah	22 dokumen	240,91	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 dokumen	206,46	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10 laporan	177,50	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10 laporan	162,87	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 laporan	63,41	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 laporan	43,59	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo**	**Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu**	**100 persen**	**787,41**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		**Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu**	**100 persen**	**501,36**	
			Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu	**100 persen**				**Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu**	**100 persen**		
			Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu	**100 persen**				**Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu**	**100 persen**		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	25 dokumen	327,95	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 dokumen	239,26	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	8 dokumen	70,91	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	6 dokumen	48,37	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra /Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	9 laporan	165,35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra /Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	8 dokumen	118,39	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	8 dokumen	91,69	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	6 dokumen	72,50	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	17 dokumen	237,48	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 dokumen	95,16	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	8 dokumen	51,60	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	6 dokumen	27,37	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	9 dokumen	185,88	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	6 dokumen	67,79	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	16 dokumen	221,99	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 dokumen	166,93	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	8 dokumen	116,99	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	6 dokumen	81,35	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	8 dokumen	105,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	6 dokumen	85,58	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**267,76**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**508,34**	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo**	**Capaian Inovasi Daerah**	**134 satinov**	**267,76**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		**Capaian Inovasi Daerah**	**210 satinov**	**140,34**	
			Capaian penelitian dan pengembangan	**7 dokumen**							
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Inovasi Daerah yang masih eksis	134 satinov	267,76	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 dokumen	140,34	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 dokumen	207,88	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 dokumen	97,33	
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	18 laporan	59,88	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	18 laporan	43,01	
						PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	**Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo**	**Capaian Reiset Daerah**	**50 persen**	**368,00**	
						Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 dokumen	368,00	
						Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kulon Progo	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 naskah	368,00	

Dari tabel di atas terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD tahun 2026 dengan hasil analisis dan kebutuhan terhadap progam dan kegiatan maupun sub kegiatan, yang meliputi :

1. Penambahan Program Riset dan Inovasi Daerah, Kegiatan Penelitian Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, dan Sub.Kegiatan Penyusunan Kebijakan Berbasis hasil riset. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini Muncul seiring di terbitkannya Perda Nomor 3 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan yang di ikuti dengan Perbub nomor 40 Tahun 2024 tentang Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan.
2. Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan dan Ketatalaksanaan berupa : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang.
3. Pengurangan Program Penyelenggaraan Keistimewaan, kegiatan Pelestarian cagar budaya dan warisan budaya, Sub Kegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia.
4. Serta untuk mengefektifkan kinerja ada satu sub kegiatan yang tidak di anggarkan pada tahun 2026 yaitu Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Disamping itu untuk efektif dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada tahun 2026, ada beberapa Sub Kegiatan yang mengalami perbedaan anggaran dari rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan seperti yang terlihat dalam data Tabel 2.4.1 diatas.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bapperida didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di Kapanewon.

Adapun usulan program dan kegiatan pada saat musrenbang kapanewon seperti tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.5.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten : Kulon Progo
Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	-		-		-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan kebijakan nasional. Sesuai arahan RPJPN 2025-2045, sasaran jangka panjang tahun 2025-2045 ialah terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran utama yaitu: 1) mencapai pendapatan per kapita setara negara maju, 2) kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan, 3) meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, 4) meningkatnya daya saing sumber daya manusia, dan 5) menurunnya intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*.

Dalam mencapai kelima sasaran utama tersebut, maka agenda pembangunan nasional yang termuat dalam RPJPN 2025-2045 dengan tema pembangunan "Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan" adalah meliputi:

a. Mewujudkan transformasi sosial
b. Mewujudkan transformasi ekonomi
c. Mewujudkan transformasi tata kelola
d. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
e. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
f. Pembangunan kewilayahan
g. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
h. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Periode 2025-2029 merupakan periode pertama dalam upaya mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo 2025-2045, yaitu ***"Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan (SEMARAK)."*** Fokus utama pembangunan daerah pada periode ini adalah penguatan fondasi pembangunan melalui respon kebijakan

yang tepat sesuai isu strategis atau tantangan yang mengemuka pada periode 2025-2029 untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis dan tantangan pembangunan daerah, maka ditetapkan Visi Kabupaten Kulon Progo 2025-2029, yaitu:



Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Bapperida mendukung visi Kepala Daerah yaitu **Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan** dan misi ketiga Kepala Daerah**, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis**.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bapperida sekaligus mendasar pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran rencana kerja Bapperida tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bapperida Tahun 2026

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN
I	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel.		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
			Indek Maturitas SPIP	Nilai	3,23
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Kinerja	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	Nilai	52,57
		Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah	Satuan inovasi daerah yang matang	Inovasi	89 Inovasi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	level	2,0 - 3.0

3.3. Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Riset dan inovasi Daerah dengan perincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	satuan	Target Indikator Kinerja Program
				Perubahan
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah	%	100
2		Persentase capaian fisik pelaksanaan pembangunan	%	99,88
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan dan pengendalian lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu	%	100
4		Persentase perencanaan dan pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA tepat waktu	%	100
5		Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu	%	100
6	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Capaian inovasi daerah	Satuan Inovasi	210
7	Program Riset dan Inovasi Daerah	Capaian Riset Daerah	%	50
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	%	100
9	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan Pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100

Untuk Rincian Perumusan program dan kegiatan di Bapperida Kulon Progo didasarkan pada dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Rancangan Rencana Kerja Bapperida tahun 2026

mencakup 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.738.374.737,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rancangan Anggaran pada Tahun 2026
I	**PROGRAM PENYELENGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**275.841.000**
1	**Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang**	**112.586.000**
1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	**112.586.000**
2	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**163.255.000**
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	**121.297.000**
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	**41.958.000**
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp4.772.137.937**
3	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp11.030.400**
4	Penyusunan dok Perencanaan Perangkat Daerah	Rp6.091.500
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp4.938.900
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp3.958.356.222**
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.881.692.222
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp41.889.400
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp34.774.600
5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp26.687.500**
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp26.687.500
6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp149.366.395**
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp21.470.900
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp127.895.495

No	Uraian	Rancangan Anggaran pada Tahun 2026
7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp107.502.900**
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp107.502.900
8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp301.756.420**
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp95.043.240
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp206.713.180
9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp217.438.100**
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp128.736.500
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp28.000.000
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp60.701.600
III	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rp680.694.200**
10	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Rp438.245.300**
18	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp24.668.700
19	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp413.576.600
11	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rp35.986.600**
20	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp35.986.600
12	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rp206.462.300**
21	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp162.872.900
22	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp43.589.400

No	Uraian	Rancangan Anggaran pada Tahun 2026
IV	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rp501.363.800**
13	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Rp239.263.600**
23	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp48.367.200
24	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp118.392.800
25	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp72.503.600
14	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Rp95.165.100**
26	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp27.373.600
27	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp67.791.500
15	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Rp166.935.100**
28	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp81.350.500
29	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp85.584.600
V	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Rp508.337.800**
16	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Rp140.337.800**
30	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp97.327.900
31	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Rp43.009.900
VI	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Rp368.000.000**
17	**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**	**Rp368.000.000**
32	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Rp368.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipasif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dalam memenuhi tugas dan fungsi Bapperida yang terkait erat dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah nomor 6 (empat): "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", Bapperida merumuskan program dan kegiatan yang didasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD 2025-2029 serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Kulon Progo sebagai unsur penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Dari rumusan program dan kegiatan, Rencana Kerja Bapperida tahun 2026 mencakup 6 (enam) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan.

Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan Bapperida pada tahun 2026 tercantum pada tabel 4.1 berikut ini:

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH						**6.738.374.737,00**							**7.528.581.799,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**275.841.000,00**							**404.752.500,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**275.841.000,00**							**404.752.500,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**275.841.000,00**						**-**	**404.752.500,00**	
	4.01.04.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	112.586.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	225.172.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	4.01.04.5.05.0003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun				3 Dokumen	112.586.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		225.172.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 dokumen	163.255.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	179.580.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan														
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				4 Dokumen	121.297.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		133.426.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY				3 Laporan	41.958.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		46.153.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.462.533.737,00**							**7.123.829.299,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**5.954.195.937,00**							**6.564.657.719,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.772.137.937,00**						**-**	**5.238.857.529,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 dokumen	11.030.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	12.132.790,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.091.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		6.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	4.938.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		5.432.790,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 dokumen	3.958.356.222,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	4.345.898.052,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	3.881.692.222,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		4.261.567.652,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	41.889.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		46.078.340,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	34.774.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		38.252.060,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 dokumen	26.687.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	29.356.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	26.687.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		29.356.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 dokumen	149.366.395,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	162.103.255,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.470.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		21.418.210,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	127.895.495,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		140.685.045,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 dokumen	107.502.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	118.253.190,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	107.502.900,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		118.253.190,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 dokumen	301.756.420,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	331.932.062,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	95.043.240,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		104.547.564,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	206.713.180,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		227.384.498,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 dokumen	217.438.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	239.181.930,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	128.736.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		141.610.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	28.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		30.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				76 Unit	60.701.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		66.771.780,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**680.694.200,00**						**-**	**747.113.620,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 dokumen	438.245.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	480.419.830,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				3 Dokumen	24.668.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		27.135.570,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				2 Dokumen	413.576.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		453.284.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 dokumen	35.986.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	39.585.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	35.986.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		39.585.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 dokumened	206.462.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo	-	227.108.530,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				10 Laporan	162.872.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo		179.160.190,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				12 Laporan	43.589.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo		47.948.340,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**501.363.800,00**						**-**	**578.686.570,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 dokumen	239.263.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo	-	263.189.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	48.367.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo		53.203.920,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				8 0	118.392.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo		130.232.080,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	72.503.600,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo		79.753.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 dokumen	95.165.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	104.681.610,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	27.373.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		30.110.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	67.791.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		74.570.650,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 dokumen	166.935.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	210.815.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	81.350.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		108.130.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	85.584.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		102.685.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**508.337.800,00**							**559.171.580,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**140.337.800,00**						**-**	**154.371.580,00**	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 dokumen	140.337.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	154.371.580,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				5 Dokumen	97.327.900,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		107.060.690,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				18 Laporan	43.009.900,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		47.310.890,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**368.000.000,00**						**-**	**404.800.000,00**	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 dokumen	368.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	404.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset				1 Naskah	368.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		404.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	J U M L A H							**6.738.374.737,00**							**7.528.581.799,00**	

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Perangkat Daerah Bapperida Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Bapperida dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bapperida Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026.

Beberapa kaidah utama dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 antara lain:

a. Sinergi dan konsistensi

   Bahwa Renja Tahun 2026 selaras dengan Visi Misi RPJMD, hal ini memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Bapperida mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah;

b. Efisiensi dan Efektivitas.

   Pelaksanaan setiap kegiatan harus dilakukan secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan efektif, yaitu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan sumber daya harus dikelola dengan bijak, serta diselaraskan dengan prioritas yang paling berdampak pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah;

c. Keterbukaan dan Partisipasi.

   Seluruh proses pelaksanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan membuka ruang partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Keterbukaan ini memastikan bahwa proses pembangunan dapat diawasi dan masukan dari publik dapat dipertimbangkan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Keterbukaan informasi publik sangat penting karena merupakan fondasi utama dari tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan. Dengan keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi mengenai dokumen produk, data dan informasi,

kegiatan yang dilakukan, prosedur perizinan, dan layanan lainnya, sehingga proses birokrasi menjadi lebih transparan dan efisien.

Dengan menerapkan kaidah-kaidah tersebut di atas, Renja tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga instrumen yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Wates, 29 Juli 2025
Kepala Bapperida
Kabupaten Kulon Progo

PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO
BAPPERIDA

Ir. MUH. ARIS NUGROHO, MMA.
NIP. 196904161993031006

BKAD, KP



RENJA BKAD, 2026

Rencana Kerja Anggaran Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2026

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang menjadi komitmen segenap pegawai untuk melaksanakan program/Kegiatan/Sub Kegiatan guna mencapai visi misi daerah.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang menjadi komitmen segenap pegawai untuk melaksanakan program/Kegiatan/Sub Kegiatan guna mencapai visi misi daerah.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan seluruh program tidak terlepas dari pengaruh keadaan, dukungan dan peran serta seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Umpan balik (*feed back*) atas segala yang kami sajikan dan saran-saran sangat kami harapkan guna pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta untuk peningkatan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai kinerja yang ditetapkan di tahun 2026 kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wates, 29 Juli 2025

Kepala BKAD

Kabupaten Kulon Progo

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAUFIQ AMRULLAH, ST, MM

NIP. 19700406199903 1003

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN…..1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum.....3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 ……. 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah……..... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 33

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. 34

2.4 Review terhadap RKPD..... 37

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……..57

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 59

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 59

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 60

3.3 Program dan Kegiatan 62

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....66

BAB V PENUTUP 83

Lampiran :

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah (PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka proses penyusunan Renja PD ada beberapa tahapan diantaranya adalah penyusunan Renja PD, berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2026.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pada setiap Perangkat Daerah harus menyusun sebuah dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) yang menggambarkan arah dan bentuk akhir pada periode 4 (empat) tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang berfungsi sebagai dokumen perencana teknis operasional yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran

RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan, yang selanjutnya dijabarkan kembali dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, maka pada setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja (Renja).

Dokumen RKPD mempunyai keterkaitan dengan dokumen Pencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Renja SKPD disusun dengan mengacu RKPD.

Salah satu ketugasan Pemerintah Daerah adalah melakukan penataan, pengaturan, pengelolaan dan pertanggungjawaban atas kewenangan daerah dalam hal pengelolaan keuangan baik dari sisi pendapatan maupun sisi alokasi belanja. Penataan dan pengelolaan pendapatan daerah dituntut untuk dapat menjadikan pendapatan daerah yang optimal, tertata dengan baik, tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan kebutuhan, demikian pula penataan pada sisi belanja dan pembiayaan yang mencerminkan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pada setiap Perangkat Daerah harus menyusun sebuah dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan bentuk akhir pada periode 5 tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD), berfungsi sebagai dokumen perencana teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, yang selanjutnya dijabarkan kembali dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan.

RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD 2025-2029 memuat tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2029 dengan mengacu pada visi misi jangka panjang daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan rencana jangka panjang daerah, dan mempertimbangkan isu-isu strategis aktual

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo disusun dengan proses berikut :

1. Pengumpulan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
5. Telaah terhadap rangcangan akhir RKPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen Renja Perangkat Daerah
10. Penyempurnaan rangcangan akhir Renja Perangkat Daerah
11. Penyesuaian dokumen Renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo (2005-2026);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan;
18. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusun Rencana Kerja BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan daerah secara komprehensif.

Renja PD disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), memastikan kesinambungan dan keterkaitan antara dokumen perencanaan. Renja PD juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renja BKAD adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 antara DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Bupati Kulon Progo yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Review terhadap RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026, BKAD Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2024 melaksanakan 4 (empat) program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan:

   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

      Sub Kegiatan :

      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      - Penyediaan gaji dan Tunjangan
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      - Pelaksanaan Penatausanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      - Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
      - Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai

   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

      Sub Kegiatan :

      - Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah

Sub Kegiatan:

- Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pemeliharan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan:

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan:

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- Koordinasi pelaksanaan piutang dan Utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sub Kegiatan:

- Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, tiwulanan dan Semesteran
- Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/Kota

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah:

Sub Kegiatan:

- Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- Pengelolaan Dana bagi Hasil kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Barang Milik daerah

Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik daerah

Sub kegiatan :

- Penyusunan Standarisasi Harga
- Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik daerah
- Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, Pemindah-tanganan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik daerah
- Penyusunan Laporan Barang Milik daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan :

- Perencanaan pengelolaan Pajak daerah
- Analisis dan Pengembangan Pajak daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak darah
- Pendataan dan Pendaftaran obyek Pajak daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah

- Penagihan Pajak daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
- Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama BKAD sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Pengukuran Kinerja Utama BKAD Kulon Progo
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan asset	%	97,72	98,39
2	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100	100

Tabel II
Pengukuran Kinerja Program utama BKAD Kulon Progo
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Cakupan peningkatan penyusunan rencana anggaran daerah	%	100	100
		Cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan	%	95,17	98,50
		Capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan	%	100	100
		Cakupan Peningkatan penerimaan pajak daerah	%	100	80,81
		Cakupan Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	75,02	71,93

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
		Cakupan peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	100

Total anggaran belanja untuk mendukung semua kegiatan BKAD selaku PD adalah sebesar Rp. 234.732.315.055,00. Sampai dengan triwulan IV realisasi anggaran sebesar Rp. 225.811.833.655,00 dengan prosentase mencapai 96,20 %.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.117.420.030.392,16 atau 85,68 dari anggaran sebesar Rp 137.039.544.457,00 . Realisasi PAD TA 2024 mengalami penurunan sebesar 3,56% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023.

Mendasar kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, penyajian klasifikasi dan nomenklatur jenis-jenis pendapatan daerah mengalami beberapa perubahan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menuang ketentuan terkait pajak dan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini, realisasi pendapatan disajikan sesuai nomenklatur pada APBD Tahun Anggaran 2024, dengan cut of realisasi bulan Maret 2024 (realisasi setelah Maret 2024 disajikan pada pos tersebut dengan nomenklatur baru)

Realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.91.693.644.130,00 atau 80,81% dari anggaran sebesar Rp.113.474.897.520,00. Realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalani penurunan sebesar 5,11% dibanding realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah, meliputi :

1. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah
2. Optimalisasi/pengelolaan aset daerah
3. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sistem administrasi
6. Peningkatan pelayanan pajak dan digitalisasi pembayaran pajak dengan mendukung ETPD (Elektronifikasi-Transaksi Pemerintah Daerah)

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra BKAD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel T-C 29 berikut:

Tabel T-C 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA OPD TAHUN 2024
KABUPATEN KULON PROGO

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
															REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**129.691,53**	**100**	**25.641,29**	**100**	**32.325,27**	**100**	**27.441,69**	**100**	**84,89**	**100**		**100,00**	**100,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*														
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	66,87	2	15,21	2	11,38	2	7,82	100	68,72	2	42,328	2	25
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	62,84	21	14,38	21	15,48	21	13,16	100	85,01	21	10,724	21	25
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*														
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	280	123.808,37	12	23.276,69	13	31.016,78	13	26.488,24	100	85,40	13	26.062	12,5	4,46
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	4	419,62	12	103,22	1	108,88	1	100,65	100	92,44	1	94,768	6,5	162,5

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
															REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		ASN														
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20	94,43	12	22,18	12	20,77	12		100	0,00	12	17,996	12	60
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	135,18	12	33,88	14	36,31	14	35,39		97,47	14	36,615		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian*														
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	0	0	1	1,79	0	-	0	0,00	1	2,00	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	72	3	45	2	12	2	6	100	50,00	2	12,00	2,5	20,83
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*														
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	552,03	12	57,95	6	54,56	6	48,08	100	88,12	6	44,736	9	18,75
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	24	259,54	12	234,74	12	122,6	12	98,02	100	79,95	12	25,326	12	50

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
															REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*														
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	403,3	12	63,32	12	97,85	12	63,71		65,11	12	152,477		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	144	836,92	11	242,29	12	269,24	12	268,21	100	99,62	12	266,031	11,5	7,99
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*														
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	287	1.666,18	94	686,33	0	190,85			0,00	0,00	0	114	47	16,38
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*													0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	156	581,04	46	175,12	39	238,04	39	190,63		80,08	39	238,078		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	418,58	2	604,61	2	10	2	7,68	100	76,80	2	15,000	2	25

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
															REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	428	299,63	30	66,37	107	118,75	107	114,12	100	96,10	107	106,250	68,5	16,00
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah															
		Cakupan pengelolaan anggaran	**100**	**804.462,39**	**100**	**185.901,99**	**100**	**195.993,29**	**100**	**192.166,89**			**100**			
		Cakupan pengelolaan perbendaharaan	**95,7**		**97,72**		**95,17**		**91,71**				**95,17**			
		Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan	**100**		**100**		**100**		**100**				**100**			
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah penerbitan dokumen penganggaran daerah (%)*														
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	16	426,17	4	98,59	4	93,77	4	54,22	100	57,82	4	108,053	4	25
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	DPA- SKPD yang Diverifikasi	340	313,82	85	62,42	85	63,96	85	49,2	100	76,92	85	62,366	85	25
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	48	1.261,12	12	277,83	12	304,4	12	281,97	100	92,63	12	271,926	12	25

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
															REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8	497,03	2	111,88	1	106,17	1	101,57			1	108,922		
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan*														
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	448	386,92	16	84,69	110	92,43	110	59,03	100	63,86	110	107,305	63	14,06
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	13840	103,44	12	22,96	12	221,85	12	96,9	100	43,68	12	20,577	12	0,09
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	8	50,44	2	11,55	2	13,07	2	7,83	100	59,91	2	13,985	2	25
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	504	723,44	126	162,21	42	184,08	42	135,22	100	73,46	42	220,093	84	16,67
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan*														

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
															REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	-Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	672	107,06	168	23,89	168	30	168	21,34			168	35,000		
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	68	87,2	17	17,86	17	25	17	22,1	100	88,40	17	30,000	17	25
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2016	321,09	126	68,85	504	58,99	504	43,91	100	74,44	504	58,176	315	15,63
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	8	349,12	2	80,14	12	99,76	12	98,96		99,20	12	64,067		

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
															REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Jumlah laporan yang terselesaikan*														
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis	48	672.958,07	6	173.496,91	6	177.719,05	6	177.719,05	100	100,00	6	174.973,244	6	12,5
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	8	79.362,37	6	1.092,33		3.485,54		1.221,56		35,05		4.800		
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	aporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	8	47.515,09	0	10.289,88	2	13.495,23	2	10.938,79		81,06	2	13.369,447		
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Cakupan pengelolaan barang milik daerah**	**100**	**1.082,90**	**100**	**1.086,22**	**100**	**387,95**	**70,83**	**347,53**			**100**		85,415	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah*														
	Penyusunan Standar Harga	Standar Harga yang Disusun	8	410,5	2	115,77	2	102,45	2	97,63		95,30	2	106,635		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	12	72,77	3	95,96	3	15,06	3	11,74	100	77,95	3	12,032	3	25
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	8	218,87	2	688,13	2	56,54	2	34,56	100	61,12	2	48,192	2	25

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
															REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	24	240,94	6	130,83	6	141,46	6	136,8		96,71	6	38,186		
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16	139,88	2	55,53	4	72,43	4	66,8	100	92,23	4	72,000	3	18,75
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah															
		Presentase penerimaan pajak daerah	**100**	**17.176,43**	**84,28**	**5.281,92**	**100**	**6.025,82**	**36,63**	**5.652,30**			**100**			
		Presentase capaian pendapatan daerah	**86,2**		**104,2**		**75,02**		**50,93**				**75,02**			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah*														
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	8	363,55	2	51,15	2	161,05	2	144,07	100	89,46	2	66,406	2	25
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	16	412,65	4	158,36	4	87,53	4	69,75	100	79,69	4	80,888	4	25
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek	32	10.436,25	8	2.501,22	8	2.688,50	8	2.623,70	100	97,59	8	2.282,528	8	25

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2025)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
															REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14
			K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pajak dan Wajib Pajak Daerah														
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1E+06	3.968,23	353127	1.948,79	12	2.237,99	12	2.051,10	100	91,65	12	1.985,713	176569,5	12,50
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	65	677,17	29	236,2	29	344,21	29	307,18	100	89,24	29	365,792	29	44,62
	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	848	579	212	231,81	212	230	212	208,7	100	90,74	212	316,782	212	25,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8	400,23	1	80,85	2	190,24	2	168,46	100	88,55	2	8,617	1,5	18,75
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi	7	339,02	1	73,55	2	86,3	2	79,34	100	91,94	2	74,707	1,5	21,43

Berdasarkan data realisasi renja SKPD sampai dengan triwulan IV diatas, target kinerja program kegiatan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan, walaupun masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah dan kualitas personil yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;
2. Dinamika ketentuan perundangan tentang perencanaan penganggaran daerah dan aplikasi SIPD berakibat pada ketidapastian tahapan dalam penyusunan APBD

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Optimalisasi ASN yang ada;
2. Koordinasi intensif dengan seluruh OPD dan membangun komunikasi dengan pihak lain dalam penyusunan perencanaan penganggaran sehingga APBD ditetapkan tepat waktu

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun berdasarkan hasil dari proses perencanaan yang telah disepakati bersama.

Sesuai tugas pokok dan fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan 1 (satu) urusan wajib pemerintahan yaitu urusan keuangan. Pada tahun 2024 BKAD Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan 4 program dan 44 sub kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

Untuk indikator kinerja utama Cakupan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 98,39 %.

Realisasi pendapatan pada triwulan IV tahun 2024 dalam APBD sebesar Rp 1.514.859.019.883,16 dari target Rp 1.547.009.486.585,00 Sedangkan realisasi belanja pada triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp 225.811.833.655,00 dari target belanja pada APBD tahun 2024 sebesar Rp 234.732.315.055,00

Adapun capaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel T-C 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKAD
KABUPATEN KULON PROGO

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian %		Proyeksi %		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***
A	Indikator Kinerja Kunci (IKK):											
	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (opini BPK)		V	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	V		84,50	84,75	85,00	84,60	84,50	84,50	84,75	84,60	
B	Indikator Kinerja SKPD											
	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset		V	95,17	95,43	95,68	72,93	98,39	95,17	95,43	72,93	
	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah		V	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 ISU-ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

a. Tingkat kinerja Pelayanan

Guna mendukung pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan maka tidak lepas dari faktor pendanaan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun pembangunan di bidang keuangan daerah, sumber-sumber dana yang dipergunakan adalah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penerimaan keuangan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari aspek keuangan, pelaksanaan kegiatan di BKAD selain OPD juga melaksanakan fungsi selaku SKPKD. Selaku SKPKD struktur anggarannya terbagi dalam bagian pendapatan, bagian belanja dan pembiayaan.

Bagian pendapatan meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, bagian belanja terdiri dari operasi, modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, bagian pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan BKAD selaku OPD terbagi dalam pendapatan dan belanja, pendapatan terdiri dari PAD sedangkan belanja terbagi dalam balanja operasi, modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD :
   1. Kurangnya jumlah kualitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan tugas sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
   2. Kesadaran wajib pajak pada jenis pajak tertentu masih rendah;
   3. Perubahan kebijakan dari pusat maupun daerah yang dinamis;
   4. Terkait kebijakan dari pusat mengenai transfer keuangan daerah dan dana desa yang harus memberikan ruang fleksibilitas dalam perencanaan dan penganggaran *(mandatory spending)*, disisi lain tidak diperbolehkan adanya SILPA yang memadai sebagai cadangan kas.
   5. Adanya invaliditas data pada pajak daerah yang diakibatkan oleh aplikasi yang belum optimal.
   6. Dinamika perubahan kebijakan dari pusat yang sangat cepat sehingga tidak dapat diprediksi dan membuat kesulitan dalam penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan keuangan.
   7. Belum optimalnya pendapatan daerah.

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah (RPJMD)

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo adalah " Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan".

Dikaitkan dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 serta penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang urusan keuangan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas BKAD terkait erat dengan pencapaian misi ke 3, yaitu " Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang

Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis".

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029 dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta tercapainya peningkatan pendapatan daerah.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan :

1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan *good governance*;
2. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat;
3. Kesadaran wajib pungut pajak masih rendah;
4. Dinamika perubahan peraturan dari pusat yang sangat cepat.

Peluang :

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPD Kabupaten Kulon Progo melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis akrual;
3. Hubungan kerja dengan instansi terkait telah terjalin dengan baik.
4. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
5. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis dan pengambilan keputusan;
6. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun legeslatif.

7. Formulasi Isu-isu penting dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah :
    1. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Daerah;
    2. Meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh PAD guna menambah sumber pendapatan;
    3. Optimalisasi sistem informasi untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah;
    4. Tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan BMD.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan BKAD Kabupaten Kulon Progo. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BKAD.

Dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pada 22 Januari 2025. Pemerintah Daerah diharapkan untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor, dengan pembatasan belanja non-prioritas, membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50%, belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur dibatasi. Anggaran difokuskan untuk pada kinerja pelayanan publik. Kebijakan tersebut sangat mempengaruhi rencana anggaran program dan kegiatan karena dilakukan efisiensi terhadap rancanagn awal Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tidak diatur lagi tentang bagi hasil pajak tetapi diterapkan sistem Opsen. Pemerintah kabupaten/kota memungut tambahan pajak secara langsung pada pemilik kendaraan saat melakukan

pembayaran pajak. Opsen yang dikenakan sebesar 66%. Opsen pajak adalah pungutan tambahan pajak dengan persentase tertentu yang dikenakan atas pajak terutang. Pengenaan opsen ini telah diatur untuk mendukung pemenuhan belanja daerah dan pembangunan infrastruktur.

Penjabaran dari rancangan rencana kerja BKAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut :

Tabel T-C. 31

REVIEW TERHADAP RKPD BKAD TAHUN 2026
KABUPATEN KULON PROGO

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	RKPD 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					**226.405.010.205**	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**				**226.435.445.305**	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					**226.405.010.205**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**226.435.445.305**	
	KEUANGAN					**226.405.010.205**	**KEUANGAN**				**226.435.445.305**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Lingkup BKAD	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**100**	**27.547.775.361**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Lingkup BKAD	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	**100**	**27.512.775.361**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Lingkup BKAD	***Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu***	**2 Dokumen**	**33.016.700**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Lingkup BKAD	***Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu***	**2 Dokumen**	**33.016.700**	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup BKAD	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	29.323.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup BKAD	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	29.323.700	
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup BKAD	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	21 Laporan	3.693.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup BKAD	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	21 Laporan	3.693.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Lingkup BKAD	***Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu***	**4 Dokumen**	**26.387.743.692**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Lingkup BKAD	***Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu***	**4 Dokumen**	**26.387.743.692**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lingkup BKAD	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	75 Orang/bulan	26.261.460.892	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lingkup BKAD	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	75 Orang/bulan	26.261.460.892	

No	RKPD 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lingkup BKAD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	87.501.100	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lingkup BKAD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	87.501.100	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lingkup BKAD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	3.695.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lingkup BKAD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	3.695.800	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lingkup BKAD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	14 Laporan	35.085.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lingkup BKAD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	14 Laporan	35.085.900	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Lingkup BKAD	***Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian***	**2 Dokumen**	**12.280.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Lingkup BKAD	***Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian***	**2 Dokumen**	**12.280.000**	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Lingkup BKAD	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	1 Dokumen	1.780.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Lingkup BKAD	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	1 Dokumen	1.780.000	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lingkup BKAD	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	3 Orang	10.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lingkup BKAD	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	3 Orang	10.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Lingkup BKAD	***Jumlah dokumen administrasi umum***	**2 Dokumen**	**194.938.902**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Lingkup BKAD	***Jumlah dokumen administrasi umum***	**2 Dokumen**	**194.938.902**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lingkup BKAD	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	26.512.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lingkup BKAD	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	26.512.600	

No	RKPD 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lingkup BKAD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	168.426.302	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lingkup BKAD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	168.426.302	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Lingkup BKAD**	***Jumlah dokumen pengadaan***	**1 Dokumen**	**111.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Lingkup BKAD**		**1 Dokumen**	**111.000.000**	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup BKAD	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	111.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup BKAD	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	111.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Lingkup BKAD	***Jumlah dokumen administrasi umum***	**2 Dokumen**	**429.818.317**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Lingkup BKAD	***Jumlah dokumen administrasi umum***	**2 Dokumen**	**429.818.317**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lingkup BKAD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	152.476.929	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lingkup BKAD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	152.476.929	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lingkup BKAD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	277.341.388	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lingkup BKAD	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	277.341.388	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Lingkup BKAD	***Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah***	**3 Dokumen**	**378.977.750**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Lingkup BKAD	***Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah***	**3 Dokumen**	**343.977.750**	

No	RKPD 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lingkup BKAD	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	33 Unit	236.071.150	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lingkup BKAD	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	33 Unit	236.071.150	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lingkup BKAD	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	48.350.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lingkup BKAD	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	48.350.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup BKAD	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	107 Unit	94.556.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup BKAD	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	107 Unit	94.556.600	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		Kab. Kulon Progo	Cakupan pengelolaan anggaran Cakupan pengelolaan perbendaharaan Cakupan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan		**193.621.118.844**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Kab. Kulon Progo	Cakupan pengelolaan anggaran Cakupan pengelolaan perbendaharaan Cakupan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan		**193.621.118.844**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Kab. Kulon Progo	***Jumlah penerbitan dokumen penganggaran daerah***	**4 Dokumen**	**405.210.200**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Kab. Kulon Progo	***Jumlah penerbitan dokumen penganggaran daerah***	**4 Dokumen**	**405.210.200**	
	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	4 Dokumen	60.811.400	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	4 Dokumen	60.811.400	
	2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Kulon Progo	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi*	85 Dokumen	29.393.500	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Kulon Progo	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi*	85 Dokumen	29.393.500	

No	RKPD 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	12 Dokumen	209.146.200	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	12 Dokumen	209.146.200	
	4	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	2 Dokumen	105.859.100	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	2 Dokumen	105.859.100	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Kab. Kulon Progo	***Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan***	**4 Dokumen**	**229.592.900**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Kab. Kulon Progo	***Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan***	**4 Dokumen**	**229.592.900**	
	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	110 Dokumen	50.150.300	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	110 Dokumen	50.150.300	
	2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	12 Dokumen	12.373.400	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	12 Dokumen	12.373.400	
	3	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas*	2 Dokumen	9.446.800	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas*	2 Dokumen	9.446.800	
	4	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	42 Orang	157.622.400	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	42 Orang	157.622.400	

No	RKPD 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Kab. Kulon Progo	***Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan***	**4 Dokumen**	**71.848.300**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Kab. Kulon Progo	***Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan***	**4 Dokumen**	**71.848.300**	
	1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota*	168 Dokumen	7.847.200	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota*	168 Dokumen	7.847.200	
	2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	17 Laporan	2.960.500	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	17 Laporan	2.960.500	
	3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	504 Laporan	7.214.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	504 Laporan	7.214.000	
	4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	*53.826.600	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	53.826.600	

No	RKPD 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Kab. Kulon Progo	***Jumlah laporan yang terselesaikan***	**3 Dokumen**	**192.914.467.444**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Kab. Kulon Progo	***Jumlah laporan yang terselesaikan***	**3 Dokumen**	**192.914.467.444**	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	12 Laporan	171.617.615.400	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	12 Laporan	171.617.615.400	
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	2 Laporan	5.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	2 Laporan	5.000.000.000	
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*	2 Laporan	16.296.852.044	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*	2 Laporan	16.296.852.044	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		Kab. Kulon Progo	***Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah***	**100**	**208.231.700**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Kab. Kulon Progo	***Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah***	**100**	**208.231.800**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kab. Kulon Progo	***Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah***	**5 Dokumen**	**208.231.700**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Kab. Kulon Progo	***Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah***	**5 Dokumen**	**208.231.800**	
	1	Penyusunan Standar Harga	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	3 Dokumen	92.132.900	Penyusunan Standar Harga	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	3 Dokumen	92.132.900	
	2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	3 Dokumen	6.435.800	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	3 Dokumen	6.435.800	
	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	2 Laporan	20.434.700	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	2 Laporan	20.434.700	

No	RKPD 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	6 Dokumen	24.059.800	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	6 Dokumen	24.059.800	
	5	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Lingkup BKAD	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*	4 Laporan	65.168.500	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Lingkup BKAD	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*	4 Laporan	65.168.500	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		Kab. Kulon Progo	***Persentase penerimaan pajak daerah Persentase capaian Pendapatan Daerah***		**5.027.884.300**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Kab. Kulon Progo	***Persentase penerimaan pajak daerah Persentase capaian Pendapatan Daerah***		**4.982.319.300**	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Kab. Kulon Progo	***Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah***	**9 Dokumen**	**5.027.884.300**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		***Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah***	**9 Dokumen**	**4.982.319.300**	
	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah*	2 Dokumen	19.050.700	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah*	2 Dokumen	19.050.700	
	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*	4 Dokumen	30.841.100	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*	4 Dokumen	30.841.100	
	3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	8 Laporan	2.235.164.400	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*	8 Laporan	2.235.164.400	

No	RKPD 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	12 Laporan	1.817.277.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	12 Laporan	1.817.277.000	
	5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	29 Layanan	474.586.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	29 Layanan	474.586.000	
	6	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	12 Dokumen	311.593.000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	12 Dokumen	311.593.000	
	7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	2 Dokumen	52.276.500	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	2 Dokumen	52.276.500	
	8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	2 Laporan	70.969.900	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	2 Laporan	70.969.900	
	9	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	1 Laporan	16.125.700	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	1 Laporan	16.125.700	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam rangka memenuhi kaidah *bottom up planning* maka perlu memperhatikan usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lain. Memperhatikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten tidak terdapat usulan pemangku kepentingan termasuk dari masyarakat hasil musrenbang kapanewon maupun pokok pikiran DPRD terhadap program/kegiatan sesuai fungsi BKAD.

Namun demikian berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan terdapat beberapa masukan yang perlu ditelaah dalam penyusunan perencanaan sebagai berikut :

1) Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah (SIMPATDA, e-SPTPD, SISMIOP, dan e-SPPT serta e-Layanan PBB) masih belum sempurna sehingga data yang disajikan belum sepenuhnya valid. Dalam hal pengolahan data pajak daerah terutama PBB P2 belum sepenuhnya bisa dilakukan *by system* sehingga beberapa tahapan penetapan harus dilaksanakan secara manual dan membutuhkan waktu yang relative lama.
2) Dengan diberlakukannya regulasi baru baik UU, PP, maupun Perda terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka diperlukan pemutakhiran data berupa sawah dan pekarangan untuk masing-masing objek pajak. Hal ini mengingat sesuai dengan regulasi tersebut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk lahan yang berupa sawah berbeda dnegan NJOP lahan yang berupa pekarangan. Di mana NJOP lahan berupa sawah prosentasenya lebih rendah.
3) Kurangnya jumlah kualitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan tugas sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
4) Kesadaran wajib pajak pada jenis pajak tertentu masih rendah;
5) Perubahan kebijakan dari pusat maupun daerah yang dinamis;

6) Terkait kebijakan dari pusat mengenai transfer keuangan daerah dan dana desa yang harus memberikan ruang fleksibilitas dalam perencanaan dan penganggaran *(mandatory spending)*, disisi lain tidak diperbolehkan adanya SILPA yang memadai sebagai cadangan kas.
7) Adanya invaliditas data pada pajak daerah yang diakibatkan oleh aplikasi yang belum optimal.
8) Dinamika perubahan kebijakan dari pusat yang sangat cepat sehingga tidak dapat diprediksi dan membuat kesulitan dalam penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan keuangan.
9) Belum optimalnya pendapatan daerah, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah diantaranya dengan memberikan reward untuk wajib pajak baik pembayaran pajak tahun berjalan maupun pembayaran tunggakan pajak.
10) Belum ada program maupun kegiatan yang merupakan usulan dari masyarakat hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD (Pokok Pikiran DPRD), yang mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, telah diatur tentang Pokok pikiran DPRD. Pokok pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Pokir ini berasal dari reses anggota DPRD, rapat dengar pendapat, atau aspirasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat penting dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan yang setiap tahunnya ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tahapan yang lebih baik harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam tahapan perencanaan dilakukan melalui pembahasan atas kebijakan yang akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat, dengan mempertimbangkan capian kinerja, potensi dan permasalahan serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Sedangkan untuk penganggaran keuangan daerah ditetapkan dalam kebijakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2022 dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan struktur yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan untuk pelaporannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Pelaksanaan pembangunan dan jalannya pemerintahan mempergunakan pendanaan dalam APBD yang tersedia untuk dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, diupayakan adanya pembagian peran dan tanggung jawab

sehingga terlaksana mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah selain mencermati amanat Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, relevansi muatan materi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ada (existing), juga mencermati Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta mempertimbangkan dinamika kebutuhan daerah.

Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat, terdapat arahan presiden tentang transformasi digital, antara lain:

a) Perluasan percepatan akses dan peningkatan infrastruktur digital
b) Peta jalan pelaksanaan transformasi digital
c) Mempersiapkan SDM yang mampu menerapkan percepatan transformasi digital
d) Mempersiapkan regulasi transformasi digital. Selanjutnya pemerintah melalui Kemendagri menerbitkan SE Mendagri nomor 910/14005/SJ tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Regulasi ini diikuti dengan diterbitkannya Keppres nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

1.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi ketiga Kepala Daerah,

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.

Tujuan adalah suatu langkah yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel"

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

" Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah"

RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD 2025-2029 memuat tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2029 dengan mengacu pada visi misi jangka panjang daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan rencana jangka panjang daerah, dan mempertimbangkan isu-isu strategis aktual. Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target sebagaimana dalam dokumen RPJMD 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2026

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP
			Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	nilai	A (85,3)
			Indeks maturitas SPIP	nilai	3,231
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset	Persentase Realisasi Belanja APBD	%	95,89

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Target Kinerja
			Persentase Nilai Aset Tetap yang ada, tercatat dan berfungsi	%	89,76
			Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	%	26,62
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat daerah	Predikat	A (>80-90)
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP perangkat daerah	Level	2,0-3,0

1.3 Program dan Kegiatan

Kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat diukur dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan yaitu diantaranya berupa rasio keuangan dengan menghitung rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pengelolaan keuangan daerah melibatkan pengelolaan berbagai komponen yang saling terkait: perencanaan dan penganggaran, pendapatan, pengelolaan kas dan pengeluaran, pengadaan, pengelolaan aset, pelaporan dan pengawasan.

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 dirumuskan program beserta indikator dan target sebagaimana dalam dokumen RKPD 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Program Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerbitan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100
		Persentase Penerbitan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban	%	100	100	100

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
		Keuangan Daerah Tepat Waktu				
		Persentase Penerbitan SPM yang Lengkap dan Benar	%	78,85	80,00	82,22
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penerbitan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah	Wajib Pajak	366.124	370.858	374.078
		Jumlah Pengawasan dan Penagihan Wajib Pajak Daerah	Wajib Pajak	2.314	2.529	2.740
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	%	100	100	100

Rencana Kerja BKAD tahun 2026 mencakup 4 program terdiri dari 13 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     - Sub Kegiatan:
       a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
       b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan:
     a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
     b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
     c. Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
     d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD
   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - Sub Kegiatan:

a. Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
b. Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan
    a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan daerah
  - Sub Kegiatan:
    a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah
  - Sub Kegiatan:
    a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan:
    a. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
    b. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan gedung lainnya
    c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan daerah
   - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran daerah
     - Sub Kegiatan:
       a. Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
       b. Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
       c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD

d. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
  - Sub Kegiatan :
    a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
    b. Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penertbitan anggaran kas dan SPD
    c. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan uang daerah sebagai optimalisasi kas
    d. Pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - Sub Kegiatan :
    a. Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan pendapatan LO dan beban
    b. Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran
    c. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah daerah
    d. Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penunjang urusan Pengelolaan Keuangan daerah
  - Sub Kegiatan :
    a. Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
    b. Pengelolaan dana darurat dan mendesak
    c. Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/ Kota

3. Program Pengelolaan barang Milik Daerah
   - Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Sub Kegiatan :
  a. Penyusunan Standar Harga
  b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah
  c. Penatausahaan Barang Milik daerah
  d. Optimalisasi penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerahbarang milik daerah
  e. Penyusunan laporan Barang Milik daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan daerah
   - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
     - Sub Kegiatan :
       a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
       b. Analisis dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah
       c. Pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah
       d. Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah
       e. Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah
       f. Penagihan Pajak Daerah
       g. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak daerah
       h. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retrebusi daerah
       i. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan di BKAD Kulon Progo didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (misi ke3) "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang tertib, aman dan tenteram".

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 BKAD Kabupaten Kulon Progo secara detail dapat dilihat pada lampiran berikut.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**226.389.893.845,00**							**237.256.492.816,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**226.389.893.845,00**							**237.256.492.816,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**226.389.893.845,00**							**237.256.492.816,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**27.518.700.501,00**						**-**	**27.805.987.365,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	40.404.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	34.141.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		41.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	6.262.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		9.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	26.398.191.880,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	26.687.987.365,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	26.267.111.380,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		26.551.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	92.299.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		94.325.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	3.695.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		7.162.365,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	35.085.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		35.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	10.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	199.333.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	194.540.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.912.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		31.540.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	168.420.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		163.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	112.793.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	112.340.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	112.793.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		112.340.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	394.795.821,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	393.820.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	112.476.929,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		92.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	282.318.892,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		301.320.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	362.682.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	356.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	251.666.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		238.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	48.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG INFRASTRUKTUR ENERGI TERBARUKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		23.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				107 Unit	62.915.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		95.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**193.609.412.044,00**						**-**	**203.879.505.451,00**	
		[Persentase Penerbitan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu, Persentase Penerbitan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu, Persentase Penerbitan SPM yang Lengkap dan Benar]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**193.609.412.044,00**	-	-	-	-	-	-	**203.879.505.451,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	405.210.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	471.894.480,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	60.811.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		65.704.180,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				85 Dokumen	29.393.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		59.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				12 Dokumen	209.146.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		231.031.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			0				0 0	105.859.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		115.859.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	229.586.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	190.904.180,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				110 Dokumen	50.148.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		55.704.180,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				12 Dokumen	12.370.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		23.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	9.444.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		19.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				42 Orang	157.622.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		92.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	60.148.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	94.800.591,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				168 Dokumen	7.847.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		11.430.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	6.260.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		11.236.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				504 Laporan	7.214.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		12.834.591,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	38.826.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		59.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	192.914.467.444,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	203.121.906.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	171.617.615.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		183.721.906.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				2 Laporan	5.000.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		5.400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				12 Laporan	16.296.852.044,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		14.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**208.230.800,00**						**-**	**227.000.000,00**	
		[Persentase Penerbitan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**208.230.800,00**	-	-	-	-	-	-	**227.000.000,00**	-
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	208.230.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	227.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				3 Dokumen	92.132.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		103.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	6.435.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	20.434.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		22.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				6 Dokumen	24.059.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				4 Laporan	65.168.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		66.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**5.053.550.500,00**						**-**	**5.344.000.000,00**	
		[Jumlah Wajib Pajak Daerah, Jumlah Pengawasan dan Penagihan Wajib Pajak Daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.053.550.500,00**	-	-	-	-	-	-	**5.344.000.000,00**	-
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	5.053.550.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	5.344.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	19.050.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	30.841.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		32.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				8 Laporan	2.159.540.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.160.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	1.817.276.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.890.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				29 Layanan	502.931.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		560.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	311.593.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		537.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	115.801.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		53.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	80.389.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.053.550.500,00**	-	-	-	-	-	-	**5.344.000.000,00**	-
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	16.125.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		17.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H							**226.389.893.845,00**							**237.256.492.816,00**	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Tahun 2026 dipengaruhi oleh 2 (dua) kebijakan yakni Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APDN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang berlaku mulai 5 Januari 2025. Tujuan Opsen PKB memperbaiki postur APBD kabupaten/kota dan penurunan belanja mandatory bagi provinsi. Dengan adanya Opsen Pajak Daerah, bagian penerimaan PKB dan BBNKB kabupaten/kota bergeser dari penerimaan bagi hasil menjadi penerimaan PAD yaitu Pajak Daerah.

Di wilayah Kabupaten Kulon Progo pemilik kendaraan bermotor lebih sedikit dari kabupaten lain di Provinsi DIY sehingga pendapatan dari pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo menurun karena prosentase jumlah kendaraan bermotor lebih kecil dari kabupaten lain.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Operasi Gabungan yang melibatkan SAMSAT, Kepolisian, serta Jasa Raharja Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya terpadu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan pelaksanaan rencana strategis ke-2, periode renstra 2025-2029. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi BKAD dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BKAD Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan PD Tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan dan karyawati BKAD Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Wates, 29 Juli 2025

Kepala BKAD

Kabupaten Kulon Progo

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAUFIQ AMRULLAH, ST, MM

NIP. 197004061999031003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

RENCANA KERJA
(RENJA)
BKPSDM KAB. KULON PROGO

2026



Jl. Perwakilan No. 1 Wates
https://bkpsdm.kulonprogokab.go.id

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Renja BKPSDM) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026.

Renja BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 memuat usulan program kegiatan tahun 2026, yang merupakan penjabaran target program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Program kegiatan tersebut disusun sebagai arahan dan panduan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Renja BKPSDM Tahun Anggaran 2026 menjadi pedoman untuk mewujudkan pelayanan publik khususnya sumber daya aparatur.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, arahan, serta kerjasamanya sehingga Renja BKPSDM Tahun 2026 dapat diselesaikan. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renja ini, sehingga kami sangat membutuhkan saran dan masukan yang membangun guna menyempurnakan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat, serta menjadi pedoman bagi segenap Aparatur dalam lingkup BKPSDM dalam mencapai tujuan, sasaran, dan kinerja program BKPSDM.

Wates, 29 Juli 2025

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KULON PROGO

SUDARMANTO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19730512 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU **7**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 27

2.4 Reviu terhadap RKPD 30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **40**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Pemda DIY 31

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 32

3.3 Program dan Kegiatan 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **45**

BAB V PENUTUP **59**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 7
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Program BKPSDM 8
Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2024 9
Tabel 2.4 Jumlah Usulan formasi CPNS Tahun 2024 17
Tabel 2.5 Jumlah Penetapan formasi CPNS Tahun 2024 18
Tabel 2.6 Jumlah Formasi Pegadaan CASN 2023 18
Tabel 2.7 Keluaran Subkegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Tahun 2024 20
Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tahun 2024 22
Tabel 2.9 Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tahun 2024 22
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kulon Progo 26
Tabel 2.11 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 31
Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Tujuan BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 41
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran BKPSDM Tahun 2026 41
Tabel 3.3 Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Kulon ProgoTahun 2026 42
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Program BKPSDM Tahun 2026 44
Tabel 4.1 Pemetaan Indikator Kinerja Dan Target Program Kegiatan Dan Subkegiatan Tahun 2026 46

DAFTAR TABEL

Gambar 2.1 Pelaksanaan Diklat Keistimewaan Yogyakarta bagi Pejabat Administrator 23

Gambar 2.2 Pelaksanaan Diklat Keistimewaan Yogyakarta bagi Pejabat Pengawas 23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kulon Progo memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan penyusunan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan, pengorganisasian pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan. Prioritas Rancangan Renja BKPSDM Tahun 2026 diarahkan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Program Kepegawaian Daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan sasaran pelaksanaan tahun 2026.

Sistematika Penyusunan Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rancangan Awal Renja juga berpedoman pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor. 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226)

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1).
25. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 126);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun dengan maksud menyediakan acuan bagi seluruh aparatur Perangkat Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2026 adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan;
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat pemerintah daerah, DPRD serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan

kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten dan APBD Pemda DIY;

3. Menjabarkan tentang kondisi umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo serta capaian kinerja di bidang yang menjadi ketugasan Badan Kepegawaian Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun yang berjalan sebagai tolak ukur tercapainya visi dan misi Kepala Daerah;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviu terhadap RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024, BKPSDM Kabupaten Kulon Progo melaksanakan 3 (tiga) Program, 12 Kegiatan, dan 27 Subkegiatan. Pengukuran kinerja BKPSDM didasarkan pada sasaran, dengan capaian tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

Sasaran OPD	IKU OPD	Target (%)	Target Perubahan (%)	Realisasi (%)*
Meningkatnya kualitas aparatur	Capaian peningkatan kualitas aparatur	59,04	64,30	64,47
Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dokumen RPD 2023-2026

Realisasi kinerja BKPSDM Tahun Anggaran 2024 berhasil melampau target, hal ini dikarenakan jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kapasitas Aparatur (PKA) berupa Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan Diklat teknis melebihi target. Pada tahun 2024, kegiatan Pengembangan Kompetensi berupa Diklat fungsional masih banyak dilaksanakan secara *online* melalui *zoom meeting* sehingga banyak diikuti oleh ASN. Adanya dukungan Sistem Informasi Diklat (SIDIK) memudahkan dalam merekapitulasi usulan-usulan kegiatan diklat ASN. Kegiatan pengembangan kompetensi ASN juga menjadi bagian dari penilaian kinerja individu yang harus dipenuhi oleh ASN yaitu minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.

Berlandaskan pada Dokumen Renstra BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, Capaian indikator kinerja program BKPSDM terdiri dari 3 (tiga) indikator sebagaimana dituangkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Program BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Indikator	Target (%)	Target Perubahan (%)	Realisasi (%)	Keterangan
1	Capaian Pengembangan Aparatur	45,10	65,35	62,64	Tercapainya indikator ini karena banyak ASN yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi, baik secara daring maupun luring, serta adanya kewajiban pemenuhan kegiatan pengembangan kompetensi.
2	Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur	82,81	82,81	79,11	Tidak tercapainya indikator ini dikarenakan ketersediaan Pegawai masih jauh dari kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan. Jumlah ASN yang direkrut lebih sedikit dari pada jumlah ASN yang pension.
3	Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur	99,98	99,98	99,93	Tidak tercapainya indikator ini dikarenakan banyaknya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada ASN

Jumlah anggaran BKPSDM Tahun Anggaran 2024 termasuk belanja gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp. 127.543.848.583,- dan Jumlah realisasi anggaran tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 126.163.384.433,- Sehingga persentase capaian realisasi anggaran BKPSDM tahun anggaran 2024 adalah 98,92 persen. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 tercantum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2024
BKPSDM Kabupaten Kulon Progo

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/4)*
4				**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	01			**SEKRETARIAT DAERAH**									
4	01	04		**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan**	**100**	**100**			**100**	**100**	**100**	**100**
4	*01*	*04*	*5.02*	*Peningkatan Budaya Pemerintahan*	*Jumlah Pelaksanaan Diklat Keistimewaan*	***210***							
4	01	04	5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	210	1	2	2	100	2	5	63,00
5				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**03**			**KEPEGAWAIAN**									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	03	01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100	100	100		100	100	100	100
5	*03*	*01*	*2.01*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu*	*23*	*23*			*90*	*23*	*46*	50
5	03	01	2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100	2	4	50
5	03	01	2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	21	21	21	100	21	42	50
5	*03*	*01*	*2.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	*14*	*14*	*14*	*14*	*100*	*14*	*14*	*50*
5	03	01	2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	45	12	12	100	48	48	50
5	03	01	2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	100	1	2	50
5	03	01	2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	14	14	14	14	100	14	28	50

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD								
5	*03*	*01*	*2.05*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*	*2*	*1*	*1*	*1*	*100*	*1*	*2*	*50*
5	03	01	2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	4	3	3	100	4	8	50
5	*03*	*01*	*2.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*	*2*	*2*				*2*	*4*	*50*
5	03	01	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	5	5	100	1	2	50
5	03	01	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100	12	12	50
5	*03*	*01*	*2.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	*24*	*24*				*24*	*24*	100
5	*03*	*01*	*2.08.0002*	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
5	*03*	*01*	*2.08.0004*	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	*03*	*01*	*2.09*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*3*	*3*			*100*	*3*	*3*	100
5	*03*	*01*	*2.09.0002*	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	14	12	12	100	15	15	100
5	*03*	*01*	*2.09.0009*	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	1	100
5	*03*	*01*	*2.09.0010*	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	16	18	18	100	16	16	100
5	**03**	**02**		**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Cakupan Pengembangan Aparatur**	**45,41**	**64,38**	**65,35**	**62,64**	**95,85**	**65,35**	**65,35**	**100**
					Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur	**85,44**	**80,44**	**82,81**	**79,11**	**95,53**	**84,07**	**82,81**	**98,50**
					Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur	**99,98**	**99,41**	**99,98**	**99,93**	**99,94**	**99,98**	**99,97**	**99,98**
5	*03*	*02*	*2.01*	*Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	*3*	*3*	*3*	*3*	*100*	*3*	*3*	50
5	03	02	2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian	2	2	2	1	100	1	1	50

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	dan Informasi Kepegawaian ASN								
5	03	02	2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	1	1	0	0	1	1	50
5	03	02	2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	1	0	0	2	2	50
5	*03*	*02*	*2.02*	*Mutasi dan Promosi ASN*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat*	*3*	*3*	*3*	*3*	*100*	*3*	*3*	*50*
5	03	02	2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	300	230	232	100,80	100	230	230	50
5	03	02	2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700	993	700	976	141	700	700	50
5	03	02	2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	26	5	5	4	80	5	5	50
5	*03*	*02*	*2.03*	*Pengembangan Kompetensi ASN*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kompetensi ASN*	*4*	*4*			*100*	*4*	*8*	*50*

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	03	02	2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	70	70	70	70	100	70	70	50
5	03	02	2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80	80	52	52	100	65	65	50
5	03	02	2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3	3	3	3	100	3	6	50
5	03	02	2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100	100	100	151	151	100	100	50
5	*03*	*02*	*2.04*	*Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	*2*	*2*			*100*	*2*	*4*	*50*
5	03	02	2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	27	27	27	27	100	27	27	100
5	03	02	2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5	11	5	14	280	5	5	100

2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan utama pada BKPSDM yang mendukung visi, misi, dan program RPJMD terhadap tugas pokok dan fungsi BKPSDM adalah sebagai berikut:

I. Program Kepegawaian Daerah

a. Pengelolaan Mutasi ASN

Redistribusi pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional umum tahun 2024 sejumlah 232 orang dari target 230 orang. Capaian redistribusi ini mencakup pemindahan PNS di internal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan juga mutasi PNS masuk dari luar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Redistribusi yang dimaksud adalah penataan/pemindahan baik ASN dalam instansi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo baik dari satu jabatan ke jabatan lain pada unit organisasi (unor) yang sama, atau dari jabatan berbeda dengan unor berbeda, baik pada kelas jabatan yang setara, lebih tinggi, maupun lebih rendah dan mutase antar instansi masuk ataupun keluar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Mutasi didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan yang ditetapkan dalam peta jabatan.

b. Pengelolaan kenaikan pangkat PNS

Jumlah kenaikan pangkat yang diusulkan sejumlah 976 dan telah diterbitkan SK kenaikan pangkat sejumlah 964 SK di tahun 2024. Kenaikan pangkat khususnya untuk Jabatan Fungsional memiliki ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi. Jumlah usulan kenaikan pangkat yang tidak disetujui dengan alasan sebagai berikut:

a. Masih sering ditemui ketidaksesuaian data PNS pada SIASN, diantaranya ditemukan data PNS yang sebenarnya masih berpangkat Pembina golongan ruang IV/a, namun pada SIASN sudah dinyatakan berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
b. Penilaian Angka Kredit (PAK) belum tertata mulai dari PAK Konvensional, PAK Integrasi, dan PAK Konversi. Kemudian angka kredit yang dimasukkan dalam PAK Integrasi dan PAK Konversi belum tepat, sehingga PAK tidak selaras.
c. Kenaikan pangkat golongan IV/d jenjang utama melalui proses yang cukup Panjang. Usulan diajukan menggunakan aplikasi SIAPP Setkab RI, kemudian berproses ke SIASN, dan penerbitan SK melalui aplikasi SIAPP dan ditandatangani Presiden RI.

Jumlah kenaikan pangkat PNS di tahun 2024mengalami peningkatan karena adanya kebijakan baru terkait periodenisasi proses kenaikan pangkat.

c. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

Pengalihan status PNS dari Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional untuk sebagian unit kerja sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam rangka penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional. Realisasi pengalihan status Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional tercapai sebanyak 373 orang dari target sejumlah 100 orang.

d. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

BKPSDM Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan Ujian Dinas Tingkat I Tahun 2024 bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Ujian diikuti oleh 34 orang peserta, dan dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo. Ke-34 orang peserta tersebut telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dinas, di antaranya mereka telah menduduki Pangkat Pengatur Tk. I Golongan Ruang II/d minimal 2 tahun per 1 Oktober 2024 serta tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin. Ujian Dinas Tingkat I ini merupakan salah satu syarat bagi seorang PNS yang menduduki jabatan pelaksana untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ke Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a.

Ujian dilaksanakan secara CBT (*Computer Based Test*). Dalam Ujian Dinas Tingkat I ini, aplikasi ujian difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Kulon Progo. Dengan metode CBT ini, setelah ujian selesai, nilai ujian yang diperoleh akan langsung tampil di monitor. Sehingga setiap peserta akan langsung mengetahui nilainya masing-masing. Selain itu, proses ujian juga akan berlangsung secara transparan.

Mekanisme pelaksanaan ujian dinas ini mendasar pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara. Keseluruhan

soal berjumlah 100 soal, yang terbagi dalam tiga materi, yakni Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Pengetahuan Umum, dan Tes Substansi Instansi. Peserta yang memperoleh nilai minimal sesuai dengan Batas Nilai Minimal yang telah ditentukan di setiap materi akan dinyatakan Lulus Ujian Dinas Tingkat I, dan akan mendapatkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas.

e. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Subkegiatan ini melaksanakan workshop pada hari ini Senin 25 November 2024 bertempat di Aula Adikarto, Komplek Pemda Kulon Progo, BKPSDM Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan sosialisasi kepegawaian dengan tema "Mengelola Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur untuk Kenaikan Pangkat". Sosialisasi ini diikuti oleh para pengelola kepegawaian di OPD yang mengampu jabatan fungsional. BKPSDM menghadirkan Tim dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta, antara lain Cicih Lasmiyati dan Muhammad Chandra Adiwiguna. Acara sosialisasi ini dikemas dengan mode *talkshow*. Para peserta dihimbau untuk dapat segera mengikuti dan menyesuaikan segala bentuk perubahan regulasi kepegawaian terkait jabatan fungsional, sehingga nantinya tidak ada kendala dalam pengelolaan kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional. Acara ini sekaligus juga dalam rangka mempersiapkan OPD dalam menyongsong kenaikan pangkat PNS Tahun 2025. Dalam acara ini BKPSDM Kabupaten Kulon Progo juga memberikan apresiasi kepada Kanreg I BKN Yogyakarta, atas kinerjanya sehingga kenaikan pangkat bagi PNS Kabupaten Kulon Progo dapat diterima tepat waktu

f. **Pelaksanaan Pengadaan**

Jumlah formasi ASN telah diusulkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Usul Rincian Formasi ASN Pemerintah Kabupaten Kulo Progo Tahun Anggaran 2024 Nomor: SPTJM.URF/6304/2024.1 tanggal 19 April 2024. Jumlah formasi ASN tahun 2024 yang diusulkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Usulan formasi CPNS Tahun 2024

No	Jenis Jabatan	CPNS	PPPK
1	Guru	0	30
	Tenaga Kesehatan	12	37
	Tenaga Teknis	78	138
	Jumlah	**90**	**205**

Sumber: BKPP Kabupaten Kulon Progo, 2024

Jumlah formasi Calon Pegwai Negeri Sipil yang disetujui, ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 tanggal 2 Juli 2024. Jumlah formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 2 Agustus 2024. Adapun jumlah formasi yang disetujui dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Penetapan formasi CPNS Tahun 2024

No	Jenis Jabatan	CPNS	PPPK
1	Guru	0	30
	Tenaga Kesehatan	12	37
	Tenaga Teknis	78	138
	Jumlah	**90**	**205**

Sumber: BKPP Kabupaten Kulon Progo, 2024

Hasil pengadaan CASN pada tahun anggaran 2023 dan bekerja pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.6 Jumlah Formasi Pegadaan CASN 2023

No	Jenis ASN	Jumlah Formasi	Jumlah ASN
1	CPNS (Umum)	Tidak ada formasi	Tidak ada formasi
2	PPPK JF Tenaga Kesehatan	52	47
3	PPPK JF Guru	247	243
4	PPPK JF Tenaga Teknis	82	71
	Jumlah	**381**	**361**

g. Pengelolaan Promosi ASN

Realisasi pelaksanaan pelantikan PNS dalam jabatan struktural telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dari target sebanyak 4 (empat) kali. Promosi dan mutasi jabatan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan memberikan arah bagi pengembangan karier aparatur yang dinamis dan terarah. Jumlah pelantikan melebihi target karena

adanya JPT yang mengalami kekosongan pejabat sehingga harus segera dilakukan seleksi terbuka maupun seleksi mutasi dan dilaksanakan pelantikan. Jabatan struktural banyak yang belum terisi karena dalam masa Penjabat Bupati, pelantikan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan pelantikan dari Menteri Dalam Negeri dengan waktu penyelesaian kurang lebih 2-3 bulan. Menteri Dalam Negeri membuat kebijakan membatasi pengisian jabatan maksimal untuk 20 pejabat, menjelang pemilihan Kepala Daerah. Selanjutnya sehubungan Tahun 2025 diberlakukan SOTK baru maka usulan persetujuan pengukuhan/pelantikan pejabat struktural sekaligus mengusulkan pengisian beberapa kekosongan jabatan yang belum terisi di Tahun 2024.

h. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur. Tahun 2024, telah terbit tugas belajar sebanyak 5 orang. Tugas belajar yang dibiaya dari non APBD menyesuaikan dengan adanya pengumuman penerimaan beasiswa dari Kementerian/Lembaga lainnya. Pengelolaan peserta Program Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan terealisasi sejumlah 52 orang.

i. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat

Perubahan Target jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis yang difasilitasi melalui BKPP adalah 677 orang, Capaian sampai dengan Desember 2024 mencapai 707 orang. Adanya peningkatan jumlah ASN yang mengikuti kegiatan diklat ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target IKU OPD. Jumlah ASN yang mengikuti diklat semakin meningkat. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakna bahwa Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Dalam Pasal 203 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sediki 20 (dua puluh) jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten telah memanfaatkan aplikasi SIDIK. Kegiatan pengembangan kompetensi dilaporkan oleh setiap ASN melalui aplikasi SIDIK. Aplikasi SIDIK juga terintegrasi dengan aplikasi E-TPP, apabila ASN tidak dapat memenuhi jumlah minimal 20 JP maka akan mendapatkan sanksi berupa potongan penerimaan tambahan penghasilan (TPP) dan ikut berpengaruh pada penilaian kinerja OPD. Adanya kebijakan tersebut berdampak pada tertibnya ASN dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi secara terus menerus.

Subkegiatan ini melaksanakan berbagai jenis pelaksanaan diklat, yaitu diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis. Diklat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak eksternal antara lain Bandiklat DIY, PPSDM, Universitas dan lembaga pelaksana diklat lainnya. Adapun jumlah pelaksanaan diklat tahun 2024 tercantum pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Keluaran Subkegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Tahun 2024

No	Jenis Diklat	Realisasi
1	Diklat Kepemimpinan	43 Orang
2	Diklat Teknis dan Fungsional	199 Orang
3	Orientasi PPPK	361 orang

j. Pembinaan Disiplin Pegawai

Kepatuhan ASN terhadap tata tertib dan peraturan perundang-undangan tentang Kepegawaian, menjadi salah satu unsur yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja sasaran. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan Disiplin Pegawai. Peraturan Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh PNS. Penegakan disiplin PNS berupa hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS yang melanggar peraturan disiplin PNS. Jumlah hukuman disiplin pada tahun 2024, telah terbit sebanyak 14 (empat belas) Keputusan Hukuman Disiplin PNS, dengan rincian 8 (delapan) Hukuman Disiplin ringan, 1 (satu) Hukuman Disiplin sedang, dan 5 (lima) Hukuman Disiplin berat. Semakin banyak ASN yang mendapat hukuman

disiplin maka capaian pada Cakupan Pembinaan Layanan Aparatur tidak dapat mencapai target, karena target pelangaran disiplin ASN tidak lebih dari 5 (lima) orang ASN.

Hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin sedang ditangani oleh OPD masing-masing, sedangkan hukuman disiplin berat ditangani oleh BKPP. Hukuman disiplin yang diberikan kepada Kepala OPD diproses di BKPP. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penentuan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2023. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 menjadi pedoman teknis penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN dan telah disosialisasikan kepada seluruh OPD.

Jumlah PNS wajib lapor LHKPN sebanyak 131 orang, telah mengisi formulir LHKPN secara *online*. Sehingga, tingkat kepatuhan aparatur wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terealisasi 100 persen.

k. Pengelolaan Data Kepegawaian

Subkegiatan melaksanakan beberapa ketugasan antara lain pelaksanaan uji kesehatan CPNS/PNS, penyelenggaraan KORPRI, penganugerahan Piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) dan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Penganugerahan Satyalancana Karya Satya bagi PNS Kabupaten Kulon Progo telah diberikan kepada 189 orang.

l. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Subkegiatan ini adalah melakukan percepatan penginputan usulan PNS di aplikasi SAPK BKN. Percepatan dilakukan karena aplikasi SAPK digantikan oleh aplikasi SIASN BKN. Melakukan update data pensiun di SIMASNEG dan mengganti kode TPP-nya.

Pengembangan pada SIMASNEG telah dilaksanakan, dengan pembuatan aplikasi *Electronic Reward and Punishment* (ERP). Aplikasi ini dapat memantau kedisiplinan serta pendokumentasian hukuman disiplin ASN.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewan Kabupaten/Kota

BKPSDM Kabupaten Kulon Progo juga melaksanakan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Capaian indikator kinerja program untuk Urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Tahun 2024.

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tahun 2024

No	Program	Indikator	Tahun 2024	
			Target (%)	Realisasi (%)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan ketatlaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	100	100

Indikator kinerja dari Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan adalah Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tahun 2024

No	Uraian	Capaian KinerjaTahun 2024	
		Target (%)	Realisasi (%)
I	**Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan**	**100**	**100**
	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat keistimewaan / Jumlah ASN yang direncanakan mengikuti diklat keistimewaan) x 100%)		
	Jumlah ASN yang mengikuti diklat keistimewaan	30	30
	Jumlah ASN yang direncanakan mengikuti diklat keistimewaan	30	30
	Capaian indikator kinerja	**100**	**100**

Dari tabel di atas diketahui bahwa persentase penyelenggaraan Diklat Keistimewaan terealisasi 100%. Kegiatan penyelenggaraan pelatihan internalisasi Keistimewaan DIY Tahun 2024 dilaksanakan 2 (dua) periode. Kegiatan

penyelenggaraan pelatihan internalisasi Keistimewaan DIY bagi 30 orang Pejabat Administrator dilaksanakan selama 8 (delapan) hari, dimulai dari 22 juli s.d. 1 Agustus 2024 dengan jumlah 68 Jam Pelajaran.



Gambar 2.1 Pelaksanaan Diklat Keistimewaan Yogyakarta bagi Pejabat Administrator

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Internalisasi Keistimewaan DIY bagi Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang Pejabat Pengawas selama 9 (sembilan) hari kerja dimulai pada tanggal 12 - 22 Agustus 2024.



Gambar 2.2 Pelaksanaan Diklat Keistimewaan Yogyakarta bagi Pejabat Pengawas

Materi-materi yang disampaikan pada diklat keistimewaan meliputi:

1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
2. *Building Learning Comitment* (BLC);
3. Sejarah Daerah Istimewa (terbentuknya Undang-Undang Keistimewaan);

4. Perencanaan partisipatif berbasis potensi masalah;
5. Sejarah dan Budaya Kadipaten Pakualaman;
6. Makna 5 (lima) Urusan Keistimewaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
7. Refleksi urusan keistimewaan DIY (kaitan 5 Perdais dengan isu kotemporer);
8. Sejarah Daerah Istimewa (Sejarah berdirinya kerajaan);
9. Pengantar Tata Cara Pemakaian Busana Adat di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
10. Penyusunan Program dan Kegiatan serta Tata Kala Kegiatan dalam 1(satu) Tahun Anggaran;
11. Sejarah Daerah Istimewa (Sejarah Kadipaten Pakualaman)
12. Ajaran Kepemimpinan Asthabrata Kadipaten Pakualam;
13. Penjelasan Penyusunan *Policy Brief Paper;*
14. Pendampungan Penyusunan *Policy Brief Paper;*
15. Wawasan Budaya Yogyakarta;
16. Sesambetane Agama lan Budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
17. Hajad Dalam lan Pranata Mangsa Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
18. Tata Krama Dalam Kraton, Tata Lampah, Tata Bahasa Dalam Kraton Ngayogyakarta Sumbu Filosofis;
19. Visitasi Sumbu Filosofis;
20. Sejarah Kabupaten Kulon Progo
21. Mewarnai Keistimewaan DIY dengan Inovasi ASN;
22. Pendidikan Anti Korupsi
23. Penjelasan Teknis Kegiatan Seminar;
24. Seminar *Policy Brief Paper.*
25. *Pre Test*
26. *Post Test*

Materi-materi tersebut disampaikan oleh narasumber dan pengajar melalui metode ceramah, dialog, praktik/simulasi dan seminar dengan narasumber antara lain:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Paniradya kaistimewaan DIY;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

4. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo
6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah
7. Pakar Hukum/Praktisi Keistimewan DIY
8. Pakar Sejarah
9. Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
10. Abdi Dalem Kadipaten Pakualaman;
11. Kepala Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi (BPKSF);
12. Pengajar di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dan BKPP Kabupaten Kulon progo.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tercantum pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kulon Progo

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thnn-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	Cakupan Peningkatan Profesionalitas ASN	-	-	58,90	64,30	59,11	59,24	64,47			Perhitungan Capaian peningkatan Profesional ASN didapatkan dari kontribusi jumlah ASN yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, Jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Jumlah ASN yang berkinerja baik, dan Jumlah ASN yang tidak diberikan hukuman disiplin. Jumlah ASN yang mengikuti DIklat melebihi target yang telah ditetapkan. Tahun 2024 terdapat perubahan target IKU sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024
1	Indeks Profesionalitas ASN	-	-						83,10	83,20	IKU BKPSDM Tahun 2025-2029 mengacu pada Racangan Awal RPJMD 2025-2029. Nilai Indeks Profesionalitas ASN didapatkan dari hasil penilaian BKN yang diterbitkan satu kali dalam satu tahun

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya. Capaian kinerja sebagian besar kegiatan menunjukkan persentase yang cukup baik sesuai dengan yang telah ditargetkan. Namun demikian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi BKPSDM Kabupaten Kulon Progo antara lain :

a. Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)

Jumlah pegawai yang pensiun per tahunnya mencapai ±300 orang, sedangkan pengadaan CASN untuk tahun 2024 telah diusulkan dan disetujui formasi CASN sejumlah 205 formasi. Pemerintah Daerah harus mengikuti ketentuan dan peraturan dari Kemendagri dan Kementerian PAN RB terkait pengadaan CASN.

b. Penataan personil secara proporsional pada berbagai jabatan sesuai dengan *merit system*

Penataan personil Jabatan Administrasi (JA). Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang harus selalu dilaksanakan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maupun aturan turunannya.

c. Penataan Tenaga Non ASN

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan penataan terhadap tenaga Non ASN. Bagi Non ASN yang tidak diterima CPNS maupun PPPK, diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Paruh Waktu. Adanya ketentuan baru tersebut, maka BKPSDM telah melakukan pendataan dan koordinasi kepada seluruh OPD terkait penataan tenaga non ASN.

d. Kapasitas dan Kompetensi ASN yang belum memadai

Salah satu indikator indeks profesionalitas ASN adalah dimensi kualifikasi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun 2021, untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas PNS berbasis kompetensi. Perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk

pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapakn mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023, berdasarkan Surat BKN Nomor 416/B-AK.02.01/SD/KR.I/2024 tanggal 1 Oktober 2024, Hal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, didapatkan nilai IP ASN Tahun 2024 sebesar 83,03 dengan kategori "Tinggi" menempati posisi ketujuh dari 42 Instansi dalam lingkup BKN Kantor Regional 1 Yogyakarta.

Berdasarkan permasalahan skala nasional, regional, daerah dan berdasarkan jaring pedapat, maka dirumuskan permasalahan berdasarkan tugas pokok BKPSDM dijelaskan sebagai berikut.

a. Kurangnya sumber daya yang kompeten;
b. Penataan tenaga non ASN;
c. Mekanisme pemberian tunjangan kinerja pegawai yang belum memadai;
d. Implementasi Manajemen Talenta belum memadai;
e. Penerapan meritokrasi manajemen ASN belum optimal;
f. Peningkatan kasus pelanggaran disiplin ASN;
g. Digitalisasi manajemen ASN belum optimal.

Dalam melaksanakan ketugasan, terdapat peluang yang dimiliki oleh BKPSDM :

a. Potensi aparatur yang masih dapat dikembangkan;
b. Adanya dukungan pendanaan dari APBN dan Dana Keistimewaan;
c. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang mendukung pelaksanaan manajemen sumber daya aparatur di daerah;
d. Pengembangan inovasi teknologi informasi kepegawaian mendukung pelayanan prima serta program yang terintegrasi dengan aplikasi Pemerintah Pusat.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh BKPSDM dalam melaksanakan ketugasan, sebagai berikut:

a. Tuntutan publik terhadap manajemen PNS yang lebih baik dan transparan mulai dari proses rekrutmen hingga pensiun.
b. Tuntutan masyarakat akan terwujudnya standar pelayanan publik dan profesionalisme PNS.

c. Perkembangan kebijakan pemerintah khususnya di bidang manajemen aparatur yang perlu respon dan tindak lanjut segera.

d. Dinamika perubahan regulasi yang berlaku dalam manajamen ASN.

Berdasarkan permasalahan, peluang dan tantangan yang ada, maka kegiatan prioritas BKPSDM yang perlu dilaksanakan sebagai berikut:

1. Seleksi Penerimaan CASN

Jumlah ASN yang ada masih jauh dari kebutuhan pegawai, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai yang signifikan. Selain itu beban pekerjaan aparatur juga semakin meningkat dan dituntut untuk memahami dan mengaplikasikan teknologi digital dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN. Maka dari itu dibutuhkan tambahan sumber daya manusia yang memadai secara kuantitas dan kualitas.

2. Penyelesaian penataan Non ASN

Pemerintah berkomitmen bahwa tenaga non ASN yang terdata dan belum berkesempatan diterima menjadi PNS maupun PPPK tidak kehilangan pekerjaan, maupun mengalami penurunan pendapatan seperti sebelumnya. Penyisiran serta pembagian tenaga non ASN antar OPD perlu dilakukan, karena beberapa tenaga Non ASN telah diterima sebagai CPNS dan PPPK di tempat yang baru.

3. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Data dan informasi kepegawaian merupakan bahan pokok dalam melakukan desain kebijakan kepegawaian. Oleh karena itu, pengembangan-pengembangan perlu dilaksanakan dalam dalam manajemen data dan informasi kepegawaian yang diwujudkan dalam Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASNEG), berbagai inovasi terus dikembangkan BKPSDM untuk memudahkan layanan serta pemantauan terahdap kedisiplinan ASN.

4. Pembinaan Disiplin Pegawai

Disiplin pegawai merupakan kunci pokok agar kebijakan pemerintah dapat berjalan secara optimal. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai OPD pembina pegawai selalu berupaya meningkatkan pembinaan terhadap disiplin aparatur agar berkinerja baik, jujur dan kompeten. Meskipun telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi peraturan kepegawaian secara massif, namun pelanggaran disiplin oleh ASN masih banyak terjadi. Pada tahun 2024 sejumlah 14 ASN dijatuhi hukuman disiplin. BKPSDM telah mengembangkan aplikasi E-RP, dan perlu terus dipantau agar Tingkat disiplin

ASN semakin meningkat.

5. Peningkatan Kompetensi ASN

Peningkatan kompetensi aparatur mutlak dibutuhkan oleh aparatur sipill Negara. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN yang diukur dari dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Kegiatan peningkatan kompetensi aparatur di era digital menjadi sangat mudah, karena dapat dilakukan melalui kegiatan online, sehingga dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

2.4 Reviu terhadap RKPD

Pada prinsipnya hubungan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah berbanding lurus. Hal ini disebabkan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam program dan kegiatan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

Pada tahapan proses, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selalu melaksanakan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah. Proses tersebut untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara Renstra dengan pelaksanaan program kegiatan. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 tercantum pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	BKPSDM				**131.328.246.742**					**144.644.042.000,00**	
1	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kab. Kulon Progo**			**248.570.000**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kab. Kulon Progo**				
	SEKRETARIAT DAERAH	**Kab. Kulon Progo**			**248.570.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**	**Kab. Kulon Progo**			**390.162.000,00**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kab. Kulon Progo**	**Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan**	**100%**	**248.570.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kab. Kulon Progo**	**Persentase Kepuasan Peserta atas layanan kediklatan minimal baik**	**100%**	**390.162.000,00**	**Terdapat perubahan indikator Program, sesuai dengan Ranwal RPJMD 2025-2029**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Pelaksanaan Diklat Keistimewaan*	*100%*	*248.570.000*	*Peningkatan Budaya Pemerintahan*	*Kab. Kulon Progo*	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*1 Dokumen*	*390.162.000,00*	
	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	60 Orang	248.570.000	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	2 Laporan	390.162.000,00	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**Kab. Kulon Progo**				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kab. Kulon Progo**				
	KEPEGAWAIAN	**Kab. Kulon Progo**				**KEPEGAWAIAN**	**Kab. Kulon Progo**				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Kulon Progo**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**102.514.740.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Kulon Progo**	***Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat***	**100%**	**140.811.433.150,00**	**Terdapat perubahan indikator Program, sesuai dengan Ranwal RPJMD 2025-2029**

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Kabupaten/Kota					***Tinggi***			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu*	23 Dok	*23.000.000*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab. Kulon Progo	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	2 Dok	*17.273.800,00*	*Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan dan target capaian, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029*
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	7.586.800,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	7.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	9.687.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	14 Laporan	*101.863.740.000*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Kab. Kulon Progo	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	3 Dok	*140.401.131.704,00*	*Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan dan target capaian, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029*
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/ Bulan	101.777.740.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2380 Orang/Bulan	140.350.491.504,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	75.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	44.200.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	11.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	6.440.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD					dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*	2 Dok	*20.000.000*						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kulon Progo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	20..000.000						Subkegiatan tidak digunakan lagi, dan ddiakomodir pada Subkegiatan Koordinasi dan Kerjasama Diklat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*	*2 Dok*	*97.000.000*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kab. Kulon Progo*	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*2 Dok*	*62.522.400,00*	*Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan dan target capaian, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029*
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.671.900,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 La[oran	80.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	50.850.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	*24 Laporan*	*175.000.000*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Kulon Progo*	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*2 Dokumen*	*198.406.198,00*	*Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan dan target capaian, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029*
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	65.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	70.214.182,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	110.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	128.192.016,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*3 Laporan*	*142.000.000*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Kulon Progo*	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*3 Dokumen*	*132.099.048,00*	*Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan dan target capaian, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029*
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	69.239.700,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Kab. Kulon Progo	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	18.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Kab. Kulon Progo	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	41.109.648,00	Penambahan guna memperbaiki atap

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			ruang resepsionis
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	24.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	21.749.700,00	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Kab. Kulon Progo**	**Cakupan Pengembangan Aparatur**	**45,41 %**	**5.491.350.000,00**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Kab. Kulon Progo**	**Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan redistribusi**	**247 Orang**	**2.708.885.350,00**	**Terdapat Perubahan indikator kinerja program dan target capaian, menyesuaikan Ranwal RPJMD 2025-2029. Ranwal RKPD masih menggunakan indikator yang tertuang dalam RPD 2023-2026**
			Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur	**85,44 %**				**Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN**	**77,69 %**		
			Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur	**99,98 %**				**Persentase Kedisiplinan ASN**	**99,82 %**		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	*3 Dok*	*1.235.000.000*	*Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	*Kab. Kulon Progo*	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*3 Dok*	*939.836.800,00*	*Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan dan target capaian, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029*
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	2 Dok	825.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	2 Dok	713.392.700,00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Kepegawaian ASN					Kepegawaian ASN			
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dok	300.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dok	157.147.300,00	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dok	110.000.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	69.296.800,00	
	Mutasi dan Promosi ASN	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat*	*3 Dok*	*660.000.000*	*Mutasi dan Promosi ASN*	*Kab. Kulon Progo*	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*3 Dok*	*449.035.600,00*	*Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan dan target capaian, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029*
	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	300 Orang	75.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	247 Dok	39.912.100,00	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dok	85.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	600 Dok	56.098.600,00	Penurunan target capaian, dikarenakan kenaikan pangkat bagi PNS telah terpenuhi dan tren akan menurun
	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	26 Dok	500.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dok	353.024.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengembangan Kompetensi ASN	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kompetensi ASN*	*4 Dok*	*3.399.350.000*	*Pengembangan Kompetensi ASN*	*Kab. Kulon Progo*	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*4 Dok*	*1.248.556.050,00*	*Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029*
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	70 Orang	43.000.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	14.530.800,00	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	35.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	65 Orang	57.048.600,00	Target capaian Keluaran adalah ASN yang dikirimkan untuk diklat PPG
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3 Dok	3.266.350.000	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dok	1.145.183.550,00	Anggaran pada Subkegiatan Sebagian dialihkan ke Program pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	55.000.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	31.793.100,00	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Kab. Kulon Progo*	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	*2 Dok*	*197.000.000*	*Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	*Kab. Kulon Progo*	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	*1 Dok*	*71.456.900,00*	*Terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan dan target capaian, meyesuaikan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029*
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	27 Dok	32.000.000						Subkegiatan ini tidak digunakan lagi, dan aktivitas yang dilakukan dilaksanakan dalam Subkegiatan Pengelolaan kenaikan

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
											Pangkat ASN
	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang	165.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Kulon Progo	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang	71.456.900,00	
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Kab. Kulon Progo**	**Persentase ASN yang memenuhi pengembangan kompetensi**	**43,14**	**733.561.500,00**	**Terdapat penambahan Program baru, sesuai denga Ranwal RPJMD 2025-2029**
						Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kab. Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Subkegiatan	1 Dok	733.561.500,00	
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	733.561.500,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada intinya merupakan hasil usulan Perangkat Daerah, yang secara tidak langsung merupakan perwujudan pemenuhan kepentingan publik khususnya Aparatur Sipil Negara. Tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah melaksanakan urusan kepegawaian di tingkat daerah, sehingga tidak ada usulan program dan kegiatan yang terkait langsung dengan masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan ASN, antara lain pengembangan kompetensi pegawai, pelaksanaan diklat, layanan mutasi dan promosi pegawai, kesejahteraan pegawai, serta kebutuhan pengadaan formasi Calon Aparatur Sipil Negara.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Pemda DIY

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, menyebutkan bahwa Pencapaian Visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi sebagaimana yang menjadi ketugasan Kemenpan RB adalah pembinaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yang mana Pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi arahan pertama dari Presiden. Perwujudan dari arahan presiden tersebut dan sesuai dengan semangat Kemenpan RB dalam meningkatkan pelayanan, Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BKD DIY), sebagai administrator kepegawaian di tingkat provinsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melayani permintaan layanan kepegawaian baik dari institusi pemerintah (dari dalam Pemda DIY dan luar Pemda DIY) maupun dari personal PNS. Tuntutan akan kecepatan, keakuratan serta transparansi informasi menjadi hal prioritas.

Kebijakan Pemerintah Provinsi tertuang dalam Peraturan Daerah DIY nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY 2022-2027. Beberapa isu yang diangkat dalam RPJMD DIY antara lain: 1) Pemenuhan standar kompetensi pegawai, 2) optimalisasi pelaksanaan manajemen talenta, 3) optimalisasi penataan sumber daya manusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi, 4) optimalisasi integritas Pegawai Negeri Sipil, 5) optimalisasi mutu layanan kepagawaian, 6) optimalisasi pengembangan kompetensi pegawai.

Penajaman kegiatan strategis yang perlu dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Kulon Progo antara lain melalui penyempurnaan berbagai regulasi dan kebijakan daerah menyangkut urusan kepegawaian dan pengembangan kompetensi, mengoptimalkan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai, melaksanakan pemetaan pegawai sesuai kulaifikasi dalam rangka pengembangan karier ASN, penguatan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis

SAPK serta SIMASNEG (Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara), peningkatan sistem keamanan data kepegawaian, penegakan disiplin pegawai dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian yaitu *Electronic Reward and Punishment*, sesuai tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025– 2029 tercantum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Indikator Tujuan BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tujuan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,23

Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025– 2029 tercantum pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran BKPSDM Tahun 2026

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
2	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 – 3,0
2	Meningkatnya kualitas Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	83,20

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan prioritas diperlukan untuk mewujudkan pencapaian sasaran daerah yang ditetapkan. Pada tahun anggaran 2026, BKPP melaksanakan 4 (Empat) Program, 11 Kegiatan, dan 25 Subkegiatan. Adapun Rincian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan tercantum pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Kulon ProgoTahun 2026

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Peningkatan Budaya Pemerintahan	1 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			10 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3	Program Kepegawaian Daerah	7 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	14 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
			15 Pengelolaan Data Kepegawaian
			16 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
		8 Mutasi dan Promosi ASN	17 Pengelolaan Mutasi ASN
			18 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
			19 Pengelolaan Promosi ASN
		9 Pengembangan Kompetensi ASN	20 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
			21 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
			22 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
			23 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
		10 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24 Pembinaan Disiplin ASN
4	Program Pengembangan Sumber Daya	11 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan	25 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan
	Manusia	Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Indikator Kinerja Program BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Program BKPSDM Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Kinerja	Target Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	%	77,69
		Persentase Kedisiplinan ASN	%	99,82
		Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan redistribusi	Orang	247
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Memenuhi Pengembangan Kompetensi	%	43,14
4	Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal baik	%	100

Pada tahun anggaran 2026, terdapat Program baru yaitu Program Pengembangan Sumber daya Manusia, program tersebut mengacu pada Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 sebagai perangkat urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan oleh BKPSDM pada tahun anggaran 2026 tercantum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Pemetaan Indikator Kinerja dan Target Program Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**144.644.042.000,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**141.201.595.150,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**141.201.595.150,00**							**0,00**	
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi***	**-**			**100 %**	**140.811.433.150,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			2 Dokumen	17.273.800,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.586.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.687.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			3 Dokumen	140.401.131.704,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2380 Orang/bulan	140.350.491.504,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	44.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula na n/Semesteran SKPD				14 Laporan	6.440.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			2 Dokumen	62.522.400,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.671.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.850.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			2 Dokumen	198.406.198,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	70.214.182,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	128.192.016,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			3 Dokumen	132.099.048,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	69.239.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi				1 Unit	41.109.648,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	21.749.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal baik***	**-**			**100 %**	**390.162.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			1 Dokumen	390.162.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan				2 Laporan	390.162.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.442.446.850,00**							**0,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**2.708.885.350,00**							**0,00**	
1,	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan redistribusi Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Persentase Kedisiplinan ASN***	**-**			**247 Orang 77,69 % 99,82 %**	**2.708.885.350,00**						**-**	**0,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			3 Dokumen	939.836.800,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	713.392.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	157.147.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	69.296.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			3 Dokumen	449.035.600,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				247 Dokumen	39.912.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				600 Dokumen	56.098.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				5 Dokumen	353.024.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			4 Dokumen	1.248.556.050,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	14.530.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				65 Orang	57.048.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1.145.183.550,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	31.793.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			1 Dokumen	71.456.900,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	71.456.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**733.561.500,00**							**0,00**	
1,	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase ASN yang memenuhi pengembangan kompetensi***	**-**			**43,14 %**	**733.561.500,00**						**-**	**0,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Laporan Pelaksanaan Subkegiatan*	-			1 Dokumen	733.561.500,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraa n Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	733.561.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H							**144.644.042.000,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, disusun sebagai dasar atau acuan penentuan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 telah menjabarkan secara rinci hal-hal yang akan dicapai untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Renstra perangkat daerah. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja telah menuangkan usulan Program Kegiatan tahun 2026. Terdiri dari penjabaran target Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Program kegiatan tersebut disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi BKPSDM, sekaligus untuk mewujudkan pelayanan publik khususnya sumber daya aparatur. Diharapkan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang tersebut dapat diakomodir oleh pengambil kebijakan (*Decision maker*) maupun pihak terkait lainnya, agar BKPSDM mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran 2026.

Wates, 29 Juli 2025

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KULON PROGO

SUDARMANTO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19730512 199803 1 008

RENJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya, Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini dapat kami selesaikan. Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, sinergisitas program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah agar pelaksanaan pembangunan daerah konsisten dengan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 serta Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 agar selaras dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah serta dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Demikian dokumen ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahun 2026.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 12

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 15

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD. 18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 23

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 23

3.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah 23

3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah 24

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 25

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan 25

BAB V PENUTUP 35

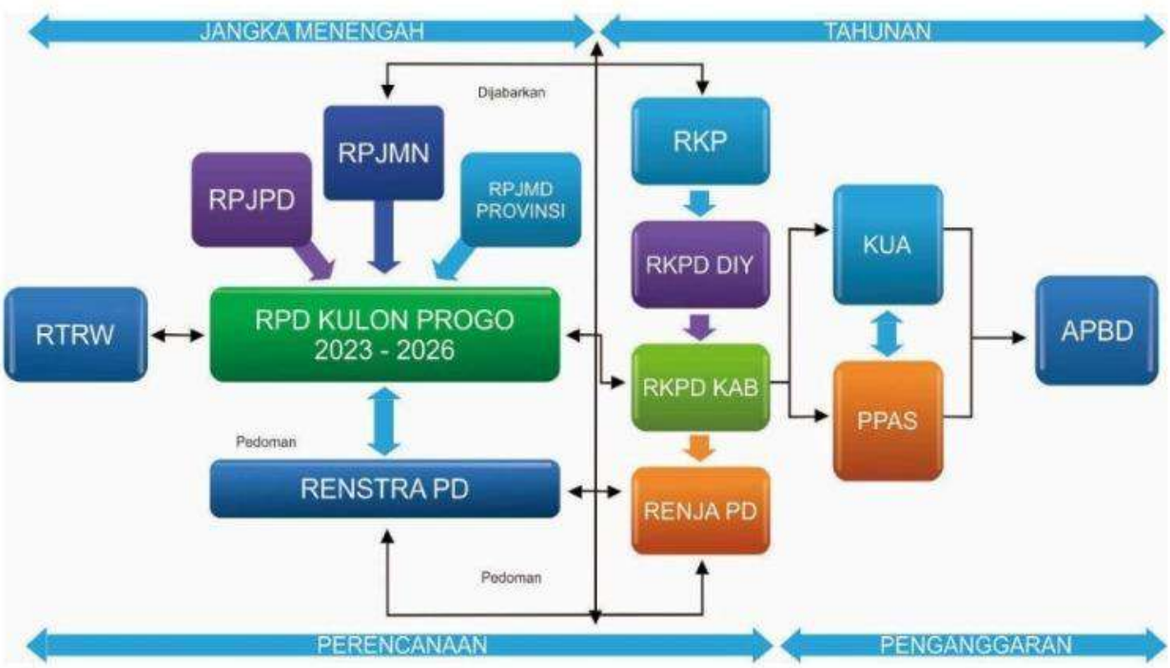
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah terdiri dari tahapan: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan dan penetapan renja. Penyusunan ini juga sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Selain mengacu terhadap Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026, Rancangan Akhir Renja 2026 Inspektorat Daerah Kulon Progo juga disusun dengan mengacu terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026**.** Sedangkan untuk keterkaitan renja dengan dokumen-dokumen lain digambarkan sebagai berikut :



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Renja 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-undang (UU) Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yograkarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305);
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
e. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026;
i. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 7 tahun 2024);
k. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Renja 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud agar tercipta keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran derah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, serta sebagai tolak ukur pencapaian sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Sedangkan Penyusunan Rancangan Akhir Renja 2026 ini bertujuan untuk :

a. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2026
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
c. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun lalu, tahun 2025;
e. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
f. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tusi sekretariat dan Irban bidang masing-masing pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
  Berisi penjelasan tentang Pengertian Rencana Kerja, proses pembuatan dan keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya
- 1.2 Landasan Hukum
  Berisi peraturan-peraturan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja 2026
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
  Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah, analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Inspektorat Daerah dan sebagainya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD TW I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, melaksanakan 4 program, 11 kegiatan dan 20 Sub kegiatan. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dengan sumber dari APBD Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 11.350.326.050,00. Untuk capaian realisasi anggaran sebesar Rp 11.178.173.179,00 atau sebesar 98,48%. *(LRA IRDA Per Desember 2024).*

Hasil evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo sampai dengan TW IV Tahun 2024 berdasakan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan IV Kabupaten Kulon Progo dijabarkan dalam tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)□		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**									
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**									
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**50%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*DUKUNGAN SEBESAR 0,73% TERHADAP PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	94 Dokumen	8 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	100%	25 Dokumen	56 Dokumen	60%
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	80%
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	84 Dokumen	6 Dokumen	21 Laporan	21 Laporan	100%	21 Laporan	48 Laporan	57%
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*DUKUNGAN SEBESAR 91,05% TERHADAP PERSENTASE PENINGKATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	152 Laporan	14 Dokumen	84 Dokumen	39 Dokumen	46%	38 Dokumen	91 Dokumen	60%
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	48 Orang/bulan	4 Dokumen	58 Orang/bulan	13 Orang/bulan	22%	12 Orang/bulan	29 Orang/bulan	60%
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	48 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	28 Dokumen	58%
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	56 Laporan	6 Dokumen	14 Laporan	14 Dokumen	100%	14 Laporan	34 Laporan	61%
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dukungan sebesar 1,04% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	24 Dokumen	1 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100%	4 Dokumen	22 Dokumen	92%
6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	8 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	0 Dokumen	3 Dokumen	38%
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	16 Orang	0 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	4 Orang	19 Orang	119%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)□		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dukungan sebesar 1,07% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	68 Laporan	7 Dokumen	17 Laporan	17 Laporan	100%	17 Laporan	41 Paket	60%
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	20 Paket	1 Dokumen	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	11 Paket	55%
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	48 Laporan	6 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	30 Paket	63%
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Dukungan sebesar 1,57% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	77 Unit	10 Unit	41 Unit	41 Unit	100%	2 Unit	53 Unit	69%
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	77 Unit	10 Unit	41 Unit	41 Unit	100%	2 Unit	53 Unit	69%
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan sebesar 1,93% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	96 Laporan	12 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	60 Laporan	63%
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	48 Laporan	6 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	30 Laporan	63%
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	48 Laporan	6 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	30 Laporan	63%
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan sebesar 2,62% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	800 Unit	40 Unit	200 Unit	200 Unit	100%	200 Unit	440 Unit	55%
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	76 Unit	10 Unit	19 Unit	19 Unit	100%	19 Unit	48 Unit	63%
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	6 Unit	50%
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	712 Unit	30 Unit	178 Unit	178 Unit	100%	178 Unit	386 Unit	54%
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan**	**99,05%**	**95,98%**	**89%**	**98,61%**	**99,56%**	**93,38%**	**100%**	**100%**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)□		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*DUKUNGAN SEBESAR 93,31% TERHADAP PERSENTASE PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN*	1.823 Laporan	205 Laporan	529 Laporan	529 Laporan	100%	429 Laporan	1.163 Laporan	64%
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*	168 Laporan	28 Laporan	42 Laporan	42 Laporan	100%	42 Laporan	112 Laporan	67%
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*	1.223 Laporan	107 Laporan	376 Laporan	376 Laporan	100%	295 Laporan	778 Laporan	64%
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa*	412 Laporan	68 Laporan	106 Laporan	106 Laporan	100%	87 Laporan	261 Laporan	63%
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*	20 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	12 Laporan	60%
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*DUKUNGAN SEBESAR 6,69% TERHADAP PERSENTASE PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN*	47 Laporan	10 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%	14 Laporan	39 Laporan	83%
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	47 Laporan	10 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%	14 Laporan	39 Laporan	83%
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**100%**	**48,80%**	**90,48 %**	**14,29%**	**14,29%**	**94,05%**	**0%**	**0%**
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Dukungan 100% terhadap persentase peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi*	532 Laporan	89 Laporan	133 Perangkat Daerah	133 Perangkat Daerah	100%	133 Perangkat Daerah	355 Perangkat Daerah	67%
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*	168 Laporan	42 Laporan	42 perangkat daerah	42 Perangkat Daerah	100%	42 Perangkat Daerah	126 Perangkat Daerah	75%
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*	20 Laporan	5 Laporan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	15 Kegiatan	75%
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*	344 Laporan	42 Laporan	86 perangkat daerah	86 Perangkat Daerah	100%	86 Perangkat Daerah	214 Perangkat Daerah	62%
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN TERAKHIR 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)□		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan**	**95,83%**		**75 %**	**0%**	**0%**			
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Dukungan sebesar 4,16% terhadap capaian program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan*	72 Laporan		18 Laporan	0	0			
4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY*	72 Laporan		18 Laporan	0	0			

**Data per 24 Juli 2025*

Secara umum capaian fisik dan keuangan sudah sesuai target, akan tetapi ada beberapa kendala pada pelaksanaan kegiatan karena disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Beberapa kegiatan tidak bisa diprediksi pelaksanaannya karena sifat insidentil, antara lain pemeriksaan tujuan tertentu, khusus/kasus, pemeliharaan sarana prasarana kantor, dan lain-lain.
2. Beberapa kegiatan belum bisa dilaksanakan sesuai jadwal karena melibatkan pihak eksternal, antara lain reviu perencanaan dan penganggaran, reviu DAK Fisik, bimtek keluarga berintegritas.

Dari data tersebut realisasi serapan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 sebesar 98,48% *(LRA Irda per 31 Desember 2024)* dan realisasi kinerja fisik 100% *(sumber e-monev)* , maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian target sasaran Inspektorat Daerah sudah didukung dengan efisiensi anggaran yang ada.

Capaian kinerja selama Tahun 2024, dijabarkan sebagai berikut :

a. Indikator Rata-rata persentase pencapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara fisik adalah sebesar 100% ,hal ini berarti kegiatan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rencana awal dan juga dapat tercapai karena secara umum komponen-komponen penilaian adalah kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan sehingga tidak ada kendala yang mempengaruhi capaian target. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara target dan realisasi.
b. Indikator Rata-rata persentase pencapaian Program Penyelenggaraan Pengawasan adalah sebesar 98,61%, hal ini melebihi dari target sebesar 89,19% dengan kriteria sangat tinggi. *(sumber Evaluasi Terhadap Hasil Rkpd Kulon Progo TW IV tahun 2024)*

Hal ini dikarenakan Komponen capaian rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu dari 170 rekomendasi, dari total rekomendasi 212. Dengan semakin banyaknya rekomendasi yang ditndaklanjuti tepat waktu diharapkan menjadi indikator tingkat kepatuhan dan komitmen obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi temuan pemeriksaan dan kesadaran dalam perbaikan tata kelola pemerintahan juga semakin tinggi.

Komponen penilaian jumlah review yang dilaksanakan tepat waktu dari target 454 telah dilaksanakan sejumlah 395. Demikian juga untuk komponen Jumlah Perangkat Daerah dan Kalurahan yang diperiksa dari target 129 dapat tercapai sesuai target sejumlah 129.

Dengan adanya beberapa kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan di luar PKPT, karena adanya regulasi yang terbit di pertengahan tahun berjalan, sehingga menambah kuantitas kegiatan pengawasan, secara umum target dapat tercapai dengan beberapa penyesuaian dan penjadwalan ulang kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya. Capaian juga tidak terlepas dari komitmen dan kerjasama yang solid di lingkungan APIP untuk melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang sudah ditetapkan.

Indikator Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP minimal A, dari target yang ditetapkan sejumlah 42 perangkat daerah, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan, semua perangkat daerah sudah mencapai nilai A. Dengan capaian ini diharapkan menjadi tolok ukur tingkat implementasi SAKIP yang punya peran strategis dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta

mendorong instansi pemerintah dalam melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan yang tepat untuk mencapai tujuan.

Indikator nilai Maturitas SPIP Hasil Validasi BPK/*Self Assesment* level 3, dari hasil evaluasi oleh APIP, semua OPD sudah mencapai nilai 3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa organisasi telah melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian semakin tinggi nilai maturitas SPIP diharapkan menunjukkan kualitas pengendalian intern juga semakin baik.

c. Sedangkan untuk capaian Program Perumusan Kebijakan, Realisasi kinerja fisik adalah 100% *(sumber e-monev)*, dikarenakan indikator perhitungan yang berupa jumlah OPD dengan Nilai Sakip minimal A dan Nilai Maturitas SPIP Hasil Validasi BPK / Self Assesment level 3 telah memenuhi target.

Beberapa hasil evaluasi yang perlu menjadi perhatian antara lain :

1) Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi.
2) Belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi). Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dapengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.
3) Pada komponen struktur dan proses, belum seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi dan kebijakan, implementasi, hasil serta efektifitas tindak lanjut secara berkala, konsisten, dan terdokumentasi untuk menangani residual risk sebagai tindak lanjut perbaikan kinerja. RTP atas risiko operasional perangkat daerah telah diimplementasikan namun atas RTP yang dirumuskan belum efektif menurunkan level risiko, karena belum sepenuhnya mengurangi dampak atau menghilangkan penyebab.
4) Inspektorat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal;
5) Perlu melakukan evaluasi hasil (outcome) dari kegiatan/subkegiatan yang telah dilaksanakan serta bisa berkolaborasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan output kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan dampak manfaatnya bagi masyarakat
6) Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah adanya pergeseran;
7) Melakukan penyesuaian ROPK dan Anggaran Kas pada aplikasi Monevku untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk pengawasan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas serta fungsi yang diemban oleh inspektorat tersebut.

Berikut adalah beberapa poin yang bisa diuraikan mengenai kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo:

1. Pengawasan:

   Inspektorat Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

   Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, seperti audit keuangan, pemeriksaan kinerja, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program, serta investigasi terhadap dugaan pelanggaran.

   Inspektorat Kabupaten Kulon Progo juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2. Pembinaan:

   Selain pengawasan, Inspektorat Kabupaten Kulon Progo juga berperan dalam pembinaan terhadap perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

   Pembinaan ini dapat berupa pemberian arahan, fasilitasi, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur daerah.

   Contohnya adalah pelaksanaan rapat koordinasi internal untuk membahas tindak lanjut hasil evaluasi dan penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) pencegahan korupsi.

3. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi:

   Inspektorat Kabupaten Kulon Progo menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta arahan dari pimpinan.

   Laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti rapat koordinasi, konfirmasi ADTT, dan koordinasi pembahasan penyusunan RB (Reformasi Birokrasi).

   Inspektorat Kabupaten Kulon Progo juga aktif dalam upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi, serta menjaga pelayanan publik yang berkualitas.

4. Peningkatan Tata Kelola:

   Secara keseluruhan, kinerja Inspektorat DIY bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Upaya ini dilakukan melalui pengawasan yang efektif, pembinaan yang berkelanjutan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang profesional.

   Inspektorat Kabupaten Kulon Progo juga berupaya untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo dapat dinilai dari

berbagai aspek tersebut, yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Keberhasilan kinerja pelayanan ini tercermin dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Berikut Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 pada Tabel **T-C.30**

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tingkat Maturitas SPIP	-	√	3,00	3,10	3,23		3,00	3,10	3,23		
2	Tingkat Kualitas APIP	-	√	3,10	3,20	3,21		3,00	3,20	3,21		
3	Persentase peningkatan hasil pengawasan	-	-	89,70	93,65	99,43		95,98	-	99,43		IKU 2024
4	Peningkatan kapabilitas APIP	-	-	3,1	3,2	3,3		3,18	-	3,3		
5	Indeks Maturitas SPIP	-	-	3	3,1	3,2		3,21	-	3,2		
6	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	-	-	100	100	100		100	-	100		

Untuk realisasi capaian IKU banyak yang melebihi target yaitu Persentase peningkatan hasil pengawasan, Peningkatan kapabilitas APIP, Indeks Maturitas SPIP. Realisasi capaian IKK untuk yang Tingkat Kualitas APIP tidak mencapai target salah satu faktornya adalah masih kurangnya personil APIP dalam melaksanakan tupoksi pemeriksaan, sehingga hasilnya belum dapat maksimal.

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

a. Permasalahan dan hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan, terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

1) Kemampuan APBD yang terbatas sehingga alokasi anggaran untuk pengawasan belum sesuai dengan cakupan obyek pemeriksaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah diamanatkan mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan besaran paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Akan tetapi karena kendala keterbatasan anggaran, ketentuan tersebut belum dapat terpenuhi. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan dan hambatan tersendiri, karena tujuan penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dimana kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
2) Jumlah kendaraan operasional yang dibutuhkan untuk kegiatan ke lapangan dalam rangka pemeriksaan belum memadai. Jumlah kendaraan roda empat yang ada saat ini hanya 4 unit, dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk satu kali penugasan terdapat 8 tim pemeriksaan, sehingga masih kekurangan kendaraan operasional roda 4 sebanyak 4 unit.
3) Bangunan gedung perkantoran yang sudah tidak memadai. Dengan jumlah ASN yang terus bertambah seiring pemenuhan SDM APIP, kapasitas gedung perkantoran Inspektorat Kabupaten Kulon Progo sudah tidak memadai lagi. Kendala lain, tidak ada ruangan khusus untuk penyimpanan arsip dan dokumen- dokumen penting sehingga keberadaan arsip dan dokumen tersebut rawan untuk hilang ataupun rusak.
4) Kesenjangan antara jumlah aparat pengawasan terutama jumlah Pejabat

Fungsional Auditor (PFA) yaitu sebanyak 32 orang dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan yang diampu oleh Inspektorat Daerah. Menurut hasil analisis jabatan, jumlah kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah setelah disesuaikan dengan beban kerja, adalah sebanyak 80 orang. Saat ini jumlah JFA sebanyak 32 orang sehingga masih kurang 48 orang, serta belum adanya JFA yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan serta teknologi informasi.

5) Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang belum dapat selesai 100 %. Permasalahan ini tentunya perlu upaya peningkatan koordinasi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan internal maupun eksternal.
6) Diterapkannya aplikasi Siswaskeudes dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa/Kalurahan belum didukung dengan konektifitas data pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, sehingga menyulitkan disaat pemeriksaan.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan **:**

1) Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dan semakin mendalam dalam pemeriksaan yang dilaksanakan khususnya oleh APIP, merupakan tantangan yang harus dihadapi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting.
2) APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan auditi untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi auditi.
3) Selain itu tuntutan untuk memahami PBJ dan perizinan yang sangat dinamis, dimana APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan audity untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD salah satunya melalui probity audit.
4) Upaya Pemerintah Daerah meraih dan mempertahankan opini BPK
5) WTP, Inspektorat perlu berperan lebih optimal dalam melaksanakan tugas Reviu atas laporan keuangan daerah
6) Keinginan dari stakeholder bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra untuk memberikan Solusi bagi permasalahan di unit kerjanya.
7) Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Tuntutan Perangkat Daerah terhadap peran Inspektorat sebagai penjamin mutu
8) Rendahnya kepercayaan elemen Masyarakat terhadap eksistensi Inspektorat karena dianggap tidak mampu menemukan penyimpangan penyimpangan keuangan negara/daerah

Peluang :

1) Penyelesaian ketugasan telah dilaksanakan berbasis teknologi informasi dan telah terintegrasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga penyelesaian ketugasan menjadi lebih mudah
2) Pelaksanaan pengawasan tetap dapat dilaksanakan meskipun efisiensi anggaran
3) Kualitas sumber daya manusia aparatur pengawas yang dimiliki dilihat dari tingkat Pendidikan formal dan penjenjangan auditor tinggi
4) Terjalinnya komunikasi dan Kerjasama yang baik dengan Instritusi eksternal aparat pengawasan seperti Inspektorat Pemda DIY, BPK, dan BPKP
5) Sistem perencanaan pengawasan yang sudah terpadu antar APIP melalui Rakor Penyusunan PKPT

c. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dari beberapa permasalahan, tantangan dan peluang tersebut, dapat dirumuskan isu- isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengawasan pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai dikarenakan saat ini masih banyak Perangkat Daerah yang berpendapat bahwa SPIP merupakan beban tugas tambahan dan formalitas, dan belum menjadi kebutuhan organisasi.
2. Mendorong kepatuhan auditan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan Inspektorat DIY, BPKP, dan BPK.
3. Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
4. Belum adanya dukungan pendanaan dalam rangka penguatan fungsi pengawasan sesuai regulasi yang ada.
5. Tuntutan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Cepatnya Kemajuan Teknologi di Bidang Teknologi Informasi yang menuntut adanya adaptasi penerapan di lingkungan kerja dan kesiapan sarana prasarana pendukung.
7. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian dan analisa terhadap kebutuhan Inspektorat Daerah. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Meningkatnya presentase capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	-	**9.867.972.900,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Meningkatnya presentase capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100 %**	**9.897.022.965,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-	41.559.900,00	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	2 dokumen	39.910.100,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	6.848.900,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2.734.100,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	21 Laporan	34.711.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	12 Laporan	37.176.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-	8.840.229.495,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	3 dokumen	8.874.511.225,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	12 Orang/bulan	8.784.326.995,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	62 Orang/bulan	8.828.309.025,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	51.600.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	41.900.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi*	14 Laporan	4.302.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi*	14 Laporan	4.302.200,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-	45.235.000,00	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	1 dokumen	45.220.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	5 Orang	45.235.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	5 Orang	45.220.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-	85.917.500,00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	2 dokumen	131.249.300,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	19.600.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	19.775.300,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	66.317.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	111.474.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-	415.260.900,00	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	1 dokumen	415.160.900,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	50 Unit	415.260.900,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	7 Unit	415.160.900,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-	204.010.592,00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	2 dokumen	178.723.740,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	81.686.832,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	81.686.832,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	122.323.760,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	97.036.908,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-	235.759.513,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	3 dokumen	212.247.700,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak*	19 Unit	157.570.800,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak*	19 Unit	157.566.300,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	43.395.613,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	19.891.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang*	178 Unit	34.793.100,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang*	178 Unit	34.789.900,00	
2,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan***	-	**108.281.700,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan***	**86,14 %**	**108.404.100,00**	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-	92.149.200,00	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	7 dokumen	92.272.200,00	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*	42 Laporan	9.997.300,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*	42 Laporan	9.997.300,00	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	110 Laporan	11.626.500,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	109 Laporan	11.626.200,00	
	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*	140 Laporan	14.026.100,00	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*	134 Laporan	14.025.900,00	
	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*	141 Laporan	11.872.300,00	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*	170 Laporan	11.872.300,00	
	Pengawasan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa*	112 Laporan	19.517.100,00	Pengawasan Desa	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa*	87 Laporan	17.545.600,00	
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk*	5 Kesepakatan	4.202.300,00	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk*	5 Kesepakatan	4.202.200,00	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak*	5 Dokumen	20.907.600,00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak*	5 Dokumen	23.002.700,00	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-	16.132.500,00	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	2 dokumen	16.131.900,00	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani*	5 Laporan	6.657.900,00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani*	5 Laporan	6.657.600,00	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	16 Laporan	9.474.600,00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	54 Laporan	9.474.300,00	
3,	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi***	-	**106.835.400,00**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	***Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi***	**100 %**	**77.662.900,00**	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-	6.469.300,00	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	1 dokumen	6.476.900,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*	2 Rekomendasi	6.469.300,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*	4 Rekomendasi	6.476.900,00	
	Pendampingan dan Asistensi	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	-	100.366.100,00	**Pendampingan dan Asistensi**	**Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	**4 dokumen**	**71.186.000,00**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan*	10 perangkat daerah	2.986.300,00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan*	6 perangkat daerah	2.978.700,00	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan*	0 perangkat daerah	8.369.600,00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan*	1 perangkat daerah	8.177.400,00	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan*	5 Kegiatan	23.904.600,00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan*	9 Kegiatan	21.098.100,00	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi*	86 perangkat daerah	65.105.600,00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi*	7 perangkat daerah	38.931.800,00	
					10.083.090.000,00					**10.083.089.965,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan, maka secara umum tidak ada usulan program dan kegiatan yang secara langsung didasarkan dari usulan masyarakat. Akan tetapi sebagai perangkat daerah, Inspektorat terlibat dalam dalam proses penyusunan RKPD melalui musrenbang RKPD Kabupaten.

Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang secara spesifik ditujukan kepada Inspektorat Daerah selaku PD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan perangkat daerah kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap peningkatan pelaksanaan pengawasan yang sudah termuat dalam program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Kulon Progo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Asta Cita yang merupakan istilah yang digunakan dalam RPJMN 2025–2029 untuk merujuk pada delapan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024–2029, Arah pembangunan nasional dalam Asta Cita tersebut diselaraskan secara substantif sehingga membentuk kerangka kebijakan yang integratif dan sinergis menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Keterpaduan antara Prioritas Nasional dalam RPJMN yang kemudian dapat diturunkan sebagai penyusunan RPJMD Kabupaten Kulon Progo memperkuat arah pembangunan yang berkelanjutan dan resilien.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka secara langsung Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo mendukung Asta Cita tersebut, terutama untuk Asta Cita Prioritas 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan**.** Selanjutnya dijabarkan ke dalam 7 Program Prioritas Presiden yang mencerminkan rencana pembangunan lintas sektor secara tematik dan transformatif, untuk itu Inspektorat Daerah mendukung program prioritas nomor 3 dan 4 yaitu Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi (3) dan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (4).

Secara teknis, implementasi kegiatan dari prioritas nasional tersebut yang diampu oleh Inspektorat Daerah seperti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko dan Register Risiko, Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi, Survey Penilaian Integritas, Zona Integritas, Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2025-2029 yang merupakan periode pertama dalam upaya mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo 2025-2045, yaitu "Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan (SEMARAK)", Fokus utama pembangunan daerah pada periode ini Inspektorat Daerah mengemban fokus visi yang ke 6 (enam) yaitu optimalisasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen keuangan serta tata kelola pemerintahan. Kemudian dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis dan tantangan pembangunan daerah, maka Inspektorat Daerah mengemban misi nomor 3 (tiga) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Tujuan PD Inspektorat Daerah adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Adapun Sasaran RPJMD yang diemban oleh Inspektorat Daerah adalah Meningkatnya

Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel. Yang kemudian dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1

Tujuan Renja Inspektorat Daerah

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator tujuan	Satuan	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,231
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)

Tabel 3.2.2

Sasaran Renja Inspektorat Daerah

No	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3,21
		Capaian MCP KPK	Persen	95
		Nilai Komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada LHE AKIP	Nilai	20
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
3	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 - 3,0

3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat Daerah kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, maka selanjutnya disusun langkah-langkah rencana kerja yang lebih operasional untuk kurun waktu satu tahun, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Inspektorat Daerah tahun 2026 melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
1.	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	%	100
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase peningkatan penyelenggaraan pengawasan	%	86,14
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	%	100

Sumber: RKPD 2026

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rancangan Akhir Renja 2026 dan pendanaan ini akan bisa berubah sesuai dengan analisa dan perhitungan kebutuhan dan akan dilakukan dalam tahapan perencanaan selanjutnya. Hal ini terutama dalam rangka implementasi peraturanperundang-undangan dalam penguatan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan besaran paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Rincian Rancangan Akhir Renja 2026 dan pendanaan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						**10.083.089.965,00**							**11.901.103.320,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.083.089.965,00**							**11.901.103.320,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**10.083.089.965,00**							**11.901.103.320,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Meningkatnya presentase capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**9.897.022.965,00**						**-**	**10.963.171.646,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			2 dokumen	39.910.100,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	82.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.734.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	37.176.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		42.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 dokumen	8.874.511.225,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	10.073.657.090,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	8.828.309.025,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		9.997.657.090,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	41.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.302.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		6.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 dokumen	45.220.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	45.220.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			2 dokumen	131.249.300,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	124.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.775.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		33.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	111.474.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		91.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			1 dokumen	415.160.900,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	132.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	415.160.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		132.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			2 dokumen	178.723.740,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	225.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	81.686.832,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		78.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	97.036.908,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		147.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			3 dokumen	212.247.700,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	255.164.556,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	157.566.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	19.891.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		37.268.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				178 Unit	34.789.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		17.896.556,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan***	**-**			**86,14 %**	**108.404.100,00**						**-**	**758.444.849,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			7 dokumen	92.272.200,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo	-	660.525.428,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				42 Laporan	9.997.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		26.828.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				109 Laporan	11.626.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		33.328.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				134 Laporan	14.025.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		227.340.432,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				170 Laporan	11.872.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		29.337.210,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				87 Laporan	17.545.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		220.689.040,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				5 Kesepakatan	4.202.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		25.345.530,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				5 Dokumen	23.002.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		97.656.216,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 dokumen	16.131.900,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	-	97.919.421,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				5 Laporan	6.657.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		21.664.545,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				54 Laporan	9.474.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		76.254.876,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi***	**-**			**100 %**	**77.662.900,00**						**-**	**179.486.825,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 dokumen	6.476.900,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo	-	18.027.765,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	6.476.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		18.027.765,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			4 dokumen	71.186.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo	-	161.459.060,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				6 perangkat daerah	2.978.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		24.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1 perangkat daerah	8.177.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		17.468.430,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				9 Kegiatan	21.098.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		43.303.680,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				7 perangkat daerah	38.931.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		76.186.950,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H							**10.083.089.965,00**							**11.901.103.320,00**	

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 Inspektorat Daerah, telah disusun berdasarkan proses dan mekanisme yang sudah ditetapkan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicantumkan dalam renja ini, telah disusun dengan berpedoman pada kebutuhan-kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam pelaksanaannya memang dimungkinkan adanya ketentuan atau regulasi yang mengharuskan adanya penambahan kegiatan pengawasan yang belum tercantum dalam renja ini. Untuk itu, apabila pada tahun berjalan ternyata diperlukan perubahan, maka akan dituangkan dalam perubahan Renja.

Dalam penyusunannya, Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 ini berpedoman pada peraturan yang ada dan pelaksanaannya telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokok Inspektorat Daerah.

Kami berharap agar Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam menjalankan peran untuk memberikan keyakinan yang memadai *(assurance)* dan pembinaan *(consulting)* penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sehingga penetapan anggaran program dan kegiatan benar-benar menggambarkan anggaran yang berbasis kinerja.

Wates, 29 Juli 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

ARIF PRASTOWO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 197005141996031004

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON TEMON

Alamat: Jln. Raya Wates-Purworejo Km. 10,4 Temon, Kulon Progo Telp/Fax. (0274) 6472581
Email: temon@kulonprogokab.go.id Website: http://temon.kulonprogokab.go.id

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2026











DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 17
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 29
3.3 Program dan Kegiatan 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 32

BAB V PENUTUP 47

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2024 ……..……	5
Tabel 2.2	Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Temon Tahun 2024	5
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo	7
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo …….	16
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 ……...	20
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……	27
Tabel 3.1	Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah …….	29
Tabel 3.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Temon …….	30
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kapanewon Temon Tahun 2026 ……..…….	35

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2026 ini juga disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2026 ini memuat Tujuan dan Sasaran Kapanewon Temon beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan serta penyesuaian target dan pagu indikator Program/Kegiatan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, setelah disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kapanewon Temon Tahun Anggaran 2026.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2026 ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga dokumen ini nantinya dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Segala kekurangan dalam Rencana Kerja ini kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Temon, 29 Juli 2025

PANEWU TEMON

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON TEMON

RIDWAN USMAN, S.H., M.M.
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 196910041993031007

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2026 didasarkan pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Temon Tahun 2026 yaitu :

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo,
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2026;

17. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2026 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Temon tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2026;
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD;
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Temon Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Temon Tahun 2024 melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pengukuran kinerja Kapanewon Temon didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah :

Tabel 2.1
Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Temon Tahun 2024

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Presentase Pencapaian Program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100	100
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,50	82,34
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	98,25	98,51

Sedangkan untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Temon sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Temon Tahun 2024

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persenase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	94,74	94,74
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	100
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	100

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Temon sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025

Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Kapanewon Temon

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2	22				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
2	22	08			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
2	22	08	5.07		*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%
2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4					**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**									
4	**01**				**Sekretariat Daerah**									
4	**01**	**04**			**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
4	**01**	**04**	**5.06**		***Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan***	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4	**01**	**04**	**5.06**	**01**	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7					**Unsur Kewilayahan**									
7	**01**				**Kecamatan**									
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**01**	**2.01**		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu**	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	100%
7	**01**	**01**	**2.01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7	**01**	**01**	**2.01**	**07**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan		21 Laporan	21 Laporan	100%
7	**01**	**01**	**2.02**		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu**	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	100%
7	**01**	**01**	**2.02**	**01**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan		20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	95%
7	**01**	**01**	**2.02**	**02**	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7	**01**	**01**	**2.02**	**07**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**01**	**2.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Jumlah Dokumen Adminisrasi Umum**	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7	**01**	**01**	**2.06**	**02**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100%
7	**01**	**01**	**2.06**	**09**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penambahan Aset**	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit		4 Unit	5 Unit	100%
7	**01**	**01**	**2.07**	**11**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit		4 Unit	5 Unit	100%
7	**01**	**01**	**2.08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%
7	01	01	2.09		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	100%
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit		9 Unit	9 Unit	100%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit		23 Unit	23 Unit	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
7	**01**	**02**	**2.01**		***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	Dukungan sebesar 84,34% terhadap Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100%
7	**01**	**02**	**2.01**	**01**	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100%
7	**01**	**02**	**2.01**	**02**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100%
7	**01**	**02**	**2.04**		***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	Dukungan sebesar 15,66% terhadap Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7	**01**	**02**	**2.04**	**01**	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	03	2.01		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	100%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	100%
7	01	05			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%		97,37%	94,74%	94,74%
7	01	05	2.01		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah***	Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang		200 Orang	200 Orang	100%
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
7	**01**	**06**	**2.01**		***Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan		5 Laporan	8 Laporan	80%
7	**01**	**06**	**2.01**	**17**	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan		5 Laporan	8 Laporan	80%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan serta Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kapanewon;
f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kalurahan; dan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kalurahan.

Keberhasilan pembangunan di Kapanewon Temon merupakan bagian keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan keserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kapanewon Temon dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kapanewon dan Desa. Kinerja Pelayanan di Kapanewon Temon dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Temon disajikan pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel : 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Temon

Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah				100	100	100		100	100	100		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84,50	84,75	85,00		84,50	84,75	85,00		
3	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				98,25	99,12	100		98,25	99,12	100		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Pelayanan OPD dan hal kritis terkait pelayanan

Kapanewon Temon sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kapanewon Temon masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan kedepan, terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang perlu ditingkatkan.
2. Belum lengkapnya sarana dan prasarana kantor *platform* dasar pelaksanaan tugas.
3. Terbatasnya pagu anggaran yang dialokasikan.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD adalah :

a. Permasalahan

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia Aparatur dan masyarakat untuk merespon dampak pembangunan hotel dan lainnya di lingkungan bandar udara YIA memerlukan perhatian dan kebijakan dari Pemerintah Kabuapaten Kulon Progo.
2. Kalurahan sebagai entitas otonomi penyelenggaraan pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur kalurahan dan system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang belum maksimal, menuntut keterlibatan dan dukungan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kapanewon maupun kalurahan dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
5. Jumlah aparatur kapanewon yang belum sesuai dengan formasi yang sudah ditetapkan, menuntut optimalisasi aparatur yang ada.
6. Kualitas aparatur kalurahan yang belum memadai dalam mengikuti dinamika kebijakan pemerintah dan memenuhi tuntutan layanan publik.

b. Hambatan

1. Formasi pegawai yang ada lebih kecil dari Bezetting yang ditentukan, hal tersebut berdampak pada ketugasan pegawai.
2. Kemampuan sebagian besar pegawai terhadap komputer dan teknologi informasi kurang sehingga menghambat pelaksanaan tugas, tetapi wewenang peningkatan kualitas aparatur dalam bentuk diklat ada pada Badan Kepegawaian Daerah.
3. Pagu indikatif anggaran yang dialokasikan ke Kapanewon Temon pertahun tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, pendopo, rumah dinas dan gedung pertemuan, serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor lainnya sehingga mampu memberikan layanan publik yang terstandar.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan di atas, maka isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2026 adalah :

1. Terpenuhinya sarana perkantoran dan fasilitas lainnya di sekitar bandara YIA (Yogyakarta International Airport)
2. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan pembangunan.
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang adaptif menuju aerotropolis.
4. Posisi strategis wilayah Temon sebagai pintu Kulon Progo barat belum optimal sebagai sebuah peluang.
5. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.
6. Pembangunan megaproyek di wilayah selatan berpotensi pada beralihnya sebagian fungsi lahan pertanian ke industri, menuntut perlindungan lahan dan optimalisasi produksi pertanian di wilayah Temon.

2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam rangka meningkatkan Pelayanan OPD adalah:

a. Tantangan

Kapanewon Temon adalah Kapanewon perbatasan dengan Kabupaten lain, sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten tetangga yang karakteristiknya tidak sesuai dengan Kabupaten Kulon Progo cepat masuk, sedangkan pemahaman masyarakat terhadap Otonomi Daerah sangat kurang.

b. Peluang

1) Potensi Kapanewon Temon cukup besar bila dikembangkan, seperti potensi agrowisata, potensi agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan.
2) Industri kerajinan batik.
3) Potensi pariwisata terutama kawasan pantai.
4) Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian barat.
5) Peluang investasi dan dukungan potensi perhotelan, pertanian, perkebunan dan peternakan.

2.3.4. Formulasi Isu-isu penting dan Rekomendasi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Temon, ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

1) Kurangnya kemampuan dan ketrampilan SDM aparatur dalam penyelenggaraan tugas pemerintah;
2) Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar;
3) Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi kepala dinas dengan kapanewon;
4) Adanya potensi permasalahan ketertiban, keamanan dan permasalahan sosial;
5) Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian barat;
6) Peluang investasi dan dukungan potensi perhotelan, pertanian, perkebunan dan peternakan.

Dengan adanya isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Temon maka perlu adanya rekomendasi untuk kedepannya berupa:

1) Dilakukannya pelatihan khusus bagi Aparatur Kapanewon dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan;
2) Tersedianya sarana prasarana kerja di kantor pemerintah maupun pelayanan publik lainnya;
3) Perlunya pelatihan bagi masyarakat Kapanewon Temon agar berhasil guna dan berdaya guna.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Kapanewon Temon. Secara Keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Temon

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kapanewon Temon**	**Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kapanewon Temon**	**Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100.000.000,00**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kapanewon Temon	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	100.000.000,00	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kapanewon Temon	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	100.000.000,00	
	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000,00	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000,00	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Temon**	**Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Dengan Regulasi**	**100 %**	**26.450.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Temon**	**Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Dengan Regulasi**	**100 %**	**26.450.000,00**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kapanewon Temon	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	26.450.000,00	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kapanewon Temon	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	26.450.000,00	

	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Temon	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	26.450.000,00	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Temon	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	26.450.000,00	
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Temon**	**Persentase Sub Kegiatan Pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**100 %**	**1.776.381.569,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Temon**	**Persentase Sub Kegiatan Pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**100 %**	**1.776.381.569,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**2 Dokumen**	**7.297.900,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**2 Dokumen**	**7.297.900,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Temon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.774.200,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Temon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.774.200,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.523.700,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.523.700,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**3 Dokumen**	**1.485.721.345,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**3 Dokumen**	**1.485.721.345,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Temon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.453.197.945,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Temon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.453.197.945,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Temon	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	28.600.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Temon	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	28.600.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	3.923.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	3.923.400,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**2 Dokumen**	**40.232.400,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**2 Dokumen**	**40.232.400,00**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Temon	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.702.400,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Temon	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.702.400,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.530.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.530.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**1 Dokumen**	**30.103.300,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**1 Dokumen**	**30.103.300,00**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Temon	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30.103.300,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Temon	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30.103.300,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**2 Dokumen**	**127.519.324,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**2 Dokumen**	**127.519.324,00**	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	31.825.312,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	31.825.312,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	95.694.012,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	95.694.012,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**3 Dokumen**	**85.507.300,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**3 Dokumen**	**85.507.300,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Temon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	51.068.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Temon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	51.068.000,00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Temon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	20.092.400,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Temon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	20.092.400,00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Temon	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15 Unit	14.346.900,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Temon	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15 Unit	14.346.900,00	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Temon**	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**100 %**	**70.675.400,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Temon**	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**100 %**	**70.675.400,00**	

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**2 Dokumen**	**62.851.400,00**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**2 Dokumen**	**62.851.400,00**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	48.570.200,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	48.570.200,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Temon	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	14.281.200,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Temon	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	14.281.200,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**1 Dokumen**	**7.824.000,00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**1 Dokumen**	**7.824.000,00**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kapanewon Temon	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	7.824.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kapanewon Temon	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	7.824.000,00	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Temon**	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon Yang Disampaikan Tepat Waktu**	**100 %**	**20.691.300,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Temon**	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon Yang Disampaikan Tepat Waktu**	**100 %**	**20.691.300,00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**1 Dokumen**	**20.691.300,00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**1 Dokumen**	**20.691.300,00**	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	20.691.300,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	20.691.300,00	
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Temon**	**Persentase Penanganan Gangguan Trantibum**	**100 %**	**48.778.500,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Temon**	**Persentase Penanganan Gangguan Trantibum**	**100 %**	**48.778.500,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**2 Dokumen**	**48.778.500,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Temon**	**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	**2 Dokumen**	**48.778.500,00**	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kapanewon Temon	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	22.170.100,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kapanewon Temon	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	22.170.100,00	
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	26.608.400,00	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	26.608.400,00	

7	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kapanewon Temon**	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa Yang Tepat waktu**	**100 %**	**25.183.200,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kapanewon Temon**	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa Yang Tepat waktu**	**100 %**	**25.183.200,00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kapanewon Temon	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	25.183.200,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kapanewon Temon	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	25.183.200,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	25.183.200,00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kapanewon Temon	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	25.183.200,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Temon diperoleh dari berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah:

1. Usulan dari Pemerintah Kalurahan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kalurahan untuk kegiatan tahun 2026. Hasil Musrenbang Kalurahan kemudian dirangkum menjadi bahan Musrenbang Tingkat Kapanewon.
2. Hasil usulan dari forum OPD tingkat Kapanewon, dimana setiap OPD di tingkat Kapanewon memberikan usulan kegiatan sebagai bahan Musrenbang di Tingkat Kapanewon.
3. Usulan dari berbagai pemangku kepentingan misalnya kelompok tani, Gabungan P3A, Anggota DPRD Kabupaten dan kelompok-kelompok masyarakat lain.
4. Semua usulan kegiatan dimaksud selanjutnya dibahas dalam Musrenbang tingkat Kapanewon. Hasil dari kegiatan tersebut adalah Rencana Pembangunan Kapanewon dan merupakan bahan Musrenbang Kabupaten.

Musrenbang tingkat Kapanewon ini menampung aspirasi yang diusulkan masyarakat, seperti para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, usulan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026. Usulan-usulan tersebut kemudian ditampung, dievaluasi, dan diakomodir sehingga tersusun suatu program usulan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Kapanewon, seperti yang telah dilimpahkan oleh Bupati. Usulan program tersebut diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan social bagi seluruh rakyat/ tanpa diskriminasi.
4. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan perekonomian daerah yang kuat, tangguh dan mandiri.
6. Penguatan reformasi birokrasi.
7. Perwujudan wilayah yang aman dan nyaman.
8. Optimalisasi kecukupan pangan dan air bersih.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang di susun Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD dan Kebijakan Nasional. Agenda pembangunan Nasional yang termuat dalam RPJMN 2025-2029 dengan tema “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045” yang meliputi:

1. Menjamin ketahanan pangan, energi, dan air;
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan negara;
3. Memperkuat tata kelola pemerintahan;
4. Membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Membangun generasi yang sehat dan produktif;
7. Menjamin akses kesehatan yang terjangkau bagi semua;
8. Membangun sumber daya manusia yang unggul;
9. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan;
10. Mewujudkan kesetaraan gender dan melindungi hak anak;
11. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan;
12. Menjamin ketersediaan input pertanian bagi petani;
13. Menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat;
14. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja;
15. Meningkatkan nilai tambah SDA dan menciptakan lapangan kerja;
16. Mewujudkan masyarakat yang toleran dan harmonis;
17. Melestarikan seni budaya, meningkatkan ekonomi kreatif dan meningkatkan prestasi olahraga.

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Asta Cita:

1) Meneguhkan nilai-nilai Pancasila, membangun demokrasi yang kuat, dan melindungi HAM.
2) Memperkuat sistem pertahanan, mendorong kemandirian ekonomi, dan mencapai swasembada.
3) Membuka lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif.

4) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan mendorong prestasi olahraga.
5) Meningkatkan nilai tambah SDA dan membuka lapangan kerja.
6) Pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan pengembangan wilayah.
7) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum.
8) Meningkatkan toleransi antar umat beragama, menjaga kelestarian lingkungan, dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Kapanewon Temon mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1

Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86.90
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,23
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,00

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Kapanewon Temon merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Temon

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	100%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Persentase pelayanan non perizinan	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha*
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*
4	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Persentase penanganan gangguan trantibum	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*
					Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
5	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*
6	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100%	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Gelar Budaya Jogja*
7	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100%	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan*

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo, program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
f) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan; dan
g) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
    a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan:

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:
    a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
    b. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, meliputi kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan: Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan:

a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
b. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

V. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:**

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

VI. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, meliputi kegiatan:**

Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang meliputi sub kegiatan: Gelar Budaya Jogja.

VII. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan:**

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan, dengan sub kegiatan: Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026 serta pendanaan Kapanewon Temon dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAPANEWON TEMON KAB. KULON PROGO TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON TEMON						**2.068.159.969,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**26.450.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**26.450.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**26.450.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	26.450.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	26.450.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.941.709.969,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.941.709.969,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.776.381.569,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	7.297.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.774.200,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Dokumen Laporan	3.523.700,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	1.485.721.345,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.453.197.945,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	28.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.923.400,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	40.232.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.702.400,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	30.530.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	30.103.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	30.103.300,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	127.519.324,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	31.825.312,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	95.694.012,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	85.507.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	51.068.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	20.092.400,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	14.346.900,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**70.675.400,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	62.851.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	48.570.200,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	14.281.200,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	7.824.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	7.824.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**20.691.300,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	20.691.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	20.691.300,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**48.778.500,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	48.778.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				80 Orang	22.170.100,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	26.608.400,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**25.183.200,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	25.183.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	25.183.200,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	JUMLAH							**2.068.159.969,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Temon Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan, dalam menunjang pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kulon Progo. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi Kapanewon Temon dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kapanewon Temon. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Temon ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan serta merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya misi pemerintah daerah.

Keberhasilan Penyusunan Renja Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 tidak terlepas dari peran aktif dan tanggungjawab seluruh pegawai Kapanewon Temon serta *stakeholder* yang bersangkutan.

Temon, 29 Juli 2025
KAPANEWU TEMON

RIDWAN USMAN, S.H., M.M.
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 196910041993031007

Kulonprogo
the jewel of java

2026

RENJA

KAPANEWON WATES

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Kapanewon Wates Tahun 2026 ini juga disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalauasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kapanewon Wates Tahun 2026 ini memuat Tujuan dan Sasaran Kapanewon Wates beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan serta penyesuaian target dan pagu indikator Program/Kegiatan. Rancangan Akhir Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kapanewon Wates Tahun Anggaran 2026.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Wates Tahun 2026 ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga dokumen ini nantinya dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Segala kekurangan dalam Renja ini kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Wates, 29 Juli 2025
Panewu Wates

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON WATES

SUTRISNA, S.Sos
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196903161996031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Wates Tahun 2026 didasarkan pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Wates Tahun 2026 yaitu :

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;;
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024. Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo,
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
15. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Wates Tahun 2026 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Wates tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2026;
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan PD;
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kapanewon Wates Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Sampai Dengan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Wates Tahun 2024 melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pengukuran kinerja Kapanewon Wates didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah :

Tabel 2.1
Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Wates
Tahun 2024

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada masimg-masing Sekretariat Perangkat Daerah	100	100
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.50	80,67
	Cakupan peningkatan Penyelengaraan Pemerintah Kapanewon	98,25	98.25

Sedangkan Untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Wates sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Wates
Tahun 2024

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	Realisasai (%)
1	Program penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100,00	100,00
2	Program penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100.00	100.00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100,00
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kapanewon	100,00	100,00
5	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100,00	100,00
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	94,74	94,74
7	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	100,00

Realisasi anggaran per Program Kapanewon Wates sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Realisasi Anggaran Kapanewon Wates Tahun 2024

No.	Program Prioritas Pembangunan	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024
1	Program penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**100,000,000**	**99,996,451**
2	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**40,000,000**	**38.842.009**
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**2,519,519,216**	**2.367.046.687**
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**44,101,800**	**41.097.517**
5	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	**1,388,652,500**	**1,383.202.758**
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**694,446,300**	**679.897.479**
7	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**24,500,000**	**24331404**

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Wates sampai dengan Tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel Berikut:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD Tahun 2024
Kabupaten Kulon Progo

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
2	2	2	8				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	420	100	347.00	**100**	**100,00**	100	99,99	99,99	100	60,00			
							Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dukungan Sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	20	300												
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya		300	5	250.00										
2	2	2	8	5	7		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Dukungan Sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	4	100	1	97.00	1	100.00	1	99.99	99.,99	1	60,00			

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
2	2	2	8	5	7	6	Gelar Budaya Yogya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	100	1	97.00	1	100.00	1	99.99	97.01	1	60,00	1	197.01	
4	1						Urusan Sekretariat Daerah		100	238.74			100	40.00	100	38.82	100	100	40,00			
4	1	4					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan ketatalaksanaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan ketatalaksanaan	100	238.74	100		**100**	**40.00**	3	38.82	71,32	100	40.00	100	74.42	
4	1	4	5	6			Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan	100	238.74	100	34.41	**100**	**40.00**	3	38.82	71,32	3	40.00	3	74.42	
								Kelembagaan dan Ketatalaksanaan														
4	1	4	5	6	1	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8	238.74	2	34.41	3	40.00	3	38.82	71,32	3	40.00	3	74.42	
7	1	1					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	10.628,32	1	2.263.20	**100**	**2,519.51**	**100**	**2.400.44**	74.76	**100**	**2507,00**	100	4,778.20	

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
7	1	1	2	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									100%					
7	1	1	2	8	2		Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	48	338			12	75.22	12	73.15	64,88	12	65.31		148.14	
7	1	1	2	8	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	656.15			12	149.67	12	249.67	76,84	12	149.67		279.02	
7	1	1	2	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
7	1	1	2	2	1	1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,736	8183.66			12	2,073.73	13	1,960.56	74,92	13	2,024.53		3,767.61	
7	1	1	2	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	211.6			12	64.86	12	63.42	74,34	12	64.88		129.32	
7	1	1	2	2	7	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	56	17.60			14	3,92	2	3.91	77,55	2	4.50		7.92	

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
								Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
7	1	1	2	6	9	9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*														
7	1	1	2	6	2	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	70.00			4	13.99	5	13.66	92,46	5	14.00		29.20	
7	1	1	2	6	9	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	152.08			12	33.46	12	33.40	78,57	12	33.47		70.17	
7	1	1	2	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu*														
7	1	1	2	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	30.00			2	5.17	2	4.90	94,44	2	5.17		10.44	
7	1	1	2	1	7	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	16.68			21	3.92	21	3.92	48,21	21	3.92		24.92	
7	1	1	2	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*														

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
7	1	1	2	7	10	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	87	*534.46*									21	20,21			
7	1	1	2	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*														
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56	247.80			14	58.96	14	57.38	72,83	14	58.97		115.99	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	55.00								1	31,99			
7	1	1	2	9	1	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	244	115.30			61	36.42	41	36.51	73,42	61	30.49		54.91	
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100**	**176.16**			**100**	**44,10**	**33.5**	**41.10**	**69,38**		**39,91**		45.57	

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
7	1	2	2	1			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan*														
7	1	2	2	1	1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16	44.31			4	10.42	4	9.22	40,59	4	7,82		20.99	
7	1	2	2	1	2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20	97.92			8	29.70	7	27.93	79,399	5	27.53		56.71	
7	1	2	2	4			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*														
7	1	2	2	4	1	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	*48*	*33.93*			12	3.97	12	3.95	70,02	12	4.56		12.04	
7	1	3					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan**					**100**	**1388,65**	**50**	**1.383.20**	90,63	100	1,342,97		1,031.12	

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
								Masyarakat Desa Dan Kelurahan														
7	1	3	2	2	3		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*															
7	1	3	2	2	3	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	36	151.06			10	35.22	10	34.83	78,14	9	32.64		70.83	
7	1	3	2	2			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah LembagaKemasyarakatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*															
7	1	3	2	2	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	68	2,797.97			17	904.22	17	903.56	99.21	17	904.23		1,579.93	

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2		3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
										K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
7	1	3	2	2	3	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48	1,267.55			11	410.58	11	409.78	74,19	11	368.93		650.13	
7	1	3	2	2	4	4		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	48	160.01			12	38.61	12	35.03	76,04	12	37.17		77.24	
7	1	5					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100.**	**2,820.36**			**92**	**694.45**	**92.11**	**679.900**	73,43	100	662,14		663.39	
7	1	5	2	1	1			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*														
7	1	5	2	1	1	1			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar	2,261	2,564.32			324	602.10	405	590.72	72,88	405	602.11		1,202.25	

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
							Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
7	1	5	2	1	2	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	540	117.38			70	37.41	70	36.56	83,16	70	31.42		59.05	
7	1	5	2	1	5	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11	138.66			6	54.91	6	53.56	72,83	6	28.61		90.53	
7	1	6					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100.**	**72.82**			**100**	**24.50**	**40**	**24.33**	71,96	100	22,14		49.03	

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta	K	Rp Juta		K	Rp Juta	K	Rp Juta	
7	1	6	2	1			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*															
7	1	6	2	1	17	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*32.00*	*72.82*			11	24.50	7	24.33	71,96	7	22.14		49.03	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Wates

Kinerja Pelayanan di Kapanewon Wates dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kapanewon

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kapanewon Wates meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Wates disajikan pada tabel Tabel 2.5 berikut :

Tabel : 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Wates
Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	Tahun 2024	2025	2026	2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*		*12*
1	Persentase peningkatan penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100,00	100,00	100,00		100	100,00	100,00		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,50	84,75	85,00		80.67	84,25	84,50		
3	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon			98,25	99,12	100,00		98.25	99,12	100,00		

2.3. Isu-isu Penting/ Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD adalah sebagai berikut:

a. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal;
b. Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal;
c. Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD;
d. Proses Perencanan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat Kabupaten kurang terintegrasi dan koordinasi dengan pengampu kepentingan di tingkat Kapanewon dan Desa;
e. Belum terpenuhinya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai waktu yang telah ditentukan;
f. Penanganan arsip pemerintah baik kalurahan maupun kapanewon belum optimal.

2.3.2. Dampak terhadap Capaian tujuan dan Sasaran Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kapanewon Wates secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap tujuan dan sasaran Daerah diantaranya sebagai berikut:

a. Belum terpenuhinya pembayaran pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) memberikan dampak berkurangnya sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah.
b. Permasalahan dan hambatan lain yang secara tidak langsung juga bisa memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dari sektor pendidikan dan kesehatan.

2.3.3. Tantangan dan Peluang

a. Tantangan

- Tuntutan publik terhadap pelayanan yang semakin baik dan transparan.
- Tuntutan masyarakat akan terwujudnya standar pelayanan publik dan profesionalisme PNS.

- Perkembangan berbagai kebijakan pemerintah yang perlu segera respon dan tindak lanjut.

b. Peluang

- Adanya mega proyek, berbagai program dan kegiatan besar yang masuk di Kabupaten Kulon Progo terlebih banyak yang terkonsentrasi di wilayah selatan. Penambangan pasir besi, pembangunan / operasional Yogyakarta International Airport, pengembangan daerah wisata perlu mempersiapkan kondisi wilayah dan masyarakat.

2.3.4. Formulasi terhadap Isu – isu penting

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Wates, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kebijakan penyerahan sebagaian kewenangan dari Bupati Kulon Progo kepada Panewu di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagaian kewenangan Bupati kepada Panewu, maka Panewu dengan tetap berdasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang berlebih besar yaitu tercapainya Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kulon Progo.
b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh sungguh memperhatikan company/coorperate sosial resposibility (CSR) maka kapanewon harus benar benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
c. Pelayanan prima Kapanewon sebagai OPD di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggaakan pelayanan publik, maka harus benar benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, efektif dan efisien, ramah, ikhlas dan akuntabel dan memiliki legalitas hukum,

di samping itu tentunya dengan tepat mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggarakan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat sehingga mencapai tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima bentuk – bentuk pelayanan.

d. Peningkatan Kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat dalam bentuk PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki kompetensi yang berkualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah Kapanewon, Kelurahan/Kalurahan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kapanewon Wates. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 2.6 berikut.

Tabel : 2.6

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Kulon Progo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Kapanewon Wates**	**Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**25,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kapanewon Wates**	**Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100,000,000**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1 Laporan**	**25,000,000**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1 Laporan**	**100,000,000**	
	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	25,000,000	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kapanewon Wates**	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**62,244,100**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Wates**	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**140,000,000**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun**	**2 Dokumen**	**62,244,100**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun**	**2 Dokumen**	**140,000,000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Wates	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	62,244,100	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Wates	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	140,000,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kapanewon Wates**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**2,725,181,252**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Wates**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**3,372,487,666**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu**	**25 Dokumen**	**12,200,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu**	**25 Dokumen**	**14,825,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10,500,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	4,200,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	4,325,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu**	**14 Dokumen**	**2,113,801,002**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu**	**14 Dokumen**	**2,341,108,426**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Wates	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	434 Org/bln	2,055,251,002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Wates	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	434 Org/bln	2,281,108,426	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	55,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	4,550,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	5,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**	**2 Dokumen**	**55,500,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**	**2 Dokumen**	**65,000,000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Wates	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Wates	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	39,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20,500,000	
	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat daerah										
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarka Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai Yang mengikuti Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang					5 Orang	5,500,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah penambahan aset**	**21 Unit**	**145,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah penambahan aset**	**21 Unit**	**567,384,200**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Wates	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 Unit	145,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Wates	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	567,384,200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**24 Laporan**	**266,029,638**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**24 Laporan**	**244,670,040**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	176,029,638	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	149,670,040	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**3 Laporan**	**132,650,612**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**3 Laporan**	**135,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Wates	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	64,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Wates	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	65,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Wates	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainya Yang di pelihara/direhabilitasi	2 Unit	38,150,612	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Wates	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainya Yang di pelihara/direhabilitasi	2 Unit	40,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Wates	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	61 Unit	30,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Wates	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	61 Unit	30,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kapanewon Wates	**Persentase Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100**	**44,566,733**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kapanewon Wates	**Persentase Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100**	**47,931,537**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**9 Dokumen**	**35,994,050**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**9 Dokumen**	**39,059,150**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	11,209,150	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	11,601,150	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	24,784,900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	27,458,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan**	**12 Dokumen**	**8,572,683**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan**	**12 Dokumen**	**8,872,387**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	8,572,683	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	8,872,387	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kapanewon Wates**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100%**	**1,107,431,788**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Wates**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100%**	**1,582,659,828**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**9 Laporan**	**38,217,200**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**9 Laporan**	**44,533,800**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	38,217,200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	44,533,800	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**17 Lembaga Kemasyarakatan**	**1,069,214,588**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**17 Lembaga Kemasyarakatan**	**1,538,126,028**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Lembaga Kemasyarakatan	707,856,200	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Lembaga Kemasyarakatan	994,229,200	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	320,876,870	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	500,000,000	
	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	40,481,518	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	43,896,828	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1064 orang**	**713,719,349**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1064 orang**	**745,469,406**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Wates	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	444 Orang	648,744,899	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Wates	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	405 Orang	671,429,928	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kapanewon Wates	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	135 Orang	29,895,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kapanewon Wates	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	37,733,528	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Laporan	35,079,450	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Laporan	36,305,950	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kapanewon Wates**	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**18,423,805**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kapanewon Wates**	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**27,305,950**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**	**9 Laporan**	**18,423,805**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**	**9 Laporan**	27,000,000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan	18,423,805	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan	27,000,000	
JUMLAH PAGU					**4,696,567,027**	**JUMLAH PAGU**				**6,015,548,437**	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Wates diperoleh dari berbagai kegiatan. Usulan program tahun 2026 dikirim kepada Bapperida Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.

Sedangkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Kapanewon selama ini tidak pernah ada.

Tabel 2.7
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No.	Program / Kegiatan	Lokasi (Desa dan Kapanewon)	Sasaran Program / Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	--	--	--	--	--

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Renja yang di susun Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD dan Kebijakan Nasional Setiap Tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 (RKP) yakni : "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema ini menjadi landasan untuk mencapai visi dan misi presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. ". Adapun prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026 Meliputi:

a. **Kedaulatan Pangan dan Energi:** Fokus pada ketahanan pangan, energi, air, dan pengelolaan sampah. Ini mencakup optimalisasi Bulog, lumbung pangan, bauran energi, energi terbarukan, pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), serta pengelolaan sampah.
b. **Ekonomi Produktif dan Inklusif:** Meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, deregulasi dan kepastian hukum, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adopsi teknologi dan inovasi, pengentasan kemiskinan, serta stabilitas makroekonomi.

3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Kapanewon Wates pada periode Renstra Tahun 2023-2026 adalah "Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsive dan akuntabel". Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan kinerja	Target Indikator Kinerja Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86.9
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (AKIP)	Nilai	A(85.3)
		Nilai Indeks Maturasi SPIP	Nilai	3,23

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan kinerja	Target Indikator Kinerja Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,610
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A(>80-90)
3	Meningkatnya kwalitas Pengendalian Internal perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2.0-3.0

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada Renstra dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Wates Tahun 2026 adalah seperti Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Tahun 2026

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Kapanewon Wates**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**100%**	**100,000,000**
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1 Laporan**	**100,000,000**
	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kapanewon Wates**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100%**	**125.000.000**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Kapanewon Wates**	**Dukungan sebesar 100% terhadap peningkatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/**	**4 Dokumen**	**125.000.000**
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kalurahan yang Didampingi	4 Dokumen	125.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kapanewon Wates**	**Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi**	**100%**	**2,485,892,820**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Wates**	**Dukungan sebesar 0.4 % terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**23 Dokumen**	**7.621.800**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,689,900
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	2,922,900

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Wates**	**Dukungan sebesar 84 % terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**14 Dokumen**	**2,088,884,162**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Wates	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Org/bln	2,046,599,962
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	39,329,700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	2,954,500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Wates**	**Dukungan sebesar 84 % terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2 Dokumen**	**43,610,800**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Wates	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,730,800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	27,880,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kapanewon Wates**	**Jumlah penambahan aset**	**46 Unit**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Wates	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Wates**	**Dukungan sebesar 10% terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2 Laporan**	**224,529,558**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	65,039,538
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	159,490,020
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Wates**	**Dukungan sebesar 3.4% terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2 Dokumen**	**121,246,500**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Wates	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	65,000,000
	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan bangunan Lainya		Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainya yang di pelihara	3 unit	57,521,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Wates	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	61 Unit	28,595,800
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kapanewon Wates	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**100**	**57,721,600**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Wates**	**Dukungan sebesar 90 % terhadap peningkatan Pelayanan Non Perizinan**	**2 Dokumen**	**54,855,600**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	35,972,800
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	18,882,800

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kapanewon Wates**	**Dukungan sebesar 10% terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**12 Dokumen**	**2,866,000**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kapanewon Wates	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	2,866,000

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kapanewon Wates**	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan tepat waktu**	**100%**	**1,347,565,700**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kapanewon Wates**	**Dukungan sebesar 28,7 % terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**1 Dokumen**	**20,750,900**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	20,750,900
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kapanewon Wates**	Dukungan sebesar 98% terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	**17 Lembaga Kemasyarakatan**	**1,326,814,800**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Lembaga Kemasyarakatan	889,456,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	406,232,800
	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Wates	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	31,126,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kapanewon Wates**	**Persentase Penanganan Gangguan Trantibum**	**94,74%**	**593,560,900**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Wates**	**Dukungan sebesar 97% terhadap peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umumh**	**1064 orang**	**593,560,900**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Wates	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	444 Orang	539,157,200
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kapanewon Wates	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	135 Orang	29,113,700
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Laporan	25,290,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kapanewon Wates**	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	**100%**	**14,854,000**

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kapanewon Wates**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**	**1 Dokumen**	**14,854,000**
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kapanewon Wates	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan	14,854,000
JUMLAH PAGU					**4,724,595,020**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo, program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
f) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
g) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

I. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, meliputi kegiatan :

1) Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, meliputi sub kegiatan :
   a. Gelar Budaya Jogja

II. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan :

1) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
   a. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan, di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kalurahan

III. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :**

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

IV. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan:**

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:
   a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;

b. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

V. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, meliputi kegiatan:

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan: Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan:

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

c. Evaluasi Kelurahan

VI. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan:

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan:

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;

c. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

VII. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:

1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026 serta pendanaan Kapanewon Wates dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAPANEWON WATES KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON WATES						**4,724,595,020**							**252,786,000,000.**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100,000,000.00**							**0.00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100,000,000.00**							**0.00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**100,000,000.00**						**-**	**0.00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	100,000,000.00			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	kelompok kesenian 8 kalurahan/ kelurahan	-	0.00	KAPANEWON WATES
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100,000,000.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	kelompok kesenian 8 kalurahan/ kelurahan		0.00	KAPANEWON WATES
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**125,000,000.00**							**140,000,000.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**125,000,000.00**							**140,000,000.00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***persentase penyelengaraan keistimewaan yogyakarta urusan ketatalaksanaan dan kelembagaan***	**-**			**100 %**	**125,000,000.00**						**-**	**140,000,000.00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Dukungan sebesar 100% terhadap peningkatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan*	-			100 %	125,000,000.00			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	kapanewo n wates	-	140,000,000.00	KAPANEWON WATES
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				4 Dokumen	125,000,000.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	kapanewo n wates		140,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4,499,595,020.00**							**252,646,000,000.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4,499,595,020.00**							**252,646,000,000.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi***	**-**			**100 %**	**2,485,892,820.00**						**-**	**250,508,000,000.00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dukungan sebesar 0.4 % terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	7,621,800.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates	-	9,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4,698,900.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		5,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	2,922,900.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		4,000,000.00	KAPANEWON WATES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dukungan sebesar 84 % terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	2,088,884,162.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates	-	250,074,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				406 Orang/bulan	2,046,599,962.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		250,000,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	39,329,700.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		70,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	2,954,500.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		4,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dukungan sebesar 0.07% terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	43,610,800.00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates	-	55,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,730,800.00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		25,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	27,880,000.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		30,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0.00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0.00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				21 Unit	0.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0.00	KAPANEWON WATES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan sebesar 10% terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	224,529,558.00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	kapanewo n wates	-	250,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	65,039,538.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	kapanewo n wates		70,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	159,490,020.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTO R (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	kapanewo n wates		180,000,000.00	KAPANEWON WATES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan sebesar 3.4% terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	121,246,500.00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-	-	120,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	57,521,000.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0.00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	35,129,700.00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		80,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				61 Unit	28,595,800.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		40,000,000.00	KAPANEWON WATES
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase pelayanan non perizinan***	**-**			**100 %**	**57,721,600.00**						**-**	**43,000,000.00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Dukungan sebesar 90 % terhadap peningkatan Pelayanan Non Perizinan*	-			100 %	54,855,600.00			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	kapanewon wates	-	38,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	35,972,800.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	kapanewon wates		8,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	18,882,800.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	kapanewon wates		30,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Dukungan sebesar 10% terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan*	-			100 %	2,866,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	kapanewon wates	-	5,000,000.00	KAPANEWON WATES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	2,866,000.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	kapanewon wates		5,000,000.00	KAPANEWON WATES
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu***	**-**			**100 %**	**1,347,565,700.00**						**-**	**1,450,000,000.00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Dukungan sebesar 28,7 % terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan*	-			100 %	20,750,900.00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	kapanewon wates	-	35,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	20,750,900.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	kapanewon wates		35,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Dukungan sebesar 98% terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan*	-			100 %	1,326,814,800.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	kapanewon wates	-	1,415,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				17 Lembaga Kemasyarakatan	889,456,000.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	kapanewon wates		950,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	406,232,800.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas SDM Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	kapanewon wates		430,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	31,126,000.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	kapanewon wates		35,000,000.00	KAPANEWON WATES
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum***	**-**			**100 %**	**593,560,900.00**						**-**	**615,000,000.00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Dukungan sebesar 97% terhadap peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum*	-			100 %	593,560,900.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	kapanewon wates	-	615,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				444 Orang	539,157,200.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	kapanewon wates		550,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				70 Orang	29,113,700.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	kapanewon wates		35,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				2 Laporan	25,290,000.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	kapanewon wates		30,000,000.00	KAPANEWON WATES
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu***	**-**			**100 %**	**14,854,000.00**						**-**	**30,000,000.00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Dukungan sebesar 100% terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan*	-			100 %	14,854,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates	-	30,000,000.00	KAPANEWON WATES
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 Laporan	14,854,000.00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		30,000,000.00	KAPANEWON WATES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	J U M L A H							**4,724,595,020.00**							**252,786,000,000.00**	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Wates Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi Kapanewon Wates dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kapanewon Wates. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Wates ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan serta merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya tujuan dan Sasaran pemerintah daerah.

Keberhasilan Penyusunan Renja Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 tidak terlepas dari peran aktif dan tanggungjawab seluruh pegawai Kapanewon Wates serta *stakeholder* yang bersangkutan.

Wates, 29 Juli 2025

Panewu Wates



SUTRISNA, S.Sos
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196903161996031001

RENCANA KERJA 2026



KAPANEWON PANJATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON PANJATAN
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦴꦤ꧀ ꦥꦚꦗꦠꦤ꧀

Alamat : Jalan Nagung – Brosot, Panjatan, Kulon Progo Telp : (0274) 773993, Fax : (0274) 773983, Kode Pos 55655
Website : https://panjatan.kulonprogokab.go.id, Email : panjatan@kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANJATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KAPANEWON PANJATAN
TAHUN 2026

PANEWU PANJATAN

Menimbang :
a. bahwa agar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat berjalan tertib dan lancar maka perlu ditetapkan personalia dengan Keputusan Panewu;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Panewu.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang No. 18 tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2019 tentang Kedudukan,

Dipindai dengan CamScanner

Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;

7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kapanewon Panjatan Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab dari personalia dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kapanewon Panjatan
b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kapanewon Panjatan
c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panewu Panjatan

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Panjatan
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Panewu Panjatan

JUMARNA, S.IP.
Pembina Tk. I ; IV/b
NIP. 19670412 199103 1 016

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo
3. Personil Tim yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU PANJATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KAPANEWON PANJATAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dinas
1.	Jumarna, S.IP	Pengguna Anggaran	Panewu
2.	Arita Handiyati, S.STP, M.Eng.	PPTK	Panewu Anom
3.	Setiya Irawan, A.Md.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat
4.	Susana Budiarti, S.Sos	Anggota	Kepala Jawatan Sosial
5.	Suprapti, S.H	Anggota	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
6.	Gunadi Handayani, S.Sos., M.IP.	Anggota	Kepala Jawatan Kemakmuran
9.	Ragil Sugiyanti, S.E.	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat
10.	Partiningsih	Anggota	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
12.	Wiwik Pujiwinarni	Anggota	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
13.	Nurlinda Vernadita, A.Md.Akt.	Anggota	Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
14.	Ngadiyanto	Anggota	Operator Layanan Operasional Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Panjatan, 02 Januari 2025
Panewu Panjatan

KAPANEWON PANJATAN

JUMARNA, S.IP
Pembina Tk. I/IV/b
NIP. 19670412 199103 1 016

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Kapanewon Panjatan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Rencana Kerja (Rankir-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan Perencanaan Tahunan dari Perubahan Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai. Dalam penyusunan Renja ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renja.

Panjatan, 29 Juli 2025

Plt. PANEWU PANJATAN

KAPANEWON PANJATAN

SETIAWAN TRI WIDADA, S.Sos

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 197106031991011004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan 24
a. Lingkungan Internal 24
b. Lingkungan Eksternal 25
2.3. Isu - isu Penting / Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 27
2.3.1. Permasalahan dan Hambatan: 27
2.3.2. Dampak Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah 27
2.3.3. Tantangan dan Peluang 28
2.3.4. Formulasi Isu-isu penting dan Rekomendasi 32
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 32
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 45
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 45
3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah 46
3.3. Program dan Kegiatan 47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 51
BAB IV P E N U T U P 62

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Tahun 2024 7
Tabel 2 2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Panjatan Tahun 2024 8
Tabel 2 3 Capaian Realisasi Serapan Keuangan Tahun Anggaran 2024 9
Tabel 2 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan) 14
Tabel 2 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan 26
Tabel 2 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 34
Tabel 2 7 Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2025 44

Tabel 3 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 46
Tabel 3 2 Indikator Kinerja Program Kapanewon Panjatan Tahun 2026 48

Tabel 4 1 Rumusan Rancangan Awal Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Panjatan Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 52

Daftar Gambar

Gambar 1 1Bagan Alur Hubungan RKPD , Renstra dan Renja Perangkat Daerah 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen Rancangan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud.

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Panjatan Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Proses Penyusunan Rencana Kerja (Rankir-Renja) Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan, penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan :

Proses penyusunan Rankit Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan , dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

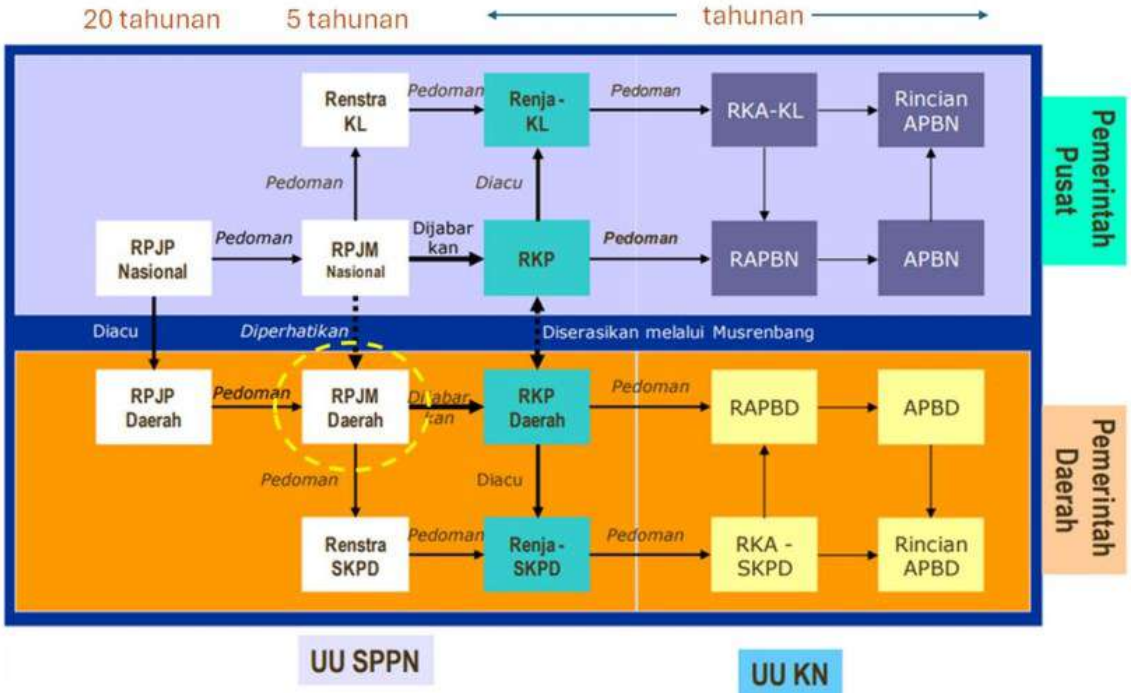
Prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja PD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Kapanewon Panjatan 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026.

Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Perubahan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra PD dan RKPD. Renja PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra PD, dan RPJMD, bagi RKA PD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD dapat dilihat dalam gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan RKPD , Renstra dan Renja Perangkat Daerah dibawah ini.

Gambar 1 1Bagan Alur Hubungan RKPD , Renstra dan Renja Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Ranwal-Renja) Kapanewon Panjatan Tahun 2026 yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rancangan Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
j. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
k. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 -2026;
l. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 -2026;
m. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026
n. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Tahun 2026 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan - kegiatan strategis di wilayah

Kapanewon Panjatan guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil - hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Menciptakan sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo khususnya Kapanewon Panjatan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kapanewon;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas - tugas Panewu berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Kapanewon Panjatan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan.
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN TAHUN 2025

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi PD
2.4. Review terhadap RKPD

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.3 `Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Kapanewon Panjatan melaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas dan dengan melihat sasaran yang ditetapkan. Pencapaian sasaran secara rinci adalah :

1. Sasaran : Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dapat mencapai 100 %.
2. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kecamatan dengan target 84,50 mendapat nilai 92,768 sehingga dapat mencapai 109,78 %. Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah telah dilaksanakan dengan "**Sangat Baik**".
3. Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dapat mencapai 100 %, dari target yang ditetapkan sebesar 98,25.

Tabel 2 1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Panjatan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024
1	*2*	*4*	*3*	*4*
Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,137	84,50	92,768
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	97,37	98,25	98,25

Tabel 2 2 Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Panjatan Tahun 2024

Program	Indikator kinerja	Realisasi 2024	Target	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100 %	100 %	100 %
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PeningkatanPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	94.74	94,74	94,74
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100 %
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan	100 %	100 %	100 %
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan	100 %	100 %	100 %

Capaian kinerja Kapanewon Panjatan Tahun 2024 mencapai 100 % dengan rata rata deviasi keuangan sebesar 0,00 %, tahun anggaran 2024 OPD Kapanewon Panjatan melaksanakan 7 (tujuh) Program, dirinci 13 (tiga belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.111.409.531,00 Dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.992.644.495,,00 dengan capaian sebesar 94,38 % sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan di luar kegiatan Penyediaan Gaji ASN dibawah ini :

Tabel 2 3 Capaian Realisasi Serapan Keuangan Tahun Anggaran 2024

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi			%	Sisa Angaran
			Pegawai Barang & Jasa	Modal	Total		
A	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**100.000.000**	**99.485.500**	**0**	**99.485.500**	**99,49**	**514.500**
1	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.485.500		99.485.500	99,49	514.500
B	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**40.000.000**	**39.687.780**	0	**39.687.780**	**99,22**	**312.220**
1	Penyusunan Rencana Programdan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	39.687.780	0	39.687.780	99,22	312.220
C	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.141.400**	**6.002.793**	**0**	**6.002.793**	**97,74**	**138.607**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.233.500	3.165.600	0	3.165.600	97,90	67.900
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.907.900	2.837.193	0	2.837.193	97,57	70.707
D	**Administrasi Keungan Perangkat Daerah**	**42.107.500**	**40.779.638**	**0**	**40.779.638**	**96,85**	**1.327.862**
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.781.200	37.593.600	0	37.593.600	96,94	1.187.600
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	3.326.300	3.186.038	0	3.186.038	95,78	140.262
E	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**37.190.600**	**35.956.789**	**0**	**35.956.789**	**96,68**	**1.233.811**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.290.600	8.057.419	0	8.057.419	86,73	1.233.181
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.900.000	27.899.370	0	27.899.370	99,99	630
F	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**151.382.032**	**144.598.838**	**0**	**144.598.838**	**95,50**	**6.783.194**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi			%	Sisa Angaran
			Pegawai Barang & Jasa	Modal	Total		
	Penyediiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.646.000	24.862.814	0	24.862.814	78,57	6.783.186
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.736.032	119.736.024	0	119.736.024	100	8
G	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95.012.070**	**93.711.691**	**0**	**93.711.691**	**98,63**	**1.300.379**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.133.470	73.372.041	0	73.372.041	98,97	761.429
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	20.878.600	20.339.650	0	20.339.650	97,42	538.950
H	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**39.462.000**	**39.325.800**	**0**	**39.325.800**	**99,66**	**136.200**
1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	17.085.000	17.013.150	0	17.013.150	99,58	71.850
2	Peningkatan Efektiivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	22.377.000	22.312.650	0	22.312.650	99,71	64.350
I	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**8.019.800**	**7.623.899**	**0**	**7.623.899**	**95,06**	**395.901**
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non usaha	8.019.800	7.623.899	0	7.623.899	99,17	395.901
J	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa**	**43.027.500**	**42.168.900**	**0**	**42.168.900**	**98,01**	**858.600**
1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	43.027.500	42.168.900	0	42.168.900	98,01	858.600

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi			%	Sisa Angaran
			Pegawai Barang & Jasa	Modal	Total		
	Wilayah Kecamatan						
K	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**92.245.100**	**86.021.550**	**0**	**86.021.550**	**93,25**	**6.223.550**
1	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi,konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	29.231.000	28.315.150	0	28.315.150	96,87	915.850
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	63.014.100	57.706.400	0	57.706.400	91,58	5.307.700
L	**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**	**24.680.000**	**24.356.100**	**0**	**24.356.100**	**98,69**	**323.900**
1	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	24.680.000	24.356.100	0	24.356.100	98,69	323.900
	JUMLAH	679.268.002	659.719.278	0	659.719.278	97,12	19.548.724

Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 Kapanewon Panjatan

Capaian Realisasi Serapan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Kapanewon Panjatan dari semua program/kegiatan/Sub Kegiatan mencapai 97,12 %, terdapat deviasi sebesar 2,8 % atau sebesar Rp. 19.548.724,00

a. Program/kegiatan/sub kegiatan yang “Tidak Memenuhi” Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pencapaian targetnya 96,94% karena belanja disesuaikan dengan harga pasar dan purna tugas 2 PPTK serta 1 PPK diklat.

b. Selanjutnya semua program/kegiatan/sub kegiatan yang lain dapat mencapai kondisi "Memenuhi" Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan, jika terdapat deviasi di capaian realisasi serapan keuangan, dikarenakan adanya selisih harga pasar untuk belanja ATK dengan harga di DPA, namun untuk realisasi kinerja fisik tidak ada kendala.
c. Kondisi dari masalah pada point a. Program/kegiatan/sub kegiatan yang "Tidak Memenuhi" Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan diatas, tidak terlalu berpengaruh / berimplikasi terhadap pencapaian realisasi fisik, dikarenakan ASN yang menjabat sebagai PPTK, untuk sementara didelegasikan kepada PPTK lain.
d. Solusi yang diambil berkaitan dengan kondisi diatas adalah dengan mendelegasikan tugas dan tanggungjawab kepada PPTK lain, sampai jabatan yang kosong terisi kembali.

Untuk memberikan gambaran capaian target kinerja hasil / keluaran tahun lalu, yaitu tahun 2024 (n-2) dan tahun 2025 (n-1), kami sajikan dalam tabel perbandingan antara target yang akan dicapai dengan realisasi capaian keluaran (output) dan hasil (outcomes). Untuk data tahun 2024 disusun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, sedangkan data tahun 2024 disusun berdasarkan Pemetaan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan) Kabupaten Kulon Progo

Pada tahun anggaran 2025 OPD Kapanewon Panjatan melaksanakan 7 (tujuh) Program, dirinci 13 (tiga belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.111.409.531,00 Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.880.176.749,00 dengan capaian sebesar 95,66 % sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan dibawah ini : Dalam mengevaluasi hasil kinerja, maka Kapanewon Panjatan menggunakan metode menghitung, mengukur nilai capaian kinerja realisasi pelaksanaan

kegiatan/program kebijakan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini diawali dengan pengukuran kinerja kegiatan dengan memuat indikator kinerja *input, output*, dan *outcome*. Hal ini dilakukan mengingat hasilnya sulit untuk diukur dengan *benefit* dan *impact*. Sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang diukur khusus adalah yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam mengevaluasi kinerja ini diupayakan untuk menilai aspek keuangan, hasil kegiatan dan harapan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga hasilnya diharapkan mendekati kebenaran.

Tabel 2 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan)

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
									Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan		Jml	Satuan	Jml	Satuan	
2							Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkairan dengan Pelayanan Dasar		100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	100	%	100 %
2	2	2					Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	100	%	
2	2	2	8				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	100	%	100 %
2	2	2	8	5	7		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Dukungan Sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100	100	%		100	%	100	%	100	100	%	100	%	100 %
2	2	2	8	5	7	6	Gelar Budaya Yogya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	Laporan	100 %
4	1						Urusan Sekretariat Daerah		100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	100	%	
4	1	4					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	100	%	100 %
								Ketatalaksanaan														

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	1	4	5	6			Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	3	Dokumen	3	Dokumen	100%
4	1	4	5	6	1	1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	3	Dokumen	3	Dokumen	100%
7	1	1					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	60	%	20	%	20	%	100%	20	%	100	%	433%
7	1	1	2	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	84	bulan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	84	bulan	596%
7	1	1	2	8	3	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa PTT) dan tersedianya peralatan kantor (Alat																
								Tulis Kantor, Cetak Penggandaan dan Surat Kabar)																

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	1	2	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
7	1	1	2	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	72	bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	72	bulan	100%
7	1	1	2	2	1	1	Penyediaan Gaji dan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	72	bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	72	bulan	100%
							Tunjangan ASN															
7	1	1	2	2	7	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan	14	Dokumen	8	Dokumen	2	kali	2	kali	100%	2	kali	14	kali	100%
7	1	1	2	6	9	9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72	bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	72	bulan	100%
7	1	1	2	6	9	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72	bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	72	bulan	100%
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa PTT) dan tersedianya peralatan kantor (Alat														
								Tulis Kantor, Cetak Penggandaan dan Surat Kabar)														

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	1					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	60	%	20	%	20	%	100%	20	%	100	%	100%
7	1	1	2	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
7	1	1	2	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 2023 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD 2022	2	Dokumen	7	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	13	Dokumen	100%
7	1	1	2	1	7	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil	21	Dokumen	21	Dokumen	21	Dokumen	21	Dokumen	100%	21	Dokumen	21	Dokumen	100%
								Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP														
7	1	1					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	60	%	20	%	20	%	100%	20	%	100	%	100%
7	1	1	2	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan	55	Unit	28	Unit	0	Unit	2	Unit	#DIV/0!	0	Unit	30	Unit	80%
								Daerah Kabupaten/Kota														
7	1	1	2	7	#	#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Laptop														

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Pengadaan Printer														
7	1	1	2	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72	Bulan	48	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	72	Bulan	100%
7	1	1	2	9	#	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbayarnya Listrik, Telepon, Air dan Perijinan Kendaraan	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	72	Bulan	100%
								Terpeliharanya aset berupa kendaraan dinas roda empat, kendaraan dinas roda dua,	34	Unit	11	Unit	11	Unit	11	Unit	100%	11	Unit	22	Unit	100%
								komputer/pc, laptop, mesin ketik, LCD dan AC														
								Terpeliharanya gedung kantor	12	bulan												
7	1	2					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	%	60	%	20	%	20	%	100%	20	%	100	%	100%
7	1	2	2	1			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
7	1	2	2	1	2	2	Peningkatan Efektifitas kegatan	Pembinaan kegiatan keagamaan	7	kali	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
							pemerintahan di tingkat kecamatan															

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021			Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
															Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Terkoordinasikannya Kapanewon Sehat	2	kali												
										Terkoordinasikannya Penanganan Permasalahan Sosial	10	kali												
										Terkoordinasinya PKK	6	kali												
										Terlaksananya pembinaan pengarusutamaan gender dan KDRT	1	kali												
7	1	2	2	1	1	1			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaaan kegiatan	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
7	1	2	2	1	1	1			pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terkoordinasinya kegiatan PAUD	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali	#DIV/0!	1	kali	1	kali	100%
										Terlaksananya monitoring penyelenggaraan Uji Kompetensi Dasar	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali		1	kali	1	kali	100%
										Terlaksananya monitoring perpustakaan kalurahan	2	kali	2	kali	2	kali	2	kali		2	kali	2	kali	100%
										Terlaksananya pembinaan UKS	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali		1	kali	1	kali	100%
										Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali		1	kali	1	kali	100%

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Terfasilitasinya kegiatan olahraga	10	kali	10	kali	10	kali	10	kali		10	kali	10	kali	100%
								Terfasilitasinya kegiatan seni dan budaya	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali		1	kali	1	kali	100%
								Terfasilitasinya Nyadran Agung	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali		1	kali	1	kali	100%
7	1	2	2	4			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	100	%	100%
7	1	2	2	4	1	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terkelolanya Paten	72	Bulan	48	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	12	bulan	12	bulan	17%
7	1	3					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
7	1	3	2	1			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
7	1	3	2	1	3	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaan koperasi, dan Pembinaan UKM)														
							Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan ekonomi produktif	Fasilitasi Manunggal Fair 1 kali	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali	100%	1	kali	1	kali	100%

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Terbinanya BUMKal 2 kali	2	kali	2	kali	2	kali	2	kali	100%	2	kali	2	kali	100%
							Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan	Tersusunnya hasil Musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Monitoring, Pengendalian, Pelaporan Pembangunan daerah) Bulan bhakti gotong royong masyarakat dan Lomba Desa														
								Terkoordinasinya BBGRM 1 kali	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali	100%	1	kali	1	kali	100%
								Terkoordinasinya Lomba Kalurahan/Kelurahan 1 kali	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali	100%	1	kali	1	kali	100%
								Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4 dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	4	Dokumen	100%
								Tersusunnya RPTK 1 dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
								Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
7	1	5					ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	82,35	%	82,35	%	82,35	%	82,4	%	100%	82,4	%	82,35	%	100%
7	1	5	2	1			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Penyelenggaraan	82,35	%	82,35	%	82,35	%	82,4	%	100%	82,4	%	82,35	%	100%

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Urusan Pemerintahan Umum														
7	1	5	2	1	2	2		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali	100%	1	kali	1	kali	100%
								Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									100%					
									Terfasilitasinya latihan Paskibraka	1	peleton	1	peleton	1	peleton	1	peleton	100%	1	peleton	1	peleton	100%
									Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional	2	kali	2	kali	2	kali	2	kali	100%	2	kali	2	kali	100%
7	1	5	2	1	5	5		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali	100%	1	kali	1	kali	100%
									Terfasilitasinya Forkompincam	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	12	bulan	100%
									Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba)	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali	100%	1	kali	1	kali	100%
									Terlaksananya Patroli Terpadu	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	12	bulan	100%
									Terlaksananya Pembinaan Linmas	1	kali	1	kali	1	kali	1	kali	100%	1	kali	1	kali	100%
									Terselenggaranya posko penanganan bencana alam tingkat kapanewon	4	kali	4	kali	4	kali	4	kali	100%	4	kali	4	kali	100%

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	1	6					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
7	1	6	2	1			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
7	1	6	2	1	#	#	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintahan kalurahan	11	kalurahan	11	kalurahan	11	kalurahan	11	kaluraha n	100%	11	kalurahan	11	kalurahan	100%
								Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	11	kalurahan	11	kalurahan	11	kalurahan	11	kaluraha n	100%	11	kalurahan	11	kalurahan	100%
								Terevaluasinya produk hukum	5	dokumen	5	dokumen	5	dokumen	5	dokumen	100%	5	dokumen	5	dokumen	100%
								Terfasilitasinya penyusunan APBKal	11	kalurahan	11	kalurahan	11	kalurahan	11	kaluraha n	100%	11	kalurahan	11	kalurahan	100%
								Terkoordinasinya pembayaran PBB P2	11	kalurahan	11	kalurahan	11	kalurahan	11	kaluraha n	100%	11	kalurahan	11	kalurahan	100%
								Terkoordinasinya pengisian pamong kalurahan	3	kalurahan	3	kalurahan	3	kalurahan	3	kaluraha n	100%	3	kalurahan	3	kalurahan	100%
																	100%					

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan

Kinerja Pelayanan di Kapanewon Panjatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur
2. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
3. Meningkatnya Sarana dan prasarana perkantoran
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kapanewon Panjatan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi.

Analisis kinerja pelayanan di Kapanewon Panjatan meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi. Faktor kunci keberhasilan kinerja pelayanan organsasi antara lain:

a. Lingkungan Internal

Kekuatan:

1. Visi dan misi organisasi yang jelas
2. Masih ada motivasi kerja aparatur sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat
3. Sebagai bentuk tanggungjawab melaksanakan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.
4. Dengan keterbatasan prasarana penunjang pelayanan yang ada merupakan tantangan untuk meningkatkan suksesnya pelayanan OPD
5. Adanya alokasi anggaran bagi Kapanewon
6. Faktor Pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS diantaranya Letak geografis dan kondisi alam dijadikan motifasi dalam pelayanan masyarakat agar ada

keseimbangan dan kesetaraan dengan daerah lain, Meningkatkan upaya strategi untuk mensiasati berbagi permasalahan yang ada agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

7. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
8. Diklat peningkatan kualitas aparatur
9. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang kuat

Kelemahan

1. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai. Terbatasnya kualitas SDM berpengaruh terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. SPM Kapanewon Panjatan belum dilaksanakan sepenuhnya sebagai acuan dasar Pelayanan Publik
3. Sarana dan prasarana kantor terbatas menyebabkan kurang optimalnya pelayanan
4. Sistem administrasi organisasi belum tertib dan masih lemah
5. Penyusunan kebijakan dan perencanaan belum optimal
6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Panewu belum dilaksanakan secara optimal.
7. Sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi terbatas sehingga menyebabkan lambatnya arus informasi dari dan ke Kalurahan.

b. Lingkungan Eksternal

Peluang:

1. Agenda pembangunan tahunan kabupaten Kulon Progo
2. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
3. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat, pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelayanan publik
4. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kapanewon

5. Tempat Wisata alam di Kapanewon Panjatan sangat potensial dan banyak lokasinya hanya tidak ditunjang promosi dan kelengkapan wisata yang masih minim apabila memungkinkan pemerintah harus mengambil peran yang penting dalam mengenalkan obyek wisata maupun pemenuhan sarana dan prasarananya.

Ancaman:

1. Sarana dan prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai,
2. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
3. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih banyak dibawah garis kemiskinan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Panjatan disajikan pada tabel Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo berikut.

Tabel 2 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panjatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)			A	A	A		A	A	A		
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Publik)			WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP		
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			84,5	84,75	85		92,768	Na	92,77		
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah			100	100	100		100	na	100		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,25	84,5	84,75		92,768	na	92,77		
			Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon			97,37	98,25	99,12		97,37	na	99,12		

2.3. Isu - isu Penting / Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Panjatan, ditentukan isu - isu penting yang dapat menimbulkan permasalahan yang secara tidak langsung menjadi penghambat dalam pencapaian program yaitu sebagai berikut :

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan:

1. Potensi banjir
2. Pembangunan JJLS
3. Rawan bencana tsunami
4. Rawan bencana kekeringan
5. Gempa bumi
6. Kondisi air bersih yang buruk
7. Dampak pandemi covid 19 dan penanganannya
8. Kerusakan jalan aspal di sejumlah ruas jalan
9. Perlunya perkerasan dan pengaspalan jalan antar desa
10. Banyaknya rumah tidak layak huni
11. Bencana angin kencang
12. Pembangunan bandara dan fasilitas pendukung
13. Tanah warga yang belum bersertifikat
14. Pengolahan tangkap laut yang belum optimal
15. Kekeringan di musim kemarau di lahan persawahan
16. Pengangguran / kenakalan remaja
17. Angka buta huruf
18. Permasalahan kekurangan permodalan dan tunggakan pinjaman masyarakat dalam lembaga keuangan
19. Permasalahan kesehatan masyarakat

2.3.2. Dampak Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah

Berkaitan dengan permasalahan dan hambatan yang ada seperti :

1. Bencana banjir, resiko bencana tsunami, gempa bumi, bencana angin kencang, pengangguran dan kenakalan remaja, akan memunculkan

kekawatiran masyarakat dalam beraktifitas, sehingga menurunkan produktifitas masyarakat, dalam segala bidang.

2. Pembangunan JJLS akan sedikit merubah pola budaya masyarakat dalam mata pencaharian.

3. Kondisi air bersih yang buruk, dampak pandemic Covid 19, kerusakan jalan aspal, banyaknya rumah tidak layak huni, keringan di musim kemarau di lahan persawahan, angka buta huruf, kekurangan permodalan dan tunggakan pinjaman masyarakat dalam lembaga keuangan, dan permasalahan kesehatan masyarakat serta merta akan mengurangi kemampuan masyarakat dalam beraktifitas, sehingga produktifitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan akan terbatas.

Kondisi tersebut dapat dipastikan akan menghambat proses pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

2.3.3. Tantangan dan Peluang

2.3.3.1. Tantangan

Pembangunan Tahun 2026 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Kapanewon Panjatan Tahun 2023-2026 dan akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan/ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Kapanewon Panjatan pada Tahun 2025 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
    1. Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP) A yang ditargetkan menuntut untuk peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kapanewon Panjatan
    2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Publik), menuntut transparansi pertanggungjawaban keuangan
    3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, menuntut kinerja aparatur pemerintah Kapanewon Panjatan yang menerapkan (nilai-nilai dasar) ASN

BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. *Core values* ASN menjadi titik tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun daerah yang berAKHLAK

2. Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator Kinerja Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah menuntut pencapaian realisasi kinerja program yang maksimal
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dengan indikator kinerja Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon dengan target di Tahun 2026 mencapai 100 %
4. Penurunan Stunting

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia 2021-2024 mendorong Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 58/A/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kulon Progo. Kapanewon Panjatan menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Panewu Nomor 21.1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kapanewon Panjatan, sedangkan 11 Kalurahan juga menerbitkan Surat Keputusan Lurah perihal yang sama. Hal ini semakin menegaskan bahwa penurunan stunting menjadi prioritas yang ditangani secara kolaboratif dan tersinergi dari semua pihak yang terkait, dari penganggaran, intervensi program kegiatan, maupun evaluasi dan pelaporannya. Untuk itu, fasilitasi koordinasi penurunan stunting kapanewon menjadi salah satu prioritas penganggaran 2023-2026.

5. Smart *City* dan *Smart Village*

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu dari 100 Kabupaten/ Kota pada Gerakan 100 *Smart City* Indonesia. Sebagai implikasinya, disusun

Master Plan Smart City 2017-2027 yang dituangkan pada Peraruran Bupati Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2017. Tindak lanjut atas peraturan tersebut, dilakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK sampai dengan Kalurahan. Selain itu, penyediaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik terus dilakukan bertahap. Meskipun demikian, implementasi di tingkat Kalurahan masih jauh dari harapan. Untuk itu, fasilitasi dan monitoring terhadap hal ini perlu mendapatkan prioritas perhatian dan pendanaan. Ha ini senada dengan Program *Smart Village* dari Kementrian Desa yang di Kapanewon Panjatan terdapat 4 (empat) Kalurahan, yaitu : Krembangan, Garongan, Bojong, dan Pleret.

6. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

   Pada era keterbukaan informasi ini, transparansi penyelenggaraan pemerintahan menjadi perhatian masyarakat secara luas. Penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawabannya dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Publikasi, penyajian dan pelayanan informasi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi hal yang wajib dilaksanakan. Untuk itu perlu menjadi prioritas untuk alokasi anggaran dari aspek penyediaan dan pelayanan informasi, maupun pembinaan pada pemerintah kalurahan.

7. Peningkatan Literasi Digital

   Seiring dengan perkembangan TIK serta implementasi *smart city* dan *smart village,* aspek kecakapan pemanfaatan teknologi informasi atau literasi digital perlu ditingkatkan agar fasilitas TIK yang tersedia digunakan dengan bijak dan meminimakan penyalahgunaan. Hal ini perlu diperhatikan dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, maupun bimbingan dan pembinaan dari segenap pihak yg berkompeten.

Disamping itu ada beberapa hal yang diperhatikan Kapanewon Panjatan yang menjadi tantangan dan peluang dalam melaksanakan ketugasannya, antara lain :

a) Pemanfaatan peluang kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Kulon Progo kepada Panewu untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya pelimpahan sebagian urusan

tersebut, maka Panewu dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya tujuan dan sasaran daerah;

b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kapanewon harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di dukung dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh – sungguh memperhatikan *Coorporate Sosial Responsibility (CSR),* maka kapanewon harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c) Inovasi pelayanan**,** Kapanewon sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggarakan pelayanan publik, perlu dilaksanakan berbagai inovasi pelayanan secara cepat, efektif dan efisien, ramah, ikhlas dan akuntabel sehingga mencapai tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima bentuk – bentuk pelayanan.
d) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat dalam bentuk PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
e) Adanya Bandara Internasional YIA, perlu di dukung dengan kesiapan masyarakat untuk dapat mengambil peran dalam bidang usaha dalam rangka memanfaatkan peluang yang mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitar bandara, dengan pengembangan daerah wisata dan factor pendukung wisata lainnya.

2.3.3.2. Peluang

Peluang yang dimiliki Kapanewon Panjatan dalam menghadapi tantangan pembangunan di Tahun 2026 adalah bahwa Kapanewon Panjatan memiliki ASN yang berkomitmen, berdedikasi tinggi, yang menerapkan (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK, sehingga mampu untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah ditargetkan

2.3.4. Formulasi Isu-isu penting dan Rekomendasi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Panjatan, ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

1) Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi;
2) Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
3) Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar;
4) Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon;
5) Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
6) Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.

Dengan adanya isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Panjatan maka perlu adanya rekomendasi untuk kedepannya berupa:

1. Dilakukannya pelatihan khusus bagi Aparatur Kapanewon dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur;
2. Tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai;
3. Perlunya pelatihan bagi masyarakat Kapanewon Panjatan agar berhasil guna dan berdaya guna.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang

selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kapanewon Panjatan berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Kulon Progo yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kapanewon Panjatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap RKPD Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 2.6 berikut.

Nama SKPD : Kapanewon Panjatan

Tabel 2 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
				Indikator	Target	Pagu	Program /			Indikator	Target	Kebutuhan	
No	Program/	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	indikatif	kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	dana	Catatan
	Kegiatan					(Rp.)						(Rp.)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.703.447.561	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**2.206.199.748**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					100.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					121.660.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA		Kap. Panjatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA		Kap. Panjatan	***Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan***	100%	100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Kap. Panjatan	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	1 Laporan	100.000.000	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Kap. Panjatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100%	40.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Kap. Panjatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100%	21.660.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
				Indikator	Target	Pagu	Program /			Indikator	Target	Kebutuhan	
No	Program/	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	indikatif	kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	dana	Catatan
	Kegiatan					(Rp.)						(Rp.)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kap. Panjatan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	40.000.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	21.660.000	
	UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN					2.563.447.561	KECAMATAN					**2.084.539.748**	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.288.452.061	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			***Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi***		**1.919.745.948**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kap. Panjatan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	23 dokumen	14.322.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kap. Panjatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	2 dokumen	6.563.200	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	8.984.200		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Panjatan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 dokumen	3.085.500	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
				Indikator	Target	Pagu	Program /			Indikator	Target	Kebutuhan	
No	Program/	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	indikatif	kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	dana	Catatan
	Kegiatan					(Rp.)						(Rp.)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	5.337.900		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Panjatan	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	12 Laporan	3.477.700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kap. Panjatan	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	14 Laporan	1.488.163.429	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kap. Panjatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	3 Dokumen	1.639.031.808	
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	8.906.300		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Panjatan	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	14 Dokumen	3.398.000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. panjatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	1.433.141.529		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. panjatan	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	20 Orang/ bulan	1.608.334.076	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	46.115.600		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Panjatan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	27.877.600	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
				Indikator	Target	Pagu	Program /			Indikator	Target	Kebutuhan	
No	Program/	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	indikatif	kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	dana	Catatan
	Kegiatan					(Rp.)						(Rp.)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kap. Panjatan	Jumlah dokumen administrasi umum	2 Dokumen	60.059.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kap. Panjatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	2 Dokumen	37.625.400	
3		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	36.600.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Panjatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	29.310.000,	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Panjatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.459.600		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Panjatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.315.400	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kap. Panjatan	Jumlah Penambahan Aset	6 unit	362.096.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kap. Panjatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	1 Dokumen	0	
4		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Panjatan	Jumlah Penambahan Aset	6 unit	362.096.200		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Panjatan	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	6 unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kap. Panjatan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	24 Laporan	175.000.032	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kap. Panjatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	2 Dokumen	156.489.072	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
				Indikator	Target	Pagu	Program /			Indikator	Target	Kebutuhan	
No	Program/	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	indikatif	kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	dana	Catatan
	Kegiatan					(Rp.)						(Rp.)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.264.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	28.884.432	
5		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	119.736.032		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Panjatan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	127.604.640	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kap. Panjatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	25 Unit	188.810.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kap. Panjatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	2 Dokumen	79.458.600	
6		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Panjatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	112.957.700		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Panjatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	62.682.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Panjatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6 Unit	43.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Panjatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6 Unit	0	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
				Indikator	Target	Pagu	Program /			Indikator	Target	Kebutuhan	
No	Program/	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	indikatif	kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	dana	Catatan
	Kegiatan					(Rp.)						(Rp.)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Panjatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	32.853.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Panjatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	16.776.600	
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Kap. Panjatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan %	100%	68.345.500	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Kap. Panjatan	***Persentase pelayanan non perizinan***	100%	**60.214.200**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18 Laporan	55.462.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kap. Panjatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	2 Dokumen	54.318.200	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	23.085.000		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	40.279.800	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
				Indikator	Target	Pagu	Program /			Indikator	Target	Kebutuhan	
No	Program/	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	indikatif	kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	dana	Catatan
	Kegiatan					(Rp.)						(Rp.)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	32.377.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	14.038.400	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12.883.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Kap. Panjatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	1 Dokumen	5.896.000	
2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12.883.500		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Panjatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	5.896.000	
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Kap. Panjatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	63.027.500	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Kap. Panjatan	***Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu***	100%	26.140.500	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	63.027.500	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kap. Panjatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	1 Dokumen	26.140.500	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
				Indikator	Target	Pagu	Program /			Indikator	Target	Kebutuhan	
No	Program/	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	indikatif	kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	dana	Catatan
	Kegiatan					(Rp.)						(Rp.)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	63.027.500		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	26.140.500	
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kap. Panjatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	97,37%	100.672.500	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kap. Panjatan	***Persentase penanganan gangguan trantibum***	100%	**60.031.900**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5 Laporan	100.672.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kap. Panjatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	2 Dokumen	**60.031.900**	
1		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Panjatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	181 Orang	36.587.000		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Panjatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	76 Orang	19.001.300	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
				Indikator	Target	Pagu	Program /			Indikator	Target	Kebutuhan	
No	Program/	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	indikatif	kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	capaian	dana	Catatan
	Kegiatan					(Rp.)						(Rp.)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	64.085.500		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5Laporan	41.030.600	
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kap. Panjatan	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	42.950.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kap. Panjatan	***Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu***	100%	18.407.200	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11 Laporan	42.950.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kap. Panjatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	1 Dokumen	18.407.200	
1		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	42.950.000		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Panjatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	18.407.200	
		II. Jumlah Pagu Dana Kegiatan				2.703.447.561		II. Jumlah Pagu Dana Kegiatan				**2.206.199.748**	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kapanewon Panjatan pada tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan umum dan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kapanewon dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan publik serta aparaturnya;
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan kalurahan ;
4. Pembinaan Pengelolaan BUMDes.
5. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
6. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas - tugas dengan Forkompinka dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah kapanewon.

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, Kapanewon Panjatan terlebih dahulu telah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pelaksanaan musrenbang kapanewon. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan hasil analisis kebutuhan SKPD, kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang, baik musrenbang desa maupun kecamatan dan kabupaten. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir

pula usulan yang masuk melalui Musrenbang Kapanewon Panjatan Tahun 2025 dengan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon & Pagu Indikatif Sektoral.

Program dan Kegiatan hasil Musrenbang dapat dilihat pada tabel 2.7. berikut ini :

Tabel 2 7 Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Volume	Kebutuhan Anggaran
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.						

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja yang disusun Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD dan Kebijakan Nasional,selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan,RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Visi,Misi dan Program Presiden.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu

"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi ini dicapai melalui **Delapan Misi Presiden** yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Panjatan mendukung visi Kepala Daerah yaitu

“Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan”

Misi ketiga Kepala Daerah,

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis”.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1. berikut ini : .

Tabel 3 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,9
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,23
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun 2026
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0-3,0
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,79

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo, program - program yang akan dilaksanakan Kapanewon Panjatan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
f) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
g) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya dan telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;, maka kegiatan - sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 2 Indikator Kinerja Program Kapanewon Panjatan Tahun 2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
	Kapanewon Panjatan			2.206.199.748,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			100.000.000,00
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**100 %**	**100.000.000,00**
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	100.000.000,00
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000,00
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			21.660.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH			21.660.000,00
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100 %**	**21.660.000,00**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	21.660.000,00
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	21.660.000,00
	UNSUR KEWILAYAHAN			2.084.539.748,00
	KECAMATAN			2.084.539.748,00
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi**	**100 %**	**1.919.745.948,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	6.563.200,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.085.500,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	3.477.700,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 Dokumen	1.639.609.676,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.608.334.076,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	27.877.600,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3.398.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	37.625.400,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.315.400,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	29.310.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	156.489.072,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	28.884.432,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	127.604.640,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	79.458.600,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	62.682.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	16.776.600,00
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan non perizinan**	**100 %**	**60.214.200,00**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	54.318.200,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	40.279.800,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	14.038.400,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	5.896.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	5.896.000,00
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu**	**100 %**	**26.140.500,00**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	26.140.500,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	26.140.500,00
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penanganan gangguan trantibum**	**100 %**	**60.031.900,00**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	60.031.900,00
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	76 Orang	19.001.300,00
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	41.030.600,00
7	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu**	**100 %**	**18.407.200,00**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	18.407.200,00
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	18.407.200,00
				2.206.199.748,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kapanewon Panjatan seperti tercantum dalam ketetapan RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026. Sesuai Perbub Kulon Progo nomor 42 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan, menegaskan bahwa salah satu tugas Kapanewon adalah melaksanakan urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon . Pada tahun 2026 Kapanewon Panjatan mendapat dukungan anggaran Dana Keistimewaan untuk 2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan di Kapanewon .

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program , Kegiatan Dan Sub Kegiatan Kapanewon Panjatan Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Panjatan Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027.

Instansi : Kapanewon Panjatan
Jumlah Pagu : Rp. 2.206.199.748,00

Tabel 4 1 Rumusan Rancangan Awal Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Panjatan Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON PANJATAN						**2.206.199.748,00**							**2.390.093.946,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1,	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan***	-			**100 %**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	100.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		100.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**21.660.000,00**							**40.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**21.660.000,00**							**40.000.000,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi***	-			**100 %**	**21.660.000,00**						-	**40.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	21.660.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	40.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	21.660.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		40.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.084.539.748,00**							**2.250.093.946,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.084.539.748,00**							**2.250.093.946,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi***	-			**100 %**	**1.919.745.948,00**						-	**2.098.115.306,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	6.563.200,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	10.620.667,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.085.500,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		7.469.220,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	3.477.700,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		3.151.447,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	1.639.609.676,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	1.802.934.989,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20Orang/b ulan	1.608.334.076,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		1.769.167.484,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	27.877.600,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		30.170.360,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.398.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		3.597.145,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	37.625.400,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	31.631.490,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.315.400,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		9.191.490,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	29.310.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	Lingkup Kapanewon Panjatan		22.440.000,00	KAPANEWON PANJATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	0,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	0,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	Lingkup Kapanewon Panjatan		0,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	156.489.072,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	166.125.730,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	28.884.432,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		34.416.148,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	127.604.640,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		131.709.582,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	79.458.600,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	86.802.430,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	62.682.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		68.579.390,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi				6 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Lingkup Kapanewon Panjatan		0,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	16.776.600,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		18.223.040,00	KAPANEWON PANJATAN
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase pelayanan non perizinan***	-			**100 %**	**60.214.200,00**						-	**36.940.750,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	54.318.200,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	29.775.020,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	40.279.800,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		11.307.780,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	14.038.400,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		18.467.240,00	KAPANEWON PANJATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	5.896.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	7.165.730,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	5.896.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		7.165.730,00	KAPANEWON PANJATAN
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu***	-			**100 %**	**26.140.500,00**						-	**28.754.550,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	26.140.500,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	28.754.550,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	26.140.500,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		28.754.550,00	KAPANEWON PANJATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase penanganan gangguan trantibum***	-			**100 %**	**60.031.900,00**						-	**66.035.420,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	60.031.900,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	66.035.420,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				76 Orang	19.001.300,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	5.Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		20.901.430,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	41.030.600,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		45.133.990,00	KAPANEWON PANJATAN
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu***	-			**100 %**	**18.407.200,00**						-	**20.247.920,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	18.407.200,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	20.247.920,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	18.407.200,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		20.247.920,00	KAPANEWON PANJATAN
	J U M L A H							**2.206.199.748,00**							**2.390.093.946,00**	

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Panjatan Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders di Kapanewon Panjatan.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Panjatan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian visi-misi Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Panjatan, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Kapanewon Panjatan disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dan Renstra Kapanewon Panjatan 2025–2029
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Kapanewon Panjatan atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Rancangan Awal Renja Kapanewon Panjatan, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
3. Jawatan – jawatan dan semua unsur teknis pelaksanan kerja Kapanewon Panjatan, agar segera menyusun rencana kinerja masing–masing dengan mengacu pada renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Kapanewon Panjatan pada Tahun 2026 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Kapanewon Panjatan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap, bahwa Renja Kapanewon Panjatan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam

RPJMD maupun RKPD untuk urusan perencanaan pembangunan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja. Demikian, dokumen Renja Kapanewon Panjatan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Panjatan.

Panjatan, 29 Juli 2025

Plt. PANEWU PANJATAN



SETIAWAN TRIWIDADA, S.Sos
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 197106031991011004

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR

RENJA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2026

Pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan: pengampu Bapperida selaku verifikator dan perwakilan Perangkat Daerah selaku penyusun rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Setelah dilakukan pencermatan terhadap Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (PD): Kapanewon Panjatan

MENYEPAKATI

KESATU : Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini

KEDUA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan perbaikan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wates, tanggal 22 Juli 2025

Tim Verifikator	Perwakilan Perangkat Daerah
1. Nama : Ibnu Nuring NIP : 19811207 201001 0 0? Jabatan : Perencana Tanda Tangan :	1. Nama : Setiya Irawan NIP : 19740127 199803 1 003 Jabatan : Ka Sub. Bag Perencanaan & Keuangan Tanda Tangan .....

Mengetahui

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Restu Dewandaru, S.E., M.M.

NIP. 197630317 201001 1 006

SARAN dan REKOMENDASI PENYEMPURNAAN
RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

Hari dan Tanggal : Selasa, 22 Juli 2025
Tempat : Ruang Rapat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
PD : Kapanewon Panjatan

1. Bab I
   a. Pendahuluan
      Dalam setiap narasi yang menyebutkan regulasi, agar mencantumkan regulasi yang terbaru, seperti pada paragraf kedua agar diperbaharui regulasinya
   b. Landasan hukum
      Agar mencantumkan regulasi yang paling baru, dan regulasi yang sudah tidak berlaku atau tidak relevan maka tidak perlu dicantumkan
   c. Sistematika
      Sistematika agar disesuaikan dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 dan disinkronisasi dengan daftar isi
2. Bab II
   a. Agar memperbaiki substansi tabel pada sub bab 2.1 termasuk mengubah kolom 5 menjadi realisasi tahun 2023 sesuai dengan format pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017
   b. Perbaikan substansi pada tabel sub bab 2.2, yakni pada kolom tahun target dan tahun proyeksi
3. Bab III
   a. Agar menambahkan narasi yang lebih jelas pada telaahan nasional salah satunya dengan memasukkan narasi tentang RPJMN pada sub bab 3.1
   b. Agar menambahkan tabel tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada sub bab 3.2 selaras dengan RKPD Tahun 2026
   c. Pada sub bab 3.3 agar menambahkan tabel yang menggambarkan indikator program yang selaras dengan RKPD Tahun 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

RENCANA KERJA(RENJA)
KAPANEWON GALUR
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Galur Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Kapanewon Galur Tahun 2026 ini disusun sebagai dokumen perencanaan (Rencana Kerja) Kapanewon Galur Tahun 2026 dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo khususnya di wilayah Kapanewon Galur. Dalam rangka itu, Pemerintah Kapanewon Galur menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang ingin mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Gavermance, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratif.

Banyak hal yang harus dikondisikan untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tentunya harus didukung oleh kelembagaan yang mantab, professionalisme aparatur dan sarana/prasarana pelayanan yang memadai.

Pada tahun 2026 Kapanewon Galur siap melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan pencapaian kinerja yang diraih saat ini, apabila didukung oleh anggaran yang memadai pada tahun-tahun mendatang, niscaya kegiatan yang diemban akan dapat terlaksana dengan baik.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Galur tahun 2026 , kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Galur, 29 Juli 2025
PANEWU GALUR

YULIANTA NUGRAHA, S.IP, M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19740720 199503 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar …… ii
Daftar ISI. iii
BAB I PENDAHULUAN…….. 1
1.1. LatarBelakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud danTujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU …… 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Galur .. 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 14
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD…… 24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……. 30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ……..... 33
3.3 Program dan Kegiatan…… 35
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH …… 36
4.1 Program dan Kegiatan …….. 36
BAB V PENUTUP 60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun mendatang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun. Fungsinya adalah untuk mengimplementasikan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2026, maka disusunlah Rencana Kerja Kapanewon Galur Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing secara terpadu, partisipatif dan demokratis, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikan kedalam program dan kegiatan

Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Perangkat (Renja) Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan RKPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daera dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dokumen Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Galur Tahun 2026 mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan di atas, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepanewon Galur

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan kelurahan. Kedudukan Kapanewon merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang dibentuk untuk meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan / atau kelurahan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045.
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor; 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Kapanewon dan Kelurahan;
9. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;
10. Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana (Renja) Kerja Kapanewon Galur Tahun 2026 adalah meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan secara komprehensip.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Galur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam rencana operasional;
2. Menjadi Pedoman dan Dasar dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) APBD tahun 2026;
3. Memelihara Konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengn tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan Informasi bagi pemenuhan laporan Evaluasi

1.3 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Kapanewon Galur tahun 2026 disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Galur

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Progrm dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Perangkat Daerah Kapanewon Galur

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Galur Tahun 2026 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kapanewon. Tercapai-tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut di atas Rencana Kerja (RENJA) Kapanewon Galur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari apa yang telah dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. **Penetapan Indikator Kinerja**

   Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi maasukan (input), keluaran *(output),* hasil *(outcome)*, manfaat *(benefit)* dan dampak *(impact).* Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja masing-masing jenis indikator yang sudah ditetapkan.

2. **Capaian Analisis Kinerja**

   Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Dalam mengevaluasi hasil kinerja, maka Kapanewon Galur menggunakan metode menghitung, mengukur nilai capaian kinerja

realisasi pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini diawali dengan pengukuran kinerja kegiatan dengan memuat indikator kinerja *input, output* dan *outcome*. Hal ini dilakukan mengingat hasilnya sulit untuk diukur dengan *benefit* dan *impact*. Sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang diukur khusus adalah yang didanai APBD. Dalam mengevaluasi kinerja ini diupayakan untuk menilai aspek keuangan, hasil kegiatan dan harapan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga hasilnya diharapkan mendekati kebenaran.

Adapun evaluasi pengukuran pelaksanaan rencana kerja dan capaian kinerja sampai tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Galur
Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsive dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (AKIP)	A	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah (%)	100%	100 %
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	84,50%	84,776 %
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,50%		Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon (%)	98,25%	98,25 %

Tabel.2.1.2
Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Galur Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100 %
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	100 %
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	100%	100 %
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persetase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Peerintahan Umum	94,74%	94,74 %
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100 %
Program Penyelengaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100 %	100 %
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100 %

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 1.975.587.430,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 1.902.239.657,00

evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Galur Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1.3

Tabel 2.1.3

Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Galur Tahun 2024

Kode								Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Tikgkat Realisasi	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
																Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)			
										Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
1								2	3	4			5			6			7			8=7/6	9			10 = (5+7+9)			11= (10/4)
2	2	2	8					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	%	60.000.000	100	%	98.306.560	100	%	100.000.000	100	%	97.930.725		100	%	60.000.000	100	%	60.000.000	0,22
				7				*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi*	*1*	*Laporan*	*60.000.000*	1	Laporan	98.306.560	1	Laporan	*100.000.000*	1	Laporan	*97.930.725*		*1*	*Laporan*	*60.000.000*	*1*	Laporan	*60.000.000*	*0,22*
2	2	2	8	5	7	6		Gelar Budaya Yogya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	Laporan	60.000.000	1	Laporan	98.306.560	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	97.930.725	98%	1	Laporan	60.000.000	1	Laporan	60.000.000	0,15
4	1	4						Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	%	40.000.000	100	%	34.907.408	100	%	40.000.000	100	%	39.909.159		2	Laporan	40.000.000	2	Laporan	40.000.000	0,15
								Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi*	*2*	*Dokumen*	*40.000.000*	*2*	*Dokumen*	*34.907.408*	*2*	*Dokumen*	*40.000.000*	*2*	*Dokumen*	*39.909.159*		*2*	*Laporan*	*40.000.000*	*2*	*Laporan*	*40.000.000*	*0,15*
4	1	4	5	6	1			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2	Dokumen	40.000.000	2	Dokumen	34.907.408	2	Dokumen	40.000.000	2	Dokumen	39.909.159	100%	2	Laporan	40.000.000	2	Laporan	40.000.000	0,26
7	1	1						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	1.651.062.500	100	%	1.295.488.599	100	%	1.673.503.630	100	%	1.580.561.627		100	%	1.651.062.500	100	%	1.651.062.500	0,25
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	*23*	*dokumen*	*6.876.400*	*23*	*Dokumen*	*6.452.718*	*23*	*dokumen*	*9.031.200*	*23*	*dokumen*	*8.828.260*		*12*	*bulan*	*6.876.400*	*12*	*bulan*	*9.726.400*	*0,31*
7	1	1	2	1	1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	4.264.100	2	Dokumen	4.205.586	2	dokumen	5.973.400	2	dokumen	5.826.246	98%	4	Dokumen	4.264.100	3	Dokumen	7.114.100	0,2
7	1	1	2	1	7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Laporan	2.612.300	21	Laporan	2.247.132	21	Laporan	3.057.800	21	Laporan	3.002.014	98%	21	Dokumen	2.612.300	21	Dokumen	2.612.300	0,26
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	*100*	*%*	*1.388.993.944*	*100*	*%*	*1.059.640.477*	*100*	*%*	*1.430.026.354*	*100*	*%*	*1.376.777.689*		*38*	*Laporan*	*1.388.993.944*	*38*	*Laporan*	*1.388.993.944*	*0,28*
7	1	1	2	2	2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	27.669.500	13	dokumen	38.305.600	13	Dokumen	39.147.500	13	Dokumen	39.139.760	100%	12	bulan	27.669.500	12	bulan	27.669.500	0,28
7	1	1	2	2	1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294	Orang /bulan	1.358.459.044	280	Orang/ Bulan	1.018.688.680	280	Orang/Bula	1.387.447.554	280	Orang/Bula	1.334.261.257	96%	280	Orang/ bulan	1.358.459.044	280	Orang/ bulan	1.358.459.044	0,26
7	1	1	2	2	7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	Laporan	2.865.400	14	Laporan	2.646.197	14	Laporan	3.431.300	14	Laporan	3.376.672	98%	12	kali	2.865.400	12	kali	2.865.400	0,25

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)							Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
															Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024			Tikgkat Realisasi	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)			Tingkat Capaian Realisasi Target
									Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
1							2	3	4			5			6			7			8=7/6	9			10 = (5+7+9)			11= (10/4)
					9		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen administrasi umum*	*6*	*Dokumen*	*33.794.500*	*6*	*Dokumen*	*34.800.995*	*6*	*Dokumen*	*37.131.000*	*6*	*Dokumen*	*33.046.557*		*6*	*Dokumen*	*33.794.500*	*6*	*Dokumen*	*33.794.500*	*0,26*
7	1	1	2	6	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	22.930.000	12	Laporan	23.028.666	12	Laporan	21360.000	12	Laporan	17.688.288	83%	12	bulan	22.930.000	12	bulan	22.930.000	0,25
7	1	1	2	8	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	10.864.500	5	Paket	11.772.329	5	Paket	15.771.000	5	Paket	15.358.269	97%	6	Paket	10.864.500	6	Paket	10.864.500	0,28
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Aset*	*22*	*Unit*	*0*	8	Unit	38.551.500			-			-		7	*Unit*	*0*	*7*	*Unit*	*0*	*0,29*
7	1	1	2	7	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penambahan Aset	22	Unit	-	8	Unit	38.551.500			-			-	0%	7	Unit	0	7	Unit	0	0,29
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	*12*	*Laporan*	*138.711.904*	*12*	*Laporan*	*84.765.609*	*12*	*Laporan*	*95.140.776*	*12*	*Laporan*	*94.963.747*		*24*	*Laporan*	*138.711.904*	*24*	*Laporan*	*138.711.904*	*0,26*
7	1	1	2	8	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	32.899.912	12	Laporan	28.961.033	12	Laporan	35.272.760	12	Laporan	35.095.731	99%	12	Laporan	32.899.912	12	Laporan	32.899.912	0,06
7	1	1	2	8	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	105.811.992	12	Laporan	55.804.576	12	Laporan	59.868.016	12	Laporan	59.868.016	100%	12	Laporan	105.811.992	12	Laporan	105.811.992	1,22
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	*12*	*Bulan*	*82.685.752*	*12*	*Bulan*	*71277.300*	*12*	*Bulan*	*102.174.300*	*12*	*Bulan*	*97.329.103*		*12*	*Bulan*	*82.685.752*	*12*	*Bulan*	*79.835.752*	*0,2*
7	1	1	2	9	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	58.540.700	8	unit	56.838.700	8	Unit	73.644.200	Unit	8	69.189.803	94%	11	Unit	58.540.700	11	Unit	58.540.700	0,25
7	1	1	2	9	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit	11.706.652	2	unit	3.577.000	2	Unit	9.081.300	Unit	2	8.876.300	98%	6	Unit	11.706.652	6	Unit	8.856.652	0,28
7	1	1	2	9	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	42	Unit	12.438.400	30	Unit	10.861.600	30	Unit	19.448.800	unit	30	19.263.000	99%	25	Unit	12.438.400	25	Unit	12.438.400	0,24
7	1	2					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	%	23.452.100	100	%	30.156.962	100	%	29.215.400	100	%	29215400		20	%	23.452.100	20	%	23.452.100	0,29
							Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*15*	*Laporan*	*17.951.500*	*15*	*Laporan*	*23.226.040*	*15*	*Laporan*	*22.870.400*	*15*	*Laporan*	*21917.505*		*18*	*Laporan*	*17.951.500*	*18*	*Laporan*	*17.951.500*	*0,3*

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)							Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
															Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024			Tikgkat Realisasi	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)			Tingkat Capaian Realisasi Target
									Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
1							2	3	4			5			6			7			8=7/6	9			10 = (5+7+9)			11= (10/4)
7	1	2	2	1	2		Peningkatan Efektifitas kegatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8	Dokumen	14.165.500	11	dokumen	15.762.024	11	Dokumen	17.683.700	11	Dokumen	16.989.222	98%	6	Laporan	14.165.500	6	Laporan	14.165.500	0,28
7	1	2	2	1	1		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7	Laporan	3.786.000	10	Laporan	7.464.016	10	Laporan	5.186.700	10	Laporan	4.928.283	95%	12	Laporan	3.786.000	12	Laporan	3.786.000	0,32
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	*100*	*%*	*5.500.600*	*100*	*%*	*6.930.922*	*100*	*%*	*6.345.000*	*100*	*%*	*6.291702*		*100*	*%*	*5.500.600*	*100*	*%*	*5.500.600*	*0,24*
7	1	2	2	4	1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12	Dokumen	5.500.600	10	Laporan	6.930.922	10	Laporan	6.345.000	10	Laporan	6.291702	100%	12	Dokumen	5.500.600	12	Dokumen	5.500.600	0,24
7	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100**	**%**	**16.030.000**	**100**	**%**	**20.374.250**	**100**	**%**	**20.061100**	**100**	**%**	**18.739.937**		**100**	**%**	**16.030.000**	**100**	**%**	**16.030.000**	**0,45**
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*7*	*Laporan*	*16.030.000*	*7*	*Laporan*	*20.374.250*	*7*	*Laporan*	*20.061100*	*7*	*Laporan*	*18.739.937*		*6*	*Laporan*	*16.030.000*	*6*	*Laporan*	*16.030.000*	*0,45*
7	1	3	2	1	3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	Laporan	16.030.000	7	Laporan	20.374.250	7	Laporan	20.061100	7	Laporan	18.739.937	100%	6	Laporan	16.030.000	6	Laporan	16.030.000	0,45
7	**1**	**5**				**ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**%**	**49.911.500**	**100**	**%**	**47.903.089**	**100**	**%**	**98.868.400**	**100**	**%**	**95.904.212**		**94,7**	**%**	**49.911.500**	**94,74**	**%**	**49.911.500**	**0,24**
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	*20*	*Laporan*	*49.911500*	*20*	*Laporan*	*47.903.089*	*20*	*Laporan*	*98.868.400*	*20*	*Laporan*	*95.904.212*		*5*	*Laporan*	*49.911500*	*5*	*Laporan*	*49.911500*	*0,32*
7	1	5	2	1	2		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160	Orang	18.584.600	150	Orang	12.454.510	150	Orang	30.404.800	150	Orang	30.209.081	100%	181	Orang	18.584.600	181	Orang	18.584.600	0,23
7	1	5	2	1	5		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6	Laporan	31326.900	28	Laporan	35.448.579	28	Orang	68.463.600	28	Orang	65.695.131	96%	4	Laporan	31326.900	4	Laporan	31326.900	0,39
7	**1**	**6**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**11.413.900**	**100**	**%**	**17.929.454**	**100**	**%**	**13.938.900**	**100**	**%**	**10.601.061**		**100**	**%**	**11.413.900**	**100**	**%**	**11.413.900**	**0,31**
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	*6*	*Laporan*	*11413.900*	6	Laporan	*17.929.454*	6	Laporan	*13.938.900*	6	Laporan	*10.601061*		*6*	*Laporan*	*11413.900*	*6*	*Laporan*	*11413.900*	*0,31*
7	1	6	2	1	17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6	Laporan	11413.900	6	Laporan	17.929.454	6	Laporan	13.938.900	24	Laporan	10.601061	76%	6	Laporan	11413.900	6	Laporan	11413.900	0,31
											1851870.000						1975.587.430							1851870.000			1851870.000	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pencapaian target kinerja hasil kegiatan, antara lain diperlukan :

1. Pada saat perencanaan program dan kegiatan, dilakukan koordinasi antar Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) agar dalam menyusun program dan kegiatan perlu ketelitian, baik sasaran, pembiayaan, waktu pelaksanaan dengan mengikuti aliran kas yang akan dilaksanakan, sehingga semua kegiatan nantinya dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, baik fisik maupun keuangan.
2. Pengguna anggaran diperlukan kebijakan, ketelitian dalam memaksimalkan target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi antara pejabat pelaksana teknis kegiatan dengan pengguna anggaran perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pencapaian target anggaran, sehingga dapat dipacu pelaksanaan anggaran sesuai dengan target, sasasaran dan waktu yang telah ditentukan.
4. Diperlukan ketepatan dalam mengatur waktu, personil dan pengaggaran pada saat volume kegiatan meningkat, agar kesemuanya dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2.4 berikut ini

Tabel 2.2.4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KAPANEWON GALUR
KABUPATEN KULON PROGO

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Rata-rata presentase pencapaiandi setiap perangkat daerah				100	100	100		100	25 %	100		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84,50%	84,75%	85%		84,776%.	25%	84,876%		
3	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon				98,25%	99.12%	100		98,25%	25%	100%		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Galur bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

a. Potensi banjir di pemukiman jika tanggul Sungai Progo akibat penambangan yang tak terkendalikan.
b. Padatnya arus lalu lintas karena akses jalan menuju Bandara YIA dan menuju ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui Kapanewon Galur/ Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
c. Kerusakan jalan aspal dan saluran irigasi disejumlah ruas jalan yang ada di wilayah Kapanewon Galur disebabkan adanya truk penambang pasir yang muatannya melebihi tonase.
d. Terganggunya arus lalu lintas karena banyaknya depo pasir yang tidak terkendali.
e. Perlunya perkerasan dan pengaspalan jalan yang menghubungkan beberapa Kalurahan yang juga memperlancar pengangkutan hasil-hasil pertanian.
f. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat pengguna jalan tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas dan jalan perlu pelebaran.
g. Akan dibangun Jalur Jalan Lintas Selatan yang secara berkelanjutan.
h. Rencana Proyek Pembangunan Bandara Udara yang menuntut pula dibangunnya insfrastruktur yang lain.
i. Rawan bencana tsunami karena mempunyai wilayah pantai.
j. Rawan bencana gempa bumi.
k. Bencana angin dan pohon tumbang akibat angin dan hujan deras yang sering terjadi.
l. Kondisi air sumur yang berwarna dan pada musim kemarau seringan mengalami kekeringan akibat penambangan pasir.
m. Masih adanya rumah tidak layak huni .
n. Pengolahan tangkap laut yang belum optimal dikarenakan dukungan perlatan yang masih minim bagi nelayan.
o. Kekeringan di musim kemarau di lahan persawahan.

p. Pengangguran tebuka yang masih tinggi
q. Kenakalan remaja yang masih sering terjadi .
r. Permasalahan kekurangan permodalan dan tunggakan pinjaman masyarakat dalam lembaga keuangan.
s. Permasalahan Kesehatan Masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemangku kepentingan.

Disamping itu ada beberapa hal yang diperhatikan Kapanewon antara lain :

a. Pemanfaatan peluang kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati Kulon Progo kepada Panewu untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya pelimpahan sebagian urusan tersebut, maka Panewu dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Kulon Progo.
b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kapanewon harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Coorperate Sosial Responsibility (CSR)*, maka Kapanewon harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga adanya peluang usaha bagi para pengusaha dengan memanfaatkan Jalur Jalan Lintas Selatan.
c. Pelayanan Prima, Kapanewon sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggarakan pelayanan publik,

maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan mengembalikan kepercayaan masyarakat masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

d. Peningkatan kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat sebagai faktor penting yang meliputi perijinan dan non perijinan, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaatan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
e. Adanya mega proyek, berbagai program dan kegiatan besar yang masuk di Kabupaten Kulon Progo terlebih banyak yang terkonsentrasi di wilayah selatan. Pelabuhan Tanjung Adikarto yang merupakan Pelabuhan perikanan yang terus diupayakan pembangunannya , pembangunan bandara yang menuntut pembangunan lain yang berkaitan, pengembangan daerah wisata perlu mempersiapkan kondisi wilayah dan masyarakat.

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan jumlah SDM dan keahlian yang dimiliki pegawai yang ada di tingkat Kapanewon, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kelancaran kinerja Kapanewon.
b. Kualitas aparatur pemerintah kapanewon yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi pendidikannya formal, maupun pendidikan informal,

seperti:diklat/kursus/bimbingan teknis lainnya yang mendukung kelancaran dan profesi pekerjaan.

c. Masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti : kebutuhan pendukung ruang pelayanan yang berstandar, , kendaraan dinas dinas yang masih kurang.

d. Adanya SDM yang purna tugas dan tidak segera ada penggantinya sehingga memengaruhi kinerja OPD

3. Dampak terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah.

a. Partisipasi masyarakat khususnya di lingkungan Dunia Usaha di Kapanewon Galur tidak lepas dari usaha serta peran Pemerintah Kapanewon guna peningkatan penyelenggaraan pembangunan terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna menumbuhkan desa /kalurahan yang berkaitan erat dengan jalannya roda perekonomian, sehingga misi Kepala Daerah dalm menciptakan sistem perekonomian yang berbasis masyarakat terlaksana di Kapanewon Galur.

b. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya terlihat jelas di pelayanan yang diberikan Pemerintah Kapanewon Galur kepada masyarakat sebagai pengguna layanan yakni Kapanewon sebagai salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggarakan pelayanan publik, ini tak lepas dari karakter Sumber Daya Manusia yang dimiliki petugas, Sumber Daya Manusia yang mempunyai prestasi untuk mengembangkan dirinya dimulai di lingkup Pelayanan Kapanewon, dengan tetap mengedepankan prinsip mandiri, berkarakter dan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya pemerintah.

c. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan Sumber Daya Alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkwalitas, terlihat jelas di wilayah selatan yakni pengembangan infrastruktur Jalan Jalur Lintas Selatan menuju

ke arah pengembangan maritim dan menuju ke arah bandara yang melibatkan kepemilikan tanah warga yang terkena proyek pembangunan, dipandang sebagai upaya untuk mewujdukan tujuan dan sasaran Kepala Daerah dalam pengembangan potensi wilayah.

4. Tantangan dan Peluang

Sebagai Perangkat Daerah terdepan dalam memberikan pelayanan pemerintahan umum kepada masyarakat, terdapat banyak tantangan dan peluang yang dihadapi Kapanewon Galur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tantangan dan peluang tersebut merupakan dua sisi yang harus dikelola sedemikian rupa agar memberikan manfaat yang maksimal dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan sebagaimana dimaksud antara lain :

a. Kalurahan sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas pamong kalurahan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga mampu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
b. Penyelanggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian, dan pelaporan yang berkualitas.
c. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-goverment) menuntut kemampuan aparatur pemerintah Kapanewon maupun Kalurahan dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
d. Kapanewon Galur berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul, menuntut kerjasama antar wilayah antar daerah demi terciptanya daerah yang aman, tentram dan terus maju.
e. Brand promosi investasi Kulon Progo sebagai ”The Jevel of Java”, menuntut terwujudnya kondisi kamtibmas yang memadai, dan peningkatan kualitas sarana prasarana publik serta pelayanan publik.

f. Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) melalui Kapanewon Galur, menuntut kesiapan masyarakat, sarana prasarana tranportasi dan aparatur pemerintah dalam menyambut potensi tersebut.
g. Perubahan peraturan perundang-undangan yang begitu cepat dalam berbagai bidang membutuhkan proses adaptasi, kemampuan, dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi setiap proses perubahan.

Selain tantangan tersebut di atas terdapat peluang yang dapat diraih dalam upaya pengembangan pelayanan Pemerintah Daerah , peluang tersebut antara lain :

a. Kapanewon Galur berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.
b. Kapanewon Galur dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet yang sebagian PNS telah menguasai teknologi tersebut.
c. Kapanewon Galur berwenang melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan untuk 7 (Tujuh) Kalurahan di Kapanewon Galur.
d. Kapanewon Galur telah memiliki Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana Alam, pemetaan potensi bencana alam, dan sarana prasarana komunikasi yang memadai.
e. Di Kapanewon Galur terdapat lembaga perbankan/ keuangan seperti : Bank BRI, Bank BPD DIY, Bank Pasar Kulon Progo, BPR Nusamba, BPR Shinta Putra, BUKP Propinsi DIY, LKM Binangun, BMT, koperasi dan paguyuban simpan pinjam di masyarakat.
f. Kapanewon Galur melaksanakan pelayanan masyarakat berupa non periznan dan memberikan pendampingan berupa perijinan yang akan dilakukan masyarakat.
g. Di Kapanewon Galur telah terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif, seperti kelompok-kelompok tani, kelompok ternak, kelompok-kelompok

tani ikan dengan manajemen usaha yang masih tradisionil, mereka sangat potensi dikembangkan, namun selama ini simpul-simpul tersebut relative kurang berhubungan dengan investor dari luar.

h. Wilayah Kapanewon Galur dilalui Jalan Propinsi dan Jalur Jalan Lintas Selatan yang berpotensi bagi pengembangan usaha di bidang perdagangan dan jasa.
i. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan di Pantai Trisik pasca abrasi akan membawa dampak positif terhadap peningkatan hasil potensi laut secara maksimal.
j. Keberadaan pengrajin batik lokal diharapkan dapat membantu mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
k. Kapanewon Galur berwenang melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau sebagai peluang di masa depan. Isu juga berpotensi menjadi tantangan di kemudian hari. Selain dari permasalahan, isu strategis juga dapat merujuk pada potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, namun jika potensi tersebut dikelola dengan baik maka dapat menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Mengingat banyaknya dan kompleksitas permasalahan pembangunan yang sudah ada, untuk menentukan isu strategis diperlukan identifikasi mulai dari isu global/internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan di Kabupaten Kulon progo. Berikut adalah isu strategis yang sudah diidentifikasi. Isu Strategis di Kapanewon Galur sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

   Di Kapanewon Galur masih terdapat faktor yang mempengaruhi belum optimalnya SDM yang berkualitas antara lain :

   a. Di Bidang Pelayanan kesehatan masyarakat masih blm tercapai secara

optimal karena masih terdapatnya kasus Tubercolosis, Demam Berdarah dan ODGJ

b. Kualitas keluarga dan kesetaraan gender yang baik membentuk individu yang lebih sehat, terdidik, dan siap untuk berpartisipasi dalam ekonomi global. Keluarga yang mendukung menyediakan lingkungan yang stabil untuk perkembangan anak, sementara kesetaraan gender memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan peluang kerja.

2. Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

   Kemiskinan di wilayah Kapanewon Galur merupakan salah satu permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini.. Selain itu adanya jumlah pengangguran yang tinggi tentu akan berpengaruh terhadap ketimpangan yang tinggi.

3. Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya

   Peningkatan pelestarian nilai budaya adalah isu penting yang berhubungan dengan menjaga identitas dan warisan budaya di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Nilai-nilai budaya mencakup tradisi, bahasa, seni, dan adat istiadat yang menjadi ciri khas suatu masyarakat dan memberikan rasa kebanggaan serta keterikatan. Namun, perubahan zaman dan perkembangan teknologi sering kali menyebabkan tergerusnya nilai-nilai ini, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan, mendukung kegiatan seni dan budaya, serta mengadakan festival dan acara yang memperingati tradisi lokal. Selain itu, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendokumentasikan dan mempromosikan budaya kepada audiens yang lebih luas.

4. Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah.

   Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah merupakan isu strategis yang esensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Daya saing daerah mencerminkan kemampuan

suatu wilayah untuk menarik investas meningkatkan produktivitas, dan menyediakan lapangan kerja yang berkualitas.

5. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah.

   Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah merupakan isu krusial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah terbukti masih banyaknya akses jalan protocol yang rusak dan perlu diupayakan perbaikan. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, sistem transportasi, fasilitas kesehatan, dan jaringan listrik, sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

6. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah.

   Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah merupakan isu penting yang berfokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Tata kelola yang baik mencakup perencanaan yang efektif, pelaksanaan kebijakan yang tepat, serta pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan.

7. Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman.

   Wilayah yang aman dan nyaman adalah isu yang berpengaruh langsung pada kualitas hidup masyarakat dan daya tarik investasi di suatu daerah. Keamanan mencakup perlindungan dari tindak kriminal, bencana alam, dan ancaman lainnya, sedangkan kenyamanan melibatkan lingkungan yang bersih, infrastruktur yang memadai, dan layananpublik yang efektif.

8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan.

   Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan lahan berkelanjutan adalah isu yang memiliki ketrkaitan terhadap kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati, dan ketahanan ekosistem. Kualitas lingkungan hidup yang baik melibatkan pengendalian polusi udara, air, dan tanah, serta pengelolaan limbah yang efektif.

9. Optimalisasi Kecukupan Pangan dan Air Bersih.

   Pangan yang cukup dan bergizi serta akses terhadap air bersih adalah hak dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan yang sehat dan produktif. Tantangan Kapanewon Galur yang dihadapi dalam isu ini

meliputi rendahnya kecukupan pangan masyarakat dan infrastruktur air yang kurang memadai.

10. Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

    Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah isu kritis yang membutuhkan perhatian serius untuk melindungi masyarakat dan lingkungan sehingga dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, infrastruktur, dan ekonomi.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

RKPD Tahun 2026 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Kapanewon Galur . Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan RKPD tahun 2026 dapat dilihat pada tabel.2.4.5.

Tabel 2.4.5

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kapanewon Galur Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Kabupaten/Kota**	100 %	**1.910.650.729**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**		**Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi**	100 %	**1.657.168.200**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23 dokumen	***8.850.000***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	2 dokumen	***6.714.300***	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	5.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.114.300	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Galur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	3.850.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Galur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	2.600.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan yang di sampaikan tepat waktu	14 Laporan	***1.652.672.496***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	3 Dokumen	***1.386.229.462***	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Galur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang /Bulan	1.602.002.496	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Galur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/ bulan	1.358.465.462	

2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Galur	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	46.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Galur	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	25.250.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap. Galur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	4.470.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap. Galur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	2.514.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	2 dokumen	***47.008.500***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 dokumen	***41.780.200***	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Galur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.335.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Galur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.550.200	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Galur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30.673.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Galur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	32.230.000	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Galur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	16.840.000				0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	**24 Laporan**	***108.204.465***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	**2 Dokumen**	***143.240.059***	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Galur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.090.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Galur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	32.899.794	

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Galur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	73.114.465,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Galur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	110.340.265	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	**3 laporan**	***93.915.268***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	**3 Dokumen**	***79.204.179***	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Galur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	75.149.268,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Galur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	58.709.600,00	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Galur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	5.456.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Galur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.778.379,00	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Galur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit	13.310.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Galur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	12.716.200,00	
II	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase peningkatan pelayanan Kecamatan**	100 %	**34.278.230**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase pelayanan Non Perizinan**	100 %	**53.507.500**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pememrintahan di tingkat kecamatan	8 dokumen	***26.068.230***	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 dokumen	***48.551.500***	

1	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Galur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 laporan	8.812.000	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Galur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 laporan	34.736.000	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 dokumen	17.256.230	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 dokumen	13.815.500	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	***8.210.000***	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	***4.956.000***	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	8.210.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	4.956.000	
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Prosentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	100%	**21.384.242**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang dsampaikan tepat waktu	100%	**16.030.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	***21.384.242***	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	***16.030.000***	
1	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Galur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	21.384.242	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Galur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	16.030.000	

IV	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**55.993.366**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase penanganan gangguan trantibum**	**100,00%**	**52.740.400**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah			6 Laporan	***55.993.366***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah***		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	***52.740.400***	
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Galur	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 orang	20.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Galur	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	22.034.600	
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Galur	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	35.993.366	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Galur	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Laporan	30.705.800	
V	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**18.501.093**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu**	**100%**	**11.413.900**	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			6 Laporan	***18.501.093***	***Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	***11.413.900***	
1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Galur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	18.501.093	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Galur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	11.413.900	

VI	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	100 %	**68.469.100**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**Persentase kesesuaian dokumen prencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	100 %	**28.000.000**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan				***68.469.100***	***Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan***		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	***28.000.000***	
1	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan	Kap. Galur	Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon/ kemantren dan kalurahan/ kelurahan	2 Dokumen	68.469.100	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kap. Galur	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	28.000.000	
VII	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan**	100%	100.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	100%	**100.000.000**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				**100.000.000**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		**Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan**	1 Dokumen	**100.000.000**	
	Pembinaan Kelembagaan adat dan tradisi		Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 laporan	100.000.000	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogja	1 laporan	100.000.000	
	Jumlah Pagu Dana Kegiatan				2.209.276.760	**Jumlah Pagu Dana Kegiatan**				1.918.860.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kapanewon Galur pada tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan umum dan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kapanewon dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan publik serta aparaturnya;
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan kalurahan ;
4. Pembinaan Pengelolaan BUMDes.
5. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas - tugas dengan Forkompinka dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah kapanewon.

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, Kapanewon Galur terlebih dahulu telah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pelaksanaan musrenbang kapanewon. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan hasil analisis kebutuhan SKPD, kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang, baik musrenbang desa maupun kecamatan dan kabupaten. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Musrenbang Kapanewon Galur Tahun 2025 dengan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon & Pagu Indikatif Sektoral.

Tabel : 2.5.6

Tabel Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025 di Kapanewon Galur

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Galur Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kebijakan. Pembangunan Nasional. Tahun 2026 diharapkan menjadi tahun kunci menuju Indonesia Emas, Tidak hanya pemulihan ekonomi, namun juga transformasi ekonomi yang didukung oleh reformasi struktural diharapkan dapat terwujud pada tahun 2026.

Rencana Kerja Kapanewon Galur telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat pusat melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasioanl (RPJMN) tahun 2025-2029. RKP Tahun 2026 memiliki tema Utama “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” Tema ini mencerminkan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tatangan global dan memastikan pembangunan yagn berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

RKP Tahun 2026 terdapat 8 (delapan) program prioritas nasional yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yangBerkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan,Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Galur Tahun 2026 didasarkan pada perumusan Tujuan dan Sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan target dan fungsi pada Rencana Strategis Kapanewon Galur Tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Galur mendukung visi kepala daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius berbudaya yang berkelanjutan dan misi ke tiga Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yag good govermance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang aman dan demokratis. Adapun Perumusan Indikator Kinerja tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kapanewon Galur Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam tabel 3.2.7

Tabel. 3.2.7

Indikator Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,90
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,23
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,88

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan Indikator Program Kapanewon Galur Tahun 2026 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut

Tabel 3.3.8

Indikator Program Kapanewon Galur Tahun 2026

No	Outcame Program Perangkat Daerah	Indikator KinerjaProgram Perangkat Daerah	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan Non Perizinan	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang dsampaikan tepat waktu	100%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan gangguan trantibum	100%
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	100%
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100%
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen prencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
f) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
g) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan:

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:
   a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
   b. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, meliputi kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan: Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan:

a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;

b. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

VI. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan:

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan.

VII. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan meliputi Kegiatan : Adat Seni , Tradisi dan Lembaga Budaya dengan sub kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026 serta pendanaan Kapanewon Galur dapat dilihat dalam tabel 4.1.9 berikut :

Tabel 4.1.9

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAPANEWON GALUR KAB. KULON PROGO TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GALUR						**1.918.860.000,00**							**58.724.200,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1,	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	

	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR

	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**28.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**28.000.000,00**							**40.000.000,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**					**28.000.000,00**						**-**	**40.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	28.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	40.000.000,00	KAPANEWON GALUR
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		40.000.000,00	KAPANEWON GALUR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.790.860.000,00**							**18.724.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.790.860.000,00**							**18.724.200,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**						**1.657.168.200,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	6.714.300,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR

												kelola pemerintah an dan pelayanan publik				
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.114.300,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	2.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	1.386.229.462,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1.358.465.462,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	25.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	2.514.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	41.780.200,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.550.200,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	32.230.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	143.240.059,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	32.899.794,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	110.340.265,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	79.204.179,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	58.709.600,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.778.379,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				27 Unit	12.716.200,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**53.507.500,00**						**-**	**18.724.200,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	48.551.500,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	9.693.200,00	KAPANEWON GALUR

	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	34.736.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		9.693.200,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	13.815.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	4.956.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	9.031.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	4.956.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		9.031.000,00	KAPANEWON GALUR

3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**16.030.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	16.030.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	16.030.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR

											rantasan kemiskinan.	pelayanan publik				
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**52.740.400,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	52.740.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				70 Orang	22.034.600,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				2 Laporan	30.705.800,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR

5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**11.413.900,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	11.413.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	11.413.900,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintah an	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR

											pembe rantasa n kemiski nan.	dan pelaya nan publik				
	J U M L A H							**1.918.860. 000,00**							**58.724.2 00,00**	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Galur Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan, dalam menunjang pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kulon Progo. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi Kapanewon Galur dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kapanewon Galur. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Galur ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan.

Pengkomunikasian/sosialisasi Rencana Kerja ke semua pihak yang terlihat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ..

Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dan rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi rencana strategis ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Kapanewon Galur dalam menyusun Rencana Kerja 2026 dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2026.

Galur, 29 Juli 2025

PANEWU GALUR



YULIANTA NUGRAHA, S.IP, MSi

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19740720 199503 1 004

RANCANGA KERJA
RENJA
TAHUN 2026



KAPANEWON LENDAH

DAFTAR ISI

			Halaman
BAB I	**PENDAHULUAN**		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	1
	1.3	Maksud dan Tujuan	2
	1.4	Sistematika Penulisan	3
BAB II	**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**		4
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah	4
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Lendah	8
	2.3	Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Lendah ……	8
	2.4	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	10
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**		18
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	18
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	18
	3.3	Program dan Kegiatan	
BABIV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**		23
BAB V	**PENUTUP**		38

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2022 …..	4
Tabel 2.2	Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Lendah Tahun 2022	4
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022 Kabupaten Kulon Progo ……	5
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo …….	9
Tabel 2.5	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo ……	11
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ……..	18
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Tahun 2026 …..……..……...	20
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kapanewon Lendah Tahun 2026 ……..…….....…….	25
Tabel 4.2	Daftar IKU dan IKK Tahun 2025-2030 …….	34

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2026 ini disusun sebagai dokumen perencanaan (Rencana Kerja) Kapanewon Lendah Tahun 2026 dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo khususnya di wilayah Kapanewon Lendah. Dalam rangka ini, Pemerintah Kapanewon Lendah menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 dengan mengacu kepada Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Pada tahun 2026 Pemerintah Kapanewon Lendah siap melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan pencapaian kinerja yang diraih saat ini, apabila didukung oleh anggaran yang memadai pada tahun-tahun mendatang, niscaya kegiatan yang diemban akan dapat terlaksana dengan baik.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Lendah tahun 2026 kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Lendah, 29 Juli 2025

Panewu Lendah,

PEMERINTAH KABUPATEN KAPANEWON LENDAH KULON PROGO

RADEN SIGIT PURNOMO, S.IP
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 196812021991031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Penyusunan Rankir Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2026 didasarkan pada Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Rancangan Rankir RPJMD, Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Lendah Tahun 2026 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023-2026;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
17. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2026 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Lendah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2026;
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah;
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika penulisan

Penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Lendah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Lendah Tahun 2024 melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pengukuran kinerja Kapanewon Lendah didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah :

Tabel 2.1

Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Lendah Tahun 2024

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Presentase Pencapaian Program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100	100
Meningkatnya Pelayanan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,26	92,824
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	98,25	98,25

Sedangkan untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Lendah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Lendah Tahun 2024

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian peningkatan pelayanan Kecamatan	100	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	94,74	94,74
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Lendah sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025

Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Kapanewon Lendah

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAPANEWON LENDAH KAB. KULON PROGO TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN TERAKHIR 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan PD tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
								TARGET RENJA PD TAHUN 2024		Realisasi Renja PD tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra
1	2	3	4	5		6		8		9		10	14		15		16
		KAPANEWON LENDAH															
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-				-							-		
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Laporan Pelaksanaan Sub*	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	99.622.200	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	99,856,870	100%	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	100%
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja															
			Jumlah Laporan Gelar Budaya	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	99.622.200	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	99,856,870	100%	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	100%
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH															
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	*Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Kelembagaan berkinerja Sangat Tinggi*	-												-	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	3 Laporan	26,481,000	3 Laporan	34.797.840	3 Laporan	40,000,000	3 Laporan	39,774,060	99%	3 Laporan	22,095,000	3 Laporan	22,095,000	100%
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di															
			Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 Laporan	26,481,000	3 Laporan	34.797.840	3 Laporan	40,000,000	3 Laporan	39,774,060	99%	3 Laporan	22,095,000	3 Laporan	22,095,000	100%
	7	UNSUR KEWILAYAHAN															
	7.01	KECAMATAN															
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi*	-											-		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-									-		-		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen															

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,574,100	2 Dokumen	6.121.208	2 Dokumen	4,500,000	2 Dokumen	4,404,680	98%	2 Dokumen	7,787,700	2 Dokumen	7,787,700	100%
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	5,625,700	14 Laporan	3.911.700	14 Laporan	3,640,000	14 Laporan	3,408,110	94%	14 Laporan	2,925,700	14 Laporan	2,925,700	100%
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-					-		-		0.00
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1,486,287,884	266 Orang/bulan	1.300.079.8	266 Orang/bulan	1,401,229,584	266 Orang/bulan	1,367,936,848	98%	266 Orang/bulan	1,471,562,029	266 Orang/bulan	1,471,562,029	100%
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	21,585,000	1 Dokumen	38.247.500	1 Dokumen	39,252,000	1 Dokumen	38,305,500	98%	1 Dokumen	26,077,700	1 Dokumen	26,077,700	100%
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3,420,100	14 Laporan	3.881.120	14 Laporan	3,648,000	14 Laporan	3,569,970	98%	14 Laporan	29,992,300	14 Laporan	29,992,300	100%
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-					-		-		0.00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,064,600	1 Paket	19.394.300,	1 Paket	16,461,200	1 Paket	16,276,200	99%	1 Paket	14,940,200	1 Paket	14,940,200	100%
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22,230,000	12 Laporan	25.966.200	12 Laporan	23,400,000	12 Laporan	19,539,840	84%	12 Laporan	13,190,000	12 Laporan	13,190,000	100%
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-					-		-		0.00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	33,543,200	1 Laporan	29.044.166	1 Laporan	35,343,091	1 Laporan	35,303,578	100%	1 Laporan	33,543,200	1 Laporan	33,543,200	100%
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	127,592,016	12 Laporan	111.609.152	12 Laporan	119,736,032	12 Laporan	119,735,670	100%	12 Laporan	119,736,032	12 Laporan	119,736,032	100%

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-					-		-		0.00
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	62,044,500	7 Unit	83,569,500	7 Unit	72,382,300	7 Unit	71,055,700	98%	7 Unit	61,111,900	7 Unit	61,111,900	100%
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	957,600	1 Unit	9,014,500	1 Unit	5,446,500	1 Unit	5,431,000	100%	1 Unit	5,442,100	1 Unit	5,442,100	100%
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	14,937,700	23 Unit	12,661,000	23 Unit	14,806,400	23 Unit	14,795,400	100%	23 Unit	13,052,700	23 Unit	13,052,700	100%
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase pelayanan non perizinan*	-													
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*														
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	7 Laporan	39,515,100	7 Laporan	16,121,930	7 Laporan	14,787,500	7 Laporan	14,521,200	98%	7 Laporan	9,515,100	7 Laporan	9,515,100	100%
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	22,136,800	6 Dokumen	25,483,070	6 Dokumen	24,241,500	6 Dokumen	23,827,000	98%	6 Dokumen	22,136,800	6 Dokumen	22,136,800	100%
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-													
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha															
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	5,755,600	12 Dokumen	9,902,920	12 Dokumen	9,100,000	12 Dokumen	7,611,100	84%	12 Dokumen	5,755,600	12 Dokumen	5,755,600	100%

3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu*	-													
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-													
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	17,483,600	8 Laporan	27.424.528	8 Laporan	25,525,000	8 Laporan	23,954,816	94%	8 Laporan	17,483,600	8 Laporan	17,483,600	100%
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Persentase penanganan gangguan trantibum*	-													
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-													
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	18,584,600	100 Orang	22.782.170	100 Orang	26,930,000	100 Orang	26,649,560	99%	100 Orang	18,584,600	100 Orang	18,584,600	100%
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai	4 laporan	30,982,600	4 laporan	37.438.200	4 laporan	68,825,000	4 laporan	65,865,540	96%	4 laporan	30,982,600	4 laporan	30,982,600	100%
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	*Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu*														
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa															
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya															
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	18,609,300	6 Laporan	18.746.288	6 Laporan	25,897,100	6 Laporan	24,969,146	96%	6 Laporan	19,169,300	6 Laporan	19,169,300	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Lendah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan serta Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kapanewon;
f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PemerintahanDesa dan/atau Kalurahan; dan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kalurahan.

Keberhasilan pembangunan di Kapanewon Lendah merupakan bagian keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan keserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kapanewon Lendah dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kapanewon dan Desa. Kinerja Pelayanan di Kapanewon Lendah dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Lendah disajikan pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel : 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Lendah Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah				100	100	100		100	100	100		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84,5	84,75	85,00		84,5	84,75	85,00		
3	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				98,25	99,12	100		98,25	99,12	100		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1.Tantangan

Tantangan merupakan hal/obyek yang harus ditanggulangi/diraih/ dilakukan. Tantangan Kapanewon Lendah dalam kurun waktu empat tahun kedepan adalah:

a. Tingkat kemiskinan penduduk Kapanewon Lendah yang masih cukup tinggi, menuntut peningkatan dan optimalisasi program pemberdayaan masyarakat, perlindungan kesehatan, sosial, pendidikan dan penciptaan lapangan kerja;

b. Kalurahan sebagai penyelenggaraan otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas perangkat desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga mampu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;

c. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas;

d. Banyaknya bantuan dana untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat miskin, menuntut adanya sistem pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan yang profesional dan akuntabel;

e. Perubahan peraturan perundang-undangan yang begitu cepat dalam berbagai bidang membutuhkan proses adaptasi, kemampuan, dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi setiap proses perubahan.

2. Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kapanewon Lendah, yaitu :

a. Kapanewon Lendah berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya;

b. Kapanewon Lendah memiliki perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan;

c. Potensi Kapanewon Lendah cukup besar bila dikembangkan, seperti hamparan tanah kosong yang sangat luas, potensi agrowisata, potensi agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan;

d. Kapanewon Lendah memilik banyak Sentra industri kerajinan batik yang dapat dikembangkan sehingga diharapkan dapat membantu mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada, untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat;

e. Posisi Kapanewon Lendah yang strategis sebagai pintu masuk Kabupaten Kulon Progo bagian timur serta sebagai penyangga kawasan industri yang berada di Kapanewon Sentolo;

f. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan. Di Kapanewon Lendah telah terbentuk kelompok- kelompok masyarakat seperti: kelompok tani, kelompok pembudidaya perikanan, kelompok tani ternak, kelompok usaha bersama, koperasi, dan sebagainya yang mendapat binaan dari penyuluh pertanian. Adanya Bendung Sapon disamping sebagai penyedia kebutuhan air bagi petani di Kapanewon Lendah, Galur dan Panjatan.

Permasalahan pembangunan daerah mencakup segala kendala, hambatan, atau ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan yang ditetapkan dengan kondisi realitas diwilayah tersebut. Ini bisa meliputi berbagai aspek, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur, hingga masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, atau konflik kepentingan. Permasalahan ini seringkali kompleks dan saling terkait, sehingga memerlukan pendekatan komprehensif untuk menemukan solusi yang tepat. Faktor-faktor seperti kondisi geografis, demografi, dan tingkat perkembangan daerah juga mempengaruhi jenis dan tingkat kompleksitas masalah yang dihadapi. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo secara umum dikelompokkan ke dalam 5 bidang yang terdiri atas permasalahan di bidang sosial, ekonomi, tata kelola, serta infrastruktur dan lingkungan hidup sehingga memicu isu-isu strategis yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau sebagai peluang di masa depan.

Isu juga berpotensi menjadi tantangan di kemuadian hari. Selain dari permasalahan, isu strategis juga dapat merujuk pada potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, namun jika potensi tersebut dikelola dengan baik maka dapat menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Mengingat banyaknya dan kompleksitas permasalahan pembangunan yang sudah ada, untuk menentukan isu strategis diperlukan identifikasi mulai dari isu global/internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan di Kabupaten Kulon Progo.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kapanewon Lendah. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 2.5 berikut.

Tabel : 2.5

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Kapanewon Lendah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				**100.000.000**	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**				**100.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100.000.000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100.000.000**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		***Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta***	***1 Laporan***	***100.000.000***	***Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya***		***Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta***	***1 Laporan***	***100.000.000***	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
II	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**					**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**					
	Sekretariat Daerah				**68.469.100**	**Sekretariat Daerah**				**26.481.000**	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**68.469.100**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**26.481.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan***	***2 Dokumen***	**68.469.100**	***Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan***		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan***	***2 Dokumen***	**26.481.000**	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	**68.469.100**	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	**26.481.000**	
III	**Unsur Kewilayahan**					**Unsur Kewilayahan**					
	Kecamatan				**2.115.948.546,67**	**Kecamatan**				**1.949.930.000**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1.946.858.215,67**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1.796.862.400**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu***	***23 Dokumen***	***13.000.000***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu***	***23 Dokumen***	***10.199.800***	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.000.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.574.100	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	6.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	5.625.700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu***	***14 Laporan***	***1.535.484.526,67***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu***	***14 Laporan***	***1.511.292.984***	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Lendah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 orang/bulan	1.481.934.526,67	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Lendah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	1.486.287.884	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	47.550.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	21.585.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3.420.100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Jumlah Dokumen Administrasi Umum***	***2 Dokumen***	***65.800.000***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Jumlah Dokumen Administrasi Umum***	***2 Dokumen***	***36.294.600***	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Lendah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	28.125.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Lendah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.064.600	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	37.675.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.230.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Jumlah Penambahan Aset***	***2 Unit***	***35.000.000***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Jumlah Penambahan Aset***	***Unit***	***0***	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Lendah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	***35.000.000***	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Lendah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	***0***	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang***	***24 Laporan***	***153.556.689***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang***	***24 Laporan***	***153.274.232***	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.320.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	33.543.200	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	115.236.689	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	127.592.016	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah***	***3 Laporan***	***144.017.000***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah***		***77.939.800***	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Lendah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	***110.142.000***	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Lendah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	**62.044.500**	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Lendah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Lendah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	957.600	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Lendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	18.875.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Lendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	14.937.700	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**59.329.311**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**67.407.500**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		***Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***6 Dokumen***	***48.588.000***	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***		***Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***18 Laporan***	**61.651.900**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	17.573.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	39.515.100	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	31.015.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	22.136.800	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		***Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan***	***12 Dokumen***	***10.741.311***	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***		***Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan***	***12 Dokumen***	**5.755.600**	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	***10.741.311***	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Lendah	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	**5.755.600**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	**26.916.589**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	**17.483.600**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		***Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan***	***8 Laporan***	**26.916.589**	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***		***Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan***	***8 Laporan***	**17.483.600**	
1	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	**26.916.589**	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	**17.483.600**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**94,74%**	**64.902.680**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**94,74%**	**49.567.200**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***4 Laporan***	**64.902.680**	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah***		***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***4 Laporan***	**49.567.200**	
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Lendah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 orang	26.175.400	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Lendah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 orang	18.584.600	
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	38.727.280	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	30.982.600	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**17.941.751**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**18.609.300**	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya***	***8 Laporan***	**17.941.751**	***Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***		***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya***	***8 Laporan***	**18.609.300**	
1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan	**17.941.751**	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Lendah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan	**18.609.300**	
	Jumlah Pagu Dana Kegiatan				**2.284.417.646,67**	**Jumlah Pagu Dana Kegiatan**				**2.076.411.000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Lendah diperoleh dari berbagai kegiatan. Usulan program tahun 2026 dikirim kepada Bappeda Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.

Sedangkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Kapanewon selama ini tidak pernah ada.

Tabel 2.6
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2026

No.	Program / Kegiatan	Lokasi (Desa dan Kapanewon)	Sasaran Program / Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAEARAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana kerja yang disusun Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD dan Kebijakan Nasional. Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Visi, Misi dan Program Presiden.

Visi Presiden preiode 2025-2029 yaitu *"Bersama Indonesia Maju Menuji Indonesia Emas 2045"* Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerjasama seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia setara dengan negara maju. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Delapan Asta Cita ini diimplementasikan menjadi dasar melangkah mewujudkan keberhasilan pembangunan.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi perangkat daerah, tujuan dan sasaran Kapanewon Lendah Tahun 2026 mendukung visi Bupati Kulon Progo yaitu *"Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya dan Berkelanjutan"* dan misi ketiga Bupati Kulon Progo Yaitu *"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Govermance, Aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang Aman dan Demokratis".*

Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2026 dengan mengacu pada dokumen rancangan akhir RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2024 dan Visi Misi Bupati Kulon Progo masa jabatan 2025-2029. Adapun Visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo 2025-2045 yaitu *"Kulon Progo yang sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya dan Berkelanjutan (SEMARAK)"*.

Tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel 3.2:

Tabel 3.2
Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86.90
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3.23
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,291

Sumber: Renstra Kapanewon Lendah 2023-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada Rankir RPJMD, Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

Adapun indikator program Kapanewon Lendah Tahun 2026 adalah seperti Tabel 3.3 berikut:

Indikator Kinerja Program Kapanewon Lendah Tahun 2026

No.	Urusan/Program	Indikator 2025	Indikator 2026	Target Kinerja Program Perubahan Tahun 2026
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Reakisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Reakisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	100
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan non perizinan	Persentase pelayanan non perizinan	100
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi produk hokum desa yang tepat waktu	Persentase rekomendasi produk hokum desa yang tepat waktu	100
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu	Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu	100
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase penanganan gangguan trantibum	Prosentase penanganan gangguan trantibum	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kulon Progo, program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
f) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan; dan
g) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan:

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:
   a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
   b. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, meliputi kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan: Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan:
   a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
   b. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

VI. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, meliputi kegiatan:

Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang meliputi sub kegiatan: Gelar Budaya Jogja.

VII. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan:**

Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan, dengan sub kegiatan: Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026 serta pendanaan Kapanewon Lendah dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kapanewon Lendah Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAPANEWON LENDAH KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON LENDAH						**2.076.411.000,00**							**100.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Laporan	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Kapanewon/ kalurahan	-	100.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Kapanewon/ kalurahan		100.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**26.481.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**26.481.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Kelembagaan berkinerja Sangat Tinggi***	**-**			**100 %**	**26.481.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Laporan	26.481.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon/ kalurahan	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			0				0 0	26.481.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon/ kalurahan		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.949.930.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.949.930.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi***	**-**			**100 %**	**1.796.862.400,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*undefined*	-			undefined undefined	10.199.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.574.100,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	5.625.700,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.511.292.984,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.486.287.884,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	21.585.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.420.100,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	36.294.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.064.600,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	22.230.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	161.135.216,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	33.543.200,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	127.592.016,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	77.939.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	62.044.500,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	957.600,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	14.937.700,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase pelayanan non perizinan***	**-**			**100 %**	**67.407.500,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			18 Laporan	61.651.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	39.515.100,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	22.136.800,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	5.755.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	5.755.600,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan		0,00	KAPANEWON LENDAH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu***	**-**			**100 %**	**17.483.600,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	17.483.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	17.483.600,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan		0,00	KAPANEWON LENDAH
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase penanganan gangguan trantibum***	-			**100 %**	**49.567.200,00**						-	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	49.567.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan	-	0,00	KAPANEWON LENDAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Kelahanan Nasional				100 Orang	18.584.600,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	30.982.600,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan		0,00	KAPANEWON LENDAH
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu***	-			**100 %**	**18.609.300,00**						-	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	18.609.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon/ kalurahan	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	18.609.300,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon/ kalurahan		0,00	KAPANEWON LENDAH
	J U M L A H							**2.076.411.000,00**							**100.000.000,00**	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Lendah Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan, dalam menunjang pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kulon Progo. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi Kapanewon Lendah dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kapanewon Lendah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Lendah ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan.

Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dan rencana Kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi rencana strategis ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Kapanewon Lendah dalam menyusun Rencana Kerja 2026 dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2026.

Lendah, 29 Juli 2025

Panewu Lendah,



RADEN SIGIT PURNOMO, S.IP.
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 196812021991031003

Kapanewon
Sentolo



RENJA KAPANEWON SENTOLO

TAHUN 2026

Jalan Raya JogjaWates Km. 18
Klebakan Salamrejo Sentolo 55664

sentolo.kulonprogokab.go.id @inisentolo +62274-6472118

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sentolo Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sentolo Tahun 2026 ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo di wilayah Kapanewon Sentolo.

Kapanewon Sentolo menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rangka melayani dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dan program-program yang mendukung pembangunan. Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat diberikan apabila didukung oleh kelembagaan yang mantap, aparatur yang profesional dan sarana serta prasarana pelayanan yang memadai.

Demikian ringkasan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo Tahun 2026 ini kami susun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sentolo, 29 Juli 2025
Panewu Sentolo,



ARMAWATI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 197304101992012001

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Landasan Hukum 2

1.3.Maksud dan Tujuan 3

1.4.Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 16

2.3.Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD……. 18

2.4.Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat..... 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 30

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 30

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah …….. 32

3.3.Program dan Kegiatan 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 37

BAB V PENUTUP 49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan pertanggungjawaban APBD.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dengan memperhatikan program prioritas di dalamnya dan mengacu pada hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026, yang memuat pagu indikatif, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Organisasi Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan proses sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kulon Progo mengintruksikan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
2. Kepala OPD menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra & Evaluasi Kinerja PD serta Isu Strategis terkait Urusan/Tupoksi;
3. Organisasi Perangkat Daerah atau Gabungan Organisasi Perangkat Daerah membahas Renja Organisasi Perangkat Daerah dalam Forum SKPD/Gabungan OPD selanjutnya disusun menjadi Renja Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang setrategis dalam menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD untuk penyusunan APBD Kabupaten.

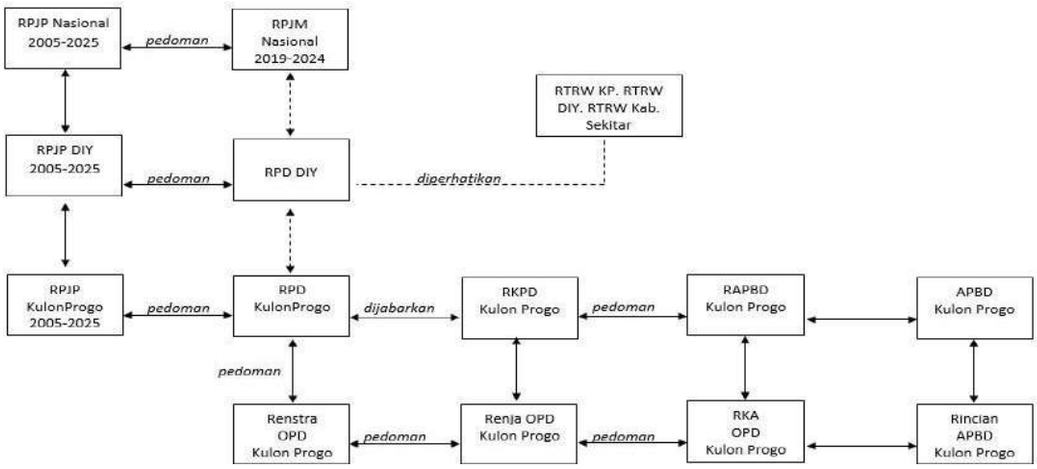
Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan RKPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan Pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja Perangkat Daerah menjadi Pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Rencana Kerja Kapanewon Sentolo Tahun 2026 mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan di atas, yang memuat program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.

Adapun keterkaitan dokumen perencanaan dan proses penyusunan perencanaan hingga penganggaran dijelaskan dalam gambar berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Hubungan RKPD , Renstra dan Renja Perangkat Daerah



Disamping itu, dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah harus mempertimbangkan prediksi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo pada rumusan program dan kegiatan tahun 2026, dan mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepanewon Sentolo

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rancana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah sebagai penjabaran Rancangan Renstra Tahun 2025-2029, mengacu pada hasil Forum Perangkat Daerah (Forum OPD) Tahun 2026 dan berpedoman pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

1. Sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun ke depan;

2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo khususnya Kapanewon Sentolo;
3. Untuk mewujudkan sistem perencanaan integral secara vertikal ke atas dengan RKPD Kabupaten, Provinsi, Kementerian dan Lembaga, serta ke bawah dengan RKP kalurahan.
4. Untuk mewujudkan sistem perencanaan integral secara horisontal dengan Pemerintah Daerah/ organisasi lain.
5. Untuk mewujudkan keterpaduan antar program dan kegiatan.
6. Untuk mewujudkan pedoman dan dasar hukum, pelaksanaan program dan kegiatan.
7. Untuk mewujudkan tolok ukur keberhasilan, pelaksanaan program dan kegiatan.
8. Untuk mewujudkan akuntabilitas, ditinjau dari segi perencanaan.
9. Untuk memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran serta menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan,sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.
10. Untuk mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah
11. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analiasis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4.Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1. Penelahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KEGIATAN DAN PEDOMAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pencapaian sasaran Daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Sentolo pada Tahun 2024 melaksanakan beberapa program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja Kapanewon Sentolo didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci sebagaimana dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Sentolo
Tahun 2024 (n-2)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah	100	100
Meningkatnya Pelayanan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,50	86,17
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	98,25	98,25

Sedangkan untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Sentolo pada tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Sentolo

Tahun 2024 (n-2)

Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100
Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja	Cakupan Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja	100	100
Peningkatan Sarana / Prasarana kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Sarana / Prasarana kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	100	100
Peningkatan Pelayanan Kapanewon	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kapanewon	84,50	86,17
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	98,25	98,25

Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo pada tahun berjalan 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**7,803,380,561**	**1,648,169,613**	**1,781,536,623**	**1,598,456,935**	**89.72**	**2,097,285,582**	**5,134,961,978**	**65.80**
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu**	**50,489,450**	**10,993,260**	**7,535,000**	**7,364,220**	**97.73**	**12,777,500**	**31,134,980**	**61.67**
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,946,750	6,717,150	4,580,000	4,471,734	97,64	7,949,000	18,748,976	60.58
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,542,700	4,276,110	2,955,000	2,892,486.	97,88	4,828,500	11.291.584	61,39
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Keuangan yang disampaiakan tepat waktu**	**6,392,087,581**	**1,261,772,049**	**1,510,243,844**	**1,267,290,599**	**83.912979**	**1,609,684,281**	**3,880,621,572.00**	**60.71**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6,198,534,781	1,217,627,739	1,466,145,344	1.224.315.394	83,51	1,563,057,781	3746875557	64,61
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	173,129,050	39,680,100	40,868,500	39,964,154	97,79	41,578,500	121,222,754	70,19
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	20,423,750	4,464,210	3,230,000	3,011,051	93,22	5,048,000	12,523,261	61,32
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen adminstrasi Umum**	**201,306,700**	**42,168,272**	**40,545,100**	**38,814,631**	**95.73**	**50,029,100**	**131,012,003**	**65.08**
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134,742,800	27,391,960	25,620,000	24,974,250	97,48	33,568,100	85,934,310	67,72
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66,563,900	14,776,312	14,925,100	13,840,381	92,73	16,461,000	45,077,693	62,72
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah penambahan Aset**	**207,262,940**	**109,891,262**	**8,606,800**	**8.530.000**	**99,11**	**40,237,560**	**150,128,822**	**72.43**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	207,262,940	109,891,262	8,606,800	8,530,000	99,11	40,237,560	158.658.822	76,55
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang**	**334,259,255**	**77,493,970**	**84,091,388**	**83,610,571**	**99,43**	**82,743,960**	**243,848,501**	**72.95**
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	96,789,385	21,689,394	24,223,372	17,155,764	98,02	23,923,320	69,355,269	71.66
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	237,469,870	55,804,576	59,868,016	46,006,012	100,00	58,820,640	174,493,232	73.48
					PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	**617,974,635**	**145,850,800**	**130,514,491**	**129,685,138**	**81.15**	**178,831,661**	**454,367,599**	**73.53**
					Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	228,427,400	57,518,600	34,090,191	33,561,000	98.45	83,002,400	174.082.000	76.21

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	57,278,550	15,886,500	19,297,900	19,202,338	99,50	13,168,800	42.487.638	84.25
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya	332,268,685	72,445,700	77,126,400	76,921,800	99,73	82,660,461	214.025.761	69.83
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan**	**223,398,115**	**47,882,858**	**45,014,500**	**44,138,050**	98.05	**56,517,271**	**148,538,179**	66.49
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**169,950,992**	**37,324,118**	**36,558,800**	**35,873,880**	98.13	**42,566,250**	**115,764,248**	68.12
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	59,793,730	12,525,420	11,583,500	11,267,884	97.28	15,345,000	39,138,304	65.46

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	110,157,262	24,798,698	24,975,300	24,605,996	98.52	27,221,250	76,625,944	69.56
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**53,447,123**	**10,558,740**	**8,455,700**	**8,264,170**	**97,73**	**13,951,021**	**32,773,931**	**61,32**
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	53,447,123	10,558,740	8,455,700	8,264,170	97,73	13,951,021	32,773,931	61,32
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**81,769,766**	**23,043,320**	**23,577,900**	**22,903,096**	**97.14**	**20,686,853**	**66,633,269**	**81.49**
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**81,769,766**	**23,043,320**	**23,577,900**	**22,903,096**	**97.14**	**20,686,853**	**66,633,269**	**81.49**
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81,769,766	23,043,320	23,577,900	22,903,096	97,14	20,686,853	66,633,269	81.49

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**265,707,474**	**68,876,230**	**112,394,300**	**73,544,685**	**65.43**	**67,221,049**	**209,641,964**	**78.90**
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**265,707,474**	**68,876,230**	**112,394,300**	**73,544,685**	**65.43**	**67,221,049**	**209,641,964**	**78.90**
					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	89,324,441	21,882,210	30,106,100	30,007,762	99.67	23,093,649	74,983,621	83.95
					Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	176,383,033	46,994,020	82,288,200	81,883,333	99.51	44,127,400	173,004,753	98.08
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**114,005,528**	**28,208,460**	**28,100,900**	**27,774,394**	**98.84**	**28,842,147**	**84,825,001**	**74.40**
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		114,005,528	28,208,460	28,100,900	27,774,394	98.84	28,842,147	84,825,001	74.40

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	114,005,528	28,208,460	28,100,900	27,774,394	98.84	28,842,147	84,825,001	74.40
					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan**	**238,740,600**	**31,631,820**	**37,620,000**	**31,635,814**	**84.09**	**62,244,100**	**125,511,734**	**52.57**
					Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan		**238,740,600**	**31,631,820**	**37,620,000**	**37,477,030**	**99,62**	**62,244,100**	**131,352,950**	**55.02**
					Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	238,740,600	31,631,820	37,620,000	37,477,030	99,62	62,244,100	131,352,950	55.02
					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan**	**400,000,000**	**99,871,740**	**100,000,000**	**99,919,601**	**99.92**	**100,000,000**	**299,791,341**	**74.95**
					Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya		**400,000,000**	**99,871,740**	**100,000,000**	**99,919,601**	**99.92**	**100,000,000**	**299,791,341**	**74.95**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	400,000,000	99,871,740	100,000,000	99,919,601	99.92	100,000,000	299,791,341	74.95

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kapanewon Sentolo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

a. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
b. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
c. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
d. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Analisis kinerja pelayanan di Kapanewon Sentolo meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi.Faktor kunci keberhasilan kinerja pelayanan organsasi antara lain:

a. Lingkungan Internal

Kekuatan:

1. Visi dan misi organisasi yang jelas
2. Masih ada motivasi kerja aparatur sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat
3. Sebagai bentuk tanggungjawab melaksanakan Keputusan Bupati Kulon progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Bupati Kepada Panewu
4. Dengan keterbatasan prasarana penunjang pelayanan yang ada merupakan tantangan untuk meningkatkan suksesnya pelayanan OPD
5. Adanya alokasi anggaran bagi Kapanewon
6. Faktor Pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS diantaranya Letak geografis dan kondisi alam dijadikan motifasi dalam pelayanan masyarakat agar ada keseimbangan dan kesetaraan dengan daerah lain, Meningkatkan upaya strategi untuk mensiasati berbagi permasalahan yang ada agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
8. Diklat peningkatan kualitas aparatur
9. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang kuat

Kelemahan

1. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai. Terbatasnya kualitas SDM berpengaruh terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. SPM Kapanewon Sentolo belum dilaksanakan sepenuhnya sebagai acuan

dasar Pelayanan Publik.

3. Sarana dan prasarana kantor terbatas menyebabkan kurang optimalnya pelayanan
4. Sistem administrasi organisasi belum tertib dan masih lemah
5. Penyusunan kebijakan dan perencanaan belum optimal
6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat belum dilaksanakan secara optimal.
7. Sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi terbatas sehingga menyebabkan lambatnya arus informasi dari dan ke Kalurahan.

b. Lingkungan Eksternal

Peluang:

1. Agenda pembangunan tahunan kabupaten Kulon Progo
2. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitaspemerintahan
3. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat, pengentasan danpenanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelayanan publik
4. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kapanewon
5. Kapanewon Sentolo merupakan daerah potensi tambang, antara lain tambang andesit, mangaan, emas, dan lain sebagainya, agar pengelolaannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan untuk kedepannya dikelola masyarakat melalui pertambangan rakyat dan pemerintah memfasilitasi melalui kegiatan pendampingan.
6. Tempat Wisata alam di Sentolo sangat potensial dan banyak lokasinya hanya tidak ditunjang promosi dan kelengkapan wisata yang masih minim apabila memungkinkan pemerintah harus mengambil peran yang penting dalam mengenalkan obyek wisata maupun pemenuhan sarana dan prasarananya.

Ancaman

1. Sarana dan prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai,

2. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
3. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih banyak dibawah garis kemiskinan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Sentolo disajikan pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah			100	100	100		100	100	100		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,50	84,75	86,270		86,14	86,14	86,270		
3	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon			98,25	99,12	100		98,25	99,12	100		

2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Sentolo Tahun 2026. Review terhadap RKPD Tahun 2026 dapat dilihat **Tabel 2.5** berikut :

Tabel 2.5
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					
I	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100.000.000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100.000.000**	
	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya		Jumlah Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya yang Dilaksanakan	***1 Event***	***100.000.000***	***Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya***		Jumlah Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya yang Dilaksanakan	***1 Dokumen***	***100.000.000***	
	Gelar Budaya Jogja	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
	SEKRETARIAT DAERAH					**SEKRETARIAT DAERAH**					
II	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**68,469,100**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**20.710.000**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		***Jumlah Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan***		***68,469,100***	***Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan***		***Jumlah Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan***	***1 Dokumen***	**20.710.000**	
	Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/ dan Kalurahan / Kelurahan	Kap. Sentolo	Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	68,469,100	Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/dan Kalurahan / Kelurahan	Kap. Sentolo	Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	20.710.000	
	UNSUR KEWILAYAHAN					**UNSUR KEWILAYAHAN**					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN					**KECAMATAN**					
III	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**2.043.341.300**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**1.519.229.500**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				***13.529.400***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***2 Dokumen***	***6.529.700***	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Sentolo	Jumlah dokumen perencanaan perangkat	2 Dokumen	8.252.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Sentolo	Jumlah dokumen perencanaan perangkat	2 Dokumen	3.604.500	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	5.277.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	2.925.200	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				***1.705.000.682***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			**3 Dokumen**	***1.263.322.091***	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Sentolo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	294 Orang / bulan	1.652.945.732	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Sentolo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 Orang / bulan	1.230.599.091	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Sentolo	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	46.537.600	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Sentolo	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	29.800.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	14 Laporan	5.517.350	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	14 Laporan	2.923.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				***55.772.100***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***2 Dokumen***	***33.859.000***	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Sentolo	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	37.781.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Sentolo	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	9.824.000	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Sentolo	Terlaksana nya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	17.991.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Sentolo	Terlaksana nya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	24.035.000	
	Pengadaan Barang				***15.712.140***					-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Sentolo	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	15.712.140	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Sentolo	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				***90.434.760***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***2 Dokumen***	***154.230.309***	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.146.920	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.997.361	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	64.287.840	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	123.232.948	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				***162.892.218***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***3 Dokumen***	***77.287.100***	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Sentolo	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	90.343.498	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Sentolo	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	61.288.400	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Sentolo	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	57.196.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Sentolo	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	-	-	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Sentolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	43 unit	15.352.320	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Sentolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	15 unit	15.998.700	
IV	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**58.493.560**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**65.109.100**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				***44.093.560***	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***			**2 Dokumen**	***58.987.400***	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 Laporan	15.761.310	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	39.542.500	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Sentolo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Dokumen	28.332.250	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Sentolo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Dokumen	19.444.900	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**14.400.000**	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***			***1 Dokumen***	***6.121.700***	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	Kap. Sentolo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilakukan	12 Dokumen	14.400.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Sentolo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilakukan	12 Dokumen	6.121.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Non Usaha										
V	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	**21.410.229**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	**17.687.700**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			***1 Dokumen***	***21.410.229***	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***			***1 Dokumen***	***17.687.700***	
1	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	21.410.229	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	17.687.700	
VI	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**69.571.627**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**70.234.500**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah			**2 Dokumen**	**69.571.627**	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah***			**2 Dokumen**	***70.234.500***	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Sentolo	Junlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 orang	23.136.840	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Sentolo	Junlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 orang	26.244.600	
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketemtuan Perundang-undangan	5 Laporan	46.434.787	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketemtuan Perundang-undangan	6 Laporan	43.989.900	
VII	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**29.850.696**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**25.773.500**	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				***29.850.696***	***Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***			***1 Dokumen***	***25.773.500***	
1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di	6 Laporan	29.850.696	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa	6 Laporan	25.773.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Wilayahnya					di Wilayahnya			
	Jumlah Pagu Dana Kegiatan				**2.391.136.512**	**Jumlah Pagu Dana Kegiatan**				**1.834.743.000**	

2.4. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan program dan kegiatan yang berasal dari pemangku kepentingan (masyarakat) telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Mulai tahap musyarawah pembangunan pedukuhan, dilanjutkan musyawarah pembangunan desa (musrenbang) tingkat Desa, dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Proses pelaksanaannya mengedepankan pada perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur / lembaga dan seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa.

Selanjutnya telah dihasilkan kesepakatan usulan program/kegiatan hasil musrenbang desa untuk dibawa musrenbang tingkat Kapanewon dan wakil delegasi peserta Musrenbang Tingkat Kapanewon.

Secara substantif usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan seluruhnya masih dalam ruang lingkup atau ranah sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Sentolo. Sehingga usulan tersebut layak untuk dilanjutkan pada tahap Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Kulon Progo.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat hasil Musrenbang Kapanewon Sentolo sebagaimana **Tabel 2.6** berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Penelahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana kerja yang disusun Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD dan Kebijakan Nasional. Selanjutnya sesaui dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJMN tahun 2025-2029 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuji Indonesia Emas 2045"* Visi tersebut mengandung arti pembnagunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bansa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045, Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasai manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meninqkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dao penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Delapan Asta Cita ini dimplementasikan menjadi delapan Prioritas Nasional. Setiap Prioritas Nasional mencakup Langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan Pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sentolo Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dokumen RPJMD 2025-2029 disusun berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 dan Visi Misi Bupati Kulon Progo masa jabatan 2025-2029.

Periode 2025-2029 merupakan periode pertama dalam upaya mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo 2025-2045, yaitu *"Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan (SEMARAK)."* Fokus utama pembangunan daerah pada periode ini adalah penguatan fondasi Pembangunan melalui respon kebijakan yang tepat sesuai isu strategis atau tantangan yang mengemuka pada periode 2025-2029 untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di masa mendatang.

Dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis dan tantangan pembangunan daerah, maka ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, yaitu

Visi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 : *Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, berbudaya yang Berkelanjutan.*

Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo :

1. *Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.*
2. *Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi*
3. *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.*
4. *Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana*

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Kulon Progo 2025-2029, telah dirumuskan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang saling berkaitan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keterpaduan ini menggambarkan arah strategis pembangunan lima tahun ke depan, dengan tujuan ditetapkan berdasarkan visi dan misi, serta sasaran dirancang untuk memastikan pencapaiannya secara sistematis dan terukur. Dengan sinergi ini, pembangunan di Kabupaten Kulon Progo diharapkan berkesinambungan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dari Visi Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 dan rumusan misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan, maka tujuan Kapanewon Sentolo Tahun 2025-2029 adalah **"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel".**

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Kapanewon Sentolo tujuan dan sasaran kerja Kapanewon Sentolo Tahun 2026 sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Sentolo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,90
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,23
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,270

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Sentolo Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Sentolo Tahun 2026

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(93	(4)	(5)	(6)	
1	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100.000.000**	
	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya		Jumlah Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya yang Dilaksanakan	***1 Dokumen***	***100.000.000***	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
2	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**20.710.000**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		***Jumlah Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan***	***1 Dokumen***	**20.710.000**	
	Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/dan Kalurahan / Kelurahan	Kap. Sentolo	Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	20.710.000	
3	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**1.519.229.500**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			***2 Dokumen***	***6.529.700***	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Sentolo	Jumlah dokumen perencanaan perangkat	2 Dokumen	3.604.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	2.925.200	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**3 Dokumen**	***1.263.322.091***	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Sentolo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19 Orang / bulan	1.230.599.091	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Sentolo	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	29.800.000	

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(93	(4)	(5)	(6)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	2.923.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			***2 Dokumen***	***33.859.000***	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Sentolo	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	9.824.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Sentolo	Terlaksana nya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	24.035.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Sentolo	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			***2 Dokumen***	***154.230.309***	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.997.361	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	123.232.948	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			***3 Dokumen***	***77.287.100***	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Sentolo	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	61.288.400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Sentolo	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Sentolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	15 unit	15.998.700	
4	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**65.109.100**	

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(93	(4)	(5)	(6)	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**2 Dokumen**	***58.987.400***	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	39.542.500	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Sentolo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Dokumen	19.444.900	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			***1 Dokumen***	***6.121.700***	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Sentolo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilakukan	12 Dokumen	6.121.700	
5	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	**17.687.700**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			***1 Dokumen***	***17.687.700***	
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	17.687.700	
6	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**70.234.500**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah			**2 Dokumen**	***70.234.500***	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Sentolo	Junlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 orang	26.244.600	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketemtuan Perundang-undangan	6 Laporan	43.989.900	
7	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**25.773.500**	

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(93	(4)	(5)	(6)	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			***1 Dokumen***	***25.773.500***	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Sentolo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	25.773.500	
	Jumlah Pagu Dana Kegiatan				**1.834.743.000**	

BAB IV
RENCANA KEGIATAN DAN PEDOMAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026, maka selanjutnya disusun langkah-langkah rencana kerja yang lebih operasional untuk kurun waktu satu tahun, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program dan kegiatan Kapanewon Sentolo pada Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah program sebanyak 7 jenis
2) Jumlah kegiatan sebanyak 13 jenis
3) Jumlah sub kegiatan sebanyak 22 jenis
4) Total kebutuhan dana/pagu indikatif sejumlah Rp1.834.743.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kulon Progo, terdiri dari :
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp1.230.599.091,00
   - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp604.143.909,00

Rincian Program dan Kegiatan Kapanewon Sentolo pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam **Tabel 4.1** berikut ini :

Tabel 4.1

PROGRAM DAN KEGIATAN KAPANEWON SENTOLO PADA RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON SENTOLO						**1.834.743.000,00**							**100.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan***	**-**			**100 %**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	100.000.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		100.000.000,00	KAPANEWON SENTOLO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**20.710.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**20.710.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi***	-			**100 %**	**20.710.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	20.710.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	20.710.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.714.033.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.714.033.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi***	-			**100 %**	**1.535.228.200,00**						-	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	6.529.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.604.500,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	2.925.200,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	1.263.322.091,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1.230.599.091,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	29.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	2.923.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	33.859.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.824.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	24.035.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			undefined undefined	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	154.230.309,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	30.997.361,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	123.232.948,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Laporan	77.287.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	61.288.400,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	15.998.700,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pelayanan Non Perizinan***	**-**			**100 %**	**65.109.100,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	58.987.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	39.542.500,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9 Dokumen	19.444.900,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	6.121.700,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	6.121.700,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu***	**-**			**100 %**	**17.687.700,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	17.687.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	17.687.700,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Penanganan Gangguan Trantibum***	**-**			**100 %**	**70.234.500,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	70.234.500,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				40 Orang	26.244.600,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				6 Laporan	43.989.900,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu***	**-**			**100 %**	**25.773.500,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	25.773.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	25.773.500,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sentolo Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders di Kapanewon Sentolo.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Sentolo ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target, tujuan dan sasaran Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan.

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sentolo Tahun 2026 telah kami susun berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, untuk selanjutnya Rencana Kerja (Renja) ini kemudian akan menjadi materi dalam penentuan KUA - PPAS Kabupaten Kulon Progo, dan setelah ditetapkan menjadi Rencana Kerja, maka akan kami jadikan dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2026.

Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Sentolo.

Sentolo, 29 Juli 2025

PANEWUSENTOLO,

ARMAWATI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 197304101992012001

RENJA 2026

Kapanewon Pengasih



Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dapat diselesaikan

Rencana Kerja Kapanewon Pengasih Tahun 2026 ini disusun sebagai dokumen perencanaan Kapanewon Pengasih Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo khususnya di wilayah Kapanewon Pengasih. Dalam rangka itu, Pemerintah Kapanewon Pengasih menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dengan berpedoman pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran dalam RKPD 2026, yang ingin meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan daerahsecara komprehnsif. Banyak hal yang harus dikondisikan untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tentunya harus didukung oleh kelembagaan yang mantap, profesionalisme aparatur dan sarana/prasarana pelayanan yang memadai.

Pada tahun 2026 Pemerintah Kapanewon Pengasih siap melaksanakan visi misi yang telah ditetapkan. Dengan pencapaian kinerja yang diraih saat ini, apabila didukung oleh anggaran yang memadai pada tahun-tahun mendatang, niscaya visi misi yang diemban akan dapat terlaksana dengan baik.

Demikian ringkasan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Kapanewon Pengasih, selanjutnya untuk menjadikan periksa.

Pengasih, 29 Juli 2025

PANEWU PENGASIH

Drs. SUNARYA, MM
(Pembina TK I, IV/b)
NIP. 19690128 198903 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16
2.4. Reviu terhadap RKPD 20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 31
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 32
3.3 Program dan Kegiatan 34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 36
BAB V P E N U T U P 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1a Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 5

Tabel 2. 1b Anggaran dan Realisasi Tahun 2024..... 10

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo12

Tabel 2. 4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo 16

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon 26

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kapanewon Pengasih Tahun 2026 Dan Prakiraan maju Tahun 2027

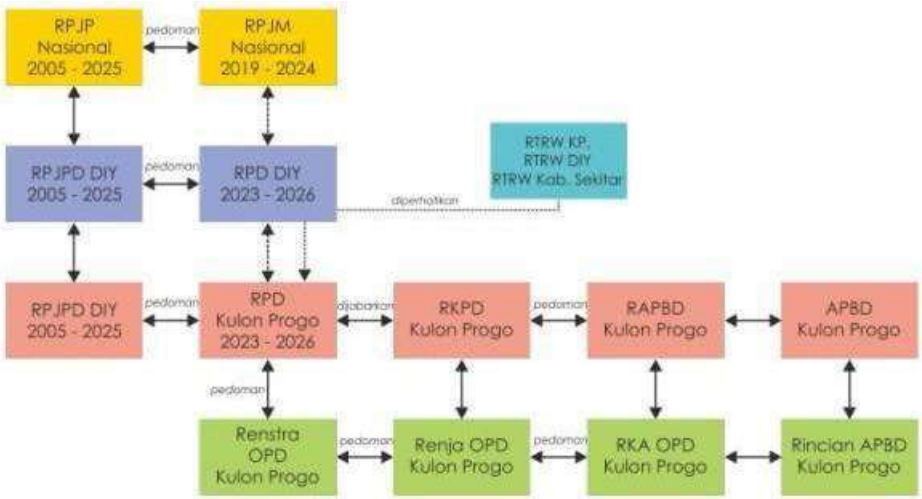
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pelaksanaan program kegiatan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Setiap tahun SKPD wajib menyusun Rencana Kerja (Renja), Dimana Renja dimaksud merupakan pedoman bagi pemerintah kabupaten untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga arah dan kebijakan serta program kerja dan SKPD dapat diketahui secara langsung oleh para pembuat kebijakan. Sehingga diharapkan kedepan perencanaan program kerja SKPD dapat terlaksana secara berkelanjutan, berjalan dengan baik dan berguna bagi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Tahun 2026, RPJMD 2025-2029, dan Rancangan Renstra SKPD Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencana teknis operasional yang memuat, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Pengasih Tahun 2026 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang RKPD tahun 2026
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
14. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Bupati Kepada Panewu

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan maksud menyediakan acuan bagi pemerintah Kapanewon dan masyarakat dalam melaksanakan suatu program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2026 dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja PD adalah:

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat pemerintah daerah, DPRD II dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten
3. Menjabarkan tentang program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan operasional tahun 2026 sehingga kegiatan dimaksud benar - benar bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada khususnya

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja PD Kapanewon Pengasih Tahun 2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB IV Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sampai dengan tahun 2025 bahwa kondisi urusan yang dilaksanakan di SKPD Tingkat Kapanewon melaksanakan 7 (tujuh) program kerja serta terbagi menjadi 12 kegiatan

Adapun 7 (tujuh) program yang dilaksanakan tersebut yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk lebih jelasnya tentang rekap hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian renstra tahun 2025 sebagai berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Pengasih

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja PD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4		5		6		7	8		9	
		K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta		K	Rp juta	K	Rp juta
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**6.969,62**	**100**	**137.147,45**	**100**	**1.592,08**	**100**	**1.548,33**	**97,25**	**100**	**1.661,41**	**139.148,40**	**1.990,01**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	*27.70*	2	678,00	2	5,70	2	5,59	98,07	4	8,24	684,77	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	*10.10*	21	302,00	21	2,73	21	2,67	97,80	21	1,83	304,77	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	80	*5.518*	12	119.402,00	13	1.288,81	13	1.242,43	96,40	14	1.374,97	121.029,06	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	*152.00*	12	378,00	12	44,56	12	43,94	98,61	12	35,85	430,34	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	*16.00*	14	3,35	14	2,39	14	2,27	94,98	14	2,52	6,33	
Administrasi Umum Perangkat Daerah												-		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (3 paket)	48	*119,80*	6	1.414,00	3	10,97	3	10,27	93,62	5	9,55	1.425,85	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	*62,00*	12	3.015,00	12	30,06	12	25,86	86,03	12	30,00	3.046,23	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												-		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	*83,86*	9	2.263,00	12	24,90	12	24,86	99,84	12	24,93	2.293,32	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	48	*31,99*	12	8.431,00	12	89,80	12	89,80	100	12	89,80	8.550,02	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												**-**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	*300,57*	10	78,10	10	78,83	10	78,25	99,26	9	71,94	169,21	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	20	*206.00*	9	1.183,00	8	13,33	8	13,31	99,85	8	11,77	1.199,43	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	32		0	0,00			0	0			0		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100**	**182,76**	**107,3**	**3.638,00**	**100**	**39,61**	**56,59**	**36,61**	92,43	**100**	**40,18**	**3.683,79**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-											-	-	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36	53,54	7	1.055,00	8	10,03	8	10,03	100	8	11,59	1.068,84	

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	52	77,22	5	1.569,00	5	20,56	5	17,87	86,92	7	20,71	1.591,24	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-											-		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			12	1.015,00	12	9,02	12	8,71	96,56	12	7,88	1.023,71	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100**	**94,06**	**100**	**21,30**	**100**	**21,46**	**50**	**20,01**	93,24	**100**	**20,57**	**234,67**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**-**											**-**	**-**	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44	94,06	9	213,00	8	21,46	8	20,01	93,24	8	20,57	234,67	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**238,46**	**9211**	**5.616,00**	**94,74**	**95,14**	**92,11**	**94,74**	99,58	**97,37**	**57,81**	**1.245,42**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**-**											**-**		

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	520	44,66	75	1.099,00	130	24,29	130	24,14	99,38	75	16,71	1.129,40	
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	120	193,80	7	45,17	30	70,85	30	70,60	99,65	30	41,10	116,01	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**111,00**	**100**	**2.659,00**	**100**	**25,46**	**40**	**20,36**	79,97	**100**	**23,07**	2.686,12	**2.413,94**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-											-		
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	44	113,01	6	2.659,00	6	25,46	6	20,36	79,97	7	23,07	2.686,12	
Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagan dan Ketatalaksanaan**	**100**	**238,74**	**100**	**3.429,00**	**100**	**40,00**	**100**	**39,78**	99,45	**91,92**	**40,00**	**74,07**	**31,03**
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**-**											**-**		

Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-											-		
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun	0	0,00	1	34,29	2	40,00	2	39,78	99,45	0	-	**74,07**	
Penerapan dan Pendampingan keistimewaan di Kapanewon/kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dukungan Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	8	238,74	0	0,00		-	0	-		3	40,00	-	
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan**	**100**	**420,00**	**100**	**99,80**	**100**	**100**	**100**	**96,72**	**96,72**	**100**	**60,00**	**1.094,72**	**260,65**
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**-**											**-**		
Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	0,00	1	998,00	0	100	1	96,72	96,72	1	1.094,72	1.094,72	
Pembinaan kelembagaan Adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	12	400,00	0	0,00						0	-		

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 telah berjalan sesuai dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pada prinsipnya dari sejumlah 12 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon hampir 100% telah memenuhi target kinerja hasil, meskipun pencapaian kinerja keuangan belum sesuai dengan rencana. Penjabaran anggaran dan realisasi fisik dan keuangan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
			FISIK (%)	KEUANGAN	%
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				
1.1	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**				
1.1.1	Gelar Budaya Jogja	Rp 100.000.000,00	100	96.722.340,00	96,72%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**				
2.1	**Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan**				
2.1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	40.000.000,00	100	27.774.427,00	69,44%
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				
3.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				
3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.702.900,00	100	5,590,366,00	98,03%
3.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.730.800,00	100	2,668,272,00	97,71%
3.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
3.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.288.813.247,00	100	957.902.508,00	74,32
3.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.555.300,00	100	43,939,840,00	98,62%

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
			FISIK (%)	KEUANGAN	%
3.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.388.300,00	100	2,268,240,00	94,97%
3.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
3.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.969.700,00	100	10,270,829,00	93.63%
3.3.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.060.000,00	100	25,858,452.,00	86.02%
3.4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				
3.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.897.639,00	100	24,857,275,00	99.84%
3.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.801.988,00	100	89,801,988,00	100%
3.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				
3.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.833.700,00	100	78,249,200,00	99.26%
3.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.327.100,00	100	13,311,100.,00	99.88%
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				
4.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				
4.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.026.600,00	100	10,026,600,00	100%
4.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.563.100,00	100	17,871,420,00	86.91%
4.2	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				
4.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	9.016.500,00	100	8,710,260,00	96.6%
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				
5.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
			FISIK (%)	KEUANGAN	%
5.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.464.800,00	100	20,007,300,00	93.21%
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				
6.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				
6.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	24.293.100,00	100	24,143,100,00	99.38%
6.1.2	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	70.851.300,00	100	70,601,300,00	99.65%
7	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				
7.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				
7.1.1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	25.462.800,00	100	20,364,817,00	79.98%

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pencapaian target kinerja hasil kegiatan, yaitu :

a. Diperlukan kebijakan dan kejelian dari pimpinan selaku pengguna anggaran dalam memaksimalkan target kinerja yang telah ditetapkan.
b. Koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan pengguna anggaran (kepala OPD) agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk kinerja pelayanan, Kapanewon Pengasih selama memberikan pelayanan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Sebagaimana ditekankan dengan kebijakan Bupati Kulon Progo bahwa pelayanan terhadap masyarakat perlu menjadi prioritas utama bagi setiap OPD. Pelayanan dimulai dari tataran tingkat pemerintahan yang terbawah yaitu kalurahan baru kemudian kapanewon dan kabupaten.

Sehingga untuk mendukung kebijakan tersebut telah disepakati bersama tentang jam pelayanan dan tata cara pelayanan. Dengan harapan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan yaitu sebagai berikut:

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	9		10	11	12
	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,50	84,75	85,00	85,00	86,053	84,75	85,00	85,00	
	Persentase Peningkatan Penyelengaraan pemerintahan Kapanewon			98,25	99,12	100	100	98,25	99,12	100	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kapanewon Pengasih adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya kesalahan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terutama dalam hal kenaikan pajak / NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga memberatkan masyarakat. Disamping itu disebabkan pula oleh karena adanya wajib pajak yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Kulon Progo sehingga sulit untuk dihubungi.
2. Masih tingginya jumlah penduduk miskin yang ada di Kapanewon Pengasih
3. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan satuan perlindungan masyarakat. Hal ini diakibatkan karena masih kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh satlinmas
4. Belum terciptanya penyusunan data profil desa dan monografi desa secara optimal dan berkualitas, sehingga Profil Kapanewon sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan belum sesuai dengan harapan
5. Penyelenggaraan Pemerintah Desa belum optimal. Hal ini dibuktikan antara lain oleh pembuatan berbagai produk pemerintahan desa yang berupa laporan pertanggungjawaban kepala desa dan peraturan desa masih sering terlambat, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan inventaris desa belum optimal sehingga berdampak pada terganggunya jalannya pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat
6. Masih lemahnya fungsi pemantauan dan pengendalian pembangunan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih tergantungnya sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan kepada pemerintah. Masyarakat terkesan masih ragu, takut, dan enggan melakukan pelaporan apabila adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan
7. Belum optimalnya pengembangan desa rintisan wisata alam berbasis budaya dan edukasi.
8. Masih perlunya tindakan antisipasi terhadap kerentanan wilayah adanya potensi bencana alam tanah longsor.
9. Potensi penyalahgunaan wewenang di desa

10. Pengembangan agrobisnis, agroindustri, Industri Rumah Tangga (IRT), Kecil (K) dan Menengah (M) belum dilaksanakan dengan optimal. Apabila sektor ini dapat ditangani secara serius maka diharapkan akan membantu peningkatan pendapatan masyarakat
11. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, sehingga perlu ditampung dan diperhatikan.
12. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat. Perumahan penduduk yang kebanyakan masih berhimpitan dengan kandang ternak, penyimpanan air yang tidak tertutup sehingga menjadi sarang nyamuk dan sistem pembuangan limbah yang kurang baik adalah menjadi salah satu contohnya
13. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan rendahnya tingkat kesejahteraan ini tentu saja mempengaruhi/berkaitan dengan hal lainnya misalnya dengan rendahnya gizi yang dikonsumsi, tingkat pendidikan, ketrampilan, dll
14. Belum berjalannya kegiatan organisasi kepemudaan dan olah raga. Di Pedukuhan dan di tingkat kalurahan aktivitas kepemudaan dan keolahragaan masih kurang. Kalaupun ada sifatnya masih insidentil, misalnya kegiatan olah raga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun
15. Makin maraknya judi online dan penyakit masyarakat lainnya. Yang peredarannya cepat sekali mempengaruhi masyarakat terutama para generasi muda. Karena kelompok umur inilah yang paling rentan untuk dipengaruhi dan ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa harus bekerja keras.

2.3.2. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan jumlah pegawai yang ada di tingkat kapanewon secara tidak langsung mempengaruhi kelancaran kinerja kapanewon
2. Keterbatasan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kapanewon menyebabkan program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan secara maksimal.
3. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang bekerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang diantaranya adalah:

a. Laptop dan PC mayoritas sudah tua ;
b. AC hanya ada di ruang Pelayanan dan Ruang Panewu;
c. Scanner sudah rusak;
d. Kursi kerja terbuat dari kayu tanpa lengan dan tanpa busa;
e. Kipas angin hanya ada di ruang Panewu Anom

4. Sudah banyak bagian bangunan kantor yang rusak seperti
   a. Gedung Serbaguna yang kurang layak dipakai karena bangunan sudah tua, panas dan cat tembok sudah mengelupas.
   b. Belum ada bangunan parkir untuk tamu
5. Sarana dan prasarana pengamanan kantor belum memadai. Contohnya adalah sebagian jendela yang ada di Kantor Kapanewon Pengasih belum diteralis

2.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam pengelolaan dan pengembangan suatu aktifitas memerlukan suatu perencanaan strategis, yaitu suatu pola atau struktur sasaran yang saling mendukung dan melengkapi menuju ke arah tujuan yang menyeluruh. Sebagai persiapan perencanaan, agar dapat memilih dan menetapkan strategi dan sasaran sehingga tersusun program-program dan proyek-proyek yang efektif dan efisien maka diperlukan suatu analisis, baik internal maupun eksternal.

2.3.3.1 Tantangan

Kapanewon merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kapanewon dalam usaha mengembangkan pelayanan Kapanewon dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntabel, cepat dan tanpa komplain
2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan Daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

3. Di era persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kapanewon Pengasih harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat
5. Kapanewon Pengasih merupakan kawasan yang rentan bencana alam sehingga dituntut untuk mengatisipasi dini terhadap keselamatan warga

2.3.3.2 Peluang

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Dukungan stackeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi.
2. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
3. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
4. Kapanewon merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,

2.3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi
2. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
3. Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar;
4. Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon dan kalurahan;
5. Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
6. Kurang ketersediaan sarana dan prasarana kantor

Dengan adanya isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pengasih maka perlu adanya rekomendasi untuk kedepannya berupa:

1. Dilakukannya pelatihan khusus bagi Aparatur Kapanewon dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan
2. Tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai.
3. Perlunya pelatihan bagi masyarakat Kapanewon Pengasih agar berhasil guna dan berdaya guna.
4. Implementasi dan evaluasi Siskeudes dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.
5. Rintisan wisata alam berbasis budaya dan edukasi (Pedukuhan Kamal, Desa Karangsari, Perkemahan Lemah Abang di Margosari, Wisata Alam Susur Sungai Serang di Sendangsari.
6. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan dan desa.
7. Kerentanan wilayah terhadap bencana tanah longsor dan antisipasi bencana.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja Pembangunan daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah yang memuat :

a. Rancangan kerangka ekonomi daerah
b. Program prioritas Pembangunan daerah
c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju

yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA PPAS.

RKPD Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kapanewon Pengasih.

Untuk lebih jelasnya mengenai reviu RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 2.5 berikut

Tabel 2. 4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Kapanewon Pengasih

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, kegiatan, Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta UrusanKebudayaan**	**100 %**	**110.000.000,00**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**100 %**	**100.000.000,00**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		***Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta***	**1 Dokumen**	**110.000.000,00**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	**1 Dokumen**	**100.000.000,00**	
	Gelar Budaya Jogja	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	1 laporan	100.000.000,00	Gelar Budaya Jogja	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	1 laporan	100.000.000,00	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan		**Persentase Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagan dan Ketatalaksanaan**	**100 %**	**62.244.100,00**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**		**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimimweaan dengan regulasi**	**100 %**	**22.096.000,00**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan***	**1 Dokumen**	**62.244.100,00**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	**1 Dokumen**	**22.096.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, kegiatan, Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan Kelembagaan								
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun*	3 Dokumen	*62.244.100,00*	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi*	3 Dokumen	22.096.000,00	
	Unsur Kewilayahan					**Unsur Kewilayahan**				**1.827.843.740,00**	
	Kecamatan					**Kecamatan**				**1.827.843.740,00**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota***	**100 %**	**2.058.492.899,00**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		***Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi***		**1.677.393.740,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**2 dokumen**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	**2 Dokumen**	**5.294.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 dokumen	*8.655.875*	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat*	2 dokumen	*3.188.300,00*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, kegiatan, Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah					Daerah		*Daerah*			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	12 Laporan	*3.812.375,00*	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	12 Laporan	*2.105.700,00*	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**3 Dokumen**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	**3 Dokumen**	**1.416.097.451,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Pengasih	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	20 orang/ bulan	*1.594.803.761,00*	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Pengasih	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	20 orang/ bulan	*1.388.714.651,00*	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	14 Dokumen	*48.180.500,00*	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	*24.950.000,00*	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD*	14 laporan	*4.274.750,00*	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	14 laporan	*2.432.800,00*	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**2 Dokumen**	**56.684.750,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	**2 Dokumen**	**40.158.500,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, kegiatan, Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Pengasih	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 paket	*17.804.750,00*	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Pengasih	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 paket	*7.083.500,00*	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 laporan	*38.880.00,00*	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 laporan	*33.075.000,00*	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**1 Dokumen**	*33.413.875,00*	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	**1 Dokumen**	**9.029.200,00**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Pengasih	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	4 unit	*33.413.875,00*	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Pengasih	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	4 unit	*9.029.200,00*	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**24 Dokumen**	**136.921.688,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	**2 Dokumen**	**132.957.789,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 laporan	*31.538.108,00*	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 laporan	*24.927.781,00*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, kegiatan, Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 laporan	*105.383.580,00*	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 laporan	*108.030.008,00*	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**3 Dokumen**	**171.745.325**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	**2 Dokumen**	**73.856.800,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Pengasih	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*10 unit*	*98.112.625*	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Pengasih	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*9 unit*	*62.098.500,00*	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kap. Pengasih	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	5 unit	*52.000.000*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya*	Kap. Pengasih	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	2 unit	*0*	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Pengasih	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	8 unit	*21.632.700*	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Pengasih	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	8 unit	*11.758.300,00*	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100 %**	**63.320.774**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**		***Persentase pelayanan non perizinan***	**100 %**	**63.376.100,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, kegiatan, Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**13 Dokumen**	**50.508.274**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	**2 Dokumen**	**57.158.600,00**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	9 laporan	*24.633.274*	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PerangkatmDaerah dan Instansi Vertikal Terkait*	10 laporan	*41.524.100,00*	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	13 dokumen	*25.875.000*	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	4 dokumen	*15.634.500,00*	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			**1 Dokumen**	**15.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	**1 Dokumen**	**6.217.500,00**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	12 dokumen	*15.000.000*	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Pengasih	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	12 dokumen	*6.217.500,00*	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan		***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**26.640.750**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan**		***Persentase dokumen pembangunan Tingkat***	**100 %**	**16.956.200,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, kegiatan, Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelurahan		***Desa Dan Kelurahan***			**Kelurahan**		***kapanewon yang disampaikan tepat waktu***			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			**1 Dokumen**	**26.640.750**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	**1 Dokumen**	**16.956.200,00**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	2 laporan	*26.640.750*	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	2 laporan	*16.956.200,00*	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		**Persentase Peningkatan Penyelenggaran Urusan pemerintahan Umum**	**97,37%**	**79.559.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		***Persentase penanganan gangguan trantibum***	**100 %**	**53.816.600,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			**30 laporan**	**79.559.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	**2 Dokumen**	**53.816.600,00**	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Pengasih	*Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	130 orang	*22.300.500*	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Pengasih	*Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	35 orang	*16.453.000,00*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, kegiatan, Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*	30 laporan	*57.258.500*	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan*	5 laporan	*37.363.600,00*	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pmerintahan Desa**	**100 %**	***40.554.239***	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		***Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu***	**100 %**	**16.301.100,00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**6 Dokumen**	***40.554.239***	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		***Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan***	**1 Dokumen**	**16.301.100,00**	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	6 Laporan	*40.554.239*	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Pengasih	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	7 laporan	*16.301.100,00*	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Pengasih diperoleh dari berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah :

1. Usulan dari Pemerintah Kalurahan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kalurahan untuk kegiatan tahun 2026, dimana musrenbang Kalurahan dimaksud dilaksanakan pada bulan Juli s.d Agustus 2024. Hasil Musrenbang Kalurahan dimaksud kemudian di rangkum menjadi bahan Musrenbang Tingkat Kapanewon
2. Hasil usulan dari forum OPD tingkat Kapanewon, dimana setiap OPD di tingkat Kapanewon memberikan usulan kegiatan dan dirangkum dalam dokumen usulan kegiatan sebagai bahan Musrenbang di Tingkat Kapanewon.
3. Usulan dari berbagai pemangku kepentingan misalnya kelompok tani, Gabungan P3A, Anggota DPRD Kabupaten dan kelompok-kelompok masyarakat lain.
4. Semua usulan kegiatan dimaksud selanjutnya dibahas dalam Musrenbang tingkat Kapanewon yang dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Hasil dari kegiatan tersebut adalah Rencana Pembangunan Kapanewon Tahun 2025 dan merupakan bahan Musrenbang Kabupaten

Musrenbang tingkat Kapanewon ini menampung aspirasi yang diusulkan masyarakat, seperti para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, usulan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026. Usulan-usulan tersebut kemudian ditampung, dievaluasi dan diakomodir sehingga tersusun suatu program usulan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Kapanewon, seperti yang telah dilimpahkan oleh Bupati. Usulan program tersebut diarahkan pada:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi)
3. Penguatan reformasi Birokrasi
4. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh dan mandiri.
5. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
6. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal
7. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan
8. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah.

Usulan program tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas secara tersendiri dikirim kepada Bappeda Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana kerja yang disusun Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD dan Kebijakan Nasional. Selanjutnya sesaui dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJMN tahun 2025-2029 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*" Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045,

Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meninqkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Delapan Asta Cita ini dimplementasikan menjadi delapan Prioritas Nasional. Setiap Prioritas Nasional mencakup Langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan Pembangunan dalam periode jangka menegngah 2025-2029.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pengasih Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dokumen RPJMD 2025-2029 disusun berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 dan Visi Misi Bupati Kulon Progo masa jabatan 2025-2029.

Periode 2025-2029 merupakan periode pertama dalam upaya mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo 2025-2045, yaitu *"Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan (SEMARAK)."* Fokus utama pembangunan daerah pada periode ini adalah penguatan fondasi Pembangunan melalui respon kebijakan yang tepat sesuai isu strategis atau tantangan yang mengemuka pada periode 2025-2029 untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di masa mendatang.

Dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis dan tantangan pembangunan daerah, maka ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, yaitu

Visi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 : *Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, berbudaya yang Berkelanjutan.*

Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo :

1. *Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.*
2. *Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi*
3. *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.*

4. *Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana*

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Kulon Progo 2025-2029, telah dirumuskan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang saling berkaitan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keterpaduan ini menggambarkan arah strategis pembangunan lima tahun ke depan, dengan tujuan ditetapkan berdasarkan visi dan misi, serta sasaran dirancang untuk memastikan pencapaiannya secara sistematis dan terukur. Dengan sinergi ini, pembangunan di Kabupaten Kulon Progo diharapkan berkesinambungan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Pengasih mendukung visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religious, Berbudaya yang berkelanjutan dan misi ketiga Kepala Daerah, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang aman dan Demokratis.

Dari Visi Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 dan rumusan misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan, maka tujuan Kapanewon Pengasih Tahun 2025-2029 adalah **"*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel*"**.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Kapanewon Pengasih tujuan dan sasaran kerja Kapanewon Pengasih Tahun 2026 sebagai berikut;

Tabel 3. 2
Tujuan dan sasaran Renja Kapanewon

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,90
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,23
		Meningkatnya akuntabilitas	Nilai AKIP Perangkat	Predikat	A (>80-90)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026
		kinerja perangkat daerah	Daerah		
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,291

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Pengasih Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Program dan Kegiatan Tahun 2026

No	Program	Indikator	Satuan	Target
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimimweaan dengan regulasi	%	100
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja	%	100

No	Program	Indikator	Satuan	Target
	Daerah Kabupaten/Kota	Sangat Tinggi		
4	Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayanaan Publik	Persentase pelayanan non perizinan	%	100
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase dokumen pembangunan Tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu	%	100
6	Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan gangguan trantibum	%	100
7	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	%	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Pengasih tahun 2026 terdiri dari 7 Program terdiri 12 kegiatan yaitu

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   - Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan,
   - Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan,

- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
   - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 Kapanewon Pengasih tersaji dala tabel berikut ini:

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja adalah salah satu kewajiban setiap Organisasi Perangkat Daerah. Dengan waktu yang sangat terbatas, Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Pengasih dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa hasil dari penyusunan ini jauh dari sempurna, sehingga ke depan diperlukan bimbingan dan pembinaan dari instansi terkait, agar rancangan rencana kerja dapat tersusun dengan tepat waktu serta berkualitas.

Meskipun dengan keterbatasan anggaran diharapkan bagi pembuat kebijakan di tingkat kabupaten untuk dapat memperhatikan program kerja dan kegiatan yang telah diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kedepan dapat dikeluarkan kebijakan pemerintah dengan memberikan dukungan anggaran yang layak melalui pagu anggaran, sehingga akan mampu mendongkrak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah menuju kesempurnaan dan keberhasilan yaitu terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu melayani masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan

Pengasih, 29 Juli 2025

PANEWU PENGASIH

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON PENGASIH

Drs. SUNARYA, MM
(Pembina TK I, IV/b)
NIP. 19690128 198903 1002

RENCANA KERJA

TAHUN 2026

KAPANEWON KOKAP

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KAPANEWON KOKAP

Ngaseman, Hargorejo, Kokap

Email : kokap@kulonprogokab.go.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja per 31 Desember 2024.....4

Tabel 2. 2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Kokap dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo.....6

Tabel 2. 3. Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Kokap Tahun 2024.....14

Tabel 2. 4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Kokap dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo Nama OPD : Kapanewon Kokap.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo.....16

Tabel 2. 6. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo.....21

Tabel 2. 7. Usulan Program dan kegaiatan dari para pemangku kepentingan tahuun 2024.....34

Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 36

Tabel 3. 2. Program dan Kegiatan Tahun 2026.....37

Tabel 4. 1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kapanewon Kokap Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2026 Kapanewon Kokap Tahun 2026 ini juga disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalauasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahun 2026 Pemerintah Daerah.Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 dan berpedoman pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

Kapanewon Kokap Tahun 2026 ini memuat Tujuan dan Sasaran Kapanewon Kokap beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan serta penyesuaian target dan pagu indikator Program/Kegiatan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kapanewon Kokap Tahun Anggaran 2026.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kapanewon Kokap Tahun 2026 ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga dokumen ini nantinya dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Segala kekurangan dalam Renja ini kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Kokap, 29 Juli 2025

Panewu Kokap

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KOKAP

MARSI, S.I.P .,M.PA

NIP. 19680305 199603 2 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hasil evaluasi kinerja Kapanewon Kokap pada tahun 2024 menunjukkan adanya beberapa indikator tujuan dan sasaran daerah yang memerlukan perhatian serius. Persoalan kemiskinan masih menjadi permasalahan prioritas yang akan di selesaikan Pemerintah Kabupaten. Pada tahun 2024 persentase penurunan kemiskinan hanya 0,02 persen poin dari 15,64 % menjadi 15,62 % Jauh lebih rendah di bandingkan tahun 203 pada 0,75 persen poin.Kapanewon juga masih menjadi kecamatan dengan persentasi kemiskinan tinggi di Kulon Progo.Persoalan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga harus menjadi perhatian khusus. Walaupun indikator indeks pembangunan manusia mampu mencapai target yang ditetapkan namun masih di bawah rata - rata Kulon Progo sehingga prioritas pembangunan SDM juga harus selalu di tingatkan.

Permasalahan dan kondisi yang di hadapi pada tahun 2024 tersebut menjadi perhatian dalam menentukan fokus pembangunan tahun 2026 yang merupakan tahapan pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029.Sebagai upaya menjamin keterkaitan dan konsistensi anatara perencanaan ,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Kokap tahun 2026.

Rencana Kerja Tahun 2026 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026.

(Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Tahun 2026 Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun

oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu,partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026. Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026. Kapanewon Kokap Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Kapanewon Kokap 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kapanewon Kokap Tahun 2026 yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) undang - undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang - undang no 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencnaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 104 ,tambahan lembaran Negara RI nomor 4421);
3. Peratuuran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPDdan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMDdan RKPD.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 14 tahun 2022 ytentang penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu.
5. Peraturan Bupati Kulon Progo No.42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan ,Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan.
6. Peraturan Bupati Kulon Progo No.13 Tahun 2022 Tentang Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahuun 2023 - 2026
7. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangakt
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
10. Keputusan Bupati Kulon Progo 274/C/2022 tentang Peraturan kedua atau Keputusan Bapati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan

sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Kokap Tahun 2026 adalah untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Kokap Tahun 2026 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengahdengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaiantarget kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Derah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Kokap

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon kokap

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kapanewon Kokap ;

2.4. Reveiu terhadap Ranwal

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2024 Belanja Anggaran Kapanewon Kokap sebesar Rp. 1.976.957.806,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.419.362.505,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 557.595.301,- . Realisasi sebesar Rp. 1.866.697.443,- atau dengan tingkat capaian sebesar 94,42 % , dengan rincian untuk realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.311.989.335,- atau 92,43 % dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 554.708.108,- atau 99,48 %.

Penjelasan sisa lebih pembiayaan anggaran Laporan Realisasi Anggaran Belanja per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja per 31 Desember 2024

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000,00	6.964.377,00	35.623,00	Selisih harga pasar Alat Tulis Kantor
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	3.983.170,00	16.830,00	Selisih harga pasar Alat Tulis Kantor
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.382.612.505,00	1.275.914.335,00	106.698.170,00	Sisa Anggaran Belanja karena adanya pegawai purna tugas
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.744.000,00	36.985.600,00	758.400,00	Sisa Anggaran karena adanya pegawai purna tugas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.300.000,00	4.283.616,00	16.384,00	Selisih harga pasar Alat Tulis Kantor dan kertas cover
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.026.400,00	10.750.885,00	275.515,00	Selisih harga pasar Alat Tulis Kantor dan kertas cover
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.600.000,00	21.574.800,00	25.200,00	Selisih harga pasar mbizmarket
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.723.077,00	25.909.473,00	813.604,00	Selisih harga pada Belanja tagihan air dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.802.024,00	89.802.024,00	0,00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.444.800,00	72.199.202,00	245.598,00	Sisa pembayaran pajak, bea dan perizinan, dan pembelian pelumas
Pemeliharaan/Rehabilit	11.292.000,00	11.178.338,00	113.662,00	Sisa anggaran

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan
asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				pada belanja alat tulis kantor dan perabot kantor
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.923.900,00	15.738.982,00	184.918,00	Sisa pengembalian honorarium narasumber
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.120.000,00	22.887.586,00	232.414,00	Sisa pengembalian honorarium narasumber
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	7.362.700,00	7.107.061,00	255.639,00	Selisih harga pasar Alat Tulis Kantor dan kertas cover
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.302.300,00	25.178.884,00	123.416,00	Selisih harga pasar makan minum rapat pada mbizmarket dan sisa pengembalian honorarium narasumber
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	23.834.600,00	23.816.656,00	17.944,00	Selisih harga pasar makan minum aktivitas lapangan pada mbizmarket
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	57.680.000,00	57.568.14200	111.858,00	Selisih harga pasar Alat Tulis Kantor, kertas cover dan bahan komputer
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15.189.500,00	15.021.630,00	167.870,00	Sisa pembayaran pajak, bea dan perizinan, dan pembelian pelumas

Sumber : Laporan Keuangan 2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Kokap Tahun 2024 melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pengukuran kinerja Kapanewon Kokap didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah :

Tabel 2. 2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Kokap dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiata Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daera s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahu berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstr (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan		Jml	Satuan	Jml	Satuan	
	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar														
	Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan														
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**		**100**	**%**	**100**	**%**	
2 2 2 8 5 7	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	**100**	%	**100**	%	**100**	%	**100**	%		**100**	%	**100**	%	
2 22 08 5 07 0006	Gelar Budaya Yogya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	even	0	0	1	Even	1	Even	100	1	even	1	even	100%
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah														
	Sekretariat														

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiata Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daera s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahu berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstr (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
			Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan		Jml	Satuan	Jml	Satuan	
	Daerah															
4 01 04	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Pesesntase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	100	**100**	**%**	300	%	300%
4 01 04 5'06	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		**100**	%	**100**	%	**100**	%	**100**	%		**100**	%	300		300%
	Perencanaan dan pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan	100	%	100	%	100	%	100	%		100	%	300		300%
4 01 04 5'06 6 0001 1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2	Laporan			4	Dokumen	4	Dokumen	4	2	Laporan	5	Laporan	250%
7	Unsur Kewilayahan															
7 01	Kecamatan															
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300%
7 01 01 2 01	Perencanaan,P	Jumlah Evaluasi	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiata Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daera s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahu berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstr (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
			Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan		Jml	Satuan	Jml	Satuan	
	enganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kinerja prangkat Daerah														
7 01 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	1	4	Dokumen	10		500%
2 23 02 3 02 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Laporan	5	Laporan	21	Laporan	21	Laporan	1	21	Laporan	47		224 %
2 22 01 2 02	Administrasi keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	1	3	Laporan	9		75%
2 23 02 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	0rang	20	0rang	20	0rang	20	0rang	1	20	0rang	36		75%
2 23 02 2 02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	1	12	Dokumen	36		75%
# 02 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keungan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	1	14	Laporan	42		65%
	Administrasi Perangkat Daerah		100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300%
	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	16	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	1	4	Laporan	12		75%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiata Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daera s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahu berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstr (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
			Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan		Jml	Satuan	Jml	Satuan	
	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang di sediakan														
2 22 01 2 06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	1	12	Laporan	36		75%
2 22 01 2 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penambahan Aset**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300%
2 22 01 2 07 0010	Pengadaan sarana dan prasaranaGedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1	unit	1	unit	0	unit	0	unit	1	35	unit	35		3.500 %
2 22 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300%
2 22 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dadn Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dadn Listrik yang di sediakan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	1	12	Laporan	36		75%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	48	Laporan	12	laporan	12	laporan	12	Laporan	1	12	laporan	36		75%
2 22 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Darah Penunjang**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiata Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daera s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahu berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstr (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
			Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan		Jml	Satuan	Jml	Satuan	
	Urusan Pemerintah Daerah															
2 22 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas OPerasional atau laporan yang di pelihara dandi bayarkan pajak dan perijinannya	9	unit	9	unit	9	unit	9	unit	1	10	unit	28		311 %
7 01 01 2 09 0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dipelihara /direhabilitasi	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300%
7 01 01 2 09 0010	Pemeliharaan /Rehabiltasi Sarana dan Prsaranana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prsaranana Geduung Kantor atau Bangunan Lainnya	23	unit	23	unit	23	unit	23	unit	1	23	unit	69		75%
7 01 02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300%
7 01 02 2 01	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***		100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300%
7 01 02 2 01 0001	*Koordinasi*	Jumlah Laporan	6	laporan	6	laporan	6	laporan	6	laporan	1	6	laporan	18		300 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiata Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daera s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahu berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstr (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan		Jml	Satuan	Jml	Satuan	
	/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
7 01 02 2 01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	1	12	laporan	36		300 %
7 01 02 2 04	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300%
7 01 02 2 04 0002	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	1	12	laporan	36		75%
7 01 03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300%
7 01 03 2 01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan*	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiata Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daera s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahu berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstr (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
			Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan		Jml	Satuan	Jml	Satuan	
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
7 01 03 2 01	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	7	laporan	7	laporan	7	laporan	7	laporan	1	7	laporan	21		300%
7 01 05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300%
7 01 05 2 01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300%
7 01 05 2 01 0001	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40	orang	40	orang	40	orang	40	orang	1	40	orang	40		306 %
7 01 05 2 01	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	laporan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	1	4	laporan	12		75%
7 01 06	**Program Pembinaan dan**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiata Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daera s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahu berjalan (2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstr (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
			Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan		Jml	Satuan	Jml	Satuan	
	Pengawasan Pemerintahan	**Pemerintahan Desa**														
7 01 06 2 01	***Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya***	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300		300%
7 01 06 2 01 0017	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5	Laporan	5	laporan	5	laporan	5	laporan	1	5	laporan	15		68 %

Sedangkan untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Kokap sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3. Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Kokap Tahun 2024

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sub Kegiatan perangkat daerah berkinerja sangat tinggi*	%	100
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Presentase Peningkatan Pelayanan Kapanewon	%	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Presentase Peningkatan Pemberdaayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	%	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	94,74
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100
Program Penyelenngaraan Keistimewaan Yogyakartaa Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	%	100
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kabudayaan	%	100

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Kokap sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Kokap

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan serta Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kapanewon;
f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kalurahan; dan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kalurahan.

Keberhasilan pembangunan di Kapanewon Kokap merupakan bagian keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan keserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kapanewon Kokap dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kapanewon dan Desa. Kinerja Pelayanan di Kapanewon Kokap dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Kokap disajikan pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2. 5.Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Rata -rata Presentase Pencapaian Program pada masing-masing Perangkat Daerah				100	100	100		100	100	100		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84,50	84,75	85,00		89,3	84,50	84,75		
3	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon				98,25	99,12	100		98,25	99,12	100		

2.3. Isu-isu Penting/ Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

10.3.1. Tingkat Pelayanan OPD dan hal kritis terkait pelayanan

Kapanewon Kokap sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kapanewon Kokap masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan kedepan, terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang perlu ditingkatkan.
2. Belum lengkapnya sarana dan prasarana kantor platform dasar pelaksanaan tugas.
3. Terbatasnya pagu anggaran yang dialokasikan.
4. Tata kearsipan belum teratur, karena minimnya tempat penyimpanan arsip/dokumen.

10.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD adalah :

1. Belum terpenuhinya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya kesalahan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terutama dalam hal kenaikan pajak / NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga memberatkan masyarakat. Disamping itu disebabkan pula oleh karena adanya wajib pajak yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Kulon Progo. Kemudian juga kinerja aparat pemungut yang rendah, dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang.
2. Kualitas dan kuantitas SDM karyawan Kapanewon yang mana pada tahun ini ada 2 (orang) karyawan yang purna tugas;
3. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal;
4. Proses Perencanan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat Kabupaten kurang terintegrasi dan koordinasi denganpengampu kepentingan di tingkat Kapanewon dan Kalurahan;
5. Terdapat lokasi-lokasi rawan bencana, kejahatan, dan ketertiban.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kapanewon Kokap secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran program pembangunan di Kabupaten Kulon Progo diantaranya sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya pembayaran pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) memberikan dampak berkurangnya sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan lain yang secara tidak langsung juga bisa memberikan dampak terhadap pencapaian visi dan misi dari sektor pendidikan dan kesehatan.

10.3.3. Tantangan dan Peluang dalam rangka meningkatkan Pelayanan OPD adalah :

a. Tantangan

Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan. Tantangan Kapanewon Kokap dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan adalah :

a) Kalurahan sebagai penyelenggaraan otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas perangkat desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga mampu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
b) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas;
c) Banyaknya bantuan dana untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat misikin, menuntut adanya sistem pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan yang profesional dan akuntabel;
d) Perubahan peraturan perundang-undangan yang begitu cepat dalam berbagai bidang membutuhkan proses adaptasi, kemampuan, dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi setiap proses perubahan.

b. Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkrit maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kapanewon Kokap, yaitu :

a) Kepanewon Kokap berwenang melaksanakan proses, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan organisasinya;
b) Kapanewon Kokap memiliki perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
c) Potensi Kapanewon Kokap cukup besar bila dikembangkan seperti potensi agrowisata, potensi agribisnis, pertanian, perkebunan, dan peternakan;
d) Kapanewon Kokap memiliki banyak tempat wisata dansentra bisnis kuliner yang dapat dikembangkan sehingga diharapkan dapat membantu mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada, untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat;

10.3.4. Formulasi Isu-isu penting dan Rekomendasi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kokap, ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

1) Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi;
2) Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
3) Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar;
4) Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon;
5) Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
6) Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.

Dengan adanya isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kokap maka perlu adanya rekomendasi untuk kedepannya berupa:

1. Dilakukannya pelatihan khusus bagi Aparatur Kapanewon dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan;
2. Tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai;
3. Perlunya pelatihan bagi masyarakat Kapanewon Kokap agar berhasil guna dan berdaya guna.

2.4. Reviu Terhadap Ranwal

Rancangan RENJA Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026. Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kapanewon Kokap. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu terhadap Rancangan Awal Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2. 6. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Kapanewon Kokap

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program penyelenggaraan Keistimewaan yogyakarta urusan Kebudayaan	Kapanewon kokap	Realisasi pelaksanaan program **kegiatan urusan kebudayaan**	100	100.000.000	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	Kapanewon kokap	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	100	100.000.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				100.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Kapanewon kokap	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	100.000.000	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100.000.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Kapanewon kokap	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan kesiatimewaan dengan regulasi**	100%	100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah program Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
	Pembinaan	Kap.	Jumlah Laporan Gelar	1	100.000.00	Pembinaan	Kap.	Jumlah Laporan Gelar	1	100.000.0	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kokap	Budaya Yogyakarta	Laporan	0	Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kokap	Budaya Yogyakarta	Laporan	00	
II	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
	Sekretariat Daerah				18,437,000.00	Sekretariat Daerah				18,437,000.00	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan kesiatimewaan dengan regulasi**	100%	18,437,000.00	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan kesiatimewaan dengan regulasi**	100%	18,437,000.00	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	***100***	***18,437,000.00***	***Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan***			***2 Dokumen***	***18,437,000.00***	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	18,437,000.00	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	18,437,000.00	
III	**Unsur Kewilayahan**					**Unsur Kewilayahan**					
	Kecamatan					**Kecamatan**					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**2.019.176.809**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**2.173.725.798**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat***	***3***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja***		***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja***	***24***		

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perangkat Daerah		***Waktu***	***Dokumen***	***8.537.400,00***	***Perangkat Daerah***		***Disampaikan Tepat Waktu***	***Dokumen***	***8.537.400,00***	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4,976,000.00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4,976,000.00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	3,561,400.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	3,561,400.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu***	***14 Laporan***	***1.290.350.057,00***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu***	***14 Laporan***	***1.290.350.057,00***	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Kokap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 orang/bulan	1,259,159,157.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Kokap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 orang/bulan	1,259,159,157.00	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	27,532,900.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	27,532,900.00	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3,658,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3,658,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Jumlah Dokumen Administrasi Umum***	***2 Dokumen***	***15.909.800,00***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Jumlah Dokumen Administrasi Umum***	***2 Dokumen***	***15.909.800,00***	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Kokap	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,709,800.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Kokap	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,709,800.00	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	11,200,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	11,200,000.00	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang***	***24 Laporan***	***123.938.306,00***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang***	***24 Laporan***	***123.938.306,00***	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27,923,543.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27,923,543.00	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	96,014,763.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	96,014,763.00	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	***3 Laporan***	***71.542.800,00***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***71.542.800,00***	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Kokap	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	56,526,700.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Kokap	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	56,526,700.00	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			i					i			
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kokap	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,016,100.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kokap	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,016,100.00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**26.574.296,00**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**26.574.296,00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		***Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***6 Dokumen***	***21.173.096,00***	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***		***Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***6 Dokumen***	***21.173.096,00***	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi			

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Kokap	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	10,942,400,00	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Kokap	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	10,942,400,00	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10,230,696.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10,230,696.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		***Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan***	***12 Dokumen***	***5,401,200.00***	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***		***Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan***	***12 Dokumen***	***5,401,200.00***	
1	Pelaksanaan Urusan	Kap.	Jumlah Dokumen Non	12	*5,401,200.00*	Pelaksanaan Urusan	Kap.	Jumlah Dokumen Non	12	*5,401,200.00*	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kokap	Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kokap	Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	*0*	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	**12,862,300.00**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	**12,862,300.00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		***Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan***	***1 Laporan***	**12,862,300.00**	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***		***Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan***	***1 Laporan***	**12,862,300.00**	
1	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12,862,300.00	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12,862,300.00	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		***48.007.541,00***	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		***48.007.541,00***	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***4 Laporan***	***48.007.541,00***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah***		***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***4 Laporan***	***48.007.541,00***	
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Kokap	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3 Laporan	20,325,641.00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Kokap	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3 Laporan	20,325,641.00	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	27,681,900.00	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Kokap		1 Laporan	27,681,900.00	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**8,145,500.00**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**8,145,500.00**	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya***	***5 Laporan***	**8,145,500.00**	***Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***		***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya***	***5 Laporan***	**8,145,500.00**	
1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	8,145,500.00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	8,145,500.00	

No	RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah Pagu Dana Kegiatan				2.293.873.109	Jumlah Pagu Dana Kegiatan				2.537.013.098	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Kokap diperoleh dari berbagai kegiatan. Usulan program Tahun 2026 dikirim kepada Bappeda Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.

Sedangkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Kapanewon selama ini tidak pernah ada.

Tabel 2. 7. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

No.	Program / Kegiatan	Lokasi (Desa dan Kapanewon)	Sasaran Program / Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	--	--	--	--	--

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TelaahanTerhadap Kebijakan Nasional

Renja yang disusun berpedoman kepada RKPD dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2026 Pemerintah (RKP). Tema Rencana Kerja Tahun 2026. Pemerintah Tahun 2026 (RKP Tahun 2026) yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026 meliputi:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
b. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
c. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
d. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan IndustriKreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi MelaluiPeran Aktif Koperasi
e. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
f. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
g. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
h. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
i. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Asta Cita sebagai landasan untuk “ Bersama menuju indonesia emas 2045 “:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional
3. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender
5. Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi
6. Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi
7. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba
8. Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran di dasarkan tas ruumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang di kaitkan sasaran target kinerja Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo . Tujuan dan Sasaran perangkat daerah kapanewon kokap mendukung visi kepala Daerah yaitu berkelanjutan dan misi ke tiga kepala daerah mewujuudkan Tata Kelola Pemrintah yang Good Govermance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang aman dan Demokratis. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1.

Tabel 3. 1.Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,90
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,23
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,00

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-

tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada Renstra dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun Indikator program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Kokap Tahun 2026 adalah seperti Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2.

Program dan Kegiatan Tahun 2026

No	Urusan, Progra, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
II	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100%	18.437.000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			2 Dokumen	18.437.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	18.437.000	
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.173.725.798	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu	23 Dokumen	8.537.400	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.976.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	21 Dokumen	3.561.400	

No	Urusan, Progra, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
			Perangkat Daerah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksana tugas ASN	26 Dokumen	1.290.350.057	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Kokap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 orang/bula n	1.259.159.157	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen HasilPenyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	27.532.900	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	3.658.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum	16 Dokumen	15.909.800	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Kokap	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.709.800	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	11.200.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik yang di sediakan	24 Laporan	123.938.306	
1	Penydiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.923.543	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Kokap	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	96.014.763	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11 unit	71.542.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Kokap	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	56.526.700	
1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kokap	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi	1 Unit	15.016.100	
IV	Program Penyelenggaraan		Persentase Peningkatan Pelayanan	100%	26.574.296	

No	Urusan, Progra, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Kecamatan			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13 laporan/dokumen	21.173.096	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	10.942.400	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.230.696	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	5.401.200	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Kokap	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	5.401.200	
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	100%	12.862.300	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas giatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12.862.300	
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12.862.300	
VI	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	48.007.541	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesua Ketugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4 laporan	48.007.541	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Kokap	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3 laporan	20.325.641	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai	Kap. Kokap	Jumlah Laporan Konflik yang	1 Laporan	27.681.900	

No	Urusan, Progra, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan		Ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan			
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	8.145.500	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	8.145.500	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Kokap	Jumlah LaporanHasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	8.145.500	
	Jumlah Pagu Dana Kegiatan				2.537.013.098	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
g. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan:

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan:
   a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
   b. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, meliputi kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan:
Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang meliputi sub kegiatan:

a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;

b. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan:

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

F. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, meliputi kegiatan:

Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang meliputi sub kegiatan: Gelar Budaya Jogja.

G. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan:

Penerapan Kelembagaan dan Ketatalaksanaann Keistimewaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026 serta pendanaan Kapanewon Kokap dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAPANEWON KOKAP KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON KOKAP						**1.763.299.612,00**							**1.802.427.900,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*	-			100 Persen	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	100.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		100.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**18.437.000,00**							**20.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**18.437.000,00**							**20.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**18.437.000,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah dokumen hasil penerapan kaistiwemaan di kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan yang didampingi*	-			3 dokumen	18.437.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	20.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	18.437.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		20.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.644.862.612,00**							**1.682.427.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.644.862.612,00**							**1.682.427.900,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.519.291.312,00**						**-**	**1.532.047.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.519.291.312,00**	-	-	-	-	-	-	**1.532.047.100,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.917.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	8.917.300,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4.355.900,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		4.355.900,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	3.561.400,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		4.561.400,00	KAPANEWON KOKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.288.496.457,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	1.290.496.457,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.259.159.157,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		1.258.159.157,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			-				-	26.194.100,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		28.194.100,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.143.200,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		4.143.200,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 dokumen	24.904.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	29.709.800,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4.709.800,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		5.709.800,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	20.195.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		24.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	123.617.555,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	127.923.543,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	27.923.543,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		29.923.543,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	95.694.012,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		98.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	74.355.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	75.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	56.524.600,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		58.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.736.400,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		9.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	10.094.200,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		8.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**56.556.100,00**						**-**	**65.154.900,00**	
		[Persentase Pelayanan Non Perizinan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56.556.100,00**	-	-	-	-	-	-	**65.154.900,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*	-			100 Persen	51.154.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	55.154.900,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	40.924.400,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		42.924.400,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	10.230.500,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		12.230.500,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah dokumen non perizinan usaha yang di laksanakan*	-			12 dokumen	5.401.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	10.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	5.401.200,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		10.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**12.862.300,00**						**-**	**15.862.300,00**	
		[Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.862.300,00**	-	-	-	-	-	-	**15.862.300,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya*	-			5 dokumen	12.862.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	15.862.300,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			-				-	12.862.300,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		15.862.300,00	KAPANEWON KOKAP
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**48.007.400,00**						**-**	**59.363.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.007.400,00**	-	-	-	-	-	-	**59.363.600,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	48.007.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	59.363.600,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				40 orang Orang	20.325.600,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		29.681.800,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	27.681.800,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		29.681.800,00	KAPANEWON KOKAP
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**8.145.500,00**						**-**	**10.000.000,00**	
		[Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.145.500,00**	-	-	-	-	-	-	**10.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	8.145.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	10.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	8.145.500,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		10.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	J U M L A H							**1.763.299.612,00**							**1.802.427.900,00**	

BAB V
P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 (Renja) Kapanewon Kokap Tahun 2026 ini merupakan Rencana Kerja Tahun 2026 tahunan, dalam menunjang pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kulon Progo. Rencana Kerja Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman bagi Kapanewon Kokap dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kapanewon Kokap. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Kokap ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan serta merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya misi pemerintah daerah.

Keberhasilan Penyusunan Renja Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 tidak terlepas dari peran aktif dan tanggungjawab seluruh pegawai Kapanewon Kokap serta stakeholder yang bersangkutan.

Kokap,29 Juli 2025

Panewu Kokap

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KOKAP

MARSI, S.I.P .,M.PA

NIP. 19680305 199603 2 003

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KAPANEWON GIRIMULYO TAHUN 2026



KAPANEWON GIRIMULYO
ALAMAT : NGLENGKONG, GIRIPURWO, GIRIMULYO, KULON PROGO, D.I.YOGYAKARTA
WEBSITE : GIRIMULYO.KULONPROGOKAB.GO.ID. E-MAIL :
GIRIMULYO@KULONPROGOKAB.GO.ID

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **1**
DAFTAR ISI **2**
KATA PENGANTAR **4**
BAB I PENDAHULUAN **5**
1.1 Latar Belakang 5
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 8
1.4. Sistematika penulisan 8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ... **9**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21
2.3 Isu-isu Penting/ Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 23
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 24
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **33**
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 33
3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah 33
3.3. Program dan Kegiatan 34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **38**
BAB V PENUTUP **59**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Girimulyo Tahun 2025 10
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan IV Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo 11
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo 22
Tabel 2. 4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo 25
Tabel 2. 5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026..... 32
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 34
Tabel 3. 2 Program dan Kegiatan Tahun 2026..... 35

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan perkenan-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 dapat diselesaikan. Renja Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RKPD Tahun 2026.

Renja Kapanewon Girimulyo memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, dan penutup. Renja yang telah disusun akan menjadi alat kontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun akan datang serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 tahun dan sebagai pedoman penyusunan penganggaran tahunan/RKA dan DPA melalui proses penetapan APBD Kabupaten.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renja Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Semoga dokumen Renja yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Girimulyo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Girimulyo, 29 Juli 2025
PANEWU GIRIMULYO

RADEN SUKIRNO, S.IP., M.M
NIP.19700124 199203 1 004

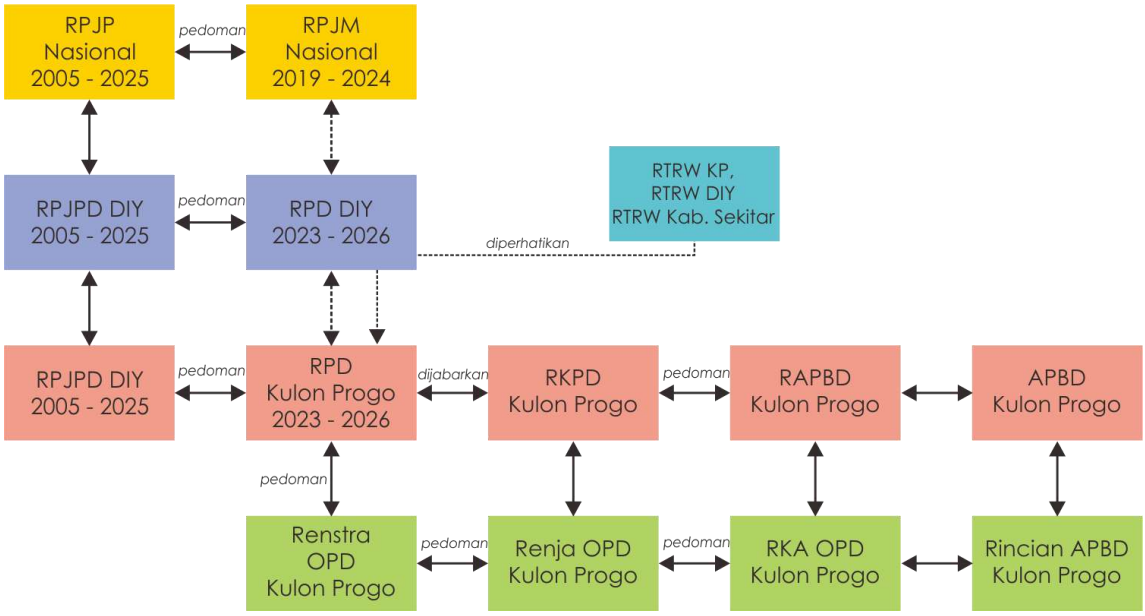
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan (c) Rencana Pembangunan Tahunan. Salah satu dokumen perencanaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tersebut yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD. Rancangan Akhir Renja merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja OPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan/RKA dan DPA melalui proses penetapan APBD Kabupaten. Proses penyusunan Rancangan Akhir Renja disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Adapun keterkaitan dokumen perencanaan dan proses penyusunan perencanaan hingga penganggaran dijelaskan dalam gambar berikut.



Gambar 1. 1. Keterkaitan perencanaan dan penganggaran

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) saling terkait dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD. Sementara RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun mengacu dari RPJMD, dan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber sah lainnya, yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita yang ingin diwujudkan. Untuk itu pemerintah harus bisa merespon atau menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang memuaskan terlebih yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya. Rancangan Akhir Renja disusun berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan dan diselaraskan dengan plafon anggaran yang tersedia, dengan harapan usulan tersebut dapat diakomodir dengan anggaran sehingga bisa dilaksanakan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPD dan RKPD;
7. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026; (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 31)
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 disusun dengan maksud memberikan tujuan, sasaran, strategis dan program yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dalam upaya percepatan pencapaian program pembangunan daerah. Selain itu, merupakan acuan bagi proses penganggaran tahunan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kapanewon Girimulyo adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran dan program serta kegiatan Kapanewon Girimulyo tahun 2026;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Merumuskan indikator kinerja dan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

1.4. Sistematika penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu terhadap Ranwal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Girimulyo Tahun 2024 melaksanakan beberapa program dan kegiatan.

a. Adapun realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

   Tidak ada

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   8. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   9. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
   10. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   11. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
   12. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
   13. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

c. Realisasi program/kegiatan yang melampaui target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Tidak ada

Pengukuran kinerja Kapanewon Girimulyo didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah :

Tabel 2. 1 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Girimulyo Tahun 2024

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,50	89,161
Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata Presentase Pencapaian Program pada masing-masing perangkat daerah	100	100

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Girimulyo sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Kapanewon Girimulyo

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
														Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2		3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
										Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan	Jml	Satuan		Jml	Satuan	Jml	Satuan	
							Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar																
							Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan																
							Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**		**100**	**%**	100	%	
2	2	2	8	5	7			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	**100**	%	**100**	%	**100**	%	**100**	%		**100**	%	100	%	

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
															Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2			3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
2	22	08		5	07	0006			Gelar Budaya Yogya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	even	0	0	1	Even	1	Even	100	1	even	1	even	100 %
							Unsur Pendukung Urusan Pemerintah																	
							Sekretariat Daerah																	
4	01	04					**Program PenyelenggaraanKeistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**			**Pesesntase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**100**	**%**	300	%	300%
4	01	04	5'06				Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				**100**	%	**100**	%	**100**	%	**100**	%		**100**	%	300	%	300%
							Perencanaan dan pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan	100	%	100	%	100	%	100	%		100	%	300	%	300%

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
4	01	04	5'06	6	0001	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2	Laporan			4	Dokumen	4	Dokumen	1	2	Laporan	6	Laporan	300%
7							Unsur Kewilayahan															
7	01						Kecamatan															
7	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	%	300%
7	01	01	2	01			Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi kinerja prangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	%	300%
7	01	01	2	01	0001		Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	1	4	Dokumen	10		500%
2	23	02	3	02	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Laporan	21	Laporan	21	Laporan	21	Laporan	1	21	Laporan	63		300%

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
2	22	01	2	02			Administrasi keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	1	3	Laporan	9		75%
2	23	02	2	02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	0rang	20	0rang	20	0rang	20	0rang	1	20	0rang	60		300%
2	23	02	2	02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	1	12	Dokumen	36		75%
23	02	2	02	0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keungan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	1	14	Laporan	42		65%
							Administrasi Perangkat Daerah		100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	%	300%
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	20	Laporan	5	Laporan	5	paket	5	paket	1	5	paket	15		75%

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
2	22	01	2	06			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	1	12	Laporan	36		75%
2	**22**	**01**	**2**	**07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penambahan Aset**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	%	300%
2	22	01	2	07	0010		Pengadaan sarana dan prasaranaGedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1	unit	1	unit	0	unit	0	unit	0	1	unit	1		100%
2	**22**	**01**	**2**	**08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	%	300%
2	22	01	2	08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dadn Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dadn Listrik yang di sediakan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	1	12	Laporan	36		75%

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	48	Laporan	12	laporan	12	laporan	12	Laporan	1	12	laporan	36		75%
2	**22**	**01**	**2**	**09**			**Pemeliharaan Barang Milik Darah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	%	300%
2	22	01	2	09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas OPerasional atau laporan yang di pelihara dandi bayarkan pajak dan perijinannya	12	unit	12	unit	12	unit	12	unit	1	12	unit	36		300%
7	01	01	2	09	0010		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dipelihara /direhabilitasi	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	%	300%

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
7	01	01	2	09	0010		Pemeliharaan /Rehabiltasi Sarana dan Prsaranana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prsaranana Geduung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	unit	12	unit	12	unit	12	unit	1	12	unit	36		300%
7	01	02					**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	%	300%
7	01	02	2	01			***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***		100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	%	300%
7	01	02	2	01	0001		*Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal*	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	lapo ran	6	lapor an	6	lapo ran	6	lapora n	1	6	lapor an	18		300%

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
7	01	02	2	01	0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	lapo ran	12	lapor an	12	lapo ran	12	lapora n	1	12	lapor an	36		300%
7	01	02	2	04			***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	%	300%
7	01	02	2	04	0002		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	lapo ran	12	lapor an	12	lapo ran	12	lapora n	1	12	lapor an	36		75%
7	01	03					**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	%	300%
7	01	03	2	01			*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	%	300%

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
7	01	03	2	01			Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	6	lapo ran	6	lapor an	6	lapo ran	6	lapora n	1	6	lapor an	18		300%
7	01	05					**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	%	300%
7	01	05	2	01			***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	%	300%
7	01	05	2	01	0001		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	37	oran g	37	orang	37	oran g	37	orang	1	37	oran g	111		300%

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
7	01	05	2	01			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	laporan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	1	4	laporan	12		75%
7	01	06					**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	%	300%
7	01	06	2	01			***Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya***	100	%	100	%	100	%	100	%	1	100	%	300	%	300%
7	01	06	2	01	0017		Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5	Laporan	5	laporan	5	laporan	5	laporan	1	5	laporan	15		68%

2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan dan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kapanewon;
f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kalurahan; dan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kalurahan.

Keberhasilan pembangunan di Kapanewon Girimulyo merupakan bagian keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan keserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kapanewon Girimulyo dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kapanewon dan Desa. Kinerja Pelayanan di Kapanewon Girimulyo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
2. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
3. Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Girimulyo disajikan pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(12)
1	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah			100	100	100		100	100	100		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84.50	84.75	85.00		89.161	89,171	89,181		
3	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon			98.25	99.12	100		98.25	99.12	100		

2.3. Isu-isu Penting/Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD adalah :

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kapanewon yang belum sesuai standar dan kebutuhan pelayanan.
2. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan belum berjalan dengan optimal;
3. Fasilitasi kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal;
4. Perubahan peraturan perundangan yang begitu cepat;
5. Banyak kegiatan yang belum bisa tercover dalam DPA OPD;
6. Wilayah Girimulyo yang berupa dataran tinggi dan pegunungan sering terjadi longsor;
7. Peningkatan angka penderita stunting;
8. Wilayah Girimulyo yang merupakan wilayah yang rawan akan kekeringan di musim kemarau menjadikan girimulyo kekurangan air bersih.
9. Berada di wilayah perbatasan provinsi dan harus berkoordinasi antar wilayah jika terjadi permasalahan.
10. Adanya pembatasan kegiatan karena refokusing anggaran.

2.3.2. Tantangan dan Peluang dalam rangka meningkatkan Pelayanan OPD adalah :

a. Tantangan

Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat relatif masih rendah.

b. Peluang

1) Potensi Kapanewon Girimulyo cukup besar bila dikembangkan, seperti hamparan tanah kosong yang sangat luas, potensi agrowisata, potensi agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan.
2) Adanya komitmen Bupati untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan peningkatan sarana prasarana wilayah dan
3) Sebagai penyangga kawasan wisata;
4) Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.

2.3.3. Formulasi Isu-isu penting dan Rekomendasi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Girimulyo, ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

1) Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi;
2) Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
3) Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar;
4) Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon;
5) Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan;
6) Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.

Dengan adanya isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Girimulyo maka perlu adanya rekomendasi untuk kedepannya berupa:

1. Dilakukannya pelatihan khusus bagi Aparatur Kapanewon dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur;
2. Tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai;
3. Perlunya pelatihan bagi masyarakat Kapanewon Girimulyo agar berhasil guna dan berdaya guna.

2.4 Reviu Terhadap RKPD

RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kapanewon Girimulyo. Untuk lebih jelasnya mengenai reviu RKPD Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2. 4

Reviu Terhadap RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kulon Progo

Nama OPD : Kapanewon Girimulyo

No	RKPD 2026					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Kapanewon Girimulyo**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**100**	**100.000.000,00**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Kapanewon Girimulyo**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**100**	**100.000.000,00**	
1	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	100.000.000,00	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	100.000.000,00	
II	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan kesiatimewaan dengan regulasi**	**100**	21.461.000,00	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan kesiatimewaan dengan regulasi**	**100**	21.461.000,00	
1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2	21.461.000,00	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2	21.461.000,00	
III	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi**	**100**	**1.410.098.657,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi**	**100**	**1.410.098.657,00**	

No	RKPD 2026					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Girimulyo**		**25**	**13.681.000,00**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Girimulyo**		**25**	**13.681.000,00**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	7,694,700.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	7.694.700,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	5,986,300.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	5.986.300,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Girimulyo**		**320**	**1.396.417.657,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Girimulyo**		**320**	**1.396.417.657,00**	
1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kapanewon Girimulyo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	308	1.359.159.157,00	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kapanewon Girimulyo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	308	1.359.159.157,00	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	30.700.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	30.700.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	6.558.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	6.558.500,00	

No	RKPD 2026					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Girimulyo**		**17**	**32.742.700,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Girimulyo**		**17**	**32.742.700,00**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Girimulyo	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	14.142.700,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Girimulyo	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	14.142.700,00	
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	18.600.000,00	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	18.600.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kapanewon Girimulyo**			24.890.120,00	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kapanewon Girimulyo**			24.890.120,00	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		24.890.120,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		24.890.120,00	
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Girimulyo			**0,00**	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Girimulyo			**0,00**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Girimulyo**			**120.136.060,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Girimulyo**			**120.136.060,00**	

No	RKPD 2026					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	95.694.012,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	95.694.012,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	24.442.048,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	24.442.048,00	
	Pemeliharaan Barang miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Girimulyo**	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**		**180.212.000,00**	**Pemeliharaan Barang miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Girimulyo**	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**		**180.212.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lainnya	Kapanewon Girimulyo	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	68.964.800,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lainnya	Kapanewon Girimulyo	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	68.964.800,00	
	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	99.148.000,00	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	99.148.000,00	

No	RKPD 2026					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kapanewon Girimulyo	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	12.099.2000,00	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kapanewon Girimulyo	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	12.099.200,00	
I V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**100**	**37,978,095,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**100**	**77.013.500,00**	
	Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Girimulyo**		**10**	**68.445.200,00**	**Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Girimulyo**		**10**	**68.445.200,00**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait	10	53.604.700,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Girimulyo	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10	53.604.700,00	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Girimulyo	Jumlah dokumen peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	14.840.500,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Girimulyo	Jumlah dokumen peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	14.840.500,00	

No	RKPD 2026					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	**Kapanewon Girimulyo**		**5**	**8.568.300,00**	**Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Kapanewon Girimulyo**		**5**	**8.568.300,00**	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kapanewon Girimulyo	Jumlah dokumen nonperizinan usaha yang dilaksanakan	12	8.568.300,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kapanewon Girimulyo	Jumlah dokumen nonperizinan usaha yang dilaksanakan	12	8.568.300,00	
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang tepat waktu**	**100**	**28.951.100,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang tepat waktu**	**100**	**28.951.100,00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kapanewon Girimulyo**			**28.951.100,00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Girimulyo**			**28.951.100,00**	
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	28.951.100,00	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Girimulyo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	28.951.100,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kapanewon Girimulyo	**Persentase Penanganan gangguan trantibum**	9737	**90.905.800,00**	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kapanewon Girimulyo	**Persentase Penanganan gangguan trantibum**	9474	**90.905.800,00**	

No	RKPD 2026					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaipenugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Girimulyo**			**90.905.800,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaipenugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Girimulyo**			**90.905.800,00**	
1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kapanewon Girimulyo	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	37	30.502.200,00	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kapanewon Girimulyo	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	37	30.502.200,00	
2	Penangan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan	Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	60.403.600,00	Penangan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan	Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	60.403.600,00	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu**	**100**	**27.950.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kapanewon Girimulyo**	**Persentase Dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu**	**100**	**27.950.000,00**	
		Kapanewon Girimulyo			**27.950.000,00**		**Kapanewon Girimulyo**			**27.950.000,00**	
		Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	5	27.950.000,00		Kapanewon Girimulyo	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	5	27.950.000,00	
Jumlah					Rp2.114.361.000,00	Jumlah				Rp2.114.361.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Girimulyo diperoleh dari berbagai kegiatan. Usulan program tahun 2026 dikirim kepada Bapperida Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.

Sedangkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Kapanewon selama ini tidak pernah ada.

Tabel 2. 5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No.	Program / Kegiatan	Lokasi (Desa dan Kapanewon)	Sasaran Program / Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	--	--	--	--	--

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja yang disusun Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD dan Kebijakan Nasional,selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan,RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Visi,Misi dan Program Presiden.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu *"Bersama Indonesia Maju,Menuju Indonesia Emas 2045"* Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita yaitu sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Girimulyo mendukung visi Kepala Daerah yaitu " Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan .Misi ketiga Kepala Daerah,Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance,Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun 2026
					Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,90
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,23
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	8,181

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Indikator program Tahun 2026 yang akan dilaksanakan Kaanewon Girimulyo adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Program dan Indikator Program Tahun 2026

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
			TARGET	RP		
I	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**100**	**100.000.000,00**	**Kapanewon Girimulyo**	
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	100.000.000,00	Kapanewon Girimulyo	
II	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan kesiatimewaan dengan regulasi**	**100**	21.461.000,00	**Kapanewon Girimulyo**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2	21.461.000,00	Kapanewon Girimulyo	
III	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi**	**100**	**1.410.098.657,00**	**Kapanewon Girimulyo**	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**13.681.000,00**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	7.695.700.00	Kapanewon Girimulyo	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	5.986.300,00	Kapanewon Girimulyo	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**1.396.417.657,00**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	308	1.359.159.157,00	Kapanewon Girimulyo	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	30.700.000,00	Kapanewon Girimulyo	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	6.558.500,00	Kapanewon Girimulyo	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**32.742.700,00**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	14.142.700,00	Kapanewon Girimulyo	

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
			TARGET	RP		
2	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	18.600.000,00	Kapanewon Girimulyo	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**24.890.120,00**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		24.890.120,00	Kapanewon Girimulyo	
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			**Kapanewon Girimulyo**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**120.136.060,00**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	95.694.012,00	Kapanewon Girimulyo	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	24.442.048,00	Kapanewon Girimulyo	
	Pemeliharaan Barang miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**		**180.212.000,00**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lainnya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	68.964.800,00	Kapanewon Girimulyo	
2	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	99.148.000,00	Kapanewon Girimulyo	
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	12.099.200,00	Kapanewon Girimulyo	
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**100**	**77.013.500,00**	**Kapanewon Girimulyo**	
	Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**68.445.200,00**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Instansi Vertikal Terkait	10	53.604.700,00	Kapanewon Girimulyo	

=

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
			TARGET	RP		
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	14.840.500,00	Kapanewon Girimulyo	
	Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			**8.568.300,00**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen nonperizinan usaha yang dilaksanakan	12	8.568.300,00	Kapanewon Girimulyo	
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang tepat waktu**	**100**	**28.951.100,00**	**Kapanewon Girimulyo**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			**28.951.100,00**		
1	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	28.951.100,00	Kapanewon Girimulyo	
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penanganan gangguan trantibum**	**9737**	**90.905.800,00**	**Kapanewon Girimulyo**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaipenugasan Kepala Daerah			**90.905.800,00**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	37	30.502.200,00	Kapanewon Girimulyo	
2	Penangan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan	Jumlah laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	60.403.600,00	Kapanewon Girimulyo	
VII	**PROGRAM PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu**	**100**	**27.950.000,00**	**Kapanewon Girimulyo**	
	Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**27.950.000,00**	**Kapanewon Girimulyo**	
1	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	5	27.950.000,00	Kapanewon Girimulyo	
			Jumlah	Rp2.114.361.000,00		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan Kapanewon Girimulyo tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026, dengan memperhatikan jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif tahun 2026. Pagu indikatif tahun 2026 termasuk dana keistimewaan yaitu sebesar Rp2.114.361.000,- Sementara Rencana Kerja tahun 2026 terdiri dari 7 program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Girmulyo maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1 berikut :

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1,	**2,22,08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan kebudayaan***	**-**			**100 %**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.08.5.07. 0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a	DANA KEISTIMEW AAN DIY	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**21.461.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**21.461.000,00**							**0,00**	
1,	**4,01,04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi***	**-**			**100 %**	**21.461.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	21.461.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	21.461.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.992.899.937,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.992.899.937,00**							**0,00**	
1,	**7,01,01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi***	**-**			**100 %**	**1.768.079.537,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	13.681.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.694.700,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	5.986.300,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	1.396.417.657,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bul an	1.359.159.157,00	Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	30.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	6.558.500,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	32.742.700,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	14.142.700,00	Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	18.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	24.890.120,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	24.890.120,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	120.136.060,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	24.442.048,00	Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	95.694.012,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	180.212.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	68.964.800,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	99.148.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12.099.200,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
2,	**7,01,02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pelayanan non perizinan***	**-**			**100 %**	**77.013.500,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	68.445.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10 Laporan	53.604.700,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	14.840.500,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	8.568.300,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.04. 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	8.568.300,00	Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
3,	**7,01,03**	**PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase dokumen pembanguna n tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu***	**-**			**100 %**	**28.951.100,00**						**-**	**0,00**	

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	28.951.100,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.03.2.01. 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	28.951.100,00	Kab. Kulon Progo, Girimuly o, Semua Kel/Des a	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAA N BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
4,	**7,01,05**	**PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM**	***Persentase Penanganan gangguan trantibum***	**-**			**100 %**	**90.905.800,00**						**-**	**0,00**	

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	90.905.800,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				37 Orang	30.502.200,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	60.403.600,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
5,	**7,01,06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu***	**-**			**100 %**	**27.950.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Laporan Pelaksaanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	27.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON GIRIMULYO						**2.114.360.937,00**							**0,00**	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	27.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	J U M L A H							**2.114.360.937,00**							**0,00**	

=

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Girimulyo Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan, dalam menunjang pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kulon Progo. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi Kapanewon Girimulyo dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kapanewon Girimulyo. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kapanewon Girimulyo ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta tujuan dan sasaran Kabupaten Kulon Progo. Pencapaian IKU tahun 2024 seluruhnya memenuhi target. Namun, masih diperlukannya optimalisasi kinerja kapanewon dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Perlu adanya rekomendasi untuk kedepannya berupa pelatihan khusus bagi Aparatur Kapanewon dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur, tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai, dan perlunya pelatihan bagi masyarakat Kapanewon Girimulyo agar berhasil guna dan berdaya guna.

Keberhasilan Penyusunan Renja Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 tidak terlepas dari peran aktif dan tanggungjawab seluruh pegawai Kapanewon Girimulyo serta *stakeholder* yang bersangkutan.

Girimulyo, 29 Juli 2025
PANEWU GIRIMULYO

RADEN SUKIRNO, S.IP., M.M
NIP.19700424 199203 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
INSPEKTORAT DAERAH
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦤ꦳ꦠꦃꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꦳ꦏꦸꦭꦺꦴꦤ꦳ꦥ꦳ꦿꦺꦴꦒ꦳ꦺꦴ
Alamat : Jalan Sugiman Gang Bispa Wates, Kulon Progo
Telp : (0274) 773159, Fax : (0274) 773159
Website : https://inspektorat.kulonprogokab.go.id, Email : inspektorat@kulonprogokab.go.id

Wates, 29 September 2025

Nomor : 700/B. 566/IX/2025
Sifat : Rahasia
Lamp : 1 Bendel
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Reviu Atas Rencana Kerja dan Anggaran Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026

Kepada:
Yth. Bupati Kulon Progo
di-
Wates

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu (LHR), dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	: 700/Reviu/155.d/IX/2025
Tanggal	: 17 September 2025
Obyek Pemeriksaan	: Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo
Sasaran Reviu	: Rencana Kerja Anggaran Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026

Demikian agar menjadikan periksa.

a.n. INSPEKTUR DAERAH
SEKRETARIS,

TRI ARYANI, S.H.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197006281995032002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
   Cq.Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Panewu Girimulyo Kabupaten Kulon Progo.
3. Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo
4. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
INSPEKTORAT DAERAH
ꦲꦶꦤ꦳ꦺꦱ꦳ꦏ꦳ꦠꦺꦴꦫꦠ꦳ꦢꦺꦫꦃ꦳
Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo
Telp. (0274) 773159, Kode Pos 55652

Wates, 17 September 2025

Nomor : 700/Reviu/155.d//IX/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Bendel.
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026

Kepada :
Yth. BUPATI KULON PROGO
Di
Wates

Dengan hormat, bersama ini kami haturkan Laporan Hasil Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026, dengan hasil sebagai berikut :

A. RINGKASAN EKSEKUTIF.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta subkegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD. Berdasarkan Surat Edaran tersebut Kepala SKPD selaku PA/KPA menyusun RKA-SKPD di lingkup tugasnya masing-masing.

Inspektorat Daerah selaku APIP Daerah melakukan reviu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan pada konsideran Menimbang, yang berbunyi: "bahwa untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan, perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo".

Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 700.1.2/1146 tanggal 1 September 2025, Tim Inspektorat Daerah telah melakukan Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026, dengan simpulan sebagai berikut :

1. **Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rencana Kerja dan Anggaran Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026.**

   Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai.

   Tanggapan objek reviu:

   Sepakat dengan hasil Reviu.

2. **Pengujian Atas Kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.**

   Pengujian kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

   a. Terdapat **kesesuaian** Nama Program, Indikator Program dan Target Program RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026;

      Tanggapan objek reviu:

      Sepakat.

   b. Terdapat **kesesuaian** Nama Kegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 **akan tetapi terdapat ketidaksesuaian** antara Indikator Kegiatan dan Target Kegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026;

      Tanggapan objek reviu:

      Setuju/Sepakat.

c. Terdapat **kesesuaian** Nama Subkegiatan dan Pagu Subkegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 **akan tetapi terdapat ketidaksesuaian** antara Indikator Subkegiatan dan Target Subkegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026;

Tanggapan objek reviu:

Sepakat dengan hasil Reviu,

Untuk masalah ketidaksesuaian karena penarikan data aplikasi SIPD terbalik akan kami konsultasikan dengan Bapperida.

3. **Tidak terdapat penambahan Kegiatan dan Subkegiatan baru pada RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dalam PPAS Tahun Anggaran 2026.**

   Tanggapan objek reviu:

   Sepakat dengan hasil Reviu.

4. **Pengujian RKA Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 Atas Pengalokasian Anggaran Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi Belanja Operasi terdapat belanja yang menghasilkan aset tetap sebesar Rp. 99.648.000,00.

   Tanggapan Objek Reviu:

   Sepakat dengan hasil Reviu.

5. **Pengujian atas Pengalokasian Belanja Modal pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026**.

   Pada alokasi belanja modal **tidak terdapat** barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.

   Tanggapan Objek Reviu:

   Sepakat dengan hasil Reviu.

6. **Pengujian atas Pengalokasian Belanja Barang (persediaan) pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026**.

   Pada alokasi belanja barang (persediaan) tidak terdapat aset tetap yang akan diserahkan kepada Perangkat Daerah lain.

   Tanggapan Objek Reviu:

   Sepakat dengan hasil Reviu.

B. DASAR HUKUM.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026.
5. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 700.1.2/1146, tanggal 1 September 2025.

C. TUJUAN REVIU.

Tujuan dari dilaksanakannya Reviu Rencana Kerja dan Anggaran adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA-SKPD sesuai dengan KUA-PPAS Tahun 2026, kaidah-kaidah penganggaran dan kelengkapan dokumen pendukung RKA-SKPD Tahun 2026.

D. RUANG LINGKUP REVIU.

Ruang Lingkup Reviu Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas :

1. Kelengkapan Dokumen Pendukung Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2026.
2. Kesesuaian RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

E. METODOLOGI REVIU.

1. Reviu RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 meliputi langkah-langkah kerja reviu mulai dari penyusunan program reviu, pembentukan tim reviu, menyiapkan instrumen reviu, penelaahan informasi dan dokumen, menelusuri, menganalisis, membandingkan, evaluasi dan melakukan wawancara dengan objek reviu sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembanguan dan Anggaran Daerah Tahunan.

2. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor Nomor 700.1.2/1146 tanggal 1 September 2025, tentang Reviu atas (RKA)-SKPD Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 1 sampai dengan 11 September 2025.

Susunan Tim Reviu sebagai berikut :

Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab	:	Arif Prastowo, S.Sos, M.Si/Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo.
Penunjang Manajerial	:	Tri Aryani, SH.
Pembantu Penanggung Jawab	:	Arbingah Kartiningrum, S.IP., M.E.
Pengendali Teknis	:	Kasijan, S.IP., M.Si.
Ketua Tim	:	Heru Widiastuti, S.H.
Anggota Tim	:	1. Faisal Febrianta, S.T. 2. Luluk Maknunah, A.Md. 3. Diah Larasati, A.Md.
Penunjang Teknis Operasional Perencanaan	:	Marwoto, SE.
Penunjang Teknis Operasional Keuangan	:	Siti Rubangiyatin, S.IP.
Staf Administrasi	:	Purwanto.

F. GAMBARAN UMUM.

Berdasarkan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.1.2/1856 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya Kepala SKPD/Unit Kerja diminta untuk segera menyusun dan menyampaikan RKA SKPD dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

G. URAIAN HASIL REVIU.

1. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rencana Kerja dan Anggaran Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026.

Dokumen RKA Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 telah didukung dengan dokumen yang memadai dengan rincian sebagai berikut :

No.	Dokumen	Catatan Reviu			
		Ada	Tidak	Keterangan	Rekomendasi
1	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang RKPD Tahun 2026	v	-	-	-
2	Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tanggal 15 AGustus 2025	v	-	-	-
3	Nota Kesepakatan PPAS Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tanggal 15 Agustus 2025	v	-	-	-
4	Surat Edaran Kepala Daerah Nomor 900.1.1.2/1856 tentang Penyusunan RKA Tahun Anggaran 2026	v	-	-	-
5	Dokumen perencanaan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu	v	-	-	-

2. **Pengujian Kesesuaian RKA Kapanewon Girimulyo Tahun Anggaran 2025 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.**
   a. Terdapat **kesesuaian** Nama Program, Indikator Program dan Target Program RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026;
   b. Terdapat **kesesuaian** Nama Kegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 **akan tetapi terdapat ketidaksesuaian** antara Indikator Kegiatan dan Target Kegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026;
   c. Terdapat **kesesuaian** Nama Subkegiatan dan Pagu Subkegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 **akan tetapi terdapat ketidaksesuaian** antara Indikator Subkegiatan dan Target Subkegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026;

sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

RKA Tahun 2026				PPAS 2026			
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100 %		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100 %	
Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen		Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Lainnya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	
Gelar Budaya Jogya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000,00	Gelar Budaya Jogya	Jumlah laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100%		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan peng endalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100%	
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	21.461.000,00	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	21.461.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	100 %		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	100 %	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.694.700,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	7.694.700,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.986.300,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.986.300,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 Dokumen		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	1.359.159.157,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 Dokumen	1.359.159.157,00

RKA Tahun 2026				PPAS 2026			
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 Dokumen		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	30.700.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 Dokumen	30.700.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 Dokumen		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	6.558.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 Dokumen	6.558.500,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	14.142.700,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	14.142.700,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	18.600.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	18.600.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	24.890.120,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	24.890.120,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Laporan	

RKA Tahun 2026				PPAS 2026			
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu
					Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.442.048,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	24.442.048,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	95.694.012,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	95.694.012,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	3 Dokumen		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	68.964.800,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	3 Dokumen	68.964.800,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	3 Dokumen		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99.148.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	3 Dokumen	99.148.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	3 Dokumen		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	12.099.200,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	3 Dokumen	12.099.200,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan non perizinan	100 %		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan non perizinan	100 %	

RKA Tahun 2026				PPAS 2026			
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	8.568.300,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	8.568.300,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Laporan	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Laporan	53.604.700,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	53.604.700,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	14.840.500,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	14.840.500,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	100 %		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentas e Dokumen Pembangu nan Tingkat Ka panewon yang disa mpaikan Tepat Waktu	100 %	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	28.951.100,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	28.951.100,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan gangguan trantribum	100 %		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan gangguan trantribum	100 %	

RKA Tahun 2026				PPAS 2026			
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	37 Orang	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	37 Orang	30.502.200,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	30.502.200,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	60.403.600,00	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	60.403.600,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	100 %		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	100 %	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Pelaksaanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	27.950.000,00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan Pelaksaanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	27.950.000,00

Keterangan :

a. **Ketidaksesuaian** Indikator Kegiatan, Target Kegiatan, Indikator Subkegiatan dan Target Subkegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 disebabkan perintah menarik data pada aplikasi SIPD **terbalik** antara keluaran dan hasil, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara Indikator Kegiatan, Target Kegiatan, Indikator Subkegiatan dan Target Subkegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

b. Ketidaksesuaian informasi atas Indikator Kegiatan, Target Kegiatan, Indikator Subkegiatan dan Target Subkegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 diketahui dengan mencermati dokumen fisik RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan oleh SKPD.

3. **Tidak terdapat penambahan Kegiatan dan Subkegiatan baru pada RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dalam PPAS Tahun Anggaran 2026.**

4. **Pengujian RKA Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 atas Pengalokasian Anggaran Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi Belanja Operasi terdapat belanja yang menghasilkan aset tetap sebesar Rp. 99.648.000,00.

5. **Pengujian atas Pengalokasian Belanja Modal pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026**.

   Pada alokasi belanja modal **tidak terdapat** barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.

6. **Pengujian atas Pengalokasian Belanja Barang (persediaan) pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026**.

   Pada alokasi belanja barang (persediaan) tidak terdapat aset tetap yang akan diserahkan kepada Perangkat Daerah lain.

H. APRESIASI.

Tim Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh Tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 dan pejabat/pegawai Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo yang telah mendukung terlaksananya Kegiatan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026.

Demikian hasil reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

A.n. INSPEKTUR DAERAH

ARIF PRASTOWO, S.Sos, M.Si.
(Pembina Utama Muda ; IV/c)
NIP. 19700514 199603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
   Cq Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Panewu Girimulyo Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo;
4. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
INSPEKTORAT DAERAH
ꦲꦶꦤ꦳ꦺꦱ꦳ꦏ꦳ꦠꦺꦴꦫꦠ꦳ꦢꦲꦺꦫꦃ
Alamat : Jalan Sugiman Gang Bispa Wates, Kulon Progo
Telp : (0274) 773159, Fax : (0274) 773159
Website : https://inspektorat.kulonprogokab.go.id, Email : inspektorat@kulonprogokab.go.id

CATATAN HASIL REVIU
DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2026

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 700.1.2/1146 tanggal 1 September 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan Reviu Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026, dan bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut :

1. Pengujian Kelengkapan Dokumen

Dokumen RKA Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 telah didukung dengan dokumen yang memadai dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dokumen	Catatan Reviu			
		Ada	Tidak	Keterangan	Rekomendasi
1	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang RKPD Tahun 2026	v	-	-	-
2	Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tanggal 15 AGustus 2025	v	-	-	-
3	Nota Kesepakatan PPAS Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tanggal 15 Agustus 2025	v	-	-	-
4	Surat Edaran Kepala Daerah Nomor 900.1.1.2/1856 tentang Penyusunan RKA TA 2026	v	-	-	-
5	Dokumen perencanaan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu	v	-	-	-

Tanggapan Obyek Reviu: Sepakat dengan hasil reviu

2. Pengujian Kesesuaian RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026.

a. Terdapat **kesesuaian** Nama Program, Indikator Program dan Target Program RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026;

b. Terdapat **kesesesuaian** Nama Kegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 **akan tetapi terdapat ketidaksesuaian** antara Indikator Kegiatan dan Target Kegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026;

c. Terdapat **kesesesuaian** Nama Subkegiatan dan Pagu Subkegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 **akan tetapi terdapat ketidaksesuaian** antara Indikator Subkegiatan dan Target Subkegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026;

sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

RKA Tahun 2026				PPAS 2026			
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100 %		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100 %	
Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen		Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Lainnya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	
Gelar Budaya Jogya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000,00	Gelar Budaya Jogya	Jumlah laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100%		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaa n dan peng endalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100%	
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	21.461.000,00	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	21.461.000,00

RKA Tahun 2026				PPAS 2026			
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	100 %		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	100 %	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.694.700,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	7.694.700,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.986.300,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.986.300,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 Dokumen		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	1.359.159.157,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 Dokumen	1.359.159.157,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 Dokumen		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	30.700.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 Dokumen	30.700.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 Dokumen		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	6.558.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3 Dokumen	6.558.500,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	

RKA Tahun 2026				PPAS 2026			
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	14.142.700,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	14.142.700,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	18.600.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	18.600.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	24.890.120,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	24.890.120,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.442.048,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	24.442.048,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	95.694.012,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	95.694.012,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	3 Dokumen		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	68.964.800,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	3 Dokumen	68.964.800,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	3 Dokumen		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	

RKA Tahun 2026				PPAS 2026			
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu
Daerah				Pemerintahan Daerah	Dipelihara/Direhabilitasi		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99.148.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	3 Dokumen	99.148.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	3 Dokumen		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	12.099.200,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	3 Dokumen	12.099.200,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan non perizinan	100 %		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan non perizinan	100 %	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	8.568.300,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	8.568.300,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Laporan	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Laporan	53.604.700,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	53.604.700,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	14.840.500,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	14.840.500,00

RKA Tahun 2026				PPAS 2026			
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	100 %		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentas e Dokumen Pembangu nan Tingkat Ka panewon yang disa mpaikan Tepat Waktu	100 %	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	28.951.100,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	28.951.100,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan gangguan trantribum	100 %		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan gangguan trantribum	100 %	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	37 Orang	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	37 Orang	30.502.200,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	30.502.200,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	60.403.600,00	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2 Dokumen	60.403.600,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	100 %		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	100 %	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Pelaksaanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	27.950.000,00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan Pelaksaanaan Sub Kegiatan	1 Dokumen	27.950.000,00

Keterangan:

a. **Ketidaksesuaian** Indikator Kegiatan, Target Kegiatan, Indikator Subkegiatan dan Target Subkegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 disebabkan perintah menarik data pada aplikasi SIPD **terbalik** antara keluaran dan hasil, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara Indikator Kegiatan, Target Kegiatan, Indikator Subkegiatan dan Target Subkegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

b. **Ketidaksesuaian** informasi atas Indikator Kegiatan, Target Kegiatan, Indikator Subkegiatan dan Target Subkegiatan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 diketahui dengan mencermati dokumen fisik RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan oleh SKPD.

Tanggapan Objek Reviu:

Sepakat dengan hasil reviu.

Untuk masalah ketidakesuaian karena penarikan data pada aplikasi SIPD terbalik akan kami konsultasikan dengan Bapperida.

3. **Tidak terdapat** penambahan Kegiatan dan Subkegiatan baru pada RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dalam PPAS Tahun Anggaran 2026.

   Tanggapan Obyek Reviu: Sepakat dengan hasil reviu

4. **Pengujian RKA Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 atas Pengalokasian Anggaran Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi Belanja Operasi **terdapat** belanja yang menghasilkan aset tetap sebesar Rp. 99.648.000,00.

   Tanggapan Objek Reviu: Sepakat dengan hasil reviu

5. **Pengujian atas Pengalokasian Belanja modal pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026**.

   Pada alokasi belanja modal **tidak terdapat** barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.

   Tanggapan Objek Reviu: Sepakat dengan hasil reviu

6. **Pengujian atas Pengalokasian Belanja Barang (persediaan) pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026**.

   Pada alokasi belanja barang (persediaan) **tidak terdapat** aset tetap yang akan diserahkan kepada Perangkat Daerah lain.

   Tanggapan Objek Reviu: Sepakat dengan hasil reviu

Wates, 17 September 2025

Panewu Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Selaku Penanggung Jawab Program	Pengendali Teknis	Ketua Tim
Raden Sukirno, S.IP., M.M	Kasijan, S.IP., M.Si	Heru Widiastuti, S.H
NIP. 19700124 199203 1 004	NIP. 19720717 199203 1 004	NIP. 19690428 199403 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON GIRIMULYO
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦴꦤ꧀ ꦒꦶꦫꦶꦩꦸꦭꦾꦺꦴ
Alamat : Nglengkong, Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo
Telp : (0274) 2824082, Fax : -
Website : https://girimulyo.kulonprogokab.go.id, Email : girimulyo@kulonprogokab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RADEN SUKIRNO, S.IP., M.M

NIP : 19700124 199203 1 004

Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a

Jabatan : Panewu Girimulyo

Instansi : Kapanewon Girimulyo

Menyatakan bahwa :

1. Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) 2026 Pada alokasi belanja modal ~~**terdapat/tidak terdapat**~~ barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.

2. Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) 2026 pada alokasi belanja barang (persediaan) ~~**terdapat/tidak terdapat**~~ aset tetap yang akan diserahkan kepada Perangkat Daerah lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Kulon Progo, 18 September 2025
Panewu Girimulyo

RADEN SUKIRNO, S.IP., M.M
NIP. 19700124 199203 1 004



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KAPANEWON NANGGULAN TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Nanggulan Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Nanggulan Tahun 2026 ini disusun sebagai dokumen perencanaan (Rencana Kerja) Kapanewon Nanggulan Tahun 2026 dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Rancangan akhir dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang ingin mewujudkan Misi Kabupaten Kulon Progo mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Good Goverment aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis, memfasilitasi kegiatan masyarakat dan program-program yang mendukung pembangunan. Banyak hal yang harus dikondisikan untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tentunya harus didukung oleh kelembagaan yang mantap, profesionalisme aparatur dan sarana/prasarana pelayanan yang memadai..

Demikian ringkasan Rencana Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Kapanewon Nanggulan, selanjutnya untuk menjadikan periksa.

Nanggulan, 29 Juli 2025

PANEWU

Ir. ST HARYOTO MMA

NIP. 196709101996031004

DAFTAR ISI

Sampul .....

Pengantar .....

Daftar Isi .....

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....

1.2 Landasan Hukum .....

1.3 Maksud dan Tujuan .....

1.4 Sistematika Penulisan .....

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD OPD .....

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....

BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.....

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BAB V PENUTUP.....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pelaksanaan program kegiatan OPD untuk periode 1 tahun. Setiap tahun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja), dimana Renja dimaksud merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga arah dan kebijakan serta program kerja dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diketahui secara langsung oleh para pembuat kebijakan. Sehingga diharapkan kedepan perencanaan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat terlaksana secara berkelanjutan, berjalan dengan baik dan berguna bagi masyarakat.

Rencana Kerja OPD berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2026. Rancangan Akhir Renja Perangka Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan evaluasi pada Tahun 2026.

Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan akhir, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

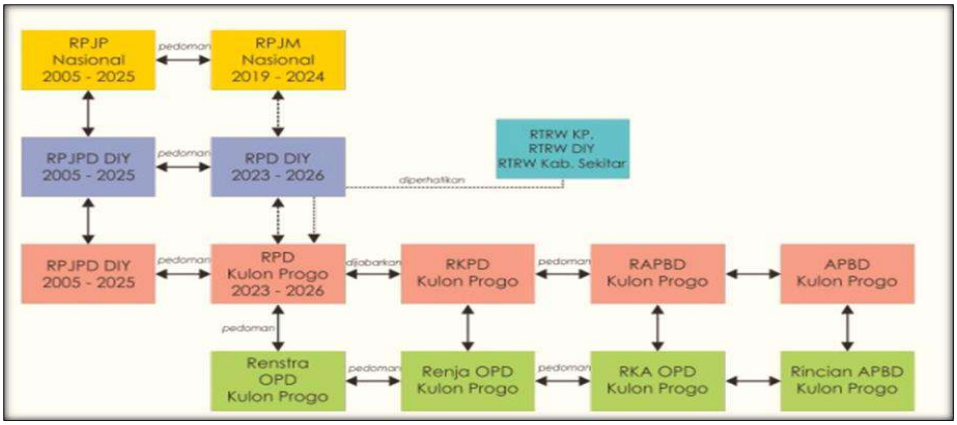
Prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026;

2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1.1.



Bagan Alur

Hubungan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja OPD Tahun 2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja pada Kapanewon dan Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

12. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;
13. Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun dengan maksud menyediakan acuan bagi pemerintah Kapanewon dan masyarakat dalam melaksanakan suatu program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2026 dengan berpedoman pada Rencana Akhir RPJMD Tahun 2025 -2029, Rancanagn Rentra Nanggulan 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah:

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Menciptakan sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo khususnya Kapanewon Nanggulan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kapanewon;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas - tugas Panewu berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja OPD Kapanewon Nanggulan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Ranwal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sampai dengan tahun 2024 bahwa kondisi urusan yang dilaksanakan di SKPD Tingkat Kapanewon adalah 1 (satu) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terbagi dalam 7 (lima) program kerja serta terbagi menjadi 23 kegiatan.

Adapun Program yang dilaksanakan di Tingkat Kapanewon ada 7 (tujuh adalah:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Untuk lebih jelasnya tentang rekap hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Nanggulan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian
			Tahun 2024	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100%	100%
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,50	84.50
		Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	98.25	98.25

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Nanggulan Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1	2	3	4	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	100%	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	94,74%	94,74%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan	100%	100%
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Program Penylenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100%	100%
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan	100%	100%

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran 2024 telah berjalan sesuai dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pada prinsipnya dari sejumlah 20 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon 100 % telah memenuhi target kinerja hasil, meskipun pencapaian kinerja keuangan belum sesuai dengan rencana. Pada tahun anggaran 2024 OPD Kapanewon Nanggulan melaksanakan 7 (tujuh) Program, dirinci 13 (tiga belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.121.370.393,00 Dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.042.263.909,00** dengan capaian sebesar 96,3%. Hal ini diakibatkan adanya hal-hal sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN	
				KEUANGAN	%
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**1,819,060,793**	**100**	1,738,630,407	95,58%
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9,200,000**	**100**	**9,120,908**	99,14%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,200,000	100	5,144,506	98.93%
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,000,000	100	3,976,402	99.41%
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1,581,710,699**	**100**	**1,502,356,410**	94.98%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,536,571,799	100	1,457,230,403	94.84%
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41,906,900	100	41,906,900	100%
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,232,000	100	3,219,107	99.60%
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**36,577,490**	**100**	**36,403,402**	**99,52%**
3.1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,437,490	100	14,341,018	99.33%
3.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22,140,000	100	22,062,384	99.65%
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5,056,200**	**100**	**4,999,995**	**98,89%**
4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,056,200	100	4,999,995	98.89%
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**106,312,004**	**100**	**106,299,392**	99.99%
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,509,980	100	16,497,368	99.92%
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	89,802,024	100	89,802,024	100%

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN	
				KEUANGAN	%
	Kantor				
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80,204,400**	**100**	**79,450,300**	**99.06%**
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64,385,900	100	63,657,800	98.87%
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,818,500	100	15,792,500	99.84%
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**52,002,700**	**100**	**51,413,172**	**98.87%**
1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**41,502,700**	**100**	**41,415,242**	**99.79%**
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16,502,700	100	16,459,861	99.74%
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25,000,000	100	24,955,381	99.82%
2	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**10,500,000**	**100**	**9,997,730**	**95.22%**
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10,500,000	100	9,997,730	95.22%
III.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**24,171,500**	**100**	**24,100,381**	**99.71%**
1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**24,171,500**	**100**	**24,100,381**	**99.71%**
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24,171,500	100	24,100,381	99.71%

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN	
				KEUANGAN	%
IV.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**71,657,700**	**100**	**71,169,500**	**99.32%**
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**71,657,700**	**100**	**71,169,500**	**99.32%**
1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15,776,100	100	15,345,173	100%
1.2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	55,881,600	100	55,824,327	99.90%
V.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**19,533,900**	**100**	**19,463,871**	**99.64%**
1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**19,533,900**	**100**	**19,463,871**	**99.64%**
1.1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	19,533,900	100	19,463,871	99.64%
VI.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**40,000,000**	**100**	**39,913,798**	**99.78%**
1	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**40,000,000**	**100**	**39,913,798**	**99.78%**
1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40,000,000	100	39,913,798	99.78%
VII.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**98,000,000**	**100**	**97,935,648**	**97.94%**
1	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**98,000,000**	**100**	**97,935,648**	**97.94%**
1.1	Gelar Budaya Jogja	98,000,000	100	97,935,648	97.94%

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN	
				KEUANGAN	%
	Jumlah	2,124,426,593		2,042,626,777	96.15%

Dari Program / kegiatan / sub kegiatan yang dlaksanakan semua memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang telah direncanakan tetapi tidak 100% disebabkan harga satuan harga tidak sesuai harga pasar dan menggunakan system Mbismarket.

Tabel 2.4.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah (PD) s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)

Kabupaten Kulon Progo

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahun2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)							Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
															Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Angg aran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
1						2		3		4			5			6			7			8 = (7/6)	9			10 = (5+7+9)			11 = (10/4
2						Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkairan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkairan dengan Pelayanan Dasar			100	%	702.840.834			99.995.120	100	%	100.000.000	100	%	97.935.648		1	laporan	30.000.000	100	%	1.127.893.972	24%
2	2	2				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			100	%	464.100.000	1	event	99.995.120	100	%	100.000.000	100	%	97.935.648	99,9%	1	laporan	30.000.000	100	%	1.127.893.972	0,22
2	2	2	8			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	%	464.100.000	1	event	99.995.120	100	%	100.000.000	100	%	97.935.648	99,9%	1	laporan	30.000.000	100	%	1.127.893.972	0,22
2	2	2	8	5	7	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	Laporan	464.100.000	1	event	99.995.120	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	97.935.648	99,9%	1	laporan	30.000.000	1	Laporan	1.127.893.972	0,22
2	2	2	8	5	7	6 Gelar Budaya Yogya	Gelar Budaya Yogya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya	1	Laporan	464.100.000	1	event	99.995.120	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	97.935.648	99,9%	1	laporan	30.000.000	1	Laporan	1.127.893.972	0,15
4	1					Urusan Sekretariat Daerah	Urusan Sekretariat Daerah			100	%	238.740.834					100%	40.000.000			39.913.798					100	%	94.931.626	
4	1	4				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	%	238.740.834	1	dokumen	34.863.228	2	Laporan	40.000.000	2	Laporan	39.913.798	99,6%	4	dokumen	20.164.600	100	%	94.931.626	0,15
4	1	4	5	6		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	8	Dokumen	238.740.834	1	dokumen	34.863.228	2	Laporan	40.000.000	2	Laporan	39.913.798	99,6%	4	dokumen	20.164.600	2	Laporan	94.931.626	0,15
4	1	4	5	6	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8	Dokumen	238.740.834	1	dokumen	34.863.228	2	Laporan	40.000.000	2	Laporan	39.913.798	99,6%	4	dokumen	20.164.600	2	Laporan	94.931.626	0,26
7	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	6.541.844.264			9.987.400	100	%	1.819.060.793	100	%	1.738.630.407	99,8%	100	%	2..005.304.271	100	%	3.753.922.078	0,25

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahun2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)							Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
															Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Angg aran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
1						2		3		4			5			6			7			8 = (7/6)	9			10 = (5+7+9)			11 = (10/4
7	1	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	84	bulan	24.752.000			9.987.400	12	bulan	9.200.000	12	bulan	9.120.905	99,8%			10.386.499	84	bulan	29.494.804	0,31
7	1	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	10.560.000	2	dokumen	5.994.960	3	Dokumen	5.200.000	3	Dokumen	5.144.505	99,9%	4	dokumen	6.506.499	13	Dokumen	17.645.964	0,20
7	1	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	Dokumen	14.192.000	21	laporan	3,992,440	21	Dokumen	4.000.000	21	Dokumen	3.975.402	99,8%	21	Laporan	3.790.000	21	Dokumen	11.757.842	0,26
7	1	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	144	%	5.327.876.959			1.407.038.694	38	Laporan	1.536.571.799	38	Laporan	1.457.230.403	93,8%	100	%	1.787.896.732	38	Laporan	4.652.165.829	0,28
7	1	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	138.600.000	12	dokumen	35.274.900	12	bulan	41.906.900	12	bulan	41.906.900	99.3%	12	dokumen	30.656.600	12	bulan	108.838.400	0,28
7	1	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1120	Orang /bulan	5.174.252.959	21	orang	1.367.770.094	280	Orang / bulan	1.536.571.799	280	Orang / bulan	1.457.230.403	93,7%	22	orang	1.764.025.432	280	Orang/ bulan	4.589.025.929	0,26
7	1	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	Laporan	15.024.000	14	laporan	3.993.700	12	kali	3.232.000			3.219.107	99,8%	14	laporan	3.014.400	12	kali	10.227.207	0,25
7	1	1	2	6	9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum	6	Dokumen	129.451.968			33.859.224	6	Dokumen	36.577.490	6	Dokumen	36.403.402	99,8%			22.354.800	6	Dokumen	92.617.426	0,26
7	1	1	2	6	9	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	96.120.000	12	laporan	20.728.575	12	bulan	22.130.000	6	Dokumen	22.062.364	99,7%	12	laporan	13.390.000	12	bulan	56.180.939	0,25
7	1	1	2	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Paket	33.331.968	12	paket	13.131.000	6	Paket	14.437.490	6	Paket	14.341.018	100%	5	paket	6.964.800	6	Paket	34.436.818	0,28
7	1	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset	Jumlah Penambahan Aset	18	Unit	189.196.960			24.092.575	7	Unit	5.056.200	7	Unit	4.999.995	98,5%			2.471.900	30	Unit	31.564.470	0,29
7	1	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penambahan Aset	Jumlah Penambahan Aset	18	Unit	189.196.960	4	unit	24.092.575	7	Unit	5.056.200	7	Unit	4.999.995	98,5%	1	unit	2.471.900	7	Unit	31.564.470	0,29
7	1	1	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	96	Laporan	527.062.347			106.190.800	24	Laporan	106.312004	24	Laporan	106.299.392	99,4%			109.798.390	24	Laporan	322.288.582	0,26

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahun2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)							Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
																	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
											Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Angg aran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
1							2		3		4			5			6			7			8 = (7/6)	9			10 = (5+7+9)			11 = (10/4
7	1	1	2	0	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	435.384.051	12	laporan	22.483.937	12	Laporan	16.509.980	12	Laporan	16.497.368	97.3%	12	laporan	19.996.366	12	Laporan	58.977.671	0,06
7	1	1	2	0	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yangD	48	Laporan	91.678.296	12	laporan	83.706.863	12	Laporan	89.802.024	12	Laporan	89.802.024	100%	12	bulan	89.802.024	12	Laporan	263.310.911	1,22
7	1	1	2	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	72	Bulan	422.000.000			103.657.400	12	Bulan	80.204.400	12	Bulan	79.450.300	98,7%			62.595.950	72	Bulan	245.703.650	0,20
7	1	1	2	9	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44	Unit	273.811.000	9	unit	46.484.100	11	Unit	64.385.900	11	Unit	63.657.800	98,9%			47.027.550	11	Unit	157.169.450	0,25
7	1	1	2	9	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Reh a bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	Unit	14.878.900	12	unit	45.174.000	6	Unit	15.818.500	6	Unit	15.792.500	98,2%	2	unit	3.499.900	6	Unit	64.466.400	0,28
7	1	1	2	9	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Reh a bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Unit	54.814.130	20	unit	11.999.300							100%	11	unit	12.068.500	25	Unit	24.067.800	0,24
7	1	2					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	400	%	168.406.884			51.661.344	20	%	52.002.700	20	%	51.413.172	99,3%	12	dokume n	35.243.800	100	%	138.321.316	0,29
7	1	2	2	1			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	72	Laporan	135.286.856			41.176.054	18	Laporan	41.502.700	18	Laporan	41.415.242	99,2%	12	dokume n	28.676.900	18	Laporan	111.268.196	0,30
7	1	2	2	1	2		Peningkatan Efektifitas kegatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Efektifitas kegatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	Dokumen	82.890.892	8	dokume n	23.460.704	6	Laporan	25.000.000	6	Laporan	24.955.381	99,8%	8	Dokum en	17.440.000	6	Laporan	65.856.085	0,28
7	1	2	2	1	1		Koordinasi/Sin ergi Perencanaan danpelaksanaaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48	Laporan	52.395.964	4	laporan	17.715.350	12	Laporan	16.502.700	12	Laporan	16.459.861	98,4%	4	laporan	11.236.900	12	Laporan	45.412.211	0,32
7	1	2	2	4			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100	%	33.120.028			10.485.290	100	%	10.500.000	100	%	9.997.730	99,8%	12	Dokum en	6.564.900	100	%	27.047.920	0,24

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Kepmendagri 900.1.15-1317 Tahun2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)							Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
															Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024			Tingkat Realisasi %				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Angg aran	Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran		Jml	Satuan	Anggaran	Jml	Satuan	Anggaran	
1						2		3		4			5			6			7			8 = (7/6)	9			10 = (5+7+9)			11 = (10/4
7	1	2	2	4	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	Dokumen	33.120.028	13	dokumen	10.485.290	12	Dokumen	10.500.000	12	Dokumen	9.997.730	99,8%	12	Dokumen		12	Dokumen		0,24
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	%	94.566.408			23.950.608	100	%	24.171.500			24.100.381	99,7%	8	laporan	17.845.000	100	%	65.895.989	0,45
7	1	3	2	1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	Laporan	94.566.408	11	laporan	23.950.608	6	Laporan	24.171.500			24.100.381	99,7%	8	laporan	17.845.000	6	Laporan	65.895.989	0,45
7	1	3	2	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	Laporan	94.566.408	11	laporan	23.950.608	6	Laporan	24.171.500			24.100.381	99,7%	8	laporan	17.845.000	6	Laporan	65.895.989	0,45
7	1	5				ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	ROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	310.950.000			51.239.610	94,74	%	71.657.700			71.169.500	98,5%	100	%	41.320.800	94,74	%	163.729.910	0,24
7	1	5	2	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	20	Laporan	230.516.654			51.239.610	5	Laporan	71.657.700			71.169.500	98,5%	100	%	41.320.800	5	Laporan	163.729.910	0,32
7	1	5	2	1	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	724	Orang	100.976.355	50	orang	9.347.370	181	Orang	15.776.100			15.345,173	98,3%	91	orang	7.926.500	181	Orang	32.619.043	0,23
7	1	5	2	1	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	16	Laporan	129.540.299	6	laporan	41.892.240	4	Laporan	55.881.600			55.824.327	98,5%	6	laporan	33.403.200	4	Laporan	131.119.767	0,39
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	79.797.768			20.950.964	100	%	19.533.900			19.463.871	99,7%	5	laporan	14.039.800	100	%	54.454.635	0,31
7	1	6	2	1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	Laporan	79.797.768			20.950.964	6	Laporan	19.533.900			19.463.871	99,7%	5	laporan	14.039.800	6	Laporan	54.454.635	0,31
7	1	6	2	1	17	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	Laporan	79.797.768	6	laporan	20.950.964	6	Laporan	19.533.900			19.463.871	99,7%	5	laporan	14.039.800	6	Laporan	54.454.635	0,31

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kapanewon Nanggulan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

1. Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur
2. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
3. Meningkatnya Sarana dan prasarana perkantoran
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Untuk kinerja pelayanan, Kapanewon Nanggulan selama memberikan pelayanan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Sebagaimana ditekankan dengan kebijakan Bupati Kulon Progo bahwa pelayanan terhadap masyarakat perlu menjadi prioritas utama bagi setiap OPD. Pelayanan dimulai dari tataran tingkat pemerintahan yang terbawah yaitu kalurahan baru kemudian kapanewon dan kabupaten. Sehingga untuk mendukung kebijakan tersebut telah disepakati bersama tentang jam pelayanan dan tata cara pelayanan. Dengan harapan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan yaitu sebagai berikut:

TABEL 2.2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KAPANEWON NANGGULAN

KABUPATEN KULON PROGO

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK	SPM IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi (%) Tahun		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10		12	13	14		15
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah			100	100	100		100	100	100		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,50	84,75	87,811		84.50	84.75	85.00		
			Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan			98,25	99,12	94,12		98.25	99.12	100		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

2.3.1 Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kapanewon Nanggulan adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendekatkan pelayanan masyarakat dengan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu belum ada ketegasan bagaimana sistem atau petunjuk teknis yang jelas dalam pelaksanaannya di tingkat kapanewon.

   Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu meliputi:

   a. Perizinan, nonperizinan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dam penyelenggaraan;
   b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
   c. Tugas pembantuan; dan
   d. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
2. Masih belum tersusunnya perpaduan dan integritas perencanaan pembangunan dari masyarakat di tingkat Pedukuhan, Kalurahan dan Kapanewon. Sehingga hal ini dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi pembangunan itu sendiri. Walaupun UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sudah diberlakukan, namun Musrenbang belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Belum terciptanya penyusunan data profil desa dan monografi desa secara optimal dan berkualitas, sehingga Profil Kapanewon sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan belum sesuai dengan harapan.

4. Masih lemahnya fungsi pemantauan dan pengendalian pembangunan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih tergantungnya system pengawasan dan pengendalian pembangunan kepada pemerintah. Masyarakat terkesan masih ragu, takut, dan enggan melakukan pelaporan apabila adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Penyelenggaraan Pemerintah Desa belum optimal. Hal ini dibuktikan antara lain oleh pembuatan berbagai produk pemerintahan desa yang berupa laporan pertanggungjawaban kepala desa dan peraturan desa masih sering terlambat, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan inventaris desa belum optimal sehingga berdampak pada terganggunya jalannya pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Penanganan arsip pemerintah baik kalurahan maupun kapanewon belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kearsipan, terbatasnya personalia pengelola kearsipan, kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat pengelola kearsipan, dan kesadaran aparatur pemerintah yang kurang terhadap arti pentingnya kearsipan.
7. Belum terpenuhinya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya kesalahan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terutama dalam hal kenaikan pajak / NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga memberatkan masyarakat. Disamping itu disebabkan pula oleh karena adanya wajib pajak yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Kulon Progo. Kemudian juga kinerja aparat pemungut yang rendah, dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang.
8. Belum tersosialisasikannya fungsi-fungsi kearsipan, perpustakaan, dan Jaringan Dokumentasi Informasi (JDI) Hukum kepada seluruh pegawai Kapanewon dan pemerintah Kalurahan. Sehingga diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan agar seluruh aparat dapat memahami dan memanfaatkan sistem tersebut dengan baik.

9. Pengembangan agrobisnis, agroindustri, Industri Rumah Tangga (IRT), Kecil (K) dan Menengah (M) belum dilaksanakan dengan optimal. Apabila sektor ini dapat ditangani secara serius maka diharapkan akan membantu peningkatan pendapatan masyarakat.
10. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat. Perumahan penduduk yang kebanyakan masih berhimpitan dengan kandang ternak, penyimpanan air yang tidak tertutup sehingga menjadi sarang nyamuk dan sistem pembuangan limbah yang kurang baik adalah menjadi salah satu contohnya.
11. Masih kurangnya perhatian terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Padahal mereka adalah anggota masyarakat juga yang kurang beruntung dengan terlahir sebagai orang yang mengalami kekurangan. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila pemerintah mulai memperhatikan mereka ini.
12. Adanya perbedaan tentang kesetaraan gender yang ditandai dengan masih adanya sikap dan pandangan bahwa derajat/kedudukan laki-laki berada di atas perempuan. Wanita masih dianggap sebagai orang yang tidak berdaya dan tidak perlu diberdayakan. Sehingga wanita tidak mempunyai hak-hak seperti halnya yang dimiliki oleh pria yang berarti masih adanya diskriminasi terhadap perempuan.
14. Makin maraknya peredaran NAPZA (Narkotika dan Antibiotik dan Zat Adiktif, Mihol), pergaulan bebas dan penyakit masyarakat lainnya. Yang peredarannya cepat sekali mempengaruhi para generasi muda. Karena kelompok umur inilah yang paling rentan untuk dipengaruhi dan mencoba hal-hal yang baru yang ingin diketahuinya.
15. Masih tingginya jumlah penduduk miskin yang ada di Kapanewon Nanggulan.

2.3.2 Faktor Penghambat

a. Keterbatasan jumlah pegawai yang ada di tingkat kapanewon secara tidak langsung mempengaruhi kelancaran kinerja kapanewon.
b. Keterbatasan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kapanewon menyebabkan program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan secara maksimal.
c. Kualitas aparatur pemerintah Kapanewon yang masih perlu ditingkatkan. Baik dari segi pendidikannya, maupun diklat/kursus/ bimteknya. Hal ini disebabkan antara lainkarena kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat sangat kecil kemungkinannya.
d. Masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana penunjang bekerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang diantaranya adalah:
   - ❖ Laptop masih kurang 2 unit;
   - ❖ Kendaraan dinas (roda dua) kurang 2 unit;
   - ❖ Kursi rapat kurang 40 unit.
e. Sudah banyak bagian bangunan kantor yang rusak seperti:
   - ❖ Pendopo Kapanewon yang kurang layak mohon untuk direnovasi.
   - ❖ Pembangunan parkir kurang 2 unit
   - ❖ Dinding kayu/joglo yang belum direnovasi.
f. Sarana dan prasarana pengamanan kantor belum memadai. Contohnya adalah:
   - ❖ sebagian jendela yang ada di Kantor Panewu Nanggulan belum diteralis ;

2.3.3 *Tantangan dan Peluang*

2.3.3.1 Tantangan

Pembangunan Tahun 2026 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Kapanewon Nanggulan Tahun 2023-2026 dan akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan/ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi oleh

Kapanewon Nanggulan pada Tahun 2026 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
2. Nilai Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP) A yang ditargetkan menuntut untuk peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kapanewon Panjatan
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Publik), menuntut transparansi pertanggungjawaban keuangan
4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, menuntut kinerja aparatur pemerintah Kapanewon Panjatan yang menerapkan (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. *Core values* ASN menjadi titik tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun daerah yang berAKHLAK
5. Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator Kinerja Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah menuntut pencapaian realisasi kinerja program yang maksimal
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dengan indikator kinerja Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon dengan target di Tahun 2024 mencapai 99,26 %

2.3.3.1. Peluang

Peluang yang dimiliki Kapanewon Nanggulan dalam menghadapi tantangan pembangunan di Tahun 2026 adalah bahwa Kapanewon Nanggulan memiliki ASN yang berkomitmen, berdedikasi tinggi, yang menerapkan (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK, sehingga mampu untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah ditargetkan

2.3.4. Formulasi Isu Isu penting

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPD Kabupaten Kulon Progo, telaahan RTRW, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Nanggulan adalah :

1. Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi.
2. Belum terpenuhinya kompetensi teknis dan kepemimpinan aparatur Kalurahan, sehingga berdampak pada kwalitas penyelengaaraan pemerintah Kalurahan, khususnya dalam perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan mampu mensejahrerakan masyaraakat.
3. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.
4. Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar
5. Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kapanewon
6. Adanya potensi permasalahan ketertiban dan keamanan
7. Adanya peluangan pengembangan wisata dan dukungan pengembangan potensi pertanian, perikanan dan peternakan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja pembangunan Daerah merupakan (RKPD) dokumen perencanaan pemerintah Daerah periode 1 Tahun dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah yang memuat:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutkan akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA PPAS. Untuk lebih jelasnya mengenai Reviu terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada table dibawah ini.

TABEL.2.4.1

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN KULON PROGO KAPNEWON NANGGULAN

No	Rancangan Awal RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (SIPD 2026)					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					
	Gelar Budaya Jogja	Kap. Nanggulan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	100%	100.000.000	Gelar Budaya Jogja	Kap. Nanggulan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	100%	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan					Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan					
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kap. Nanggulan	Prosentase Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100%	40.000.000	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kap. Nanggulan	Prosentase Peningkatan penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100%	22.562.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	11.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	4.430.700	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	3.796.200	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					

No	Rancangan Awal RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (SIPD 2026)					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**100%**	1,787,219,039	**Penyediaan Gaji danTunjangan ASN**	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**100%**	1.754.025.432	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Kap. Nanggulan**	**persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**100%**	**46.000.000**	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**100%**	**27.983.700**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**100%**	**5.000.000**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**100%**	**3.030.900**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**100%**	**16.720.000**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**100%**	**9.211.900**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**24.000.000**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**27.140.000**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**100%**		**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**100%**	**20.289.200**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**100%**	60.000.000	**Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional**	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**100%**		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap Nanggulan	**Prosentase peningkatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor**	100%	89.802.000	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Kap Nanggulan	**Prosentase peningkatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor**	100%	95.694.012	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					

No	Rancangan Awal RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (SIPD 2026)					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100%	28.000.000	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100%	16.786.016	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kap. Nanggulan**	**Dukungan sebesar 5,67% terhadap Persentase**	**100%**	**96.000.000**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**		**Dukungan sebesar 5,67% terhadap Persentase**	**100%**	**89.802.024**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**100%**	**90.000.000**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**100%**	**60.000.000**	**Belanja BBM**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	3.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	16.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	12.068.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**					
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	21.477.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	16.302.700	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	28.332.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	24.000.000	
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					**Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	11.307.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Nanggulan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	10.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					

No	Rancangan Awal RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (SIPD 2026)					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	**Kap. Nanggulan**	**Persentase Peningkatan Pembinan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan**	100%	**24.562.000**	**Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**	**Kap. Nanggulan**	**Prosentasie Peningkatan Pembinan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan**	100%	20.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKT DESA DAN KALURAHAN					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKT DESA DAN KALURAHAN**					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**					
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap Nanggulan	Meningkatnay efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	28.030. 000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap Nanggulan	Meningkatnay efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	25.000. 000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**					
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	**Kap Nanggulan**	**Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**	100%	**11.236.000**	**Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**Kap Nanggulan**	**Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**	100%	**11.236.000**	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**Kap Nanggulan**	**Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan urusan Pemerintah umum**	100%	**65.000.000**	**Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**Kap Nanggulan**	**Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan urusan Pemerintah umum**	100%	**65.000.000**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kapanewon Nanggulan diperoleh dari berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah:

1. Hasil usulan dari forum OPD tingkat Kapanewon, dimana setiap OPD di tingkat Kapanewon memberikan usulan kegiatan dan dirangkum dalam dokumen usulan kegiatan sebagai bahan Musrenbang di Tingkat Kapanewon.
2. Usulan dari berbagai pemangku kepentingan misalnya kelompok tani, Gabungan P3A, Anggota DPRD Kabupaten dan kelompok-kelompok masyarakat lain. Usulan program tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas secara tersendiri dikirim kepada Bapperida Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Kulon Progo

Kapanewon Nanggulan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	0

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana kerja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan kebijakan Nasional. Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJMN tahun 2025-2029 dendan Visi, Misi dan Program.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu" **Bersama Indonesia Maju, memuji Indonesia Emas 2045"**. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang tertuang dalam Delapan Asta Cita.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan menlanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan Asta Cita ini diimplementasikan menjadi delapan Prioritas Nasional. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan Pembangunan dalam periode jangkah menengah 2025-2029

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renja Kapanewon Naggulan Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan target dan fungsi pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Nanggulan mendukung Visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Good Govermance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang aman dan Demokratis.

Berdasarkan RPD Kabupaten Kulon Progo, indikasi prioritas tema perencanaan tahun 2026 adalah “Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berbudaya untuk mendorong pemanfaatan kawasan pusat pertumbuhan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Pembangunan kawasan diarahkan meningkatkan manfaat potensi yang ada dari aspek ekonomi dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumberdaya manusia yang berlandaskan nilai - nilai budaya keistimewaan Yogyakarta.

Tujuan dan sasaran kerja Kapanewon Nanggulan Tahun 2026 sebagai berikut;

Tabel 3.2

Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86.90
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3.23
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85.430

3.3. Program dan kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan Tindakan Tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program dan Indikator Kapanewon Nanggulan yang dilaksanakan tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Program ,Kegiatan dan sub Kegiatan Kapanewon Nanggulan Tahun 2026

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1	Program penyelenggaraan keiustimewaaan yogyakarta urusan kebudayaan	Adat, seni,tradisi,dan lembaga budaya	Gelar Budaya Jogya
2	Program penyelenggaraan keistimewaaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
3	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
5	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
7	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Rumusan Rancangan Akhir Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kapanewon Nanggulan seperti tercantum dalam ketetapan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026. Sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan, menegaskan bahwa salah satu tugas Kapanewon adalah melaksanakan urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon. Pada tahun 2026 Kapanewon Nanggulan mendapat dukungan anggaran Dana Keistimewaan untuk 2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan di Kapanewon.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Nanggulan Tahun 2026 dapat dilihat

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Nanggulan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON NANGGULAN						**2.289.642.000,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-	-			-	**100.000.000,00**						-	**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**22.562.000,00**							**0,00**	
1	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Kelembagaan berkinerja Sangat Tinggi***	-			**100 %**	**22.562.000,00**						-	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimew aan	*Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			1 Dokumen	22.562.000,00			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanew on	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimew aan di Kapanew on/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	22.562.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanew on		0,00	KAPANEWON NANGGULAN

	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.167.080.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.167.080.000,00**							**0,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi***	**-**			**100 %**	**2.041.907.260,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			2 Dokumen	8.226.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanew on Nanggulan	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.430.700,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanew on Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	3.796.200,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanew on Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			3 Dokumen	1.794.439.432,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanew on Nanggulan	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN

	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1.764.025.432,00	Kab. Kulon Prog	DANA ALOKASI UM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gov	Kapanew on		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	27.383.700,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanew on		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.030.300,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanew on		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			2 Dokumen	36.311.900,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanew on	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.211.900,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanew on		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	27.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanew on		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			1 Dokumen	20.289.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanew on	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN

	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	20.289.200,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusa	*Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			2 Dokumen	112.480.028,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	16.786.016,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	95.694.012,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan pelaksanaan*	-			3 Dokumen	70.159.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover	Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	48.656.700,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			0				1 0	10.269.900,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN

	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			0				0 0	11.233.200,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase pelayanan non perizinan***	**-**			**100 %**	**59.923.840,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			2 Dokumen	52.636.940,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	39.039.440,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	13.597.500,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			1 Dokumen	7.286.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha															
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	7.286.900,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN

3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu***	**-**			**100 %**	**13.353.900,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			1 Dokumen	13.353.900,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	13.353.900,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase penanganan gangguan trantibum***	**-**			**100 %**	**41.164.500,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			2 Dokumen	41.164.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover	-	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional															
			-				-	9.251.300,00	Kab. Kulon Progo	PAJAK BAHAN BAKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				3 Laporan	31.913.200,00	Kab. Kulon Progo	PAJAK BAHAN BAKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN

5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu***	**-**			**100 %**	**10.730.500,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan*	-			1 Dokumen	10.730.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Nanggulan	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya															
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	10.730.500,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	JUMLAH							**2.289.642.000,00**							**0,00**	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja adalah salah satu kewajiban setiap Organisasi Perangkat Daerah. Dengan waktu yang sangat terbatas, Rencana Kerja Kapanewon Nanggulan dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa hasil dari penyusunan ini jauh dari sempurna, sehingga ke depan diperlukan bimbingan dan pembinaan dari instansi terkait, agar rancangan awal rencana kerja dapat tersusun dengan tepat waktu serta berkualitas.

Meskipun dengan keterbatasan anggaran diharapkan bagi pembuat kebijakan di tingkat kabupaten untuk dapat memperhatikan program kerja dan kegiatan yang telah diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kedepan dapat dikeluarkan kebijakan pemerintah dengan memberikan dukungan anggaran yang layak melalui pagu anggaran, sehingga akan mampu mendongkrak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah menuju kesempurnaan dan keberhasilan yaitu terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu melayani masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Nanggulan, 29 Juli 2025

PANEWU NANGGULAN

Ir. ST. HARYOTO, MMA.

NIP. 19670910 199603 1004

RENCANA KERJA
TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KAPANEWON SAMIGALUH

Jl. Pangaji - Plono Km. 4,5 Jetis, Gerbosari, Samigaluh
Kabupaten Kulon Progo,
Daerah Istimewa Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan kewajiban kami selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Adapun substansi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditetapkan. Tentu saja masih banyak kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 ini. Kritik yang membangun masih kami harapkan untuk perbaikan perencanaan di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga pengambil keputusan anggaran serta masyarakat pada umumnya.

Samigaluh, 29 Juli 2025
PANEWU SAMIGALUH

SURYANTORO, S.IP., M.Si.
Pembina Tk I; IV/b
NIP. 197003261998031007

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar …… ii

Daftar isi …… iii

Daftar Tabel …… iv

Daftar Gambar …… v

BAB I PENDAHULUAN …… 1

1.1 Latar Belakang …….. 1

1.2 Landasan Hukum …… 2

1.3 Maksud dan Tujuan …….. 3

1.4 Sistematika Penulisan …… 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU …… 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu Dan capaian Renstra PD …… 5

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …… 15

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD …….. 17

2.4 Review terhadap Ranwal RKPD Kulon Progo Tahun 2026……. 19

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat …….. 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH …… 28

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional yang termuat pada Asta Cita Tahun 2026 …….. 28

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah …… 28

3.3 Program dan kegiatan …….. 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENGANGGARAN PD …….. 34

BAB V PENUTUP …… 45

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.1	Pengukuran sasaran renja tahun lalu ……..	5
Tabel 2.1.2	Pengukuran kinerja program tahun lalu..……..	6
Tabel 2.1.3	Realisasi fisik dan keuangan ……..	7
Tabel 2.1.4	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah ……..	11
Tabel 2.2	Pencapaian kinerja pelayanan …….	16
Tabel 2.4	Review terhadap Ranwal RKPD Kulon Progo Tahun 2026 ……..	20
Tabel 2.5	Usulan program dan kegiatan masyarakat …….	27
Tabel 3.2.1	Indikator Tujuan PD Tahun 2026 ……..	29
Tabel 3.2.2	Indikator Sasaran PD 2026 …….	30
Tabel 3.2.3	Indikator Kinerja Utama PD 2026 …….	31
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Program …….	31
Tabel 4.1	Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ……..	35

DAFTAR GAMBAR

Ganbar 1.1 Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen lainnya …….. 1

BAB I
PENDAHULUAN

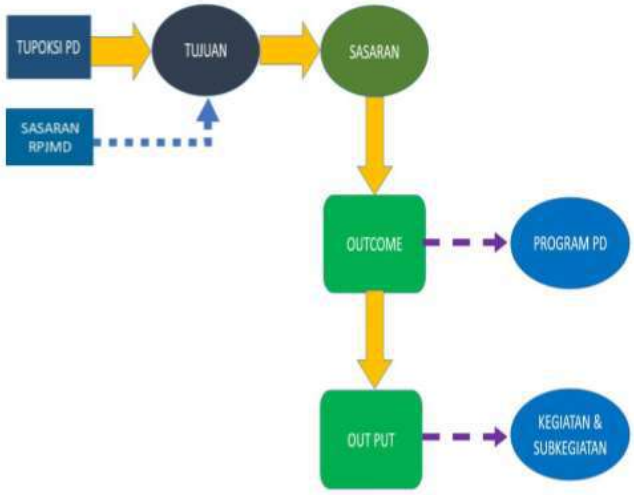
1. 1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) Tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima Tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah juga harus menyesuaikan dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026 menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Senada dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045, maka Renja Perangkat Daerah juga harus menyesuaikan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Samigaluh merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dokumen tersebut tidak terlepas dari dokumen Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Samigaluh Tahun 2026.

Gambar 1.1
Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen lainnya



Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan Akhir, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan Rancangan Akhir dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026 dengan berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan Evaluasi, pelaksanaan, Rencana pembangunan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah**;**
i. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
j. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
k. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
l. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026;

m. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah;
n. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
o. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
p. Keputusan Bupati Kulon Progo 274/C/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Panewu.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh Tahun Anggaran 2026 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kapanewon Samigaluh untuk tahun 2026. **Tujuan** disusunnya Rencana Kerja tahun 2026 adalah untuk:

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan;
2. Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026;
4. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan mas
- 2.6. yarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3. Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagaian Urusan Pemerintah Daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Samigaluh Tahun 2024 melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pengukuran kinerja Kapanewon Samigaluh didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci adalah:

Tabel 2.1.1
Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Samigaluh Tahun Lalu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	%	100	100	100
2	Meningkatnya Pelayanan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,50	85,33	100,98
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	%	98,25	98,25	100

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan target, capaian kinerja sasaran perangkat daerah tahun ini sudah berhasil terlaksana diatas target yang telah ditentukan. Capaian kinerja sasaran meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dapat terealisasi sebesar 100%. Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kapanewon yang ditargetkan 84,50%, berdasarkan nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo mendapat nilai 85,33% atau terealisasi sebesar 100,98% dari target yang telah ditentukan. Sedangkan untuk capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon dari target 98,25% mencapai 98,25%, atau terealisasi sebesar 100%.

Sedangkan Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah tahun lalu pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.2
Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Samigaluh Tahun lalu

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)
1	Program Penunjang Uruan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kapanewon	100%	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Persentase Peningkatan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	100%	100%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	94,74%	94,74%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100%	100%
7	Program Penyelenggaraab Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100%

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

Adapun realisasi fisik dan keuangan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.3

Tabel realisasi fisik dan keuangan

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN LALU		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN LALU	
			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1.670,70**	**100**	**36.576,06**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja 2025 dan tersusunnya Perubahan Renja 2024	2	5,99	2	704,99
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	2,96	21	396,96
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13	1.378,30	13	2.648,61
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	38,73	12	4.001,73
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	3,99	14	7,94
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	1	13,63	1	1.382,63

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	26,67	12	2.782,67
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa peninjang*				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya iar dan listrik yang disediakan	12	15,61	12	33,91
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	59,87	12	115,67
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunn lainnya yang di sediakan				10.352,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8	91,52	8	7.310,52
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	5	15,80	5	4.696,80
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	17,63	12	2.141,63
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**50,19**	**41,79**	**50,19**	**4.835,79**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	11,87	6	2.007,87

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	24,39	7	2.000,39
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12	5,53	12	827,53
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**50**	**30,04**	**50**	**3.267,04**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	30,04	5	3.267,04
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**92,11**	**93,30**	**92,11**	**2.355,45**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45	29,23	45	2.253,23
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	5	64,07	5	102,22
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**40**	**23,09**	**40**	**3.068,09**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7	23,09	7	3.068,09
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100,00**	**39,91**	**100,00**	**74,91**

	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan					
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	3	39,91	3	74,91
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan**	**100,00**	**98,00**	**100,00**	**1.085,00**
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	**98,00**	1	**1.085,00**

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target capaian kinerja fisik perangkat daerah tahun ini dapat terlaksana sesuai target yang telah ditentukan. Capaian kinerja keuangan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak memenuhi target karena adanya selisih anggaran dengan harga pasar. Dari selisih realisasi anggaran tersebut di kembalikan ke kas daerah.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kapanewon Samigaluh sampai tahun lalu dan perkiraan capaian tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Terakhir 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					RUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN									
2	22	08	07		*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*									
2	22	08	07	08	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	1	1	1	100	1	3	75
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN									
4	01	04	5		*Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*									
4	01	04	5	06	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8	2	3	3	100	3	*8*	100
7					**Unsur Kewilayahan**									
7	01				**Administrasi Pemerintahan (Kapanewon)**									
7	01	01			**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
7	01	01	2.01		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*									
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	2	2	2	100	2	6	54,55
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	21	21	21	100	21	63	75
7	01	01	2.02		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*									

7	01	01	2.02	01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjanganASN	48	12-	13	13	100	32	38	79,17
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	12	12	12	100	12	36	75
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran OPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	56	14	14	14	100	14	42	75
7	01	01	2.06		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*									
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	48	12	12	12	100	12	36	75
7	01	01	2.08	03	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang di Sediakan	4	1	1	1	100	1	3	75
7	01	01	2.08		*Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*									
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	75
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	75
7	01	01	2.09		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*									
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	**8**	**8**	**8**	**100**	8	24	**75**
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	**2**	**5**	**5**	**100**	1	8	**72,73**

7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	48	12	12	12	100	12	36	75
7	01	01	2.07		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah*									
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	129	52	12	12	100	12	76	68,9
7	01	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**									
7	01	02	2.01		*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*									**25**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/ Sinergi Perancanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	40	10	6	6	100	6	22	58
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon	28	7	7	7	100	7	21	75
7	01	02	2.04		*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*									
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang di Laksanakan	48	12	12	12	100	12	36	75
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**									
7	01	03	2.01		*Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa*									
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kePanewuan	40	10	5	5	100	5	20	50
7	01	05			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**									
7	01	05	2.01		*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*									
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi	240	60	45	45	100	45	150	62,5

					Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	koordinasi dan pembinaan(Bimtek,sosialisasi,konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional								
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	20	5	5	5	100	5	15	75
7	01	06			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**									
7	01	06	2.01		*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*									
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahna	25	5	7	7	100	5	17	68

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Panewu melaksanakan tugas dan urusan seperti yang tertuang dalam Struktur Organisasi Kapanewon Samigaluh dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan tersebut di jelaskan bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selain meyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintah meliputi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. Koordinasi pemeliharaan prasarana dansarana pelayanan umum;
g. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kapanewon;
h. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kalurahan dan/atau Kelurahan;
i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kapanewon;
j. Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan dibidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan dan kelembagaan;
k. Pelaksanaan administrasi Kapanewon;
l. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kapanewon;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah di tetapkan oleh Kapanewon Samigaluh dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Penilaianini dilakukan untuk evaluasi dan pengukuran capaian kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun untuk pencapaian kinerja Kapanewon sampai dengan saat ini dan juga proyeksi capaian untuk Tahun 2026 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK (SPM)	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi (%)			Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah			100	100	100	100		100	100	100		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,25	84,5	84,75	85		85,33	84,75	85		
	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon			97,37	98,25	99,12	100		97,37	99,12	100		

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Samigaluh yang juga merupakan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Program pada Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan sejak Tahun awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah menunjukkan keberhasilan.

Permasalahan yang ada di wilayah Kapanewon Samigaluh saat ini antara lain: 1). Sebaran tingkat pendapatan masyarakat didominasi pada daerah yang infrastruktur jalannya mudah, seperti halnya sekitaran jalan nasional Dekso-Plono. 2). Kreatifitas dan keterampilan masyarakat masih perlu ditingkatkan. 3). Kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup semakin menurun. 4). Mitigasi bencana alam maupun bencana social belum optimal. 5). Kesadaran akan kebersihan lingkungan untuk menjaga kesehatan masih perlu ditingkatkan.

Sedangkan hambatan dalam pencapaian kinerja maupun serapan anggaran yang dialami dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Kapanewon Samigaluh mengalami kekurangan pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas, serta tidak meratanya kemampuan serta pengetahuan pegawai dari segi jumlah personil maupun kompetensinya;
2. Plafonisasi pagu anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon menyebabkan harus memilih dan memilah program dan kegiatan yang penting dan *urgent,* sehingga yang terjadi aldalah program dan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dab Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo merupakan kegiatan yang sifatnya rutin;
3. Wilayah Kapanewon Samigaluh sebagian besar merupakan perbukitan yang rawan terhadap bencana tanah longsor.

Adanya beberapa kendala dan hambatan tersebut menyebabkan permasalahan tersendiri bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka pelaksanaan prioritas bagi program dan kegiatan yang penting dan urgent adalah suatu yang harus dilaksanakan, sehingga tujuan terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang transparan, akuntabel dan partisipatif dapat di wujudkan.

Program dan kegiatan serta berbagai fasilitasi yang dilakukan oleh Kapanewon Samigaluh telah berdampak secara signifikan terhadap masyarakat. Program dan kegiatan tersebut turut mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu terwujudnya Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa. Program dan kegiatan tersebut juga mendukung pencapaian Standar Pelayanan Mminimal (SPM) di beberapa bidang, serta pencapaian *Millenium Development Goals* (*MDGs)* diantaranya penurunan kemiskinan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, perluasan akses pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tantangan untuk peningkatan pelayanan Kapanewon Samigaluh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan informasi dan daya kritis dari masyarakat sehingga mereka menginginkan pelayanan yang prima dari Kapanewon Samigaluh;
2. Ketersediaan dan keakuratan data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kapanewon Samigaluh adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan partisipatif apabila melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang ada di Kapanewon Samigaluh;
2. Kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku semakin tinggi.
3. Meningkatnya kedisiplinan dan juga kinerja dari pegawai yang ada di Kapanewon Samigaluh.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Berdasarkan permasalahan dan potensi yang dihubungkan dengan tugas dan fungsi pokok Kapanewon. Isu-isu strategis berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2026 yang dihadapi oleh Kapanewon Samigaluh antara lain:

1. Berbagai sektor terutama dalam sektor ekonomi sangat membutuhkan sarana dan prasarana serta pelayanan infrastruktur yang memadai, sehingga akan mempermudah pelaku usaha. Contoh dalam hal ini adalah kebutuhan akan penataan pasar tradisional yang lebih luas, teratur, dan nyaman;
2. Perlunya mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kapanewon Samigaluh untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Masih perlunya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan infrastruktur maupun menggerakkan perekonomian masyarakat;
4. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan kapanewon dan kalurahan;
5. Diperlukan antisipasi dini terhadap bencana alam di wilayah yang berpotensi bencana;
6. Perlunya peningkatan keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Kapanewon Samigaluh. Secara keseluruhan hasil telaahan Rancangan Awal RKPD 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KULON PROGO TAHUN 2026

Rancangan Awal RKPD 2026							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
No	Program / kegiatan / sub kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Program	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program / kegiatan / sub kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Program	Satuan	Kebutuhan dana (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	%	100.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	%	100.000.000	
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1	Dokumen	100.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1	Dokumen	100.000.000	
	Gelar Budaya Jogja	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	Laporan	100.000.000	Gelar Budaya Jogja	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	Laporan	100.000.000	Sub kegiatan ini sangat penting untuk tetap menjaga kelestarian nilai-nilai budaya dan nilai karakter khas Yogyakarta
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						SEKRETARIAT DAERAH						
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	%	18.009.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	%	18.009.000	
2	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1	Dokumen	18.009.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1	Dokumen	18.009.000	

	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kap. Samigaluh	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3	Dokumen	18.009.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kap. Samigaluh	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3	Dokumen	18.009.000	Sub kegiatan ini sangat penting untuk tetap menjaga kelestarian nilai tata kelola kelembagaan khas Yogyakarta
	UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						KECAMATAN						
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan non perizinan	100	%	64.318.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan non perizinan	100	%	3.683.300	
3	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2	Dokumen	60.635.100	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2	Dokumen		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7	Laporan	12.338.200	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7	Laporan	42.338.200	Sub kegiatan ini penting untuk mensinergikan kegiatan pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kalurahan.
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Samigaluh	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	Dokumen	18.296.900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Samigaluh	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	Dokumen	18.296.900	Sub kegiatan ini penting untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kalurahan.
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1	Dokumen	3.683.300	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1	Dokumen	3.683.300	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Samigaluh	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	Dokumen	3.683.300	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Samigaluh	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	Dokumen	3.683.300	Sub kegiatan ini mendukung pelaksanaan layanan yang diberikan pemerintah ke masyarakat
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	100	%	22.095.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	100	%	22.095.000	

5	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1	Dokumen	22.095.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1	Dokumen	22.095.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	22.095.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	22.095.000	Sub kegiatan ini penting untuk meningkatkan efektifitas pemberdayaan di wilayah Kapanewon
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan gangguan trantribum	100	%	56.630.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan gangguan trantribum	100	%	56.630.400	
6	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2	Dokumen	56.630.400	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2	Dokumen	56.630.400	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Samigaluh	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45	orang	25.066.800	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Samigaluh	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45	orang	25.066.800	Sub kegiatan ini penting untuk menjaga dan menumbuh kembangjan nilai-nilai dan jiwa nasionalisme, cinta tanah air.
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5	Laporan	31.563.600	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5	Laporan	31.563.600	Sub kegiatan ini penting untuk mendukung penenganan dan pencegahan konflik yang kemungkinan terjadi di wilayah
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	100	%	19.114.900	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	100	%		
7	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1	Dokumen	19.114.900	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1	Dokumen	19.114.900	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5	Laporan	19.114.900	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5	Laporan	19.114.900	Sub kegiatan ini penting untuk pendampingan kalurahan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya.

VII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	100	%	1.799.550.871	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	100	%	1.799.550.871	
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2	Dokumen	9.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2	Dokumen	9.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Samigaluh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Samigaluh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	6.000.000	Sub kegiatan ini penting bagi sebuah OPD karena operasional OPD dimulai dari penyusunan perencanaan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	Laporan	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	Laporan	3.000.000	Sub kegiatan ini penting untuk mengukur, mengevaluasi keberhasilan OPD dalam menjalankan program dan kegiatan
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3	Dokumen	1.502.187.415	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3	Dokumen	1.502.187.415	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Samigaluh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	orang	1.469.874.715	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Samigaluh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	orang	1.469.874.715	Sub kegiatan ini penting untuk tetap menjaga terbayarnya gaji ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Samigaluh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	28.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Samigaluh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	28.600.000	Sub kegiatan ini penting untuk mendukung kegiatan administrasi mulai dari perencanaan pelaksanaan dan evaluasi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	Laporan	3.712.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	Laporan	3.712.700	Sub kegiatan ini penting karena sebagai wadah untuk menyajikan pelaporan baik itu pelaporan keuangan, perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan lainnya
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2	Dokumen	28.631.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2	Dokumen	28.631.800	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Samigaluh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	11.061.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	11.061.800	Sub kegiatan ini penting karena jika sub kegiatan ini tidak ada maka penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tidak bisa dialokasikan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	8.570.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	17.570.000	Sub kegiatan ini penting karena jika sub kegiatan ini tidak ada maka rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tidak bisa dilaksanakan
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2	Dokumen	144.810.636	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	2	Dokumen	144.810.636	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	19.770.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	19.770.800	Jika sub kegiatan ini tidak maka pembayaran listrik, air, internet dan telepon akan mengalami kendala.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	125.039.836	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Samigaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	125.039.836	Jika sub kegiatan ini tidak maka pembayaran jasa tenaga kebersihan, keamanan akan mengalami kendala.
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3	Dokumen	114.921.020	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3	Dokumen	114.921.020	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Samigaluh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	94.662.920	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap. Samigaluh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	94.662.920	Dengan anggaran yang tersedia saat ini dirasa sangat kurang, sebab bertambah tahun masa manfaat kendaraan berkurang sehingga beban perawatan menjadi besar
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Samigaluh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	6.256.100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Samigaluh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	6.256.100	Dengan anggaran yang saat ini tersedia sangat tidak layak untuk memelihara gedung maka dari itu besar harapanya untuk sub kegiatan ini ditambah anggarannya

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Samigaluh	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	unit	14.002.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Samigaluh	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	unit	14.002.000	Dengan anggaran yang saat ini tersedia sangat tidak layak untuk memelihara sarana dan prasarana maka dari itu besar harapanya untuk sub kegiatan ini ditambah anggarannya
						2.079.718.571						2.079.718.571		

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkap pusat dan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Tahunan. Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari tingkat Kalurahan, Kapanewon, Kabupaten hingga tingkat Provinsi.

Musrenbang Kapanewon adalah forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kapanewon. Musrenbang tingkat Kapanewon ini dihadiri oleh *Stakeholders* yang ada di Kapanewon. Pemangku Kepentingan *(Stakeholders)* Kapanewon adalah pihak yang langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kapanewon serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat.

Tujuan diadakannya musrenbang tingkat Kapanewon yaitu untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang Kalurahan/Kelurahan, usulan OPD tingkat Kapanewon, ormas tingkat Kapanewon yang akan menjadi proritas pembangunan di wilayah Kapanewon yang dituangkan dalam RKP, membahas dan menyepakati program kegiatan yang belum disepakati menjadi program kegiatan prioritas; dan menyepakati tim delegasi Kapanewon yang akan mewakili dalam forum OPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten.

Proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat secara *bottom up* sehingga diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan secara berjenjang musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) di semua tingkatan mulai dari pedukuhan dan kalurahan telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat

kapanewon. Seluruh *stakeholder* yang berhubungan dengan usulan dari tingkat kalurahan dan instansi tingkat kapanewon diundang untuk menentukan prioritas usulan program dan kegiatan.

Melihat proses musrenbang yang telah dilakukan di tingkat kapanewon telah sesuai dengan prosedur dan hasilnya pun telah sesuai dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Tabel 2. 5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2026

No.	Program / Kegiatan	Lokasi (Desa dan Kapanewon)	Sasaran Program / Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	--	--	--	--	--

Sumber: Kapanewon Samigaluh, 2026

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional yang Termuat Pada Asta Cita 2026

Rencana Kerja yang disusun berpedoman kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Adapun Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 meliputi:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Daerah Kulon Progo, maka Kapanewon Samigaluh memiliki tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan yang akan dicapai bersama. Tujuan merupakan sesuatu hal/keadaan yang akan deicapai dari kegiatan yang perlu dilakukan oleh panewu selaku pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan media yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon Samigaluh yang dikaitkan dengan target kinerja pada rumusan renstra Tahun 2025-2029. Sasaran Kapanewon Samigaluh yaitu:

1. Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon

Target kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk melakukan evaluasi dan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan target kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Target kinerja Kapanewon Samigaluh ini merupakan alat yang bermanfaat untuk menilai apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja kapanewon pada akhir periode karena dapat segera dilakukan perbandingan antara target dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin lima indikator kinerja, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Samigaluh mendukung visi Kepala Daerah yaitu TerwujudnyaKulon Progo yang makmur, mandiri, religious, berbudaya yang berkelanjutandan misi ketiga Kepala Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Govermance*, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1

Indikator Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Renja Tahun 2026
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,23
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,90
	Nilai Akuntabilitas	Nilai	A (85,3)

	Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)		

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026

Tabel 3.2.2

Indikator Sasaran Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Renja Tahun 2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
2	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 - 3,0
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,291

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026

Kapanewon Samigaluh telah menentukan target kinerja sasaran tujuan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga merupakan Indikator Kinerja Kapanewon. Makna dari tujuan dan sasaran tersebut adalah bahwa fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon Samigaluh memegang prinsip keterbukaan, dapat dipertanggung jawabkan baik secara formal maupun material, dan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat. Kinerja sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Indikator Kinerja Utama tertuang pada tabel berikut.

Tabel 3.2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2026
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsiv dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata presentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,90
			Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	100

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026

3.3 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Renja Perangkat Daerah

Kapanewon Samigaluh telah menentukan target kinerja sasaran tujuan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga merupakan Indikator Kinerja Kapanewon. Makna dari tujuan dan sasaran tersebut adalah bahwa fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon Samigaluh memegang prinsip keterbukaan, dapat dipertanggung jawabkan baik secara formal maupun material, dan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat. Kinerja sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Indikator Kinerja program tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Program Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RKPD 2026
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan non perijinan	%	100,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu	%	100,00
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan gangguan trantibum	%	100,00
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi produk hokum desa yang tepat waktu	%	100,00
5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi.	%	100,00

6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan.	%	100,00
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2026

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan Misi yang diemban oleh suatu organisasi, maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   c) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Deesa dan Kelurahan

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a) Koordinasi Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
a) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
b) Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
a) Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantrendan kalurahan/Kelurahan

g. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

1) Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
a) Gelar Budaya Jogja

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka di tahun 2026 Kapanewon Samigaluh mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan Renstra Kapanewon Samigaluh Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Validasi.

Secara garis besar rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Tahun 2026 dapat dijelaskan bahwa terdapat 7 Program yang terdiri atas 12 kegiatan dan 21 sub kegiatan untuk anggaran Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan oleh Kapanewon Samigaluh. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KAPANEWON SAMIGALUH TAHUN 2026

Nama OPD : Kapanewon Samigaluh
Jumlah Pagu : Rp. 2.079.718.571,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON SAMIGALUH						**2.079.718.571,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
1,	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kelompok Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	2.22.08.5.07. 0006	Gelar Budaya Jogja														

			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh , Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kelompok Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**18.009.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**18.009.000,00**							**0,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**18.009.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	18.009.000,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	18.009.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.961.709.571,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.961.709.571,00**							**0,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.799.550.871,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	9.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	1.502.187.415,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1.469.874.715,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	28.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.712.700,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	28.631.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.061.800,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	17.570.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	144.810.636,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH

	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	19.770.800,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	125.039.836,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	114.921.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	94.662.920,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.256.100,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	14.002.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**64.318.400,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	60.635.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	42.338.200,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	18.296.900,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	3.683.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	3.683.300,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**22.095.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	22.095.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	22.095.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kegiatan Pemberdayaan Desa		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**56.630.400,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	56.630.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				45 Orang	25.066.800,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	31.563.600,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**19.114.900,00**						**-**	**0,00**	

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	19.114.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintahan Desa	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	19.114.900,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintahan Desa		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	J U M L A H							**2.079.718.571,00**							**0,00**	

Sumber: Sipd-ri.kemendagri.go.id, 2026

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon Samigaluh Tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon Samigaluh periode 2025-2029 dan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Rencana Kerja ini memuat dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon Samigaluh dalam rangka mencapai sasaran yang telah di tetapkan.

Dari hasil penyajian pada bab-bab sebelumnya mulai dari pendahuluan, gambaran umum, sampai pada penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan organisasi, analisis potensi, hambatan dan permasalahan, serta kondisi yang diharapkan di masa mendatang bahwa pada dasarnya Rencana Kerja merupakan sebuah instrumen perencanaan yang didasarkan pada data yang valid dan akurat yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan pembangunan. Dengan telah selesainya perumusan Rencana Kerja ini, berarti pemerintah Kapanewon Samigaluh telah memiliki pedoman yang mengatur arah perkembangan organisasi untuk mencapai tujuan dimasa yang akan datang dengan mengutamakan dukungan dan partisipasi seluruh pihak termasuk masyakarat dalam rangka mewujudkan *good governance.* Untuk mencapai keberhasilan tersebut pemerintah Kapanewon Samigaluh tidak dapat bekerja sendiri, namun harus menjalin kerjasama dengan pemerintah kalurahan dan instansi pemerintah tingkat kapanewon lainnya serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat kabupaten.

Rencana Kerja ini harus dikembangkan menjadi sarana yang efektif oleh pemerintah Kapanewon Samigaluh untuk menentukan jalannya roda pemerintahan. Selanjutnya renja ini akan digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja pemerintahan yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan tolok ukur Rencana Kerja tersebut, maka seluruh aktivitas dari instansi harus dapat diukur baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Pengukuran tersebut tidak semata-mata difokuskan kepada *input* (masukan) dari kegiatan instansi tersebut, namun lebih ditekankan kepada *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) dari kegiatan tersebut bagi peningkatan kesejahteraan masyakarat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab.

Samigaluh, 29 Juli 2025
PANEWU SAMIGALUH

SURYANTORO, S.IP., M.Si.
Pembina Tk I; IV/b
NIP. 19700326 199803 1007

PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON KALIBAWANG

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2026

(Penetapan)



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disusun periode tahunan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan pertanggungjawaban APBD.

Substansi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah program dan kegiatan pembangunan berikut kerangka pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kapanewon Kalibawang Tahun 2026 ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditetapkan, namun demikian tentunya masih banyak kekurangan. Kritik yang membangun masih kami harapkan untuk perbaikan perencanaan di tahun mendatang. Selanjutnya harapan kami semoga Rencana Kerja Kapanewon Kalibawang ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahapan selanjutnya.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Kerja Kapanewon Kalibawang Tahun 2026 ini bermanfaat bagi Kapanewon Kalibawang, Dinas/ Instansi pengambil kebijakan perencanaan dan anggaran pembangunan daerah serta masyarakat pada umumnya.

Kalibawang, 29 Juli 2025

Panewu,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KALIBAWANG

RISDIYANTO NUGROHO, S.STP., M.Eng.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197706281996121001

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 11

2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD…… 14

2.4. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat..... 24

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH** …… 25

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....….. 25

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah……. 26

3.3. Program dan Kegiatan..... 27

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**…… 33

BAB V **PENUTUP** ……..... 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan pertanggungjawaban APBD.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan mengacu pada hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026, yang memuat pagu indikatif, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Organisasi Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Disamping itu, dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah harus mempertimbangkan prediksi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo pada rumusan program dan kegiatan tahun 2026, dan mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepanewon Kalibawang.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rancana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026;

12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah sebagai penjabaran Rancangan Renstra Tahun 2025-2029, mengacu pada hasil Forum Perangkat Daerah (Forum OPD) Tahun 2026 dan berpedoman pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

1. Untuk mewujudkan sistem perencanaan integral secara vertikal ke atas dengan RKPD Kabupaten, Provinsi, Kementerian dan Lembaga, serta ke bawah dengan RKP kalurahan.
2. Untuk mewujudkan sistem perencanaan integral secara horisontal dengan Pemerintah Daerah/ organisasi lain.
3. Untuk mewujudkan keterpaduan antar program dan kegiatan.
4. Untuk mewujudkan pedoman dan dasar hukum, pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Untuk mewujudkan tolok ukur keberhasilan, pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Untuk mewujudkan akuntabilitas, ditinjau dari segi perencanaan.
7. Untuk memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran serta menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan,sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.
8. Untuk mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah
9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Kalibawang Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analiasis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3.Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4.Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Penelahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KEGIATAN DAN PEDOMAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pencapaian sasaran Daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kapanewon Kalibawang pada Tahun 2024 melaksanakan beberapa program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja Kapanewon Kalibawang didasarkan pada sasaran dengan pencapaian sasaran secara rinci sebagaimana dalam **Tabel II.1** berikut ini:

Tabel II.1

Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Kalibawang

Tahun 2024 (n-2)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah	100	100
Meningkatnya Pelayanan Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,50	89,882
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	98,25	98,25

Sedangkan untuk pengukuran kinerja program Kapanewon Kalibawang pada tahun 2024 sebagaimana dalam **Tabel II.2** berikut ini:

Tabel II.2

Pengukuran Kinerja Program Kapanewon Kalibawang

Tahun 2024 (n-2)

Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100
Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja	Cakupan Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja	100	100
Peningkatan Sarana / Prasarana kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Sarana / Prasarana kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	100	100
Peningkatan Pelayanan Kapanewon	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kapanewon	84,50	89,882
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	98,25	98,25

Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang Tahun 2025 (Tahun Berjalan) dapat dilihat pada **Tabel II.3** berikut :

Tabel II.3

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KAPANEWON KALIBAWANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN)

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Kalibawang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun terakhir 2026	Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	Unsur Kewilayahan									
7.01	Kecamatan									
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**	100	**25%**	75,53	75,53
7.01.01.2.01	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu**	**94 Dokumen**	**23 Dokumen**	**23 Dokumen**	**23 Dokumen**	100	**23 Dokumen**	**71 Dokumen**	75,53
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	4 dokumen	8 dokumen	80
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84 dok	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	100	21 dokumen	63 dokumen	75
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat waktu**	**56 Laporan**	**14 Laporan**	**14 Laporan**	**14 Laporan**	100	**14 Laporan**	**42 Laporan**	67,02
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1316 orang/bulan	280/orang bulan	280/orang bulan	280/orang bulan	100	322/orang bulan	882/orang bulan	67,02
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelasksanaan tugas ASN	48 dokumen	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	75
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	56 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100	14 Laporan	42 Laporan	75

7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**	**8 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	100	**2 Dokumen**	**6 Dokumen**	75
7.01.01.2.06.0002	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	75
7.01.01.2.06.0009	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	75
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penambahan Aset**	**9 Unit**	1 unit	3 unit	3 unit	100	2 unit	6 unit	66,67
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penambahan Aset	9 unit	1 unit	3 unit	3 unit	100	2 unit	6 unit	66,67
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**96 Laporan**	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100	24 Laporan	72 Laporan	75
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36 laporan	75
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36 laporan	75
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	100	**3 Laporan**	**3 Laporan**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100	8 unit	24 unit	75
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	3 unit	75
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	144 unit	36 unit	36 unit	36 unit	100	36 unit	108 unit	75
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	18,75%	18,75%	18,75%	100	20,83%	74,34%	74,34
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**114 Laporan**	27 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	100	30 Laporan	84 Laporan	73,68
7.01.02.2.01.0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100	20 dokumen	60 dokumen	75
7.01.02.2.01.0002	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	114 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	100	30 Laporan	84 Laporan	73,68
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**48 dokumen**	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	

7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Disedakan	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	100	48 dokumen	48 dokumen	50
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Perentase Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100%**	**23,40%**	**25,53%**	**25,53%**	100	**25,53%**	**74,47%**	74,47
7.01.0. 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan**	**47 laporan**	11 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	35 laporan	74,47
7.01.0. 2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47 laporan	11 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	35 laporan	74,47
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Peningkatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**25%**	**25%**	**25%**	100	**25%**	**75%**	75
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**92 laporan**	23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	100	23 Laporan	69 Laporan	75
7.01.05.2 .01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	440 orang	110 orang	110 orang	110 orang	100	110 orang	330 orang	75
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik Sosial yang Ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	92 laporan	23 laporan	23 laporan	23 laporan	100	23 laporan	69 laporan	75
7.01.06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	25%	25%	25%	100	25%	75%	75
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**48 laporan**	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36 laporan	75
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Lapiran Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36 laporan	75
4.01.04	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	25%	25%	25%	100	25%	75%	75
4.01.04.5.01	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	8 Dokumen	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	100	**2 dokumen**	**6 dokumen**	75
4.01.04.5.01.0007	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	8 dokumen	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	100	**2 dokumen**	**6 dokumen**	75
2.22.08	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**1 laporan**	**1 laporan**	**1 laporan**	100	**1 laporan**	**3 laporan**	75
2.22.98.5.07	**Adat, Seni Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Jumlah Laporan Adat, Seni Tradisi dan Lembaga Budaya**	**4 laporan**	**1 laporan**	**1 laporan**	**1 laporan**	100	**1 laporan**	**3 laporan**	75
2.22.98.5.07	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4 laporan	**1 laporan**	**1 laporan**	**1 laporan**	100	**1 laporan**	**3 laporan**	75

a) Program yang dilaksanakan mendasar pada Perubahan Renstra 2023-2026 Kapanewon Kalibawang menjadi 7 Program terbagi dalam 13 kegiatan dan 22 sub kegiatan.

b) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terpenuhinya kinerja hasil/keluaran dari berbagai program dan kegiatan tersebut atas, antara lain : adanya komitmen bersama seluruh pimpinan dan staf (aparatur) Kapanewon Kalibawang untuk mencapai target kinerja secara optimal, mantapnya koordinasi, pengendalian, sinkronisasi dan simplifikasi dengan berbagai unit kerja/ Perangkat Daerah lain, forkompimkap, pemerintah kalurahan, lembaga-lembaga kalurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun warga masyarakat pada umumnya.

c) Implikasi yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama perubahan rencana strategis Kapanewon Kalibawang diimplementasikan dan berdasarkan penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa rencana kerja tahun 2024 dapat direalisasikan dengan optimal. Namun harus diakui bahwa kegiatan yang terdanai dalam APBD Kabupaten Kulon Progo masih terbatas yang belum sebanding dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon yang cenderung semakin bertambah.

d) Kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Dengan mengetahui faktor penyebab dan implikasinya terhadap capaian tersebut, maka tindakan yang harus diambil guna penyempurnaan perencanaan dan penganggaran ke depan adalah :

1. Dinamika tugas pokok dan fungsi kapanewon, kebijakan pemerintah daerah, maupun perubahan peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan penyesuaian program dan kegiatan serta dijadikan landasan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan merujuk pada Perubahan Renstra 2023-2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Kulon Progo yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.
2. Dalam penyusunan kerangka pendanaan harus mengedepankan prinsip proporsionalitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai prestasi kerja Perangkat Daerah atau dengan kata lain anggaran harus berbasis kinerja. Disisi lain harus diperkuat sistem pengendalian internal yang memadai, sehingga dapat dipastikan bahwa pengelolaan anggaran Perangkat Daerah dapat dipertanggungjawabkan, tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.

3. Aspek sumberdaya manusia aparatur harus diperkuat dengan melaksanakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kompetensi, peningkatan disiplin serta diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan, Kapanewon dalam tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan / atau kelurahan, dan penugasan sebagian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon, Kapanewon juga mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat;
d. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
e. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kapanewon;
h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kalurahan dan/ atau kelurahan.
i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
j. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kapanewon;
k. Pelaksanaan penugasan sebagian urusan keistimewaan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan;
l. Pelaksanaan administrasi Kapanewon;
m. Pelaksanaan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas kapanewon; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mendasar pada Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nomor 324/A/2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu, Panewu mendapat pendelegasian sebagian kewenangan berbagai aspek kewenangan meliputi:

a. 1. Perizinan
   2. Non Perizinan
   3. Koordinasi
   4. Pembinaan
   5. Pengawasan
   6. Fasilitasi
   7. Penetapan
   8. Penyelenggaraan
b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/ Kelurahan
c. Tugas Pembantuan
d. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Keberhasilan pembangunan di Kapanewon Kalibawang merupakan bagian keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan keserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kapanewon Kalibawang dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo.

Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi kapanewon dan kalurahan.

Penyajian tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan disajikan pada **Tabel II.4** berikut.

Tabel II.4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2024 (thn n-2)	TAHUN2025 (thn n-1)	TAHUN 2026 (thn n)	TAHUN 2027 (thn n+1)	TAHUN 2024 (thn n-2)	TAHUN 2025 (thn n-1)	TAHUN 2026 (thn n)	TAHUN 2027 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah			100	100	100		100	100	100		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			84,50	84,75	89,902		89,882	90,21	89,902		
3	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon			98,07	99,12	100,00		98,25	99,12	100,00		

2.3. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Kalibawang Tahun 2026. Review terhadap RKPD Tahun 2026 dapat dilihat **Tabel II.5** berikut :

Tabel II.5

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Kulon Progo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					
I	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100.000.000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100%**	**100.000.000**	
	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya		Jumlah Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya yang Dilaksanakan	***1 Event***	***100.000.000***	***Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya***		Jumlah Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya yang Dilaksanakan	***1 Dokumen***	***100.000.000***	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Gelar Budaya Jogja	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
	SEKRETARIAT DAERAH					**SEKRETARIAT DAERAH**					
II	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**40.000.000**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100%**	**17.039.000**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		***Jumlah Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan***		**40.000.000**	***Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan***		***Jumlah Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan***	***1 Dokumen***	**17.039.000**	
	Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/ dan Kalurahan / Kelurahan	Kap. Kalibawang	Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	40.000.000	Penerapan dan pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/dan Kalurahan / Kelurahan	Kap. Kalibawang	Jumlah dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	17.039.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR KEWILAYAHAN					**UNSUR KEWILAYAHAN**					
	KECAMATAN					**KECAMATAN**					
III	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**2.022.560.925**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**1.814.085.069**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				***11.000.000***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			***2 Dokumen***	**11.000.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Kalibawang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat	2 Dokumen	7.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Kalibawang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat	2 Dokumen	6.500.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**1.541.503.035**	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			**3 Dokumen**	**1.526.436.195**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Kalibawang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	322Orang / bulan	1.497.077.335	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Kalibawang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	21 Orang / bulan	1.492.436.195	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			ASN					ASN			
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Kalibawang	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	40.425.700	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Kalibawang	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	29.800.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semes teran SKPD	14 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semes teran SKPD	14 Laporan	4.200.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**40.526.600**	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			***2 Dokumen***	**36.750.800**	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Kalibawang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	18.626.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Kalibawang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	7.050.800	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Kalibawang	Terlaksana nya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.900.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Kalibawang	Terlaksana nya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	29.700.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah				**168.433.397**					-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kalibawang	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Unit	168.433.397	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kalibawang	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**151.584.426**	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			***2 Dokumen***	**147.567.874**	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.959.704	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.629.156	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	120.624.722	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	121.938.718	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**109.513.467**	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			***3 Dokumen***	**92.330.200**	
1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Kap. Kalibawang	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	8 unit	80.384.367	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kap. Kalibawang	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	8 unit	72.680.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kalibawang	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	11.787.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kalibawang	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	5.945.300	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kalibawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	21 unit	17.341.700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap. Kalibawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	15 unit	13.704.900	
IV	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**40.741.909**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100%**	**57.586.500**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				**31.059.100**	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***			**2 Dokumen**	**51.580.100**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	27 Laporan	11.679.100	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	37.653.300	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kalibawang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Dokumen	19.380.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kalibawang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Dokumen	13.926.800	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**9.682.809**	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***			***1 Dokumen***	**6.006.400**	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Kalibawang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilakukan	12 Dokumen	9.682.809	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kap. Kalibawang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilakukan	12 Dokumen	6.006.400	
V	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	**24.900.300**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**100%**	**20.609.500**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			***1 Dokumen***	**24.900.300**	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***			***1 Dokumen***	**20.609.500**	
1	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.900.300	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	20.609.500	
VI	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**91.252.800**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**64.653.550**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah			**2 Dokumen**	**91.252.800**	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketugasan Kepala Daerah***			**2 Dokumen**	**64.653.550**	
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Kalibawang	Junlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 orang	33.491.300	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap. Kalibawang	Junlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 orang	33.781.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					
	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketemtuan Perundang-undangan	6 Laporan	30.871.850	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketemtuan Perundang-undangan	6 Laporan	30.871.850	
VII	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	57.761.500	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**15.765.000**	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**25.465.000**	***Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***			***1 Dokumen***	**15.765.000**	
1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	***25.465.000***	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap. Kalibawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7 Laporan	15.765.000	
	Jumlah Pagu Dana Kegiatan				**2.344.920.934**	**Jumlah Pagu Dana Kegiatan**				**2.089.738.619**	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan program dan kegiatan yang berasal dari pemangku kepentingan (masyarakat) telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Mulai tahap musyarawah pembangunan pedukuhan, dilanjutkan musyawarah pembangunan desa (musrenbang) tingkat Desa, dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Proses pelaksanaannya mengedepankan pada perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur / lembaga dan seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa.

Selanjutnya telah dihasilkan kesepakatan usulan program/kegiatan hasil musrenbang desa untuk dibawa musrenbang tingkat Kapanewon dan wakil delegasi peserta Musrenbang Tingkat Kapanewon.

Secara substantif usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan seluruhnya masih dalam ruang lingkup atau ranah sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Kalibawang. Sehingga usulan tersebut layak untuk dilanjutkan pada tahap Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Kulon Progo.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat hasil Musrenbang Kapanewon Kalibawang sebagaimana **Tabel II.6** berikut :

Tabel II.6
Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana kerja yang disusun Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD dan Kebijakan Nasional. Selanjutnya sesaui dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJMN tahun 2025-2029 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuji Indonesia Emas 2045"* Visi tersebut mengandung arti pembnagunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bansa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045, Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasai manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meninqkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dao penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Delapan Asta Cita ini dimplementasikan menjadi delapan Prioritas Nasional. Setiap Prioritas Nasional mencakup Langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan Pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Kalibawang Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dokumen RPJMD 2025-2029 disusun berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 dan Visi Misi Bupati Kulon Progo masa jabatan 2025-2029.

Periode 2025-2029 merupakan periode pertama dalam upaya mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo 2025-2045, yaitu *"Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan (SEMARAK)."* Fokus utama pembangunan daerah pada periode ini adalah penguatan fondasi Pembangunan melalui respon kebijakan yang tepat sesuai isu strategis atau tantangan yang mengemuka pada periode 2025-2029 untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di masa mendatang.

Dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis dan tantangan pembangunan daerah, maka ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, yaitu

Visi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 : *Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, berbudaya yang Berkelanjutan.*

Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo :

1. *Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.*
2. *Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi*
3. *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.*
4. *Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana*

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Kulon Progo 2025-2029, telah dirumuskan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang saling berkaitan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keterpaduan ini menggambarkan arah strategis pembangunan lima tahun ke depan, dengan tujuan ditetapkan berdasarkan visi dan misi, serta sasaran dirancang untuk memastikan pencapaiannya secara sistematis dan terukur. Dengan sinergi ini, pembangunan di Kabupaten Kulon Progo diharapkan berkesinambungan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dari Visi Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 dan rumusan misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan, maka tujuan Kapanewon Kalibawang Tahun 2025-2029

adalah **"*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel*"**.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Kapanewon Kalibawang tujuan dan sasaran kerja Kapanewon Kalibawang Tahun 2026 sebagaimana Tabel III.1 berikut:

Tabel III. 1

Tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Kalibawang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,90
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,23
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0-3,0
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89,902

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Kalibawang Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel III.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Kalibawang Tahun 2026

No	Urusan,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**100 %**	**100.000.000,00**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1 Dokumen**	**100.000.000,00**	
	Gelar Budaya Jogja	Kap.Kalibawang	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000,00	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100 %**	**17.039.000,00**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		**Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun**	**1 Dokumen**	**17.039.000,00**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kap.Kalibawang	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	3 Dokumen	17.039.000,00	
III	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100 %**	**1.814.085.069,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu**	**2 Dokumen**	**11.000.000,00**	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap.Kali bawang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.500.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat waktu**	**3 Dokumen**	**1.526.436.195,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap.Kali bawang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	1.492.436.195,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap.Kali bawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	29.800.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	4.200.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**36.750.800,00**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap.Kali bawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.050.800,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	29.700.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Unit Sarana dan Prasaranan yang Disediakan**	**1 Dokumen**	**-**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap.Kali bawang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**2 Dokumen**	**147.567.874,00**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	121.938.718,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	25.629.156,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**3 Dokumen**	**92.230.200,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap.Kali bawang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	72.680.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap.Kali bawang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.394.800,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap.Kali bawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	13.704.900,00	
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**100 %**	**57.586.500,00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**2 Dokumen**	**51.580.100,00**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	37.653.300,00	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap.Kali bawang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	13.926.800,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Jumlah Dokumen non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan**	**1 Dokumen**	**6.006.400,00**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Dokumen	6.006.400,00	
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu**	**100 %**	**20.609.500,00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**1 Dokumen**	**20.609.500,00**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	20.609.500,00	
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase penanganan gangguan Trantibum**	**100 %**	**64.653.550,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**2 Dokumen**	**64.653.550,00**	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kap.Kali bawang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang	33.781.700,00	

	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	30.871.850,00	
VII	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu**	**100 %**	**15.765.000,00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**	**1Dokumen**	**15.765.000,00**	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kap.Kali bawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7 Laporan	15.765.000,00	
					2.089.738.619,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026, maka selanjutnya disusun langkah-langkah rencana kerja yang lebih operasional untuk kurun waktu satu tahun, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program dan kegiatan Kapanewon Kalibawang pada Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah program sebanyak 7 jenis
2) Jumlah kegiatan sebanyak 13 jenis
3) Jumlah sub kegiatan sebanyak 22 jenis
4) Total kebutuhan dana/pagu indikatif sejumlah Rp. 2.089.738.619,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kulon Progo, terdiri dari :
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp1.492.436.195,00
   -Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 597.302.424,00

Rincian Program dan Kegiatan Kapanewon Kalibawang pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam **Tabel IV** berikut ini :

Tabel IV.
Program dan Kegiatan Kapanewon Kalibawang pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah (Renja OPD) Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON KALIBAWANG						**2.089.738.619,00**							**2.360.459.490,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi***	**-**			**100 %**	**100.000.000,00**						**100 %**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	1 Dokumen	100.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
							1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	1 Laporan	100.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**17.039.000,00**							**40.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**17.039.000,00**							**40.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Sub Kegiatan Keistemawaan pada urusan Kelembagaan berkinerja Sangat Tinggi***	**-**			**100 %**	**17.039.000,00**						**100 %**	**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	17.039.000,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	1 Dokumen	40.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	17.039.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	3 Dokumen	40.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.972.699.619,00**							**2.220.459.490,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.972.699.619,00**							**2.220.459.490,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi***	**-**			**100 %**	**1.814.085.069,00**						**100 %**	**2.017.108.081,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	11.000.000,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	2 Dokumen	11.500.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	2 Dokumen	7.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	4.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	12 Laporan	4.500.000,00 .	KAPANEWON KALIBAWANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	1.526.436.195,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	3 Dokumen	1.526.436.195,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.492.436.195,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	21 Orang/bulan	1.492.436.195,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	29.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	1 Dokumen	29.800.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	14 Laporan	4.200.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	36.750.800,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-2 Dokumen	48.326.600,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.050.800,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	1 Paket	18.626.600,00	KAPANEWON KALIBAWANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	29.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	1 Laporan	29.700.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	0,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	1 Dokumen	168.433.397,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	10 Unit	168.433.397,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	147.567.874,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	2 Dokumen	152.898.422,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25.629.156,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	1 Laporan	30.959.704,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	121.938.718,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	1 Laporan	121.938.718,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			3 Dokumen	92.330.200,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an	Lingkup Kapanewon Kalibawang	3 Dokumen	109.513.467,00	KAPANEWON KALIBAWANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	72.680.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	8 Unit	80.384.367,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.945.300,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	1 Unit	11.787.400,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	13.704.900,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	15 Unit	17.341.700,00	KAPANEWON KALIBAWANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase pelayanan non perizinan***	-			**100 %**	**57.586.500,00**						**100 %**	**61.262.909,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	51.580.100,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	2 Dokumen	51.580.100,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	37.653.300,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	5 Laporan	37.653.300,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	13.926.800,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	6 Dokumen	13.926.800,00	KAPANEWON KALIBAWANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	6.006.400,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	1 Dokumen	9.682.809,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	6.006.400,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	12 Dokumen	9.682.809,00	KAPANEWON KALIBAWANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu***	**-**			**100 %**	**20.609.500,00**						**100 %**	**24.900.300,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			1 Dokumen	20.609.500,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	1 Dokumen	24.900.300,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	20.609.500,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	8 Laporan	24.900.300,00	KAPANEWON KALIBAWANG
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase penanganan gangguan trantibum***	**-**			**100 %**	**64.653.550,00**						**100 %**	**91.543.200,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			2 Dokumen	64.653.550,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	2 Dokumen	91.543.200,00	KAPANEWON KALIBAWANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				35 Orang	33.781.700,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	35 Orang	33.781.700,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan *Perundang-Undangan*				6 Laporan	30.871.850,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	6 Laporan	57.761.500,00	KAPANEWON KALIBAWANG
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu***	**-**			**100 %**	**15.765.000,00**						**100 %**	**25.645.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Laporan Pelaksanaan Sub* *Kegiatan*	-			1 Dokumen	15.765.000,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	1 Dokumen	25.645.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				7 Laporan	15.765.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an	Lingkup Kapanewon Kalibawang	7 Laporan	25.645.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Kalibawang Tahun 2026 ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta pengambilan kebijakan untuk tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berikutnya.

Keberhasilan pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini tidak lepas dari peran serta dan tanggung jawab seluruh ASN Kapanewon Kalibawang serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Kalibawang, 29 Juli 2025

Panewu,

RISDIYANTO NUGROHO, S.STP., M.Eng.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19770628199612100

RENCANA KERJA

TAHUN 2026





BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Sugiman, Watulunyu , Margosari, Pengasih
Telp. (0274) 773837

DAFTAR ISI

		Halaman
Halaman Sampul		i
SK Bupati Kulon Progo		ii
Daftar Isi		v
Daftar Tabel		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud Dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 dan Capaian Kinerja	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	14
	2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan fungsi SKPD	16
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	48
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	48
	3.2 Tujuan Dan Sasaran	48
	3.3 Program dan Kegiatan	50
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB V	PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Kinerja Tahun 2024	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	19
Tabel 3.1	Tujuan Dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode Renstra 2025-2026	49
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan	52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun . Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan renja perangkat daerah terdiri atas enam tahapan, yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perangkat daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu

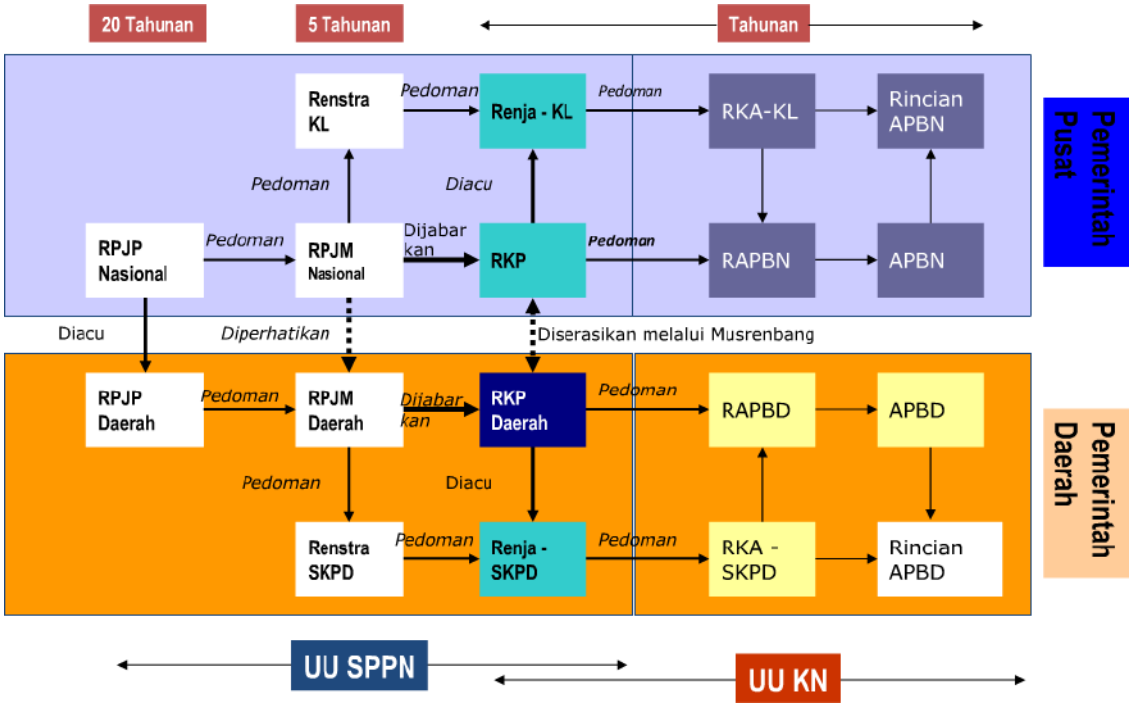
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan pelaksanaan atas Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang – undang.

Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 didasarkan pada Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026, serta Peraturan Bupati Kulon Progo tentang RKPD Tahun 2026. sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah. Selanjutnya rencana kerja ini akan menjadi pedoman penyusunan Pra RKA Badan dan selanjutnya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 melalui APBD 2026 Kabupaten Kulon Progo.

Keterkaitan dokumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Alur Perencanaan dan Penganggaran

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) diganti dengan UU Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305)
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standard Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentangPedoman Teknis PengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2025;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 103);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi terhadap berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

B. Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dalam merencanakan dan mengembangkan langkah langkah strategis guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo.
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka penyusunan perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada setiap tahun yang dibiayai dengan APBD
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memahami dan menilai arah kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan serta sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan.
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi
5. Sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 Dan Capaian Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 melaksanakan 6 program, 10 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan capaian renja sebagai berikut :

Tabel 2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Kode					Urusan /Bidang/Program/Kegiatan	Indkator kinerja program/kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegtn s/d Th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegtn Th 2024			Target program &kegtn (Renja PD)Th 2025	Rperkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegtn s/d Th 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8					**Unsur pemerintahan umum**									
8	**01**				**Kesatuan Bangsa dan Politik**									
8	**01**	**01**			**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**Persentase peningk penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota**	**100**							
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	**Jml dokumen perencanaan PD**	**94**							
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jml dokumen perencanaan PD	10	2	2	2	100	4	8	
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml laporan Evaluasi kinerja PD	84	21	21	21	100	21	63	
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi keuangan PD**	**Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan keuangan PD**								
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jml org yg menerima gaji dan tunjangan ASN	80	20	20	20	100	20	60	
8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN	Jml dok hasil penyediaan adm pelaks tugas ASN	48	48	48	48	100	48	144	
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan penyusunan lap keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jml lap keu bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan lap koordinasi penysnan lap keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	56	14	14	14	100	12	40	
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum PD**	**Terselenggaranya koordinasi perangkat daerah**	64						13,46	

Kode					Urusan /Bidang/Program/Kegiatan	Indkator kinerja program/kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegtn s/d Th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegtn Th 2024			Target program &kegtn (Renja PD)Th 2025	Rperkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegtn s/d Th 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	01	01	2.06	0002	Penyediaaan peralatan dan perlengk ktr	Jml paket peralatan dan perlengk katr yg disediakan	16	4	4	4	100	4		
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jm laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	12	12	12	100	12		
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		9							
8	01	01	2.07	0006	Pengadaad Peralatan dan Mesin Lainnya	Jml unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	0	0	3	0	3		
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Terselenggaranya kelancaran penunjang urusan umum PD**	*96*							
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jml laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	48	12	12	12	100	12		
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jml laporan penyediaan jasa pelayanan umum ktr yg disediakan	48	12	12	12	100	12		
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah**	173							
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional	Jml kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabtan yg dipelihara dan dibyrkan pjk nya	36	9	9	9	100	7		
8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gd ktr atau bangunan lainnya	Jml sarana dan prasarana gd ktr dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	136	34	34	34	100	7		
					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jml gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	1					0		

Kode					Urusan /Bidang/Program/Kegiatan	Indkator kinerja program/kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegtn s/d Th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegtn Th 2024			Target program &kegtn (Renja PD)Th 2025	Rperkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegtn s/d Th 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**01**	**02**			**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase peningkatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**80**							
8	01	02	2.01		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Terlaksananya pemantapan wawasan kebangsaan Masyarakat								
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jml org yg mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideolodi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bgsa, pembauran kebangsaaan, Bhinneka TunggalIka dan sejarah kebangsaan	2000	500	500	500	100	500		
8	**01**	**03**			**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**2000**							
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya peningkatan pendidikan politik masyarakat daerah	*2000*	250	250	250	100			

Kode					Urusan /Bidang/Program/Kegiatan	Indkator kinerja program/kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegtn s/d Th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegtn Th 2024			Target program &kegtn (Renja PD)Th 2025	Rperkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegtn s/d Th 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jml org yg mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2000	250	250	250	100	*120*		
8	**01**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase peningkatan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	**71,33**					142,51		
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya peningkt pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	*71,33*	54,26	57,55			*62,07*		
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jml dokumen hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	71,33	54,26	57,55			62,07		
8	**01**	**05**			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**29.55**							
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya								

Kode					Urusan /Bidang/Program/Kegiatan	Indkator kinerja program/kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegtn s/d Th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegtn Th 2024			Target program &kegtn (Renja PD)Th 2025	Rperkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegtn s/d Th 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jml org yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	29,55	12.50	18,18	18,18	100	23,86		
8	**01**	**06**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase peningkatan kewadanaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social**	**100**					**100**		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Pengananan Konflik Sosial	Terlaksananya peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik social	*2008*							
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jml Org Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1440	120	120	120	100	*100*		

Kode					Urusan /Bidang/Program/Kegiatan	Indkator kinerja program/kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegtn s/d Th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegtn Th 2024			Target program &kegtn (Renja PD)Th 2025	Rperkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegtn s/d Th 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jml Org Yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang ewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		120	120	120	100	100		
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jml dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	48	12	12	12	100	6		

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan tahun 2024 dari target 80% dapat tercapai 80 %. Keberhasilan program ini didukung oleh capaian atas kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang ditempuh melalui kegiatan sosialisasi ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bela negara.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dalam rangka meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemula, tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan dan pendidikan politik bagi parpol. Target kinerja program ini sebesar 80%, dapat dicapai 80 % dengan indikator persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Dengan indikator program persentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dapat tercapai 57,55 % dari target 57,55%. Hal ini berarti bahwa target program ini dapat tercapai 100 %, dilakukan dengan melaksanakan monitoring ormas dari ormas yang tercatat.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan indikator persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya, dengan target kinerja sebesar 18,18 %, dapat dicapai 18,18 %.. Hal ini berarti bahwa program ini dapar tercapai sebesar 100 %. Dukungan terhadap program ini adalah dilakukannya penetapan Kalurahan Bersinar pada tahun 2024 sebanyak 6 kalurahan dari kalurahan yang ada sebanyak 88 kalurahan.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan indicator kinerja persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan target kinerja 100 %, dapat tercapai 100 %. Keberhasilan pencapaian target program ini didukung atas terlaksananya penyelesaian konflik social dari konflik social yang ada.

Tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) konflik social dapat terselesaikan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi serta koordinasi yang baik secara internal maupun eksternal. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, diantaranya seperti:

a. Ada proses pelaksanaan kegiatan yang menyesuaikan dengan kebijakan pimpinan, sehingga sering terjadi antara taget dengan realisasi terjadi hal yang tidak sama.
b. Adanya beberapa kegiatan yang proses pelaksanaannya, terutama kegiatan perencanaan dan kegiatan pengendalian, saling berhubungan satu sama lain sehingga capaian fisik dan keuangan kegiatan tersebut terserap menyesuaikan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah

2.2. Analisis kinerja Pelayanan SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum mempunyai sasaran strategis peningkatan penyelesaian konflik sosial dengan indicator persentase peningkatan penyelesaian konflik sosial, yakni dengan kegiatan pendukungnya monitoring ormas dari ormas tercatat dan penyelesaian konflik social dari konflik yang ada. Tahun 2024 terdapat 3 konflik sosial dapat terselesaikan dari 3 konflik social yang ada. Terdapat 109 ormas dimonitoring dari sebanyak 145 ormas tercatat.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026	Tahun 2027 n+1	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**13**
1.	Persentase Peningkatan penyelesaian konflik sosial	--	--	78,78	81,03	85,67		78,78	81,03	85,67		
2.	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	--	--	100	100	100		100	100	100		
3.	Jumlah konflik yang terselesaikan	--	--	20	15	10		1	15	10		

2.3. Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan budaya, beragam suku, agama, ras serta golongan. Hal tersebut akan menjadi nilai tambah untuk negara Indonesia karena kaya akan keragaman. Namun, tidak menutup kemungkinan juga apabila keragaman tersebut menjadi masalah bagi Indonesia. Keragaman tersebut memungkinkan munculnya sifat etnosentrisme, dimana masyarakat Indonesia akan merasa bahwa golongannya lebih hebat daripada golongan yang lain, sehingga terjadilah intoleransi.

Persoalan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang akan tetap menjadi permasalahan krusial bagi Kabupaten Kulon Progo. Hal ini sejalan dengan dinamika yang berkembang bersamaan dengan transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan. Dinamika yang berkembang pada saat terakhir menunjukkan adanya potensi resistensi terhadap pengelolaan sumberdaya alam daerah yang cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari rencana kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang sampai saat ini masih menjadi polemik yang cukup hangat. Perbedaan kepentingan yang terjadi bukan hanya secara vertikal yang melibatkan antara masyarakat dan pemerintah, Namun juga secara horizontal yang melibatkan antara kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan kelompok masyarakat yang setuju. Apabila tidak dikelola dengan baik maka perbedaan kepentingan ini akan menjadi bersifat terbuka dan dikhawatirkan apabila ini terjadi dampaknya akan dapat mengganggu jalannya pembangunan. Di samping persoalan di atas, kondisi kemiskinan kemungkinan juga akan menjadi faktor diterminan bagi munculnya tindak kriminal dan kejahatan yang dampaknya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG), terhadap stabilitas Ipoleksosbudhankam;
2. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;

3. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi;
4. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme, radikalisme serta kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah;
5. Masih banyaknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
6. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai- nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
7. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/ penghayat kepercayaan;
8. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
9. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.
10. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis
11. Munculnya potensi konflik akibat suhu politik meningkat di kalangan masyarakat, Ormas/LSM dan Partai Politik pada menjelang, saat dan paska pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan :

1. Melemahnya pemahaman akan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa di kalangan masyarakat khususnya anak remaja.
2. Potensi kerawanan sosial di masyarakat baik yang kontra maupun yang pro terhadap kebijakan pemerintah Daerah.
3. Potensi penyebaran faham-faham radikalisme yang menjadi akar timbulnya terorisme.

Peluang Pengembangan :

1. Ketersediaan media informasi
2. Sinergitas pemangku kepentingan melalui forum komunikasi diskusi politik
3. Keberagaman dan kebhinekaan

2.4. Riview Terhadap Rancangan RKPD

Perkembangan situasi dan kondisi di masyarakat yang sangat dinamis mengakibatkan perlu adanya perubahan hal tersebut berimbas pada penyesuaian program kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kulon Progo, sehingga rencana kerja perlu dilakukan riview, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD 2026 Data diAmbil dari ranwal RKPD atau dari renstra					Hasil Analisis Kebutuhan Diambil dari perbup 23 tahun 2025 tentang RKPD 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	1.845.776	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	7.076,500	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kulon Progo	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	2 Dokumen	16.875	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kulon Progo	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	10 Dokumen	17.000	
3	Penyusunan Dokumen	Kulon Progo	Jumlah dokumen		8.638	Penyusunan Dokumen	Kulon Progo	Jumlah dokumen			

	Perencanaan Perangkat Kulon Progo Daerah		perencanaan perangkat daerah			Perencanaan Perangkat Kulon Progo Daerah		perencanaan perangkat daerah			
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kulon Progo	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	21 Laporan	8.236	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kulon Progo	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	84 Laporan	11.250	
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kulon Progo		3 Dokumen	1.520.409	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kulon Progo				
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kulon Progo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 Orang/bulan	1.481.384	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kulon Progo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	80 orang/bulan	605.137.840	
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kulon Progo	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	29.600	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kulon Progo	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48 Dokumen	162.000	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kulon Progo	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi	14 Laporan	9.424	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kulon Progo	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan	56 Laporan	7.250	

			penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD					keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD			
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	2 Dokumen	40.087	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Administrasi Umum			
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kulon Progo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (4) Paket		12.845	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kulon Progo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (4) Paket	16 Paket	1.349.000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	27.242	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	59.800	
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kulon Progo	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	2 Dokumen	98.789	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kulon Progo	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	2 Dokumen	98.789	

13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12.845	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12.845	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediaka	12 Laporan	27.242	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediaka	12 Laporan	27.242	
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kulon Progo	Laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	44.762	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kulon Progo	Laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	44.762	
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kulon Progo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	44.762	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kulon Progo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	44.762	
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang	2 Dokumen	98.789	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang	2 Dokumen	98.789	

			Urusan Pemerintahan Daerah					Urusan Pemerintahan Daerah			
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.994	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.994	
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69.794	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kulon Progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69.794	
20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	124.852	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	124.852	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kulon Progo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	96.923	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kulon Progo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	96.923	

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
22	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit ,	27.929	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kulon Progo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit ,	27.929	
23	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kulon Progo	Persentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	90 %	973.042	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kulon Progo	Persentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	90 %	973.042	
24	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 Dokumen	973.042	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 Dokumen	973.042	

25	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kulon Progo	umlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	154.026	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kulon Progo	umlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	154.026	
26	Pembentukan Paskibraka	Kulon Progo	Jumlah Paskibraka	48 Orang	819.016	Pembentukan Paskibraka	Kulon Progo	Jumlah Paskibraka	48 Orang	819.016	
27	Program peningkatan Peran partai politik Dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan Pengembangan etika	Kulon Progo	Persentase siswa yang menggunakan hak pilih dalam Pemilos	60 %	1.244.795	Program peningkatan Peran partai politik Dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan Pengembangan etika	Kulon Progo	Persentase siswa yang menggunakan hak pilih dalam Pemilos	60 %	1.244.795	

	Serta budaya politik					Serta budaya politik					
28	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2 Dokumen	1.244.795	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2 Dokumen	1.244.795	
29	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan	Kulon Progo	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di	300 Orang	1.083.817	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan	Kulon Progo	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di	300 Orang	1.083.817	

	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
30	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Kulon Progo	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Kegiatan	1.083.817	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Kulon Progo	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	300 Orang	1.083.817	
31	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi	Kulon Progo	Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyaratan	1 Kegiatan	160.978	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi	Kulon Progo	Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyaratan	1 Kegiatan	160.978	

	Kemasyarakatan					Kemasyarakatan					
32	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	84.56 %	124.991	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	84.56 %	124.991	
33	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	1 Dokumen	124.991	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	1 Dokumen	124.991	

			Ormas Asing di Daerah					Ormas Asing di Daerah			
34	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	124.991	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kulon Progo	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	124.991	
35	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kulon Progo	Persentase hasil penetapan kalurahan bersinar yang ditindaklanjuti	34.78 %	134.101	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kulon Progo	Persentase hasil penetapan kalurahan bersinar yang ditindaklanjuti	34.78 %	134.101	
36	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis	1 Dokumen	134.101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	1 Dokumen	134.101	

	Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
37	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kulon Progo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	134.101	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kulon Progo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	134.101	
38	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan	Kulon Progo	Persentase laporan penanganan konflik sosial	100 %	333.328	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan	Kulon Progo	Persentase laporan penanganan konflik sosial	100 %	333.328	

	Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					
39	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3 Dokumen	333.328	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kulon Progo	Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3 Dokumen	333.328	
40	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Kulon Progo	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	20 Orang	128.850	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Kulon Progo	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	20 Orang	128.850	

	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
41	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kulon Progo	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	20 Orang	99.075	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kulon Progo	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	20 Orang 99.075.400,00	99.075	

			Penanganan Konflik di Daerah					Penanganan Konflik di Daerah			
42	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	105.403	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	105.403	

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1	1055399	23-01-2025	Nasib Wardoyo S.Pd	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila wawasan bela Negara bagi Kader Posyandu (PRIORITAS 20)	Karangwuni, Wates, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila wawasan bela Negara bagi Kader Posyandu (PRIORITAS 20)Nasib Wardoyo, S,Pd.	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	50	Orang	-	-	-
1774	1055416	23-01-2025	Nasib Wardoyo S.Pd	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila wawasan bela Negara bagi Kader Posyandu	Garongan, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila wawasan bela Negara bagi Kader Posyandu Garongan, Panjatan	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	50	Orang	-	-	-
1784	1055528	23-01-2025	TITIK WIJAYANTI, SE	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Bojong, Panjatan (PRIORITAS 16)	Bojong, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	PRIORITAS 16. Titik wijayanti, SE. Sosialisasi Ideologi Pancasila	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1785	1055536	23-01-2025	TITIK WIJAYANTI, SE	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Tayuban, Panjatan (PRIORITAS 17)	Tayuban, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	PRIORITAS 17. Titik Wijayanti, SE. Sosialisasi Ideologi Pancasila	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-
1786	1055541	23-01-2025	TITIK WIJAYANTI, SE	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Depok, Panjatan (PRIORITAS 18)	Depok, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	PRIORITAS 18. Titik Wijayanti, SE. Sosialisasi Ideologi Pancasila	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-
1787	1055545	23-01-2025	TITIK WIJAYANTI, SE	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Pleret, Panjatan (PRIORITAS 19)	Pleret, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	PRIORITAS 19. Titik Wijayanti, SE. Sosialisasi Ideologi Pancasila	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-
1788	1055567	23-01-2025	TITIK WIJAYANTI, SE	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Krembangan, Panjatan (PRIORITAS 20)	Krembangan, Panjatan , Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	PRIORITAS 20. Titik Wijayanti, SE. Sosialisasi Ideologi Pancasila	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1789	1055568	23-01-2025	BUDI HUTOMO PUTRO, SS	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Program sosialisasi peningkatan Perempuan dalam peran Politik	Kapanewon Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Program sosialisasi peningkatan Perempuan dalam peran Politik Kapanewon Samigaluh	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	2	Paket	-	-	-
1790	1055570	23-01-2025	TITIK WIJAYANTI, SE	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Kanoman, Panjatan	Kanoman, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Titik Wijayanti, SE. Sosialisasi Ideologi Pancasila	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-
1791	1055572	23-01-2025	TITIK WIJAYANTI, SE	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Bugel, Panjatan	Bugel, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Titik Wijayanti, SE. Sosialisasi Ideologi Pancasila	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-
1792	1055577	23-01-2025	TITIK WIJAYANTI, SE	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Garongan, Panjatan	Garongan, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Titik Wijayanti, SE. Sosialisasi Ideologi Pancasila	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1793	1055578	23-01-2025	BUDI HUTOMO PUTRO, SS	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda	Karang Taruna WIRABAKTI, Sidoharjo, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda Karang Taruna WIRABAKTI, Sidoharjo	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	100	Orang	-	-	-
1794	1055589	23-01-2025	BUDI HUTOMO PUTRO, SS	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda	Kapanewon Kalibawang, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda Kapanewon Kalibawang	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	50	Orang	-	-	-
1795	1055592	23-01-2025	Sutrisno	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Hargomulyo Kokap 70 orang (PRIORITAS 18)	Hargomulyo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	PRIORITAS 18. Sutrisno. Sosialisasi Ideologi Pancasila	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-
1796	1055598	23-01-2025	BUDI HUTOMO PUTRO, SS	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Program sosialisasi peningkatan Perempuan dalam peran Politik	Kapanewon Kalibawang, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Program sosialisasi peningkatan Perempuan dalam peran Politik Kapanewon Kalibawang	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	2	Paket	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1797	1055607	23-01-2025	BUDI HUTOMO PUTRO, SS	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda	Kapanewon Girimulyo, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda Kapanewon Girimulyo	Untuk Dilakukan Verifikasi Lebih Lanjut	-	-	50	Orang	-	-	-
1798	1055609	23-01-2025	BUDI HUTOMO PUTRO, SS	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Program sosialisasi peningkatan Perempuan dalam peran Politik	Kapanewon Girimulyo, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	BadanKesbangpol	BadanKesbangpol	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Program sosialisasi peningkatan Perempuan dalam peran Politik Kapanewon Girimulyo	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	2	Paket	-	-	-
1799	1055624	23-01-2025	Sutrisno	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kalurahan Hargomulyo Kokap 70 orang (PRIORITAS 16)	Hargomulyo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	PRIORITAS 16. Sutrisno. Sosialisasi Ideologi Pancasila	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-
1800	1055631	23-01-2025	Sutrisno	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kalurahan Kedungsari Pengasih 70 orang (PRIORITAS 17)	Kedungsari Pengasih , Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	PRIORITAS 17. Sutrisno. Sosialisasi Ideologi Pancasila	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-
1801	1055642	23-01-2025	Sutrisno	Sosialisasi Ideologi	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan	Donomulyo, Nanggulan, Kab.	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bang	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	1	Paket	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
				Pancasila	Bela Negara untuk Kalurahan Donomulyo, Nanggulan 70 orang	Kulon Progo		sa dan Politik												
1802	1055654	23-01-2025	Sutrisno	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Sukoreno, Sentolo 70 orang	Sukoreno, Sentolo, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	1	Paket	-	-	-
1803	1055661	23-01-2025	Sutrisno	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kalurahan Sukoreno, Sentolo 70 orang	Sukoreno, Sentolo, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	1	Paket	-	-	-
1804	1055676	23-01-2025	Sutrisno	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kalurahan Donomulyo Nanggulan 70 orang	Donomulyo, Nanggulan., Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	1	Paket	-	-	-
1821	1056005	23-01-2025	Kartono	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan	Donomulyo, Nanggulan, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan	Badan Kesatuan Bangsa dan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Kartono. Sosialisasi Ideologi Pancasila	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan	-	-	1	Paket	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
					Donomulyo, Nanggulan 70 orang			Politik	Politik				waktu pelaksanaannya							
1823	1056011	23-01-2025	Kartono	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Sukoreno, Sentolo 70 orang	Sukoreno, Sentolo, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Kartono. Sosialisasi Ideologi Pancasila	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-
1824	1056021	23-01-2025	Kartono	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kalurahan Sukoreno, Sentolo 70 orang	Sukoreno, Sentolo, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Kartono. Sosialisasi Ideologi Pancasila	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-
1826	1056032	23-01-2025	Kartono	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kalurahan Donomulyo Nanggulan 70 orang	Donomulyo, Nanggulan ., Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Kartono. Sosialisasi Ideologi Pancasila	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1889	1056550	23-01-2025	QOIS REIZA FAHMI	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 5 titik di wilayah Kalurahan Bumirejo dan Kalurahan Wahyuharjo (PRIORITAS 13)	Bumirejo dan Wahyuharjo, Lendah, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	PRIORITAS 13. Qois Reiza Fahmi. Sosialisasi Ideologi Pancasila	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	5	titik	-	-	-
1983	1057088	23-01-2025	Dewi Nugraheni, ST	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Adanya sosialisasi pendidikan karakter untuk para remaja	Semak, Banjarasri, Kalibawang, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Adanya sosialisasi pendidikan karakter untuk para remaja Semak, Banjarasri, Kalibawang	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	paket	-	-	-
2068	1059456	24-01-2025	Suryanto	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Ideologi Pancasila & Wawasan kebangsaan (Kesbangpol) Kalurahan Tirtorahayu, Kecamatan Galur	Kalurahan Tirtorahayu, Kecamatan Galur, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Ideologi Pancasila & Wawasan kebangsaan (Kesbangpol) Kalurahan Tirtorahayu, Kecamatan Galur	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	paket	-	-	-
2091	1059684	24-01-2025	Jeni Widiyatmoko	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi di Tangkisan 1, Hargomulyo,	Tangkisan 1, Hargomulyo, Kokap, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi di Tangkisan 1, Hargomulyo, , Kokap	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	paket	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
2092	1059692	24-01-2025	Jeni Widiyatmoko	Sosialisasi Narkoba	Sosialisasi terkait Narkoba untuk masyarakat Karangasem, Sidomulyo	Karangasem, Sidomulyo, Pengasih, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi terkait Narkoba untuk masyarakat Karangasem, Sidomulyo Pengasih	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	paket	-	-	-
2105	1060273	24-01-2025	Agung Raharjo	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Ideologi Pancasila & Wawasan kebangsaan (Kesbangpol) Kalurahan Banguncipto, Kecamatan Sentolo (Prioritas 24)	Kalurahan Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Ideologi Pancasila & Wawasan kebangsaan (Kesbangpol) Kalurahan Banguncipto, Kecamatan Sentolo (Prioritas 24), Agung Raharjo,ST	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	paket	-	-	-
2106	1060282	24-01-2025	Agung Raharjo	Sosialisasi Narkoba	Sosialisasi Narkoba (Kesbangpol) Kalurahan Donomulyo, Kecamatan Nanggulan (Prioritas 25)	Kalurahan Donomulyo, Kecamatan Nanggulan , Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Narkoba (Kesbangpol) Kalurahan Donomulyo, Kecamatan Nanggulan (Prioritas 25), Agung Raharjo,ST	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	paket	-	-	-
3112	1077622	30-01-2025	SUHARTO	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan	Jatimulyo, Girimulyo, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan	Badan Kesatuan Bangsa dan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan	-	-	1	Paket	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
					Jatimulyo, Girimulyo			Politik	Politik			Jatimulyo, Girimulyo	waktu pelaksanaannya							
3113	1077624	30-01-2025	SUHARTO	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Giripurwo, Girimulyo	Giripurwo, Girimulyo, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Giripurwo, Girimulyo	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-
3114	1077627	30-01-2025	SUHARTO	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Banjararum, Kalibawang (PRIORITAS 18)	Banjararum, Kalibawang, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Banjararum, Kalibawang (PRIORITAS 18) Suharto	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-
3115	1077635	30-01-2025	SUHARTO	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Banjarharjo, Kalibawang	Banjarharjo, Kalibawang, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Banjarharjo, Kalibawang	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
3116	1077638	30-01-2025	SUHARTO	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Ngargosari, Samigaluh (PRIORITAS 19)	Ngargosari, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Ngargosari, Samigaluh (PRIORITAS 19) Suharto	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-
3117	1077640	30-01-2025	SUHARTO	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Banjarsari, Kalibawang	Banjarsari, Kalibawang, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Banjarsari, Kalibawang	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-
3118	1077647	30-01-2025	SUHARTO	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Gerbosari, Samigaluh (PRIORITAS 20)	Gerbosari, Samigaluh, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Kalurahan Gerbosari, Samigaluh (PRIORITAS 20) Suharto	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	Paket	-	-	-
3196	1079889	30-01-2025	Wisnu Prastya	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara	Sabrang, Giripurwo, Girimulyo, , Kab.	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan	Badan Kesatuan Bangsa dan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara Sabrang,	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan	-	-	1	paket	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
						Kulon Progo		Politik	Politik			Giripurwo, Girimulyo,	waktu pelaksanaannya							
3197	1079893	30-01-2025	Wisnu Prastya	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara	Wadas, Giripurwo, Girimulyo, , Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara Wadas, Giripurwo, Girimulyo,	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	paket	-	-	-
3198	1079901	30-01-2025	Wisnu Prastya	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara	Kepundung, Giripurwo, Girimulyo , Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara Kepundung, Giripurwo, Girimulyo	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	paket	-	-	-
3200	1079906	30-01-2025	Wisnu Prastya	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara	Banjaran, giripurwo, Girimulyo , Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara Banjaran, giripurwo, Girimulyo	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	paket	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
3201	1079913	30-01-2025	Wisnu Prastya	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara	Grigak, Girimulyo, Giripurwo, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Wawasan kebangsaan dan Bela Negara Grigak, Girimulyo, Giripurwo	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	paket	-	-	-
3547	1087105	31-01-2025	ARIS SYARIF UDDIN	Sosialisasi Ideologi Pancasila	Wawasan Kebangsaan	Bendungan, Wates, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Ideologi Pancasila Wawasan Kebangsaan Bendungan, Wates	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	paket	-	-	-
3548	1087108	31-01-2025	ARIS SYARIF UDDIN	Sosialisasi Ideologi Pancasila	san kebangsaan	Triharjo, Wates, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Ideologi Pancasila / wawasan kebangsaan Triharjo, Wates	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	paket	-	-	-
3549	1087112	31-01-2025	ARIS SYARIF UDDIN	Sosialisasi Ideologi Pancasila	wawasan kebangsaan	kulwaru, Wates, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi wawasan kebangsaan kulwaru, Wates	Untuk Dilakukan Verifikasi Lebih Lanjut	-	-	1	paket	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
3550	1087128	31-01-2025	ARIS SYARIF UDDIN	Sosialisasi Ideologi Pancasila	wawasan kebangsaan	Sogan, Wates, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi wawasan kebangsaan Sogan, Wates	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	paket	-	-	-
3551	1087133	31-01-2025	ARIS SYARIF UDDIN	Sosialisasi Ideologi Pancasila	wawasan kebangsaan	Bojong, Panjatan, Kab. Kulon Progo	Kabupaten / Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sosialisasi wawasan kebangsaan Bojong, Panjatan	OPD agar melakukan verifikasi dan klarifikasi kelompok sasaran, serta memperhatikan waktu pelaksanaannya	-	-	1	paket	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yakni membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, selaras dengan prioritas nasional yang termuat Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khusunya asta cita pertama, yakni memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), asta cita ketujuh yang berbunyi memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba serta asta cita kedelapan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
b. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif

Sasaran

a. Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah
b. Meningkatnya penyelesaian konflik sosial

Adapun tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target tersajipada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Periode Renstra 2025 – 2029

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
1	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	--	Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	Nilai	7,42
2.		--	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	A (85,3)
			Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Nilai	3,231
		Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	Persentase penyelesaian konflik sosial	%	100
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP perngkat Daerah	Predikat	A (>80-90)
		Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP perangkat daerah	Level	2,0-3,0

3.3 Program dan Kegiatan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2026
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	%	90,00
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase siswa yang menggunakan hak pilih dalam pemilos	%	65,00
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	84,56
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase hasil penetapan kalurahan bersinar yang ditidaklanjuti	%	34,78
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial	Persentase laporan penangan konflik sosial	%	100
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	%	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Umum , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi urusan pemerintahan umum dengan tugas pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Serta sesuai dengan visi Kabupaten Kulon Progo Kulon Progo Tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kulon Progo Yang Makmur Mandiri, Religius, Berbudaya Yang Berkelanjutan “, juga yang sudah diselaraskan dengan misi Kabupaten Kulon Progo Kulon Progo , khususnya misi ketiga, “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Good Governance, Aspiratif, serta Mewujudkan Masyrakat Yang Aman, dan Demokratis”.

Dari beberapa hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun program dan kegiatan serta sub kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**4.656.036.000,00**							**4.879.119.348,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.845.776.304,00**							**1.928.627.123,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**1.845.776.304,00**							**1.928.627.123,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase sub kegiatan pada Perangkat Daerah berkinerja sangat tinggi***	-			**100 %**	**1.845.776.304,00**						-	**1.928.627.123,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	16.875.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	15.675.135,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			0				0 0	8.638.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		7.026.495,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	8.236.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		8.648.640,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	1.520.409.028,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	1.590.924.434,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.481.384.128,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.555.453.334,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	29.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		31.080.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	9.424.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		4.391.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*	-			2 Dokumen	40.087.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	42.890.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			0				0 0	12.845.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		11.955.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	27.242.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		30.935.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 Dokumen	44.762.620,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	47.252.646,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	44.762.620,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		47.252.646,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			2 Dokumen	98.789.556,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	103.729.033,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			0				0 0	28.994.676,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		30.444.409,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	69.794.880,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		73.284.624,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			2 Dokumen	124.852.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	128.155.475,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	96.923.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		99.467.025,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	27.929.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		28.688.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**2.810.259.696,00**							**2.950.492.225,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**2.810.259.696,00**							**2.950.492.225,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Persentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan***	-			**90 %**	**973.042.200,00**						-	**1.021.694.310,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	-			2 Dokumen	973.042.200,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	1.021.694.310,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	154.026.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		155.503.110,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				48 Orang	819.016.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		866.191.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Persentase siswa yang menggunakan hak pilih dalam Pemilos***	-			**60 %**	**1.244.795.896,00**						-	**1.306.755.235,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*	-			2 Dokumen	1.244.795.896,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	1.306.755.236,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				300 Orang	1.083.817.196,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		1.138.008.055,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka														
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka				1 Kegiatan	160.976.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		168.747.180,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	-			**84,56 %**	**124.991.700,00**						-	**131.241.285,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	-			1 Dokumen	124.991.700,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	131.241.285,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2 Laporan	124.991.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		131.241.285,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Persentase hasil penetapan kalurahan bersinar yang ditindaklanjuti***	-			**34.78 %**	**134.101.100,00**						-	**140.806.155,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*	-			1 Dokumen	134.101.100,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	140.806.155,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	134.101.100,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		140.806.155,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase laporan penanganan konflik sosial***	-			**100 %**	**333.328.800,00**						-	**349.995.240,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	-			3 Dokumen	333.328.800,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	349.995.240,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				20 Orang	128.850.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		135.292.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				20 Orang	99.075.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		104.029.170,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	105.403.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		110.673.570,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai program dan sasaran pembangunan daerah.

Proses mekanisme penyusunan Rencana Kerja ini melalui tahap-tahap yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya dokumen ini digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan tolok ukur Renja, maka seluruh aktivitas harus dapat diukur. Pengukuran tersebut tidak hanya pada input, namun pada keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari manfaat suatu program dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya suatu program .

Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Kulon Progo, 29 Juli 2025
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BUDI HARTONO, S.Si., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196903181996031003

Wates, 29 Juli 2025

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN